Pemerintah Daerah
Kabupaten Wajo

RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi Daerah dengan masa jabatan Bupati yang berakhir pada Tahun 2024.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. penutup.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksanaan program pembangunan dari RPD Tahun 2025-2026.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 8 Juli 2024,
Pj. BUPATI WAJO,

ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 8 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 36

TELAH DITELITI:

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum ..... I - 5
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 8
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... I - 13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1

2.1 Gambaran Umum Wilayah ..... II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 9
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II – 49
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II – 294
2.2 Capaian Indikator Pembangunan Daerah ..... II – 300
2.3 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD..... II – 383
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II – 445
2.5 Inovasi Daerah..... II - 470

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III - 1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III – 20

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV - 1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV - 2
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV – 8
4.3 Keselarasan Dan Konsistensi Perencanaan Pembanguanan Tahun 2025..... IV – 21
4.2 Pokok-Pokok Pikiran ..... IV - 46

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V – 1

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025..... V - 2

5.1.1 Sinkronisasi Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Wajo Terhadap Prioritas dan Program Prioritas Nasional Tahun 2022 ..... V - 4
5.1.2 Sinkronisasi Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Wajo Terhadap Prioritas dan Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... V - 4
5.1.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Wajo Tahun 2025 ..... V - 5

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH ..... VI – 1

6.1 Indikator Makro Pembangunan ..... VI – 1

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... VI - 2

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... VI – 7

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal ..... VI – 22

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ..... VI - 24

BAB VII PENUTUP ..... VII – 1

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai daerah. Sedangkan ujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Rencana pembangunan pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses pembangunan daerah, hendaknya mempertimbangkan upaya optimalisasi sumber-sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangun. Olehnya itu, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu disusun rencana pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, program prioritas nasional dalam RKP. Hal ini mengacu pada Pasal 75 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pentahapan penyusunan dokumen RKPD meliputi :

(1). Penyusunan rancangan awal RKPD;
(2) Rancangan RKPD;
(3). Rancangan Akhir RKPD;
(4). Penetapan RKPD.

Dan pada penyusunannya, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 menggunakan pendekatan yang terdiri dari :

(1). Pendekatan Politik;

Pendekatan politik yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Pendekatan perencanaan tersebut ditunjukan dengan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo.

(2). Pendekatan Teknokratik;

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Pendekatan Partisipatif;

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan, keterwakilan, kelompok masyarakat rentan termarginalkan, transparansi dan akuntabilitas, serta rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus pada semua tahapan penting pengambilan keputusan.

(4). Pendekatan Bottom Up;

Pendekatan Bottom Up merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Dilaksanakan sejak Bulan Februari Tahun 2019, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada bulan Maret 2019.

(5). Pendekatan Top Down.

Pedekatan Top Down dapat diimplementasikan dalam bentuk dedikated program yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pada Tahun 2024 ini, selain kelima pendekatan tersebut di atas, dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Wajo telah menggunakan pendekatan holistik, integratif, spasial dan tematik. Kesemuanya itu dituangkan

dalam model penganggaran berbasis money follow program. Pun memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan moitoring dan evaluasi, yaitu Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Pinjaman Daerah, CSR, dan Obligasi Daerah. Kondisi ini disatukan agar program prioritas dapat tercapai secara optimal dan segera dilakukan percepatan yang terintegrasi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupatenn Wajo Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

(1). Penyusunan rancangan RKPD;

Penyusunan rancangan RKPD berpedoman pada RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 – 2026 yang disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo di bulan Februari 2024 yang memuat pendahuluan, evaluasi kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program prioritas daerah.

Rancangan RKPD dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Wajo kepada pada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

(2) Rancangan RKPD;

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo. Verifikasi dimaksud untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD.

Dalam tahapan penyusunan rancangan RKPD juga memperhatikan hasil Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Wajo.

(3). Rancangan Akhir RKPD;

Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Wajo dilakukan berdasarkan berita acara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam Musrenbang Kabupaten Wajo selanjutnya dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada Desk Musrenbang. Pembahasan

dimaksud untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPD provinsi untuk kabupaten/kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD.

(4). Penetapan RKPD.

Penetapan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 pada Pasal 5 ayat (2) bahwa Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lambat pada Bulan Juni Tahun 2024. Penetapan melaui Perbup ini dilaksanakan setelah RKP dan RKPD Provinsi ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah. Kemudian RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Wajo untuk dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Wajo sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2025.

Program prioritas RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna memastikan APBD yang telah disusun berlandaskan pada RKPD.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2024 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka mendukung kebijakan keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2) ;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

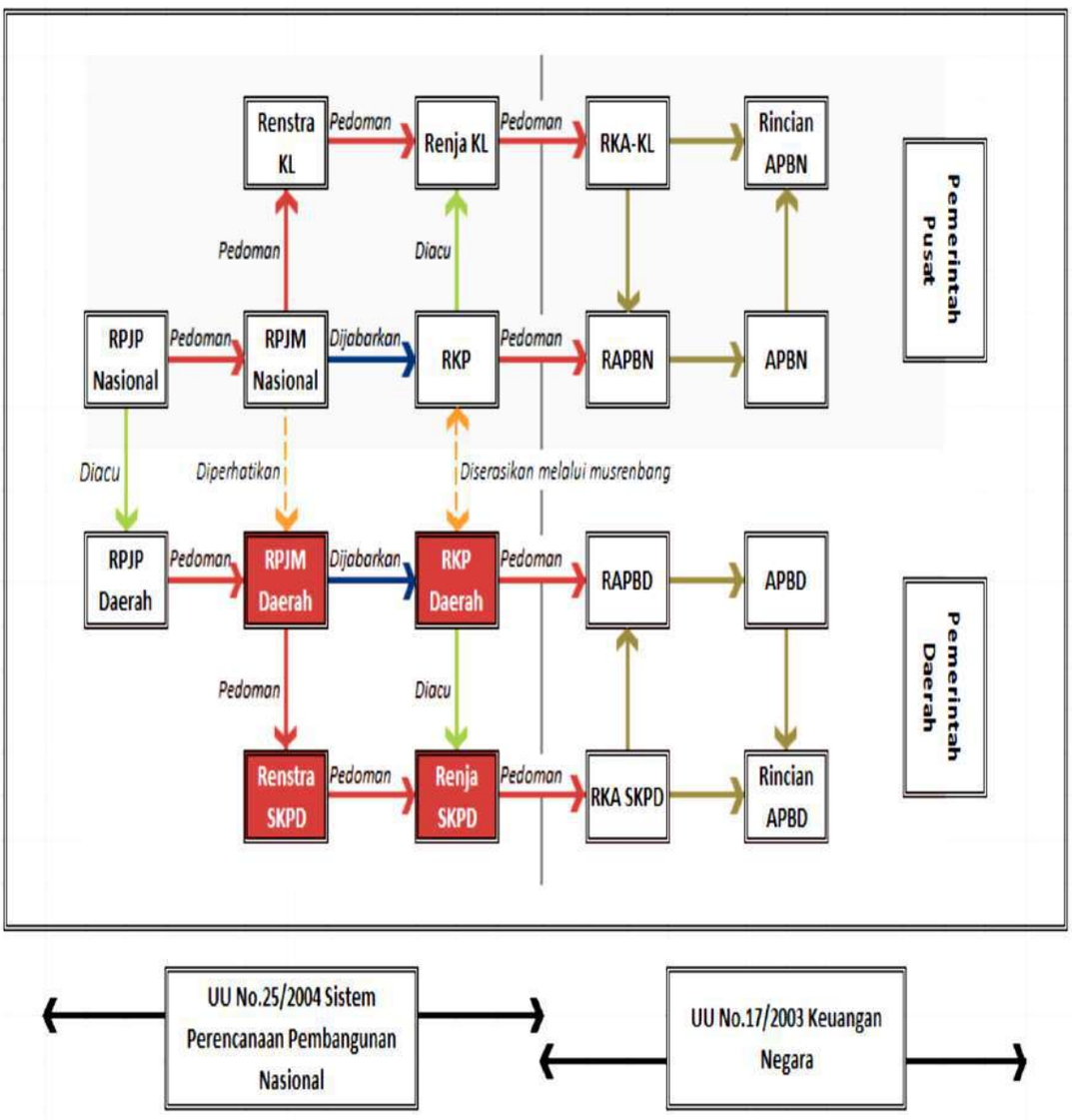
RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam hubungan antar dokumen, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan keuangan daerah. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alur perencanaan berikut ini.

Gambar 1. 1
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, Diolah

Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1. RPD 2025 – 2026 Kabupaten Wajo dengan RKPD Kabupaten Wajo

RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 - 2026 yang memuat :

a) rancangan kerangka ekonomi daerah;

b) prioritas pembangunan daerah; dan

c) rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Hubungan antara RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dengan RKPD Kabupaten Wajo, dimana dalam RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 khusus pada Bab VIII Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2025 dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025, yang tentunya akan sama dengan program prioritas Perangkat Daerah pada Renja Perangkat Daerah pada tahun 2025. Rancangan RKPD Kabupaten Wajo disusun berpedoman pada Perubahan RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2009-2025, RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, serta mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029.

1.3.2. RKP dengan RKPD Kabupaten Wajo

Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, dimana keselarasan itu termuat antar tema RKP dan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, sinergitas perencanaan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menjamin tercapainya sasaran prioritas bidang pembangunan nasional yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimenasi pemerataan dan kewilayahan, dan arah kebijakan pembangunan nasional untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial serta arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan RKPD perlu dilakukan secara lebih rinci dengan penekanan pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

1.3.3. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan RKPD Kabupaten Wajo

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025. Pedoman dimaksud berupa keselarasan dan keterkaitan antar tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dengan tema RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025, sinergitas sasaran prioritas bidang pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang termuat dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2025 dengan sasaran prioritas bidang pembangunan daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang meliputi sasaran makro ekonomi maupun sasaran urusan bidang.

1.3.4. Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD Kabupaten Wajo

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025, dimana Renstra Perangkat Daerah pada program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan rancangan renja Perangkat Daerah yang sinkron dengan rancangan akhir RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025. Penyajian Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.

1.3.5. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Kabupaten Wajo

RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 mengacu pada rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Renja Perangkat Daerah disusun setelah melakukan sinkronisasi usulan program dan kegiatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Setelah pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan maka dilakukan pembahasan Renja PD pada Forum PD dan melakukan penyesuaian rancangan Renja PD untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RKPD, setelah Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan dan Musrenbang Nasional maka dilakukan penyesuaian rancangan akhir RKPD dan selanjutnya penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah. RKPD yang telah dtetapkan menjadi dasar Bappelitbangda melakukan verifikasi rancangan Renja PD, rancangan Renja PD yang sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan kemudian disahkan oleh Kepala Daerah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Renja PD oleh kepala PD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan dasar untuk penyusunan rancangan KUA – PPAS Kabupaten Wajo Tahun 2025, untuk dibahas dan disepakati antara Bupati Wajo dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo yang dituangkan dalam nota kesepakatan. KUA – PPAS dipergunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan di PD lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah :

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota; dan
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegitan Tahun 2025;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasa;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Wajo.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah menentukan sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini memuat Latar Belakang Penyusunan RKPD, Proses Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; Memuat Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indicator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan Daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah daerah, prioritas pembangunan daerah tahun 2025, dan kebijakan dan strategi pengembangan kewilayahan Kabupaten Wajo.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Memuat rincian program dan kegiatan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025, Perangkat Daerah pelaksana / penanggungjawab, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; Memuat

indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Kinerja Tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP; Memuat hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 sebagai bagian penegasan pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Demografi dan Aspek Geografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Wajo

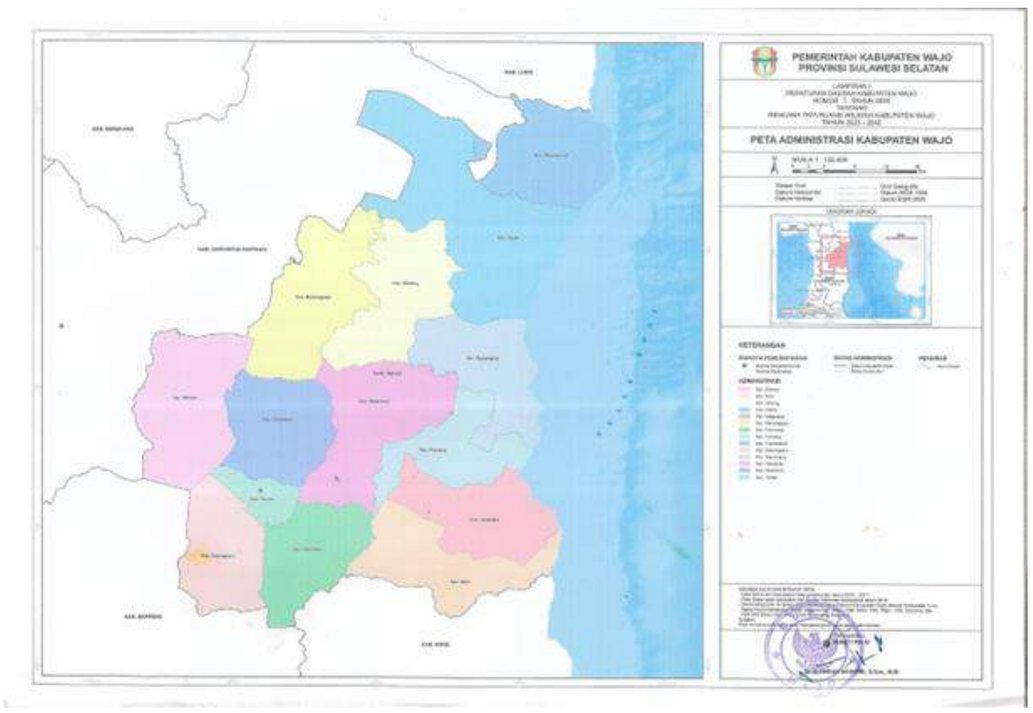
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Wajo memiliki wilayah seluas 2.506.19 km² atau 4.01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas wilayah administrasi Kabupaten Wajo sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
Sebelah Timur	:	Teluk Bone
Sebelah Barat	:	Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Secara administratif Kabupaten Wajo terdiri atas 14 wilayah kecamatan yang terdiri dari 190 desa/kelurahan meliputi 48 kelurahan dan 152 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Keera (368.36 Km² atau 147%) dan yang tersempit adalah Kecamatan Tempe (2827 Km² atau 153%) sedangkan kecamatam dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di Kecamatan Pitumpanua (27 desa/kelurahan) dan yang tersedikit adalah Kecamatan Maniangpajo (8 desa/kelurahan). Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo 2023-2024

Kemudian pembagian administrasi Kabupaten Wajo berdasarkan luas wilayah Kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 1
Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km2)	% Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	132.75	5.30	12	3	**15**
2	Tempe	38.27	1.53	0	16	**16**
3	Pammana	162.10	6.47	14	2	**16**
4	Bola	220.13	8.78	10	1	**11**
5	Takkalalla	179.76	7.17	11	2	**13**
6	Sajoanging	167.01	6.16	6	3	**9**
7	Penrang	154.9	6.18	9	1	**10**
8	Majauleng	225.92	9.01	14	4	**18**
9	Tanasitolo	154.60	6.17	15	4	**19**
10	Belawa	172.30	6.88	6	3	**9**
11	Maniangpajo	175.96	7.02	5	3	**8**

No	Kecamatan	Luas (km2)	% Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
12	Gilireng	147.00	5.87	8	1	**9**
13	Keera	368.36	14.70	9	1	**10**
14	Pitumpanua	207.13	8.26	23	4	**27**
Jumlah		**2.506,19**	**100**	**142**	**48**	**190**

Sumber : BPS. 2024 (Diolah)

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Wajo secara geografis terbentang mulai 3°39‘ - 4°16’ Lintang Selatan dan 119° 53’ - 120°27’ Bujur Timur. Apabila di lihat secara geostrategis regional Pulau Sulawesi maka Kabupaten Wajo yang berada pada bagian selatan merupakan daerah yang dilewati jalur transportasi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut dapat membawa dampak bagi eksistensi Kabupaten Wajo terhadap mobilitas baik barang/jasa maupun orang. Posisi Kabupaten Wajo dengan ibukotanya di Sengkang merupakan daerah transit dengan akses penghubung ke daerah-daerah lain yang berpusat pada wilayah strategis baik di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kota Pare-pare dan Kabupaten Toraja.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur selatan tengah dan barat. Danau Tempe terletak di bagian barat sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai.

Karakteristik dan kondisi wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan *“**Mangkalungu Ribulue MassulappE RipottanangngE Mattodang Ritasi Tappareng**”* yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yakni:

a. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke utara yang semakin bergunung utamanya di Kacamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah

pengembangan hutan tanaman industri perkebunan coklat cengkeh jambu mente serta peternakan;

b. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan / tegalan pada wilayah timur selatan tengah dan barat;

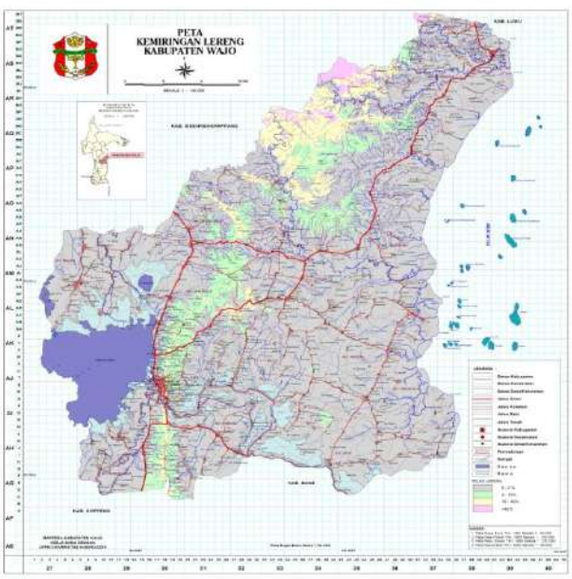
c. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah timur merupakan wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak;

Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Wajo cukup bervariasi mulai dari datar bergelombang hingga berbukit yang mana terdiri dari:

1. Sebagian besar bentuk wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0 – 2% luasnya mencapai 212.341 Ha atau sekitar 84%;
2. Lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan/ lereng 3 – 15% luas 21.116 Ha (843%);
3. Lahan yang berbukit dengan kemiringan/ lereng di atas 16 . 40% luas 13.752 Ha (550%); dan
4. Kemiringan lahan di atas 40% (bergunung) hanya memiliki luas 3.316 Ha (132%);

Sedangkan kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta kemiringan lahan sebagai berikut.

Gambar 2. 2
Peta Kemiringan Kabupaten Wajo



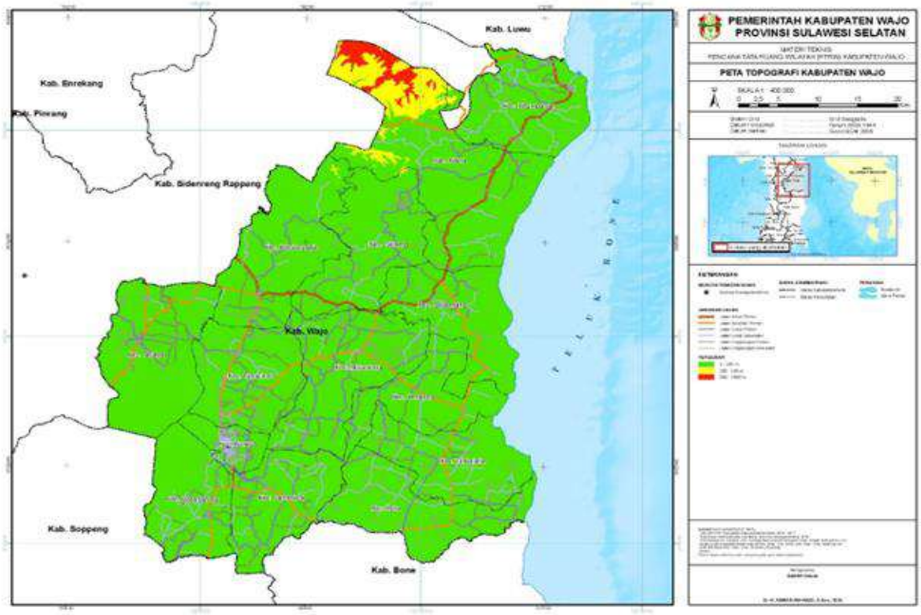
Sumber : RTRW Kabupaten Wajo 2023-2024

Secara morfologis Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut:

- 0 – 7 meter luas 57.263 Ha atau sekitar 2.285%;
- 8 – 25 meter luas 94.539 Ha atau sekitar 3.772%;
- 26 – 100 meter luas 87.419 Ha atau sekitar 3.490%;
- 101 – 500 meter luas 11.231 Ha atau sekitar 450% dan ;
- Ketinggian di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66%.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi ketinggian di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta ketinggian di Kabupaten Wajo sebagai berikut.

Gambar 2. 3
Peta Ketinggian Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo 2023-2024

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Berdasarkan informasi dari peta geologi Indonesia skala 1 : 100.000 Kabupaten Wajo mempunyai struktur batuan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan induk yaitu:

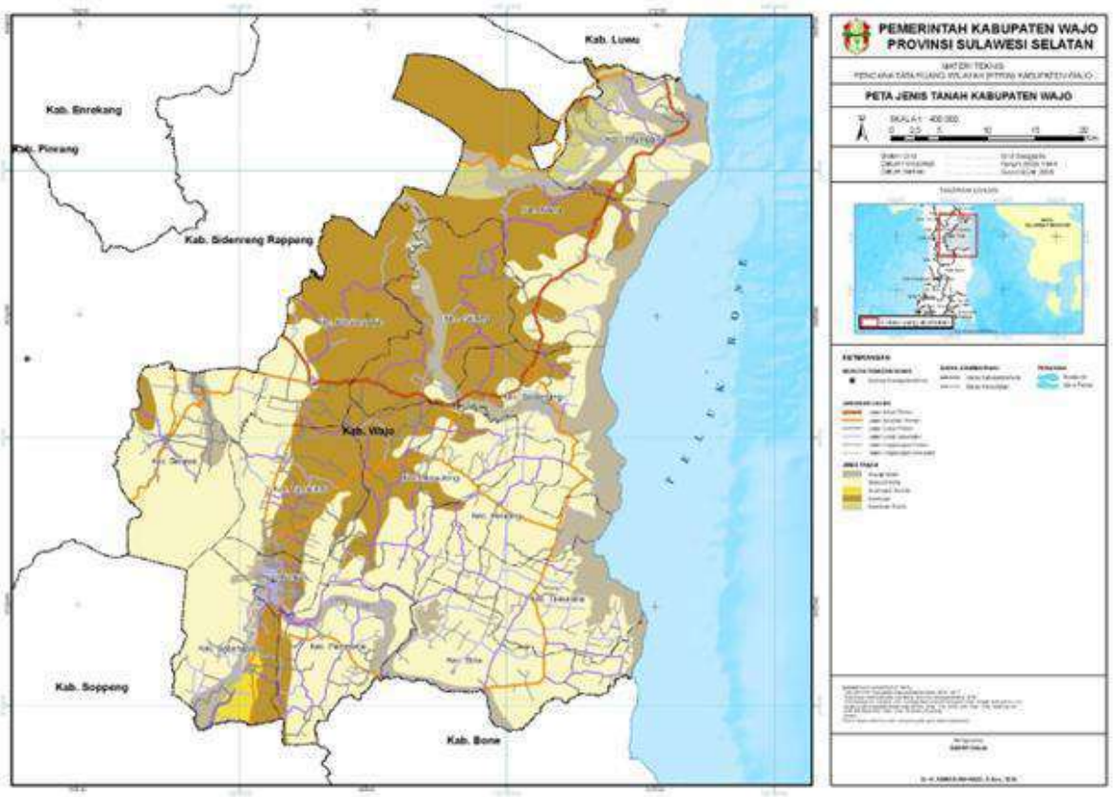
Daerah berstruktur batuan aliran lava tersusun basal hingga andesit breksi vulkanik dan batu pasir vulakanik. Struktur batuan ini terdapat pada bagian utara Kabupaten Wajo yang merupakan daerah aliran lava dari Gn. Rante Kambola yang berada di Kabupaten Tanatoraja dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah dengan berstruktur

batuan Napal dan batu Gamping terdapat di daerah bawah yang berstruktur batuan aliran lava atau tepatnya berada di Kecamatan Pitumpanua.

a. Daerah berstruktur batuan konglomerasi batu pasir glaukonit dengan serpih kaquina dan moluska yang memepunyai ketebalan 100 – 500 meter. Struktur tanah ini terdapat pada bagian tengah di Wilayah Kabupaten Wajo dan mempunyai luasan paling besar;
b. Daerah aluvial yang berasal selain dari hasil sedimentasi tersebar di sepanjang pantai yang berasal dari angkutan sedimen air sungai/danau;

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta jenis tanah di Kabupaten Wajo sebagai berikut.

Gambar 2. 4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo 2023-2024

Selanjutnya menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan jenis tanah di Kabupaten Wajo terdiri dari:

1. Alluvial : Jenis tanah ini tersebar di seluruh Kecamatan

2. Clay : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Pammana dan Takkalalla.
3. Podsolik : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Maniangpajo Tanasitolo Tempe Sajoanging Majauleng Belawa dan Pitumpanua.
4. Mediteran : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Tempe Tansitolo Maniangpajo Pammana dan Belawa.
5. Grumosol : Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sabbangparu dan Pammana.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Wajo memiliki potensi hidrologi yang meliputi daerah aliran sungai danau danau/rawa dan air tanah. Pada daerah irigasi di Kabupaten Wajo terdapat 3 (tiga) kewenangan/tanggung jawab pengelolaannya yaitu wewenang/tanggungjawab pusat dengan keluasan 9.641 terdiri dari 2 (dua) daerah irigasi di 2 (dua) desa dan 2 (dua) kecamatan; wewenang dan tanggungjawab Provinsi Sulawesi Selatan dengan keluasan 3.037 Terdiri dari 2 (dua) daerah irigasi di satu desa dan satu kecamatan; dan wewenang dan tanggungjawab Kabupaten Wajo dengan keluasan 17.504 terdiri dari 126 daerah irigasi di 126 (dua) desa/kelurahan tersebar di 14 kecamatan
Untuk lebih jelasnya mengenai daerah irigasi di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2
Daerah Irigasi Luas Rencana Menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Wajo

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana	Desa / Kelurahan	Kecamatan
1	**Wewenang / Tanggung Jawab Pusat**		**9756**		
	1	Awo	5324	Awo	Keera
	2	Kalola Kalosi	4317	Kalola	Maniangpajo
	Daerah Irigasi Air Tanah		115		
	1	Takkalalla Bola	115		
2	**Wewenang / Tanggung Jawab Provinsi**		**13025**		
	Daerah Irigasi		3037		
	1	Cilellang	732	Worongnge	Sabbangparu

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	2	Cenranae	2305	Worongnge	Sabbangparu
	Daerah Irigasi Rawa/Daerah Irigasi Tambak		9988		
	1	DI Rawa Pammana	2050		Pammana
	2	DIT Akkotengeng	1000	Akkotengeng	Sajoanging
	3	DIT Doping	1000	Doping	Sajoanging
	4	DIT Putumpanua	1380		Pitumpanua
	5	DIT Sajoanging	2175		Sajoanging
	6	DIT Takkalalla	2383		Takkalalla
3	**Wewenang / Tanggung Jawab Kabupaten**		**17504**		
	1	Abbanderange	500	Abbanderangnge	Pitumpanua
	2	Amesangeng I	200	Tosora	Majauleng
	3	Amesangeng II	300	Tosora	Majauleng
	4	Bakke	80	Walanga	Penrang
	5	Bulupatila	240	Patila	Pammana
	6	Labawang	113	Labawang	Keera
	7	Lakatenni	300	Wele	Belawa
	8	Pabbelle	308	Lepangeng	Belawa
	9	Salampi	200	Abbanderangnge	Pitumpanua
	10	Salo Mapejie	100	Awo	Pitumpanua
	11	Teppo Balanda	200	Lalliseng	Keera
	12	Ugi I / Manyili	300	Mallusesalo	Sabbangparu
	13	Uraiyang	108	Uraiyang	Majauleng
	14	Wajo Wajo	200	Tosora	Majauleng
	15	Aluppang	100	Aluppang	Takkalalla
	16	Ana Saloe	130	Gilireng	Gilireng
	17	Atapangnge	100	Rumpia	Majauleng
	18	Bali Elo	70	Bali Elo	Bola
	19	Barangmamase	50	Barangmamase	Sajoanging
	20	Botto Tanre	250	Botto Tanre	Majauleng

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	21	Botto Benteng	300	Botto Benteng	Majauleng
	22	Bulutekaci	260	Lamata	Gilireng
	23	Callaccu	30	Mattirowalie	Maniangpajo
	24	Cempalagi	70	Cempalagi	Tempe
	25	Cenranae	300	Abbanuangnge	Pammana
	26	Dori.Dori	30	Inalipue	Tanasitolo
	27	Geddongnge	275	Lagosi	Pammana
	28	Ire'E	50	Ire'E	Bola
	29	Jarakania	80	Tonralipue	Tanasitolo
	30	Kalidongnge	200	Macanang	Majauleng
	31	Karamae	100	Raddae	Penrang
	32	Labukkang	100	Uraiyang	Majauleng
	33	Labuangpatu	150	Mappadaelo	Tanasitolo
	34	Laceppung I	40	Inalipue	Tanasitolo
	35	Laceppung II	40	Inalipue	Tanasitolo
	36	Lakadaung	10	Dualimpoe	Maniangpajo
	37	Lamaggarang	60	Anabanua	Maniangpajo
	38	Lamalua	50	Tonralipue	Tanasitolo
	39	Lamara Awotarae	30	Kalola	Maniangpajo
	40	Lamate	200	Anabanua	Maniangpajo
	41	Manessi	50	Minangatellue	Maniangpajo
	42	Lapatoleng	500	Macanang	Majauleng
	43	Lapoloaju	40	Sogi	Maniangpajo
	44	Laputeng	100	Mamminasae	Gilireng
	45	Lare'E	200	Pammana	Pammana
	46	Larukkaeto	30	Belawa	Belawa
	47	Limpomajang Lompo Labawi	120	Limpomajang	Majauleng
	48	Masara	80	Abbanderangnge	Pitumpanua
	49	Lompo Labojo	400	Liu	Sabbangparu
	50	Lompo Towesse	500	Walennae	Sabbangparu

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	51	Macero	320	Macero	Belawa
	52	Malingmongeng	100	Lapaukke	Pammana
	53	Maminasae	200	Mamminasae	Gilireng
	54	Manri	200	Watang Rumpia	Majauleng
	55	Manurung	20	Manurung	Bola
	56	Maroanging	70	Macanang	Majauleng
	57	Maroanging	130	Cina	Pammana
	58	OngkoE	100	OngkoE	Belawa
	59	Palaguna	50	Lempa	Pammana
	60	Palolloi	350	Wele	Belawa
	61	Pangempangnge	160	Lamata	Gilireng
	62	Parigi	150	Parigi	Takkalalla
	63	Pasa.Pasa	70	Uraiyang	Majauleng
	64	Pasir Putih	60	Pasir Putih	Bola
	65	Patemma	500	Lapaukke	Pammana
	66	Peneki	100	Parigi	Takkalalla
	67	Salo Barue	100	Wage	Sabbangparu
	68	Salotengnga	50	Pallimae	Sabbangparu
	69	Sanreseng Ade	50	Sanreseng Ade	Bola
	70	Soppae	500	Ongkoe	Belawa
	71	Tancung	50	Tancung	Tanasitolo
	72	Teppo Batue	300	Tua	Majauleng
	73	Teppo Panasae	70	Uraiyang	Majauleng
	74	Teppo Waji	100	Macanang	Majauleng
	75	Tobatang	30	Tobatang	Pammana
	76	Tocule	250	Bola	Bola
	77	Ujung Tanah	200	Ujung Tanah	Bola
	78	Ujunge / Pajalele	350	Pajalele	Tanasitolo
	79	UkkeE	15	Dualimpoe	Maniangpajo
	80	Wecuddai	100	Wecuddai	Pammana
	81	Watangteppo	100	Wage	Sabbangparu

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	82	Batue	150	Cinnong Tabi	Majauleng
	83	Timpalaja	40	Uraiyang	Majauleng
	84	Mabbucu Ulu Tanre	50	Uraiyang	Majauleng
	85	Lamasewanua	200	Tajo	Majauleng
	86	Labulo.Bulo	200	Cinnong Tabi	Majauleng
	87	Ladusa	40	Tajo	Majauleng
	88	Latappareng	100	Limpomajang	Majauleng
	89	Cingki	100	Watang Rumpia	Maje
	90	Labette	60	Tadangpalie	Penrang
	91	Kading	200	Penrang	Penrang
	92	Lonrae	60	Penrang	Penrang
	93	Amasaloe	150	Temmabarang	Penrang
	94	Mualla	50	Assorajang	Sajoanging
	95	Pappolo Lekko	200	Akkotengeng	Sajoanging
	96	Bulu Mallopie	300	Sakkoli	Sajoanging
	97	Ciromanie	100	Ciromanie	Keera
	98	Toboko	50	Keera	Keera
	99	Salo Pandang	100	Simpellu	Pitumpanua
	100	Lacinde	125	Marannu	Pitumpanua
	101	Cekke	85	Marannu	Pitumpanua
	102	Lompo Loang	65	Lompo Loang	Pitumpanua
	103	Bunga Jenne	65	Lompo Loang	Pitumpanua
	104	Tobaralla	70	Tobbarakka	Pitumpanua
	105	Aggattungeng	40	Pallimae	Sabbangparu
	106	Teppo Batue	50	Teppo Batue	Pammana
	107	Ulu Galung	50	Lempa	Pammana
	108	Lawarengnge	50	Taddangpalie	Pammana
	109	Lapao	80	Ujung Tanah	Bola
	110	Lakaluku	50	Lempong	Bola
	111	Ceppaga	150	Ceppaga	Takkalalla
	112	Lagoari	80	Lagoari	Takkalalla

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	113	Lebongnge	40	Tancung	Tanasitolo
	114	Abbolongeng Katampue	40	Pincengpute	Tanasitolo
	115	Waroriaja	150	Wajoriaja	Tanasitolo
	116	Lajokka	30	Tonralipue	Tanasitolo
	117	Cirowalie	50	Waetuwo	Tanasitolo
	118	Teppoe	80	Tonralipue	Tanasitolo
	119	Salodua	40	Mattirowalie	Maniangpajo
	120	Ajutalie Appewalie	60	Mattirowalie	Maniangpajo
	121	Langkauttu	15	Mattirowalie	Maniangpajo
	122	Bulu Seppang	20	Abbanuangnge	Maniangpajo
	123	Makkalu	20	Dualimpoe	Maniangpajo
	124	Assorajang	60	Sogi	Maniangpajo
	125	Karamee Salotengnga	350	Ongkoe	Belawa
	126	OngkoE	350	OngkoE	Belawa

Sumber : BPS. 2024 (Diolah)

Sedangkan hidrologi ditinjau dari sungai danau dan rawa di Kabupaten Wajo terdapat 33 (tiga puluh tiga) sungai di mana yang terpanjang adalah Sungai Gilireng / Akkotenngeng sepanjang 77 Km dan terpendek adalah Sungai Laponggo sepanjang 2 Km dan 15 (lima belas) danau di mana yang terluas adalah Danau Tempe seluas 9342 Ha dan terkecil adalah Danau Dorie seluas 6 Ha. Untuk lebih jelas mengenai sungai danau/rawa di Kabupaten Wajo Tahun 2017 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1
Sungai Menurut Panjang Lebar dan Kedalaman di Kabupaten Wajo

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)
1	Siwa	20.5	70	0.85
2	Awo	43.5	85	0.65
3	Keera	27	65	0.6
4	Gilireng	61.5	40	0.35
5	Bila / Belawa	15	40	0.4
6	Cenranae	47	115	0.7
7	Walanae	28.5	95	0.55

Sumber : BPS. 2024 (Diolah)

Tabel 2. 2
Sungai Menurut Panjang Kecamatan dan Muara di Kabupaten Wajo

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Kecamatan	Muara
1	Walanae	28.5	Sabbangparu	Teluk Bone
2	Cenranae Menraleng – Wajo	74	Tempe Majauleng Pammana Bola	Teluk Bone
3	Cenranae / Labulang	13	Sajoanging	Teluk Bone
4	Bulete / Awo	52	Pitumpanua	Teluk Bone
5	Gilireng / Akkotengeng	77	Sajoanging Majauleng Takkalalla	Teluk Bone
6	Peneki	21	Takkalalla Penrang	Teluk Bone
7	Campi	5	Takkalalla Penrang	Teluk Bone
8	Doping	10	Penrang	Teluk Bone
9	Laliseng	16	Keera	Teluk Bone
10	Keera	27	Keera	Teluk Bone
11	Kulampu	18	Keera	Teluk Bone
12	Siwa	20.5	Pitumpanua	Teluk Bone
13	Buila / Kalola	17	Belawa. Tanasitolo	Teluk Bone
14	Laponggo	2	Gilireng	Teluk Bone
15	Batumanuk	6	Bola	Teluk Bone
16	Bila	17	Belawa. Tanasitolo	Danau Tempe
17	Belawa	11	Belawa	Danau Sidenreng
18	Belle	13	Belawa	Danau Sidenreng
19	Bonge	5	Sajoanging	Teluk Bone
20	Laponggo	6	Sajoanging	Teluk Bone
21	Cilelang	9.5	Sabbangparu	Danau Tempe
22	Lapotta		Majauleng	
23	Labette		Penrang	
24	Cellue		Bola Pammana Takkalalla	
25	Polla		Majauleng Sajoanging	
26	Salo Bakka		Sajoanging	
27	Ambo Dongi		Pammana	
28	Worongnge		Sabbangparu	
29	Kading		Penrang	
30	Lompo Lagau		Penrang	
31	Lompo Lajonga		Sabbangparu	
32	Mualla		Penrang	
33	Jangkali		Bola	

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Tabel 2. 3
Danau Tempe Menurut Kedalaman dan Luas
di Kabupaten Wajo

No	Nama Danau	Kedalaman (m)	Luas (Km²)
1	Danau Tempe	0 – 1	35.9
		1 – 2	35.42
		2 . 2.5	20.9
		> 2.5	1.2

Sumber : BPS. 2024 (Diolah)

Tabel 2. 4
Danau / Rawa Menurut Luas di Kabupaten Wajo

No	Nama Danau	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Danau Tempe	9342	Tempe Tanasitolo Sabbangparu Belawa
2	Danau Buaya	360	Takkalalla
3	Danau Lapongpakka	1960	Maniangpajo / Belawa
4	Danau Lampulung	1000	Tempe / Pammana
5	Danau Penrang Riawa	25	Tanasitolo
6	Danau Cenranae	24	Sajoanging
7	Danau Dorie	6	Takkalalla
8	Danau Lapapolo	37	Takkalalla
9	Danau / Rawa Sempangnge	343	Majauleng
10	Danau / Rawa Palisu	767	Bola
11	Danau / Rawa Baleng	620	Pammana
12	Danau / Rawa Bola	1920	Bola
13	Danau / Rawa Salo	890	Bola
14	Danau / Rawa Penrang	726	Penrang
15	Danau / Rawa Palaguna	420	Pammana
Jumlah		**18.543**	

Sumber : BPS. 2024 (Diolah)

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Wajo sebagaimana daerah lainnya di Indonesia beriklim tropis dengan suhu kurang lebih 27°C – 30°C. yang tandai dengan adanya bulan kering/musim hujan dan bulan basah/musim kemarau. Musim hujan setiap tahunnya berlangsung agak pendek yaitu rata.rata 3 bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni kecuali di bagian utara yaitu di Kecamatan Pitumpanua terdapat musim hujan mirip dengan Kabupaten Luwu serta bulan.bulan selanjutnya adalah lembab. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Antara bulan November sampai dengan Bulan Maret terdapat curah hujan yang cukup akibat pengaruh musim hujan di bagian selatan Sulawesi Selatan.

Curah hujan untuk 3 tahun terakhir mencapai rata.rata 1.510 mm dan 128 hari hujan.

Gambar 2. 5
Peta Klimatologi Kabupaten Wajo



Sumber : Bappelitbangda 2024

Tabel 2. 5
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Stasiun di Kabupaten Wajo Tahun 2023

Bulan	Ongkoe/Menge		Tingara Posi	
	Curah Hujan (mm²)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm²)	Hari Hujan
Januari	110	7	36	5
Pebruari	180	7	20	0
Maret	182	6	7	1
April	278	12	32	4
Mei	391	14	124	15
Juni	545	13	73	8
Juli	160	7	29	4
Agustus	15	1	0	0
September	62	3	0	0
Oktober	11	1	0	0
November	162	11	3	1
Desember	50	3	7	2

Sumber : BPS. 2024(Diolah)

2.1.1.6. Kondisi Penggunaan Lahan

Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya kawasan perlindungan setempat kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya kawasan rawan bencana alam kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

Penggunaan lahan di Kabupaten Wajo pada luas lahan kering meliputi Tegal/Kebun seluas 36.706 Ha Ladang/Huma seluas 12177 Ha Perkebunan seluas 29.413 Ha Tanah Tanaman Kayu.Kayuan Hutan Rakyat seluas 7226 Ha Pengembalaan/Padang Rumput selaus 10655 Ha Lahan Sementara Tidak Diusahakan seluas 7.780 Ha Lain.lain (Tambak Kolam Empang Hutan Negara) seluas 21401 Ha dan Lahan Bukan Pertanian seluas 24.517 Ha.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas lahan kering menurut penggunaan di Kabupaten Wajo tahun 2017 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6
Luas Lahan Kering Menurut Penggunaan Kabupaten Wajo

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Tegal / Kebun	36.706
2	Ladang / Huma	12.177
3	Perkebunan	29.413
4	Tanah Tanaman Kayu.Kayuan Hutan	7226
5	Penggembalaan / Padang Rumput	10.655
6	Lahan Sementara Tidak Diusahakan	7.780
7	Lainnya (Tambak Kolam Empang Hutan)	21401
8	Lahan Bukan Pertanian	24.517
Jumlah		**149.875**

Sumber : BPS. 2024 (Diolah)

Penyebaran permukiman di Kabupaten Wajo terpusat pada sepanjang pusat kabupaten (Kota Sengkang) pusat-pusat kecamatan dan sepanjang ruas jalan yang menghubungkan antar kawasan permukiman. Pola penyebaran permukiman cukup merata mengisi keseluruhan ruang di Kabupaten Wajo. Daerah sepanjang pesisir pantai kurang diminati untuk menjadi kawasan permukiman mengingat aksesibilitas yang terbatas serta kondisi topografi yang berawa.rawa, lahan persawahan yang ada tidak

seluruhnya menggunakan sistem irigasi teknis. Hanya 29018 Ha yang menggunakan sistem irigasi teknis yaitu Awo Bila Kalola Belawa dan Gilireng. Itupun untuk Gilireng baru pada tahap perencanaan. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah bahwa sebagian besar irigasi desa yang digunakan untuk pertanian lahan basah di Kabupaten Wajo dalam keadaan belum berfungsi secara optimal.

Diperkirakan telah terjadi alih fungsi lahan (selama ini tidak terdata) sehingga mengakibatkan semakin bertambahnya luas lahan bukan pertanian dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menyusun kebijakan agar alih fungsi lahan menjadi lebih terkendali antara lain dengan menetapkan lahan pertanian berkelanjutan dan mengarahkan penggunaan lahan berdasarkan pola ruang RTRWK yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta penggunaan lahan sebagai berikut.

Gambar 2. 6
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Wajo



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Wajo 2024

Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya kawasan perlindungan setempat kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar

budaya kawasan rawan bencana alam kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

a) **Kawasan hutan lindung** merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah air tanah dan air permukaan. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua Kecamatan Keera Kecamatan Bola Kecamatan Takkalalla Kecamatan Penrang dan Kecamatan Sajoanging dengan luasan kurang lebih 767.993 hektar.

b) **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya** merupakan kawasan resapan air yang meliputi areal yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan selain kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dengan kemiringan lereng di atas 45%. Kawasan resapan air ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu Kawasan Rawa Lampullung Kecamatan Tempe dan Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng dengan luasan kurang lebih 18.543 hektar.

c) **Kawasan Perlindungan Setempat** terdiri atas:

1. Kawasan sempadan pantai ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Pitumpanua Kecamatan Keera Kecamatan Sajoanging Kecamatan Bola Kecamatan Penrang dan Kecamatan Takkalalla dengan ketentuan:
   a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
   b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
2. Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Walanae Sungai Bila Sungai Gilireng Sungai Siwa Sungai Awo Sungai Keera dan Sungai Cenrana'E dengan ketentuan:
   a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar;

b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepi sungai; dan

c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 meter dari tepi sungai.

3. Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan Tempe Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu Kawasan Rawa Lampullung Kecamata Tempe Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng dan Kawasan Bendungan Kalola Kecamatan Maniangpajo dan Kawasan Bendung Paselloreng di Kecamatan Gilireng dengan ketentuan :

   a. Daratan dengan jarak paling sedikit 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau

   b. Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

4. Kawasan ruang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis sosial budaya estetika dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL PKLp dan PPK.

d. Kawasan Suaka Alam Pelestarian Alam dan Cagar Budaya terdiri atas:

1. Kawasan cagar alam laut ditetapkan di Kawasan Pantai Timur (Tanjung Tanah Merah) Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla dengan luasan kurang lebih 125 hektar;

2. Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua Kecamatan Keera Kecamatan Sajoangning Kecamatan Bola Kecamatan Penrang dan Kecamatan Takkalalla;

3. Kawasan wisata alam ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe kawasan permandian Kalola Kecamatan Maniangpajo dan awo Kecamatan Gilireng; dan
4. Kawasan cagar budaya dan ilmu pegetahuan ditetapkan di Kawasan Gua Nippon di Kecamatan Tempe situs Geddong'E di Desa Lagosi Kecamatan Pammana situs makam raja-raja Wajo di Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kawasan Desa Tosora di Kecamatan Majauleng kawasan rumah adat Atakkae di Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe dan Makam Sultan Kutai di Akkotengeng Kecamatan Sajoanging.

e. Kawasan rawan bencana terdiri atas:

1. Kawasan rawan banjir ditetapkan di sebagian DAS Walanae dan Danau Tempe di Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Sabbangparu muara sungai Siwa dan sepanjang WAS Cenranae di Kecamatan Bola Kecamatan Majauleng Kecamatan Pammana;
2. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Gilireng dan sebagian Kecamatan Pitumpanua.

f. Kawasan lindung geologi terdiri dari atas:

1. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gas beracun kawasan rawan gas beracun ditetapkan di :
2. Kawasan rawan gas beracun di Kampung Baru Kecamatan Gilireng dengan luasan kurang lebih 63 hektar;
3. Kawasan rawan gas beracun di Desa Patila Kecamatan Pammana dengan luasan kurang lebih 625 hektar;
4. Kawasan rawan gas beracun pengembangan sumur gas dan minyak bumi blok Sengkang (seismick Wasambo).
5. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di kawasan cekungan air tanah (CAT) di sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Gilireng sebagian Kecamatan Keera dan sebagian Kecamatan Maniangpajo; dan kawasan sempadan mata air ditetapkan di

kawasan mata air Kelurahan Talotenreng dan Kelurahan SumpabakaE Kecamatan Sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah Daerah.

g. Kawasan lindung lainnya terdiri dari atas:

1. Kawasan wisata berburu merupakan kawasan yang yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kesinambungan kegiatan berburu dan kelestarian satwa dengan mengutamakan aspek rekreasi olahraga dan kelestarian satwa ditetapkan di Kawasan Bendungan Kalola Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo dengan luasan kurang lebih 500 hektar;
2. Kawasan pengungsian satwa merupakan kawasan yang yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kelestarian satwa ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Gilireng sebagian Kecamatan Keera dan sebagian Kecamatan Majauleng.

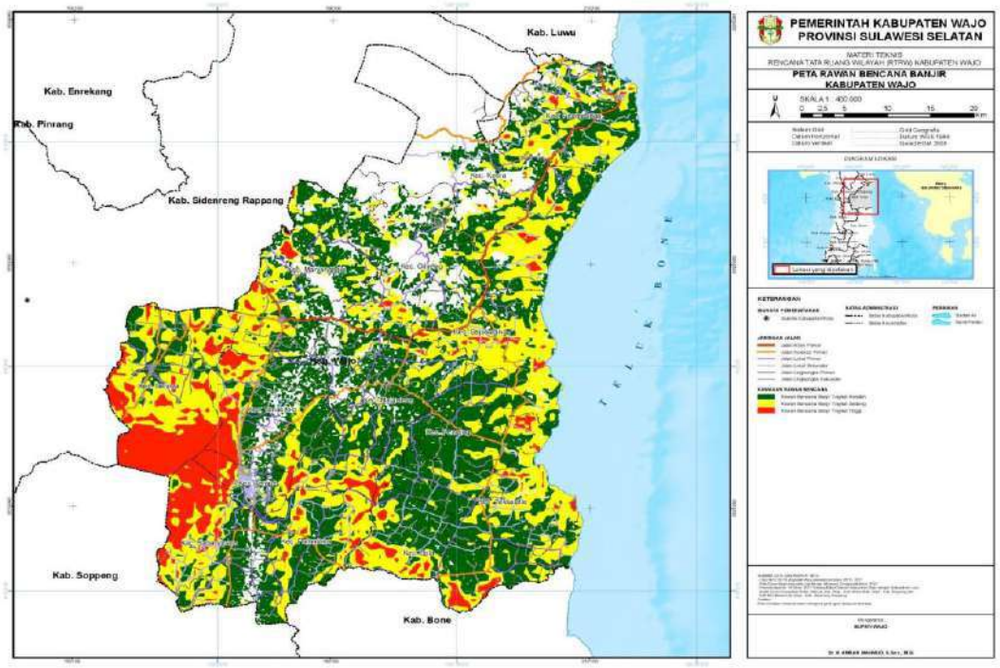
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Wajo memiliki kawasan yang sering dilanda bencana banjir. Berdasarkan pengkajian risiko bencana parameter yang digunakan untuk menghitung indeks ancaman bencana banjir adalah geomorfologi persentase luas DAS *landuse* (tutupan vegetasi) jenis tanah dan intensitas hujan tahunan sehingga menghasilkan skor bahaya. Perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana pada dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Wajo.

Berdasarkan hasil analisa kajian risiko Kabupaten Wajo didapatkan indeks ancaman bencana banjir adalah sedang dan indeks penduduk terpapar adalah tinggi yang berdampak pada pada 311.789 jiwa masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan terancam. Dengan demikian maka tingkat ancaman bencana banjir di Kabupaten Wajo adalah tinggi.

Untuk lebih jelasnya mengenai resiko bencana banjir di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta resiko bencana banjir di Kabupaten Wajo sebagai berikut.

Gambar 2. 7
Peta Resiko Bencana Banjir Kabupaten Wajo



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo 2024

Jumlah penduduk terpapar per kecamatan akibat ancaman bencana banjir di Kabupaten wajo berbeda.beda sesuai indeks dan kelas ancamannya. Indeks penduduk terpapar dan kelas ancaman bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Wajo seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7
Indeks Penduduk Terpapar dan Kelas Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Jiwa Terpapar			Kelas Indeks Dominan Jiwa Terpapar	Kelas Indeks Dominan Ancaman
		Tinggi	Sedang	Rendah		
1	Sabbangparu	20.568	1.724	0	Tinggi	Rendah
2	Tempe	34.691	1.551	308	Tinggi	Rendah
3	Pammana	28.529	576	0	Tinggi	Rendah
4	Bola	18.091	557	618	Tinggi	Rendah
5	Takkalalla	20.122	0	624	Tinggi	Rendah
6	Sajoanging	14.837	1.857	223	Tinggi	Rendah
7	Penrang	13.571	1.793	320	Tinggi	Rendah
8	Majauleng	23.984	2.966	85	Tinggi	Rendah
9	Tanasitolo	23.940	802	1.130	Tinggi	Rendah
10	Belawa	31.905	0	0	Tinggi	Rendah
11	Maniangpajo	5.379	671	518	Tinggi	Rendah
12	Gilireng	0	2.941	1.342	Tinggi	Rendah
13	Keera	13.925	1.664	830	Tinggi	Rendah
14	Pitumpanua	38.205	896	46	Tinggi	Rendah
Jumlah		**287.747**	**17.998**	**6.044**		

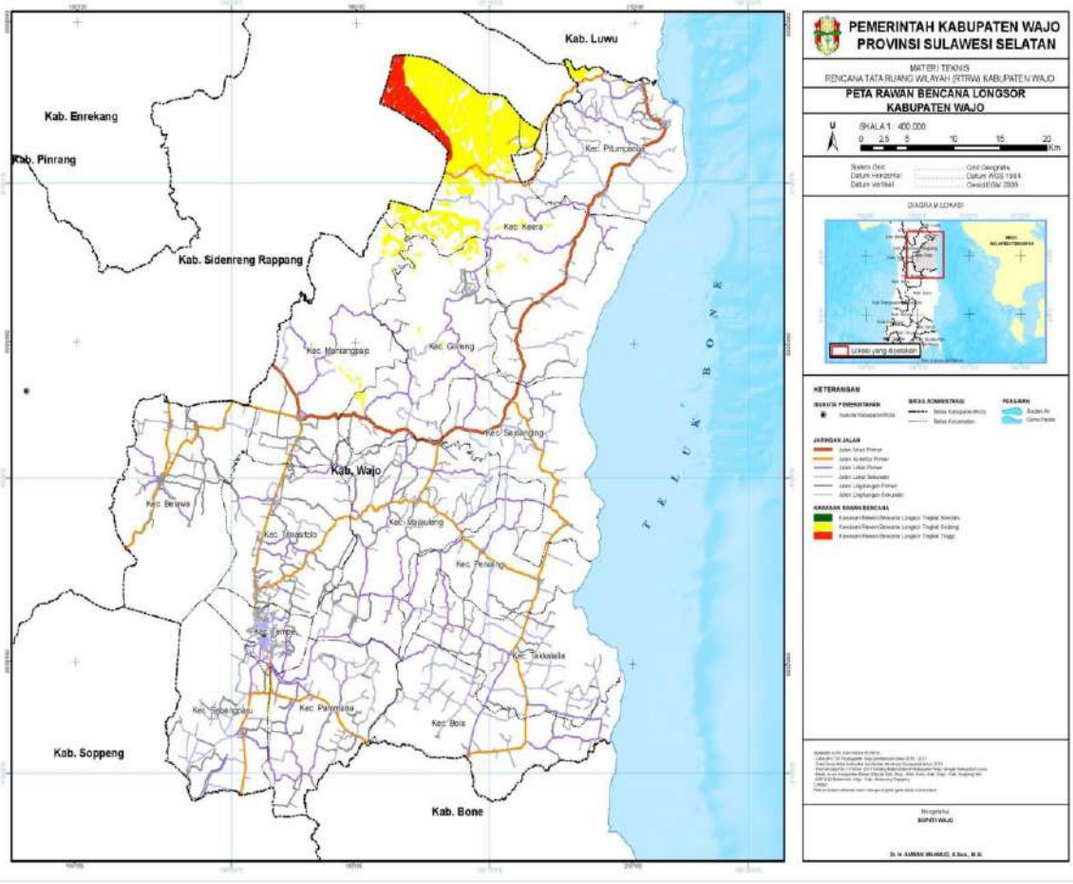
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo 2024.

Penghitungan indeks ancaman bencana tanah longsor dengan mengacu kepada beberapa parameter berdasarkan Perka No 02 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana parameter yang di lihat untuk penghitungan indeks ancaman bencana tanah longsor adalah geomorfologi tutupan vegetasi jarak sesar/patahan sehingga menghasilkan skor bahaya. Perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana pada dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Wajo.

Berdasarkan hasil analisa kajian risiko Kabupaten Wajo didapatkan indeks ancaman bencana tanah longsor adalah sedang dan indeks penduduk terpapar adalah tinggi yang berdampak pada 71.598 jiwa masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan terancam. Dengan demikian maka tingkat ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Wajo adalah tinggi.

Untuk lebih jelasnya mengenai resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Wajo sebagai berikut.

Gambar 2. 8
Peta Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Wajo



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo 2024

Jumlah penduduk terpapar per kecamatan akibat ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Wajo berbeda.beda sesuai indeks dan kelas ancamannya. Indeks penduduk terpapar dan kelas ancaman bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Wajo seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8
Indeks Penduduk Terpapar dan
Kelas Ancaman Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Jiwa Terpapar			Kelas Indeks Dominan Jiwa Terpapar	Kelas Indeks Dominan Ancaman
		Tinggi	Sedang	Rendah		
1	Sabbangparu	1,297	1,986	0	Sedang	Sedang
2	Tempe	21,163	2,006	0	Tinggi	Sedang
3	Pammana	0	907	1,197	Rendah	Sedang
4	Bola	0	0	0		
5	Takkalalla	0	0	0		
6	Sajoanging	1,589	0	252	Tinggi	Sedang
7	Penrang	0	0	0		
8	Majauleng	1,671	2,178	463	Sedang	Sedang
9	Tanasitolo	6,606	6,154	497	Tinggi	Sedang
10	Belawa	0	0	0		
11	Maniangpajo	6,570	2,183	533	Tinggi	Sedang
12	Gilireng	4,678	1,027	1,084	Tinggi	Sedang
13	Keera	2,778	1,530	859	Tinggi	Sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo 2024

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba Kabupaten Soppeng Kabupaten Sidrap bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh kegempaan. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang dilewatinya yang berpusat di Kabupaten Bone Kabupaten Pinrang Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Makassar menyebabkan daerah pantai di kabupaten Pinrang kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami. Maka Kabupaten Wajo dikelilingi dengan kabupaten–kabupaten rawan gempabumi.

Dari tabel Jumlah Jenis Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 (RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan) Kabupaten Wajo mengalami jenis kejadian bencana banjir angin puting beliung dan

kebakaran pemukiman. Dengan jumlah kejadian banjir sebanyak 11 (sebelas) kejadian anging puting beliung sebanyak 2 (dua) kejadian kebakaran permukiman sebanyak 4 (empat) kejadian.

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.8.1 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah yang tersusun atas konstelasi pusat.pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana terutama jaringan transportasi.

1. Rencana sistem pelayanan

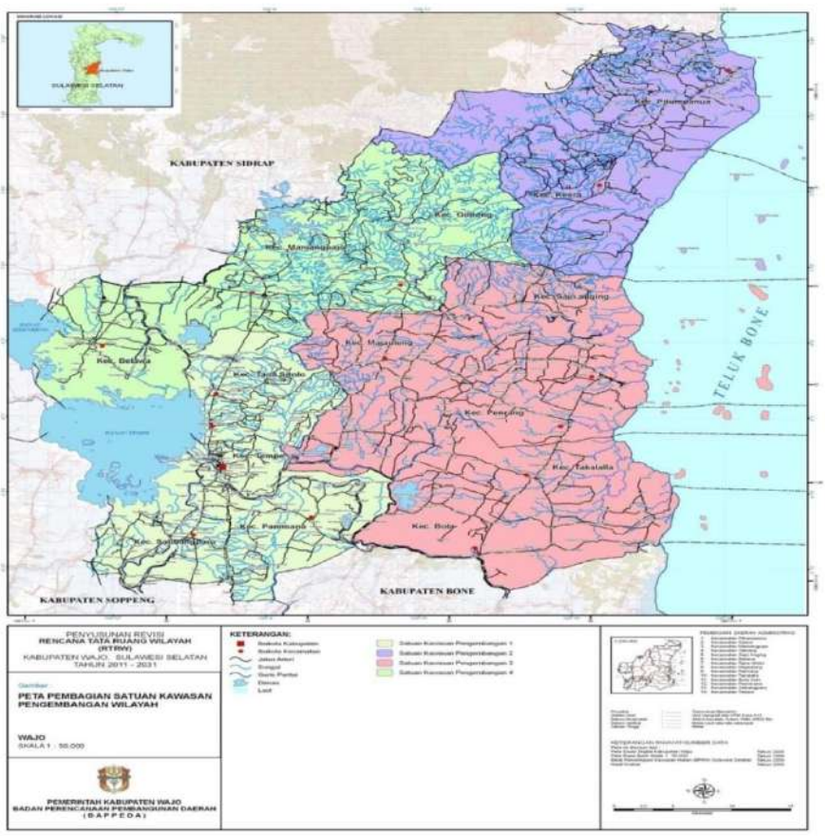
Sistem perwilayahan merupakan upaya pembentukan struktur tata ruang dengan penjenjangan pelayanan yang bertujuan untuk menemukenali perwujudan ruang kecenderungan perkembangannya serta permasalahan pengembangan wilayah yang memiliki dimensi keruangan. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pendekatan beberapa proses analisa terhadap unsur-unsur pembentuk ruang yang meliputi sistem pusat-pusat permukiman sistem sarana dan prasarana utama secara menyeluruh tentang keadaan pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta jangkauan pelayanannya dan hubungannya antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah (growth pole region models).

Berdasarkan hasil analisis model tersebut dan dengan masukan pertimbangan kondisi fisik kewilayahan potensi dan keunggulan wilayah (kesesuaian lahan dan kemampuan lahan) askesibilitas dan keterjangkauan wilayah maka perwilayahan pembangunan di Kabupaten Wajo direncanakan terbagi ke dalam 4 (empat) Satuan Kawasan Penembangan (SKP). Dimana setiap SKP mempunyai karakteristik dan fungsi (utama dan penunjang) yang diembannya relatif berbeda sesuai dengan tingkatan/hirarki pelayanannya (gambar 2.9). Adapun sistem perwilayahan yang terbentuk di Kabupaten Wajo antara lain :

a. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP1) meliputi Kecamatan Tempe Sabbangparu Pammana dan Kecamatan Tanasitolo dengan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) di Kota Sengkang yang juga berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wajo (PPW/ibukota kabupaten);

b. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP2) meliputi Kecamatan Keera dan Kecamatan Pitumpanua dengan pusat pengembangan di Kota Siwa (Kec. Pitumpanua);
c. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP3) meliputi Kecamatan Majauleng Penrang Sajoanging Takkalalla dan Kecamatan Bola Solo dengan pusat pengembangan di Kota Paria (Kecamatan Majauleng);
d. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP4) meliputi Kecamatan Maniangpajo Gilireng dan Kecamatan Belawa dengan pusat pengembangan di Anabanua (Kecamatan Maniangpajo).

Gambar 2. 9
Peta Pembagian Satuan Kawasan
Pengembangan Wilayah Kabupaten Wajo



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Wajo 2024

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana

a. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Prasarana transportasi yang terdapat di Kabupaten Wajo meliputi prasarana transportasi darat dan laut. Prasarana transportasi tersebut merupakan sistem yang menunjang terhadap aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga

diperlukan rencana pengembangan yang terpadu dengan sistem rencana tata ruangnya agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara sinergis.

Fungsi utama sistem prasarana transportasi adalah menunjang kegiatan pemindahan manusia dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam pengembangan wilayah sistem transportasi berfungsi untuk menjembatani keterkaitan fungsional antar kegiatan sosial ekonomi di Kabupaten Wajo. Sesuai dengan fungsi tersebut maka pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan tata ruang wilayah di Kabupaten Wajo. Adapun tujuan pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Wajo adalah :

1) Pengembangan sistem transportasi dalam kaitannya untuk mewujudkan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Wajo yang pesat. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran-sasaran yang ditetapkan meliputi kegiatan sebagai berikut:
   a) Mengembangkan sistem interaksi antar wilayah antara lain Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Bone Kabupaten Soppeng Kabupaten Sidrap Luwu dan Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka dan sebagainya.
   b) Mendukung kegiatan perdagangan ekspor–impor Kabupaten Wajo dengan wilayah lainnya.
   c) Menunjang pengembangan sektor-sektor strategis di Kabupaten Wajo.
2) Pengembangan sistem transportasi dalam kaitannya untuk mewujudkan pertumbuhan yang serasi bersama-sama dengan wilayah yang ada disekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran-sasaran yang ditetapkan meliputi kegiatan sebagai berikut :
   a) Membuka keterisolasian wilayah yang ada di Kabupaten Wajo dengan mewujudkan keterkaitan antar wilayah antar pusat dan daerah belakangnya serta meningkatkan aksesibilitas dengan pusat.pusat pemasaran.
   b) Menunjang perkembangan sektor.sektor utama di Kabupaten Wajo yaitu : kehutanan pertambangan pertanian

pariwisata dll.

3) Pengembangan sistem transportasi bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dengan sasaran :
    a) Memperlancar koleksi dan distribusi arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas penduduk.

Meningkatkan keterhubungan ke wilayah-wilayah terisolasi yang memiliki potensi. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Wajo maka diperlukan adanya suatu pola pengembangan sistem transportasi yang terpadu. Transportasi darat dan air harus dapat terintegrasi dengan sistem tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Wajo.

2.1.1.8.2 Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan

1. **Kawasan peruntukan pertanian di daerah** terdiri atas:
    1. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan ditetapkan di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Wajo;
    2. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian Kecamatan Pitumpanua sebagian Kecamatan Keera dan sebagian Kecamatan Tanasitolo dengan luasan kurang lebih 233.816 hektar;
    3. Kawasan peruntukan perkebunan terdiri dari :
        a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Gilireng sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 9.046 hektar;
        b. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian

Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 20.000 hektar;

c. kawasan peruntukan perkebunan kopi robusta ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo dan sebagian Kecamatan Sajoanging dengan luasan kurang lebih 142 hektar;
d. kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kapas ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Pitumpanua sebagian Kecamatan Keera sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 14.947 hektar;
e. kawasan peruntukan perkebunan lada pala vanili dan tebu ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Pitumpanua sebagian Kecamatan Keera sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 28.599 hektar; dan
f. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh jambu mete dan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa sebagian Kecamatan Maniangpajo sebagian Kecamatan Sabbangparu

sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Pammana sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Takkalalla sebagian Kecamatan Pitumpanua sebagian Kecamatan Keera sebagian Kecamatan Sajoanging sebagian Kecamatan Penrang dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 8.384 hektar.

4. Kawasan peruntukan peternakan berupa kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo sebagian wilayah Kecamatan Gilireng sebagian wilayah Kecamatan Majauleng sebagian wilayah Kecamatan Pammana sebagian wilayah Kecamatan Bola sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla sebagian wilayah Kecamatan Penrang sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging dan sebagian wilayah Kecamatan Belawa dengan luasan kurang lebih 183.907hektar. Untuk peruntukan ternak kecil tersebar di 14 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo.
5. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di daerah ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luasan kurang lebih 180.000 (seratus delapan puluh ribu) hektar.

2. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Teluk Bone yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bola kawasan pesisir Kecamatan Sabbangparu kawasan pesisir Kecamatan Tempe kawasan pesisir Kecamatan Pammana kawasan pesisir Kecamatan Takkalalla kawasan pesisir Kecamatan Majauleng kawasan pesisir Kecamatan Tanasitolo kawasan pesisir Kecamatan Belawa kawasan pesisir Kecamatan Maniangpajo kawasan pesisir Kecamatan Keera kawasan pesisir Kecamatan Pitumpanua kawasan pesisir Kecamatan Sajoanging dan kawasan pesisir Kecamatan Penrang dengan luasan kurang lebih 40.643 hektar;

2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari:
    a. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua sebagian wilayah Kecamatan Bola sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla sebagian wilayah Kecamatan Penrang sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging dan sebagian wilayah Kecamatan Keera dengan luasan kurang lebih 9.100 hektar; dan
    b. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu sebagian wilayah Kecamatan Pammana sebagain wilayah Kecamatan Majauleng sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo sebagian wilayah Kecamatan Belawa sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo sebagian wilayah Kecamatan Gilireng dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe dengan luasan kurang lebih 9.486 hektar.
3. Kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bola sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging sebagian wilayah Kecamatan Penrang sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe;
4. Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Bola Kecamatan Bola BBI Kalola Kecamatan Maniangpajo BBI Surae Kecamatan Tempe BBI Kecamatan Takkalalla dan BBI Kecamatan Keera; dan
5. Pelabuhan Pendaratan Ikan ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua dan sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging.

2.1.1.8.3 Kawasan peruntukan pariwisata

1. **Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah** terdiri atas:
    a. Kawasan Rumah Adat Atakkae di Kecamatan Tempe;
    b. Kawasan Gua Nippon di Kecamatan Tempe; dan
    c. Kawasan Wisata Mesjid Belawa di Kecamatan Belawa.

2. **Kawasan peruntukan pariwisata alam** terdiri atas:
   a. Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Tempe;
   b. Kawasan Wisata Air Terjun Awo di Kecamatan Keera;
   c. Kawasan Wisata Air Terjun Maniangpajo di Kecamatan Maniangpajo;
   d. Kawasan Wisata Alam Kalola di Kecamatan Maniangpajo;
   e. Kawasan Wisata Alam Pantai Pasir Putih di Kecamatan Bola;
   f. Kawasan Wisata Telaga Biru di Kecamatan Bola;
   g. Kawasan Wisata Pantai Bangsalae di Kecamatan Pitumpanua;
   h. Kawasan Wisata Situs Tosora di Kecamatan Majauleng;
   i. Kawasan Wisata Situs Pammana di Kecamatan Pammana;
   j. Kawasan Wisata Situs Makam Puang Masora di Kecamatan Maniangpajo;
   k. Kawasan Wisata Situs Istana Datunna Cina di Kecamatan Pammana;

3. **Kawasan peruntukan pariwisata buatan** terdiri atas:
   a. Kawasan Wisata Rumah Adat Maniangpajo di Kecamatan Maniangpajo;
   b. Kawasan Agrowisata Sutera SempangE Desa Pakkanna di Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Sabbangparu.

2.1.1.8.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas

1. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral merupakan wilayah usaha pertambangan rakyat. Wilayah usaha pertambangan rakyat berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tempe sebagian wilayah Kecamatan Pammana sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua sebagian wilayah Kecamatan Belawa sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo sebagian wilayah Kecamatan Gilireng sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging sebagian wilayah Kecamatan Bola dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo; dan
2. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak

Blok Sengkang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gilireng sebagian wilayah Kecamatan Majauleng sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo.

2.1.1.8.5 Kawasan Peruntukan Industri

1. Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas:
   a. kawasan industri manufaktur penghasil mesin dan atau alat produksi ditetapkan di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pammana; dan
   b. rencana pengembangan kawasan industri pengolahan nikel ditetapkan di Kecamatan Keera dan kawasan industry batu bata ditetapkan di kecamatan Tanasitolo.
2. Kawasan peruntukan energi sedang merupakan kawasan industri kerajinan tenun dan kain sutera ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe sebagian Kecamatan Tanasitolo sebagian Kecamatan Sabbangparu sebagian Kecamatan Majauleng sebagian Kecamatan Penrang dan Kecamatan Sajoanging;
3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL PKLp dan PPK.

2.1.1.8.6 Kawasan Peruntukan Perdagangan

Kawasan peruntukan perdagangan yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa terdiri atas:

1. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan perdagangan Sengkang Kecamatan Tempe, kawasan perdagangan Siwa Kecamatan Pitumpanua, kawasan perdagangan Keera Kecamatan Keera, kawasan perdagangan Anabanua Kecamatan Maniangpajo dan kawasan perdagangan Atapange Kecamatan Majauleng; dan
2. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua Kecamatan Keera, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Bola, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu dan Kecamatan Tempe.

2.1.1.8.7 Potensi Energy Baru Terbaharukan (EBT)

1. Penurunan Emisi GRK (pemanfaatan kotoran ternak/biomassa (subtitusi BB fosil)) Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebagaimana tertuang dalam Dokumen NDC sebagai tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan menyampaikan First Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi sebesar 29% dari BAU 2030 dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen sektor energi adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 314.398 Juta Ton CO2 pada tahun 2030 taerget 23% EBT dari Bauran Energi Primer dan 17% Efisiensi Energi dari BAU Energi Final.

   Dalam NDC disebutkan bahwa penurunan emisi di Indonesia berfokus pada 5 (lima) sektor yang berkontribusi dalam upaya penurunan emisi GRK dari BAU 2030 yaitu sektor energi industri kehutanan pertanian dan limbah.

   Dalam hal penurunan emisi grk pemerintah kabupaten wajo melakukan beberapa hal salah satunya pemanfaatan kotoran ternak / biomassa (subtitusi bb fosil). Adapun aksi mitigasi yang dilakukan yaitu menyediakan sarana dan prasarana tepat guna peternakan dan pembangunan instalasi biogas dengan jenis ternak sapi dimana penggunaanya biomassanya untuk memasak dan lampu penerangan.
2. Penurunan Emisi GRK (efisiensi energy lampu hemat energy (LHE))

   Energi baru dan terbarukan (EBT) ini terdiri dari tenaga surya tenaga angin tenaga air tenaga laut panas bumi biodiesel bioethanol biomasa komersial termasuk limbah pertanian dan rumah tangga. Namun tidak termasuk biomasa tradisional untuk sektor rumah tangga. EBT dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan sebagai sumber energi pengganti BBM (biodiesel dan biopremium).

   EBT terus dikembangkan dan dioptimalkan dengan mengubah pola pikir bahwa EBT bukan sekedar sebagai energi alternatif dari bahan bakar fosil tetapi harus menjadi pasokan energi nasional. Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) Pasal 9 Huruf f Nomor 1 pada tahun 2025 peran energi baru dan terbarukan

paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi.

Penurunan emisi GRK dalam hal efisiensi energy lampu hemat energy melakukan aksi mitigasi yaitu pemerliharaan penerangan jalanan umum di kecamatan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum led di beberapa lokasi dan menyediakan bahan dan material pemeliahraan jalana umum. Adapun yang masih menjadi masalah dalam efisiensi energy lampu yaitu maintenance yang mahal sarana dan prasarana belum memadai dan SDM petugas kelistrikan pemda masih rendah.

2.1.1.9 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

1. Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo pada Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan rerata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.04% di mana jumlah penduduknya juga mengalami penurunan yang mana pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Wajo sebanyak 397.814 jiwa meningkat menjadi 405.14 pada tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Wajo tahun 2019 hingga 2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 9
Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kec. Tahun 2019–2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2020-2023
1	Sabbangparu	26.326	24.365	24.38	24.4	26.38	0.04
2	Tempe	66.461	64.32	64.41	64.5	68.64	0.04
3	Pammana	31.86	30.712	30.73	30.75	33.01	0.04
4	Bola	19.792	19.435	19.45	19.46	21.05	0.04
5	Takkalalla	21.044	19.981	20	20.01	21.24	0.05
6	Sajoanging	19.07	17.525	17.54	17.55	18.50	0.03
7	Penrang	15.856	14.799	14.81	14.82	15.94	0.05
8	Majauleng	31.862	30.713	30.74	30.76	32.81	0.03
9	Tanasitolo	40.081	39.324	39.35	39.38	41.77	0.03
10	Belawa	32.594	30.153	30.17	30.18	31.97	0.04
11	Maniangpajo	16.348	15.762	15.77	15.78	17.19	0.05
12	Gilireng	11.444	10.875	10.89	10.9	11.73	0.03
13	Keera	22.529	20.237	20.25	20.27	21.85	0.04
14	Pitumpanua	42.547	40.878	40.91	40.94	43.08	0.03
Jumlah		**397.814**	**379.079**	**379.396**	**379.706**	**405.137**	**0.04**

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS. 2024. Diolah.

Melihat pada tabel di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kecamatan yang rerata laju pertumbuhan penduduknya lebih besar dari rerata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo sebesar 0.05% yaitu Kecamatan Takkalalla, Penrang, dan Maniangpajo.
b. Rerata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo selama tahun 2020-2023 sebesar 0.04%.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk kasar dihitung untuk mengetahui rerata jumlah penduduk dalam setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wajo pada Tahun 2019–2023 senantiasa mengalami peningkatan. Tahun 2019 kepadatan penduduk Kabupaten Wajo sebesar 35.81 jiwa/ km², meningkat drastis pada Tahun 2020 sebesar mengalami penurunan menjadi 151.26 jiwa/ km². Tahun 2021-2022 cenderung stabil di angka 151.38 jiwa/ km² dan 151.51 jiwa/ km² kemudian meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 161.65 jiwa/ km².

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Wajo menurut kecamatan tahun 2019-2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Sabbangparu	132.75	198	183.54	183.68	183.83	198.71
2	Tempe	38.27	1.737	1.680.69	1683.04	1685.34	1793.44
3	Pammana	162.1	197	189.46	189.59	189.72	203.63
4	Bola	220.13	90	88.29	88.35	88.41	95.63
5	Takkalalla	179.76	117	111.15	111.24	111.33	118.16
6	Sajoanging	167.01	114	104.93	105.01	105.08	110.75
7	Penrang	154.9	102	95.54	95.62	95.69	102.88
8	Majauleng	225.92	141	135.95	136.05	136.16	145.23
9	Tanasitolo	154.6	259	254.36	254.53	254.71	270.19
10	Belawa	172.3	189	175	175.09	175.17	185.55
11	Maniangpajo	175.96	93	89.58	89.64	89.7	97.67
12	Gilireng	147	78	73.98	74.05	74.12	79.77
13	Keera	368.36	61	54.94	54.98	55.01	59.30
14	Pitumpanua	207.13	205	197.35	197.51	197.66	207.99
Jumlah		**2506.19**	**35.81**	**151.26**	**151.38**	**151.51**	**161.65**

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS. 2024. Diolah.

Kepadatan penduduk pada tahun terakhir tertinggi di Kecamatan Tempe sebesar 1,793.44 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Keera sebesar 59.30 jiwa/km². Melihat pada tabel di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. 6 (enam) kecamatan yang kepadatan penduduknya di atas dari kepadatan penduduk Kabupaten Wajo sebesar 161.65 jiwa/km² yaitu Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Pammana, Kecamatan Belawa dan Kecamatan Pitumpanua;
b. 8 (delapan) kecamatan yang kepadatan penduduknya di bawah Kabupaten Wajo yaitu Kecamatan Bola, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Penrang, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Keera.

3. Sex Ratio

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2019 menurut jenis kelamin maka sebanyak 47.94% berjenis kelamin laki-laki dan 52.06% berjenis kelamin perempuan. Sedangkan apabila di lihat dari komposisi jumlah penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2020 menurut jenis kelamin maka menjadi 48.55% berjenis kelamin laki-laki, peningkatan ini sebesar 0.64% sedangkan jenis kelamin perempuan sebesar 51.45%, hal ini mengalami penurunan sebanyak -0.62%. Namun di tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 s.d 2023 cenderung stabil.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 11
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wajo
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	
1	2019	190.693	47.94	207.121	52.06	**397.814**
2	2020	184.047	48.55	195.032	51.45	**379.079**
3	2021	184.222	48.56	195.174	51.44	**379.396**
4	2022	184.393	48.56	195.313	51.44	**379.706**
5	2023	196.905	48.60	208.232	51.40	**405.137**

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS. 2024. Diolah.

Melihat pada data di atas maka untuk tahun 2023, jumlah penduduk jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki sebesar 2.80% sehingga diharapkan pembangunan juga lebih memperhatikan penduduk berjenis kelamin perempuan atau pembangunan berbasis gender.

Sedangkan jika ditinjau dari sex ratio yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan maka sex ratio di Kabupaten Wajo Tahun 2019 sebesar 92% dalam pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 jiwa penduduk laki-laki. Adapun di tahun 2020 s.d tahun 2022 sex ratio meningkat menjadi 94% dan cenderung stabil. Tahun 2023, meningkat menjadi 95%, sehingga dapat dikategorikan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo tergolong cepat. Untuk lebih jelasnya mengenai sex ratio penduduk di Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 12
Sex Rasio Penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jenis Kelamin		Sex Ratio (%)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2019	190.693	207.121	**92**
2	2020	184.047	195.032	**94**
3	2021	184.222	195.174	**94**
4	2022	184.393	195.313	**94**
5	2023	196.905	208.232	**95**

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS. 2024. Diolah.

Kemudian untuk sex ratio berdasarkan kecamatan di Kabupaten Wajo tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13
Rasio Jenis Kelamin Penduduk berdasarkan Kecamatan
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (%)
1	Sabbangparu	92
2	Tempe	94
3	Pammana	94
4	Bola	95
5	Takkalalla	94
6	Sajoanging	96
7	Penrang	94
8	Majauleng	92
9	Tanasitolo	95

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (%)
10	Belawa	93
11	Maniangpajo	98
12	Gilireng	94
13	Keera	97
14	Pitumpanua	98
WAJO		**95**

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS. 2024.

Melihat pada data di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. 8 (delapan) kecamatan yang rerata sex ratio kurang dari rerata sex ratio Kabupaten Wajo sebesar 95% yaitu Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Tempe, Kecamatan Pammana, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Penrang, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Belawa dan Kecamatan Gilireng.
b. 4 (Empat) kecamatan yang rerata sex ratio lebih dari rerata sex ratio Kabupaten Wajo sebesar 95% yaitu Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Keera dan Kecamatan Pitumpanua.
c. 2 (Dua) kecamatan yang rerata sex ratio sama dengan rerata sex ratio Kabupaten Wajo sebesar 95% yaitu Kecamatan Bola dan Kecamatan Tanansitolo.

4. Kelompok Umur

Berdasarkan komposisi penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2022 penduduk dengan kelompok usia 25-29 tahun dan 30-39 tahun mempunyai jumlah yang paling tinggi di Kabupaten Wajo. Jumlah penduduk menurut kelompok usia 15-19 tahun mencapai 27.456 jiwa dan usia 20-24 tahun mencapai 25-29 jiwa. Apabila di lihat dari komposisi usia produktif yaitu 15.65 tahun dan usia tidak produktif (0.14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio* Kabupaten Wajo pada tahun 2022 adalah 6482%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 65 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif.

Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kelompok Umur Tahun 2021-2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

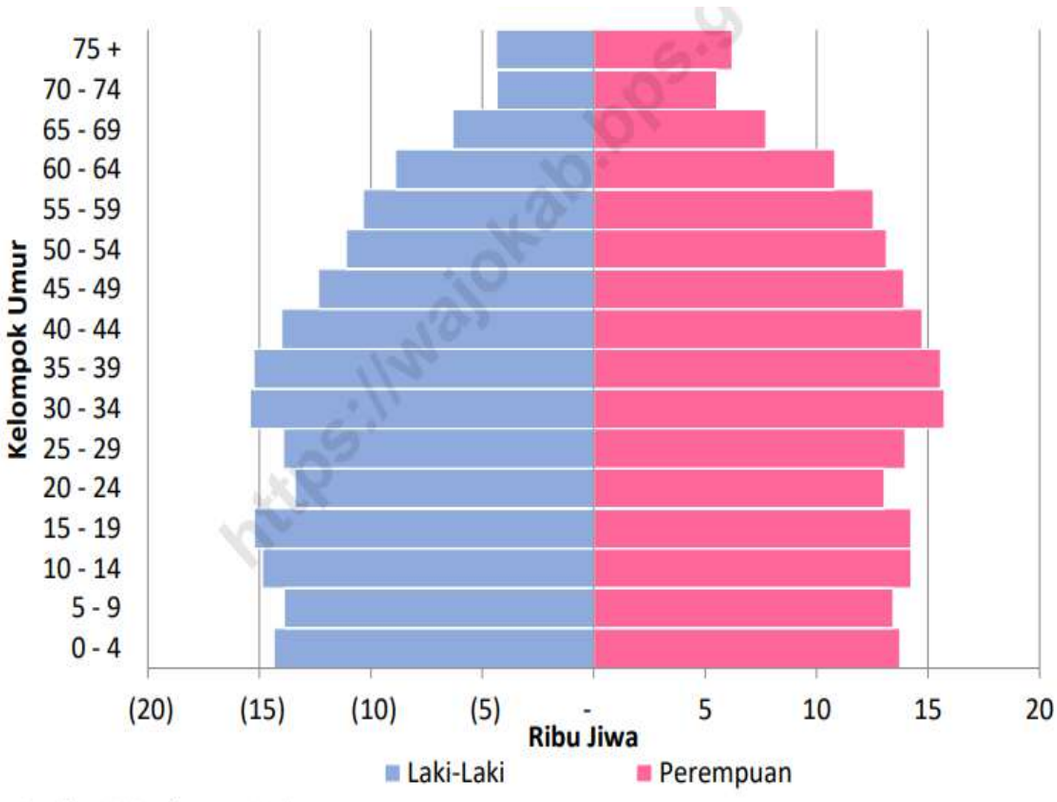
Tabel 2. 16
Komposisi Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kelompok Umur
Tahun 2021-2023

Kelompok Umur (Tahun)	2021			2022			2023		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	13.809	13.234	27.043	13.732	13.153	26.885	11.092	10.267	21.359
5 – 9	14.12	13.829	27.949	13.666	13.398	27.064	17.066	16.073	33.139
10 – 14	15.728	14.741	30.469	14.609	13.737	28.346	17.850	16.683	34.533
15 – 19	14.018	13.438	27.456	13.834	13.167	27.001	15.710	15.190	30.900
20 – 24	13.325	13.239	26.564	13.111	12.969	26.08	15.677	15.243	30.920
25 – 29	15.235	15.401	30.636	15.074	15.17	30.244	14.269	13.782	28.051
30 – 34	15.61	15.898	31.508	15.686	15.826	31.512	14.326	14.398	28.724
35 – 39	14.812	15.227	30.039	14.822	15.196	30.018	15.278	15.584	30.862
40 – 44	13.16	14.353	27.513	13.204	14.311	27.515	14.708	15.334	30.042
45 – 49	11.782	13.645	25.427	12.066	13.878	25.944	12.572	14.465	27.037
50 – 54	10.843	12.966	23.809	11.17	13.29	24.46	12.737	14.464	27.201
55 – 59	10.283	12.34	22.623	10.738	12.854	23.592	10.459	13.200	23.659
60 – 64	7.734	9.158	16.892	82.31	97.19	17.95	8.877	11.240	20.117
65 – 69	5.743	7.036	12.779	60.86	74.41	13.527	5.851	7.613	13.464
70 – 74	3.705	4.753	8.458	39.76	50.78	9.054	4.398	5.655	10.053
> 75	4.315	5.916	10.231	43.88	61.26	10.514	6.035	9.041	15.076
Jumlah	**184.047**	**195.032**	**379.396**	**184.393**	**195.313**	**379.706**	**196.905**	**208.232**	**405.137**

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS. 2024. Diolah

Apabila digambarkan maka penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2019 merupakan kategori penduduk muda (*expansive*) di mana dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian sehingga penduduk yang berumur muda mendominasi dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 dapat di lihat pada gambar berikut ini

Grafik 2. 1
Piramida Penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2023



Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS. 2024. Diolah

5. Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Rumah Tangga digunakan dalam pengukuran capaian indikator akses rumah tangga terhadap air minum layak, capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi layak serta capaian indikator aspek dya saing daerah. Data jumlah rumah tangga ini dalam pencapaian indikator-indikator menjadi tolak ukur terhadap pemerataan layanan infrastruktur dasar masyarakat. Adapun jumlah rumah tangga per kecamatan di Kabupaten Wajo sebagai berikut.

Tabel 2. 17
Jumlah Rumah Tangga per Kecamatan Kabupaten Wajo
Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			
		2022		2023	
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	%
1	SABANGPARU	9,743	9,743	9,743	7,02
2	PAMMANA	11,638	11,638	11,638	8,39
3	TAKKALALLA	7,449	7,449	7,449	5,37
4	SAJOANGING	6,268	6,268	6,268	4,52
5	MAJAULENG	11,351	11,351	11,351	8,18
6	TEMPE	22,401	22,401	22,401	16,15
7	BELAWA	10,901	10,901	10,901	7,86
8	TANASITOLO	14,506	14,506	14,506	10,45
9	MANIANGPAJO	5,817	5,817	5,817	4,19
10	PITUMPANUA	14,101	14,101	14,101	10,16
11	BOLA	7,314	7,314	7,314	5,27
12	PENRANG	5,707	5,707	5,707	4,11
13	GILIRENG	4,126	4,126	4,126	2,97
14	KEERA	7,426	7,426	7,426	5,35
	KAB. WAJO	**138,748**	**138,748**	**138,748**	**100**

Sumber :Disdukcapil Kab. Wajo. 2024

2.1.1.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Wajo menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Hasil kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Wajo untuk pangan dan air bersih menggunakan pendekatan sistem grid diketahui bahwa untuk status penyediaan bahan pangan di Kabupaten Wajo masih cukup bagus dimana wilayah ketersediaan pangan sebesar 4.226.094 Kkal/Tahun. sementara kebutuhan sebesar 312.185 Kkal/Tahun sehingga dapat terlihat bahwa daya dukung penyediaan pangan belum melampaui ambang batas.

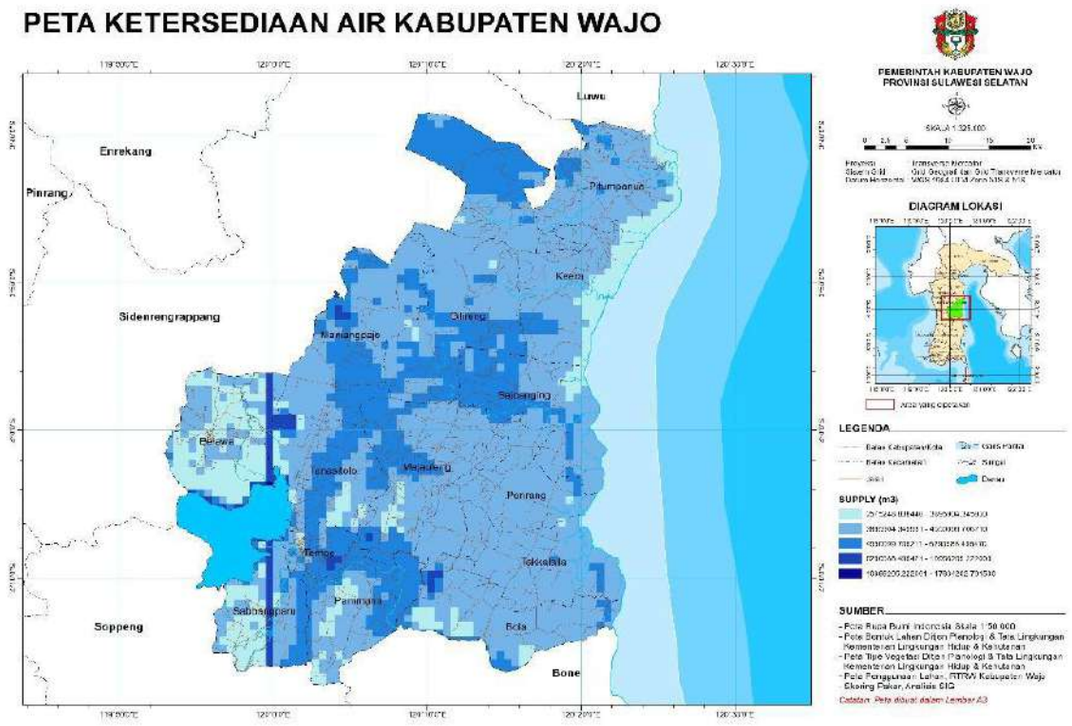
Sedangkan untuk status penyediaan air bersih Kabupaten Wajo dengan ketersediaan air sebesar 752.312.478 m3/Tahun. sementara kebutuhan air untuk kabupaten Wajo sebesar 17.185.565 m3/Tahun sehingga wilayah daya dukung penyediaan air belum melampaui ambang batas. Akan tetapi nilai tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang sehingga kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan yang ada saat ini akan semakin defisit. Adapun gambaran ketersediaan pangan dan air di Kabupaten Wajo disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2. 10
Peta Ketersediaan Bahan Pangan (dalam satuan kkal)
di Kabupaten Wajo



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Wajo 2024

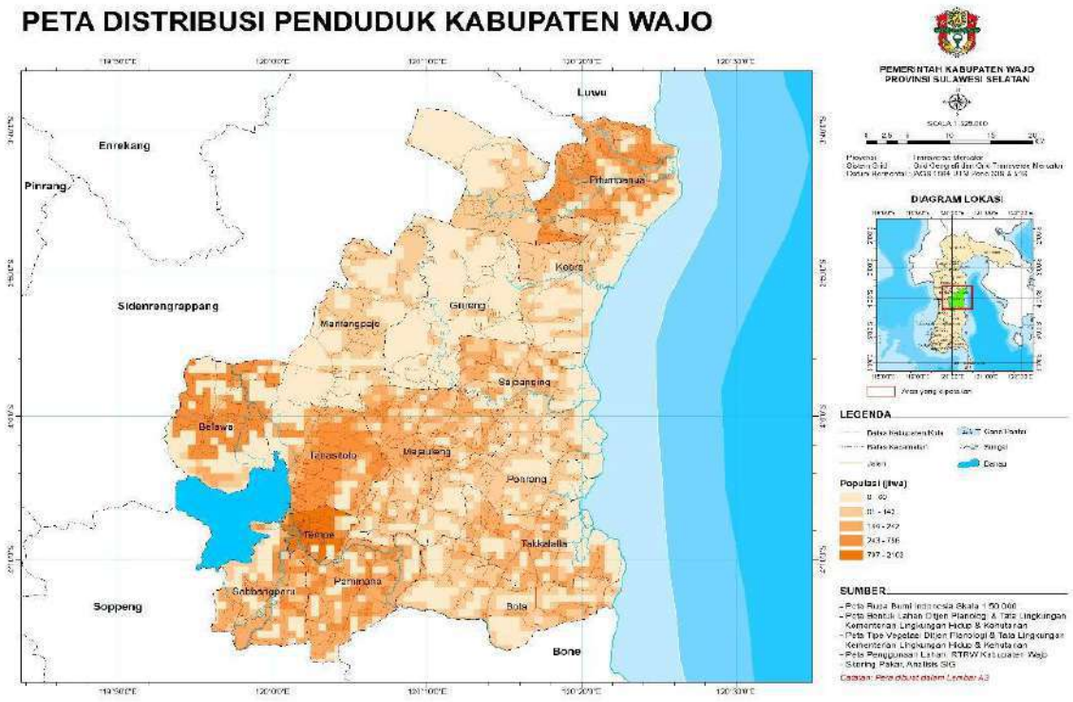
Gambar 2. 11
Peta Ketersediaan Air (dalam satuan m3) di Kabupaten Wajo



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Wajo 2024

Analisis status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Wajo dilakukan dengan teknik pengolahan data spasial sehingga untuk membendingkan data ketersediaan dan kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data potensi baik pangan dan air serta kebutuhan pangan dan air berbasis spasial. Untuk kebutuhan pangan dan air dilakukan dengan menghitung kebutuhan penduduk pada setiap grid yang digunakan dalam menghitung status daya dukung lingkungan hidup. Jumlah penduduk yang terdapat pada setiap kecamatan didistribusikan secara spasial ke grid yang digunakan sehingga diketahui sebaran jumlah populasi persetiap grid. Adapun hasil distribusi penduduk pada setiap grid disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2. 12
Peta Distribusi Penduduk Kabupaten Wajo



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Wajo 2024

Hasil distribusi penduduk di Kabupaten Wajo pada setiap grid kemudian digunakan untuk menghitung kebutuhan penduduk terhadap bahan pangan dan air bersih. Adapun standar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan pangan masyarakat adalah standar Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu 2.150/hari/kapita sedangkan untuk kebutuhan air menggunakan standar 1.600 m3/tahun/kapita untuk penggunaan perorang. Adapun hasil perhitungan kebutuhan pangan dan air di Kabupaten Wajo berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 18
Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan dan Air Bersih di Kabupaten Wajo

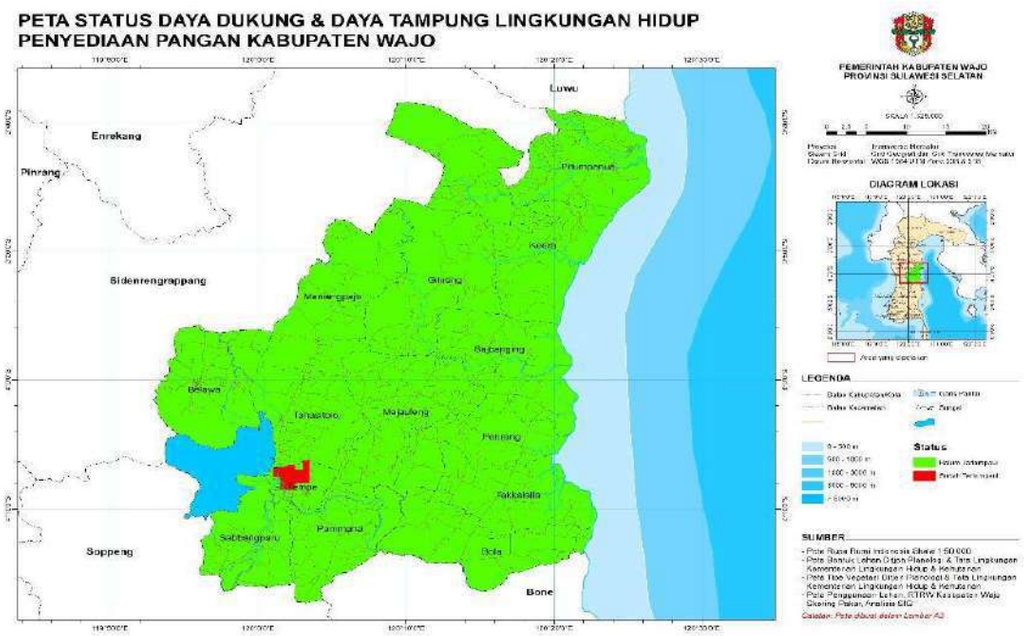
No	Kecamatan	Ketersediaan		Kebutuhan	
		Pangan (Kkal)	Air (m3)	Pangan (Kkal)	Air (m3)
1	Belawa	518.092.165.73191	1.171.120.04660	27.772.302.50000	342.002.27889
2	Bola	456.654.457.98626	1.158.045.77058	17.869.542.25000	322.147.96738
3	Gilireng	495.581.049.90574	1.421.666.36222	9.856.460.00000	27.706.42477
4	Keera	760.606.061.20753	1.492.877.27306	21.655.176.25000	136.754.36320
5	Majauleng	522.589.222.53216	2.019.238.18876	30.539.331.00000	220.477.87626
6	Maniangpajo	522.244.063.93122	1.360.261.45290	14.395.454.00000	358.136.81321

No	Kecamatan	Ketersediaan		Kebutuhan	
		Pangan (Kkal)	Air (m3)	Pangan (Kkal)	Air (m3)
7	Pammana	393.529.114.42124	1.456.053.91066	27.126.453.25000	226.476.04218
8	Penrang	446.672.954.01609	975.514.15692	14.023.482.50000	263.760.51743
9	Pitumpanua	414.221.361.14976	1.103.579.86564	39.078.980.50000	352.183.70561
10	Sabbangparu	441.562.501.25186	1.127.419.16091	21.723.449.50000	141.949.10363
11	Sajoanging	482.835.130.28357	1.047.635.95946	16.981.205.25000	231.521.97185
12	Takkalalla	424.502.808.16138	1.130.809.46180	17.864.049.00000	225.573.23900
13	Tanasitolo	413.718.035.64227	982.605.22986	35.651.192.50000	257.953.91191
14	Tempe	131.254.648.45537	1.086.072.83192	61.430.230.00000	222.849.06876
Total		**6.424.063.574.67636**	**17.532.899.67129**	**355.967.308.50000**	**3.329.493.28410**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Wajo 2019-2024. (Diolah)

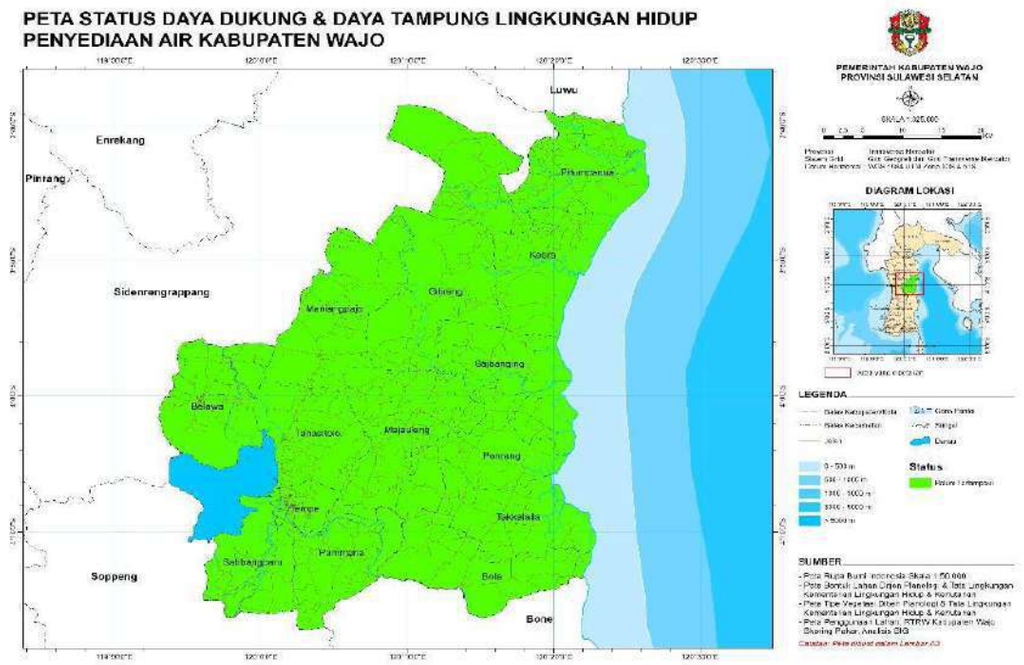
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sektor pangan hampir pada setiap kecamatan belum terlampaui jika diukur persetiap kecamatan. Namun informasi ambang batas pada setiap grid perlu diperhatikan untuk melihat status pangan di Kabupaten Wajo begitupun dengan status air di Kabupaten Wajo berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kecamatan yang jika dihitung secara keseluruhan antara kebutuhan domestik dan kebutuhan air terhadap pengolahan penggunaan lahan telah melampaui ambang batasnya. Sehingga wilayah-wilayah yang telah melampaui ambang batasnya dapat menjadi zona yang terbatas terhadap program-program perencanaan pembangunan wilayah dikarenakan dua komponen analisis yang digunakan yakni pangan dan air merupakan komponen penentu bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat disuatu wilayah. Akan tetapi banyak teknik yang dapat dilakukan ketika terjadi kekurangan ketersediaan disuatu wilayah yakni dapat dilakukan dengan mendatangkan sumbernya dari luar wilayah atau dari wilayah.wilayah yang masih surplus ketersediaanya.

Gambar 2. 13
Peta Status Penyediaan Bahan Pangan Kabupaten Wajo



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Wajo 2023

Gambar 2. 14
Peta Status Penyediaan Air Kabupaten Wajo



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Wajo 2022

Berdasarkan informasi dari Gambar 3.4 dan 3.5 diatas diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampauan alam menyediakan pelayanan dalam hal

penyediaan bahan pangan dan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi pangan dan air yang dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut. Adapun rincian luasan status daya dukung wilayah penyedian bahan pangan dan penyediaan air bersih di Kabupaten Wajo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 19
Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Bahan Pangan per Kecamatan di Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Penyediaan Pangan			
		Belum Malampaui Ambang Batas		Melampaui Ambang Batas	
		(Ha)	%	(Ha)	%
1	Belawa	18.03249	100%		00%
2	Bola	18.02725	100%		00%
3	Gilireng	23.62444	22.34%		00%
4	Keera	32.39233	13.71%		00%
5	Majauleng	21.21599	65.5%		00%
6	Maniangpajo	22.85248	10.77%		00%
7	Pammana	14.84766	65.0%		00%
8	Penrang	16.31708	10.99%		00%
9	Pitumpanua	18.99675	1164%		00%
10	Sabbangparu	13.38881	705%		00%
11	Sajoanging	17.50060	1307%		00%
12	Takkalalla	15.85566	906%		00%
13	Tanasitolo	15.50628	978%		00%
14	Tempe	3.13097	202%	1.22532	79%
Total		**251.68879**	**971%**	**1.22532**	**05%**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Wajo 2024 (Diolah)

Tabel 2. 20
Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air Bersih per Kecamatan di Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Penyediaan Pangan			
		Belum Malampaui Ambang Batas		Melampaui Ambang Batas	
		(Ha)	%	(Ha)	%
2	Bola	18.02725	1000%		00%
3	Gilireng	10.57703	1000%		00%
4	Keera	23.62444	1000%		00%
5	Majauleng	32.39233	1000%		00%
6	Maniangpajo	21.21599	1000%		00%

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Penyediaan Pangan			
		Belum Malampaui Ambang Batas		Melampaui Ambang Batas	
		(Ha)	%	(Ha)	%
7	Pammana	22.85248	1000%		00%
8	Penrang	14.84766	1000%		00%
9	Pitumpanua	16.31708	1000%		00%
10	Sabbangparu	18.99675	1000%		00%
11	Sajoanging	13.38880	1000%		00%
12	Takkalalla	17.50060	1000%		00%
13	Tanasitolo	15.85566	1000%		00%
14	Tempe	15.50627	1000%		00%
Total		**259.13482**	**1000%**	**.**	**00%**

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Wajo 2024 (Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Wajo dapat diketahui bahwa secara keseluruhan ini mampu mendukung kebutuhan pangan dan air di wilayahnya bahkan untuk saat ini dapat mengekspor kelebihan potensi pangan dan air ke wilayah disekitarnya. Untuk Tahun 2018 jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan pangan dan air secara alamiah di Kabupaten Wajo berdasarkan data potensi yang digunakan masing-masing adalah 507.686 dan 164.912.279 jiwa populasi dari jumlah penduduk eksisting pada tahun 2017 yang sebanyak 453.628 jiwa. Nilai tersebut menggambarkan bahwa terdapat nilai ambang batas penduduk yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Wajo khususnya terkait penyediaan pangan maupun air.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat berupa penjelasan gambaran dan hasil analisis terhadap pencapaian indikator kerjahteraan dan pemerataan ekonomi kesejahteraan soaial seni budaya dan olahraga. Untuk lebih jelasnya mengenai aspek kesejahteraan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.2.1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan ekonomi dapat diukur dengan salah satu indikator pereknomian secara makro adalah pertoumbuhan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertenu di bandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. PDRB terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Harga Konstan dan PDRB Atas Harga Berlaku. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga sehingga perubahan yang di ukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

PDRB Kabupaten Wajo sejak tahun 2019-2023 khususnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK Tahun 2010) Kabupaten Wajo senantiasa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2022 tumbuh sebesar 13,891.79 juta rupiah yang relatif jauh lebih besar bila dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar 12,858.45 juta rupiah. Berikut tabel PDRB ADHK menurut lapangan usaha Tahun 2019–2023 di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 21
PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan
ADHK Tahun 2010 Kabupaten Wajo (Miliar Rupiah)
Tahun 2019 – 2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	PertanianKehutanan dan Perikanan	3,861.95	3,883.96	4,116.95	4,462.63	4,260.85
B	Pertambangan dan Penggalian	2,208.68	2,045.84	2,279.98	1,998.06	2,047.50
C	Industri Pengolahan	492.60	487.37	511.57	548.61	581.58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.07	15.93	16.67	17.47	18.41
E	Pengadaan Air Pengolahan SampahLimbah dan Daur Ulang	4.90	5.41	5.90	6.13	6.45
F	Konstruksi	1,177.05	1,169.63	1,205.42	1,177.70	1,202.96
G	Perdagangan Besar dan EceranReparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,216.20	2,193.01	2,318.85	2,455.66	2,637.76
H	Transportasi dan Pergudangan	482.35	443.2	475.35	513.75	529.72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49.39	47.87	53.81	59.97	62.24
J	Informasi dan Komunikasi	290.97	329.09	361.67	379.75	397.87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	310.13	328.67	373.87	375.16	359.14
L	Real Estate	444.17	438.13	478.00	496.16	539.55
MN	Jasa Perusahaan	17.16	16.18	17.80	16.57	17.60

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
O	Administrasi PemerintahanPertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	543.35	539.37	545.94	534.70	542.12
P	Jasa Pendidikan	492.36	505.60	529.36	558.21	577.39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188.22	197.31	212.15	219.28	228.27
RSTU	Jasa Lainnya	63.89	61.77	66.00	71.98	79.37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		**12,858.45**	**12,708.31**	**13,569.28**	**13,891.79**	**14,090.79**

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS (Diolah)

* *: angka sementara*

** *: angka sangat sementara*

Peningkatan Nilai dan kontribusi sektor PDRB tahun 2019-2023 untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Wajo yang meningkat, tentu bersaing pula dengan Kabupaten tetangga yang sewilayah, yaitu Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone. Pada tebel berikut terlihat bahwa PDRB ADHK Kabupaten Wajo Tahun 2023 masih berada di bawah Kabupaten Bone, namun masih berada diatas Kabupaten Soppeng. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 22
Perbandingan PDRB ADHK Tahun 2010 Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Tetangga (Miliar Rupiah) Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	12,858.45	12,708.31	13,569.28	13,891.79	14,090.79
Kabupaten Bone	22,108.04	22,053.74	23,273.87	24,491.73	25,416.03
Kabupaten Soppeng	6,993.53	7,146.65	7,585.98	8,054.42	8,322.53

Sumber : BPS (Diolah)

Adapun Perbandingan Peningkatan Nilai dan kontribusi sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 23
Perbandingan PDRB ADHK Tahun 2010 Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional (Miliar Rupiah) Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	12,858.45	12,708.31	13,569.28	13,891.79	14,090.79
Provinsi Sulawesi Selatan	330,506.00	328,155.00	343,395.00	360,895.00	377,162.00
Nasional	10,949,155.40	10,722,999.30	11,120,059.70	11,710,247.90	12,301,393.60

Sumber : BPS (Diolah)

Kemudian, untuk nilai dan kontribusi sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wajo sejak tahun 2019-2023 senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2023 tumbuh sebesar 24,588.57 juta rupiah yang relatif jauh lebih besar bila dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar 19,838.81 juta rupiah. Berikut tabel PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2019–2023 di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 24
PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Wajo (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	6,467.62	6,675.52	7,446.58	8,279.46	8,281.56
B	Pertambangan dan Penggalian	2,852.34	2,482.71	3,411.02	3,800.05	3,160.35
C	Industri Pengolahan	797.71	795.58	853.81	949.09	1,019.27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.65	16.27	17.55	18.73	20.51
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	6.27	6.96	7.73	8,09	8.72
F	Konstruksi	2,030.53	2,021.77	2,170.16	2,185.34	2,305.49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,267.43	3,268.52	3,511.82	3,839.14	4,250.56
H	Transportasi dan Pergudangan	688.73	652.25	741.76	919.10	1,000.21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72.02	70.38	79.85	91.76	99.52
J	Informasi dan Komunikasi	328.63	372.46	410.87	432.66	453.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	485.68	516.23	612.22	667.30	653.61
L	Real Estate	711.94	704.57	770.15	817.75	899.68
MN	Jasa Perusahaan	26.09	25.04	28.08	27.31	29.95

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	879.25	888.15	908.07	895.35	921.73
P	Jasa Pendidikan	778.25	824.25	862.22	912.31	944.26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	331.26	354.79	382.35	396.52	414.34
RSTU	Jasa lainnya	99.42	97.61	105.50	112.79	125.33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		**19,838.81**	**19,773.05**	**22,319.74**	**24,352.78**	**24,588.57**

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS (Diolah)

** : angka sementara*

*** : angka sangat sementara*

Peningkatan Nilai dan kontribusi sektor PDRB tahun 2019-2023 untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wajo yang meningkat, tentu bersaing pula dengan Kabupaten tetangga yang sewilayah, yaitu Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone. Pada tebel berikut terlihat bahwa PDRB ADHB Kabupaten Wajo Tahun 2023 masih berada di bawah Kabupaten Bone, namun masih berada diatas Kabupaten Soppeng. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 25
Perbandingan PDRB ADHB Tahun 2010 Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Tetangga (Miliar Rupiah) Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	19,838.81	19,773.05	22,319.74	24,352.78	24,588.57
Kabupaten Bone	36,034.84	36,560.64	39,369.96	43,640.84	46,935.17
Kabupaten Soppeng	10,938.27	11,382.12	12,426.78	13,741.84	14,909.33

Sumber : BPS (Diolah)

Adapun Perbandingan Peningkatan Nilai dan kontribusi sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 26
Perbandingan PDRB ADHB Tahun 2010 Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional (Miliar Rupiah) Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	19,838.81	19,773.05	22,319.74	24,352.78	24,588.57
Provinsi Sulawesi Selatan	504,321.00	504,053.00	544,857.00	605,149.00	652,574.00
Nasional	15,832,657.20	15,443,353.20	16,976,751.40	19,588,089.90	20,892,376.70

Sumber : BPS (Diolah)

Berdasarkan harga konstan 2010 angka PDRB Wajo juga mengalami penurunan, dari 13.57 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 14.09 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Wajo mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1.43 persen. Perlambatan laju pertumbuhan PDRB ini disebabkan oleh menurunnya lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan, hal ini diakibatkan bencana alam, berupa banjir yang cukup besar melanda Kabupaten Wajo. Selama tiga tahun terakhir (2020-2023) struktur perekonomian Wajo didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha,

diantaranya: Jasa lainnya; Real Estate; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	-1.76	0.57	6.00	8.40	-4.52
B	Pertambangan dan Penggalian	8.3	-7.37	11.44	-12.36	2.47
C	Industri Pengolahan	4.64	-1.06	4.97	7.24	6.01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.90	5.65	4.69	4.75	5.37
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	5.36	10.47	9.12	3.86	5.25
F	Konstruksi	3.67	-0.63	3.06	-2.30	2.15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.64	-1.05	5.74	5.90	7.42
H	Transportasi dan Pergudangan	9.16	-8.12	7.25	8.08	3.11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.40	-3.08	12.42	11.45	7.12
J	Informasi dan Komunikasi	10.99	13.10	9.90	5.00	4.77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.60	5.98	13.75	0.34	-4.27
L	Real Estate	5.90	-1.36	9.10	3.80	8.75
MN	Jasa Perusahaan	10.44	-5.76	10.02	-6.90	6.21
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14.68	-0.73	1.22	-2.06	1.39
P	Jasa Pendidikan	6.14	2.69	4.70	5.45	3.44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.51	4.83	7.52	3.36	4.10
RSTU	Jasa lainnya	7.78	-3.33	6.85	9.06	10.28
	PDRB	**4.06**	**-1.17**	**6.77**	**2.38**	**1.43**

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2024. BPS (Diolah)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Wajo diperbandingkan dengan kabupaten tetangga sewilayah yaitu Kabupaten Bone dan Soppeng, dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 28
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023 (%)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	4.06	-1.17	6.77	2.38	1.43
Kabupaten Bone	7.01	-0.25	5.53	5.23	3.77
Kabupaten Soppeng	7.69	2.19	6.15	6.18	3.33

Sumber : BPS (Diolah)

Kemudian Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 29
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)

Uraian	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	-1.17	6.77	2.38	1.43
Provinsi Sulawesi Selatan	-3.28	3.46	3.92	3.37
Nasional	-2.07	3.70	5.31	5.05

Sumber : BPS (Diolah)

Adapun peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Wajo, dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 30
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2023 (Persentase)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	32.60	33.76	33.36	34.00	33.68
B	Pertambangan dan Penggalian	14.38	12.56	15.28	15.60	12.85
C	Industri Pengolahan	4.02	4.02	3.83	3.90	4.15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
F	Konstruksi	10.24	10.22	9.72	8.97	9.38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.47	16.53	15.73	15.76	17.29
H	Transportasi dan Pergudangan	3.47	3.30	3.32	3.77	4.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.36	0.36	0.36	0.38	0.40
J	Informasi dan Komunikasi	1.66	1.88	1.84	1.78	1.84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.45	2.61	2.74	2.74	2.66
L	Real Estate	3.59	3.56	3.45	3.36	3.66
MN	Jasa Perusahaan	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.43	4.49	4.07	3.68	3.75
P	Jasa Pendidikan	3.92	4.17	3.86	3.75	3.84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.67	1.79	1.71	1.63	1.69
RSTU	Jasa lainnya	0.50	0.49	0.47	0.46	0.51
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Wajo Dalam Angka 2024. BPS (Diolah)

Memasuki Tahun 2023 perekonomian Kabupaten Wajo tampak mengalami perkembangan positif. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang perkembangannya melambat dikarenakan *Covid-19*.

2. Inflasi

Inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Apabila inflasi meningkat maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan menurunnya nilai tukar mata uang. Keberadaan inflasi ini berhubungan dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan atau penurunan tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Laju inflasi Kabupaten Wajo tertinggi terjadi pada saat menjelang perayaan hari besar hari besar keagamaan dan musim liburan sekolah yang menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan barang/jasa jenis tertentu. Selain itu laju inflasi ini dipengaruhi juga faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa omoditas yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang selanjutnya akan memacu dan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Namun mulai tahun 2015 perhitungan Laju Inflasi Kabupaten Wajo terhitung berdasarkan Wilayah bagian atau Region Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini BPS Kabupaten Wajo menyatakan bahwa Laju Inflasi Kabupaten Wajo berdasarkan Region Kabupaten Bone.

Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan nilai Inflasi Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2019–2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Perbandingan Nilai Inflasi Kabupaten Wajo
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Uraian	Laju Inflasi (%)					Rerata Pertum buhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Inflasi Kabupaten Wajo	1.64	1.89	2.26	5.52	2.84	2.83
2	Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	2.35	2.04	2.4	5.77	2.81	3.07
3	Inflasi Nasional	2.72	1.68	1.87	5.51	2.61	2.88

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024 (Diolah).

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Laju inflasi Kabupaten Wajo (region Bone) berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir, inflasi tertinggi terjadi d tahun 2022 yaitu 5.52%, hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM. Namun Tahun 2023 menurun drastis menjadi 2.84%. Demikian pula dengan laju Inflasi Provinis Sulawesi Selatan, untuk tahun 2023 kembali normal menjadi 2.81% yang artinya masih moderat. Namun masih perlu kerja keras bagi pemerintah Kabupaten Wajo dan provinsi Sulawesi Selatan karena Laju inflasi Tahun 2023 masih diatas laju inflasi Nasional yaitu 2.61%.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Wajo yang oleh BPS Kabupaten Wajo berdasarkan Region digantikan dengan perhitungan Laju Implisit yang merupakan perhitungan indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan

harga di tingkat produsen. Laju Implisit digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan merupakan salah satu indikasi perhitungan Laju Inflasi. Untuk lebih jelasnya mengenai Laju Implisit Kabupaten Wajo menurut tahun 2019–2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 32
Laju Implist Kabupaten Wajo Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019–2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1.48	2.63	5.24	2.57	4.76
B	Pertambangan dan Penggalian	3.66	.6.03	23.28	27.12	-18.84
C	Industri Pengolahan	1.22	0.8	2.24	3.65	1.31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.45	-1.59	3.01	1.90	3.96
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	2.73	0.43	1.84	0.81	2.4
F	Konstruksi	3.06	0.2	4.15	3.07	3.28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.91	1.09	1.61	3.23	3.07
H	Transportasi dan Pergudangan	0.76	3.07	6.03	14.65	5.54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.25	0.83	0.93	3.11	1.24
J	Informasi dan Komunikasi	0.85	0.21	0.38	0.29	0.04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.47	0.3	4.26	8.62	2.32
L	Real Estate	1.58	0.33	0.19	2.29	1.17
MN	Jasa Perusahaan	1.64	1.86	1.91	4.48	3.23
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.36	1.76	1.01	0.67	1.54
P	Jasa Pendidikan	1.61	3.14	-0.09	0.34	0.06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.19	2.17	0.23	0.33	0.38
RSTU	Jasa lainnya	2.06	1.56	1.16	-1.97	0.76
	PDRB	**1.90**	**0.85**	**5.72**	**6.58**	**-0.46**

Sumber : BPS Kab. Wajo 2024. Diolah. * : *Angka sementara* ** : *Angka sangat sementara*

3. PDRB Per kapita

PDRB Per kapita ADHK menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk dan menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita pun merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk.

PDRB perkapita Kabupaten Wajo dengan perhitungan tahun dasar 2010 juga mengalami peningkatan yang siginifikan di tahun 2020 sebesar 52.16 Juta Rupiah, sebelumnya tahun 2019 sebesar 49.31 Juta Rupiah. Kemudian tahun 2021 menjadi 58.55 Juta Rupiah, tahun 2022 terus meningkat menjadi sebesar 63.43 Juta Rupiah dan di tahun 2023 sebesar 63.61 Juta Rupiah. Berikut adalah tabel PDRB perkapita tahun 2019–2023 di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 33
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

Tahun	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	Perkembangan (%)	PDRB Perkapita ADHK 2010 (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	49.31	5.77	31.96	3.79
2020	52.16	-0.57	33.53	-1.41
2021	58.55		35.77	
2022**	63.43		24.35	
2023**	63.61			

Sumber : Kabupaten Wajo dalam Angka. BPS Kab. Wajo 2024

Sedangkan perbandingan PDRB Perkapita ADHB di Kabupaten Wajo jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 34
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Tentangga Tahun 2019–2023 (Miliar Rupiah)

PDRB Perkapita ADHB	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Bone	47.81	45.68	48.67	53.48	57.02
Kabupaten Soppeng	47.83	48.82	52.67	57.95	62.58
Kabupaten Wajo	49.31	52.16	58.55	63.43	63.61

Sumber : Kabupaten Wajo dalam Angka. BPS Kab. Wajo 2024 dan Provinsi Dalam Angka 2024.

Kemudian Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 35
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019–2023 (Miliar Rupiah)

PDRB Perkapita ADHB	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Wajo	49,31	58,55	63,43	63,61
Provinsi Sulawesi Selatan	-0,71	4,64	5,10	4,51
Nasional (PDB)	-3,26	2,76	4,15	3,93

Sumber :. BPS 2024

4. Indeks Gini

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang seringkali digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Gini Rasio adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0.1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0 maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

1. Gini Rasio < 03 = Ketimpangan rendah
2. 03 ≤ Gini Rasio ≤ 05 = Ketimpangan moderat
3. Gini Rasio ≥ 05 = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Wajo selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menjukkan berada dikategori kelompok ketimpangan “moderat” karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0.4. Kondisi ini apabila dicermati lebih dalam terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya menunjukkan adanya tendensi meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah, di mana pada tahun 2019 sebesar 0.34 kemudin di tahun 2023 menjadi 0.362. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36
Perbandingan Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Gini Kabupaten Wajo	0.34	0.355	0.361	0.375	0.362
2	Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan	0.38	0.389	0.382	0.377	0.377
3	Indeks Gini Nasional	0.38	0.38	0.398	0.402	0.388
4	Kriteria Ketimpangan Kabupaten Wajo	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : BPS Sulawesi Selatan 2024. Bappelitbangda 2024. Diolah

Pergeseran angka Indeks Gini Kabupaten Wajo yang meningkat memperlihatkan adanya pergeseran ke arah pemerataan yang cenderung tidak stabil, namun pada dasarnya masih dalam angka yang wajar. Pergeseran ini disebabkan oleh faktor-faktor internal yang berkembang secara nasional. Indeks Gini Kabupaten Wajo sampai saat ini masih berada klasifiksi "Moderat", hal ini disebabkan oleh keseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Yang berarti bahwa percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh SDM yang tinggi sejalan dengan kelompok berpendapatan rendah sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo. Namun demikian upaya tetap harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif protektif *pro poor pro job dan pro invorement*.

Sedangkan perbandingan Indeks Gini Ratio di Kabupaten Wajo jika dibandingkan dengan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 37
Perbandingan Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Indeks Gini Kabupaten Bone	0,383	0,376	0,389
2	Indeks Gini Kabupaten Soppeng	0,406	0,386	0,39
3	Indeks Gini Kabupaten Wajo	0,361	0,375	0,362

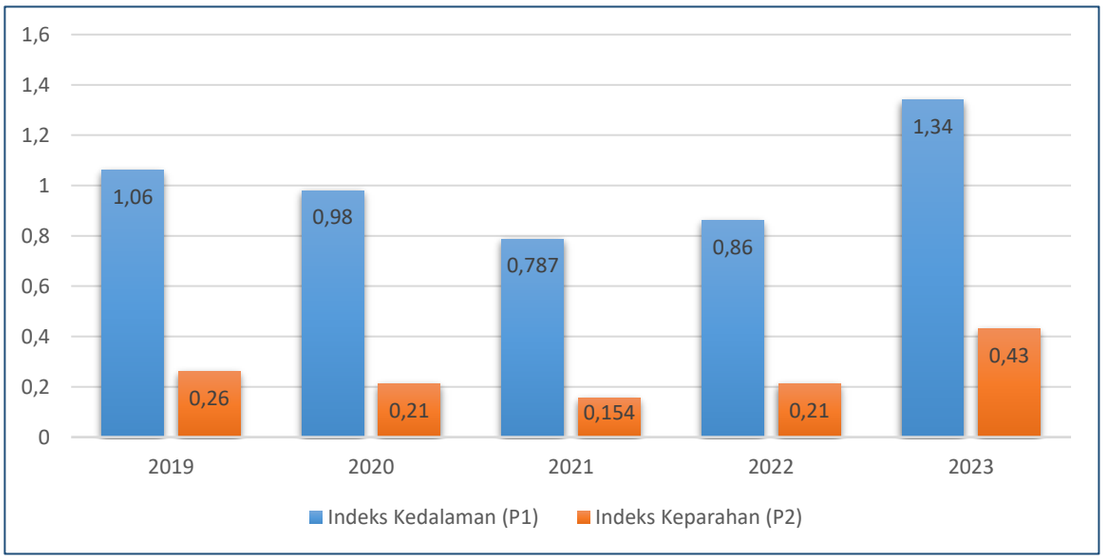
Sumber : BPS Sulawesi Selatan 2024. Diolah

5. Tingkat Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Wajo selama periode 2018.2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan Kabupaten Wajo tercatat sebesar 297.121 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat menjadi 311.017 Rupiah/Kapita/Bulan tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 menjadi sebesar 350.765 Rupiah/Kapita/Bulan dan tahun 2021 menjadi 361.181 Rupiah/Kapita/Bulan. Dan Tahun 2022 menjadi 375.022 Rupiah/Kapita/ Bulan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1.06 di tahun 2019 sedangkan tahun 2020 menjadi 0.98. Kemudian tahun 2021 menurun menjadi 0.79 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 0.86. Tahun 2023 meningkat tajam sebesar 1.34. Sedangkan untuk Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0.26 di tahun 2019 kemudian di tahun berikutnya menurun di tahun 2020 sebesar 0.21 dan tahun 2021 menjadi 0.15. Tahun 2022 meningkat menjadi 0.21, demikian pula di tahun 2023 meningkat drastis sebesar 0.43. Grafik berikut dapat menggambarkan P1 dan P2 Kabupaten Wajo yang berfluktuasi daalam kurun waktu 5 tahun.

Grafik 2. 2
Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman
Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023



Sumber : BPS 2024. Diolah

Sementara itu jika di lihat dari persentasenya selama kurun waktu 2019-2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo cenderung meningkat. Adapun tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo tahun 2019 sebesar 6.91% meningkat menjadi pada tahun 2020 sebesar 6.95% dan tahun 2021 menurun menjadi 6.46% kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 6.57%. Dan di tahun 2023 di angka 6.73%.

Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin cenderung mengalami peningktan di mana pada tahun 2019 sebanyak 29.48 ribu/jiwa, tahun 2020 meningkat menjadi 27.69 ribu/jiwa hingga di tahun 2022 menjadi 26.75 ribu/jiwa dan pada tahun 2023 menjadi 402.351 ribu/jiwa.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo cenderung mengalami peningkatan apalagi bila dibandingkan dengan Kabupaten tetangga bahkan secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Berikut adalah tabel penduduk di atas garis kemiskinan tahun 2019–2023 di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 38
Data Kemiskinan Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/ bulan	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
1	2019	311.017	27.48	6.91	1.06	0.26
2	2020	350.765	27.69	6.95	0.98	0.21
3	2021	361.181	26.22	6.46	0.787	0.154
4	2022	375.022	26.75	6.57	0.86	0.21
5	2023	402.351	27.54	6.73	1.34	0.43

Sumber : BPS 2024 (Diolah)

Adapun perbandingan antara Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39
Perbandingan P1 dan P2 Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2022–2023

No	Kabupaten	Indeks Kedalaman (P1)		Indeks Keparahan (P2)	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kabupaten Wajo	0,86	1,34	0,21	0,43
2	Kabupaten Bone	1,35	1,23	0,26	0,26
3	Kabupaten Soppeng	0,91	1,44	0,21	0,4

Sumber : BPS 2024 (Diolah)

Kemudian perbandingan antara Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) antara Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022-2023, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40
Perbandingan P1 dan P2 Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022–2023

No	Kabupaten	Indeks Kedalaman (P1)		Indeks Keparahan (P2)	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kabupaten Wajo	0,86	1,34	0,21	0,43
2	Prov. Sulawesi Selatan	1,36	1,57	0,32	0,41
3	Nasional	1,56	1,53	0,38	0,38

Sumber : BPS 2024 (Diolah)

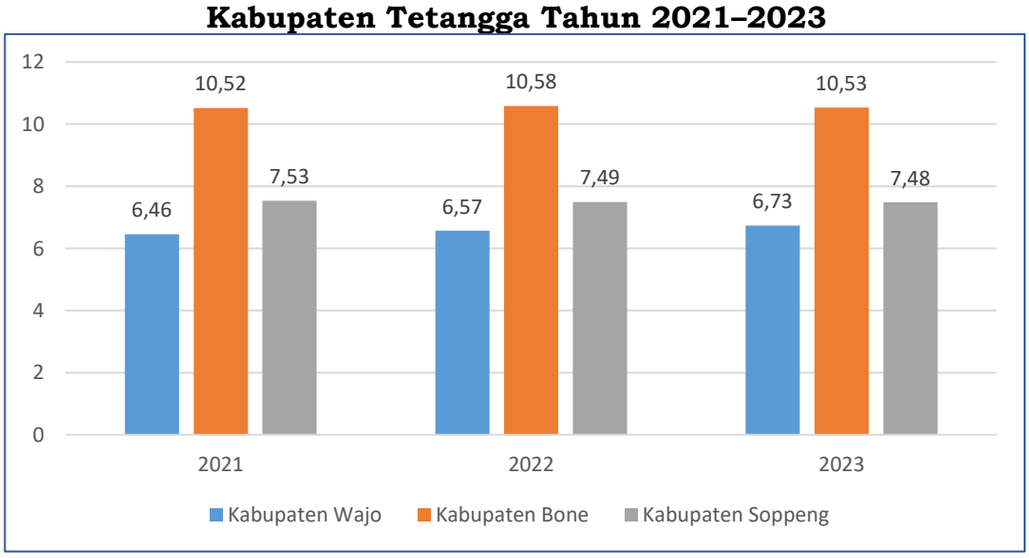
Tabel 2. 41
Penduduk Miskin Di Atas Garis Kemiskinan Kab. Wajo
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Garis Kemiskinan Rph/Kapita/bulan	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan
1	2019	311.017	2.748	6.91	93.09
2	2020	350.765	2.769	6.95	93.05
3	2021	361.181	2.622	6.46	93.54
4	2022	375.022	26.75	6.57	93.43
5	2023	402.351	27.54	6.73	93,27

Sumber : BPS 2024 (Diolah)

Adapun perbandingan Persentase Penduduk Miskin antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023, terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 3
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2021–2023



Sumber : BPS 2024. Diolah

Kemudian perbandingan Persentase Penduduk Miskin antara Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasioanl Tahun 2022-2023, terlihat pada grafik berikut.

Tabel 2. 42
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 – 2023

No	Kabupaten	Indeks Kedalaman (P1)		Indeks Keparahan (P2)	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kabupaten Wajo	0,86	1,34	0,21	0,43
2	Prov. Sulawesi Selatan	1,36	1,57	0,32	0,41

No	Kabupaten	Indeks Kedalaman (P1)		Indeks Keparahan (P2)	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3	Nasional	1,56	1,53	0,38	0,38

Sumber : BPS 2024 (Diolah)

6. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa nilai produksi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Wajo mengalami fluktuatif yaitu terjadi peningkatan dan penurunan dimana pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan tahun 2022 dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4.15%. Kontribusi PDRB dari sektor indusrti tahun 2019–2023 mengalami peningkatan demikian pula jumlah PDRB dari tahun 2019–2023 juga mengalami peningkatan. Pada kontribusi sektor industri terhadap PDRB kabupaten Wajo tahun 2019-2023 yang berfluktuatif.

Kondisi diatas menggambarkan sektor industri di kabupaten Wajo sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di kabupaten Wajo, demikian pula disisi kontribusi sektor industri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) sektor industri merupakan roda penggerak perekonomian dan jasa membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat agar dapat menekan tingginya tingkat pengangguran.

Kondisi ini menunjukkan semakin berperannya sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo. Semakin berperannya sektor industri ini dapat ditunjukkan pula dari capaian kinerja industri. dimana indikator.indikator yang ada cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian Kabupaten Wajo belum memiliki kawasan industri terpadu. Kabupaten Wajo memiliki industri yang bergerak pada sektor makanan dan minuman, industri kerajinan dan Industri Pengolahan Sutera.

Tabel 2. 43
Kontibusi Industri terhadap PDRB Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri	797.71	795.58	853.81	949.09	1,019.27

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah PDRB	19,838.81	19,773.16	22,319.74	24,352.78	24,588.57
3	**Kontribusi sektor industri terhadap PDRB**	**4.02%**	**4.02%**	**3.83%**	**3.90%**	**4.15%**

Sumber : BPS Kab. Wajo Tahun 2024. Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Wajo Tahun 2024

7. Pertumbuhan PDRB Industri

Pertumbuhan industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana jumla unit usaha di tahun 2023 sebanyak 15.928 IKM yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Wajo. Ini menggambarkan semakin besarnya animo Masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di situasi dengan iklim usaha yang semakin membaik Dimana pemerinta dengan regulasi yang ada memberikan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha dan program/visi misi bapak Bupati Wajo menciptakan 10.000 wira usaha baru. Peningkatan pertumbuhan industri ini tidak lepas karena adanya kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 2. 44
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Wajo
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Industri	12,464	13,009	13,877	15,175	15,928
2	**Pertumbuhan Industri**	**0.40%**	**4.18%**	**6.25%**	**8.55%**	**4.72%**

Sumber : Dinas Perindagkop & UKM Kab. Wajo Tahun 2024

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan angka melek huruf dan rata.rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang di lihat dari rata.rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Wajo mencatat angka 69.05 dan kemudian meningkat menjadi 73.56 pada tahun 2023.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilllihan.pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2. 45
IPM Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Komponen		2019	2020	2021	2022	2023
1	**Kesehatan**						
	a.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67.17	67.35	67.48	67.82	73.25
2	**Pendidikan**						
	a.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.13	13.14	13.15	13.30	13.31
	b.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6.8	6.81	7.05	7.16	7.45
3	**Pengeluaran Paritas Daya Beli (PPD)**		12,399	12,386	12,505	12,729	13,192
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			**69.05**	**69.15**	**69.62**	**70.26**	**73.56**

Sumber :BPS. 2024. Diolah

Meskipun IPM Kabupaten Wajo terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun namun masih di bawah rata-rata Provinsi maupun Nasional. Ini dapat terlihat pada tebel berikut.

Tabel 2.46
Perbandingan IPM Kabupaten Wajo dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	69.05	69.15	69.15	70.26	73.56
Provinsi SulSel	71.66	71.93	72.24	72.82	74.6
Nasional	71.92	71.94	72.29	72.91	74.39

Sumber : BPS Kabupaten Wajo. 2024

Namun IPM Kabupaten Wajo masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah setara yang juga merupakan kabupaten tetangga. Ini dapat terlihat pada tebel berikut.

Tabel 2. 47
Perbandingan IPM Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Tetangga
Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	69.05	69.15	69.62	70.26	73.56
Kabupaten Bone	65.67	66.06	66.4	67.01	70.25
Kabupaten Soppeng	68.26	68.67	68.99	69.7	71.94

Sumber : BPS Kabupaten Wajo. 2024

9. Angka Melek Huruf (AMH)

Pada elemen pendidikan angka melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Angka melek huruf menurut Badan Pusat Statistik Indonesia merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari.hari. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin besar nilai angka melek huruf suatu kabupaten/kota maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis.

Selain untuk menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan indikator angka melek huruf juga menjadi dasar guna meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi serta penggalian informasi.
Angka Melek Huruf Kabupaten Wajo selama kurun waktu tahun 2018– 2023 senantiasa mengalami fluktuasi tahun 2019 sebesar 99.86% dan stagnan di tahun 2020, tahun 2021 menurun menjadi 90.44 kemudian meningkat menjadi 91.88% pada tahun 2022 dan tahun 2023 menurun menjadi 90.67%. Berikut tabel angka melek huruf di tahun 2018-2023 di Kabupaten Wajo :

Tabel 2. 48
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melek Huruf (%)	99.86	99.86	90.44	91.88	90.67

Sumber : BPS Kabupaten Wajo. 2024

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa hampir sebagian besar penduduk Kabupaten Wajo dapat membaca dan menulis kondisi ini dikarenakan fokusnya Pemerintah Kabupaten Wajo dalam pelayanan hak dasar khususnya bidang pendidikan dan adanya program pendidikan gratis

sehingga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Penurunan angka melek huruf pada tahun 2023 yaitu 90.67% menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Wajo untuk semakin meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan Pendidikan ke depan melalui program dan kegiatan khususnya pendidikan informal guna meningkatkan kemampuan membaca dan manusia penduduk Kabupaten Wajo.

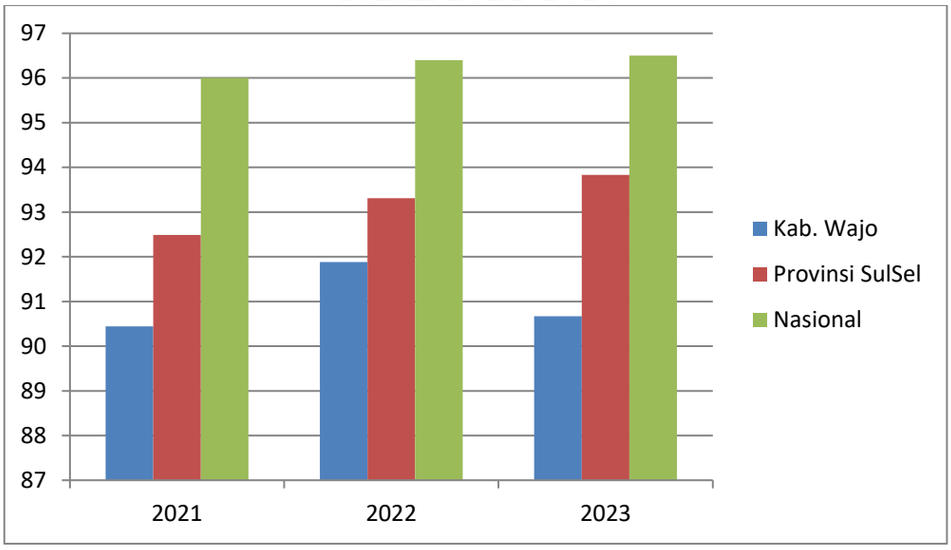
Grafik 2.4
Perbandingan Angka Melek Huruf
Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2022–2023



Sumber : BPS Kabupaten Wajo. 2024

Pada grafik diatas terlihat perbandingan Angka Melek huruf antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten tetangga Tahun 2022-2023. Kemudian pada grafik berikut terlihat perbandingan Angka Melek huruf antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten tetangga Tahun 2021-2023.

Grafik 2. 5
Perbandingan Angka Melek Huruf
Kab. Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021–2023



10. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Wajo di mana selama kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Dapat terlihat di tahun 2019 rata-rata Lama Sekolah yaitu 6.80 daan di tahun 2023 meningkat menjadi 7.45, dengan rerata pertumbuhan di angka 7.05. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel rata-rata lama sekolah tahun 2019-2023 di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 49
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah
1	2019	6.80
2	2020	6.81
3	2021	7.05
4	2022	7.16
5	2023	7.45
Rerata Pertumbuhan		**7.05**

Sumber : BPS Kabupaten Wajo. 2024. Diolah

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wajo ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Wajo semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya

manusia dan adanya program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Wajo yang memberikan biaya pendidikan gratis sampai di tingkat SLTP yang memacu masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dan mengurangi beban biaya pendidikan orang tua.

Adapun perbandingan rata-rata lama sekolah antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten tetangga Tahun 2019-2023, dapat terlihat pada tabel berikut.

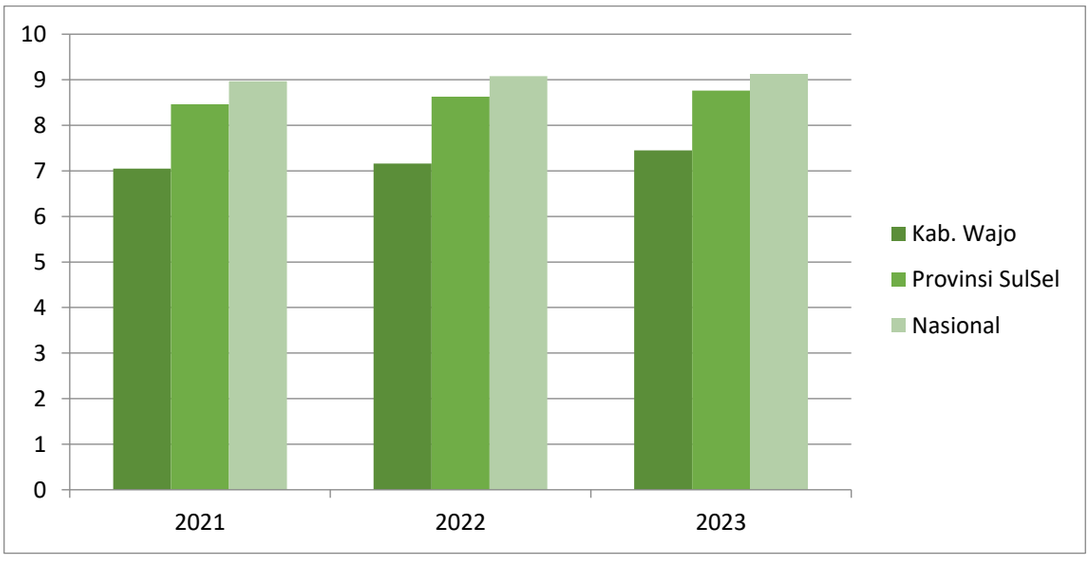
Tabel 2. 50
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Wajo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2019–2023

No	Rata-Rata Lama Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Wajo	6,8	6,81	7,05	7,16	7,45
2	Kabupaten Bone	6,98	7,15	7,23	7,36	7,54
3	Kabupaten Soppeng	7,74	7,81	7,82	7,96	8,27

Sumber : BPS 2024. Diolah

Kemudian pada grafik berikut tergambar perbandingan rata-rata lama sekolah antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten tetangga Tahun 2021-2023.

Grafik 2. 6
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Wajo dengan Provinsi Sul-Sel dan Nasional Tahun 2021–2023



Sumber : BPS 2024. Diolah

11. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah akan berpengaruh pada HLS walaupun besarannya tidak signifikan.

Tabel 2. 51
Angka Harapan Sekolah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah
1	2019	13.13
2	2020	13.14
3	2021	13.15
4	2022	13.30
5	2023	13.31
Rerata Pertumbuhan		**13.21**

Sumber : BPS Kabupaten Wajo. 2024. Diolah

Pada periode tahun 2019-2023 tren Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 sebesar 13.13 dan tahun 2023 menjadi 13.31. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wajo tumbuh sebesar 13.21. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten tetangga Tahun 2019-2023, dapat terlihat pada tabel berikut.

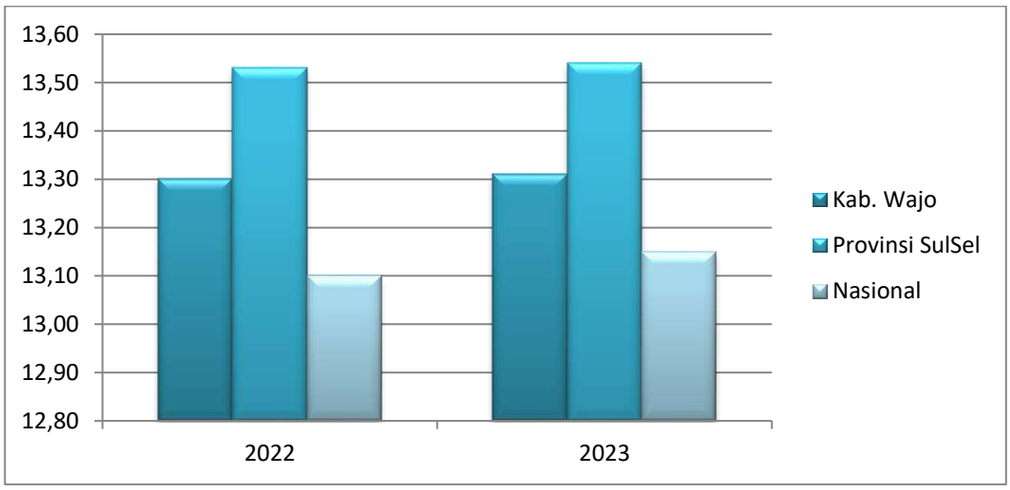
Tabel 2. 52
Perbandingan Angka Harapan Sekolah Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023

No	Harapan Lama Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Wajo	13,13	13,14	13,15	13,30	13,31
2	Kabupaten Bone	12,8	12,88	12,98	12,99	13,00
3	Kabupaten Soppeng	12,73	12,9	13,05	13,2	13,21

Sumber : BPS 2024. Diolah

Adapun perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah antara Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional Tahun 2022-2023, dapat terlihat pada tabel berikut.

Grafik 2. 7
Perbandingan Angka Harapan Sekolah Kab. Wajo dengan Provinsi Sul-Sel dan Nasional Tahun 2022–2023



Sumber : BPS 2024. Diolah

12. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi budaya dan pendidikan. Peran sektor kesehatan memengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan peningkatan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan yang baik.

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dari Tabel berikut terlihat bahwa terjadi peningkatan angka harapan hidup dari Tahun 2020–2022 berdasarkan data puslikasi dari BPS yang mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

Tabel 2. 53
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Indikator Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Usia Harapan Hidup (Thn)	67.17	67.35	67.48	67.82	73.25

Sumber : BPS Silawesi Selatan 2024.

Semakin meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang semakin baik yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan adanya berbagai jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan BPJS Kesehatan.

Akan tetapi dengan adanya peningkatan angka usia harapan hidup maka berarti juga harus meningkatkan pelayanan dan penjaminan hidup yang layak untuk lansia dan panti jompo sehingga memberikan kemungkinan para lansia untuk tetap beraktivitas dan mendapat pelayanan yang baik dan ke depan diharapkan menjadi kota yang ramah untuk lansia.

Dalam meningkatkan angka usia harapan hidup diperlukan tenaga medis dan kesehatan lainnya seperti angka kesakitan yang menurun akses ke sarana kesehatan semakin dekat akses tempat tinggal yang layak huni kondisi air bersih yang baik serta meningkatnya pola hidup sehat masyarakat.

Perbandingan angka usia harapan hidup antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten tetangga Tahun 2021-2023, dapat terlihat pada tabel berikut.

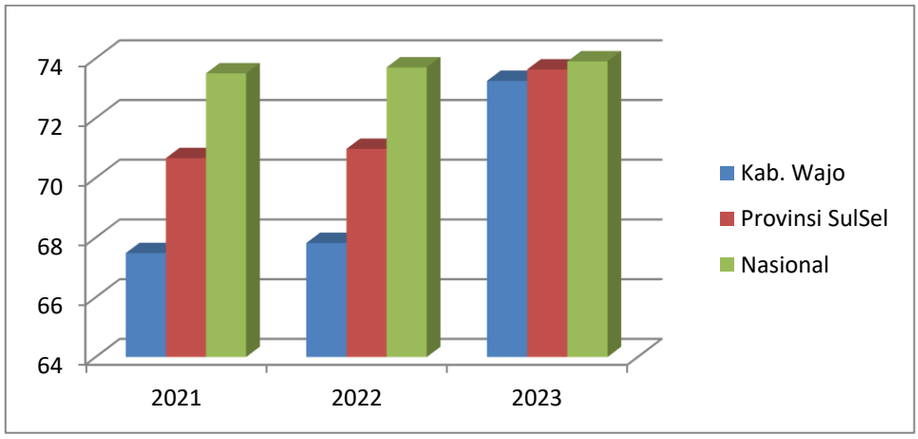
Tabel 2. 54
Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2021–2023

No	Angka Usia Harapan Hidup	2021	2022	2023
1	Kabupaten Wajo	67,48	67,82	73,25
2	Kabupaten Bone	67,21	67,57	73,2
3	Kabupaten Soppeng	69,81	70,2	73,47

Sumber : BPS , 2024. Diolah.

Adapun perbandingan angka usia harapan hidup antara Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023, dapat terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 8
Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kab. Wajo dengan Provinsi Sul-Sel dan Nasional Tahun 2021–2023



Sumber : BPS , 2024. Diolah.

13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dalam mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan publikasi ILO *(International Labour Organization)* penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih seiring dengan program wajib belajar 9 tahun.

Selanjutnya tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Tingkat partisipasi umum yaitu jumlah angkatan kerja dibagi seluruh penduduk

berumur 10 tahun keatas. Berikut data Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Wajo selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 55
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2019	304.739	60.32
2020	322.85	63.13
2021	325.258	61.8
2022	327.619	59.58
2023	277.513	71,74

Sumber : BPS & Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Wajo. 2024

Perbandingan Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten tetangga Tahun 2021-2023, dapat terlihat pada tabel berikut.

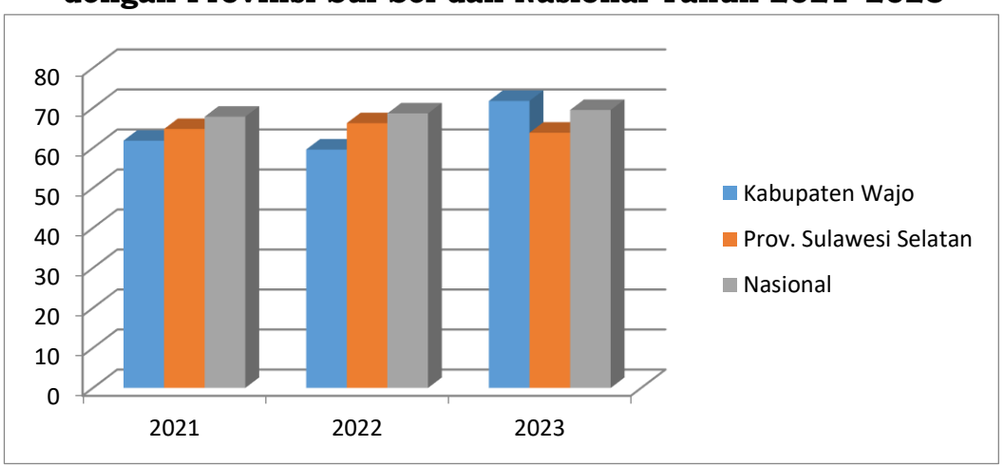
Tabel 2. 56
Perbandingan TPAK Kabupaten Wajo dengan
Kabupaten Tetangga Tahun 2021–2023

Uraian	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	61,8	59,58	71,74
Kabupaten Bone	65,7	67,48	62,69
Kabupaten Soppeng	58,94	61,90	59,44

Sumber : BPS, 2024. Diolah

Adapun perbandingan Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) antara Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023, dapat terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 9
Perbandingan Perbandingan TPAK Kab. Wajo
dengan Provinsi Sul-Sel dan Nasional Tahun 2021–2023



Sumber : BPS, 2024. Diolah

14. Tingkat Pengangguran Terbuka

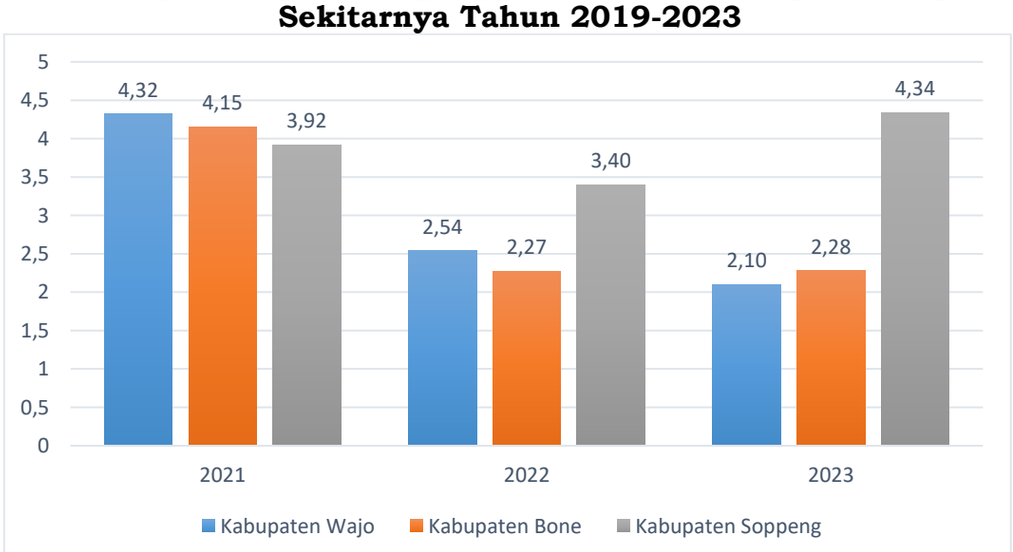
Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Melihat tabel diatas dapat diketahui Angka Pengangguran di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 hanya 3,18%, namun di tahun 2020 dan 2021 naik menjadi 4,33% hal ini karena efek dari menyebarnya virus *Covid-19*. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis menjadi 2,54% dan tahun 2023 menjadi 2,10%.

Tabel 2. 57
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wajo
Tahun 2019–2023

Wilayah	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	Orang	L	2,815	6,277	5,742	3,552	1,616
		P	3,185	2,944	3,323	1,540	2,567
		T	6,000	9,221	9,065	5,092	4,183
Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	L	117.026	131.259	131.315	131.601	124.074
		P	73.059	81.778	78.816	68.674	75.003
		T	190.085	213.037	210.131	200.275	199.077
Tingkat Pengangguran Terbuka	**%**	L	2.41%	4.78%	4.37%	2.70%	1.30%
		P	4.36%	3.60%	4.22%	2.24%	3.42%
		T	**3.18%**	**4.33%**	**4.32%**	**2.54%**	**2.10%**

Sumber :BPS & Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Wajo. 2024

Grafik 2. 10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2019-2023



Sumber : BPS 2024. Diolah

Tabel 2. 58
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wajo
Tahun 2019–2023

Uraian	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	4,32	2,54	2,10
Prov. Sulawesi Selatan	5,72	4,51	4,33
Nasional	6,49	5,86	5,32

Sumber :BPS, 2024

15. Persentase Penduduk yang Bekerja

Persentase penduduk yang bekerja mengalami penurunan dimana tahun 2019 sebesar 96.70% meningkat menjadi 97.90% di tahun 2023. Berikut data persentase penduduk yang bekerja Kabupaten Wajo selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 59
Persentase Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Tahun	Uraian		
		Penduduk yang bekerja	Angkatan kerja	Persentase penduduk yang bekerja
1	2019	183.804	190.085	**96.70%**
2	2020	203.816	213.037	**95.67%**
3	2021	200.994	210.059	**95.68%**
4	2022	195.183	200.275	**97.46%**
5	2023	194.894	199.077	**97.90%**

Sumber : Distenakertrans Kab.Wajo & Wajo Dalam Angka Tahun 2024

16. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan evaluasi hasil pembangunan memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Dari Tabel dilihat tahun 2020 sebesar 3.94% mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 70.84% karena tingkat perekonomian tenaga kerja mengalami penurunan secara signifikan.

Tabel 2. 60
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja
Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produk Domestik Bruto (PDB)		12,708.31 m	13,569.28 m	13,891.79 m	14,090.79 m

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah tenaga kerja		322.85	325.258	327.619	19.891
3	**Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja**	**n/a**	**3.94%**	**4.17%**	**4.24%**	**70.84%**

Sumber : Distenakertrans Kab.Wajo Tahun 2024

17. Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri (BS) pekerja bebas (PB) dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator yang digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal.

Tabel 2. 61
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (%)
Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	87.735	85.272	89.34	88.798	111.683
2	Total kesempatan kerja	190.09	213.037	210.059	200.275	204.182
3	**Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja**	**46.16**	**40.03**	**42.53**	**44.34**	**54,70**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Wajo Tahun 2024

18. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala

sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja di mana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik lebih efisien dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Tabel 2. 62
Indeks Kepuasan Masyarakat Kab. Wajo Tahun 2019–2023

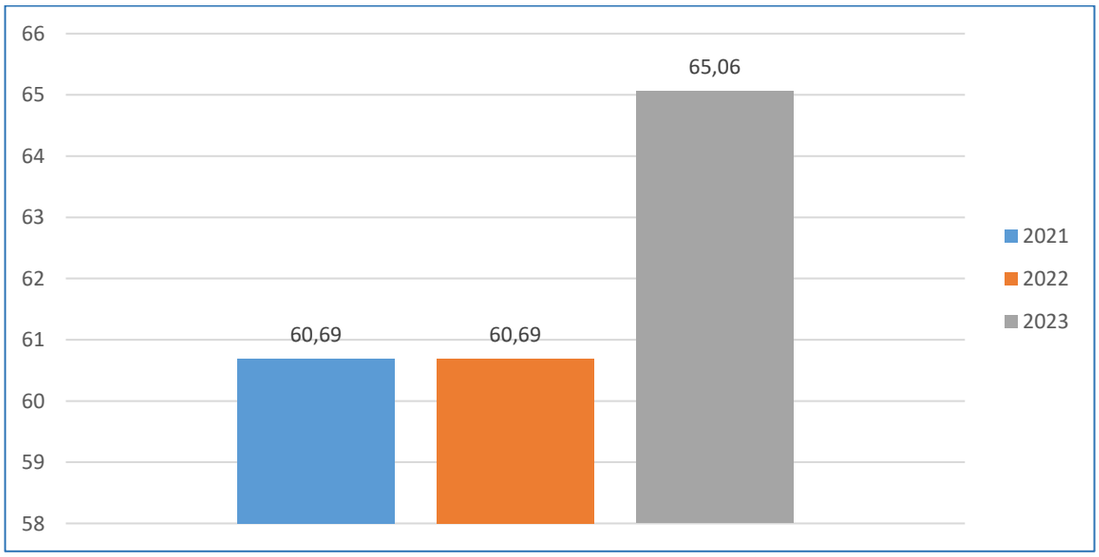
No	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	80.33	80,49	80,49	82,15

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Wajo, Tahun 2024
2022 : Angka sementara*

19. Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance, yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke–21. Dan dalam perkembangannya, Indeks Refoemasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wajo selama kurun waktu Tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Tahun 2021-2023 berada pada kategori B dengan nilai 65.06. Hal ini dapat terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 11
Indeks Reformasi Birokrasi



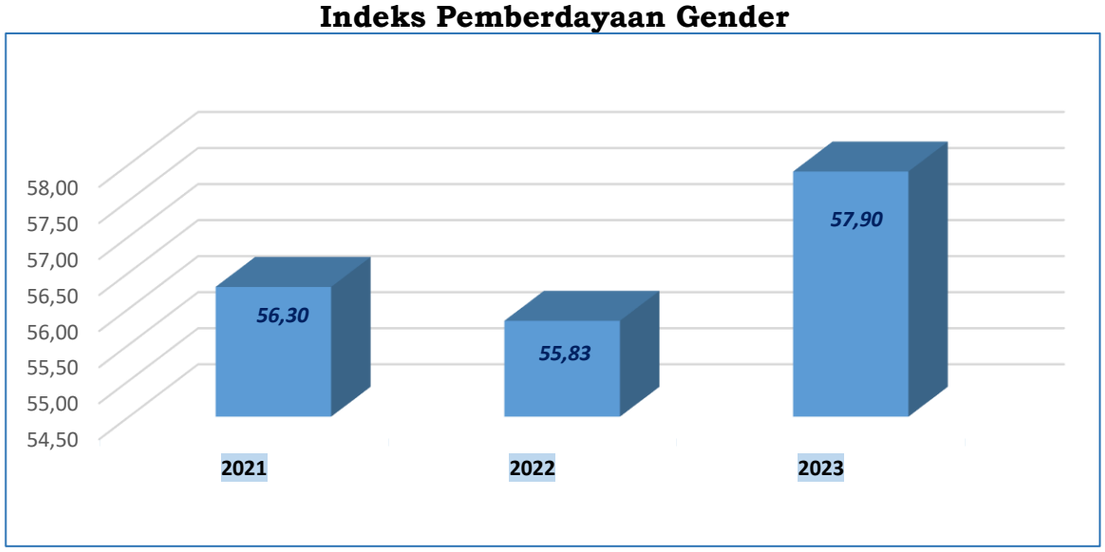
Sumber : Bagian Organisasi Kab. Wajo Tahun 2024

20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender *(Gender Empowerment Index)* yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki.laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Dimana diharapkan tujuan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan dan meningkatkan peran dan kemandirian suatu lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Pada tahun 2021 capaian IDG Kabupaten Wajo sebesar 56.30 menurun di tahun 2022 menjadi 55.83 dan mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 57.90. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin

menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Perkembangan Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tiap tahunnya dapat tergambar melalui grafik berikut :

Grafik 2. 12
Indeks Pemberdayaan Gender

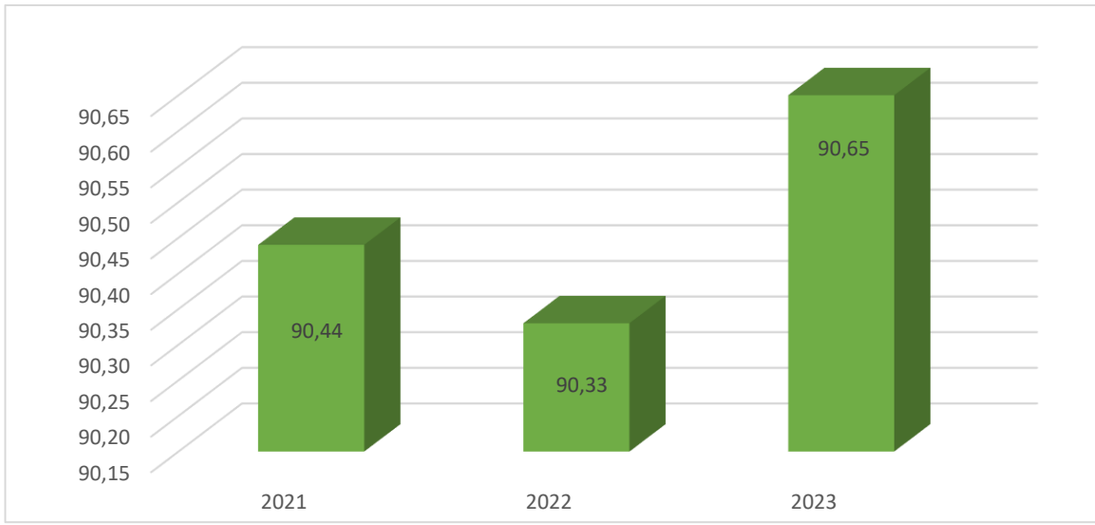


Sumber : BPS Tahun 2024

21. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu harapan hidup. tingkat pendidikan. dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan sehingga IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : (i) Umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*. (ii) Pengetahuan *(knowledge)*. dan (iii) Standar hidup layak *(decent standard of living)*. IPG di Kabupaten Wajo sebesar 90.44 di tahun 2021 dan 90.33 di tahun 2022, ini diartikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Wajo mendekati setara, interpretasinya adalah semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100. maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Wajo tiap tahunnya dapat tergambar melalui grafik berikut :

Grafik 2. 13
Indeks Pembangunan Gender



Sumber : BPS Tahun 2024

2.1.3 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah melalui 4 Indikator Tujuan dan 11 Indikator Sasaran yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Wajo. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaaran pembangunan daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan tahun selama 5 tahun. Berikut capaian IKU Kabupaten Wajo dan capaian tahun 2023.

Tabel 2. 63
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Wajo Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi		Persentase Capaian Tahun 2023
				Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai SAKIP	Angka/Predikat	70.11-75.00 (BB)	62.66	62.99	84%
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.31-3.50	2.86	2.67	76%
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	72	65	78.162	109%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi		Persentase Capaian Tahun 2023
				Tahun 2022	Tahun 2023	
4	Skor Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	Angka/Predikat	3.66-3.80/Tinggi	2.55	2.48	65%
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.61-3.00	2.51	2.67	89%
6	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,696-0,711	0.697	0.706	99%
7	Cakupan Daya Saing Infrsatruktur Daerah	Persentase	76.83	87.76	82.12	107%
8	Indeks Pendidikan	Indeks	59.37-59.46	60.81	61.81	104%
9	Indeks Kesehatan	Indeks	73.41-73.70	80.95	81.49	137%
10	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	12.554-12.609	12.505	12.729	101%
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	90.51-90.62	55.83	57.90	64%
12	Indeks Ketentraman, Ketertiban dan Kerukunan	Indeks	2.01-2.10	2.01	2.01	96%
13	Indeks Kualitas Lingkungan hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	61.91-62.20	64.34	62.58	101%
14	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4.35-5.79	2,38	1.43	25%
15	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	49.62	63.43	63.61	128%
16	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84.5	85.46	84.36	100%
17	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5.58	6,57	6.73	121%
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4.14	2.54	2.10	51%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Tahun 2024. Diolah

2.1.4 Capaian Indikator Makro Ekonomi

Indikator makro pembanguan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. pemerintah pusat. pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor. urusan. dan bidang pemerintahan. Adapun capaian indikator makro ekonomi pembangunan Kabupaten Wajo dapat terlihta pada tabel berikut :

Tabel 2. 64
Capaian Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

No	Indikator	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.06	-1.17	6.77	2.38	1.43	BPS
2	Laju inflasi (%)	1,64	1,89	2,26	5,52	2,84	BPS
3	Penduduk Miskin (%)	6,91	6,95	6,46	6,57	6,73	BPS
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3.18	4.33	4.32	2.54	2.10	BPS / DISNAKERTRANS
5	Indeks Pembangunan Manusia	69.05	69.15	69.62	70.26	73.56	BPS
6	Indeks Gini	0,34	0.355	0.361	0.375	0.362	BPS

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Tahun 2024. Diolah

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wajo dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.1.5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Layanan urusan wajib diarahkan pada 6 (enam) urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan pendidikan urusan kesehatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan sosial.

2.1.5.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal nonformal dan informal. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Wajo pada tahun 2018 .2022 mengalami fluktuasi dimana tahun 2018 PAUD sebesar 56.04% meningkat menjadi 74.99% pada tahun 2019. Kemudian tahun 2020 menurun menjadi 60.11 kemudian meningkat lagi ditahun 2020 sebesar 74.02% hingga tahun 2021 meningkat lagi sebesar 75.33%. Peningkatan PAUD dari tahun 2020 ke tahun 2022 terjadi karena jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak yang juga terus meningkat. Untuk lebih lengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 65
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk yang Bersekolah pada Jenjang TK/RA/ Penitipan Anak	Orang	9.585	7.839	8.954	9.233	13.412
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Orang	12.782	13.040	12.096	12.256	12.113
3	**Pendidikan Anak Usia Dini**	**%**	**74.99 %**	**60.11 %**	**74.02 %**	**75.33 %**	**110,72 %**

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan 2024

2. Tenaga Pendidik dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Untuk menunjang pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Wajo, berikut data guru dan sarana penunjang pada PAUD di tiap Kecamatan se-Kabupaten Wajo Rahun 2022-2023.

Tabel 2. 66
Jumlah Tenaga Pendidik dan Sarana Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Wajo Tahun 2022-2023

No	KECAMATAN	GURU		SARANA	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kecamatan Tempe	117	150	123	676
2	Kecamatan Sabbangparu	40	53	40	273
3	Kecamatan Pammana	57	78	56	56
4	Kecamatan Bola	44	69	41	250
5	Kecamatan Takkalalla	29	43	29	162
6	Kecamatan Sajoanging	44	42	51	246

No	KECAMATAN	GURU		SARANA	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
7	Kecamatan Majauleng	57	57	65	372
8	Kecamatan Tanasitolo	62	66	67	345
9	Kecamatan Belawa	53	55	57	296
10	Kecamatan Maniangpajo	28	62	29	265
11	Kecamatan Keera	25	41	28	175
12	Kecamatan Pitumpanua	54	63	70	344
13	Kecamatan Penrang	21	36	19	157
14	Kecamatan Gilireng	42	45	45	191
JUMLAH		**673**	**860**	**720**	**3808**

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan 2024

3. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS yaitu anak usia sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah menengah atas sederajat (7-18 tahun) yang:

a. Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan SMA/MA sederajat;
b. Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di jenjang SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat, dan SMA/MA sederajat;
c. Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat);

Sumber data terkait Anak Tidak Sekolah dapat dilihat secara agregat di setiap sektor berdasarkan kelompok masyarakat seperti penerima bantuan sosial. Namun, data tersebut belum dapat menggambarkan secara menyeluruh karena terbatas pada kelompok tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama UNICEF telah mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Desa (SID), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan UNICEF dalam rangka Penanganan Anak Tidak Sekolah memperkenalkan dan memberikan pendampingan ke kabupaten terkait pengumpulan data Anak Tidak Sekolah melalui aplikasi SIPBM tersebut. Menindaklanjuti kerjasama ini,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo melakukan pendataan melalui Korwil Kabupaten Wajo di 14 Kecamatan. Dari pendataan tersebut ditemukan bahwa anak usia 7-18 tahun terdapat 40 orang Anak Tidak Sekolah (ATS), usia 13-15 tahun terdapat 209 orang dan usia 16-18 tahun terdapat 164 orang ATS, berikut dapat terlihat lebih rinci.

Tabel 2. 67
Data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Wajo Tahun 2023

No	KECAMATAN	ATS (ANAK TIDAK SEKOLAH)		
		Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun	Usia 16-18 Tahun
1	PENRANG	0	0	0
2	MANIANGPAJO	5	27	33
3	SAJOANGING	5	36	17
4	KEERA	1	30	4
5	BOLA	2	0	0
6	TAKKALALLA	1	0	0
7	SABBANGPARU	2	3	5
8	BELAWA	4	73	68
9	TANASITOLO	3	4	4
10	PITUMPANUA	9	16	25
11	PAMMANA	6	17	6
12	MAJAULENG	2	3	2
13	GILIRENG	0	0	0
14	TEMPE	0	0	0
	TOTAL	**40**	**209**	**164**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Tahun 2024

Adapun gambaran Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo, yang terdata pada 14 Kecamatan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 68
Data Putus Sekolah Kabupaten Wajo tahun 2023

No	KECAMATAN	APS (ANAK PUTUS SEKOLAH)		
		Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun	Usia 16-18 Tahun
1	PENRANG	8	1	0
2	MANIANGPAJO	10	29	26
3	SAJOANGING	2	4	2
4	KEERA	13	12	4
5	BOLA	21	57	48
6	TAKKALALLA	14	32	0
7	SABBANGPARU	8	31	12
8	BELAWA	4	25	58
9	TANASITOLO	31	103	30
10	PITUMPANUA	40	146	122
11	PAMMANA	16	119	110
12	MAJAULENG	13	88	59

No	KECAMATAN	APS (ANAK PUTUS SEKOLAH)		
		Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun	Usia 16-18 Tahun
13	GILIRENG	0	12	0
14	TEMPE	3	6	2
	TOTAL	**183**	**665**	**473**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Tahun 2024

Dari data-data tersebut di atas dapat terlihat bahwa hampir semua kecamatan di Kabupaten Wajo pada tahun 20230 ini memiliki Anak Putus Sekolah (APS). Usia 7-14 tahun terdapat 183 orang APS, usia 13-15 terdapat dan usia 16-18 tahun sebanyak 473 orang APS.

Hal ini tentunya menjadi perhatian Pemda Kabupaten Wajo dan dengan data-data tersebut diatas, maka intervensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) akan mudah dilakukan dan tepat sasaran.

Dalam upaya menurunkan jumlah ATS, Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) memberikan arah strategi pendekatan dan kelompok ATS dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), yang meliputi:

a. Strategi pencegahan diarahkan untuk memastikan agar Anak yang Beresiko Putus Sekolah tetap bersekolah sampai tuntas Pendidikan Dasar dan Menengah 12 Tahun.
b. Strategi Intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan baik formal maupun nonformal.

Strategi Intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan atau pelatihan yang relevan. Proses pendampingan ATS dapat dilakukan melalui program retrieval dan sangat diperlukan untuk memastikan agar ATS dapat melalui proses transisinya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang akan diikuti. Terkait dengan kelompok sasaran ATS, Kabupaten Wajo menyepakati bahwa seluruh kelompok ATS yang termasuk dalam 6 (enam) kelompok ATS prioritas akan diintervensi sesuai dengan kebutuhannya. Strategi ini dipetakan dalam kebijakan pemerintah, kemudian diturunkan pada program kegiatan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang berwenang. Pelaksanaan Program kegiatan ini diharapkan mampu untuk menurunkan jumlah ATS di Kabupaten Wajo.

4. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu yang digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan sehingga APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah. tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Untuk jenjang pendidikan SD/MI tahun 2021 target APK SD/MI =100% dan pada tahun 2022 tercapai APK SD=106%. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A diatas 100% menunjukkan bahwa jumlah siswa SD/MI di Kabupaten Wajo yang berjumlah 39.719. mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1240 siswa apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 40.959 orang. Angka Partisipasi Kasar SD/MI lebih dari 100% menunjukkan jumlah siswa jenjang SD/MI yang bersekolah di Kabupaten Wajo jumlahnya lebih besar daripada jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Terindikasi terdapat penduduk diluar daripada usia 7-12 tahun lebih cepat atau lebih lambat menyelesaikan pendidikan diluar daripada umur seharusnya dan atau tambahan dari luar kabupaten maupun luar kota untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Wajo dengan selisih tambahan sebanyak 2.281 orang. sebagai kesimpulan bahwa untuk APK SD/MI sendiri terlaksana dengan baik. hal ini sejalan dengan diimbanginya antara jumlah siswa yang bersekolah melebihi daripada angka usia 7.12 tahun yang mana menunjukkan antusias orangtua untuk menyekolahkan anaknya dan daripada jumlah tersebut mampu mendapatkan angka 106% atau bertahan dari tahun sebelumnya dengan presentase 101%.

Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs. dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Wajo.

untuk jenjang SMP sederajat belum mampu mencapai 100% karena selain masih terdapat anak usia 13.15 tahun yang melanjutkan ke pondok pesantren. sekolah diluar kota. lebih memilih bekerja atau tidak sekolah. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Wajo. untuk jenjang SMP sederajat belum mampu mencapai 100% karena selain masih terdapat anak usia 13.15 tahun yang melanjutkan ke pondok pesantren. sekolah diluar kota. lebih memilih bekerja atau tidak sekolah.

Adapun pengukuran data Indikator kinerja APK jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs secara lengkapnya pada 5 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 69
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar
Tahun 2019–2023

No	Uraian	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	Orang	L	17.062	16.377	20.311	20.372	20665
			P	15.944	15.228	20.648	19.347	19.905
			T	33.006	31.605	40.959	39.719	40.570
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	Orang	L	19.934	18.620	20.884	18.684	17.766
			P	18.848	17.804	19.676	18.275	16.785
			T	38.782	36.424	40.560	36.959	34.551
3	**APK SD / MI**	**%**	L	**86%**	**88%**	**97%**	**109%**	**116%**
			P	**85%**	**86%**	**105%**	**106%**	**119%**
			T	**85%**	**87%**	**101%**	**107%**	**117%**
1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	L	6.105	5.515	7.761	9.010	7927
			P	5.843	5.864	8.111	8.171	7893
			T	11.948	11.379	15.872	17.181	15.820
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	Orang	L	9.863	9.182	10.037	9.085	7.716
			P	9.303	9.357	9.458	9.063	6.611
			T	19.166	18.539	19.495	18.148	14.327
3	**APK SMP / MTs**	**%**	L	62%	60%	77%	99%	103%
			P	63%	63%	86%	90%	119%
			T	62%	61%	81%	95%	110%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Untuk meningkatkan APK SD/MI dan SMP/MTs terutama untuk SD dan SMP yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo berupaya untuk meningkatkan mutu baik dari sarana prasarana. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta

membangun sistem pendidikan yang lebih baik antara lain dengan menerapkan ekstra keagamaan. penguatan pembinaan karakter siswa dan memberikan informasi. sosialisasi dan fasilitasi untuk melanjutkan ke jalur pendidikan non formal yaitu melelaui pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B.

5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator yang mengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang berada pada jenjang pendidikan tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkan berbeda dengan angka rata.rata lama sekolah jika angka rata.rata lama sekolah menunjukkan berapa lama waktu suatu masyarakat bersekolah pada suatu kabupaten/kota. Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan. Angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Wajo mulai dari SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA mengalami fluktuatif.

Tabel 2. 70
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**					
1.1.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	6.449	6.700	6.773	6.562	40.570
1.3.	**Angka ditamatkan SD/MI**	**6.449**	**6.700**	**6.773**	**6.562**	**10,01**
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah ditamatkan pada jenjang SMP/MTs	6.060	6.090	6.107	5.854	34.551
2.3.	**Angka ditamatkan SMP/MTs (1/2)**	**6.060**	**6.090**	**6.107**	**5.854**	**8,5**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Angka ditamatkan di jenjang SD/MI pada tahun 2019-2023 mengalami tahun 2019 menurun sebesar 6.477 orang dan meningkat 6.562 ditahun 2022. Sedang angka ditamatkan pada jenjang SMP/MTs juga mengalami hal yang sama dimana pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni menurun sebesar 3.980 dimana pada tahun 2018 menjadi 5.854 pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 5.854.

6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Terlaksananya APM SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Wajo. antara lain terjadi karena selain karena adanya penduduk usia 7,12 tahun yang bersekolah di luar Kabupaten Wajo. juga terdapat penduduk usia 7,12 tahun yang sudah sekolah di SMP/MTs atau masih sekolah di TK. atau anak SD yang masih berusia kurang dari 7 tahun. Hal ini akan berdampak pada jenjang.jenajnag selanjutnya. dimana anak.anak yang mulai bersekolah lebih awal dari usia seharusnya otomatis akan semakin bertambah banyak juga. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anaknya lebih awal dari usia seharusnya juga relatif besar.

Untuk meningkatkan APM SD/MI dan SMP/MTs terutama untuk SD dan SMP yang menjadi kewenangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo berupaya untuk memberikan sosisalisasi kepada sekolah melaui wali murid agar menyekolahkan anaknya sesuai dengan jenjang usia sekolahnya. Selain juga dalam aplikasi Dapodik sudah terdapat warning untuk siswa baru yang mendaftar di bawah usia seharusnya. Apabila terdapat siswa baru yang mendaftar di bawah usia seharusnya maka harus melampirkan rekomendasi dari psikolog atau dewan guru. Selain itu perlu adanya peran dari pemerintah Desa sebagai pemberi pelayanan yang terdekat dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada warganya akan manfaaat sekolah sesuai dengan jenjang usia sekolahnya. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan APM Sekolah di Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 71
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidkan Dasar Kabupaten Wajo
Tahun 2019 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	Satuan		2019	2020	2021	2022	2022	2023
1	**SD/MI**								
1.1.	Jumlah siswa usia 7 -12 Tahun dijenjang SD/MI Paket A	Orang	L	17.062	16.558	20.325	20.374	17.626	18383
			P	15.944	15.531	20.660	19.347	16.831	17686
			T	33.006	32.089	40.985	39.721	34.457	36.069
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	Orang	L	19.934	18.620	20.884	18.684	18.684	17.766
			P	18.848	17.804	19.676	18.275	18.275	16.785
			T	38.782	36.424	40.560	36.959	36.959	34.551
1.3.	APM SD / MI	**%**	L	**85,59 %**	**88,93 %**	**97,32%**	**109,05 %**	**94,34%**	**103,47 %**
			P	**84,59 %**	**87,23 %**	**105,00 %**	**105,87 %**	**92,10%**	**105,37 %**
			T	**85,11 %**	**88,10 %**	**101,05 %**	**107,47 %**	**93,23%**	**104,39 %**
2	**SMP/MTs**								
2.1.	Jumlah siswa usia 13 -15 Tahun dijenjang SMP/MTs Paket B	Orang	L	6.137	5.515	7.763	9.031	6.233	5107
			P	5.863	5.864	8.111	8.189	5.624	5194
			T	12.000	11.379	15.874	17.220	11.857	10.301
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	Orang	L	9.863	9.182	10.037	9.085	9.085	7.716
			P	9.303	9.357	9.458	9.063	9.063	6.611
			T	19.166	18.539	19.495	18.148	18.148	14.327
2.3.	**APM SMP / MTs**	**%**	L	**62%**	**60%**	**77%**	**99%**	**69%**	**66%**
			P	**63%**	**63%**	**86%**	**90%**	**62%**	**79%**
			T	**63%**	**61%**	**81,43%**	**94,89%**	**65,34%**	**71,90%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. 2024. Diolah

7. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur

sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Di Indonesia proporsi penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas (lihat bagian fertilitas). Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak.anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun bila digunakan APS maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7.12 tahun dan 13.15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut adalah capaian angka putus sekolah Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 72
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Wajo
Tahun 2019–2023

No	Jenjang Pendidikan	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**							
1.1.	Jumlah murid usia 7 - 12 thn	Orang	L	17.062	16.558	20.311	17.260	18378
			P	15.944	15.531	20.648	16.831	17685
			T	33.006	32.089	40.959	34.091	36.063
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	Orang	L	19.934	18.620	20.884	18.684	17.766
			P	18.848	17.804	19.676	18.275	16.785
			T	38.782	36.424	40.560	36.959	34.551
1.3.	APS SD / MI		L	**85,59%**	**88,93%**	**97,26%**	**92,38%**	**103,44%**
			P	**84,59%**	**87,23%**	**104,94%**	**92,10%**	**105,36%**
			T	**85,11%**	**88,10%**	**100,98%**	**92,24%**	**104,38%**
2	**SMP/MTs**							
2.1.	Jumlah murid usia 13-15	Orang	L	6.105	5.477	7.761	6.212	5067
			P	5.843	5.756	8.111	5.606	5162
			T	11.948	11.233	15.872	11.818	10.229
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	Orang	L	9.863	9.182	10.037	9.085	7.716
			P	9.303	9.357	9.458	9.063	6.611
			T	19.166	18.539	19.495	18.148	14.327
2.3.	**APS SMP / MTs**		L	**61,90%**	**59,65%**	**77,32%**	**68,38%**	**65,67%**
			P	**62,81%**	**61,52%**	**85,76%**	**61,86%**	**78,08%**
			T	**62,34%**	**60,59%**	**81,42%**	**65,12%**	**71,40%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. 2024. Diolah

APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS pendidikan dasar jenjang pendidikan SD di Kabupaten Wajo setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sebesar 85.11% dan naik menjadi menjadi 100.98% di tahun 2021 dan tahun 2022 menurun menjadi 92.25%.

Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat SD juga berlaku pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan SMP. Di tahun 2019 APS SMP sebesar 62.34% meningkat di tahun 2021 menjadi 81.42% kemudian turun menjadi 71.40% di tahun 2023.

8. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Angka putus sekolah pada usia sekolah 7-12 tahun (SD/MI) tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 Angka Putus Sekolah Kabupaten Wajo sebesar 0.66 meningkat di tahun 202 menjadi 0.87, akan tetapi tahun 2022 menurun cukup signifikan menjadi 0.52, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 0,71. Sementara Angka Putus Sekolah pada usia 13-15 tahun (SMP/MTs) di Kabupaten Wajo selama periode 2019-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 1.53 dan meningkat terus hingga tahun 2022 menjadi 1.94. Namun tahun 2023 menurun drastis menjadi 0,61. Adapun data lengkap selama 5 tahun belakang sebagai berikut.

Tabel 2. 73
Angka Putus Sekolah (APS) Pendidikan Dasar
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**							
1.1.	Jumlah Capaian kinerja APS SD/MI	Orang	L	64	47	51	40	58
			P	35	45	48	44	54
			T	99	92	99	84	112
1.2.	Jumlah APS	Orang	L	97	58	62	109	51

No	Uraian	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
	SD/ MI		P	53	49	52	53	107
			T	150	107	114	162	158
1.3.	APS SD / MI		L	**0,66**	**0,81**	**0,82**	**0,37**	**1,14**
			P	**0,66**	**0,92**	**0,92**	**0,83**	**0,50**
			T	**0,66**	**0,86**	**0,87**	**0,52**	**0,71**
2	**SMP/MTs**							
2.1.	Jumlah Capaian kinerja APS SMP/MTs	Orang	L	50	57	63	25	29
			P	37	47	54	39	23
			T	87	104	117	64	52
2.2.	Jumlah APS SMP/ MTs	Orang	L	33	97	101	18	47
			P	24	64	69	15	38
			T	57	161	170	33	85
2.3.	**APS SMP / MTs**		L	**1,52**	**0,59**	**0,62**	**1,39**	**0,62**
			P	**1,54**	**0,73**	**0,78**	**2,60**	**0,61**
			T	**1,53**	**0,65**	**0,69**	**1,94**	**0,61**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. 2024. Diolah

Dari data tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adapun penyebab siswa putus sekolah disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Masih adanya masyarakat yang kesadaran akan pentingnya pendidikan rendah, sehingga kurang memberikan dukungan ketika anak-anaknya memasuki usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikannya.
2. Pengaruh ekonomi yang secara tidak langsung memaksa keadaan dimana anak-anak yang seharusnya menyelesaikan pendidikan tepat waktu terkendala dikarenakan ikut membantu orangtua mencari nafkah.

Untuk mengantisipasi peningkatan yang lebih signifikan dikemudian hari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo melakukan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir angka putus sekolah di Kabupaten Wajo :

1. Bimbingan dan konseling untuk siswa.
2. Memberikan materi parenting kepada wali murid akan pentingnya pendidikan.
3. Kunjungan guru ke orang tua siswa dan memberikan pembinaan.

9. Angka Kelulusan

Tamat sekolah adalah jika responden telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang

belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Secara umum tingkat pendidikan penduduk Indonesia mencapai pendidikan menengah. Separuh penduduk umur 15 tahun ke atas menyelesaikan SMP/sederajat. Sedikitnya satu dari empat penduduk tamat SM/sederajat. Kurang dari 10 persen penduduk umur 15 tahun ke atas yang lulus perguruan tinggi.

Untuk lebih jelasnya mengenai Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar 2019 s.d 2023

No	Jenjang Pendidikan	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**							
1.1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	L	3.233	3.399	3.151	3.380	3523
			P	3.216	3.301	3.221	3.116	3465
			T	6.449	6.700	6.372	6.496	6.988
1.2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	Orang	L	3.353	3.497	3.310	3.336	3479
			P	3.293	3.345	3.057	3.080	3388
			T	6.646	6.842	6.367	6.416	6.867
1.3.	**Angka Kelulusan SD/MI (1/2)**		L	**96%**	**97%**	**95%**	**101%**	**101%**
			P	**98%**	**99%**	**105%**	**101%**	**102%**
			T	**97%**	**98%**	**100%**	**101%**	**102%**
2	**SMP/MTs**							
2.1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	L	3.057	3.093	2.930	2.845	2830
			P	3.003	2.997	3.077	2.965	2783
			T	6.060	6.090	6.007	5.810	5.613
2.2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	Orang	L	3.080	3.145	2.537	2.737	2636
			P	2.824	3.110	3.497	2.874	2662
			T	5.904	6.255	6.034	5.611	5.298
2.3.	**Angka Kelulusan SMP/MTs (2/2)**		L	**99%**	**98%**	**115%**	**104%**	**107%**
			P	**106%**	**96%**	**88%**	**103%**	**105%**
			T	**103%**	**97%**	**100%**	**104%**	**106%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. 2024

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian angka Kelulusan pada jenjang SD/MI dengan target sebesar 102% dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs angka kelulusan pada tahun 2023 tercapai 106%. sebagaimana target 100% yang ditetapkan.

10. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan seberapa besar tingkat melanjutkan dari lulusan SD/MI ke tingkat selanjutnya. Semakin besar Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. menunjukkan semakin tinggi juga kesadaran masyarakat terhadap pendidikan.

Berdasarkan data berikut menunjukkan angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke jenjang pendidikan SMP/MTs selama kurun waktu 2019 s.d 2023 mengalami kondisi fluktuasi dimana di tahun 2019 berada di angka 98% namun di tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 90% pada tahun 2022. Walaupun Capaian Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2021 untuk realisasi capaian kinerja sebesar 95%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 7% point daAdapun Angka Melanjutkan jenjang pendidikan dasar Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75
Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2019 s.d 2023

No	Jenjang Pendidikan	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
1	**dari SD/MI ke SMP/MTs**							
1.1.	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP/MTs	Orang	L	2.867	2.852	2.950	2.780	3336
			P	2.773	2.756	3.235	3.090	3506
			T	5.640	5.608	6.185	5.870	6.842
1.2.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	L	3.233	3.215	3.451	3.380	3523
			P	3.216	3.199	3.322	3.116	3465
			T	6.449	6.414	6.773	6.496	6.988

No	Jenjang Pendidikan	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
1.3.	**Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs**		L	**89%**	**89%**	**85%**	**82%**	**95%**
			P	**86%**	**86%**	**97%**	**99%**	**101%**
			T	**87%**	**87%**	**91%**	**90%**	**98%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. 2024

11. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Mutu pendidikan dapat dinilai melalui kondisi bangunan yang baik. Di tingkat sekolah dasar kondisi bangunan baik mengalami kondisi stagnan selama empat tahun. Pada tahun 2019 sampai 2023 angka yang tercatat pada angka bangunan sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik mengalami peningktan. Tahun 2019 hanya sebesar 25% namun terus meningkat hingga di tahun 2023 menjadi 67%. Adapun Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Kabupaten Wajo dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 76
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Kab. Wajo
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	110	135	231	284	290
1.2.	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	435	438	438	439	432
1.3.	**Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik**	**25%**	**31%**	**53%**	**65%**	**67%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. 2024

12. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Masih diperlukan perhatian ekstra untuk meningkatkan kualitas bangunan sekolah tingkat lanjut meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pilihan masyarakat dalam memilih sekolah di tingkat lanjut. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo terus melakukan pembenahan, hal ini dapat terlihat kondisi bangunan baik untuk sekolah tingkat pendidikan SMP/MTs Kabupaten Wajo juga mengalami peningkatan. dari tahun 2019 hanya 7.56% terus meningkat menjadi 84% di tahun 2023. Hal ini dapat terlihat dari data berikut.

Tabel 2. 77
Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi bangunan baik
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	**SMP/MTS**					
1.1.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	915	928	973	90	96
1.2.	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs	121	122	121	112	114
1.3.	**Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik**	**7,56**	**7,61**	**8,04**	**80%**	**84%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. 2024.

13. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Selama periode 2019-2023 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar 95.95 kemudian pada tahun 2021 sebesar 119.14. Selanjutnya rasio ketersediaan sekolah meningkat di tahun.tahun berikutnya sampai di tahun 2023 menjadi 96.83. Hal ini dapat terlihat dari data berikut.

Tabel 2. 78
Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2019 s.d 2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/ MI**					
1,1	Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)	556	560	560	551	546
1,2	Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn	57.948	48.654	47.005	55.107	56.390
1,3	**Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar**	**95,95**	**115,10**	**119,14**	**99,99**	**96,83**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. 2024. Diolah

14. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid dihitung melalui perbandingan antara jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan

dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk setiap guru agar tercapai standar kualitas mutu pengajaran yang baik.

Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 ke 2023 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah dimana pada tahun 2019 rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar sebesar 615,03 dan tahun 2020 meningkat menjadi 1.102,25. Tahun 2021 meningkat sebesar 945,08 di tahun 2022 menurun menjadi 924,78 dan di tahun terakhir menurun drastis menjadi 756,52. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 79
Rasio Guru / Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Wajo
Tahun 2019–2023

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**						
1.1.	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs	Orang	1.281	1.273	1.376	3.566	2616
			2.283	2.264	3.995	1.696	1650
			3.564	3.537	5.371	5.262	4.266
1.2.	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	Orang	29.797	16.558	28.072	39.719	40570
			28.151	15.531	28.759	17.181	15820
			57.948	32.089	56.831	56.900	56.390
1.3.	**Rasio**		31.078,00	17.831,00	490,17	897,81	644,81
			30.434,00	17.795,00	1.389,13	987,14	1.043
			615,03	1.102,25	945,08	924,78	756,52

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. 2024

15. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Wajo pada tahun 2018 s.d 2022 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2018 rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar sebesar 107,57 dan tahun 2018 menjadi 127,01.

Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 71,75. Untuk lebih jelasnya Rasio Guru/murid per kelas rata-rata Sekolah Dasar Kabupaten Wajo adalah.

Tabel 2. 80
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas	4.440	3.676	5.310	2850	4156
1.2.	Jumlah murid pendidikan dasar	35.805	35.755	40.959	39.719	56.390
1.3.	**Rasio**	**124,01**	**102,81**	**129,64**	**71,75**	**73,70**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab, Wajo, 2024, Diolah

16. Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Tercatat bahwa 29,07% di tahun 2019 penduduk Kabupaten Wajo yang memiliki usia dalam rentan 7,12 tahun sudah mengikuti jenjang pendidikan dasar setingkat SD. Adapun di tahun 2020 menurun menjadi 28,50% dan meningkat di tahun selanjutnya menjadi 30,84%. Tahun 2022 proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar di Kabupaten Wajo mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 81,59% dan pada tahun 2023 menjadi 81,58%. Adapun data lengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2. 81
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar
Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Banyaknya lulusan SD/ MI	6.449	5.734	6.773	6.496	5.690
1.2.	Banyaknya penduduk usia 12 tahun	22.186	20.115	21.963	7.962	6.975
1.3.	**Rasio**	**29,07%**	**28,50%**	**30,84%**	**81,59%**	**81,58%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab, Wajo, 2024, Diolah

17. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan Laki-Laki

Angka Melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan, tingkat

melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Adapun data ter*update* Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun di Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 5 tahun dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 82
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki Kabupaten Wajo Tahun 2018–2022

No	Uraian	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Banyaknya Penduduk usia 15 – 24 tahun yang melek huruf	Orang	L	171	29.282	31.071	33.657	
			P	329	27.547	28.815	29.811	
			T	500	56.829	59.886	63.468	
1.2	Banyaknya Penduduk usia 15 – 24 Tahun	Orang	L	33.075	31.045	32.759	33.439	
			P	33.249	29.858	30.269	31.276	
			T	66.324	60.903	63.028	64.715	
1.3	**Presentase angka melek huruf penduduk usia 15 – 24 Tahun Perempuan dan Laki-laki**		L	**100%**	**94%**	**95%**	**101%**	**99,58%**
			P	**100%**	**92%**	**95%**	**95%**	**99,56%**
			T	**100%**	**93%**	**95%**	**98%**	**99,57%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab, Wajo, 2023

Kedepan Pemerintah Kabupaten Wajo mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 261 persen. Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk antara lain melalui program kejar paket A paket B dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin termasuk juga mampu berbahasa Indonesia, Harapannya mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

18. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan program keaksaraan fungsional yang membimbing masyarakat untuk berkemampuan menguasai keterampilan membaca dan menulis, pada tahun 2018 hingga di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 145,46% di tahun 2018 dan 150,37% di

tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan adanya kebulatan tekad di masing-masing daerah menjadikan program strategis dalam meningkatan Indek pembangunan manusia. Oleh karena itu bantuan pendanaan melalui dekonsentrasi memberikan alokasi dana yang signifikan untuk layanan bagi warga masyarakat yang tidak melek huruf setiap tahunnya. Adapun data ter*update* dapat terlihat sebagai berikut.

Tabel 2. 83
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah capaian kinerja Kependudukan yang berusia>15 Tahun melek huruf se Kabupaten Wajo	262.417	262.316	269.911		
2	Jumlah seluruh penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf se Kabupaten Wajo	179.946	179.879	179.503		
3	**Presentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf**	**145,83%**	**145,83%**	**150,37%**	**91,00%**	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab, Wajo, 2024

19. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV

Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Oleh karena itu Guru wajib memiliki kualifikasi akademik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memiliki kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan peningkatan persentase guru yang berkesempatan memperoleh kualifikasi S1/D-IV disebabkan peran dan koordinasi dari pusat ke provinsi dan Kabupaten/kota memberikan perhatian dan layanan dengan memberi kesempatan/izin untuk melanjutkan pendidikan sebagai tuntutan dari Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya.

Di tahun 2019-2023 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 86% pada tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 87% di tahun 2022. Realisasi Guru yang memenuhi Kualifikasi S–1/D–IV pada tahun 2023 sebesar 96% dari target sebesar 95%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Guru baik dari jenjang SD/MI, SMP/MTs memiliki ijazah S–1 atau D–IV mengalami penurunan sebesar 10% point. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 84
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah guru berijazah berkualifikasi S1 dan D.IV	Orang	L	1.510	1.638	1.671	1.386	1.144
			P	3.525	3.764	4.648	3.532	3.288
			T	**5.035**	**5.402**	**6.319**	**4.918**	**4.432**
2	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs	Orang	L	1.879	1.989	2.094	1.757	1.323
			P	3.983	4.223	4.478	3.929	3.515
			T	**5.862**	**6.212**	**6.572**	**5.686**	**4.838**
3	**Persentase guru yang memenuhi kualifkasi S1/D.IV**		L	80%	82%	80%	79%	86%
			P	89%	89%	104%	90%	94%
			T	**86%**	**87%**	**96%**	**86%**	**92%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo, 2024

Dari data tersebut diatas dapat terlihat bahwa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV antara lain yaitu memberikan kemudahan pemberian ijin belajar kepada guru-guru yang akan melanjutkan kuliahnya. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Wajo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan kegiatan berupa bimtek, sosialisasi guru penggerak sejalan dengan terselenggaranya kurikulum merdeka belajar, penguatan guru karakter keagamaan, pembelajaran e-learning dan hal lain yang diperlukan untuk ditingkatkan.

2.1.5.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan berupa derajat kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan adanya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. terselenggaranya upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu merata dan dapat

diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya-upaya di bidang kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta, Pemerintah dan swasta dalam memberikan upaya pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan fasilitas kesehatan.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam usaha mencapai tujuan tersebut di atas telah melakukan beberapa program seperti program pemerataan kesehatan peningkatan status gizi dan meningkatkan peran serta masyarakat, Indikator yang menjadi pengukuran dalam hal ini adalah indeks harapan hidup seseorang sejak dilahirkan. Angka tersebut diharapkan dapat mencerminkan tingkat/derajat kesehatan penduduk karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan orang yang derajat kesehatannya buruk.

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi, Secara garis besar dari sisi penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo,natal* adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program.program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kejadiaan kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi balita dan ibu maternal (hamil melahirkan nifas) Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 85
Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran bayi
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Tahun) pada 1 tahun tertentu.	7	30	27	20	45
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.342	6.471	5.743	5.787	5.648
3	**Angka Kematian Bayi (AKB) per.1000 kelahiran bayi**	**1.10**	**4.64**	**4.70**	**3.46**	**7.97**
4	**AKHB (1.AKB)**	**-0.10**	**-3.64**	**-3.70**	**-2.46**	**-6,97**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat

keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB tinggi pada suatu wilayah, maka status kesehatan di wilayah tersebut rendah.Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai dengan bayi berusia < 1 Tahun. Apabila Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi pada suatu wilayah, maka status kesehatan di wilayah tersebut rendah. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai dengan bayi berusia < 1 Tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Wajo pada tahun 2023 sebesar 45 bayi atau 7,97 per 1.000 kelahiran bayi, penyebab terjadi peningkatan kematian bayi Pencatatan dan pelaporan berbasis online melalui aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) di seluruh Indonesia sehingga semua kasus kematian bayi akan terlaporkan berdasarkan alamat KTP. dan pada Tahun 2023 angkanya berada pada nilai 7,97 per 1.000 KH. Berdasarkan target SDGs bahwa sampai tahun 2030 jumlah kematian Bayi diupayakan 12 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Wajo tahun 2023 sebesar -6,97 per 1.000 kelahiran hidup. Trend AKHB dalam 3 tahun terakhir masih terlihat positif dimana grafik menunjukkan tren yang cenderung meningkat.

Berdasarkan target SDGs bahwa sampai tahun 2030 jumlah kematian Bayi diupayakan 12 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa kematian Bayi yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan 2023 masih dibawah standar SDGs yang di tetapkan yaitu 12 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Kematian bayi pada Tahun 2021 di Kabupaten Wajo disebabkan karena kelahiran bayi belum pada waktunya (Prematur) dan berat badan bayi rendah pada saat lahir. Kejadian ini dapat diatasi dengan adanya kehamilan yang terencana.peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk kader dan bidan perlu ditingkatkan dan diawasi perkembangannya.

3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan angka yang menunjukkan Jumlah kematian anak berusia 0.4 tahun (0.59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Dari tabel diatas terlihat bahwa ada peningkatan

Jumlah kematian bayi dimana tahun 2020 tidak ada kemtain bayi ke Tahun 2021 (1 bayi) sehingga rasio angka kematian balita meningkat sebesar 0.16.

Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Phemonia yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum adekuat.

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan angka yang menunjukkan Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Dari tabel diatas terlihat bahwa penurunan jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 Tahun) pada 1 tahun tertentu menurun secara signifikan,sehingga rasio angka kematian balita menurun dari Tahun 2021 ,dengan ratio 4,88 menurun pada tahun 2022 menjadi 3,80 dan terus terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 8,32 per 1000 kelahiran hidup (47 Kasus kematian bayi) di karnakan Pencatatan dan pelaporan berbasis online melalui aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) di seluruh Indonesia sehingga semua kasus kematian Balita akan terlaporkan berdasarkan alamat KTP. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 86
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Wajo
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 Tahun) pada 1 tahun tertentu.	6	30	28	22	47
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.432	6.471	5.743	5.787	5.648
3	**Angka kematian balita per.1000 kelahiran hidup.**	**0.47**	**4.64**	**4.88**	**3.80**	**8.32**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari. Indikator ini

terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial. ekonomi dan lingkungan anak.anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Dari tabel diatas terlihat bahwa Ratio Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup menurun secara signifikan dari Tahun 2019 (4.26 %). Tahun 2020 menurun menjadi 3.86 %, tahun 2021 menurun lagi menjadi 3.19%, tahun 2022 menurun tajam menjadi 2,76%. Namun di tahun 2023 meningkat sanat signifikan sebesar 6,55%.

Tahun 2019 hingga 2023 Cakupan Kematian Neonatus masih fluktuatif hal ini disebabkan diantaranya adalah kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang dukungan sarana prasarana yang kurang memadai serta deteksi faktor resiko yang belum akurat. Kematian neonatal dari tahun 2019 hingga 2023 rata-rata disebabkan oleh BBLR dan Asfiksa hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

Tabel 2. 87
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Bulan) pada 1 tahun tertentu.	27	25	20	16	37
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.342	6.471	5.743	5.787	5648
3	**Angka kematian neonatal per-1000 kelahiran hidup.**	**4.26**	**3.86**	**3.48**	**2.76**	**6,55**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Dari tabel diatas

terlihat bahwa Ratio Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup menurun secara signifikan dari Tahun 2020 sebesar 3,86 %, tahun 2021 menurun menjadi 3,48 % dan tahun 2022 menurun lagi menjadi 2,76%. Namun di tahun 2023 meningkat tajam menjadi 6,55%.

5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan. persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-.sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Data menunjukkan tren peningkatan pada indikator AKI (per 100.000 kelahiran hidup) dari 4 Ibu Hamil yang meninggal pada tahun 2020 menjadi 6 Ibu Hamil yang meninggal pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 Kematian Ibu Hamil, bersalin dan Nifas menurun menjadi 1 orang dari 5787 jumlah kelahiran hidup.

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya.Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu. Kasus kematian ibu pada tahun 2019 angkanya mencapai 63.07 dan menurun secara drastis pada tahun selanjutnya sebesar 17.28 di tahun 2022 dan di tahun 2023 kembali menurun tajam menjadi 6.55. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 88
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Wajo
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Tahun	4	4	6	1	37

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama.	6.342	6.471	5.743	5.787	5.648
3	**Angka kematian Ibu per-100.000 kelahiran hidup.**	**63.07**	**61.81**	**104.48**	**17.28**	**6,55**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

6. Prevalensi Balita Stunting

Stunting menurut WHO tahun 2020 adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi *irreversibel* akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 Hak Pasien dan Keluarga (HPK). Stunting menjadi perhatian utama pemerintah, sehingga dituangkan dalam Misi kedua Renstra Kementerian Kesehatan adalah menurunkan angka stunting pada balita. Adapun data Stunting Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 5 tahun dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 89
Pravelensi Balita Stunting berdasarkan SSIG Kab. Wajo
Tahun 2019–2023

	Tahun	Prevalensi Stunting
1	2019	36.7
2	2020	-
3	2021	22.6
4	2022	28.6
5	2023	27.4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

7. Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak.anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik

lingkungan yang sehat dan aman pengembangan psikososial/emosi kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita.Trend Ratio Posyandu per satuan balita dari tahun 2021 sampai dengan 2023 pada table tersebut di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat penambahan 2 unit posyandu dengan ratio posyandu per satuan balita 17,77, artinya bahwa jumlah posyandu per 1.000 orang balita adalah 17 buah,ratio ini menurun dari tahun 2021 dimana ratio Posyandu pada Tahun 2021 adalah 21,43. Berdasarkan Kementerian Kesehatan idealnya 1 Posyandu melayani 100 balita (1 : 100), data capaian pada tahun 2023 dengan jumlah balita 26.108 balita dengan jumlah posyandu 464 buah maka ratio tersebut sesuai dengan target ideal dengan capaian 1 : 58. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 90
Rasio Posyandu per Balita Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu	455	460	460	462	464
2	Jumlah Balita	31.634	31.257	21.469	21.194	26.108
3	**Rasio posyandu per satuan balita**	**14.38**	**14.72**	**21.43**	**21,80**	**17,77**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

8. Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel 2. 91
Rasio Puskesmas Poliklinik dan Pustu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	puskesmas poliklinik pustu	78	78	78	78	78
2	Jumlah penduduk	396.810	397.814	379.079	379.396	405.137
3	**Rasio puskesmas poliklinik pustu per satuan penduduk**	**0.19**	**0.19**	**0.20**	**0.20**	**0.19**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan seperti pustu dan dan puskesmas perlu ditingkatkan seiiring dengan perkembangan jumlah penduduksehingga penduduk di Kabupaten Wajo memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

9. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan asuhan keperawatan yang

berkesinambungan diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Pada Tahun 2022 Ratio Rumah Sakit per Satuan Penduduk sebesar 0,01 yang menunjukkan bahwa di setiap 100.000 jumlah penduduk terdapat 1 RS jumlah rumah sakit ada 4 (empat), terdiri dari rumah sakit daerah 2 (Dua) RS dan rumah sakit swasta 2 (Dua) RS. Idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Wajo dengan penduduk sebanyak 405.137 jiwa sudah terpenuhi dengan adanya 4 unit Rumah Sakit. Rasio perbandingannya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.92
Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2019 s.d 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	397.814	379.079	379.396	379.706	405.137
Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/ Vertikal)	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ POLRI	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Sakit Pemprov dan PemKabupaten Wajo	2	2	2	2	2
Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	2	2	2
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	3	3	4	4	4
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Satuan Penduduk)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

10. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah

penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Rasio tenaga dokter per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 2.500.

Tabel 2. 93
Rasio Dokter Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter	69	83	67	68	67
2	Jumlah Penduduk	397.814	379.079	379.396	379.706	405.137
3	**Rasio dokter per satua penduduk**	**0.17**	**0.22**	**0.18**	**0,17**	**0,165**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Dari Tabel diatas terlihat bahwa jumlah tenaga dokter pada tahun 2022 jumlahnya 68 orang dengan ratio 0,17 masih sangat rendah, seharusnya tenaga dokter yang tersedia untuk menangani Pelayanan kesehatan di Kabupaten Wajo dengan jumlah penduduk 379.700 jiwa adalah 152 orang, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal masih dibutuhkan 84 orang tenaga dokter di Kabupaten Wajo.

11. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio tenaga Medis per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Medis berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 16.000. Pemenuhan Rasio tenaga kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat ini karena adanya upaya yang dilakukan untuk pemenuhan tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat dan daerah. Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan

Rumah Sakit. Khsusunya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang jumlahnya masih sangat kurang seperti tenaga medis (dokter spesialis dokter umum dan dokter gigi) serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat tenaga kesehatan lingkungan tenaga gizi tenaga Farmasi dan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis). Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya didaerah terpencil perbatasan dan kepulauan dan rawan bencana serta daerah bermasalah kesehatan lainnya. Ini disebabkan karena daerah tersebut masih kurang diminati oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang telah ditempatkan di daerah tersebut selalu berusaha untuk pindah ke daerah perkotaan dengan berbagai macam alasan yang mereka ajukan. Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan dengan melakukan penugasan khusus namun beberapa daerah tetap kosong peminat untuk bertugas didaerah tersebut. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Wajo selama kurun waktu 2019-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebesar 69 orang dan pada tahun 2023 menjadi 164 orang. Jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk juga mengalami penurunan 0.17 pada tahun 2019 menjadi 0.40 per 10000 penduduk pada tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 94
Rasio Tenaga Medis Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Medis	69	83	67	125	164
2	Jumlah penduduk	397.814	379.079	379.396	379.706	405.137
3	**Rasio Tenaga Medis**	**0.17**	**0.22**	**0.18**	**0,32**	**0,40**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa untuk tenaga medis pada dasarnya sudah terpenuhi sesuai standar yang ada, namun perlu dipertimbangkan terkait jenis ketenagaan medis berdasarkan keahlian yang dibutuhkan masyarakat. Dan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal, maka berikut data jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 95
Tenaga Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2022

No	TENAGA KESEHATAN	TAHUN 2022
1	Dokter Spesialis	27
2	Dokter	68
3	Dokter Gigi	30
4	Dokter Gigi Spesialis	0
5	Tenaga Keperawatan	781
6	Tenaga Kebidanan	749
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	104
8	Tenaga Kesehatan Linkungan	37
9	Tenaga Gizi	46
10	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	77
11	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	21
12	Keterapian Fisik	15
13	Keteknisian Medis	36
14	Tenaga Teknis Kefarmasian	35
15	Apotoker	60
16	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan	534
TOTAL		**2620**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2023

12. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin). Pada Tabel berikut tergambar bahwa ada penurunan untuk cakupan Penanganan komplikasi kebidanan yaitu dari cakupan Tahun 2021 sebesar 105,23% menurun menjadi 102,16 % pada tahun 2022 dimana terdapat 1201 ibu dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Wajo yang semuanya diberikan penanganan sesuai standar di fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hal ini disebabkan tenaga kesehatan telah melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami keluarga dan Masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan KB Pasca Persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka

meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan Bayi Baru Lahir. Untuk lebih lengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 96
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan di finitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	1.082	1.056	1.267	1.227	1214
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayahkerja pada kurun waktu yang sama	1.416	1.399	1.204	1.201	1193
3	**Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani**	**76.41%**	**75.48%**	**105,23%**	**102,16%**	**101,76%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

13. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada Tabel tersebut diatas terlihat bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan meningkat secara signifikan dari tahun 2020 sebesar 97,12% meningkat pada tahun 2021 menjadi 100,52% dan pada Tahun 2022 capaiannya menjadi 101,06% dimana terdapat 5.728 Orang sasaran ibu bersalin di kabupaten Wajo yang seluruh persalinannya di tolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Jika melihat cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di tahun 2019 sampai 2023 yang meningkat, hal ini disebabkan karena ibu hamil yang melahirkan menggunakan fasilitas kesehatan dan pertolongan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya jarak dengan fasilitas kesehatan alat transportasi letak demografi daerah dan pengetahuan mencari penolong persalinan yang aman dan pengetahuan tersebut mempengaruhi keputusan dalam meminta bantuan penolong persalinan. Cakupan kunjungan ibu bersalin yang memperoleh pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2019-2023 di Kabupaten Wajo terus meningkat seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 97
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.337	6.485	5.776	5.789	5.661
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama	6.773	6.677	5.746	5.728	5.693
3	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**	**93.56%**	**97.12%**	**100,52%**	**101,06%**	**99.44%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

14. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar lengkap pada semua bayi. Desa UCI adalah desa/ kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Dari tabel tersbut dibawah, terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 Cakupan Desa masih sesuai dengan target Nasional yakni ≥ 80%, terjadi penurunan cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Wajo yaitu pada Tahun 2021 Cakupan Desa UCI/Kelurahan UCI sebesar 80%, penurunan ini diakibatkan adanya pandemic *Covid-19* yang mendera di tahun 2020 hingga 2021 dimana banyak ibu yang tidak membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan atau posyandu untuk mendapatkan vaksinansi karena takut tertular virus *Covid-19* dan terjadi kekosongan vaksin IPV dari Pusat/Provinsi yang digunakan untuk imunisasi dasar lengkap. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 98
Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2024
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	190	152	134	168	173
2	Jumlah Desa/Kelurahan	190	190	190	190	190
3	**Cakupan Desa/Kelurahan UCI**	**100.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**88,42%**	**91,05%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

15. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Kasus balita gizi buruk mendapat perawatan adalah Balita gizi buruk (sangat kurus) yang dirawat inap maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Dari tabel berikut terlihat bahwa Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan dari Tahun 2020 s/d tahun 2022 sangat baik dimana cakupan 100% tetap dipertahankan. Dengan jumlah kasus balita gizi buruk yang jumlahnya 6 kasus pada tahun 2023 semuanya diberikan perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 99
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	19	22	21	15	6
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	19	22	21	15	6
3	**Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Dalam istilah medis, gizi buruk disebut sebagai Malnutrisi Energi Protein (MEP) berat, anak dengan gizi buruk akan mudah mengalami infeksi karena kekebalan tubuhnya rendah. Selain itu, anak dengan gizi buruk juga memiliki intelligence quotient (IQ) atau tingkat kecerdasan rendah. Pada jangka panjang, gizi buruk dapat mengakibatkan pertumbuhan anak berhenti sebelum waktunya. Lebih jauh lagi, gizi buruk dalam jangka panjang akan menyebabkan anak kurus (wasting) dan stunting. Sementara itu, stunting pada anak akan berdampak pada gangguan metabolisme, rendahnya kekebalan tubuh, dan ukuran fisik tubuh yang tidak optimal.

Dari tTabel diatas terlihat bahwa trend Persentase Balita Gizi Buruk mengalami penurunan dari Tahun 2020 sebesar 22 balita menjadi 21 balita pada Tahun 2021, dan terus menurun menjadi 15 balita pada tahun 2022, hingga di tahun 2023 menjadi 6 balita. Hal ini dipengaruhi oleh pengaktifan posyandu baik oleh kader maupun petugas kesehatan.

16. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun. dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12.23 bulan.

Dari tabel berikut dapat terlihat bahwa persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Pada tahun 2020 sebesar 96,81%, dimana dari 6.359 anak usia 1 tahun Dalam wilayah Kabupaten Wajo terdapat 6.156 orang yang mendapatkan imunisasi campak, pada tahun 2021 persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak meningkat sekitar 3,19 % dari tahun 2020, dimana cakupan Imunisasi Campak pada tahun 2021 sebesar 100 %. Tetapi pada Tahun 2022 persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mencapai 99,60%. Cakupan imunisasi Campak anak usia 1 tahun dapat mencapai 99,60%, berkat adanya kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional/BIAN yang diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah pusat mulai 18 Mei sampai dengan 30 Okober 2022 dengan target capaian minimal Campak Rubella 95%.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut Kabupaten Wajo termasuk salah satu kabupaten yang berhasil mencapai target Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum menjadi provinsi diluar pulau Jawa dan Bali dengan capaian imunisasi Campak Rubella tertinggi yakni 95,30%. Kegiatan BIAN ini sangat berpengaruh terhadap capaian imunisasi Campak Rubella tingkat puskesmas karena pada pelaksanaannya melibatkan lintas sektor diwilayah kerja puskesmas. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 100
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat	6.432	6.156	5.455	5.431	5.446

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Imunisasi Campak di suatu wilayah selama 1 Tahun					
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.	6.489	6.359	5.455	5.407	5.373
3	**Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak**	**99.12**	**96.81**	**100**	**100,44%**	**101.36%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

17. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Acute Flacid Paralysis (AFP) adalah Kelumpuhan pada anak berusia <15 tahun yang bersifat layuh (flaccid) terjadi secara akut/ mendadak (<14 hari) dan bukan disebabkan oleh ruda paksa. Non Polio AFP rate per100.000 penduduk usia <15 tahun adalah Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk berusia <15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.Ukuran indikatornya adalah jumlah dengan satuan indiaktor jumlah orang. Dari data dibawah terlihat bahwa jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Wajo ada sebanayak 1 kasus dan dilaporkan penangannya secara berkesinambungan.

Tabel 2. 101
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	2	2	2	3	5
2	Jumlah Penduduk < 15 tahun.	92.666	71.896	71.896	80.640	80.039
3	**Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk**	**0.003**	**0,278**	**0,278**	**3,720**	**6,247**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

18. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Persentase Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia pada tahun 2022 adalah 8,07%, hal ini diperoleh dari jumlah kasus pneumonia yang ditemukan dan ditangani sebanyak 122 penderita dibandingkan dengan Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di Kabupaten Wajo pada Tahun 2021 yaitu 1511 orang. Dari tabel tersebut dibawah ini dapat terlihat bahwa persentase cakupan balita pneumonia yang ditangani pada tahun 2022 sama dengan capaian pada tahun 2021 yaitu 8,07% (122 Balita menderita pneumonia).

Capaian yang sangat rendah disebabkan karena petugas ISPA di tingkat Puskesamas belum mendapatkanpelatihan tentang pelaksanaan kegiatan program ISPA dan tatalaksana Pnemonia/ISPA. Tingginya tingkat mutasi di daerah yang berimbas pada pengelola program di Rumah Sakit maupun ditingkat Puskesmas sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan program di daerah. Dukungan Sumber Daya (SDM bahan KIE serta sarana dan prasarana) yang tersedia masih terbatas masih lemahnya koordinasi antar. Adapun data selengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 102
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.	284	68	122	122	307
2	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wailayah kerja pada kurun waktu yang sama.	1.533	1.242	1.511	1.511	1552
3	**Cakupan balita Pneumonia yang ditangani**	**18.53**	**4.50**	**8.07**	**8.07**	**19,78**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

19. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penanganan Penyakit TBC BTA pada tahun 2022 adalah 56.03%. hal ini diperoleh dari Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di Kabupaten Wajo selama 1 Tahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama. Capaian ini meningkat dari Tahun 2021 dengan capaian kinerja 56,03. dan dari Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan sebanyak 483 orang diberikan penanganan sesuai standar (100%).

Tentunya perlunya kesadaran masyarakat untuk saling menjaga kondisi lingkungan sekitarnya serta belum adanya kewajiban pelaporan dari RS dan layanan kesehatan swasta dalam penemuan dan tatalaksana TB (mandatory notification). Dalam upaya penemuan dan penanganan pasien TBC dibutuhkan strategi yang tepat yaitu startegi DOTS. Pengobatan TBC yang diberikan di fasilitas kesehatan DOTS dilakukan secara gratis oleh pemerintah dengan pendampingan yang dilakukan oleh PMO selama 6 bulan masa pengobatan hingga tuntas. Data dalam kurun waktu 5 tahun dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 103
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	501	444	483	483	539
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	861	861	862	862	862
3	**Cakupan penanganan penyakit TBC BTA**	**58.19**	**51.57**	**56.03**	**56.03**	**62,53**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2020 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC.

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk) adalah jumlah seluruh penderita terdaftar dan diobati per 100.000 penduduk. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 1016 penderita semua kasus TBC yang ditemukan dan diobati pada tahun 2023 di Kabupaten Wajo jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada sebanyak 405.137 maka terdapat penderita sebanyak 250,78 per 100.000 penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 104
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	878	569	687	687	1016
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	397.814	379.079	379.396	379.706	405.137
3	**Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**	**221**	**150**	**181.23**	**180.93**	**250,78**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

21. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena Tuberkulosis adalah jumlah semua penderita TBC yang meninggal selama pengobatan. Dari Tabel tersebut

diatas terdapat kematian TB sebanyak 35 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 379.700 maka angka kematian karena TBC di Kabupaten Wajo pada tahun 2022 sebanyak 9,21 per 100.000 penduduk Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi antara tahun 2018-2022:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah ditemukan gejala awal TBC.
2. Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kseshatan karena sigma yang masih ada dia masayarakat.
3. Pengobatan yang tidak tuntas sehingga kematian semakin tinggi.

Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 105
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien TB yang meninggal	54	52	37	35	35
2	Jumlah penduduk pada kurun yang sama	397.814	379.079	379.396	379.706	379.706
3	**Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**	**13.57**	**13.72**	**9.76**	**9.21**	**9.21**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

22. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Proporsi jumlah Kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS adalah jumlah kasus baru TBC BTA Positif yang ditemukan dan diobati dengan program DOTS dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TBC BTA positif yang ada. Dari tabel berikut, dimana pada tahun 2022 terdapat 749 kasus baru BTA positif yang ditemuakan dan diobati dengan program DOTS, jika dibandingkan dengan perkiraan kasus baru BTA psoitif tahun 2023 di kabupaten Wajo sebanyak 1016 maka angka proporsi Kasus Baru BTA Positif yang dilayani dengan program DOTS adalah 68,51%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 106
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	549	444	483	749	1016
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	861	861	862	861	1483
3	Presentasi Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.	**63.76**	**51.57**	**56.03**	**86,99**	**68,51**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

23. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah Jumlah semua kasus TBC BTA Positif yang mengalami kesembuhan dibandingkan dengan umlah pasien TBC BTA Positif yang diobati dalam kurun waktu yang sama yang dibuktikan dengan hasil evaluasi pengobatan pada akhir pengobatan menjadi BTA negatif. Terlihat di Kabupaten Wajo ada 278 orang penderita BTA positif yang mengalamai kesembuhan dibandingkan dengan jumlah pasien TBC BTA Positif yang diobati pada kurun waktu yang sebanyak 445 orang, maka angka kesembuhan TBC BTA Positif dikabupaten Wajo sebanyak 62.47 %. Berdasarkan laporan data kesembuhan antara 2017.2021 menunjukkan hasil yang belum mencapai target. Beberapa hal yang yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Turn Over SDM TBC yang tinggi sehingga mengakibatkan pasien terlayani dengan baik;
2. Beberapa kasus pindah ke daerah lain dengan tidak memberikan laporan hasil pengobatan yang dijalani;
3. Beberapa kasus terlaporkan *lost to follow op*dengan beberpa penyebab yaitu efek samping obat kejenuhan karena pengobatan yang sangat lama ekonomi kurangnya dukungan keluarga.

Tabel 2. 107
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan	484	361	406	391	559

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	melalui DOTS					
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	850	497	549	537	748
3	Presentasi Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.	**56.94**	**72.64**	**73.95**	**72,81**	**74,73**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

24. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Angka kesakitan DBD tahun 2019 di Kabupaten Wajo sebanyak 297 penderita yang keseluruhannya ditangani sesuai standar Penanganan DBD (capaian Kinerja :100%), Pada tahun 2020 jumlahnya menurun menjadi 124 penderita yang keseluruhan penderita DBD pada tahun 2020 ditangani secara menyeluruh (capaian 100%). Pada Tahun 2021 jumlah penderita meningkat lagi dari tahun 2020 sebanyak 178 penderita yang kesemaunya juga diberikan penanganan Penderita DBD sesuai standar (Capaian Kinerja :100%). Target Nasional bahwa semua penderita DBD yang diteukan harus ditanagani 100% dengan penanganan penderita DBD sesui standar telah dicapai di Kabupaten Wajo ,dimana sejak Tahun 2019-2021 semua penderita DBD diberikan penanganan sesuai standar di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Karena Penyakit DBD sangat terkait dengan kondisi lingkungan maka Dinas Kesehatan berupaya untuk menciptakan inovasi terkait penanggulangan DBD melalui koordinasi dalam rangka perbaikan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Untuk lebih jelasnya data penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Wajo dapate terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 108
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	297	124	178	78	50
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	58	297	124	78	50
3	**Cakupan Penemuan dan penanganan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	penderita penyakit DBD					

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

25. Penderita Diare Yang Ditangani

Persentase penderita diare yang ditangani pada tahun 2019 adalah 76.22% hal ini diperoleh dari jumlah penderita diare yang ditangani di sarana kesehatan pada tahun 2019 (8134 penderita) dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare di kali jumlah penduduk) pada tahun 2019 yaitu 10.672 penderita. Dengan jumlah perkiraan penderita diare yang sama pada tahun 2020 dan tahun 2021. jumlah penderita diare menurun secara signifikan. yaitu dari 4.997 penderita tahun 2020 (46.41%) menjadi 3971 penderita pada tahun 2021 (36.88). Hal ini didukung dengan adanya peningkatan gerakan perilaku hidup sehat oleh masyarakat dan kesadaran agar melakukan penanganan yang cepat sesuai standar kepada seluruh penderita diare agar kematian karena Penyakit diare tidak terjadi.

Tabel 2. 109
Penderita Diare Yang Ditangani Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita diare yang dilayani disarana kesehatan	8134	4997	3971	5.664	7.478
2	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	10672	10767	10767	10.955	10.999
3	**Penderita diare yang ditangani**	**76.22**	**46.41**	**36.88**	**51,70**	**67,99**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

26. Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API). API adalah angka kesakitan per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun, angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk. meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida. pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vektor, migrasi dan pemindahan penduduk.

Dari tabel berikut terlihat bahwa terjadi peningkatan kasus malaria dari tahun 2020 (14 Kasus) sampai Tahun 2021 (23 Kasus). hal ini menjadi

meningkatnya ratio angka kejadian malaria di Kabupaten Wajo yakni 6.07%; yang dapat di interpretasikan bahwa pada tahun 2021 di setiap 1.000 penduduk terdapat 6 orang penduduk yang menderita malaria.

Penanganan penyakit malaria dilakukan dengan berbagai upaya oleh Pemerintah Kabupaten diantaranya adalah peningkatan Kapasitas SDM Mass Bolod Survey (MBS) Penyemprotan Rumah Distribusi Kelambu Surveilans Migrasi Sosialisasi Sistem Surveilans Malaria kepada LS/LP pengamatan daerah reseptif dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun angka kesakitan malaria sudah tercapai terget nasional tetapi masih banyak kendala yang di hadapi di lapangan terutama dalam kualitas SDM logistic (Laboratorium Supply) penatalaksanaan dan kasus import yang datang dari daerah–daerah endemis yang harus ditemukan secara dini.Beberapa permasalahan dalam penanganan kejadian malaria diantaranya:

1. Masih perlu pelatihan bagi tenaga mikroskopis Puskesmas;
2. Logistik penemuan penderita (Rapid Test Diagnostik/RDT) bagi puskesmas yang tidak memiliki tenaga mikroskopis masih kurang;
3. Mikroskop yang layak pakai pemeriksaan sediaan darah masih kurang;
4. Jejaring tatalaksana untuk kliknik Swasta Dojter Swasta belum berjalan dengan baik;
5. Sistem surveilans migrasi masih belum maksimal.

Tabel 2. 110
Angka Kejadian Malaria Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	32	14	23	30	28
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun.	397814	379079	379396	379.706	405.137
3	**Angka kejadian malaria**	**8.04**	**3.51**	**6.07**	**7,90**	**6,91**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

27. Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat

Tidak terdapat anak Balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat karena tidak ada anak balita yang menderita malaria. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut.

Tabel 2. 111
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita yang diobati dengan ACT dalam 1 tahun	0	0	1	0	0
2	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	0	0	1	0	0
3	**Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

28. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi

Masih rendah penemuan kasus di Kabupaten Wajo dikarenakan belum dilakukannya Testing HIV. Dari tabel berikut terlihat bahwa jumlah pasien HIV dan AIDS di Kabupaten Wajo menurun dari Tahun 2020 (37 Kasus) sampai dengan Tahun 2022 (20 Kasus), tetapi berdasarkan perhitungan bahwa prevalensi HIV/AIDS dari total Populasi adalah 0,00%, mengindikasikan bahwa setiap 1.000 penduduk tidak ditemukan kejadian HIV/AIDS di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 112
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	41	37	20	60	42
2	Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama	397.814	379.079	379.396	379.706	405.137
3	**Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0,02%**	**0,01%**

Sumber : Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

29. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Kurangnya sosialisasi HIV AIDS di sekolah dan juga Kabupaten Wajo belum memiliki pendanaan APBD untuk program HIV.AIDS Survey masih bergantung pada APBD Provinsi. Pada tahun 2021 presentase proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memeliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS adalah 0% disebakan karena tidak dilakukannya penyuluhan massal baik di sekolah ataupun lembaga lainnya disebabkan adanya pandemic *Covid-19.* Pada Tahun 2022 Presentase

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS adalah 67,20 % yang merupakan data penduduk yang telah diberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS pada tahun 2020,demikian pula tahun 2021 walaupun kegiatan penyuluhan secara massal tidak dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 disebakan adanya pandemic *Covid-19*, sehingga pengukuran terkait proporsi jumlah penduduk usia 15–24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS tidak dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 113
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia 15.24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	71.344	35.672	35.672	630	943
2	Jumlah penduduk usia 15.24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama	68.153	54.020	54.020	61.084	61.820
3	**Proporsi jumlah penduduk usia 15.24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS**	**104.68%**	**66.03%**	**66.03%**	**1,03%**	**1,53%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

30. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Pelayanan rujukan ini antara lain meliputi Konsultasi medis pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum Rehabilitasi medis Penunjang diagnostic seperti pemeriksaan laboratorium klinik radiologi dan elektromedik Tindakan medis kecil dan sedang. Operasi sedang dan besar Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan Pelayanan KB seperti pelayanan pasca persalinan/keguguran Pemeriksaan

kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit Pelayanan darah dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada ruang perawatan kelas III. Diterapkannya sistem rujukan online oleh BPJS yang memetakan wilayah rujukan untukPasien hal ini menimbulkan adanya batasan masyarakat untuk memilih Rumah Sakit karena sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan.Ketersediaan RS Tipe C di Makassar sangat kurang sehingga merugikan pasien yang diterapkan sistem rujukan berjenjang akhirnya pasien dirujuk ke RS Khusus dengan fasilitas yang tidak memadai. Pencapaian sasaran cakupan perlayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin yang telah memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Sarana dan Prasarana yang belum memadai sehingga terjadi proses antrian bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit;
2. Penerapan Sistem rujukan belum berjalan optimal di mana beberapa kasus yang seharusnya dapat ditangani pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang Non Spesialistik namun tetap dirujuk ke Rumah Sakit.

Tabel 2. 114
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	54.628	53.256	52.284	106.694	114.155
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten	165.892	182.204	143.633	138.743	146.909
3	**Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**	**32.93%**	**29.23%**	**36.40%**	**76,90%**	**77,70%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Dari Tabel diatas terlihat bahwa ada penurunan jumlah kunjungan masyarakat miskin dari tahun 2021 s/d 2022, pada tahun 2020 jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 sebanyak 53.256 jiwa ,yang menurun jumlahnya pada tahun 2021 yaitu 52.284 jiwa,dan meningkat kembali Tahun 2022 dengan jumlah kunjungan 60.452 jiwa,namun dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin terjadi penurunan pada tahun 2021 (36,40%) ke tahun 2022 (29,04 %) hal ini disebabkan karena pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan sudah melengkapi sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan fasilitas ,sarana dan prasarana kesehatan yang lebih lengkap termasuk obat-obatan,pemeriksaan penunjang/laboratorium sehingga pasien masyarakat miskin bias tertangani dengan baik sehingga tidak dirujuk lagi ke FKTPL.

31. Cakupan kunjungan bayi

Tujuan kunjungan bayi adalah untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau mengalami masalah kesehatan yang harus segera ditangani oleh pihak medis. Dari tabel di atas terlihat bahwa Cakupan Kunjungan bayi dari tahun 2020 (98,73 %) meningkat 7,37 % pada tahun 2021 (106,10 %), pada Tahun 2022 cakupan kunjungan bayi meningkat menjadi 110,9 %.

Keterlibatan Lintas Sektor dalam pelayanan Posyandu belum maksimal. Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu. Berdasarkan data capaian dari tahun 2017 sampai 2021 cakupan kunjungan bayi mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini di karenakan pelayanan kesehatan dasarpada anak bayi salah satunya adalah pemberi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) hal Ini yang menarik ibu atau keluarga untuk datang berkunjung ke Posyandu sehingga anak bayi mendapatkan pelayanan berkualitas dan terstandar sampai usia satu tahun. Oleh karena itu perlu dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam oenigkatan kualitas pelayanan kesehatan pada anaka bayi khususnya peran kader dan PKK dalam Pelayanan kesehatan anak bayi saat permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Keterlibatan lintas sektor dalam pelayanan Posyandu belum maksima;
2. Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas;
3. Pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu.

Tabel 2. 115
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.478	6.389	5.794	6.054	5.888
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	6.451	6.471	5.461	5.455	5.422
3	**Cakupan Kunjungan Bayi**	**100.42%**	**98.73%**	**106.10%**	**110,98%**	**108.59%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

32. Cakupan puskesmas

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa cakupan Puskesmas terhadap jumlah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo masih sesuai standar yakni diatas 100% yang artinya bahwa disetiap Kecamatan sudah memiliki Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Tabel 2. 116
Cakupan puskesmas Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah puskesmas	23	23	23	23	23
2	Jumlah seluruh kecamatan	14	14	14	14	14
3	**Cakupan puskesmas**	**164.29%**	**164.29%**	**164.29%**	**164.29%**	**164.29%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

33. Cakupan pembantu puskesmas

Pembantu Puskesmas (PUSTU) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas. yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Dari tabel data tersbut dibawah, terlihat bahwa dari tahun 2019 sd 2023 jumlah Puskesmas Pembantu berjumlah 55 Unit, tidak terjadi penambahan Puskesmas Pembantu. Dan berdasarkan standar Nasional Puskesmas Pembantu memiliki perbandingan 1 : 1.500, yaitu untuk 1 Puskemas Pembantu melayani 1.500 Penduduk. Sedangkan untuk

perbandingan Desa maka satu Pustu dapat melayani 2 atau 3 Desa sebagai wilayah kerjanya. Berdasarkan tabel berikut untuk 190 Desa maka masih dibutuhkan sarana Pustu sebanyak 13 Pustu untuk memenuhi standar perbandingan Pustu terhadap Desa yang dilayani. Dari Jumlah Penduduk di Kabupaten Wajo Tahun 2022 sebanyak 397.706 maka jumlah Pustu yang tersedia seharusnya 264 unit pada Tahun 2022. Cakupan Pembantu Puskesmas sejak Tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak mengalami perubahan dengan cakupan Pembantu Puskesmas sebesar Rp. 28,95%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 117
Cakupan pembantu puskesmas Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pembantu puskesmas	55	55	55	55	54
2	Jumlah desa / kelurahan	190	190	190	190	190
3	**Cakupan pembantu puskesmas**	**28.95%**	**28.95%**	**28.95%**	**28.95%**	**28.95%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

34. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan. Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai persalinannya. Pada Tahun 2020 persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebanyak 91,89% (6.428 IH) ,yang meningkat persentase pada tahun 2021 100,35 % (6.041 IH dilayani) dan terus meningkat cakupannya pada tahun 2022 sebesar 100,38 % (6024 IH dilayani).Hal ini dikarenakan tingginya antusiasme dan kesadaran ibu hamil untuk mendapatkan pemeriksaan lengkap di fasilitas pelayanan kesehatan,dan semakin meningkatnya kinerja para bidan dan petugas kesehatan dalam melakukan screening pemeriksaan ibu hamil di wilayah kerja masing masing.

Berdasarkan data tersebut cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) masih berfungsi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas/kesenjangan antar Kab/Kota yang variasinya cukup besar ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan di mana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini menyebabkan

ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil kondisi grografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya yang mempunyai kompotensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 1 kali pada trimester ke .1 (0.12 Minggu) 1 kali pada trimester ke.2 (.12.24 Minggu) dan 2 kali pada trimester ke.3 (> 24 minggu sampai dengan kelahirannya). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa kehamilan maka tidak dapat dilaporkan sebagain cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan penyakit dan gangguan kehanilan. Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengakp (K4) adalah :

1. Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan
2. Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sasmpai persalinannya.

Tabel 2. 118
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	6.123	6.428	6.041	6.024	5.897
2	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	7.096	6.995	6.020	6.020	5.964
3	**Cakupan kunjungan ibu hamil K4**	**86.29%**	**91.89%**	**100,35%**	**100,38%**	**98,88%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

35. Cakupan Pelayanan Nifas

Pada Tahun 2020 dari 6.677 ibu nifas sejumlah 6.365 dengan cakupan 95,33 % ibu nifas yang telah memperoleh pelayanan nifas sesuai standar dan pada tahun 2021 dan tahun 2022 trendnya meningkat seiring dengan jumlah ibu nifas yang juga berkurang dari tahun 2021 sejumlah 5.746 dan tahun 2022 menjadi 5.728, pada tahun 2022 persentase cakupan pelayanan nifas menjadi 101,60%. Persentase lebih dari target

ditetapkan 100% disebabkan adanya ibu Nifas yang melakukan pemeriksaan /pelayanan nifas dari luar wilayah Kabupaten Wajo. Peningkatan cakupan Pelayanan Nifas ini dipengaruhi oleh :

1. Pelaksanaan supervise fasilitatif Pelayanan Ibu Nifas di setiap Puskesmas
2. Meningkatnya kapasitas petugas dalam pelayanan nifas sesuai standar bagi bidang Puskesmas dan Bidan di Desa.
3. Assesment pendmapingan peningkatan kualitas pelayanan (Klinis) Program Penyelamatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
4. Peningkatan kapasitas petugas dalam pengiisian buku kohort secara online dan offline.

Adapun data terkait Cakupan Pelayanan Nifas kabupaten Wajo dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 119
Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.190	6.365	5.742	5.820	5.578
2	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	6.773	6.677	5.746	5.728	5.693
3	**Cakupan pelayanan nifas**	**91.39%**	**95.33%**	**100%**	**101.6%**	**97,98%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

36. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Kompetensi Nakes dalam menangani bayi baru lahir masih rendah deteksi faktor resiko komplikasi pada ibu hamil masih rendah serta kualitas Kesehatan Ibu hamil masih rendah merupakan permasalahan dalam penanganan neonates dalam komplikasi. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Dari tabel di atas terlihat bahwa Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani trendnya meningkat dari tahun 2020 sebanyak 60,69 % menjadi 73,50 % pada Tahun 2021. Dan menurun pada tahun 2022 (73,26 %) karena semakin berkurangnya jumlah neonates yang

memiliki komplikasi.Faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah faktor ekonomi keluarga,akses ke palayanan kesehatan, kesadaran orang tua dalam mencari pertolongan kesehatan yang masih rendah,keterlambatan deteksi dini oleh petugas kesehatan.

Berdasarkan data capaian pelayanan neonates dengan komplikasi yang ditangani dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktasi disebabkan oleh salah satunya faktor medik secara langsung yaitu keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten serta menyangkut sarana dan prasarana dalam menangani bayi baru lahir bermasalah yang belum adekuat. Dan terdapat faktor ekonomi keluarga. akses ke palayanan kesehatan kesadaran orang tua dalam mencari pertolongan kesehatan yang masih rendah. keterlambatan deteksi dini oleh petugas kesehatan. Masalah kesehatan bayi baru lahir tidak terlepas dari kualitas kesehatan ibu pada sebelum dan saat hamil. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. kompetensi nakes dalam menangani bayi baru lahir masih rendah
2. deteksi faktor resiko komplikasi pada ibu hamil masih rendah
3. kualitas kesehatan ibu hamil masih rendah

Tabel 2. 120
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani	576	579	609	600	557
2	Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada	968	954	828	819	813
3	**Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani**	**59.50%**	**60.69%**	**73.50%**	**73,26%**	**68,51%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

37. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah Pelayanan kesehatan anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat:Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0-11 bulan;
b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan;

c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan.

Pelayanan kesehatan balita sakit:Pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Dari tabel berikut terlihat bahwa Presentase cakupan pelayanan anak balita mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2021 yaitu 76,29 % meningkat menjadi 80,83%, dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 97,65%, hal tersebut terjadi karena keaktifan petugas kesehatan melakukan penyuluhan akan pentingnya kesehatan balita sseiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan keaktifan kader melakukan kunjungan rumah untuk melakukan screening. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel 2. 121
Cakupan pelayanan anak balita Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	17.724	23.845	17.353	20.695	26.108
2	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	25145	31.257	21.469	21.194	26.380
3	**Cakupan pelayanan anak balita.**	**70.49%**	**76.29%**	**80.83%**	**97.65%**	**98,97%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

38. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-4 bulan keluarga miskin mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 98.32% dari 2018 yang hanya d angka 2.54%. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.Pada tabel di atas terlihat bahwa Pada tahun 2022 dari 257 seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin hamper seluruhnya 252 anak usia 6 – 24 bulan (98,05%) diberikan MP-ASI untuk pencegahan terjaidnya kasus gizi buruk atau stunting.

Tabel 2. 122
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI
pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	1052	571	638	252	3.982

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	1070	581	642	257	4.076
3	**Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 . 24 bulan keluarga miskin**	**98.32%**	**98.27%**	**99.37%**	**98.05%**	**97,69%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

39. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil. Sedangkan Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih guru UKS dokter kecil melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Trend Presentase cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SD dan setingkat pada Tahun 2020 mencapai 84,90% meningkat pada Tahun 2021 sebesar 99,70% yang persentasenya meningkat pada tahun 2022 menjadi 100%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 123
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	7.333	6.252	32.417	34.414	35.103
2	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7.684	7.364	32.513	3.414	35.103
3	**Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat**	**95.43%**	**84.90%**	**99.70%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

40. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pemerintah Pusat melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin yang merupakan peralihan program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program kesehatan gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah

berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Tabel 2. 124
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan pasien miskin disarkes strata 1	59.940	53.256	52.284	60.42	114.155
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	139.490	182.204	143.633	208.107	146.909
3	**Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin**	**42.97%**	**29.23%**	**36.40%**	**29.04%**	**77,70%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil. Sedangkan Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih guru UKS dokter kecil melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Trend Presentase cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SD dan setingkat pada Tahun 2020 mencapai 84,90% meningkat pada Tahun 2021 sebesar 99,70% yang persentasenya meningkat pada tahun 2022 menjadi 100%.

41. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Wajo tahun 2023 adalah 100%. Target kinerja tahun 2023 dan target nasional SPM adalah 100%, maka persentase capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% (4 Rumah Sakit dan 12 puskesmas perawatan) seluruhnya memberikan pelayanan gawat darurat level I. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 125
Cakupaan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan gawat darurat level 1	3	3	4	4	4

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah rumah sakit	3	3	4	4	4
3	**Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

42. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam

Setiap tahunnya dari tahun 2019–2023 terdapat penurunan Kejadian Luar Biasa yang terjadi di Kabupaten Wajo, tetapi meningkat drastis pada Tahun 2020 karena adanya pandemic *Covid-19* dan seluruh kejadian Luar Biasa tersebut diberikan penanganan > 24 jam (Cakupan Pelayanan 100%) untuk meminimalisir adanya penduduk yang meninggal akibat kejadian Luar Biasa tersebut. Kejadian Luar Biasa yang terjadi adalah KLB Penyakit DBD, Keracunan Makanan, Suspekrabies, AFP, Suspeck Leptospirosis dan terakhir pada tahun 2020 terjadi pandemic *Covid-19*.

Tabel 2. 126
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB
Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dalam periode tertentu	8	163	7	7	8
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	8	163	7	7	8
3	**Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2023 terjadi KLB sebanyak 8 KLB di Desa/Kelurahan yang mana ke tujuh KLB tersebut telah dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam oleh petugas epidemiologi baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan.

43. Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk memicu munculnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare kronik dan stunting. Pemerintah mencanangkan 5 pilar dalam program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) untuk mengurangi penyakit tersebut. Adapun 5 pilar itu, yakni berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun,

pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai pilihan pendekatan, strategi dan program untuk mengubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode pemicuan. Jumlah seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Wajo sebanyak 190 desa/kelurahan sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selama 5 tahun terakhir Pilar 1 berhenti buang air besar sembarangan. Adapun desa yang telah melaksanakan 5 pilar dan telah diverifikasi oleh kementerian kesehatan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 127
Data Desa STBM Kabupaten Wajo Tahun 2023

NO	KECAMATAN	DESA STBM	JUMLAH
1	SABBANGPARU	-	0
2	TEMPE	KELURAHAN BULU PABBULU	1
3	PAMMANA		0
4	BOLA	SANRESENG ADE	1
5	TAKKALALLA		0
6	SAJOANGING	WALIDA	1
7	PENRANG		0
8	MAJAULENG		0
9	TANASITOLO	PALIPPU	1
10	BELAWA		0
11	MANIANGPAJO	KALOLA	1
12	GILIRENG		0
13	KEERA		0
14	PITUMPANUA	KALUKU	1
TOTAL			**6**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2024

2.1.5.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 4658/XII/Tahun 2004 Data Jalan Kabupaten Wajo Sepanjang 1.76415 Km. Namun terjadinya perubahan 96 ruas titik pangkal saat survey jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2012 adanya overlap dengan 39 ruas lainnya adanya 122 ruas jalan dalam kota yang belum masuk dalam SK Gubernur adanya 49

ruas jalan tambahan kabupaten sesuai SK Bupati Wajo No. 441 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas.Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten sepanjang 1.00862 Km.

Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara panjang jalan kondisi baik (Km) dengan panjang jalan keseluruhan dikabupaten wajo berdasarkan SK jalan kabupaten No. 441 tahun 2012 dengan capaian 50%. Adapun capaian sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 cenderung meningkat. Panjang jalan kondisi baik/mantap mencakup kondisi baik dan kondisi sedang sesuai dengan data teknis Kabupaten Wajo pada Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SIPDJD) Kementerian PUPR. Kenaikan indikator capaian ini disebabkan karena banyaknya kegiatan pembangunan jalan. peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan yang terdapat pada DPA SKPD Dinas pelayanan umum yang dilaksanakan. Untuk masa yang akan datang diharapkan adannya pembagian kewenangan pengelola jalan. Secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 128
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan kondisi baik (km)	347.21	455.69	475.726	503.822	491,81
2	Panjang jalan seluruhnya (km)	1.008.62	1.008.62	1.008.62	1.008.62	1.008,62
3	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**0.34**	**0.45**	**0.47**	**0.50**	**0,49**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo Tahun 2024

Adapun untuk persentase kondisi panjang jalan mantap Kabupaten Wajo dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 129
Panjang jalan dalam kondisi sedang Tahun 2019-2023

No	URAIAN	2019		2020		2021		2022	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	260,161	25,79%	347,074	34,41%	369,963	36,68%	384,285	38,10%
2	Panjang Jalan Kondisi Sedang	59,304	5,88%	108,626	10,77%	105,704	10,48%	108,427	10,75%
	Panjang Jalan Kondisi Mantap	**319,465**	**31,67%**	**455,700**	**45,18%**	**475,667**	**47,16%**	**492,712**	**48,85%**
3	Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan	288,875	28,64%	196,279	19,46%		0,00%	95,990	9,52%
4	Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat	400,283	39,69%	356,644	35,36%		0,00%	419,910	41,63%

	Total	**1.008,623**	**100%**	**1.008,623**	**100%**	**475,667**	**47,16%**	**1.008,612**	**100%**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo Tahun 2023

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Capaian rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak mengalami meningkatan disebabkan karena panjang jalan Kabupaten Wajo tetap berdasarkan panjang sesuai SK jalan kabupaten. Oleh karena itu sejak tahun 2020 dinas pekerjaan umum telah melaksanakan survey investigasi jalan desa strategis yang akan ditingkatan menjadi jalan kabupaten sehingga rasio pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan jumlah panjang jaringan jalan.

Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara panjang jalan kondisi baik (Km) dengan jumlah penduduk. Adapun capaian sejak Tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak mengalami meningkatan disebabkan karena panjang jalan Kabupaten Wajo tetap berdasarkan panjang sesuai SK jalan kabupaten. Oleh karena itu sejak tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan survey investigasi jalan desa strategis yang akan ditingkatan menjadi jalan kabupaten sehingga rasio pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan jumlah panjang jaringan jalan. Adapun data tersebut dimakssud pada tabel berikut.

Tabel 2. 130
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah panjang jalan (km)	1.008.62	1.008.62	1.008.62	1.008.62	1.008,62
2	Jumlah penduduk	397.814	379.079	379.396	379.706	405.137
3	**Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk**	**0.0025**	**0.0027**	**0.0027**	**0.0027**	**0,002**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo Tahun 2024

c. Persentase Kawasan Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4 cenderung tetap. Hal ini disebabkan luas permukiman penduduk sebanding dengan jumlah kawasan yang belum dilalui roda 4. Dalam tabel diketahui Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 3, tahun 2019-2020 sebesar 0.12%, namun di tahun 2021-2023 mengalami

peningkatan menjadi 0.18%. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Wajo, seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2. 131
Persentase kawasan permukiman yang belum dilalui Roda 4
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	51.46	76.79	76.79	76.79	76.79
2	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	42.559	42.559	42.559	42.559	42.559
3	**Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4**	**0.12%**	**0.12%**	**0.18%**	**0.18%**	**0.18%**

Sumber : Dinas Perkimta Kabupaten Wajo 2024

Secara umum jalan dengan kondisi baik yang ada di Kabupaten Wajo dapat dilalui dengan kecepatan >40 km/jam. Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara panjang jalan kondisi baik (Km) dengan panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Wajo berdasarkan SK jalan kabupaten No. 441 tahun 2018 dengan capaian 32.96 %. Adapun capaian sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung naik. Kenaikan capaian indikator ini disebabkan karena banyaknya kegiatan pembangunan jalan, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan, baik yang bersumber dari dana alokasi umum maupun yang bersumber dari dana alokasi khusus. Oleh karena itu, sejak tahun 2020 sebagai tindaklanjut dari capaian ini. Dinas Pekerjaan Umum melakukan upaya untuk merevisi kembali SK Jalan Kabupaten agar jalan-jalan strategis dapat dimasukkan sebagai jalan kabupaten dan meminimalkan jalan non status untuk tidak dianggarkan pada kegiatan Dinas Pekerjaan Umum. Adapun data secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 132
Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (m)	347.21	455.69	475.726	503.822	491.838

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (m)	1.008.62	1.008.62	1.008.62	1.008.62	1.008.623
3	**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**	**34.42%**	**45.18%**	**47.17%**	**49.95%**	**48,76%**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Wajo Tahun 2024

d. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 15 m)

Secara umum jalan di Kabupaten Wajo yang memiliki trotoar dan drainase /saluran pembuangan air minimal 15 m hanya terdapat di beberapa kecamatan. Antara lain Kecamatan Tempe Kecamatan Majauleng Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Maniangpajo. Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km) dengan panjang seluruh panjang jalan kabupaten. Adapun capaian sejak tahun 2019 sampai 2022 cenderung tidak mengalami peningkatan disebabkan minimnya peningkatan pelaksanaan kegiatan pembuatan drainase jalan. Oleh karena itu sejak tahun 2020, untuk meningkatkan capaian ini dinas pekerjaan umum akan membantu kegiatan pembangunan drainase dan trotoar untuk jalan.jalan khusus. Data selengkapnya daoat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 133
Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m) Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	37.58	37.58	37.58	38.26	38,95
2	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	1.008.62	1.008.62	1.008.62	1.008.62	1.008,60
3	**Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 15 m)**	**3.73%**	**3.73%**	**3.73%**	**3.79%**	**3,86%**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo Tahun 2024

e. Persentase Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Secara umum pemanfaatan jalan oleh pedagangan kaki lima atau bangunan rumah liar tergolong masih kurang. Penggunaan sempadan jalan ini hanya terjadi di pusat perbelanjaan pusat Kota Sengkang terminal dan beberapa pasar di setiap kecamatan. Pemanfaatannya pun hanya pada jam-jam tertentu saja.

Indikator diukur berdasarkan data dari Peta Citra tahun 2009 yang dipakai sampai tahun 2019 sehingga indikator persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima bangunan rumah liar tidak berubah dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal ini belum pernah dilaksanakan pendataan terkait Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar. Adapun sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022 stgnan pada angka 3.76%.

Tabel 2. 134
Persenatse Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)	0.3795	0.3795	0.3795	0.3795	0,3795
2	Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)	15.903.84	1.008.63	1.008.63	1.008.63	1.008,63
3	**Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar**	**2.39%**	**3.76%**	**3.76%**	**3.76%**	**3,76%**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo Tahun 2024

f. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Lingkungan dan perilaku yang mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Presentase rumah tangga / rumah tinggal yang bersanitasi dapat di lihat pada data berikut. Capaian Presentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Wajo sebesar 90.12% berada diatas target akses air limbah layak Nasional (90%) dan target akses air limbah layak Propinsi Sulawesi Selatan (95%). Terdapat penurunan persentase tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 karena adanya perbedaan klasifikasi akses yaitu rumah tangga dengan dengan sarana sanitasi berupa jamban Semi permanen di daerah perkotaan tahun 2020 dikategorikan sebagai

akses sanitasi air limbah domestik Dasar, namun pada tahun 2021 sarana sanitasi berupa jamban semi permanen di daerah perkotaan dimasukkan ke dalam Akses Sanitasi Air Limbah Domestik kategori tidak ada akses sehingga tidak masuk dalam perhitungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa permasalahan terkait pendataan rumah tinggal berakses sanitasi adalah:

1. Sumber Data untuk jumlah rumah tinggal hanya memanfaatkan data Jumlah KK aktual ter.entry pada website http://monev.stbm.kemkes.go.id/monev/ (belum diperoleh data jumlah rumah tinggal lingkup kabupaten Wajo).
2. Adanya perbedaan/variasi satuan untuk data akses sanitasi (rumah tinggal rumah tangga KK jiwa) sehingga berpotensi menjadi kendala dalam pendataan.
3. SPM sanitasi berada pada dinas PUPR namun belum tersedia database akses air limbah domestik yang terupdate sehingga kebutuhan data masih bergantung pada Dinas Kesehatan.

Adapun hal-hal yang harus diupayakan yaitu :

1. Tersedianya data umum yang valid dan akurat serta menjadi rujukan bagi seluruh OPD;
2. Diperlukan penyusunan database akses sanitasi (air limbah domestik) pada Dinas PUPR;
3. Peningkatan peran dari pemerintah desa dan kelurahan dalam mendorong penyediaan sarana sanitasi (air limbah domestik) di setiap rumah tinggal.

Sehingga dari upaya tersebut diatas diharapkan pencapaian presentase akses rumah tinggal bersanitasi 100% akan meningkatkan aspek kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 135
Persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	98.380	98.380	94.349	96.205	128.739
2	Jumlah rumah tinggal	102.970	102.970	105.694	105.488	140.238

3	**Persentase rumah tinggal bersanitasi**	**95.54%**	**95.54%**	**89.27%**	**91.20%**	**91,80%**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo Tahun 2024

Kemudian untuk rumah tangga dengan akses sanitasi layak yang merupakan indikator RPJMN dan *SDGs* tahun 2019-2023 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 136
Persentase rumah tangga sanitasi layak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	92,54	93,89	89,27	89,27	91,80

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo Tahun 2024

g. Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

Secara umum pemanfaatan sempadan sungai yang dipakai bangunan liar lebih terfokus pada area sekitar Danau Tempe. Hal ini dikarena lokasi tempat tinggal mereka lebih dekat dengan sumber mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu pola perkembangan Kota Sengkang sejak awal menjadikan Danau Tempe sebagai pusat aktifitas warga. Namum saat ini sejak dilakukannya pembangunan jalan.jalan permukiman sehingga banyak rumah warga yang mulai menjadikan sungai/danau sebagai backyard halaman rumah mereka.

Adapun sempadan jalan yang dipakai bangunan liar pada tahun 2019 sebesar 45.13 % kemudian menurun di tahun 2020 dan stagnan sampai tahun 2023 di angka 37.48%.

Tabel 2. 137
Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)	137	137	137	137	137
2	Panjang seluruh Sempadan Sungai Kabupaten (Km)	303.6	365.54	365.54	365.54	365.54
3	**Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar**	**45.13%**	**37.48%**	**37.48%**	**37.48%**	**37.48%**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo Tahun 2024

h. Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Secara umum drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Wajo masih terbatas dan meningkat setiap

tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 23.40% drainase yang ada dalam kondisi tersumbat dan makin menurun menjadi 79.98% pada tahun 2023. Beberapa Gambaran terkait Kondisi Drainase adalah: 1). Kewenangan Pengelolaan Drainase berdasarkan tupoksi OPD yaitu Drainase Primer pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP Drainase Sekunder yang sekaligus sebagai saluran tepi jalan/bangunan pelengkap pada ruas Jalan Kabupaten pada Bidang Bina Marga Dinas PUPRP dan Drainase Lingkungan (perumahan permukiman) pada Dinas Perkim 2). Persentase Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat 76.60% memerlukan penganggaran kegiatan perbaikan/pemeliharaan prasarana drainase. 3). Perlu dilakukan penyusunan database Drainase Primer Drainase Sekunder dan Drainase Lingkungan (perumahan permukiman). Efek pencapaian Persentase Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat 100% akan meningkatkan aspek kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Wajo. Berikut data-data yang lengkap yang tersaji.

Tabel 2. 138
Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	19.26	63.00	3.964	3.246.07	2896,07
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)	82.31	82.31	14.465	14.465	14465
3	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**23.40%**	**23.46%**	**72.60%**	**77.56%**	**79,98%**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo Tahun 2024

i. Persentase Pembangunan turap/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

Pembangunan turap/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten masih sangat terbatas pelaksanaan pembangunan turap di Kabupaten Wajo masih terbatas dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pembangunan turap sebesar 37.80% dan pada tahun 2022 menjadi 56.99%. Jumlah Pembangunan tanggul, tebing, sungai dan Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang pada Daerah Aliran Sungai Rawan Longsor sebanyak 5 Lokasi.

sehingga bertambah dari Jumlah Tahun 2021 sebanyak 48 Lokasi menjadi 53 Lokasi di Tahun 2022. Dengan Lokasi penambahan pada :

1. Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang/Anak Sungai/Cabang Sungai Lompodia Malakke Kec. Belawa;
2. Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang/Anak Sungai/Cabang Sunga Desa Botto Benteng Kec. Majauleng;
3. Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang/Anak Sungai/Cabang Sunga Desa Ongko Kec. Belawa;
4. Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang/Anak Sungai/Cabang Sunga Kel. Mallake Kec. Belawa ; dan
5. Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang/Anak Sungai/Cabang Sunga Dusun Karamae Desa Ongkoe Kec. Belawa.

Tabel 2. 14139
Pembangunan turap/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayahjalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	39	44	48	53	68
2	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	93	93	93	93	93
3	**Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor**	**41.94%**	**47.31%**	**51.61%**	**56.99%**	**73,12%**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Wajo Tahun 2024

j. Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Wajo sebanyak 126 DI dengan luas 17.504 Ha. Namun berdasarkan hasil investigasi Dinas PSDA Kab. Wajo dan Asistensi oleh Kementerian PUPR Tahun 2018 Jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Wajo sebanyak 130 DI dengan luas 9.676 Ha. Terjadi pengurangan 9 DI dikarenakan adanya dobel nama DI tidak di temukan di lapangan dan terjadinya fungsi lahan serta penambahan 13 DI baru dan pembaharuan/ pengecekan luasan daerah irigasi dengan sistem perpetaan.

Capaian persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 63.94% dengan sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus.

Pada tahun 2020 persentase capaian irgasi dalam kondisi baik cenderung menurun karena adanya perubahan jumlah luas daerah irgasi berkurang dari Permen sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi IGT data spatial yang disesuaikan dengan Peta lahan Baku Sawah hasil verivikasi BIG terbaru yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan satu peta. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh jumlah Dana Alokasi Khusus yang mengalami penurunan hanya Rp.19.935.000.000 sehingga capaian persentase irigasi dalam kondisi baik menurun menjadi 69.31%. Pada Tahun 2021 diadakan evaluasi lanjutan terhadap luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten sehingga luas daerah kewenangan irigasi kabupaten berkurang dan mempengaruhi jumlah Dana Alokasi Khusus hanya sebesar Rp.6.807.333.000 dengan capaian persentase sebesar 70.66%. Pada tahun 2022 persentase capaian irigasi dalam kondisi baik cenderung naik karena adanya perubahan jumlah luas daerah irigasi berkurang dari Permen sebelumnya. yang juga dipengaruhi Dana Alokasi Khusus pengelolaan jaringan irigasi. sehingga capaian naik menjadi 72.02%, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 73.46%. Secara umum capaian ini meningkat dalam 3 tahun terakhir jika dibandingkan antara luas daerah irgasi kewengan kabupaten dengan luas irigasi dalam kondisi baik. Upaya peningkatan akan terus dilakukan melalui penganggaran pada sumber pendanaan lainnya serta perbaikan data secara maksimal agar rehab dan perbaikan bisa dilakukan secara tuntas dan menyeluruh.

Tabel 2. 140
Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	3.489	3.801	3.875	3.950	4.029
2	Luas irigasi kabupaten	5.457	5.483.94	5.483.94	5.483.94	5.483,94
3	**Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik**	**63.94%**	**69.31%**	**70.66%**	**72.02%**	**73.46%**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Wajo Tahun 2024

k. Rasio Jaringan Irigasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target "*overstock pangan*" dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi di Kabupaten Wajo dengan luas areal Daerah Irigasi 42.92953 Ha.

Kinerja jaringan irigasi di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 rasionya 10.38 mengalami penurunan hingga tahun 2023 yang rasionya 8.23. Peningkatan rasio tersebut disebabkan kondisi jaringan irigasi yang bertambah selama 5 tahun sebanding dengan peningkatan luas lahan budidaya. Saat ini 1 Km jaringan irigasi mengairi lahan budidaya seluas 1038 Km^2. Baerikut gambaran jelas data tersebut.

Tabel 2. 141
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2018 s.d 2022

No	Jaringan Irigasi	Panjang Saluran Irigasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jaringan primer	84.700	1.287	2.033	4.753	4.879
2.	Jaringan Sekunder	8.941.66	12.496.40	20.150.66	22.278.66	24.040,66
3.	Jaringan Tersier	12.496.40	12.496.40	12.496.40	15.438.40	16.150,40
4.	**Total Panjang Jaringan Irigasi (1+2+3)**	**22.285.06**	**26.279.80**	**34.680.06**	**42.920.06**	**45.070,06**
5.	Luas lahan budidaya	44.183.53	5.483.94	5.483.94	5.483.94	5483,94
6.	**Rasio Jaringan Irigasi**	**10.38**	**4.06**	**4.79**	**6.32**	**8,23**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Wajo Tahun 2024

Sehingga dengan adanya peningkatan efesiensi dan efektifitas peningkatan pengelolaan jaringan irigasi melalui penambahan luasan lahan budidaya yang terairi maka pencapaian target Kabupaten Wajo sebagai pendukung ketahanan pangan nasional dapat terwujud.

Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan jaringan irigasi. Tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi saat ini 76% yang menunjukkan bahwa masih terdapat 24% luas lahan budidaya yang belum diairi. Sedangkan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan.

l. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase Penduduk berakses air minum Kabupaten Wajo adalah 97.77% dan di atas rata.rata akses air minum nasional sedangkan 10.83% penduduk Kabupaten Wajo masih memanfaatkan akses air minum kategori tidak layak (Sumur/Mata Air tidak terlindungi dan Air Permukaan (Sungai Danau Waduk Kolam)) dan Air Hujan serta Depot dan Air Kemasan.

Gambaran kondisi terkait Penduduk Berakses Air Minum diantaranya :

1. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka Metode

Pengumpulan Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

2. SPM Air Minum berada pada Dinas PUPR-P namun belum tersedia database akses air minum yang terupdate sehingga kebutuhan data masih bergantung pada Dinas Kesehatan.
3. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sampling per Desa/Kelurahan sehingga dibutuhkan pengumpulan database terkait akses air minum yang lebih detail per jiwa agar kegiatan yang direncanakan dalam rangka penerapan SPM tepat sasaran.
4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018-2022 dengan nilai diatas 97% kemungkinan masih memasukkan Penduduk dengan Akses Air Minum dari Depot dan Air Kemasan kedalam kategori penduduk yang sudah mengakses Air Minum.

Tabel 2. 142
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk berakses air minum	337.187	337.187	360.523	371.228	127.505
2	Jumlah penduduk	397.814	379.079	379.396	379.706	140.238
3	**Persentase penduduk berakses air minum**	**84.75%**	**88.94%**	**95.02%**	**97.76%**	**90,92%**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Wajo Tahun 2024

Dari data tersebut diatas dapat terlihat bahwa target SPM belum dapat terpenuhi 100%, olehnya diperlukan tindaklanjut berupa :

1) Diperlukan penganggaran penyusunan database air minum detail per Jiwa pada Dinas PUPR-P.
2) Peningkatan peran dari pemerintah desa dan kelurahan dan kecamatan dalam mendorong penyediaan akses air minum bagi setiap jiwa dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang tersedia.
3) Diperlukan pemetaan terhadap GAP 15,24% penduduk yang belum terakses air minum dengan format by name by adress.

Dengan tindaklanjut tersebut diatas diharapkan Pencapaian prosentase akses air minum penduduk 100% akan meningkatkan aspek kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Wajo.

m. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan

Air minum layak adalah air minum yang memenuhi 4 kriteria diantaranya; kualitas air sesuai dengan standar air minum kuantitas yang mengacu pada standar penyediaan yaitu 60 liter/hari/orang Kontunuitas atau tersedia secara terus menerus serta Keterjangkauan yaitu akses dan harga terjangkau. Penyediaan air minum layak menunjukkan peningkatan sebesar ±2% /tahun. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan mencapai 88.64% di tahun 2018. Namun pencapaian akses ini masih bertumpu pada masayarakat perkotaan yang terlayani oleh PDAM. Sedangkan pemenuhan akses air minum layak di perdesaan masih belum optimal dikarenakan sumber air dan pengaliran yang digunakan masyarakat khususnya di area terpencil dan pulau-pulau masih belum layak belum terjangkau serta belum menggunakan jaringan perpipaan. Selain itu pengelolaan sumber air baku belum maksimal untuk menjamin penyediaan dan penyaluran air baku sesuai standar kebutuhan.

Prosentase Rumah Tangga berakses air minum layak berkelanjutan Kabupaten Wajo adalah 87,41% dan di atas rata-rata akses air minum nasional, sedangkan 15,24% Rumah Tangga Kabupaten Wajo masih memanfaatkan akses air minum dari Sumur/Mata Air tidak terlindungi dan Air Permukaan (Sungai, Danau, Waduk, Kolam) dan Air Hujan serta Depot dan Air Kemasan. Adapun data lengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2. 143
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	346.491	337.187	360.523	371.228	127.505
2	Jumlah penduduk seluruhnya	397.814	379.079	379.396	379.706	140.238

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan**	**87.09%**	**88.94%**	**95.02%**	**97.76%**	**90,92**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Wajo Tahun 2024

Pada dasarnya kebutuhan air minum penduduk Kabupaten Wajo sudah terpenuhi dalam segi akses untuk mendapatkan air. Akan tetapi dalam pemahaman terhadap akses air minum yang layak ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh penduduk Kabupaten Wajo. Menjawab kebijakan yang diamanatkan oleh Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) yang mana mengatakan "peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia", maka sebelum menyusun strategi untuk menjawab kebijakan tersebut sangat perlu untuk mengetahui akses air minum eksisting di Kabupaten Wajo dengan mengidentifikasi ketersediaan data yang terdata di instansi terkait yang mempunyai wewenang atau pernah melakukan kegiatan pengembangan SPAM. Cakupan air minum di Kabupaten Wajo yaitu.

Tabel 2. 144
Akses Air Minum Tahun 2023

No	Nama OPD	Jumlah Penduduk	SPAM Perairan	
			PDAM (SR)	NON PDAM (SR)
1	Kecamatan Tempe	66.461	13.006	116
2	Kecamatan Sabbangparu	26.326	554	280
3	Kecamatan Pammana	31,86	830	1421
4	Kecamatan Bola	19.792	312	556
5	Kecamatan Takkalalla	21.044	-	560
6	Kecamatan Sajoanging	19,07	-	710
7	Kecamatan Majauleng	31.862	-	1861
8	Kecamatan Tanasitolo	40.081	1.121	1224
9	Kecamatan Belawa	32.594	403	165
10	Kecamatan Maniangpajo	16.348	-	998
11	Kecamatan Keera	22.529	815	906
12	Kecamatan Pitumpanua	42.547	2.162	1999
13	Kecamatan Penrang	15.856	-	639
14	Kecamatan Gilireng	11.444	-	535

	TOTAL	**397.814**	**19.503**	**11970**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Wajo Tahun 2024

Dalam Tujuan Pembangunan SDGs, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, standpipes, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung dan jarak maksimal dari sumber air adalah radius 50 mserta kontinuitas dan kualitas yang terjangkau. Sedangkan definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/jamban kompos. Selanjutnya, SPM air minum 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 120 liter/orang/hari. Sedangkan SPM sanitasi 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (dengan target SPM 60%) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (dengan target SPM 5%). Definisi akses aman terhadap air minum, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan terdiri dari:

- Air ledeng meteran;
- Sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- Sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- Mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar.

Dari persyaratan tersebut diatas Kabupaten wajo belum mampu memenuhi air minum aman. Hal ini juga menjadi perhatian Dinas PUPR kabupaten Wajo dalam program kegiatan ke depannya.

n. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Kawasan permukiman khususnya di daerah perkotaan identik dengan kawasan, lingkungan yang umumnya di huni oleh golongan menengah ke bawah. Khusus di Kabupaten Wajo persentase lingkungan kumuh pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan. Namun dengan luas kawasan kumuh yang sama di Kabupaten Wajo dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu seluas 250.619.

Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan dan tidak adanya kesediaan data terkait jumlah rumah layak huni di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 145
Persentase Areal Kawasan Kumuh Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Kawasan Kumuh (ha)	1.050.93	1050.18	1201.61	1.185,14	1.185,13
2	Luas Wilayah (ha)	250.619	250.619	250.619	250.619	250.619
3	**Persentase areal kawasan kumuh**	**0.42**	**0.42**	**0.48**	**0,47%**	**0,47%**

Sumber : Dinas PERKIMTA Kabupaten Wajo Tahun 2024

o. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik)

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. Untuk data persampahan di Kabupaten Wajo dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14615
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di perkotaan
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang daur ulang pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	348.849 (94.64%)	22.41 (41.30%)	22.43 (44.58%)	22.43 (44.58%)	22.43 (44.58%)
2	Total volume sampah	57.939.93	9.709	9.387.80	9.387.80	9.387.80
3	**Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan**	**7.04%**	**60.70%**	**73.20%**	**73.20%**	**73.20%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo Tahun 2023

p. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Ketersediaan tempat pemakaman umum di Kabupaten Wajo merupakan salah satu kebutuhan dasar. Daya tampung TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Kabupaten Wajo pada tahun 2015 sebesar 2.327.92 poin dari seluruh jumlah penduduk. Rasio daya tampung TPU (Tempat Pemakaman Umum) pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.313.08. Tahun 2017 rasio pemakaman umum menjadi 2.306.72 dan 2018 penurunan menjadi 2.299.59. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertambahan daya tampung TPU dan TPK. Namun di tahun 2019 terjadi perubahan tugas dan fungsi OPD sehingga data terkait pemakaman umum tidak tersedia. Perkembangan data terkait pemakaman umum ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 147
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan di Perkotaan
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	912.500	912.500	912.500	912.500	912.500
2	Jumlah penduduk	397.814	379.079	379.396	379.706	405.137
3	**Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk**	**2.294**	**2.407**	**2.405**	**2.403**	**2.252**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Wajo Tahun 2024

q. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dihitung dengan cara menjumlahkan masing.masing tempat ibadah yang ada di Kabupaten Wajo dibagi dengan jumlah penduduk sesuai agama yang dianut dikali dengan

1000. Adapun perkembangan antara tempat ibadah dengan penduduk terlihat pada tebel berikut :

Tabel 2. 148
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tempat ibadah	804	822	839	846	846
2	Jumlah penduduk	397.814	379.079	379.396	379.706	405.137
3	**Rasio tempat ibadah per satuan penduduk**	**00.30**	**04.02**	**05.04**	**05.28**	**02.06**

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Penataan Ruang

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau ber HPL/HGB dari tahun ke tahun tetap sejak tahun 2019-2020 sebesar 0.49% barulah di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0.51 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa luasan RTH pada wilayah yang berHPL/HGB luasannya masih terbatas. Kondisi rasio ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 149
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas ruang terbuka hijau (ha)	58.282,04	58.282,14	60.282,14	60.282,14	60.282,14
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	118.613,16	118.613,16	118.613,16	118.613,16	118.613,16
3	**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**	**0.49**	**0.49**	**0.51**	**0.51**	**0.51**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo. Tahun 2024

b. Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/perkotaan di Kabupaten Wajo tergolong cukup baik. Ini terlihat di tahun 2019 luasan

RTH Publik sebesar 116.28% dan pada tahun 2023 menjadi 120.27% Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 150
Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	58.282,24	58.282,24	60.282,14	60.282,14	60.282,14
2	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan	50.123,80	50.123,80	50.123,80	50.123,80	50.123,80
3	**Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan**	**116.28%**	**116.28%**	**120.27%**	**120.27%**	**120.27%**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Wajo Tahun 2024

c. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru mengubah memperluas mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal kegiatan keagamaan kegiatan usaha kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.

Bangunan ber-IMB yang telah diawasi di Kabupaten Wajo sejak tahun 2019 hingga 2023 mengalami pertambahan. Pada tahun 2019 jumlah bangunan ber IMB sebanyak 12.867 bangunan (012 dari total bangunan) dan meningkat menjadi 17.270 bangunan pada tahun 2023 (sebesar 018). Hal ini menunjukkan bahwa bangunan yang ber-IMB telah terawasi.

Tabel 2. 151
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bangunan ber – IMB	12.867	14.294	15.418	16.083	17.270
2	Jumlah bangunan	103.128	116.359	117.483	118.148	95.537
3	**Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan**	**0.12**	**0.12**	**0.13**	**0.14**	**0.18**

Sumber : Dinas DPMPTSP Kab. Wajo. Tahun 2024

d. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Berdasarkan peta Citra Satelit Resulusi Tinggi (Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2013 dan 2015)kerjasama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sejak tahun 2015-2017 terkait penyusunan Data dan Inforasi Spasial Berbasis Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi diperoleh data terkait luasan kawasan tertutup pepohonan di Kabupaten Wajo. Secara umum kawasan yang tertutup pepohonan berupa hutan kebun campuran kebun sejenis dan mangrove.

Karena berskala besar sehingga perubahan yang terjadi setiap tahun tidak begitu siginifikan bahkan cenderung tetap. Luas kawasan yang tertutup pohon 61.21341 Ha dari 251.119 Ha dengan rasio 0.24. Artinya dari 251.119 Ha luas daratan di Kabupaten Wajo hanya 24% wilayahnya yang tertutup pepohonan.

Tabel 2. 151
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	61.213,41	61.213,41	61.213,41	61.213,41	61.213,41
2	Luas daratan	251.119	251.119	251.119	251.119	251.119
3	**Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo. Tahun 2024

e. Ketaatan terhadap RTRW

Saat ini rasio kesesuaian dengan RTRW kabupaten masih rendah diindikasikan dengan telah dilaksanakannya beberapa program pembangunan pada program utama RTRW Kabupaten. Rasio realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW sebesar 8.03 pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 99.92.

Tabel 2. 152
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi RTRW	20.112,57	8.223.261	768.677	231,99	231,93
2	Rencana Peruntukan	250.619	8.224.841	770.478	232.11	232,11
3	**Ketaatan terhadap RTRW**	**8.03**	**99.98**	**99.77**	**99.92**	**99,92**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Kemeterian Perumahan Rakyat RI No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kriteria permukiman tidak layak huni antara lain : luasan lantai bangunan paling rendah 36m^2 paling tinggi 45m^2 bahan lantai dinding atau atap tidak memenuhi standar layak huni tidak memenuhi MCK.

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rasio rumah layak huni diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan yang sejak tahun 2018 dengan rasio 0.26 dan pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 0.27. Data jumlah rumah layak huni sangat dipengaruhi oleh faktor masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan serta minimnya kesediaan data terkait jumlah rumah layak huni di Kabupaten Wajo.

Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan dan tidak adanya kesediaan data terkait jumlah

rumah layak huni di Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 153
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah layak huni	104.556	100.328	101.536	101.708	103.049
2	Jumlah penduduk	397.814	379.079	379.396	379.706	391.893
3	**Rasio rumah layak huni**	**0.26**	**0.26**	**0.27**	**0.27**	**0,26**

Sumber : Dinas Perkimta Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Rasio permukiman layak huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Permukiman layak huni harus memiliki kelengkapan minimal berupa fasilitas sarana dan prasarana permukiman sehingga menumbuhkan keadaan yang baik secara fisik, mental, maupun sosial budaya. Rasio permukiman layak huni diperoleh dengan membandingkan luas permukiman layak huni terhadap luas seluruh wilayah permukiman. Rasio permukiman layak huni mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar 0,945 dan di tahun 2023 sebesar 0,946 (telah dilakukan perbaikan data luas permukiman layak huni tahun 2018, 2020 dan 2021). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas areal permukiman seiring dengan peningkatan kualitas permukiman layak huni. Perbandingan permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman sebanding dengan rasio permukiman layak huni.

Berdasarkan Peraturan Kemeterian Perumahan Rakyat RI No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kriteria permukiman tidak layak huni antara lain : luasan lantai bangunan paling rendah 36m2 paling tinggi 45m2 bahan lantai dinding atau atap tidak memenuhi standar layak huni ketersediaan prasarana sarana dan utilitas permukiman.

Tabel 2. 154
Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023

1	Luas pemukiman layak huni (ha)	18.395.62	18.386,40	18.401,13	18.405,21	18.405,21
2	Luas wilayah permukiman (ha)	19.460,81	19.460,81	19.460,81	19.460,81	19.460,81
3	**Rasio permukiman layak huni**	**0.945**	**0.945**	**0.946**	**0.946**	**0.946**

Sumber : Dinas Perkimta Kab Wajo. Tahun 2024

3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indeks keterjangkauan harga rumah di kabupaten Wajo menjadi "terjangkau" Pemerintah daerah perlu untuk memfasilitasi masyarakat tersebut baik melalui pemberian bantuan biaya pembelian pembangunan perbaikan rumah penyediaan lahan murah dan memberikan kemudahan perizinan. Dengan demikian peran Pemda adalah melakukan berbagai upaya agar masyarakat mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni melalui Indeks Median harga rumah Keterjangkauan.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan kelengkapan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.Nilai cakupan ketersediaan rumah layak huni diperoleh dengan membandingkan jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dan meningkat di tahun 2021 dan tahun 2022. Telah dilakukan perbaikan data jumlah seluruh rumah tahun 2021.

Median penghasilan rumah tangga adalah Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni Yang terjangkau pada kurun waktu tertentu dengan Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau = Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu X 100. Hasil dari hitungan tersebut dapat menunjukkan perkembangan layanan rumah layak huni di Kabupaten Wajo dapat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2. 155
Cakupan layanan rumah layak huni Kabupaten Wajo
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	104.556	100.328	101.536	101.708	103.049

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	109.276	107.138	107.225	107.369	107.546
3	**Cakupan ketersediaan rumah layak huni**	**0.96**	**0.94**	**0.95**	**0.95**	**0,96**

Sumber : Dinas Perkimta Kab. Wajo. Tahun 2024

Tabel 2. 156
Rumah tidak layak huni per Kecamatan Kabupaten Wajo
Tahun 2021-2023

No	Nama Kecamatan	Rumah Layak Huni			Total Seluruh Rumah			Rumah Tidak Layak Huni		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kecamatan Tempe	15.976	15.976	6.956	16.093	16.122	7.435	117	146	479
2	Kecamatan Sabbangparu	6.904	6.913	16.099	7.393	7.408	16.202	489	495	103
3	Kecamatan Pammana	9.217	9.240	9.355	9.973	9.988	10.044	756	748	689
4	Kecamatan Bola	5.089	5.105	5.165	5.390	5.395	5.396	301	290	231
5	Kecamatan Takkalalla	5.057	5.057	5.118	5.502	5.507	5.508	445	450	390
6	Kecamatan Sajoanging	5.182	5.208	5.316	5.483	5.488	5.490	301	280	174
7	Kecamatan Majauleng	8.115	8.131	4.132	8.816	8.821	4.360	701	690	228
8	Kecamatan Tanasitolo	10.617	10.656	8.207	11.042	11.047	8.821	425	391	614
9	Kecamatan Belawa	8.238	8.238	10.833	8.398	8.403	11.054	160	165	221
10	Kecamatan Maniangpajo	4.215	4.236	8.335	4.386	4.401	8.404	171	165	69
11	Kecamatan Keera	6.095	6.095	4.293	6.492	6.507	4.401	397	412	108
12	Kecamatan Pitumpanua	9.587	9.609	3.228	10.531	10.546	3.376	944	937	148
13	Kecamatan Penrang	4.091	4.091	9.744	4.355	4.360	10.548	264	269	804
14	Kecamatan Gilireng	3.153	3.153	6.268	3.371	3.376	6.507	218	223	239
TOTAL		**101.536**	**101.708**	**103.049**	**107.225**	**107.369**	**107.546**	**5.689**	**5.661**	**4.497**

Sumber : Dinas Perkimta Kab. Wajo. Tahun 2023

4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.22/PERMEN M/2008 indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai SPM bidang perumahan rak yat sebagaimana dimaksud adalah 100 %. Ini berarti Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Wajo masih dibawah nilai SPM. Kriteria rumah layak huni terjangkau adalah memiliki akses dalam hal ketahanan

bangunan,kecukupan luas tempat tinggal, akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak serta harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah perlu memfasilitasi masyarakat baik melalui pemberian bantuan pembiayaan perumahan, pembangunan dan perbaikan rumah, penyediaan lahan murah serta memberikan kemudahan perizinan. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau dari tahun ke tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2019 sebesar 17,85% dan menjadi 32,75% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau di Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 157
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Uraian		
		Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau
1	2019	2.262	12.675	**17.85%**
2	2020	2.999	12.675	**23.66%**
3	2021	3.782	15.417	**24.53%**
4	2022	4.700	17.109	**27.47%**
5	2023	6.042	18.451	**32.75%**

Sumber :Dinas Perkimta Kab. Wajo 2024

Dari tabel diatas dpat dilihat bahwa faktor yang menjadi pendukung pencapaian nilai cakupan ini adalah tingginya jumlah penduduk di pusat kota mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan rumah layak huni untuk menampung penduduk yang bekerja di sekitar kawasan CBD. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum optimalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan infrastruktur pada

kawasan permukiman dan juga kurangnya ketersediaan lahan sehingga untuk menambah jumlah hunian penduduk sering mengabaikan aturan dasar pengadaan bangunan rumah seperti kualitas bahan jenis ruang garis sempadan jalan dan jarak antar rumah.

5. Persentase Permukiman Yang Tertata

Tabel 2. 158
Persentase permukiman yang tertata Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas area permukiman tertata (ha)	11.664,52	11.665,27	11.721,44	11.725,52	11.729,36
2	Luas area permukiman keseluruhan (ha)	19.460,81	19.460,81	19.460,81	19.460,81	19.460,81
3	**Persentase pemukiman yang tertata**	**59.94%**	**59.94%**	**60.23%**	**60.25%**	**60,27**

Sumber :Dinas Perkimta Kab. Wajo 2024

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2008 tentang permukiman adalah Tempat bermukim masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tertata adalah Permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi harmoni saling menunjang dan mendukung. Peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum air limbah drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Persentase permukiman yang tertata diperoleh dengan membandingkan luas area permukiman yang tertata terhadap luas area permukiman keseluruhan. Luas area permukiman yang tertata semakin meningkat dari tahun 2019 seluas 11.655,14 Ha (perbaikan data) dan pada tahun 2023 seluas 11.729,36 Ha. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan persentase permukiman yang tertata dimana pada tahun 2019 sebesar 59.94% dan meningkat menjadi 60.27% pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa area permukiman yang tertata semakin bertambah luas. Berbagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas permukiman tertata dan berkelanjutan termasuk infrastruktur pengelolaan air mimum air limbah dan drainase permukiman

6. Persentase Lingkungan pemukiman kumuh

Kawasan permukiman khususnya di daerah perkotaan identik dengan kawasan pertokoan utamanya kawasan sekitar sungai. Lingkungan

umumnya di huni oleh golongan menengah ke bawah. Permukiman kumuh adalah permukiman dengan kualitas tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Persentase lingkungan permukiman kumuh diperoleh dengan membandingkan luas lingkungan permukiman kumuh terhadap luas wilayah. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 persentase lingkungan permukiman kumuh mengalami stagnan yaitu sebesar 0,42%. Pada tahun 2021 persentase lingkungan permukiman kumuh bertambah sebesar 0,48%, hal ini disebabkan adanya pertambahan luas kawasan permukiman kumuh karena telah dilakukan update data SK kumuh yang awalnya di wilayah Kecamatan Tempe saja ditambah permukiman kumuh di luar Kecamatan Tempe. Pada tahun 2022-2023 persentase lingkungan permukiman kumuh menurun menjadi 0,47% hal ini menunjukkan bahwa luas lingkungan permukiman kumuh juga berkurang dimana penanganan/ peningkatan kualitas kawasan kumuh mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 159
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	1.050,93	1.050,18	1,201,18	1.185,14	1.185,14
2	Luas wilayah (ha)	250.619	250,619	250,619	250.619	250.619
3	**Persentase lingkungan pemukiman kumuh**	**0.42%**	**0.42%**	**0.48%**	**0.47%**	**0.47%**

Sumber :Dinas Perkimta Kab. Wajo 2024

7. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan

Penanganan kawasan kumuh perkotaan terpusat di Kecamatan Tempe. Untuk Kecamatan Penrang Kecamatan Majauleng Kecamatan Maniangpajo Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera menunggu dilegalitaskan melalui SK Bupati Wajo. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan diperoleh dengan membandingkan luasan permukiman kumuh yang tertangani terhadap luas permukiman kumuh.Penanganan permukiman kumuh perkotaan dari tahun ke tahun semakin meningkat dimana persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada

tahun 2019 sebesar 3.79% dan terus meningkat sampai tahun 2023 sebesar 17,77%. Hal ini menunjukkan bahwa luas permukiman kumuh yang tertangani juga semakin meningkat dimana pada tahun 2019 seluas 24.30 Ha dan pada tahun 2023 bertambah menjadi 101,33 Ha. (Ada perbaikan data luas permukiman kumuh tahun 2020). Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 160
Persentase luasan permukiman kumuh di perkotaan
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani (ha) Kota	24.30	33.12	84.86	101.33	101.33
2	Luas pemukiman kumuh (ha) Kota	641.75	570.08	570.075	570.075	570.075
3	**Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan**	**3.79**	**5.81**	**14.89**	**17.77**	**17.77**

Sumber :Dinas Perkimta Kab. Wajo 2024

8. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah tangga kumuh perkotaan terhadap dengan jumlah seluruh rumah. Tahun 2019 hingga tahun 2023 proporsi rumah tangga kumuh perkotaan stagnan di angka 0,01% dengan jumlah rumah tangga yang terus mieningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2019 sebanyak 2.260 rumah tangga dan di tahun 2023 meningkat menjadi 3.686 rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh pertambahan luas kawasan permukiman kumuh. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 161
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	2.260	2.443	2.260	3.686	3.686
2	Jumlah seluruh rumah	109.276	107.138	107.225	107.369	107.369
3	**Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan**	**0.02%**	**0.02%**	**0.02%**	**0,02%**	**0,02%**

Sumber :Dinas Perkimta Kab. Wajo 2024

9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU diperoleh dengan membandingkan jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Nilai cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU stagnan dari tahun 2019-2021 dimana telah dilakukan perbaikan data jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu tahun 2019-2021, kemudian meningkat pada tahun 2023 karena telah dilakukan update data jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 162
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	23	23	23	61	61
2	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	364	364	364	364	364
3	**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,17**	**0,17**

Sumber :Dinas Perkimta Kab. Wajo 2024

2.1.5.1.5. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Berikut merupakan tabel persentase petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 163
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	100 orang petugas linmas kabupaten/kota daerah pemekaran baru	2.446	2.190	2.190	1.778	2.281
2	1 wilayah kerja kabupaten/kota	25	25	25	25	25

3	**Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)**	**97.84%**	**87.6%**	**87.6%**	**71,12%**	**91,24%**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wajo Tahun 2024

Kondisi sosial dimasyarakat yang heterogen, banyak mempengaruhi keadaan lingkungannya. Terciptanya keadaan yang tenteram antar masyarakat yang heterogen menjadi harapan bagi seluruh masyarakat. Tugas untuk tercapainya harapan masyarakat yang tenteram tentunya dibutuhkan dukungan dari internal yakni masyarakat itu sendiri maupun eksternal yakni dari pemerintah. Masyarakat secara umum wajib berperan aktif dalam pencapaian keadaan tenteram di lingkungannya. Untuk memenuhi peran tersebut, dibentuklah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai garda terdepan penciptaan keadaan tenteram dimasyarakat.

Satlinmas merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil dampak akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, satlinmas sebenarnya memegang peranan mendasar. Satlinmas menjadi pendeteksi awal atas potensi-potensi konflik dan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Ini dikarenakan akses mereka yang membaur dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) ditentukan dengan membandingkan jumlah petugas Linmas kabupaten/kota dengan wilayah kerja, sementara wilayah kerja sebagai penyebut atau factor pembanding ditetapkan dengan membagi wilayah kabupaten kedalam beberapa wilayah kerja, dengan membandingkan luas wilayah kabupaten dengan luas satu wilayah kerja. Satu wilayah kerja ditetapkan 100 km2 dan luas wilayah kabupaten 2.506,19 km2, sehingga dalam wilayah Kabupaten Wajo terdapat 25 wilayah kerja.

Untuk Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) capaiannya fluktuatif tiap tahun, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perhelatan pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan

pemilihan legislatif. Pada tahun 2019 jumlahnya 2.446 orang dengan cakupan 97,84%, hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota legislatif. Dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota legislative secara serentak dan penambahan jumlah pemilih, berakibat pada penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diikuti dengan penambahan jumlah anggota Linmas. Pada tahun 2020 cakupan petugas perlindungan masyarakat menurun dengan 87,6% dengan jumlah anggota Linmas berkurang menjadi 2.190 orang dan jumlah tersebut tetap pada tahun 2021 dengan cakupan 87,6%. Pada tahun 2022 setelah diadakan pendataan, jumlah anggota satlinmas menurun menjadi 1.778 orang dengan cakupan 71,12%. Salah satu penyebab penurunannya adalah banyaknya anggota satlinmas tahun sebelumnya yang telah berpindah domisili, baik antar wilayah dalam kabupaten maupun wilayah luar kabupaten.

Kendala yang dihadapi terkait anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SatLinmas) yang ada di Kabupaten Wajo adalah :

- keanggotaannya belum ditetapkan melalui keputusan Bupati dan tidak dilengkapi dengan kartu anggota;
- Hanya difungsikan ketika ada acara pesta demokrasi (pilkada/pileg/pilpres);
- tidak mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- belum pernah memperoleh pendidikan dan pelatihan terkait tugas-tugas.

Solusi terhadap perbaikan capaian indicator kinerja tersebut, yang akan dilakukan adalah :

- Penguatan kelembagaan anggota LInmas di desa/kelurahan;
- Pemberdayaan Linmas untuk berperan aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- Pembinaan dan penataan personil Linmas;
- Mendorong untuk lebih aktifkan siskamling.

Sebagai upaya dalam memberdayakan anggota Linmas melalui peningkatan SDM akan diadakan pembinaan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa serta peningkatan kesiapsiagaan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas dalam perlindungan

masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, pasal 9 dijelaskan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai tugas membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan membantu upaya pertahanan Negara. Pada tahun 2020 telah dilakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan, untuk melakukan pendataan kembali terhadap anggota Linmas yang ada di desa/kelurahan. Data-data tersebut akan di verifikasi untuk menjadi dasar dalam penetapan petugas Linmas melalui Surat Keputusan dan kartu keanggotaan. Tahun 2022 telah dilakukan pelatihan pada anggota satlinmas di kecamatan Bola dan pembinaan akan tetap dilakukan pada kecamatan lain secara bertahap.

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman Keindahan)

Indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang membandingkan jumlah pelanggaran yang diselesaikan dengan jumlah keseluruhan pelanggaran yang dilaporkan dan diidentifikasi sendiri, capaian kinerja mengalami peningkatan. Tahun 2019 capaiannya 99,05%, sementara tahun 2020 sampai 2022 capaiannya menjadi 100% yang berarti bahwa semua aduan ataupun yang teridentifikasi sendiri oleh Satpol PP dapat terselesaikan. Peningkatan capaian indicator kinerja dalam penyelesaian pelanggaran K3 disebabkan hal sebagai berikut :

- Terbentuknya tim satgas yang siaga selama 24 jam dengan sistem shift;
- Tersedianya nomor pengaduan untuk menyampaikan laporan;
- Patroli secara rutin;
- Kerjasama dengan aparat keamanan lainnya pada kondisi tertentu dalam melakukan penertiban;
- Koordinasi dengan unit teknis terkait berdasarkan jenis pelanggaran;
- Penggunaan media sosial yang memudahkan koordinasi dan komunikasi.

Pada tahun 2019 ada dua pelanggaran yang tidak terselesaikan yaitu rumah bernyanyi yang masih buka di luar jam operasional yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya pengelola yang tidak

mengindahkan himbauan petugas, yang tutup saat patroli datang dan kadang buka kembali setelah tim patroli meninggalkan lokasi dan menyediakan minuman yang dilarang. Namun pelanggaran tersebut diselesaikan pada tahun berikutnya berupa tindakan penutupan dan pencabutan izin yang dilakukan bersama dengan instansi teknis dan proses penyelidikan dan penyidikan telah dikenakan sanksi karena melanggar Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Hiburan serta Sarana Hiburan. Pelanggaran pada tahun 2020 berkurang sekitar 46% dari tahun sebelumnya dan tahun 2021 jumlah pelanggaran kembali menurun yang salah satu penyebabnya karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat akibat pandemi, sementara tahun 2022 terjadi penurunan sekitar 1,1% dari tahun sebelumnya.

Solusi yang dilakukan dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam menurunkan jumlah pelanggaran yaitu:

- Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi terjadinya gangguan trantibum;
- Meningkatkan kualitas dan kuatitas giat patroli rutin dengan cakupan yang wilayah yang lebih luas;
- Memberikan sosisalisasi kepada masyarakat terkait K3 (Ketenteraman, Ketertiban, Keindahan);
- Mengedepankan pendekatan secara persuasif dan humanis terhadap masyarakat dalam menangani pelanggaran.

Untuk lebih jelasnya berikut dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 164
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban ketentraman keindahan) di Kabupaten Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	210	114	86	85	82
2	Jumlah Pelanggaran K3	212	114	86	85	82
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban ketentraman keindahan) di Kabupaten	**99.05%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wajo Tahun 2024

3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten di ukur dengan membandingkan jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas wilayah kabupaten. WMK merupakan wilayah yang dianggap terproteksi dari kebakaran yang luasnya di tetapkan sebagaimana Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 bahwa daerah layanan setiap WMK tidak melebihi radius 7,5 km. Dengan demikian, 1 pos pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan mobil penyemprot dan personil mempunyai luas WMK 176,62 km².

Sejak tahun 2019 jumlah pos yang lengkap dengan armada penyemprot adalah 5 pos yaitu pos induk di Kecamatan Tempe, pos sektor masing-masing di Kecamatan Belawa, Majauleng, Maniangpajo dan Pitumpanua sehingga luas WMK nya 883,1 km² dan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah 35,24%. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerjanya sebesar 42,28% dengan luas WMK nya 1.059,72 km² dari luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tersebut jika dibanding dengan luas wilayah kabupaten itu belum sebanding sebab masih banyak wilayah yang dikategorikan tidak terlindungi (unprotected area) sehingga masih dibutuhkan beberapa pos lagi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarananya terutama di wilayah yang sangat jauh dari pos yang telah ada saat ini. Dari luas Kabupaten 2.506.19 km2 dan luas WMK 1.059,72 km2 maka terdapat wilayah seluas 1.448,47 km2 yang merupakan wilayah yang tidak terproteksi kebakaran, sehingga masih dibutuhkan sekitar 8 WMK untuk memenuhi cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten.

Peningkatan capaian kinerja indicator tersebut disebabkan dengan adanya pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun 2020 yang kemudian dilakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan Bola untuk menyiapkan pos jaga. Sehingga luas WMK bertambah yang berarti cakupan pelayanan bencana kebakaran ikut bertambah. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah pos pemadam beserta kelengkapan sarana dan prasarananya serta membutuhkan anggaran yang besar untuk memenuhinya. Sampai Tahun 2022 cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten masih sama dengan tahun sebelumnya karena belum ada penambahan luas WMK.

Sebagai upaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten yang baru mencapai 42,28%, akan dilakukan

pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk di tempatkan di sektor kecamatan, terutama yang daerah yang jauh dari pos yang telah ada. Dengan demikian luas wilayah manajemen kebakaran akan bertambah yang berarti bahwa daerah terproteksi kebakaran bertambah luas. Selain itu, akan dilakukan pemetaan dan kajian terhadap kebutuhan pos pemadam untuk wilayah Kabupaten Wajo dengan memperhatikan aspek-aspek pendukungnya misalnya kondisi letak georafis, ketersediaan sumber air dan sosial wilayah. Adapun cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Wajo dari tahun 2019-2023 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 165
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	883.1	1.059.72	1.059.72	1.059.72	1.059.72
2	Luas wilayah kabupaten	2.50619	2.50619	2.50619	2.50619	2.50619
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	**35.24%**	**42.28%**	**42.28%**	**42.28%**	**42.28%**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo Tahun 2024

4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Data yang ada di tabel menunjukkan bahwa kasus kebakaran yang terjadi dalam Wilayah Manjemen Kebakaran (WMK) tertinggi tahun 2019 dengan 98 kejadian yang menurun drastis pada tahun 2020 menjadi 30 kejadian dalam WMK dari 45 total kebakaran dan 2021 kasus kebakaran dalam WMK naik menjadi 39 kejadian dari total kebakaran sebanyak 53 kali, tahun 2022 jumlah kejadian di WMK 38 kebakaran dari 55 total kejadian kebakaran. Capaian kinerja tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK sebesar 100%, semua kejadian kebakaran dalam wilayah yang dinyatakan terproteksi kebakaran dapat dilayani tidak melebihi 15 menit, yang dihitung mulai saat menerima laporan sampai personil pemadam tiba dilokasi dan siap melakukan pemadaman. Namun, tahun 2023 capaian menurun menjadi 82,4% dengan total kebakaran sebanyak 172 kejadian, 102 kebakaran yang terjadi dalam WMK dan yang ditangani sesuai waktu tanggap hanya 84 kebakaran.

Keberhasilan dalam pencapaian target terhadap indicator tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK disebabkan oleh:

Petugas damkar yang direkrut merupakan warga sekitar WMK, sehingga sudah mengetahui lokasi dan akses bila ada kejadian kebakaran

Informasi yang jelas terkait lokasi dan jalur evakuasi

Kesiapsiagaan petugas jaga selama 24 jam

Koordinasi yang baik antara penanggungjawab regu jaga dengan personil lapangan serta dengan unit terkait

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indicator ini yakni kemampuan petugas pemadam yang belum merata terkait tugas penanggulangan kebakaran, yang diakibatkan beberapa personil merupakan petugas yang baru direkrut untuk mengganti personil yang berhenti. Faktor alam sepertti el nino yang melanda tahun 2023 berdampak pada tingginya kejadian kebakaran, termasuk banyaknya kebakaran lahan yang lokasinya sulit dijangkau armada pemadam, hal ini yang menyebabkan waktu tanggap tidak tercapai karena akses ke lokasi yang tidak lancar.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan layanan sesuai waktu tanggap adalah peningkatan kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran melalui pelatihan-pelatihan dan pemeliharaan sarana pemadam kebakaran untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, melakukan penyuluhan dan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat untuk meminimalkan terjadinya resiko kebakaran. Perekrutan relawan kebakaran juga menjadi salahsatu upaya untuk mendekatkan layanan kebakaran secara dinikepada masyarakat.

Selain upaya tersebut, Satpol PP Damkar dan Penyelamatan akan mendorong desa/kelurahan terutama yang langsung berada dekat sumber air misalnya sekitar sungai dan pesisir danau tempe untuk melakukan upaya terkait penanggulangan kebakaran dengan membuat alat pemadam kebakaran portable misalnya floating pump (pompa apung) untuk menjangkau kawasan-kawasan yang tidak bisa diakses dengan kendaraan pemadam kebakaran. Hal tersebut diharapkan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait penanggulangan kebakaran dan pemenuhan waktu tanggap terhadap kejadian kebakaran.

Tabel 2. 166
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	98	30	39	38	102
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	98	30	39	38	84
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**82,4%**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo. Tahun 2024

5. Persentase Penegakan Perda

Indikator Persentase penegakan PERDA adalah membandingkan antara jumlah penegakan PERDA yang diselesaikan dengan jumlah pelanggaran yang ada capaiannya 100% yang berarti semua pelanggaran Perda dapat diselesaikan dengan jumlah pelanggaran yang selalu menurun. Pelanggaran yang paling banyak adalah pelanggaran terhadap Perda Nomor 16 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

Penyebab keberhasilan pencapaian target persentase penegakan perda adalah :

- Adanya pegawai internal yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- Kerjasama dengan lembaga peradilan;
- Pelaksanaan sidang tindak pidana ringan bagi pelanggar perda;
- Menurunnya jumlah pelanggaran perda.

Sedangkan kendala yang dihadapi antara lain:

- Masih terbatasnya jumlah penyidik (PPNS) yang sekarang baru 2 orang;
- Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda/Perkada;
- Masih adanya Peraturan yang belum tersosialisasi secara meluas.

Upaya tindaklanjut yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian indikator kinerja ini serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yaitu:

- Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum terkait pelaksanaan sidang tindak pidana ringan (Tipiring);
- Kerjasama dengan penyidik dari kepolisian;
- Meningkatkan penyuluhan dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan kepala daerah;
- Mengembangkan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah ada dan penambahan penyidik baru.

Berikut data penegakan PERDA di Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 167
Penegakan PERDA Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	52	47	45	42	37
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	52	47	45	42	37
3	Penegakan PERDA (%)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wajo Tahun 2024

6. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tabel 2. 168
Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2019 s.d 2023

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus narkoba	69	79	73	73	39
2.	Jumlah kasus pembunuhan	5	3	0	4	2
3.	Jumlah kejahatan seksual	11	16	21	33	8
4.	Jumlah kasus penganiayaan	206	20	95	97	79
5.	Jumlah kasus pencurian	174	226	70	85	50
6.	Jumlah kasus penipuan	106	65	49	84	8
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	3	1	0
8.	Jumlah criminal lainnya	n/a	n/a	29	28	55
9.	**Total Jumlah Tindak Kriminal tertangani selama 1 Tahun**	**571**	**409**	**340**	**405**	**241**
10.	Jumlah Penduduk	397.814	398.784	379.079	400.118	407.873
11.	**Angka Kriminalitas (9)/(10)**	**14,35**	**10,25**	**8,97**	**10,12**	**5,9**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wajo Tahun 2024

Data angka kriminalitas berdasarkan data dari Polres Wajo karena terkait tindak pidana umum yang ditangani oleh pihak kepolisian dan diolah oleh bidang Trantibum Satpol Damkar. Berdasarkan tabel untuk tahun 2019 sampai 2021 kriminalitas yang terjadi selalu mengalami penurunan. Dalam rentang waktu tersebut, kasus pencurian yang paling sering terjadi atau 35,6% dari jumlah kriminalitas, kemudian kasus penganiayaan dengan rata-rata 24,3%. Tahun 2023 kasus kriminal rata-rata menurun dari semua jenis kriminal, jumlah kriminal sebanyak 241 yang turun dibanding tahun

sebelumnya dengan jumlah kriminal sebanyak 405 kasus sementara tahun 2021 sebanyak 340 kasus.

Dari tahun 2019 sampai 2022, kasus narkoba jumlah kejadiannya relatif stabil rata-rata 73 kasus, hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kriminalitas ini masih terbatas pada jaringan narkoba yang selama ini beraksi di Kabupaten Wajo. Jumlah kejadiannya selain di ibukota kabupaten juga banyak kejadian di perbatasan kabupaten, sehingga dalam penanganannya diperlukan kerjasama dengan stakeholder terkait antar kabupaten. Tapi tahun 2023 kasus narkoba menurun menjadi 39 kasus. Untuk kasus pembunuhan dan kasus pemalsuan uang angkanya tiap tahun kurang dari 5 kejadian, bahkan pernah tidak ada kasus dalam 1 tahun.

Berdasarkan formulasi indikator yang digunakan, menandakan bahwa semakin kecil angka kriminalitas yang tertangani itu semakin baik, karena jumlah total angka kriminalitas berkurang sementara jumlah penduduk sebagai pembanding semakin meningkat. Angka kriminalitas tahun 2023 adalah 5,9 yang merupakan angka kriminalitas terendah dalam 5 tahun terakhir. Faktor keberhasilan ini disebabkan mulainya meningkat kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum dan toleransi pada kelompok masyarakat. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan kemajuan kota yang bisa berdampak adanya kesenjangan dalam masyarakat, hal tersebut bisa memicu munculnya konflik dan potensi terjadinya perilaku kriminal. Adapun solusi yang telah dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas serta pembinaan anggota Babinkantibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan kerjasama dengan unit-unit terkait.

2.1.5.1.6. Bidang Urusan Sosial

1. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan. kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara

memadai dan wajar. Pada tahun 2019 persentase PMKS yang memperoleh bantuan mencapai 45.92% sedangkan tahun 2020. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 45.92% dan di tahun 2021 sekitar 26.75%. Di lihat dari persentase kebanyakan perempuan yang menerima bantuan daripada laki-laki.

Tantangan yang dihadapi adalah upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin adalah masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial; dan penataan sistem pendataan pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Berikut PMKS yang memperoleh bantuan sosial d Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 169
PMKS yg Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2019 s.d 2023

Indikator	Satuan		Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	3.069	3.069	13.169	13.170	13.169	
		7.134	7.134	14215	14216	14215	
		10.203	10.203	27.384	27.386	27.384	1513
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	6.666	6.666	98.250	98.251	98.250	
		15.554	15.554	106.437	106.438	106.437	
		22.220	22.220	204.687	204.689	204.687	1513
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	**%**	**46,04**	**46,04**	**13,40**	**13,40**	**13,40**	
		45,87	**45,87**	**13,36**	**13,36**	**13,36**	
		45,92	**45,92**	**26,75**	**26,75**	**26,75**	**100**

Sumber : Dinas Sosial. P3A&P2KB Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Persentase PMKS Yang Tertangani

Penanganan PMKS mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 persentase PMKS yang tertangani sebanyak 28.69%, sedangkan di tahun 2021 penanganan PMKS sudah mengalami kenaikan menjadi 88.92%, berarti perhatian dari pemerintah tehadap penanganan PMKS sudah maksimal.

Tabel 2. 170
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019 s.d 2023

Indikator	Satuan		Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	L	1.912	1.912	34.768		
		P	4.464	4.464	139.068		
		T	6.376	6.376	173.836	21600	16,226

Indikator	Satuan		Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PMKS	Orang	L	6.666	6.666	40.938		
		P	15.554	15.554	163.749		
		T	22.22	22.22	204.687	202309	199,985
Persentase PMKS yang tertangani		**L**	**8.61%**	**8.61%**	**1698%**		
		P	**20.08%**	**20.08%**	**6794%**		
		T	**28,69%**	**28,69%**	**84,92%**	**10,68%**	**8,11%**

Sumber : Dinas Sosial. P3A&P2KB Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 stagnan di angka sebesar 38.99%, sedangkan ditahun 2021 kenaikannya cukup signifikan yakni mencapai 49.16% dan tahun 2022-2023 sebesar 49.17%. Adapun data lengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2. 171
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	10.613	10.613	201.272	201.300	1.513
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan social	27.220	27.220	409.374	409.400	1.513
3	**Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**	**38.99%**	**38.99%**	**49.16%**	**49,17%**	**49,17%**

Sumber : Dinas Sosial. P3A&P2KB Kab. Wajo. Tahun 2024

4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya

Keberadaan panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2019 baru ada data 100% pencapaian dan di tahun 2020 penyaluran program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE tidak terealisasi. disebabkan adanya usulan penerima bantuan KUBE yang

datanya tidak ada di data DTKS, pada tahun 2021-2022 penerima bantuan usaha melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis sekitar 0.10%.

Tabel 2. 172
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	30	.	5	5	0
2	Jumlah PMKS dalam satu tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	30	.	5000	5000	0
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	.	0.10%	0.10%	0

Sumber : Dinas Sosial. P3A&P2KB Kab. Wajo. Tahun 2024

5. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Tahun 2019 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sekitar 91.32% dan di tahun 2020 menurun sekitar 6.44%. Pada tahun 2021 naik menjadi 84.18% Diharapakan pada tahun-tahun berikutnya penerimaan bantuan korban bencana banjir dapat secara menyeluruh dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo. Donatur Pihak III, Sumbangan dari Pihak III serta dukungan personil TAGANA Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 173
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

No	Uraian	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Orang/ Jiwa	22.263	1.632	3.210	3.500	3.210	4.514
			28.987	1.986	5.528	5.700	5.528	2.003
			51.250	3.618	8.738	9.200	8.738	6.517

No	Uraian	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Orang/ Jiwa	22.450	22.450	4.876	4.900	4.876	4.514
			33.672	33.672	6.775	6.800	6.775	2.003
			56.122	56.122	11.651	11.700	11.651	6.517
3	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**Orang/ Jiwa**	**39.67**	**03.12**	**36.74**	**0,714**	**36.74**	**100%**
			51.56	**03.32**	**47,45**	**0,838**	**47,45**	**100%**
			91.32	**06.44**	**84,18**	**0,786**	**84,18**	**100%**

Sumber : Dinas Sosial, P3A&P2KB Kab. Wajo. Tahun 2024

6. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Pada tahun 2019 jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat baik evakuasi ke Posko Pengungsian maupun evakuasi ke rumah keluarga korban sebesar 76,25%. Pada Tahun 2022 dengan Jumlah korban dan Wilayah terdampak banjir yang tidak terlalu meluas sehingga jumlah korban yang dievakuasi menurun mencapai 38.66%. Penanganan evakuasi pada korban tentu tergantung pada kesiap siagaan Anggota TAGANA dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Penunjang, dengan ini sangat diharapakan adanya Pengadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan Perekrutan Anggota TAGANA serta peningkatan SDM. Untuk data lengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.174
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

No	Uraian	Satuan		2019	2020	2021	2022	2022
1	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Orang/ Jiwa	L	235	62	50	62	
			P	285	90	80	90	
			T	520	152	130	152	709
2	Jumlah korban bencana yang harusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Orang/ Jiwa	L	330	71	80	71	
			P	352	107	100	107	
			T	682	178	180	178	1834

No	Uraian	Satuan		2019	2020	2021	2022	2022
3	**Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap**	Orang/ Jiwa	L	34.36	34.83	130	34.83	
			P	41.79	50,56	180	50,56	
			T	76,25	85,39	72,22	85,39	38.66

Sumber : Dinas Sosial. P3A&P2KB Kab. Wajo. Tahun 2024

7. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Persentase penerima jaminan sosial di Kabupaten Wajo meningkat setiap tahunnya baik itu penyandang cacat fisik dan mental maupun lanjut usia tidak potensial. Pada tahun 2019 sebesar 7,55%, meningkat pada tahun 2020 menjadi 12.27%, kemudian tahun 2021-2022 meningkat menjadi menjadi 100%. Namun di tahun 2023 menurun tajam menjadi 38.66%.

Merujuk pada Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Tabel 2. 175
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	83	135	405	405	708
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	1.100	1.100	405	405	1834
3	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social**	**7.55%**	**12.27%**	**100%**	**100%**	**38.66%**

Sumber : Dinas Sosial. P3A&P2KB Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.2. Urusan Wajib Non Dasar

2.1.5.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Pekerja/Buruh dan Pengusaha adalah para Pelaku Utama di tingkat Perusahaan. Di satu sisi, pekerja/buruh dan pengusaha mempunyai

kepentingan yang sama ialah kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi disisi lain hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interprestasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada perbedaan.

Dalam kaitan dengan Perselisihan itu, Pemerintah berfungsi utama mengadakan pengaturan agar hubungan antar pekerja/buruh dan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh Pengaturan Hak dan Kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hokum. Disamping itu, pemerintah juga berkewajiban sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi secara adil.

Persentase Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja di Kabupaten Wajo pada Tahun 2022 sebesar 12.85 % sedangkan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar sebesar 9,12 % jika dilihat dari jumlah perusahaan yang bertambah dari 389 menajdi 548 perusahaan namun jumlah kasus perselisihan yang terjadi tetap, dikarenakan Perusahaan dan Pekerja sudah mengetahui Peraturan Perundang-Undangan terkait Ketenagakerjaan. Persentase tersebut sudah termasuk kategori baik Penyelesaian Perselisihan antara Pengusaha dan Pekerja yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Hubungan Industrial. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 176
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	5	5	5	5	5
2	Jumlah perusahaan	355	835	355	389	548
3	**Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun**	**14.08**	**5.99**	**14.08**	**12.85**	**9.12**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Pekerja adalah orang yang bekerja, orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, buruh, karyawan. sedangkan Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan

dan menanggung resiko yang mungkin saja akan terjadi dalam aktivitas usahanya.

Sebaik–baik pengaturan hak dan kewajiban, masih mungkin timbul perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap pengaturan tersebut. Apalagi jika perbedaan ini terkait dengan kepentingan, maka hal ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi perselisihan. Berbagai upaya strategis perlu dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan untuk mencegah atau meminimalkan timbulnya perselisihan. Upaya ini sangat bermanfaat untuk memelihara hubungan baik antara Pekerja dan Pimpinan Perusahaan. Apabila dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu Pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan ini kepada Instansi Ketenagakerjaan setempat. Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wajo sebagai salah satu Instansi di Kabupaten Wajo yang menangani Perselisihan Hubungan Industrial antara Perusahaan dan Pekerjanya.

Proses Penyelesaian melalui Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wajo. Mediator hanya membantu menyelesaikan masalah dan Putusan Penyelesaian tetap oleh Pihak-pihak yang berselisih.

Adapun Angka Sengketa Pengusaha–Pekerja yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama pada tahun 2022 sebesar 100% sama dengan tahun 2023 juga 100% dimana Kasus yang dicatatkan di Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wajo sebanyak 5 Kasus dan diselesaikan dengan hasil Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 5 Kasus. Untuk lebih jelasnya terkait besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 177
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	5	5	5	5	5
2	Jumlah kasus yang dicatatkan	5	5	5	5	5
3	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

- Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,Angkatan kerja dalah penduduk yang produktif yang telah memiliki pekerjaan sementara tidak bekerja atau menganggur,Penduduk usia Kerja adalah penduduk usia produsktif bagi yang bekerja maupun yang tidak bekerja,Pengangguran adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan dimasyarakat, Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha untuk sebuah bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Persentase tahun 2022 sebesar 6,90% sedangkan tahun 2023 sebesar 10,37% mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, sementara perusahaan yang membuka lowongan kerja adalah mandiri atau diperusahaan, namun sebagian besar terserap dikarenakan beberapa hal yaitu :
- Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakt sehingga tidak mampu terserap
- Tingkat kompetensi masih rendah
- Pencari Kerja yang sudah diterima masih banyak yang tidak kembali melapor ke Dinas Ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Wajo
- Dampak Covid 19.

Selain itu, dikarenakan beberapa faktor yaitu keahlian yang dimiliki pencari kerja berbeda dengan yang diinginkan oleh pemberi kerja. Adapun upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat mengalokasikan anggaran dari kementerian pada beberapa kabupaten kota yang tidak mendapat anggaran dan juga memaksimalkan fungsi dari fungsional pengantar kerja. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 178
Pencari Kerja yg Ditempatkan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencari kerja yang ditempatkan	36	25	66	99	87

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Pencari kerja yang terdaftar	781	376	933	1434	839
3	**Besaran pencari kerja yang ditempatkan**	**4.61%**	**6.65%**	**7.07%**	**6.90%**	**10.37%**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo. Tahun 2024

4. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Pekerja adalah orang yang bekerja, orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, buruh, karyawan. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah; pekerja-orang yang bekerja pada suatu lembaga, kantor, perusahaan dan sebagainya dengan mendapat gaji (upah). Para pekerja sebagaiman tersbut diatas mendapatkan Program perlindungan tenaga kerja telah dimulai sejak lama, dimana lembaga pertama yang terbentuk adalah YDJS (Yayasan Dana Jaminan Sosial) yang terbentuk sesuai dengan PMP No. 48/1952 dan PMP No. 8/1952 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh.Kemudian sesuai dengan PP No. 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja. YDJS digantikan oleh ASTEK (Asuransi Sosial Tenaga Kerja). Lalu pada tahun 1992, lahirlah undang-undang baru yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja dan melalui PP No. 36/1995, berubahlah ASTEK menjadi Jamsostek.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan Program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk itu perlu adanya Skema Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu menskronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk Jaminan social yang dilaksanakan oleh beberapa Penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberi manfaat yang lebih besar bagi setiap Peserta , maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kepada pekerja/buruh , pengusaha, pemerintah maupun kepada Masyarakat luas untuk dapat memberikan Informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Program Perlindungan Tenaga Kerja tela dimulai sejak lama, dimana lembaga pertama yang terbentuk adalah YDJS (Yayasan Dana Jaminan Sosial), yang terbentuk sesuai dengan PMP No. 48/1952 tentang Pengaturan Bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh. Kemudian sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan

program asuransi social tenaga kerja, YDJS digantikan oleh ASTEK (Asuransi Sosial Tenaa Kerja). Lalu pada Tahun 1992, lahirlah Undang-Undang baru yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja dan melalui PP No. 36/1995, berubahlah ASTEK menjadi Jamsostek. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang melindungi Pekerja agar kebutuhan minimal mereka sekeluarga dapat terpenuhi. Jamsostek berdiri pada tahun 1995, kemudian di Tahun 2014 PT.Jamsostek berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun Jumlah Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Wajo Tahun 2023 sebanyak 19.891 Orang dengan Jumlah Peserta Jamsostek sebanyak 4.506 orang. Sehingga besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek sebesar 22,65 %. Hal ini mengalami penurunan dari Tahun 2022 dikarenakan masih banyaknya Perusahaan yang belum memasukkan buruh atau karyawannya ke dalam Program Jamsostek. Berikut data terkait yang lebih jelas pada tabel :

Tabel 2. 16179
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekerja/buruh Jamsostek	4,975	6,470	6,257	13,560	5
2	Pekerja/buruh	7,136	7,136	7,910	23,962	20
3	**Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek**	**69.72%**	**90.67%**	**79.10%**	**56.59%**	**22.65%**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo. Tahun 2024

5. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan yang berlaku selama ini terkadang menempatkan Pekerja pada Posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan system hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan.

Adapun besaran perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2023 adalah nihil atau dengan kata lain tidak ada terjadi perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 180
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda Tahun n	10	5	5	5	0
2	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	10	5	5	5	0
3	**Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah**	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo. Tahun 2024

6. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa di tahun 2020 jumlah pendaftar sama dengan jumlah yang dilatih, namun berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 yang mana jumlah pendaftar lebih bayak daripada jumlah yang dilatih. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelatihan keterampilan meningkat signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan dukungan sarana dan prasarana serta instruktur yang kompeten mengingat makin bertambahnya jumlah angkatan kerja. Apabila angkatan kerja tidak diberikan keterampilan akan berdampak jumlah pengangguran makin bertambah khususnya di Kabupaten Wajo. Tahun 2023, jumlah yang dilatih sama dengan jumlah pendaftar. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 181
Besaran tugas kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenaga kerja yang dilatih	752	112	144	240	266
2	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	752	112	267	613	266
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	100%	100%	54%	39%	100%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo. Tahun 2024

7. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia khususnya di Kabupaten Wajo Dinas Tenaga Kerja melaksanakan program dan kegiatan yang memberikan pelatihan bagi pencari kerja agar setiap pencari kerja memiliki keterampilan berbasis Masyarakat. Melihat dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2022 100% sedangkan tahun 2023 sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 182
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenaga kerja yang dilatih	25	16	20	16	10
2	Pendaftar pelatihan berbasis Masyarakat	50	16	20	16	10
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat**	50%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo. Tahun 2024

8. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatlan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan pada tahun 2019-2023 mengalami stagnansi di mana pada tahun 2019 sebesar 100% demikian pula ditahun 2020. Namun di tahun 2021 tidak dilaksanakan karena adanya *Covid.19.* Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM memperluas peluang usaha meningkatkan produktivitas UKM. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan.

Tabel 2. 183
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenaga kerja yang dilatih	205	190	n/a		
2	Pendaftar pelatihan kewirausahaan	205	190	n/a		
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**	**100%**	**100%**	**0%**		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo. Tahun 2022

9. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Secara umum jumlah lulusan yang ada di Kabupaten Wajo hanya untuk S1 dan S2. Pada tahun 2017 rasio lulusan sebanyak 6,02% dimana jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 238 lulusan. Pada tahun berikutnya 2018 dan 2019 mengalami menurunan masing–masing 1.4 dan 1.2. Untuk tahun 2021 rasio lulusan meningkat kembali menjadi 1.2 dengan jumlah sebanyak 4.518 lulusan. UNtuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 184
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2017 s.d 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Julah lulusan S1/S2/S3	238	581	4.372	4.396	4.518
2.	Jumlah penduduk	395.059	404.538	374.888	383.005	392.437
3.	**Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)**	6,02	1,436	11.662	11.478	11.513

Sumber : BKPSDM KAB. WAJO Tahun 2019

2.1.5.2.2. Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi

1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan pada Pemberdayaan Masyarakat di Lingkup Desa dan Kelurahan di Kabupaten Wajo yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan Pemerintah atau sebaliknya, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok, dalam hal ini Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kelompok Informasi Masyarakat untuk mewujudkan jejaring diseminasi informasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan. Terkait data cakupan pengembangan KIM 2019 s.d 2023 yang terdata pada jumlah Desa 142 dan Kelurahan 48 dengan Jumlah 190 Desa/Kelurahan. Jumlah Desa dan Kelurahan yang membentuk KIM 107 Desa/Kelurahan dengan data yang diperoleh atas pencatatan data informasi yang di tiap Kecamatan menunjukkan bahwa KIM yang sebelumnya terbentuk dinyatakan sudah tidak Aktif lagi dan banyaknya kepengurusan anggota KIM terganti disebabkan minimnya pengelokasian anggaran pembentukan KIM di Desa dan Kelurahan. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2022 bertambah sebanyak 50

KIM, berdasarkan output kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik melalui sosialisasi pembentukan KIM Desa dan Kelurahan, cuma saja Data Pengurus dan Surat Keputusan Tahun 2023 nya sekarang masih menunggu dari Desa dan Kelurahan lainnya, dengan harapan terciptanya pengembangan sumber daya manusia, terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara terpadu dan berkesinambungan untuk tetap menghidupkan kembali KIM dengan melalui Sosialisasi Pelaksanaan Pembentukan KIM dimana Pemerintah dalam hal ini Diskominfotik memfasilitasi sosialisasi pembentukan KIM secara Swadaya yang berpengaruh pada terbatasnya anggaran pembentukan pada tiap Desa/Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 185
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KIM	14	14	25	50	50
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	14	14	14	14	14
3	**Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**179%**	**357%**	**357%**

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Terkait indikator cakupan layanan telekomunikas rumus yang digunakan adalah luas wilayah yang tercoverage dibagi luas wilayah keseluruhan. Untuk data Tahun 2019 hingga tahun 2022 belum pernah dilakukan pengukuran terhadap indikator ini. namun berdasarkan cakupan wilayah tercoverage untuk pelayanan komunikasi data antar Perangkat Daerah (PD) yakni sebesar 100 persen. Dalam konteks layanan telekomunikasi yang digunakan masyarakat yaitu layanan telekomunikasi seluler selama ini layanan telekomunikasi seluler di wilayah Kabupaten Wajo sudah mencapai 100% karena semua wilayah kecamatan dan kelurahan telah tercakup oleh operator seluler.

Mengingat hal tersebut sangat sulit untuk dibuktikan kebenaran dan kevalidan data tersebut, maka hal ini perlu diperbaharui. Karena data yang

dimaksud diberikan pada Balai Kementerian Kominfo Makassar adalah untuk atau dasar pertimbangan atau uji coba sebagai bentuk yang mendasar dalam pemenuhan permintaan data. Tapi sampai saat ini kami sudah upayakan dengan cara koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pusat Statistik tapi belum bisa mencapai hasil yang maksimal. sehingga sulit untuk dibuktikan kebenaran data tersebut.

Tabel 2. 186
Cakupan layanan telekomunikasi Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	1,879.05	1,879.05	1,879.05	1,950.55	1,950.55
2	Luas Wilayah Keseluruhan (km2)	2,506.19	2,506.19	2,506.19	2,506.19	2,506.19
3	**Cakupan Layanan Telekomunikasi**	**75%**	**75%**	**75%**	**78%**	**78%**

Sumber : Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Jumlah penduduk pengguna HP dan PSTN setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat ini masyarakat senantiasa melakukan transaksi informasi dan komunikasi. Penggunaan gawai semakin banyak di kalangan masyarakat mulai dari anak usia sekolah hingga golongan usia non.produktif. Begitu pula dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Wajo menjadi salah satu penyebab peningkatan jumlah pengguna HP dan PSTN dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga memicu konsumsi internet dalam rumah tangga. Baik yang berasal dari penggunaan gawai/HP maupun pemasangan jaringan internet rumah tangga berlangganan yang jumlahnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun jumlah tidak terlalu signifikan. Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon mengalami peningkatan seiring dengan jumlah penduduk menggunakan HP dengan tanpa batas usia.

Tabel 2. 187
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk yang memiliki HP	366,180	367,527	368,874	371,990	371,990
2	Penduduk yang memiliki telepon PSTN	1,521	1,521	1,521	1,550	1,550

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	**Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)**	**367,701**	**369,048**	**370,395**	**371,780**	**371,780**
4	**Jumlah penduduk**	**397,814**	**379,079**	**379,396**	**379,706**	**405,137**
5	**Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon**	**92%**	**97%**	**98%**	**98%**	**92%**

Sumber : Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kab. Wajo. Tahun 2024

4. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Pertumbuhan persentase rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Wajo terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Perakhir tahun 2021 dari total 103.712 rumah tangga, sebanyak 0,535 persen telah memiliki akses internet. Sedangkan di Tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 0,547 persen. Pertumbuhan persentase rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Wajo terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Per akhir tahun 2023 dari total 107.940 rumah tangga. Jumlah ini meningkat tidak terlalu signifikan.

Meningkatnya akses internet di rumah tangga ini mengikuti tren peningkatan penggunaan telepon seluler dan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer. Tren ini terlihat untuk periode 2019-2023.

Tabel 2. 189
Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	50,675	51,775	52,775	53,660	53,900
2	Jumlah rumah tangga	104,846	105,946	106,946	107,940	107,940
3	**Proporsi rumah tangga dengan akses internet**	**0.483**	**0.489**	**0.493**	**0.497**	**0.499**

Sumber : Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kab. Wajo. Tahun 2024

5. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Dari data dibawah dapat dilihat bahwa di Kabupaten Wajo persentase rumah tangga yang memiliki komputer berada di kisaran 53.50%. Dari tahun ke tahun tidak ada tren khusus terkait penurunan dan kenaikan namun tiap tahun jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi semakin bertambah dimana persentase tertinggi saat ini di Tahun 2023 yakni 64%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk yang dibarengi dengan kenaikan jumlah kepemilikan komputer pribadi.

Tabel 2. 190
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
Tahun 2019– 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	54,347	55,456	55,456	56,700	67,100
2	Jumlah rumah tangga	103,712	103,712	103,712	103,712	103,712
3	**Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi**	**0.524**	**0.535**	**0.535**	**0.547**	**0.647**

Sumber : Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.2.3. Bidang urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase koperasi aktif

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Berdasarkan data Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana tersebut pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 Jumlah Koperasi aktif adalah 291 unit, dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif menjadi 292 unit, peningkatan angka ini terjadi karena adanya penambahan atau pendirian 1 (satu) unit koperasi baru, yaitu Koperasi Produsen “Sawit Ewako Mandiri” yang beralamat di Jl. Andi Unru Kecamatan Tanasitolo. Adapun Persentase Koperasi Aktif pada Tahun 2023 adalah 64,75 %, persentase ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 0,08 % dari Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 191
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	286	310	289	291	292
2	Jumlah Seluruh Koperasi	446	446	448	450	451
3	**Persentase Koperasi Aktif**	**64.13%**	**69.51%**	**64.51%**	**64.67%**	**64.75%**

Sumber : Disperindagkop Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Persentase UKM non BPR/LKM UKM

Tahun 2019 jumlah UKM Non BPR/LKM Aktif sebanyak, tahun 2020 meningkat menjadi 12 dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 15, pada Tahun 2022 masih sama di Tahun 2021 ini menunjukkan bahwa peran dari UKM non BPR/KM aktif berhasil tumbuh meskipun dihadapkan

dengan pandemi *Covid-19* disaat kredit perbankan mengalami kontraksi, UKM non BPR justru masih berhasil tumbuh. Pertumbuhan tersebut merupakan bukti bahwa UKM non BPR masih bertahan dalam menghadapi tekanan pandemi sepanjang tahun. Pada Tahun 2023 persentase UKM non BPR/LKM Aktif masih sama dengan jumlah pada tahun 2022 yaitu 30,00%. Untuk lebih jelasnya data terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 192
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif	8	12	15	15	15
2	Jumlah Seluruh UKM non BPR/LKM	8	12	35	50	50
3	**Persentase UKM non BPR/LKM Aktif**	**100%**	**100%**	**42.86%**	**30%**	**30%**

Sumber : Disperindagkop Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Persentase BPR/LKM Aktif

Jumlah BPR/LKM selama kurung watu 5 (Lima) Tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak mengalami peningkatan atau tetap berjumlah 1 BPR/LKM aktif. Hal ini dapat terlihat pada tabel.

Tabel 2. 193
Jumlah BPR/LKM Aktif Tahun Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah BPR/LKM aktif	1	1	1	1	1
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	1	1	1	1	1
3	**Persentase BPR/LKM Aktif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Disperindagkop Kab. Wajo. Tahun 2024

4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Dalam kurun waktu lima tahun, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo mencatat Jumlah seluruh UMKM sebanyak 16.920 pelaku usaha. Upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM saat ini sangat dibutuhkan keseriusan dan keberpihakan yang nyata, tegas dan lebih luas dari semua pihak. Selain itu bertambahnya UMKM ini dinilai sebagai bentuk kesadaran terhadap para pelaku usaha agar terus mengembangkan usahanya, khususnya administrasi.

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Tahun 2019 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 8.319, di tahun 2020 dan meningkat menjadi 12.028 dan pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 12.174. Sedangkan pada tahun 2022 Persentase usaha Mikro dan Kecil mengalami

kenaikan dengan jumlah sebanyak 3008 Usaha Mikro dan kecil dengan persentasi 18,29 %, ini di sebabkan adanya Program Pemerintah dalam hal menciptakan 10.000 Interpreneur di Kabupaten Wajo sehingga mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Wajo. Dan pada tahun 2023 jumlah seluruk UMKM sebanyak 16.920 dengan pertambahan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 475 UMKM. Untuk lebih jelasnya data terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 194
Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	8,319	12,028	12,174	3,008	4,750
2	Jumlah Seluruh UMKM	8,372	12,028	13,437	16,445	16,920
3	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**99.37%**	**100%**	**90.60%**	**18.29%**	**28.1%**

Sumber : Disperindagkop Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.2.4. Bidang Urusan Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor berskala Nasional terdiri dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing). Tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah investor berskala nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2019 sejumlah 635, namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 62 investor, hal ini merupakan dampak dari pandemi *Covid-19,* pemerintah memberlakukan pembatasan sosial untuk mencegah *Covid-19.* Kemudian pada tahun 2021 jumlah investor mengalami kenaikan hal ini disebabkan terbukanya pembatasan sosial, investor sektor UMKM menggerek naiknya perekonomian yang mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian. Tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 2.875 Investor, daan terus meningkat d yahun 2023 menjadi 6.305 investor. Peningkatan investor tersebut didukung oleh beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Wajo dan dengan berbagai kemudahan dan kerjasama terhadap investor. Usaha mikro juga mempunyai perputaraan transaksi yang besar, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.195

Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=3+4)*
2019	Jumlah investor	628	7	**635**
2020	Jumlah investor	55	7	**62**
2021	Jumlah investor	147	7	**154**
2022	Jumlah investor	2875	0	**2,875**
2023	Jumlah investor	6305	0	**6,305**

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan komunikasi dan informasi berdampak pula pada peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Nilai Investasi Indikator ini diukur berdasarkan jumlah investor yang menanamkan modal tahun 2019 sebanyak 294.660.109.320 kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 11,940,837,780, hal ini dikarenakan Pandemi *Covid-19*. Namun Tahun 2023 meningkat tajam senilai 2,092,368,212,287. Jumlah nilai investasi mengalami kenaikan disebabkan karena keadaan sudah kembali normal tidak ada pembatasandari pemerintah akibat pengaruh *Covid-19*, selain itu perizinan semakin dipermudah hal ini disebabkan adanya sistem aplikasi yang memudahkan dan memepercepat keluarnya izin bagi pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 196
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2019	682	146,712,883,413	628	294,660,109,320
2020	55	1,194,083,778	55	11,940,837,780
2021	4	435,517,927,600	147	435,517,927,600
2022	4	2,431,909,560,130	2875	4,969,932,970,566
2023	57/6	65,000,000,000	6305	2,092,368,212,287

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja indikator ini diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ada dihitung dengan banyaknya jumlah investor dengan persentase nilai rasio lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.220 orang, hali ini disebabkan pelaku usaha memperoleh nomor induk berusaha dari OSS dari sebagian pelaku usaha yang tidak mendapatkan izin di karenakan masalah

kepatuhan administrasi dan pemenuhan komitmen dan tahun 2020 mengalami penurunan di sebabkan karena adanya Pandemi *Covid-19*. Meningkatnya rasio tenaga kerja dipengaruhi oleh terbukanya lapangan kerja dengan muncul banyak kegiatan usaha UMKM. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 197
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	1,220	194	917	917	917
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	635	62	154	2,875	6,305
3	**Rasio daya serap tenaga kerja**	1.9	3.1	6.0	0.3	0.1

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Wajo. Tahun 2024

4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah aspek dari indikator kenaikan/penurunan nilai investasi PMDN/PMA seharusnya berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara online pertriwulan akan tetapi data tersebut tidak disediakan karena pelaku usaha yang disebut sebagai investor tidak terdaftar dalam sistem yang merupakan gerbang utama untuk masuk dalam Aplikasi LKPM. Seiring dengan terbukanya pembatasan sosial akbat pendemi covid 19. pelaku usaha mengalami kelancaraan dalam memproduksi secara komersial sehingga berdampak kepada kenaikan realisasi investasi. Serta ketaatan para pelaku usaha melaporkan nilai realisasi investasinya. ini tidak luput dari kinerja bidang pengendalian DPMPTSP melakukan koordinasi dalam pengawasan, pemantauan dan pembinaan kepada para pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar. Pada Tahun ini pelaporan LKPM dikelompokkan nilai investasi (Modal usaha perusahaan) sehingga nilai realisasi LKPM mengalami penurunan. Tidak semua perusahaan PMDN bisa memenuhi persyaratan dalam pelaporan LKPM.Perusahaan PMDN yang wajib lapor LKPM masuk pada jenis menengah dengan modal usaha Rp.500.000.000,00 keatas. Laporan LKPM pada saat ini masih data pelaporan Triwulan ke-3, hal ini disebabkan pelaporan Triwulan ke-4 belum terbit. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 198
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi PMDN	294.660.109.320	11,940,837,780	140,057,602,344	273,220,360,836	4,577,528,533,405
3	**Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)**	**-95.55%**	**-95.95%**	**1072.93%**	**95.08%**	**1575.40%**

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.2.5. Bidang Urusan Kepemudaan Olahraga

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita.cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide.ide ataupun gagasan yang berilmu wawasan yang luas serta berdasarkan kepadanilai.nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan komunitas adalah suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu yang memiliki kesamaan atau kemiripan ciri, minat, aktifitas, bahkan profesi dalam suatu lingkup tertentu.

Keaktifan organisasi kepemudaan sangat diperlukan untuk menggerakkan potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Wajo. Apabila organisasi kepemudaan tidak aktif dalam suatu daerah maka nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme akan hilang pada generasi muda kita.

Tabel 2. 199
Persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	33	20	45	47	47
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	188	195	195	195	195
3	**Persentase organisasi pemuda yang aktif**	**17.55**	**10.26**	**23.08**	**24.10**	**24.10**

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo. Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa sudah ada peningkatan pada kegiatan Organisasi Kepemudaan. Hal ini terjadi karena adanya dukungan dan bantua dari Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata pada Bidang Kepemudaan dengan melakukan pendataan tentang organisasi yang masih aktif dan organisasi yang tidak aktif dengan melihat SK kepengurusan organisasi tersebut dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesbangpol jumlah keseluruhan organisasi pemuda yang terdaftar mayoritas dari komunitas/club dan organisasi lokal. Keaktifan organisasi kepemudaan sangat diperlukan untuk menggerakkan potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Wajo. Apabila organisasi kepemudaan tidak aktif dalam suatu daerah maka nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme akan hilang pada generasi muda kita.

2. Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha mua berasal dari pemuda yang berusia 17 tahun sampai 30 tahun. Pemuda yang saat ini menjadi sasaran pendirian usaha karena generasi muda milinial saat ini memiliki kemampuan marketing yang sangat bagus dengan adanya bantuan media sosial berupa Instagram, Facebook, Whatsapp dan media sosial lainnya. Peran pengusaha muda penting mempercepat roda perekonomian.

Pada tabel berikut dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 Jumlah Wirausaha Muda sebanyak 1.036 orang dengan persentase 34,44 %. Pada Tahun 2023 Jumlah Wirausaha Muda sebanyak 728 dengan persentase 55,83 %. Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wirausaha Muda mengalami penurunan. Pada dasarnya penurunan Jumlah wirausaha muda ini dikarenakan rata-rata wirausaha muda sudah terdata keseluruhan, jadi yang pada data berikut adalah wirausaha yang baru mendirikan usaha.

Tabel 2. 200
Persentase wirausaha muda Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Wirausaha Muda	2,452	874	2,818	1,036	728
2	Jumlah Seluruh Wirausaha	2,785	4,925	11,599	3,008	1,304
3	**Persentase Wirausaha muda**	**88.04%**	**17.75%**	**24.30%**	**34.44%**	**55.83%**

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Cakupan Pembinaan Olah Raga

Cakupan pembinaan ke olahragaan dari tahun 2019 meningkat di tahun 2020 yaitu dari 24 menjadi 25 cabor, namun statis di tahun 2021. Tahun 2022 meningkat menjadi 26 cabor kemudian tahun 2023 menigkat

lagi menjadi 28 cabor. Cabang Olahraga dibina dibawah naungan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kab. Wajo yang bekerjasama dengan Disporapar Kab. Wajo. Adapun di tahun 2023 Cabang Olahraga yang dibina meliputi: Sepak Bola, Senam, Bulutangkis, Menembak, Tennis Meja, Tennis Lapangan, Taekwondo, Karate, Judo, Billiard, Balap Motor, Futsal, Volly, Bridge, Takraw, Volly Pasir, Basket, Pencak Silat, Renang, Panjat Tebing, Panahan, Gateball, Petanque, Youngmodo, Atletik, Binaraga, Kick Boxing, dan Softball. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 201
Cakupan pembinaan olah raga Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	24	25	25	26	28
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	24	25	25	26	28
3	**Cakupan pembinaan olahraga**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo. Tahun 2024

4. Pelatih Yang Bersertifikat

Pelatih Bersertifikat merupakan bukti legalitas dan kompetensi seseorang dalam melakukan pelatihan pada cabang olahraganya Sertifikat diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan telah lulus Uji Kompetensi dan pastinya berhak untuk Melakukan Pelatihan. Bagi atlet Sertifikat pelatih ini bermanfaat kepada pembinaan atlet baik dalam meningkatkan prestasi maupun intelektual atlet. Di Tahun 2023, dari 26 pelatih yang bersertifikat, 12 diantaranya berlisensi Nasional. Masing-masing dengan rincian; 5 dari cabang olahraga Sepak Bola, 2 pelatih dari cabang olahraga Volley, 1 dari cabang olahraga Senam, 2 dari cabang olahraga Sepak Takraw, 1 dari cabang olahraga Atletik dan 1 dari cabang olahraga Futsal. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 202
Cakupan pelatih yang bersertifikat Tahun 2019– 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelatih bersertifikat	24	24	27	25	26
2	Jumlah seluruh pelatih	56	56	61	61	61
3	**Cakupan Pelatih yang bersertifikasi**	**43%**	**43%**	**44%**	**41%**	**43%**

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo. Tahun 2024

5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pelajar dikategorikan pada anak yang mengenyam pendidikan formal dan non formal di bangku Sekolah Dasar dan Menengah. Di kabupaten Wajo data dari tahun 2017 sampai tahun 2021 telah mengalami peningkatan jumlah atlet pelajar yang dibina dari seluruh atlet pelajar yang ada di Kabupaten Wajo walaupun peningkatan tersebut masih jauh dari target yang diinginkan ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasaran olahraga yang memadai sehingga berimbas pada minat pelajar yang akan dibina. Sebanyak 110 atlit pelajar binaan Dinas Pemuda. Olahraga dan Pariwisata terdiri dari 63 atlit sepak bola. 37 atlit taekwondo. dan 10 atlit pencak silat. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 20317
Cakupan pembinaan atlet muda Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	97	97	109	109	165
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	522	522	522	522	642
3	**Cakupan pembinaan atlet muda**	**18.6%**	**18.6%**	**20.9%**	**20.9%**	**25.70%**

Sumber : Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo. Tahun 2021

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi pada tahun tahun 2019 sebesar 13 atlet dan terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar 214 atlet. Adapun permasalahan yang sering dihadapi dalam peningkatan atlet berprestasi yaitu masih kurangnya keikutsertaan atlet dalam kejuaraan nasional dan internasional. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 204
Jumlah Atlet Berprestasi Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Atlet yang mengikuti Turnamen Nasional	11	4	1	5	5
2	Atlet yang mengikuti Turnamen Internasional	2	0	2	1	0
3	**Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun**	**13**	**4**	**3**	**6**	**5**

Sumber : Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo. Tahun 2024

Adapun jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional maupun internasional dan turnamen yang diikuti menurut tabel diatas adalah :

- Tahun 2019, 4 atlet Sepak Bola Juara I Popwil Tk. Nasional di Mataram dan di cabang olahraga Balap Motor berhasil menjuarai Asia Road Racing Championship.
- Tahun 2020 atlet Perbakin Wajo berhasil meraih Perak Event Air Pistol, Perak Event Air Rifle Match, Perunggu Balandika Kopasus Cup dan Perak Tembak Reaksi Production. Di cabang olahraga sepak bola, 1 atlet Wajo berhasil masuk akademi PSM dan ditahun yang sama masuk tim Garuda Selection di Italia dan Inggris.

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Dari 15 target Cabang Olahraga yang dimenangkan pada tahun 2020 hanya satu yang terelasasi cabang olahraga yaitu Menembak (Perbakin) yang menangkan pada tahun 2020 ini dikarenakan wabah pandemic Covid 19 yang terjadi pada akhir tahun triwulan pertama tahun 2020 yang mengakibatkan segala bentuk event olagraga ditahun 2020 tidak dilaksanakan. Kemudian di Tahun 2021-2023 terus meningkat, dari 24 -43 prestasi yang di raih dari berbagai cabang olahraga. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 205
Jumlah prestasi olahraga Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	87	4	24	34	42

Sumber : Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.2.6. Bidang Urusan Statistik

1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi

Untuk urusan Statistik yang menangani masalah Data Sektoral Kabupaten Wajo masih belum optimal dalam dalam pengelolaan Data Sektoral di Kabupaten Wajo. Ini dapat terlihat sistem data yang belum terintegrasi secara terpadu dan konsisten yang dapat kita lihat ADA dan TIDAK ADAnya sistem data yang terintegrasi tiap tahunnya. Oleh karena itu, perlunya melengkapi isian data sektoral dalam Sistem Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten Wajo dan pengembangan pengelolaan sistem data yang dapat menyediakan data secara optimal. Adapun penyediaan data dalam pencetakan buku tidak semuanya dapat dapat terpenuhi dengan

baik. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatan anggaran pada Bidang Statistik Sektoral.

Tabel 2. 206
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Buku ”kabupaten dalam angka”

Buku “ Kabupaten dalam Angka” masih tersedia sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 2. 207
Buku “kabupaten dalam angka” Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Buku ”PDRB”

Tabel 2. 208
Buku “PDRB” Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku ”PDRB”	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.2.7. Bidang urusan Persandian

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Situasi kondisi penggunaan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat di satu sisi keamanan informasi turut diperhitungkan demi keamanan akses informasi tersebut. Pengiriman informasi melalui email sanapati dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) merupakan salah satu sistem pengamanan informasi yang sangat aman, berdasarkan Perka Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaringan Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi berupa email sanapati. Pengguna Persandian adalah pejabat pada instansi pemerintah yang memanfaatkan

persandian, seluruh OPD Kabupaten Wajo menggunakan email sanapati untuk terima dan berkirim berita/radiogram.

Tabel 2. 209
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	53	41	41	39	39
2	Jumlah total perangkat daerah	53	41	41	39	39
3	**Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.2.8. Bidang Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Secara umum penyelenggaraan seni dan budaya sejak tahun 2019-2023 cenderung sama yakni yakni 7-6 kegiatan. Adapun jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki Kabupaten Wajo pada tahun 2019 sebanyak 7 dan 6 unit di tahun 2020 hingga 2022, kemudian tahun 2023 menjadi 7 unit.

Tabel 2. 210
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	6	6	6	7

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya Struktur Cagar Budaya Situs Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan Sejarah Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga dalam rangka pelestarian dan pengelolaannyan diperlukan adanya upaya perlindungan pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Wajo saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat sehingga implikasinya dapat

mengancam Keberadaan Cagar Budaya maka diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya. Dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Wajo mempunyai tujuan melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya memperkuat kepribadian daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dan mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat Nasional dan Internasional. Pemerintah Kabupaten Wajo sejak Tahun 2019 hingga 2023 melalui Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Wajo telah melakukan pelestarian terhadap Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 211
Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	60	60	60	60	60
2	Total Benda situs & kawasan yang dimiliki daerah	60	60	60	60	60
3	**Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Karya budaya Sulawesi Selatan yang dimasukan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Terdapat 2 karya budaya di Kabupaten Wajo yang tercatat dari tahun 2018. Tahun 2019 hingga tahun 2022 sebanyak 4. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 212
Jumlah karya budaya yang direvetalisasi dan inventarisasi
Tahun 2019– 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	4	4	4	4

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. Tahun 2024

4. Jumlah cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Tabel 2. 213
Jumlah cagar budaya yang dikelolah secara terpadu
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023

1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	24	24	24	24	24

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka persentase jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu tahun 2018 sampai 2022 meningkat dan stagnan hingga 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Cagar Budaya yang telah dikaji dan dapat dijadikan dan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya untuk dikelola sebagai Aset Sejarah dan Situs Perpustakaan Daerah.

2.1.5.2.9. Bidang Urusan Perpustakaan

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah tahun 2019-2023 telah mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan oleh adanya pembinaan/sosialisasi yang dilaksanakan Perpustakaan Kabupaten Wajo baik melalui Perpustakaan milik Pemda dan non Pemda setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mana dalam hal ini disebutkan bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengelola Perpustakaan dan melakukan pembinaan dengan melalui berbagai bentuk kegiatan yang ada pada Perpustakaan Kabupaten tersebut.

Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Perpustakaan di dalam pengembangan dan pembinaan Perpustakaan yang ada pada Kabupaten Wajo, yaitu masih minimnya tenaga pustakawan/tenaga teknis yang bersertifikat.

Dan kedepannya diperlukan pengangkatan tenaga pustakawan/tenaga teknis Perpustakaan, pelatihan tenaga Perpustakaan, penerbitan peraturan daerah tentang tenaga pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.

Tabel 2.214
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda)	375.942	158.420	162.482	272.000	272.000
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	0	7.8	7.778	8.100	9.200
3	**Total pengunjung perpustakaan (1+2)**	**2.692**	**383.742**	**204.192**	**170.942**	**281.200**

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wajo Tahun 2024

2. Jumlah Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan milik pemerintah daerah pada tahun 2023 berjumlah 521 unit yang terdiri dari Perpustakaan desa/kelurahan 119 unit, perpustakaan sekolah dasar (SD) 325 unit, perpustakaan sekolah menegah pertama (SMP) 74 unit, perpustakaan umum 3 unit yaitu Perpustakaan Cakkuridie, Perpustakaan Islamic Center, Perpustakaan DPK Kabupaten Wajo.

Jumlah Perpustakaan milik non Pemda Kab. Wajo pada tahun 2019-2023 tidak mengalai perubahan yaitu 3 unit yang terdiri dari : Perpustakaan Perguruan Tinggi Lamaddukkelleng, Perpustakaan Perguruan Tinggi As'Adiyah Sengkang, Perpustakaan Perguruan Tinggi Universitas Puangrimaggalatung Sengkang.

Tabel 2. 215
Jumlah Perpustakaan daerah
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda)	512	521	521	521	521
2.	Jumlah perpustakaan milik non pemda	3	3	3	3	3
3.	**Total jumlah perpustakaan (1+2)**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wajo Tahun 2023

3. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Melihat jumlah rasio Perpustakaan pada saat ini dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk yang ada masih kurang. Hal ini disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana Perpustakaan pada masing-masing Perpustakaan baik milik Pemerintah daerah maupun milik non Pemda Kabupaten Wajo. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan sarana dan parasarana yang memadai berupa gedung, ruang baca, sistem jaringan internet dan Perpustakaan yang berbasis digitalisasi.

Tabel 2. 216
Rasio perpustakaan per satuan penduduk
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perpustakaan	515	515	524	524	524
2	jumlah Penduduk	397.814	379.079	379.396	379.706	405.137
3	**Rasio**	**1.29**	**1.35**	**1.38**	**1.38**	**1.29**

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wajo Tahun 2024

4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun

Jumlah rata-rata Perpustakan yang ada pada saat ini dibanding dengan jumlah pengunjung yang ada setiap tahunnya telah mengalami peningkatan, namun masih diharapkan adanya peningkatan pada tahun berikutnya. Adapun masalah yang dihadapi adalah belum memadainya sarana dan prasarana.

Solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana yang memadai berupa pembangunan gedung layanan pada masing-masing Perpustakaan, bimtek pengelolaan perpustakaan dan pengadaan buku bacaan pada masing-masing Perpustakaan.

Tabel 2. 217
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-Rata jumlah pengunjung perpustakaan	375.644	204.092	328.103	428.000	428.000

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wajo Tahun 2024

5. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah pada tahun 2019-2023 tidak mengalami peningkatan ditiap tahunnya. Hal ini disebabkan minimnya koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan desa/kelurahan. Untuk kedapannya masih perlu adanya penyediaan bahan bacaan baik berupa koleksi digital maupun koleksi umum lainnya di Perpustakaan desa/kelurahan.

Tabel 2. 218
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wajo Tahun 2024

6. Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis dan Bersertifikat

Tabel 2. 219
Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis dan Bersertifikat
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pustakawan. tenaga teknis dan penilaian yang bersertifikat	2	2	2	2	2
	Jumlah pustakawan. tenaga teknis dan penilaian yang non sertifikat	1	1	1	1	1

2.	Jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai	3	3	3	3	3
3.	Persentase pustakawan. tenaga teknis dan penilaian yang memiliki bersertifikat	3	3	3	3	3

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wajo Tahun 2024

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat dibanding data yang ada pada saat ini masih kurang. Tenaga pustakawan dan penilai yang ada di Kabupaten Wajo rata-rata belum memiliki sertifikasi keahlian. Kedepan, tenaga pustakawan dan penilai diharapkan dapat memiliki sertifikasi (Bimtek Pengelolaan Perpustakaan).

2.1.5.2.10. Bidang Urusan Kearsipan

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku adalah kegiatan pengelolaan arsip sesuai kaidah-kaidah atau peraturan (regulasi) yang berlaku dan apabila tidak melaksanakan pengelolaan arsip secara baku, maka pertumbuhan arsip menjadi tidak terkendali. Adapun kaidah kearsipan yang dimaksud adalah Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Keamanan Klasifikasi dan Hak Akses Arsip Dinamis (SKKAD) dan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Namun belum optimal penerapan 4 (empat) pilar penyelengaraan kearsipan dinamis tersebut. lndikator diukur berdasarkan jumlah Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah. Untuk tahun 2020 s.d. 2022 stagnan karena tidak ada anggaran pembinaan kearsipan, disamping minimnya sarana dan prasarana (sarpras) kearsipan, belum adanya arsiparis pada setiap PD sesuai kebutuhan. dan belum lengkapnya regulasi kearsipan dalam bentuk Perbup sehingga hampir setiap PD tidak ada penataan arsip dinamisnya.

Adapun Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2019 sampai sekarang namun belum optimal. yaitu: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Bappedalitbangda, Dinas Kesehatan, RSUD Lamadukkelleng, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 220
Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2019 s.d 2029

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	jumlah perangkat daerah yang telah menerapka arsip secara baku	11	9	9	9	9
2	jumlah perangkat daerah	53	41	41	41	41
3	**Persentase perangkat daerah yang telah menerapka arsip secara baku**	**20.75%**	**21.95%**	**21.95%**	**21.95%**	**21.95%**

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wajo Tahun 2024

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pemerintah daerah Kabupaten Wajo terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan arsip agar semua dokumen penting terkait dengan kegiatan pemerintah realiabel dan akurat untuk digunakan. Untuk itu pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir terus menambah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Wajo.

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dengan target peserta kegiatan SDM kearsipan sebanyak 40 orang. Namun sejak tahun 2019 s.d. 2023 belum ada anggaran kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dinamis. Padahal perlu mengoptimalkan kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi penyelenggaraan kearsipan dinamis. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius Pemda Kabupaten Wajo di tahun berikutnya.

Tabel 2. 221
Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan**	0	0	0	0	0

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wajo Tahun 2024

2.1.5.2.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Kondisi partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan, baik eksekutif dan yudikatif di Kabupaten Wajo menunjukkan pada tahun 2019 sekitar 17,40% dan di tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 17,30% dan di tahun 2021 menjadi 17,22%.

Tahun 2022 meningkat tajam menjadi 60,73% dan tahun 2024 meningkat lagi menjadi 82,59%. Meski belum dinilai optimal, namun sebagian pemimpin lembaga pemerintah sudah memahami pentingnya peran perempuan di lembaga pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Kemampuan dan kapasitas perempuan harus lebih ditingkatkan Budaya Patriarki yakni Struktur yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dan lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah berupaya meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuannya baik formal maupun non formal untuk lebih menambah wawasan dari berbagai aspek sehingga dengan mudah dapat mengemban tugas yang dibebankan kepadanya oleh pejabat penentu. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 112).

Tabel 2. 222
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.678	3.658	3.676	4.156	3.472
2	Jumlah pekerja perempuan	21.141	21.141	21.342	6.483	4.204
3	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**17,40**	**17,3**	**17,22**	**60,73**	**82,59**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

2. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD merupakan Partisipasi sejajarnya perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah semata.mata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan karena dengan berkembangnya demokrasi, tuntutan keterlibatan perempuan dalam politik semakin kuat.

Persentase keterwakilan perempuan di Kabupaten Wajo dalam periode pemilu 2019-2024 keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen semakin menurun sekitar 10 % artinya pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal dibandingkan laki-laki karena belum

maksimalnya pendidikan demokrasi di kalangan perempuan dan juga masih kentalnya budaya patriarki, sehingga kuota 30% perempuan belum tercapai secara maksimal meskipun pada saat penyusunan Calon Anggota Legislatif Kuota 30% perempuan terpenuhi.

Beberapa hal yg perlu dilakukan dalam upaya membangun Budaya Politik Perempuan dalam memenuhi Hak-Hak Politiknya adalah Kaum Perempuan perlu mengetahui mengenai masalah budaya politik di Indonesia. Tingkatkan pengetahuan mengenai konsep memahami diri.

Tabel 2. 223
Prorporsi kursi yang dipduduki perempuan di DPR Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kursi DPRD yang dipduduki perempuan	7	4	4	4	4
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	40	40	40	40	40
3	**Proporsi kursi yang dipduduki perempuan di DPR**	**17.50%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

3. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Kabupaten Wajo. Partisipasi perempuan di lembaga swasta di tahun 2019 sekitar 55.76% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 55.42% hal ini mengakibatkan Pandemi *covid-19* sehingga banyak pekerja yang dirumahkan dan pada umumnya kebanyakan kaum perempuan, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 98.16% dan menurun tahun 2022 sebesar 97,46%. Hal ini disebabkan karena banyak perempuan ingin mencari pekerjaan dalam membantu perekonomian keluarga.

Tabel 2. 224
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	17.463	17.356	1.656	692	692
2	Jumlah pekerja perempuan	31.320	31.320	1.687	710	4.204
3	**Partisipasi perempuan di lembaga swasta**	**55.76%**	**55.41%**	**98.16%**	**97,46%**	**16,46%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

4. Rasio KDRT

Masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan salah satu masalah yang melanggar hak asasi wanita. Kasus KDRT bisa terjadi karena adanya faktor usia, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, status sosial ekonomi. Tetapi saat ini pihak pemerintah lebih fokus dalam menangani masalah KDRT ini, hal ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan perempuan. melakukan advokasi perubahan kebijakan, melakukan kajian kritis terhadap penyusunan pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai informasi tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya, melakukan penguatan kelembagaan, melakukan gugatan *class action* dan legal standing guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) secara kelompok. Persentase KDRT di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 rasio KDRT sebesar 0.015% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 0.008% dikarenakan adanya kegiatan sosialisis ke mayarakat tentang dampak dari kekerasan rumah tangga, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan berkisar 0.013% disebabkan adanyak dampak *Covid-19*.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan. terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Tabel 2. 225
Rasio KDRT Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KDRT	21	12	19	43	8
2	Jumlah rumah tangga	144,227	102,970	105,694	105,488	140,238
3	**Rasio KDRT**	**0.015**	**0.012**	**0.018**	**0.041**	**0.006**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

5. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Anak merupakan penentu kualitas sumberdaya manusia dan akan menjadi pilar utama pembangunan oleh karena itu seluruh popuasi anak perlu ditingkatkan kualitasnya mendapatkan perlindungan sungguh-

sungguh dari semua elemen masyarakat. Provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak memiliki tenaga kerja di bawah umur terutama yang bekerja di usaha-usaha informal asisten rumah tangga hotel tempat karoke pedagang asongan(untuk diwilayah perkotaan) pemulung dst. Kondisi tempat kerja tersebut sangat rentan dengan tindakan kekerasan pelecehan seksual seks bebas dan narkoba. Anak merupakan penentu kualitas sumber daya manusia dan akan menjadi pilar utama pembagunan, oleh karena itu seluruh populasi anak perlu ditingkatkan kualitasnya mendapatkan perlindungan sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Pada tahun 2021 hingga 2023 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dapat dikatakan tidak ada data tenaga kerja dibawah umur namun.

Tabel 2. 226
Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur
Tahun 2021 s.d 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun	7.256	0	0
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	7.256	0	0
3	**Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur**	01.37	0	0

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Perbandingan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja dikali dengan seratus. Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja, maka semakin besar juga jumlah angkatan kerja. Dan begitu pula sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih sekolah dan yang mengurus rumah tangga akan menyebabkan semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja dan akibatnya semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 sampai tahun 2020 tidak ada data mengenai partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun tahun 2021 terdapat partisipasi angkatan kerja perempuan sekitar 100 %. Saat ini, perempuan usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Wajo lebih banyak berkegiatan mengurus rumah tangga. Dan dapat dikatakan bahwa kerja di Kabupaten Wajo masih banyak dikuasai oleh penduduk laki-laki. Perempuan tidak bekerja dapat disebabkan faktor social dan budaya, seperti mengurus rumah tangga, sulit masuk ke sektor

formal, deskriminasi pekerjaan bagi perempuan dan budaya yang tumbuh di masyarakat tentang peran dan kedudukan perempuan.

Tabel 2. 227
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2021 s.d 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	1,022916667	205.587	0
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	1,022916667	9.587	1.683
3	**Partisipasi angkatan kerja perempuan**	**100%**	**4,66%**	**-**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu tahun 2019 sampai dengan 2023 realisasi 100% dimana semua kasus yang terlapor melalui unit pelayanan terpadu mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih baik di tingkat Kabupaten, hal ini merujuk kepada amanah SPM bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun korban perdagangan orang termasuk laki-laki berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan kasus korban. Semenjak tahun 2019 sampai tahun 2023 penanganan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu tertangani dengan baik 100%.

Tabel 2. 228
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Tahun 2019–2023

No	Uraian	2018	2019	2021	2022	2023
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	33	33	20	74	37
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	33	33	20	74	37
3	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

8. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit merupakan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit realisai 100% tahun 2019–2023, dimana semua kasus korban kekerasan mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pasien atau klien difasilitasi kesehatan akan terlayani 100% berdasarkan tingkat keterpaparannya/diagnose hasil pemeriksaan, terkecuali pada kasus-kasus tertentu pasien/klien akan dirujuk pada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau pelayanan khusus.

Tabel 2. 229
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu TataLaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	24	54	54	54	8
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentudalam kurun waktu tertentu	24	54	54	54	4

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

9. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Rehab sosial bertujuan melakukan pendampingan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan klien yang mengalami disfungsisosial/ traumatik sehingga klien/korban dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (seperti semula). Pada dasarnya seluruh korban yang sudah tercatat lembaga/petugas akan melakukan identifikasi korban dalam rangka menindak lanjuti kasus klien. Diharapkan semua kasus yang terlapor melalui unit layanan terpadu akan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih. Berdasarkan tabel di bawah bahwa data cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, pada tahun 2019-2022 belum diperoleh, namun tahun 2023 terdapat korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos sebanyak 29 orang dan terlayani dengan baik. Hal ini menjadi perhatian untuk tahun berikutnya agar terus dilakukan pendataan.

Tabel 2. 230
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos	0	0	0	0	29
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	0	0	0	0	29
3	**Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korb an kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

10. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan pengakuan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus–kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak tahun 2019–2023 mencapai 100% dan didalam artian seluruh kasus perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat oleh penyidik seluruhnya terproses dan dikawal oleh pendamping dari P2TP2A maupun unit PPA Polda/Polres/Poltabes ke tingkat Pengadilan demikian pula pada tingkat Kejaksaan dimana tetap terproses dengan baik hingga putusan. Tahun 2022, jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak 0 kasus, sehingga tidak ada perkara yang diputuskan pengadilan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 231
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	31	2	2	0	12
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	31	2	2	0	8
3	**Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**150%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

11. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Berdasarkan tabel bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum kurun waktu lima tahun (2019-2023) mencapai 100%. Korban/Klien yang melaporkan diri di tempat pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap diberikan layanan hukum namun pada kondisi tertentu beberapa klien (pelapor) mencabut laporan

dan menempuh jalan damai. Tahun 2022 tidak ada laporan sehingga capaiannya pun 0%. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 232
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	5	2	2	0	Data tdk tersedia
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	5	2	2	0	
3	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

12. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Angka partisipasi murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama sebab APK biasanya digunakan ketika APMnya masih jauh dari 100%. Di Kabupaten Wajo, rasio APM perempuan atau laki-laki di SD pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Rasio APM perempuan/laki-laki di SD sebesar 0.98 dan di tahun 2020 menurun sekitar 0.97 hal ini disebkan masa pandemic *covid-19*. Tahun 2022 meningkat menjadi 0,99. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 233
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	APM-SD perempuan	18,95	18,95	18,90	91,20	10537
2	APM-SD laki-laki	19,37	19,36	19,36	92,39	10347
3	**Rasio APM perempuan/laki-laki di SD**	**0.96**	**0.97**	**0.98**	**0.99**	**1,02**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

13. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP di Kabupaten Wajo menunjukkan anak perempuan sudah

mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan di SMP. Di Kabupaten Wajo Rasio APM Perempuan atau Laki-laki di SMP pada tahun 2019 pada angka 0,49 meningkat ditahun 2020 sebesar 0,50 dan pada tahun 2021 hingga 2023 terus meningkat menjadi 1,20. Hal ini menunjukkan bahwa rasio APM antara perempuan dan laki-laki setiap tahunnya masih di dominasi laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 234
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	APM-SMP perempuan	22.30	22.27	7.3	7.4	79
2	APM-SMP laki-laki	44.27	44.27	8.71	8.2	66
3	**Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP**	**0,49**	**0,50**	**0.83**	**0.90**	**1,20**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

14. Rasio Melek Huruf Perempuan/Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun.

Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan, AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. AMH Kabupaten Wajo Tahun 2018 antara perempuan dan laki-laki sampai tahun 2020 sama persentase jadi dapat dikatakan tidak perbedaan antara perempuan dan laki-laki penduduk di Kabupaten Wajo yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Demikian pula di tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada data terupdate saat ini.

Tabel 2. 234
Rasio melek huruf perempuan/laki-laki pada kelompok usia 15-24 Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	AMH 15-24 perempuan	98.00	98.00	95	99,58	99,58
2	AMH 15-24 laki-laki	98.00	98.00	101	99,56	99,56

3	**Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun**	**1**	**1**	**0,94**	**1**	**1**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

15. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

Pergeseran peran perempuan yang semula kerja reproduktif ke produktif semakain lama meniunjukkan gejala peningkatan. Kontribusi penduduk perempuan dalam pekerjaan upahan untuk sektor non pertanian mengalami peningkatan Kontribusi perempuan di Kabupaten Wajo mulai terdata pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dimana persentase perempuan yang berkontribusi sebanyak 22.42% atau 17.411 orang, namun tahun 2021 pengolahan di samakan pada tahun sebelumnya dikarenakan data belum ditemukan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh data dikarenakan pekerja perempuan yang terdata pada umumnya tidak berdomisili di Kab. Wajo hanya menetap sementara.

Tabel 2. 235
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian	17.411	17.411	17.411	17.411	17.510
2	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian	77.648	77.648	77.648	77.648	77.910
3	**Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian**	**22.42%**	**22.42%**	**22.42%**	**22.42%**	**22.47%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

2.1.5.2.12. Bidang Urusan Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Persentase Jumlah Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2023 di Kabupaten Wajo sebanyak 108,846% hal ini menandakan bahwa tingkat ketersediaan pangan utama (kebutuhan beras) di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan. Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 236
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023

1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)	411,977.060	412,612.065	444,156.486	545,528.196	545,528.20
2	Jumlah Penduduk	377,465	390,155	392,437	402,066	407,873
3	**Ketersediaan Pangan Utama (%)**	**109%**	**106%**	**113%**	**136%**	**134%**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Tingkat ketersediaan energi dan protein pada tahun 2021 sudah melebihi anjuran Angka kecukupan Energi (AKE) 2,400 kalori/kapita/hari, dan angka kecukupan protein 63 gram/kapita/hari berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012. Tingkat ketersediaan energi pada tahun 2022 sebesar 9.014 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein sebesar 179,26 gram/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 237
Ketersediaan energi dan protein perkapita tahun 2019 s.d 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori x BDD	785,200	864,100	864,100	901,400	901,400
	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari	**7,852**	**8,641**	**8,641**	**9,014**	**9,014**
2	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD	14,465	16,721	16,721	17,926	17,926
	Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	**144.7**	**167.2**	**167.2**	**179.3**	**179.3**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pada Tahun 2023, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 100,00 %, atau jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi sesuai standar dan yang diperdagangkan oleh pengumpul di suatu wilayah dianggap aman semua. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk

dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/ perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia.

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas SDM. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang tidak akan berarti, jika makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak aman dari cemaran kimia maupun mikroba. Pangan yang tercemar mikroba menyebabkan berbagai kasus Penyakit Bawaan Makanan (PBM), seperti diare. Sedangkan pangan yang terkontaminasi cemaran kimia, seperti residu pestisida dan toksin diduga sebagai penyebab penyakit kanker. Begitu pentingnya keamanan pangan ini menjadi dasar bagi kita untuk mendeklarasikan bahwa keamanan pangan adalah hak asasi setiap individu. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 238
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kabupaten Wajo
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi pedagang pengumpul di suatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	4	8	9	9	9
2	Jumlah total sampel pangan yang diperdagankan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	6	9	10	10	9
3	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**66.67%**	**88.89%**	**90%**	**90%**	**100%**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.2.13. Bidang Urusan Pertanahan

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah luas lahan bersertifikat dibagi dengan luas wilayah (Ha). Perhitungan persentase luas lahan bersertifikat dilaksanakan setelah tahun 2019 kegiatan ini sudah terlaksana dengan jumlah lahan bersertifikat yaitu 12.49 ha bengan persentase luas lahan bersertifikat yaitu 0.005. Adapun untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 239
Perrsentase luas lahan bersertifikat Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	jumlah Luas Lahan Bersertifikat	12.51	53.94	142.9	36.558	36.558
2	Jumlah Luas Wilayah (ha)	2.511,19	2.511,19	2.511,19	2.511	2.511
3	**Persentase Luas Lahan Bersertifikat**	**0.005**	**0.021**	**0.057**	**0.015**	**0.015**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Wajo mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 penyelesaian kasus sebesar 62.75% sedangkan pada tahun 2023 penyelesaian kasus sebesar 100%. Hal ini juga disebabkan banyaknya jumlah kasus yang terdaftar dan masih dalam proses penyelesaian kasus. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 240
Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus yang diselesaikan	64	65	66	2	2
2	Jumlah kasus yang terdaftar	102	102	102	2	2
3	**Penyelesaian kasus tanah Negara**	**62.75%**	**63.73%**	**64.71%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.2.14. Lingkungan Hidup

1. Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten

Dilihat dari data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo pada tahun 2019-2023 ketersediaan dokumen RPPLH tidak tersedia hingga tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel.

Tabel 2. 241
Tersedianya dokumen RPPLH kabupaten Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Tersusunnya RPPLH Kabupaten

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta pengelolaan perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) diharapkan mampu mengarahkan pembangunan agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan menjadi acuan bagi semua upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dibuat dalam kurun waktu 30 tahun sehingga setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Permasalahan yang umum dihadapi dalam penyususnan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) karena keterbatasan anggaran, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga ahli sehingga diperlukan bimbingan teknis tentang penyusunan RPPLH atau bimtek penyusunan RPPLH, permasalahan selanjutnya kuranya suplai data OPD yang terkait sehingga dalam pengambilan data masih banyak yang kosong, sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah penambahan anggaran dalam rangka penyusunan Dokumen RPPLH dan pengusulan pendidikan atau pelatihan penyusunan RPPLH serta pembuatan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Tabel 2. 242
Tersusunnya RPPLH kabupaten Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten

Terintegrasinya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Wajo belum terintegrasi dikarenakan Penyusunan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) masih dalam proses tahapan penyusunan data awal karena belum ada perda yang mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). sehingga data tahun 2019-2023 tidak tersajikan atau tidak ada.

Tabel 2. 243
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

4. Tersedianya Dokumen KLHS Kabupaten

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan Kebijakan Rencana Pembangunan (KRP) tingkat daerah Kabupaten/ kota, Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS RPJMD adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan, sehingga Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Tabel 2. 244
Tersedianya Dokumen KLHS Kabupaten

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

5. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten

Ada 2 dokumen KLHS yg disusun pada tahun anggaran 2023 yaitu :

1. KLHS RPJPD TAHUN 2025-2045
2. KLHS RPJMD TAHUN 2025-2030

KLHS disusun sebagai syarat sebelum disusun dokumen perencanaan yaitu Dokumen RPJPD dan Dokumen RPJMD dengan tujuan agar dokumen perencanaan yg disusun berwawasan lingkungan dengan termuat Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 245
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah bupaten/kota	1	-	1	-	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, badan air (sungai, anak sungai, dan sejenisnya; danau dan sejenisnya; dan/atau rawa dan lahan basah lainnya) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia, sehingga kualitas air dijadikan indikator dalam perhitungan kualitas lingkungan khususnya untuk menentukan indeks pencemaran air. Perhitungan Indeks Pencemar (IP) untuk indikator kualitas air dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Hasil indeks pengukuran kualitas air tahun 2018 yaitu 60,00 dengan kriteria “Sedang”, sedangkan data hasil indeks pengukuran kualitas air tahun 2019 yaitu 40 dengan kriteria “kurang” sedangkan hasil indeks kualitas air tahun 2020 yaitu 60 dengan kriteria “sedang” hasil indeks kualitas air pada tahun 2021 yaitu 58,75 dengan kriteria “sedang”, hasil indeks kualitas air pada tahun 2022 yaitu 53,57 dengan kriteria “sedang” sedangkan tahun 2023 yaitu 54,44 dengan kriteria “sedang”. Kategori nilai IKA terdiri dari lima klasifikasi dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2. 246
Hasil pengukuran indeks kualitas air Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	40	60	58.75	53.57	54.44

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

Adapun Penyebab pencemaran air sebagai akibat menurunnya nilai IKA sebagai berikut:

- Masyarakat belum sadar akan kebersihan sehingga masih membuang sampah sembarangan.
- Limbah pabrik/ industri yang dibuang ke sungai atau laut.
- Penggunaan detergen dan pembuangan limbah detergen langsung ke sungai.
- Limbah pertanian berkaitan dengan penggunaan pestisida maupun pupuk kimia yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman.
- Tidak adanya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang melaksanakan pengawasan lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha/ kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Tidak adanya tenaga teknis pengendali dampak lingkungan yang bertugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan. pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Masalah Khususnya:

- Kurangnya Anggaran sehingga Metode Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Yang harusnya dilakukan 2 Kali setahun yaitu Musim Hujan dan Musim Kemarau tidak terlaksana secara maksimal.
- Kurangnya Anggaran yang menjadi kendala pengambilan sampel tidak dilakukan secara maksimal di titik.titik penting dalam melakukan pengambilan sampel.
- Kurangnya Anggaran yang sangat tidak mendukung dalam mengoperasikan Laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo.

Adapun solusi dari penyebab persoalan tersebut dapat ditambahkan alokasi anggaran, pengangkatan tenaga fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) serta pengangkatan tenaga fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan (PEDAL).

7. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam.

Indeks Standar Kualitas Udara digunakan secara resmi di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor: P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) untuk data tahun 2018 adalah 92,03 dengan kategori “sangat baik” data tahun 2019 adalah 92,56 dengan kriteria “sangat baik” Data Tahun 2020 adalah 90,73 dengan kriteria “sangat baik” data indek kualitas udara tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 91,48 dengan kriteria “Sangat baik”, data indek kualitas udara tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 91,93 dengan kriteria “Sangat baik” namun data tahun 2023 menunjukkan mengalami penurunan yaitu 89,06 dengan kriteria “Baik”. Hal tersebut akibat Pada saat perekaman pemantauan kualitas udara di area permukiman terjadi pembakaran sampah oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 247
Hasil pengukuran indeks kualitas udara Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	92.56	90.73	91.48	91.93	89,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

8. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indek kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau.

Data Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) tahun 2018 yaitu 41,67 selanjutnya Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) tahun 2019 yaitu 39,30 Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) tahun 2020 yaitu 39,27 Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) tahun 2021 yaitu 23,75, Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) tahun 2022 yaitu 23,75 datanya sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2023 yaitu 27,65.

Masalah yang dihadapi adalah masyarakat melakukan penebangan tanpa melihat adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan dan tidak adanya anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemantuan Indeks Kualitas Lahan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut belum maksimal serta perlunya anggaran dalam penyediaan bibit tanaman produktif dan pelindung.

Tabel 2. 248
Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	39.30	39.27	23.75	23.75	27,65

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

9. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten

Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/ atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Data Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sering mengalami fluktuasi dikarenakan jumlah anggaran dalam menunjang kegiatan pengawasan tidak menetap. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 249
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkunganizin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani	110	516	371	61	19
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkunganizin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	27	21	80	85	90
3	**Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota**	**24.54**	**24.57**	**21.56**	**139.34**	**0.21**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

10. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Di Kabupaten

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Hidup.

Pengawasan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/ atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/ atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
Sebenarnya peranan Petugas PPLH/ PPLHD tidak terbatas pada kegiatan pengawasan saja, namun dituntut untuk lebih dari itu, antara lain memberikan kesaksian di dalam proses peradilan lingkungan atau memberikan masukan kepada atasan dalam menentukan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian, sebagai PPLH/PPLHD dituntut untuk selalu belajar dan mengembangkan diri dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh

para PPLH/ PPLHD adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Kesempatan tersebut sangat mungkin terjadi karena wewenang dan peranan yang cukup luas menjadikan kedudukannya sangat strategis dan sangat penting dalam proses penegakan hukum lingkungan. Data tahun 2019-2023 tidak ada dikarenakan belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Wajo, sehingga sebagai tindak lanjut untuk pemenuhan kebutuhan pejabat PPLHD perlu dijadikan sebagai skala prioritas untuk mengangkat pejabat tersebut melalui instansi yang terkait.

Tabel 2. 250
Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di kabupaten Tahun 2018-2022

No	Uraian	2019	2021	2021	2022	2023
1	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	.	.	.	.	.
2	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	.	.	.	.	.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

11. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Terlaksananya pemberian penghargaan di lingkungan hidup, yang terdiri dari Penghargaan sekolah Adiwiyata, Penghargaan program Kampung Iklim (Proklim) Penghargaan Piala Adipura, serta perlombaan kebersihan masjid tingkat Desa/ Kelurahan (kampung mapaccing). Pada tahun 2022-2023 tidak terlaksananya kegiatan tersebut akibat tidak tersedianya anggaran. Untuk lebih lengkapnya dapdat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 184
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1	11	74	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

12. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lokasi Usaha dan Dampak Lintas Kabupaten/Kota Yang Ditangani

Pengertian pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pangaduan kepada Instansi penanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/ atau dampak di bidang lingkungan hidup/

usaha dan/ atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/ atau pasca pelaksanaan, adapun tujuan dari pada pengaduan masyarakat sebagai berikut :

- Bahwa untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- Untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah bertugas dan berwewenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengaduan
- Untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam menentukan lingkungan hidup diperlukan kebijakan pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.

Data 2019 ada 10 pengaduan, data tahun 2020 ada 86 pengaduan, data tahun 2021 ada 91 pengaduan, data tahun 2022 jumlah pengaduan masyarakat 48, data tahun 2023 jumlah pengaduan 24 dan tidak tersedia dana pendukung. Semua pengaduan dapat diselesaikan secara persuasif dan preventif meskipun tidak ada dana pendukung untuk melaksanakan kegiatan tersebut

Tabel 2. 251
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lokasi Usaha dan Dampak Lintas Kabupaten/Kota Yang Ditangani Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	10	86	91	48	26
2	total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	10	86	91	48	26
3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2023

13. Timbunan Sampah Yang Ditangani

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir,

data menunjukkan bahwa volume timbulan sampah di tahun 2022 yaitu 40.705,56 Ton sedangkan di tahun 2023 yaitu 40.523,74. Dari data tersebut volume sampah mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya diakibatkan oleh jumlah penduduk semakin meningkat juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yaitu kesadaran masyarakat, pola konsumsi masyarakat yang belum berwawasan lingkungan serta belum ada kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten terhadap pengelolaan persampahan. Adanya penurunan penangan sampah dari tahun sebelumnya yaitu 73,11 % menjadi 69,05 % pada tahun 2023 hal tersebut dikarenakan sudah beroperasinya TPST untuk mengurangi jumlah timbulan sampah.

Tabel 2. 252
Timbulan sampah yang ditangani Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume timbunan sampah yang ditangani	54.833.08	23.992.74	24.701.37	40.523,74	40.523,74
2	Total timbunan sampah	57.939.93	58.080.84	55.348.60	55.428,46	58.685,14
3	Timbulan sampah yang ditangani	**94.64%**	**41.31%**	**44.62%**	**73,11%**	**69.05%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

14. Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R

Seperti halnya persentase timbunan sampah yang ditangani persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 menjadi 1.57%.

Tabel 2. 253
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah pusat daur ulang pengomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	24.21%	853.37 (1.47%)	867.97 (1.57%)	867.97 (1.57%)	4.432,89 (34,37%)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo Tahun 2024

3R merupakan kepanjangan dari Reuse, Reduce, dan Recycle. Reuse artinya menggunakan kembali sampah plastik yang masih dapat digunakan. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang dapat menjadi sampah. Dan Recycle artinya mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari hari. Adanya fluktuasi jumlah pengurangan sampah dari tahun sebelumnya yaitu 4.432,39 Ton pada tahun 2023, hal ini disebabkan adanya aktivitas pendaur ulangan sampah plastik oleh masyarakat.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Wajo, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dengan jumlah rumah tangga yang dikurangi sampahnya melalui TPST = 296 RT. Untuk jumlah rumah tangga yang dikurangi sampahnya melalui Bank Sampah = 296 KK. Sampah yang dibawa ke TPS diproses di Bank Sampah. Adapun saran di Bank Sampah Induk Padduppa berupa gedung mesin pencacah plastik. Data terkait jumlah sarana pengurangan sampah, dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 254
Data Jumlah Sarana Pengurangan Sampah TPS3R
Tahun 2023

NO	TAHUN	ARMADA		AWAK PERSAMPAHAN (Org)	JUMLAH TPS	JUMLAH TPA	BANK SAMPAH
		MOBIL	MOTOR 3 RODA				
1	2018	15	16	52	24	1	0
2	2019	15	16	52	24	2	0
3	2020	16	16	52	24	2	0
4	2021	13	18	52	24	2	1
5	2022	13	18	52	24	2	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo Tahun 2024

15. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Dari persentase cakupan are pelayanan dimana luas area Kab/ Kota yaitu 2511,19 Ha sedangkan luas area pelayanan mencapai 387.794 Km/ Ha. Melihat data tersebut sudah dikategorikan baik karena tingkat pencapaian pelayanan yaitu 80% luas area yang tertangani.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan persampahan di Kabupaten Wajo yaitu dengan menambaha luasan area pelayanan persampahan di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten wajo dengan cara memeberikan sarana dan prasarana persampahan seperi mobil

pengangkut sampah, peningkatan pengurangan sampah dengan memberikan bangunan bank sampah atau rumah kompos.

Tabel 2. 255
Persentase cakupan area pelayanan Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ ha)	370.814	378,230	387,794	387,794	188,06
2	Luas area kabupaten/ kota (km2/ ha)	2511,19	2.511,19	2.511,19	2.511,19	13.88
3	Persentase cakupan area pelayanan	200,89	15,06	15.363	15.363	7,38

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

16. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten

Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Nilai (TPA) merupakan nilai dari Program Adipura, nilai dari tahun 2019 s/d tahun 2023 merupakan nilai dari hasil tim penilai dari Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang turun menilai bersama tim dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sul-Sel, Sedangkan nilai TPA tahun 2019 s/d 2023 belum ada (karena tidak ada penilaian adipura) sampai saat ini menunggu hasil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Tabel 2. 256
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai TPA (Program Adipura) >= 71	0	0	0	69,05	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wajo. Tahun 2024

1.1.5.2.15. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio kepemilikan KTP Kabupaten Wajo tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 0,99 namun terjadi peningkatan di tahun 2021 sebesar 1,00. Tahun 2022 meningkat menjadi 0,97 dan stagnan di rasio yang sama tahun 2023, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 257
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia>17 yang ber-KTP	275,781	283,660	284,231	293,369	297,547
2	Jumlah penduduk usia>17 atau telah menikah	279,451	287,332	285,244	302,531	308,155
3	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	0.99	0.99	1.00	0.97	0.97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo Tahun 2024

2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi yang berakte kelahiran pada tahun tahun 2019 rasio bayi yang berakte sebesar 0.50. Dan meningkat di tahun 2020 dan 2021 menjadi 0.98, tahun 2022 menjadi 0.996. Hal ini menggambarkan bahwa ada bayi baru lahir yang belum memiliki akte kelahiran dimana jumlahnya bertambah tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 258
Rasio Bayi yang ber Akte Kelahiran Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bayi yang berakte kelahiran	186,627	108,940	102,444	105,605	31,239
2	Jumlah bayi	374,375	110,190	103,549	105,979	31,277
3	Rasio bayi berakte kelahiran	0.50	0.99	0.99	0.99	0.99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo Tahun 2024

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah dari tahun 2019 adalah 0.50, hal ini menggambarkan bahwa dari jumlah pasangan nikah sebanyak 126,255 orang hanya 30,987 orang yang memiliki akta nikah. Tentunya sangat jauh dari pemenuhan target keterpenuhan akta nikah, berbagai upaya dilakukan Pemda Wajo diantaranya pemenuhan alat kerja dan sosialisasi kepada masyrakat.

Upaya ini nyatanya dapat meningkatkan rasio Akte Nikah dalam kurun waktu 5 tahun kedepannya, hingga dapat terlihat pada tahun 2023 mencapai rasio 0.58, yang menggambarkan peningkatan jumlah pasangan yang memiliki akta nikah sebanyak 112,740 orang dari jumlah total pasangan nikah sebanyak 193,002 orang. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 259
Rasio Pasangan ber Akte Nikah Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	30,987	36,148	43,029	104,044	112,740
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	126,255	87,365	87,153	191,024	193,002
3	**Rasio pasangan berakte nikah**	**0.25**	**0.41**	**0.49**	**0.54**	**0.58**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo Tahun 2024

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Ketersediaan databese kependudukan skala provinsi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dinyatakan tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 260
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo Tahun 2024

5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Kepemilikan KTP sangat penting manfaatnya guna keakuratan/ ketersediaan database kependudukan Indonesia khususnya di Kabupaten Wajo. Secara umum jumlah penduduk yang ber-KTP/KK sangat minim. Kesadaran penduduk untuk mengurus persuratan kependudukan kurang. Sistem penerapan KTP di Kabupaten Wajo sudah berbasis NIK yang berlaku nasional. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 261
Ketersediaan data base dan Penerapan KTP Nasional
Tahun 2019 s.d 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo Tahun 2024

6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Persentase jumlah penduduk ber-KTP dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 sebesar 98,69% kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 98,72%. Terjadi kenaikan signifikan di tahun 2021 menjadi 99,64%, namun pada tahun 2022 cakupan penerbitan akta kelahiran menurun tajam menjadi 96.97% dan terus menurun pada tahun

2022 menjadi 96.56%. Tentunya ini menjadi perhatian Pemda agar kedepannya pemenuhan target terhadap jumlah KTP ber-NIK bisa terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 262
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	275,781	283,660	284,231	293,369	297,547
2	Jumlah penduduk wajib KTP	279,451	287,332	285,244	302,531	308,155
3	**Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**98.69%**	**98.72%**	**99.64%**	**96.97%**	**96.56%**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo Tahun 2024

7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2019 sebesar 98.53%, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 96.77%, tahun berikutnya kembali meningkat menjadi 98.03% dan meningkat drastis di tahun 2022 menjadi 99.84%, kemudian di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 99.88%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua penduduk yang lahir memperoleh atau memiliki akte kelahiran di tahun bersangkutan, namun dengan program Pemda Kabupaten Wajo yang tepat sasaran cakupan penerbitan akta kelahiran berada persentase positif. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 263
Cakupan penerbitan akta kelahiran Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	4,290	2,219	4,282	5,122	31,239
2	Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	4,354	2,293	4,368	5,130	31,277
3	**Cakupan penerbitan akta kelahiran**	**98.53%**	**96.77%**	**98.03%**	**99.84%**	**99.88%**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo Tahun 2024

2.1.5.2.16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Kantor Pemerintahan Desa adalah sarana atau bangunan tempat penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. Data awal pada tahun 2019 terkait cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik yaitu 85.92% atau 122 kantor desa yang tergolong baik dari 142 kantor desa. Kemudian pendataan di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 92.25% atau 131 kantor desa yang tergolong baik dari 142 kantor desa sampai dengan tahun 2023.

Adapun penyebab 11 kantor desa yang tidak tergolong dalam kondisi yang baik, yaitu 11 Desa tersebut merupakan Desa hasil pemekaran tahun 2013 dan kantor tersebut masih dalam kondisi menumpang tempat. Oleh karena itu solusi ke depan yang diharapkan dalam rangka pencapaian target yang telah direncanakan yaitu diharapkan kepada Kepala Desa tekait agar menganggarkan untuk pembangunan dan rehabilitasi kantor desanya melalui Alokasi Dana Desa atau Dana Desa.

Tabel 2. 264
Cakupan sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa yang baik
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	122	123	131	131	131
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	142	142	142	142	142
3	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik**	**85,9%**	**86,6%**	**92,3%**	**92,3%**	**92,3%**

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Wajo. Tahun 2024

2. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sama dengan jumlah LPM yang terdaftar di kelembagaan desa/kelurahan mengikuti jumlah desa/kelurahan yang ada di wiliayah pemerintahan kabupaten. Untuk lebih lengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 265
Kelompok Binaan LPM Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	190	190	190	190	190
2	Jumlah LPM	190	190	190	190	190
3	**Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Wajo. Tahun 2024

3. Persentase LSM aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dan terdaftar di kelembagaan desa/kelurahan mengikuti jumlah desa/kelurahan yang ada di wilayah pemerintahan kabupaten dengan persentase LSM aktif sebesar 100%. Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan penjelasan pada Pasal 6 ayat 1 Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yaitu, jenis LKD paling sedikit meliputi: rukun tetangga; rukun warga; PKK; Karang Taruna; Pos pelayanan terpadu; dan LPM. sehingga atas dasar tersebut LSM sudah tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2. 266
Pesentase LSM aktif Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah LSM aktif	190	190	190	190	190
2	Jumlah LSM	190	190	190	190	190
3	**Persentase LSM aktif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Wajo. Tahun 2024

4. Persentase LPM Berprestasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa "Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. LPM memiliki tugas Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif menggerakan swadaya gotong royong masyarakat serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPM memiliki tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pada Tahun 2021 tidak diadakan lomba LPM Berprestasi di Kabupaten Wajo sehingga tidak ada realisasi pada tahun tersebut

Tujuan dari pelaksanaan lomba LPM Berprestasi untuk dapat mendorong sinergitas antara peran pemerintah desa/kelurahan dan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dalam proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pada tahun 2021 tidak diadakan lomba LPM Berprestasi di Kabupaten Wajo sehingga tidak ada realisasi pada tahun tersebut.

Tabel 2. 267
LPM Berprestasi Menurut Kecamatan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah LPM berprestasi	0	0	0	0	0
2	Jumlah LPM	190	190	190	190	190
3	**Persentase LPM berprestasi**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Wajo. Tahun 2024

5. Persentase PKK aktif

Tim Penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi golongan partai politik Lembaga atau instansi berfungsi sebagai pelaksana Gerakan PKK dengan jumlah kepengurusan yang aktif 190 desa/kelurahan 14 kecamatan serta 1 dari tingkat Kabupaten dengan jumlah keseluruhan 205 Kepengurusan PKK Aktif.

Tabel 2. 268
PKK Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PKK aktif	190	190	190	190	190
2	Jumlah PKK	190	190	190	190	190
3	**Persentase PKK aktif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Wajo. Tahun 2024

6. Persentase Posyandu aktif

Posyandu berperan penting dalam memperbaiki kesehatan ibu bayi dan anak balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu bayi dan anak balita. Oleh karena itu keaktifan posyandu di setiap daerah sangat penting untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Selama tahun 2019 sampai 2023 jumlah posyandu aktif di Kabupaten Wajo bertambah sebanyak 462 Posyandu.

Tabel 2. 269
Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah posyandu aktif	453	453	453	462	462
2	Jumlah posyandu	453	453	453	462	462
3	**Persentase posyandu aktif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Wajo. Tahun 2024

7. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Penyebab tidak tercapainya target indikator Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di tahun 2022 dan 2023 pada aspek layanan wajib non dasar disebabkan, karena peran masyarakat sekarang tidak menjadi focus perhatian utama dalam kegiatan swadaya masyarakat di desa, serta daya dukung pemerintah setempat yang kurang. Adapun solusi ke depan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target tesebut adalah agar dilakukan kembali pengaktifan kegiatan swadaya masyarakat melalui kelompok masyarakat di Desa, dengan melibatkan pemerintah desa setempat. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 270
Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	9	9	9	0	0
2	Total program pemberdayaan masyarakat	9	9	9	0	0

3	**Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Wajo. Tahun 2024

8. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Dari tabel berikut terlihat bahwa pada tahun 2022-2023 program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat tidak dilaksanakan lagi. Padahal kita ketahui bahwa pemeliharaan tersebut sangat diperlukan agar segala yang dibangun dan dilaksanakan pada tahun tersebut dapat berjalan dan dimanfaatkan seterusnya

Tabel 2. 271
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Program pemberdayaan masyarakat yang di kembangkan dan di pelihara masyarakat	2	2	13	0	0
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	2	2	13	0	0
3	**Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Wajo. Tahun 2024

.2.1.5.2.17. Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju Pertumbuhan Penduduk jika tidak ditekan akan mengakibatkan ledakan penduduk sehingga nantinya akan berdampak buruk pada kehidupan social ekonomi masyarakat. Sehinnga Pemerintah Melalui Dinas SosialPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan giat-giatnya melakukan penyuluhan di tingkat Desa/Kelurahan pentingnya Ber-KB untuk Kesejahteraan Keluarga.

Tabel 2. 272
Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.31	1.18	1.18	1.17	1.17

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

Dari data diatas dapat terlihat bahwa sepanjang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Pemerintah Daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Wajo pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi 1.18% dan pada tahun 2021 stagnan di persentase tersebut namun di tahun 2022 menurun menjadi 1.17% hingga pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

2. Total Fertility Rate (TFR)

Salah satu sebab melambatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Wajo adalah angka *Total Fertility Rate* yang cenderung konstan dalam lima tahun terakhir. TFR merupakan ukuran untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan program KB membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Konsep Definisi *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata.rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

Sejak tahun 2019 hingga 2023 angka TFR Kabupaten Wajo mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 2.10 dan stagnan di di tahun 2020. Pada tahun 2021 menurun hingga 1.99 dan tahun 2022 terus menurun menjadi 1.96. Tahun 2023 kembali menurun menajdi 1.7. Dari data tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun tersebut wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai dua anak selama masa usia suburnya.

Tabel 2. 273
Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Fertility Rate (TFR)	2.10	2.10	1.99	1.96	1.7

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Partisipasi Perangkat Daerah dalam pembangunan Daerah dalam mendukung Program dan kegiatan yang telah dibuat akan lebih terarah dan lebih jelas disertai indikator yang meliputi indikator program dan indikator kegiatan yang terarah pada pembangunan daerah melalui Kampung KB Pada Tahun 2019 jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif di kampung KB sebanyak 53 dengan jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Wajo sebanyak 53. Sedangkan nilai persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif sebesar 100% pada tahun 2019. Tahun 2020, meskipun beberapa perangkat daerah sudah di rampingkan sehingga menjadi 41 hal ini membuktikan pada tahun 2020 melalui Dinas yang menangani Laju Pertumbuhan Penduduk jika tidak ditekan akan mengakibatkan ledakan penduduk sehingga nantinya akan berdampak buruk pada kehidupan social ekonomi masyarakat. Tahun 2021 dan tahun 2023, jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif di kampung KB mengalami penurunan menjadi 4 OPD, hal ini mengakibatkan persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB menurun drastis menjadi 14.63%. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 274
Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah yang melalui kampung KB Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	53	41	6	6	6
2	Jumlah semua perangkat daerah	53	41	41	41	41
3	**Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB**	**100%**	**100%**	**14,63%**	**14,63%**	**14,63%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan Induk diartikan sebagai perencanaan secara menyeluruh yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk di tahun 2019

sebesar 9.43%, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 tidak ada perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk hal ini dikarenakan perampingan pearangkat daerah serta anggaran APBD sangat minim. Kemudian tahun 2022, persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk meningkat menjadi 17.07%, hal ini disebabkan ada 7 OPD yang kembali menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk demikian pula di tahun 2023. Berikut data yang dimaksud.

Tabel 2. 275
Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	6	0	0	7	7
2	Jumlah semua perangkat daerah	53	41	41	41	41
3	**Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**	**9.43%**	**0%**	**0%**	**17.07%**	**17.07%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

5. Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Manfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penyedia data profil adalah satuan perangkat kerja daerah di lingkungan pemerintah daerah. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. pada tahun 2019 terdapat 6 sektor yang memanfaatkan data profil namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak ada data pfofil yang disediakan dengan kendala yang di hadapi dalam penyediaan data profil ialah kurang akuratnya data yang disediakan serta tidak ada data yang mendukung. Tahun 2022 meningkat menjadi 7 sektor dan Tahun 2023 kembali menjadi 0 sektor. Adapun data yang tersaji dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 276
Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Manfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	6	0	0	7	0

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

6. Jumlah Kerjasama Penyelenggaran Pendidikan Formal Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Dengan mengetahui kondisi kepen. dudukan kaum muda dapat mem. persiapkan hidup lebih baik dapat memberi makna hidup dalam mengelola keluarga masyarakat lingkungan. Kaum muda dapat berperan untuk membuat dunia yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kabupaten Wajo di tahun 2019 sebesar 68 kerjasama. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 65 kerjasama dan stagnan hingga tahun 2023, hal ini disebabkan kurangnya penyediaan data yang di tampilkan dalam data profil tidak maksimal hal ini disebabkan minimnya dana dalam melakukan pendataan secara menyeluruh dan terprogram untuk kedepannya perlu ada penganggaran dalam memperoleh data yang akurat. Data berikut merupakan data *update* hingga tahun ini.

Tabel 2. 277
Jumlah kerjasama penyelenggara pendidikan formal non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	68	65	65	65	65

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

7. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program Pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga rata-rata capaian jumlah anak dalam satu keluarga memiliki dua anak.

program untuk mengurangi angka ibu melahirkan itu. Salah satunya adalah pencanangan kampung KB. Tidak hanya itu kampanye program KB dua anak cukup harus terus dilakukan. Hal itu menanamkan mindset di masyarakat bahwa memiliki dua anak sudah cukup dari data semenjak tahun 2018 sampai 2020 sudah mencapai sebesar 2 artinya dalam satu keluarga rata capaian anak dalam satu keluarga 2 anak. Di tahun 2021 rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 1 anak, demikian pula tahun 2022.

Upaya dalam mempertahankan Jumlah anak per keluarga perlu dorongan agar mencegah pernikahan anak. Upaya itu dilakukan dengan terus mengintervensi remaja melalui pusat informasi dan konseling (PIK) remaja serta sosialisasi program Genre. Data berikut merupakan data *update* hingga tahun ini.

Tabel 2. 278
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak	9.689	9.689	9.689	105.893	34.178
2	Jumlah keluarga	20.002	20.002	20.002	105.458	105.458
3	**Rata – rata jumlah anak per keluarga**	**2**	**2.1**	**2**	**1**	**0.3**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

8. Rasio akseptor KB

Kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanent. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas tujuan utama program KB adalah untuk memenuhi perminatan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. Di tahun 2019 jumlah akseptor KB mencapai 73.65% sedangkan di tahun 2020 pencapain jumlah akseptor meningkat menjadi 76.70%. namun pada tahun 2021 megalami penurunan sebesar 75,22%, di tahun 2022 kembali menurun dengan angka 53.75%. Kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 67,72%, walaupun belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran dan minta pasangan usia subur terhadap

pemakaian kontrasepsi dan kasus *covid-19,* sehingga perlu kembali di adakan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya KB guna kesejahteraan Keluarga ditingkat desa/kelurahan. Adapun data lengkapnya dapat terlihat pada tebel berikut.

Tabel 2. 279
Rasio Akseptor KB Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Akseptor KB	48.907	52.523,4	50.540	27.253	37.383
2	Jumlah pasangan usia subur	66.397	68.483	67.190	50.699	55.201
3	**Ratio Akseptor KB**	**73,66%**	**76,70%**	**75,22%**	**53,75%**	**67,72%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

9. Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Jumlah pasangan usia subur yang ikut KB (CPR) Peningkatan ini belum menunjukkan keberhasilan Program KB dalam menekan jumlah anak masih sangat rendah dari data jumlah akseptor KB di tahun 2019 persentase junlah peserta KB aktif sebesar 73.66% dan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 76.71%. suatu peningkatan yang baik dalam pencapaian pemakaian kontrasepsi namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 75.21%, kemudian tahun 2022 menurun tajam menjadi 58.69%, namun ditahun 2023 meningkat menjadi 67,72%. Fluktuasi ini disebabkan oleh pemahaman tentang pentingnya pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia 15-49 tahun, belum begitu optimal, kemudian pemahaman tentang metode kontrasepsi juga suatu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan keputusan terhadap kelangsungan pemakaian metode kontrasepsi. Namun perlu diberikan. Adapun data lengkapnya dapat terlihat pada tebel berikut.

Tabel 2. 280
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta KB aktif	48.907	52.534	50.540	29.753	37.383
2	Jumlah pasangan usia subur	66.397	68.483	67.190	50.699	55.201
3	**Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49**	**73,66%**	**76,71%**	**75,22%**	**58,69%**	**67,72%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

10. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15–49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun, pada tahun 2019 sebesar 0.0040%. di karenakan kesadaran masyarakat akan akibat pernikahan di usia dini namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0.0085% hal ini disebakan di tahun 2020 masa pandemic *covid-19* yang menyebabkan sumber pendapatan dan perekonomian sangat menurun dan di tahun 2021 terjadi lonjakan pasangan usia subur kurang 20 tahun sebesar 0.011% . Data berikut merupakan data ter*update*.

Tabel 2. 281
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	780	267	562	25.934	22.972
2	Jumlah pasangan usia subur	66.774	65.969	65.984	53.661	50.699
3	**Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun**	**0.011%**	**0.004%**	**0.008%**	**48.33%**	**45.31%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

11. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Unmet need atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi sering dikaitkan dengan dua hal, yaitu supply dan demand. Hal ini berupaya melihat konsep unmet need lebih dalam dengan memperhatikan latar belakang sosial ekonomi pasangan usia subur sehingga jumlah pasangan usia subur yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dari tahun 2019 sebesar 15,42%, sedangkan pada tahun tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 12.85% serta ditahun 2021 terjadi lagi penurunan sebesar 12.04%, Tahun 2022 meningkat menjadi 15,46% namun tahun 2023 kemabali mengalami penurunan menjadi 11,44%. Hal disebabkan pengetahuan, sikap, dukungan suami dan keluarga, kegagalan KB sebelumnya, kualitas pelayanan dan sosial budaya disinyalir menjadi beberapa faktor yang

mempengaruhi tingginya angka unmet need dengan demikian jalan keluar yang komprehensif dan sistematik dalam upaya meningkatkan cakupan akseptor KB dengan melibatkan suami dan keluarga dalam penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan tentang KB. Adapun data lengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 282
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	10.170	8.803	8.092	10.198	6.317
2	Jumlah pasangan usia subur	65.969	68.483	67.190	65.984	55.201
3	**Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)**	**15,42%**	**12,85%**	**12,04%**	**15,46%**	**11,44%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

12. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang adalah metode yang efektif untuk menunda dan menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan Pencapaian prevalensi penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih minim. Penggunanya masih berkutat di angka 21.72 persen pada tahun 2019 dan 2020 di persentase 22,49%, tahun 2021 meningkat menjadi 24%. Namun tahun 2022 menurun drastis menjadi 5,40% walaupun di tahun 2023 meningkat menjadi 7,79% tapi belum signifikan. Hal ini di sebabkan masih kurangnya pusat pelayaan keluarga sejahtera.

Pemberian informasi dalam kualitas pelayanan KB merupakan indikator yang paling dominan berhubungan dengan pemilihan MKJP. Kesimpulan Pemberian pelayanan KB pada peserta KB baru yang mencakup pemberian informasi pemilihan metode dan asuhan berkelanjutan sudah dilakukan dengan baik oleh bidan pada peserta KB.

Tabel 2. 283
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	10.625	11.816	12.132	1.578	2.912
2	Jumlah akseptor KB	48.907	52.534	50.540	29.206	37.383

3	**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**21,72%**	**22,49%**	**24,00%**	**5,40%**	**7,79%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

13. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi untuk 4 tahun terakhir rata-rata 13.03 %. Angka ini menunjukkan masih terdapat 86.97% peserta KB yang masih memungkinkan untuk tidak lanjut memakai kontrasepsi. Untuk meningkatkan keberlangsungan pemakaian Kontrasepsi maka hal yang perlu disarankan adalah dorongan pemakaian MKJP. Pendampingan PUS yang ber-KB yang mengalami komplikasi dan efek samping sehingga tetap konsisten menggunakan alat kontrasepsi. Memperbanyak calon fasilitator KB yang dapat memberikan Advokasi dan KIE kepada akseptor KB untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis. Sesudah melalukan verifikasi ulang terhadap data pada tahun 2019 dan 2020 data file tahun 2022 sudah merujuk berdasarkan hasil pendataan Keluarga tahun 2021 dengan melihat perbandingan hasil pendataan keluarga tahun sebelumnya sehingga jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi di lihat persentase besaran dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel 2. 284
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	17.490	15.949	16.650	5.407	6.757
2	Jumlah akseptor KB	48.907	52.534	50.540	29.253	37.383
3	**Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi**	**35,76%**	**30,36%**	**32,94%**	**18,48%**	**18,08%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

14. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Program Bina Keluarga Balita bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainya dalam membina tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan

emosional maupun sosial dari 5 (lima) tahun terakhir persentase BKB ber-KB mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya (2019-2023). Setelah pencanangan Program Nasional Kampung KB, cakupan anggota BKB tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 80,46%. Tahun 2021 menurun menjadi 74,48%, terus menurun di tahun 2022 menjadi 54,69% dan tahun 2023 menjadi 44,31%. Sehingga dalam pencapaiannya untuk mengetahui pemahaman orang tua balita mengenai program kegiatan Posyandu untuk mengetahui pemahaman orang tua balita mengenai program kegiatan Posyandu. Berikut data 5 tahun.

Tabel 2. 285
Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	5.168	5.168	5.069	1.952	1.882
2	Jumlah Anggota kelompok BKB	6.423	6.423	6.805	3.569	4247
3	**Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**	**80.46%**	**80.46%**	**74.48%**	**54.69%**	**44.31%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

15. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kelompok/wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai anak remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja dalam rangka memantapkan kesertaan pembinaan bagi remaja.

Di tahun 2018 sebanyak 72.38% anggota BKR yang sudah mengikuti program KB angkanya meningkat di tahun 2019 menjadi 77.58%, hingga di tahun 2020. Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menambah cakupan Anggota BKR di Kabupaten Wajo untuk terlibat dalam program pengendalian pertumbuhan penduduk sehingga di tahun 2021 persentasenya menurun menjadi 59.88% dan begitu pula di tahun 2022 menurun drastis menjadi 15.20%. Namun di tahun 2024 menurun drastis menjadi 3,27%. Untuk lebih lengkapnya, berikut data 5 tahun.

Tabel 2. 286
Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang	3.086	3.086	6.935	560	140

	ber-KB					
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	3.978	3.978	4.901	3.683	4.285
3	**Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB**	**77.58%**	**77.58%**	**59.88%**	**15.20%**	**3,27%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

16. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat mandiri poduktif dan bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Wajo yang mengikuti program KB berada di angka 65,93%. Pada Tahun 2019 meningkat menjadi 70.33% yang artinya anggota BKL yang belum mengikuti Program KB masih terdapat 734 orang. Di tiga tahun terakhir proporsi Anggota BKL yang terlibat menggunakan KB meningkat menjadi 75.70 di tahun 2020. Tahun 2021 menurun drastis menjadi 43.06% dan tahun kembali meningkat tajam di tahun 2022 sebesar 90.91%. Tahun 2023 menurun drastis menjadi 9,34%. Hal ini di karenakan peran serta dari kader BKL khususnya untuk mewujudkan pembangunan keluarga lansia tangguh, melalui fungsi sosialisasi fungsi sosial budaya fungsi perlindungan dan sebagainya sehingga mampu meningkatkan kualitas lansia dan pemberdayaan keluarga lansia yang mampu berperan serta dalam kehidupan keluarganya. Adapun data lengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 287
Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	1.740	1.873	1.776	1.060	298
2	Jumlah Anggota kelompok BKL	2.474	2.474	4.124	1.166	3.192

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	**Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**	**70.33%**	**75.70%**	**43.06%**	**90.91%**	**9,34%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

17. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat pelayanan keluarga sejahtera dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 19 Tahun 2017 diartikan sebagai wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat dengan kegiatan dan atau rangkaian pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi informasi dan edukasi konsultasi dan konseling pembinaan serta rujukan. Dalam regulasi ini PPKS penting keberadaanya untuk mewujudkan sebuah keluarga harmonis.

Dalam lima tahun terakhir Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Wajo tidak mengalami perubahan. Angka persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupaten Wajo di tahun 2019-2023 menunjukkan angka sebesar 14.29 persen. Mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 21%, hal ini dikarenakan bertambahnya petugas PPKS, yang pada tahun sebelumnya adalah 2 orang menjadi 3 orang. Namun di tahun 2022 menurun kembali menjadi 14.29%, demikian pula di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada data berikut.

Tabel 2. 288
Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS	2	2	3	2	2
2	Jumlah kecamatan	14	14	14	14	14
3	**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan**	**14.29%**	**14.29%**	**21%**	**14.29%**	**14.29%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

18. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja / Mahasiswa

Peran Forum Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) sebagai perwujudan pendidikan nonformal di masyarakat. Berkaca pada maraknya perilaku menyimpang di masa remaja saat ini berbagai kegiatan yang dilaksanakan dari oleh dan untuk remaja Forum PIK Remaja

memberikan kesempatan bagi remaja untuk memperoleh pengetahuan kemampuan dan bekal guna menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Forum ini memberikan keleluasaan bagi para remaja untuk dapat belajar mengenai penyalahgunaan Napza Seksualitas *HIV* dan *AIDS* serta *Life Skill* untuk mencapai tujuan program generasi berencana. Kegiatan yang dilaksanakan menjadi pendidikan alternatif bagi kalangan remaja.

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, kembali menjadi 4.6% di tahun 2021 dan tahun 2022 meningkat menjadi 4.9%, demikian pula tahun 2023. Hal ini diakibatkan kurannya kesadaran remaja mengenai pentingnya konseling remaja/mahasiswa dalam memperoleh pengetahun guna membendung tantangan kehidupan saat ini.

Untuk membantu dan membina remaja menyiapkan masa depannya BKKBN sesuai dengan amanat UU No 52 Tahun 2009 mengembangkan program Generasi Berencana yang disingkat Program GENRE yang ditujukan kepada remaja/mahasiswa melalui wadah PIK Remaja/ mahasiswa. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada data berikut.

Tabel 2. 289
Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PIK R/M	63	63	65	68	69
2	Jumlah kecamatan	14	14	14	14	14
3	**Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa**	**4.5**	**4.5**	**4.6**	**4.9**	**4.92**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

19. Cakupan PKB / PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pelayanan evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. Karena peranya yang penting maka pelibatan PKB/PLKB dalam

menyusun perencanaan dan pelaksanaan berkaitan dengan pengendalian penduduk menjadi penting.

Dalam lima tahun terakhir cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Wajo sudah mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena PKB/PLKB adalah pegawai negeri sipil yang tentu saja terlibat langsung dalam semua proses perencanaan dan pelaksanaan bidang pengedalian penduduk di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 290
Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	99	98	93	96	96
2	Jumlah PKB/PLKB	99	98	93	96	96
3	**Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

20. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri

Kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan pendapatan keluarga.

Anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang sering dikenal dengan peserta KB mendiri memperlihatkan nilai yang relatif tinggi dari tahun 2017 sebesar 78.69% demikian pula tahun 2018 mengalami lonjakan pasangan usia subur yang sudah ber KB mandiri sebesar 84.14 %, namun ditahun 2019 turun menjadi 79.58%. Kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 84.14%. Tahun 2021 menurun menjadi 60.06% dan kembali meningkat di tahun 2022 sebesar 66.35%. Kelompok UPPKS didorong diajak difasilitasi dan didampingi untuk memanfaatkan segala sumber daya lokal untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dalam ber– KB. Untuk lebih

jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut, yang merupakakn data ter*update*.

Tabel 2. 291
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	1.188	1.123	1.188	1.113	1.120
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	1.412	1.411	1.412	1.853	1.688
3	**Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri**	**84.14%**	**79.58%**	**84.14%**	**60.06%**	**66.35%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

21. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan seseorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional ditingkat dusun RT/RW yang setara. Peran petugas pembantu dalam mensosialisasikan penggunakan alat kontrasepsi pada tingkat desa dan kelurahan dapat secara langsung mempengaruhi perilaku penduduk dalam mengikuti program KB. Oleh karena itu keberadaan petugas pembantu harus disebar di semua desa.

Di Kabupaten Wajo rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Wajo sudah mencapai angka 1. Capaian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa/kelurahan di Kabupaten Wajo yang tidak memiliki petugas pembantu Pembina KB.

Tabel 2. 292
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	190	190	190	190	190
2	Jumlah Desa/Kelurahan	190	190	190	190	190
3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/ Kelurahan	1	1	1	1	1

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2024

22. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Pelayanan Keluarga Berencana seperti monitoring pencapaian peserta KB baru pendistribusian serta pengawasan terhadap ketersediaan alat kontrasepsi ke seluruh fasyankes di Kabupaten Wajo. Dalam hal ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi memperlihatkan kondisi yang baik dari tahun ke tahun. hal ini dibuktikan ketersediaan alat dan kontrasepsi cukup berlebih bila dibandingkan permintaan dari masyarakat yaitu pada tahun 2020 sekitar 149% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah mengalami peningkatan. Untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat yang mengikuti program KB perlu didukung dengan penyajian data dan informasi mengenai pelaporan kegiatan secara berkala untuk membantu perencanaan distribusi alat kontrasepsi monitoring dan evaluasi program KB.

Untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan tersebut maka harus ada datadata yang menunjang informasi. Seperti laporan target capaian KB dibutuhkan data cakupan peserta KB baru Domisili per bulan. Data berikut merupakan data ter*update.*

Tabel 2. 293
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dangudang Alkon kab/kota	69.839	67.797	69.800	47.226	37.698
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	46.885	46.805	46.805	45.375	35.847
3	**Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat**	**148.96%**	**149.1%**	**149.1%**	**104%**	**105.16%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

23. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 berbagai upaya perbaikan kualitas layanan terus dilakukan. BPJS Kesehatan bersama dengan

pemangku kepentingan terkait agar implementasi Program JKN-KIS dapat berkesinambungan dan manfaatnya makin dirasakan oleh peserta. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat Dari Ketersediaan Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS juga memperlihatkan kondisi yang baik (100%) di tahun 2018 meski tidak memperlihatkan peningkatan jumlah Faskes dari tahun ke tahun namun pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh BPJS dalam program JKN-KIS yang di bayarkan melalui pemerintah dapat membantu masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Pemerintah Kab. Wajo berkomitmen sesuai program jaminan kesehatan seduania (UHC) sekitar atau 95% masyarakat Wajo harus terpenuhi pelayanan BPJS dalam program JKN-KIS secara gratis. Data berikut merupakan data ter*update.*

Tabel 2. 294
Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	25	27	25	190	190
2	Jumlah Faskes dan jejaring	25	195	199	190	190
3	**Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**	**100%**	**13.84%**	**13.56%**	**100%**	**100%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

24. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Setiap desa wajib menyajikan data mikro keluarga hasil pendataan keluarga yang akurat dan terpercaya. Informasi Keluarga Informasi keluarga meliputi : data demografi data keluarga berencana data keluarga sejahtera dan data anggota keluarga. Dari jumlah penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa mencakup persentase sebesar 100% semenjak dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022.

Sebagai dasar peraturan Peemrintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana keluarga bernacana dan sistem indomasi keluarga Penyajian dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Penyajian dilakukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara berjenjang di setiap bulan. Data berikut merupakan data ter*update.*

Tabel 2. 295
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	190	25	190	332.089	332.089
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	190	25	190	332.089	332.089
3	**Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

25. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Dalam membangun keluarga ada delapan fungsi keluarga yang seharusnya menjadi perhatian semua keluarga di Indonesia karena dianggap sebagai acuan dan fondasi kehidupan oleh setiap keluarga. BKKBN menyebut bahwa kedelapan fungsi tersebut adalah Fungsi Agama fungsi cinta dan kasih sayang fungsi sosial dan budaya fungsi perlindungan fungsi kesehatan reproduksi fungsi lingkungan fungsi ekonomi dan fungsi sosialisasi pendidikan.

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Wajo sudah mencapai 100 persen di tahun 2018 hingga tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa tak ada satupun kelompok kegiatan di Kabupaten Wajo yang tidak melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga. Data berikut merupakan data ter*update.*

Tabel 2. 296
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok kegiatan	940	938	940	430	640

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga					
2	Jumlah kelompok kegiatan	940	938	940	570	812
3	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**100%**	**100%**	**100%**	**75.43%**	**78.82%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

26. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Dalam hal urusan balita dan anak tentang cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pemeliharaan tumbuh kembang anak dari tahun 2015 sampai 2018 masih memperlihatkan angka yang relatif kecil kurang dari 50% (rata-rata 48.44%). Jangka waktu tahun 2019-2022 berfluktuatif, tahun 2019 sebesar 79.19% lalu menurun menjadi 77.27% tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 81.16% dan di tahun 2022 menjadi 81.01%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tebel berikut. Data berikut merupakan data ter*update.*

Tabel 2. 297
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	9.689	5.740	5.401	5.523	5.498
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	20.002	7.248	6.989	6.805	6.787
3	**Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**	**48.44%**	**79.19**	**77.27%**	**81.16%**	**81.01%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

27. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu variabel yang menjadi perhatian dalam analisis demografi karena kaitannya yang erat dengan ferlitas Usia perkawinan terjadi baik pada laki-laki ataupun perempuan, meskipun tren penurunan pada perempuan lebih panjang dan pada laki-

laki telah kembali terjadi peningkatan usia kawin pertama yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Rata–rata usia kawin wanita dari tahun 2018 sampai 2019 tidak mengalami penurunan. Tahun 2018, rata-rata usia kawin pertama wanita sebesar 21.50 menurun di tahun berikutnya menjadi 21.47 demikian pula di tahun 2020. Tahun 2021 jumlah wanita menurut usia kawin pertama meningkat menjadi 2.254 orang, yang mengakibatkn rata-rata usia kawin pertama wanita menurun menjadi 18.19 namun 2022 menurun drastis menjadi 1,13. Hal inidisebabkan dinamika pada umur kawin pertama wanita dengan jumlah wanita menurut usia kawin pertama. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut. Data berikut merupakan data ter*update.*

Tabel 2. 298
Rata-rata usia kawin pertama wanita Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	41.065	41.000	41.000	41.000	60.445
2	Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	1.910	1.910	1.910	2.254	53.361
3	**Rata-rata usia kawin pertama wanita**	**21,50**	**21,47**	**21,47**	**18,19**	**1,13**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2022

28. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Dari segi pembiayaan untuk program kependudukan, keluarga berencana dan pembinaan keluarga juga masih relative kecil. Dari tahun 2018 sebesar 0.99%, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 0,57% demikian pula di tahun 2020. Padat tahun 2021 meningkat drasti menjadi 38.14% dan kembali turun di tahun 2022 sebesar 33.91%.

Dalam menopang pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejak tahun 2018 sampai sekarang bantuan operasional keluarga berencana untuk pemerintah kabupaten/kota, hal ini sejalan dengan pasal 298 ayat (7) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan kegaitan non fisik.

Tabel 2. 299
Persentase pembiayaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	15.138.747.714	8.795.455.637	8.795.455.637	5.571.424.000	4.648.648.200
2	Jumlah APBD dan APBDES	153.055.338.919.050	153.822.202.829.521	153.822.202.829.521	1.460.792.278.539	1.370.792.278.539
3	**Persentase Pembiayaan Program Kependudukan Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes**	**0,99%**	**0,57%**	**0,57%**	**38,14%**	**33,91%**

Sumber : DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun 2023

2.1.5.2.18. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Seiring laju urbanisasi masyarakat menikmati berbagai gaya hidup perkotaan dan memiliki system nilai yang berbeda.beda terhadap barang dan jasa. Dalam konteks transportasi layanan angkutan umum harus dapat memuaskan beragam jenis permintaan angkutan. Transportasi sebagai sarana angkutan penumpang umum yang memegang peranan penting dalam menunjang aktifitas dan mobilitas masyarakat akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup sosial ekonomi sehingga penumpang angkutan umum ini harus dipertahankan keberadaannya.Pada tabel di atas ini kita dapat melihat bahwa arus penumpang angkutan umum penumpang bis meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan salah satu indikasi meningkatnya pergerakan ekonomi oleh pelaku ekonomi masyarakat Kabupaten Wajo yang lebih cenderung menggunakan transportasi darat dalam mobilitasnya. Peningkatan penumpang laut pada tahun 201 didominasi penumpang di sektor non formal seperti pedagang pekerja perkebunan dan peternakan dari pelabuhan tobaku yang ingin melakukan aktifitas perekonomiannya seperti berdagang maupun membeli kebutuhan sehari-hari. Untuk tahun 2019 s/d tahun 2023 terjadi penurunan penumpang kapal laut disebabkan moda transportasi darat lebih dominan digunakan pelaku transportasi.

Jumlah arus penumpang angkutan umum merupakan akumulasi keseluruhan penumpang moda transportasi darat khusus bis serta penumpang kapal laut. Arus penumpang angkutan umum pada tahun 2022 sebesar 637.830 orang, jika dibandingkan realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 94,90%. Lonjakan arus penumpang terutama pada moda darat ini dipengaruhi faktor mulai dilonggarkannya kebijakan pembatasan sosial akibat *Covid-19*. Untuk tahun 2023 terdapat peningkatan 5,43% penumpang bis dan 6,98% penumpang kapal laut dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya arus penumpang dari dan ke wilayah Soppeng, Palopo, Masamba dan daerah Palu. Peningkatan arus penumpang bus dominan juga terjadi jelang perayaan hari besar keagamaan dan perayaan tahun baru. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 300
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penumpang Bis	1.927.380	512.791	308.770	604.800	637.643
2.	Jumlah penumpang Kereta api	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	51.508	36.662	36.517	33.030	35.337
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	**Total Jumlah Penumpang**	**1.978.888**	**549.453**	**345.287**	**637.830**	**672.980**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Rasio Ijin Trayek

Penyediaan fasilitas angkutan umum merupakan indikator penting pada urusan perhubungan. Dalam daerah Kabupaten Wajo terdapat beberapa wilayah yang dilayani angkutan umum. Moda angkutan umum yang beroperasi dalam wilayah ini sebagian besar angkutan pedesaan yang melayani pengangkutan antar kecamatan dalam wilayah kabupaten. Untuk legalitas operasional dan keteraturan wilayah operasi sesuai beban kebutuhan pengangkutan angkutan umum diperlukan adanya izin trayek.

Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dapat menggambarkan jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi dengan tujuan melayani permintaan pengangkutan yang terdefinisikan pada indikator kinerja kunci

(IKK) bidang urusan perhubungan di dalam indikator Rasio ijin trayek. Pada tahun anggaran 2022 realisasi jumlah izin trayek yang telah dikeluarkan sebanyak 102 dengan jumlah penduduk sebesar 379.706 jiwa. Untuk tahun 2023 sebanyak 105 ijin trayek dengan jumlah penduduk 405,14 ribu jiwa. Jika disesuaikan dengan perhitungan rasio maka dapat direpresentasikan rata-rata 1 unit moda darat setidaknya melayani permintaan angkutan sebesar 3.723 (0,98%) jiwa penduduk. Pada indikator kinerja tersebut bahwa ijin trayek yang dikeluarkan tidak menggambarkan analisis hasil kinerja secara signifikan karena terdapat faktor penghambat makin meningkatnya angkutan umum yang menggunakan plat hitam serta peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 301
Rasio Ijin Trayek Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	DPMPTS	DPMPTS	DPMPTS	102	105
2	Jumlah penduduk	397.814	398.784	379.396	379.706	405.140
3	**Rasio ijin trayek**	-	-	-	**0,00027**	**0,00025**

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2024

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Untuk meningkatkan keamanan angkutan darat Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo telah melakukan Uji Kir angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis. Uji KIR berkala merupakan penentu layak atau tidaknya kendaraan tersebut untuk dapat dioperasikan, kelayakan teknis kendaraan yang baik dapat meningkatkan keselamatan pengguna transportasi sehingga mendukung interkoneksi antar wilayah. Tenaga penguji yang secara teknis memiliki kompetensi dalam bidang pengujian dan petugas Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala melakukan sosialisasi mengenai pentingnya melakukan pengujian laik kendaraan dan tentunya juga meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan sehingga meningkatkan jumlah Uji KIR Angkutan Umum.

Jumlah uji kir kendaraan bermotor angkutan umum yang memenuhi syarat laik jalan pada tahun 2022 sebanyak 3.658 unit yang didominasi kendaraan pick up/bak terbuka angkutan barang dan truk. Jika dibandingkan realisasi pada tahun 2021 yang sebanyak 2.778 unit, maka terdapat peningkatan sebesar 31,67%. Faktor pendukung peningkatan

jumlah uji kir angkutan umum disebabkan makin bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor terutama pick up/bak terbuka dan sejenisnya yang merupakan mobil untuk mengangkut barang. Hal ini tentu diselaraskan dengan upaya-upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo dalam meningkatkan jumlah kendaraan yang telah memenuhi syarat kelaikan teknis melalui sosialisasi serta pengawasan lapangan terhadap kendaraan umum yang wajib uji.

Tabel 2. 302
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2019 s.d 2023

No	Angkutan Umum	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mobil Penumpang Umum	245	91	17	17	26
2	Mobil Bus	16	6	9	10	-
3	Mobil Barang	2.176	2.523	2.752	3.631	3.687
4	**Jumlah Uji Kir**	**2.437**	**2.620**	**2.778**	**3.658**	**3.713**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wajo. Tahun 2023

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator kinerja uji kir angkutan umum diperlukan usaha untuk mengoptimalkan kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor diantaranya pelaksanaan sosialisasi pentingnya Uji KIR kepada para pengusaha angkutan umum serta operasi terpadu kelengkapan Uji KIR dengan pihak terkait.

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis

Dapat diketahui bahwa 1 (satu) Indikator sasaran "Tercukupinya sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung konektivitas wilayah dan pengembangan sentra produksi. Dalam mengukur tercukupinya sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung konektivitas wilayah dan pengembangan sentra produksi, salah satu indikator yang digunakan adalah jumlah terminal/pelabuhan yang mempunyai trayek ke sentra produksi. Hal ini tergambarkan pada data indikator jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis. Jumlah terminal yang terdiri dari 3 unit pada saat ini masih dapat mengakomodir kebutuhan transit kendaraan moda angkutan darat, sedangkan untuk pelabuhan/ dermaga realisasi tetap sebanyak 1 unit meskipun pemerintah sedang mengupayakan rencana pembangunan dermaga rakyat pada wilayah tertentu yang di pisahkan perairan demi mendukung aksebilitas masyarakat di masa yang akan datang.

Pembangunan wilayah dapat direpresentasikan eksistensi sektor dan biasanya wilayah yang memiliki keuntungan lokasi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kemampuan wilayah untuk menyebarkan pertumbuhan tersebut tergantung pada multiplier effect yang berhubungan dengan faktor-faktor input-output dari inti tersebut adanya industri yang bertujuan menyediakan barang dan jasa serta sektor transportasi yang mendukung pengembangan sentra produksi akan menyebabkan timbulnya aktivitas ekonomi dan penyebaran pertumbuhan.

Tabel 2. 303
Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelabuhan laut	2	2	1	1	1
3	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	2
	Jumlah	**5**	**5**	**4**	**4**	**3**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wajo. Tahun 2024

Dalam mengukur tercukupinya sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung konektivitas wilayah dan pengembangan sentra produksi, salah satu indikator yang digunakan adalah jumlah terminal/pelabuhan yang mempunyai trayek ke sentra produksi. Hal ini tergambarkan pada data indikator jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis. Jumlah terminal bis yang terdiri dari 3 (tiga) unit pada tahun 2022 mengalami pengurangan sebanyak 1 (satu) unit pada tahun 2023 disebabkan salah satu sub terminal yaitu sub terminal siwa Kecamatan Pitumpanua tidak lagi layak untuk dioperasikan karena tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk pelabuhan/dermaga realisasi tetap sebanyak 1 (satu) unit meskipun pemerintah sedang mengupayakan rencana pembangunan dermaga rakyat pada wilayah tertentu yang di pisahkan perairan demi mendukung aksebilitas masyarakat di masa yang akan datang.

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Hingga saat ini pengembangan industri di Kabupaten Wajo masih belum optimal namun diyakini bahwa Kabupaten Wajo memiliki kemampuan yang besar untuk mengembangkan industri yang berdaya saing kuat dengan berbagai peluangnya baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Dalam mengukur tersedianya infrastruktur transportasi yang mendukung pengembangan sentra produksi salah satu indikator yang digunakan adalah Jumlah Angkutan Darat.

Layanan angkutan darat dapat diartikan sejauhmana moda transportasi darat mampu memenuhi permintaan/kebutuhan penumpang angkutan darat. Ketidakseimbangan akan terjadi jika moda angkutan darat lebih besar dibandingkan permintaan (On Demand) atau jumlah penumpang/kebutuhan penumpang ataupun sebaliknya permintaan angkutan yang terlalu tinggi dilayani moda angkutan darat yang terbatas. Sebagai sampel pada data indikator presentase layanan angkutan darat tahun 2022, jumlah angkutan darat mengalami peningkatan sebesar 10,96% yang diikuti penurunan jumlah penumpang sebesar 0,28% dibandingkan tahun 2021. Untuk tahun 2023 terdapat penurunan 63,80% untuk jumlah angkutan darat dan penurunan 46,53% untuk penumpang angkutan darat. Khusus untuk angkutan darat penurunan tersebut terjadi disebabkan faktor beberapa unit armada sudah tidak beroperasi dan beralih ke plat hitam. Sedangkan menurunnya jumlah penumpang diakibatkan peralihan pola pemilihan transportasi publik online yang rata-rata berplat hitam serta makin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi.

Tabel 2. 304
Angkutan Darat Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan darat	662	155	155	172	105
2	Jumlah penumpang angkutan darat	1.927.380	512.791	308.770	307.900	210.115
3	**Persentase layanan angkutan darat**	**0.03**	**0.03**	**0.05**	**0.05**	**0.049**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wajo. Tahun 2024

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum merupakan presentase jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR terhadap jumlah seluruh angkutan umum. Pada Tahun 2022 tercatat 3.872 total angkutan umum (mobil pick up, mobil sewa, truck pengangkut barang, bus) sedangkan yang tidak memiliki kir sebanyak 164 unit. Jika dibandingkan pada tahun 2021 jumlah angkutan umum yang tidak memiliki kir tetap, akan tetapi di sisi lain jumlah angkutan umum meningkat sebanyak 33,05%. Untuk tahun 2023 kendaraan yang tidak memiliki kir meningkat sebesar 31,09% dari tahun 2022 diiringi peningkatan jumlah angkutan umum sebesar 1,44%. Terhitung rata-rata presentase kepemilikan kir menurun sebesar 1,44%

pada rentan waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini diartikan presentase kendaraan yang tidak memiliki kir dibalik fenomena makin bertambahnya jumlah kendaraan angkutan umum yang didominasi angkutan barang masih terkendali. Beberapa faktor penyebab yang masih terjadi pada periode sebelumnya diantaranya masih ditemukannya beberapa kendaraan terutama angkutan barang khusus truk tidak layak uji akibat merubah konstruksi kendaraan serta kesadaran masyarakat untuk mengujikan kendaraan wajib uji yang masih rendah.

Faktor penghambatnya, kesadaran pemilik kendaraan wajib uji yang masih rendah karena kurangnya pengetahuan tentang uji KIR yang memiliki fungsi utama mengetahui layak atau tidak kendaraan bermotor tersebut dioperasikan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan selain itu bertambahnya jumlah angkutan umum yang menggunakan plat hitam menjadi penghambat dalam capaian kinerja tersebut. Faktor lainnya bahwa pelaksanaan uji kir tidak berlaku pada satu wilayah saja akan tetapi dapat dilaksanakan pada daerah lain apabila tenggang waktu kir telah habis. Mobilitas mobil penumpang umum yang tinggi akan berdampak pada lokasi wilayah tempat pengujian karena kita tidak dapat untuk memobilisasi/mengarahkan angkutan umum untuk melakukan uji kir di Kabupaten Wajo saja.

Untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan usaha untuk mengoptimalkan kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor diantaranya pelaksanaan sosialisasi pentingnya Uji KIR kepada para pengusaha angkutan umum serta operasi terpadu kelengkapan Uji KIR dengan pihak terkait.

Tabel 2. 305
Kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n	123	3.831	164	164	215
2	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	662	155	2.910	3.872	3.928
3	**Persentase kepemilikan KIR angkutan umum**	**0.19**	**24.72**	**5.63**	**5.53**	**5.47**

Sumber : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), 2024

7. Pemasangan Rambu-Rambu

Secara umum pengertian rambu-rambu adalah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang huruf

angka kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan larangan perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Selain itu rambu lalu lintas juga merupakan tanda yang sengaja dipasang untuk memberikan informasi kepada para pemakai jalan. Rambu tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada system jalan. Berdasarkan jenis pesan yang disampaikan rambu lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi rambu-rambu sebagai berikut :

1. Rambu peringatan
2. Rambu petunjuk
3. Rambu Larangan dan perintah
4. Rambu tetap dan rambu tidak tetap.

Pemasangan rambu lalu lintas pada tahun 2022 sebanyak 31 unit dari target yang seharusnya tersedia 67 unit. Presentase pemasangan rambu pada tahun 2021 sebesar 60,4%, ada penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 30,56%. Sedangkan untuk tahun 2023 terjadi penurunan drastis sebesar 80,65% dibandingkan dengan tahun 2022. Sebagai bahan pertimbangan bahwa target pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 pada tahun 2022 yang harus dipenuhi sebanyak 67 unit jika dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 53 unit. Terdapat beberapa faktor target pemasangan rambu yang seharusnya tersedia tidak tercapai diantaranya permintaan usulan hasil musrenbang tiap wilayah kecamatan yang harus dipenuhi dengan anggaran terbatas, selanjutnya intensitas tinggi permintaan pemasangan rambu prioritas untuk ditindaklanjuti pada titik-titik berpotensi menimbulkan dampak negatif bangkitan lalu-lintas.

Tabel 2. 306
Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	0	34	32	31	6
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	0	80	53	67	67
3	**Pemasangan Rambu-rambu**	**0**	**0.43**	**60.4%**	**46,27%**	**8,95%**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wajo. Tahun 2024

8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Peningkatan signifikan jumlah kendaraan bermotor akan mempengaruhi daya tampung jalan. Kapasitas/volume jalan sangat vital

dalam memenuhi kebutuhan mobilisasi perparkiran/pemberhentian sementara suatu kendaraan. Salah satu pemicu tingginya pertambahan jumlah kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Wajo disebabkan kemudahan dalam pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan dari tahun 2015 sampai dengan pada tahun 2020 mengalami peningkatan rata.rata 502% setiap tahunnya. Untuk saat ini perbaikan pelayanan khusus manajemen transportasi umum di jalan melalui kegiatan pengendalian pengamanan dan rekayasa lalu lintas dipandang lebih efektif untuk meminimalisir ketidakmampuan daya tampung jalan.

Tabel 2. 307
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan (Km)	PU	PU	PU	1.008,62	1.008,62
2	Jumlah Kendaraan	159.588	165.163	165.163	-	-
3	**Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wajo. Tahun 2024

9. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang jasa tenaga kerja serta merupakan inti dari pergerakan perekonomian sebuah kota. Berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karateristik dan tingkat pelayanan yang diberikan seharusnya berorientasi pada kenyamanan dan keamanan serta angkutan umum harus memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu fungsi utama angkutan umum moda transportasi darat dan moda transportasi laut adalah memobilisasi/mengangkut orang/dan atau barang, penumpang orang atau barang dari asal keberangkatan ke tujuan tempat/daerah tertentu. Terkhusus untuk moda darat, penumpang/barang dinyatakan dengan istilah terangkut angkutan umum di dalam dan di luar terminal dalam suatu wilayah tertentu. Pengecualian pada moda laut yang aktifitas pengangkutan orang maupun barang dilakukan pada dermaga/pelabuhan. Pada tahun 2022 tercatat jumlah orang yang terangkut angkutan umum sebanyak 130.230 orang dan barang yang terangkut sebesar 39.184 ton, jika dipresentasekan maka masing-masing terdapat peningkatan 163,19% untuk penumpang orang dan 72,52% untuk angkutan barang. Hal ini disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat ke arah/dan dari pusat sentra

produksi (pasar, tempat- tempat pelayanan umum)/wilayah transaksional untuk berbagai kebutuhan/kepentingan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 308
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	1.102.310	48.040	49.481	130.230	159.857
2	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)55	349.580	20.443	22.712	39.184	70.834
3	**Total**	**1.451.890**	**68.483**	**72.193**	**169.414**	**230.691**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wajo. Tahun 2024

10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Terminal berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan sesuai dengan fungsinya sebagai tempat melintas/check point pemberhentian sementara (transit) untuk penumpang ataupun awak kendaraan umum yang ingin beristirahat membeli keperluan tertentu ataupun mengecek keadaan kendaraan. Jika sesuai definisi di atas maka yang dimaksud adalah penumpang dan barang yang turun melalui/melintas di terminal.

Angkutan penumpang orang dan barang yang turun, melalui/melintas di terminal pada tahun 2022 tercatat 33.119 untuk penumpang orang sedangkan angkutan barang sebesar 33.514 ton. Presentase peningkatan dari tahun 2021 sebesar 15,06% untuk penumpang orang dan 20,87% untuk angkutan barang. Untuk tahun 2023 tercatat peningkatan sebesar 275,97% untuk jumlah orang melalui terminal disebabkan meningkatnya jumlah penumpang dari dalam dan luar wilayah kabupaten pada pusat perbelanjaan pasar sentral serta yang ingin melintas ke daerah lain karena dari segi letak wilayah, kota sengkang merupakan wilayah strategis sebagai titik simpul jaringan transportasi beberapa wilayah kabupaten. Sedangkan untuk jumlah barang yang melalui terminal terdapat penurunan 34,71% yang terjadi karena meningkatnya penggunaan kendaraan angkutan barang

bak terbuka serta distribusi logistic melalui ekspedisi atau perusahaan angkutan barang. Namun dari hasil peningkatan persentase tersebut di atas terdapat hambatan strategis bahwa pengalihan terminal callaccu ke terminal sawerigading yang terletak jauh dari pusat perekonomian menimbulkan dampak sangat signifikan terhadap menurunnya pengguna jasa terminal sehingga dalam perhitungan data jumlah orang/barang yang melalui terminal bisa saja lebih tinggi dari yang dapat ditampilkan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel 2. 309
Jumlah orang/barang melalui terminal per Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Orang	635.520	28.220	28.784	33.119	124.520
2	Jumlah Barang	636.520	27.380	27.727	33.514	20.276
3	**Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun**	**1.272.040**	**55.600**	**56.511**	**66.633**	**144.796**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wajo. Tahun 2024

Untuk Jumlah orang/barang yag melalui dermaga, pada tahun 2022 jumlah orang melalui dermaga sebanyak 45.214 orang dan angkutan barang sebesar 39.012 ton, berdasarkan realisasi pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 23,81% untuk penumpang orang sedangkan untuk angkutan barang menurun 3,76%. Untuk tahun 2023 jumlah orang melalui dermaga tercatat meningkat 6,29% dan untuk barang 29,59% dibandingkan tahun 2022. Untuk penumpang orang salah satu faktor pendukung yaitu meningkatnya pengguna jasa dermaga terutama penduduk dari wilayah Kabupaten Soppeng yang berprofesi sebagai pekebun dan peternak serta yang berprofesi sebagai pengusaha. Mobilisasi barang didominasi barang campuran, beras/hasil perkebunan, dan hewan ternak. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 310
Jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Orang	64.333	36.662	36.517	45.214	48.058
2	Jumlah Barang	16.398	41.629	40.482	39.012	50.558

3	**Jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun**	**80.731**	**78.291**	**76.999**	**84.226**	**98.616**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.3. Layanan Pilihan

2.1.5.3.1. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Perkembangan Kunjungan dan Pengeluaran Wisatawan Data Tahunan dapat dijabarkan seperti pada tabel dibawah ini, berdasar pada jumlah kunjungan pada objek wisata Kawasan Atakkae, Danau Tempe, Kolam Renang Kalola. Khusus pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan berkurang karena adanya pandemic covid 19 sedangkan pada tahun 2021 kunjungan wisatawan sudah mulai meningkat pelaksanaan kegiatan mulai stabil dan destinasi wisata pun sudah terbuka kembali meskipun tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata sangat meningkat dibanding dua tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya lagi pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan dan wisatawan mancanegara pun sudah mulai berdatangan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 311
Kunjungan Wisata Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se.Kabupaten dan Kota	83.006	26.975	29.222	30.105	347.416
2	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se.Kabupaten dan Kota	72.782	83.265	29.222	30.00	35.000
3	**Kunjungan wisata %**	**11.40**	**32.39**	**33.01**	**33.69**	**9.92**

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata Kab. Wajo, 2024

2. Lama Kunjungan Wisata

Secara umum lama tinggal wisatawan pada suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang cukup tentang suatu destinasi wisata bagi wisatawan sehingga memutuskan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam destinasi tersebut. Rata-rata lama kunjungan wisata yaitu pada tahun 2018 selama 1 hari hingga tahun 2022. Dan di

tahun 2019 rata-rata lama kunjungan wisata dalam satu tahun selama 2 hari. Adapun lama kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2020 tidak mengalami kenaikan lama kunjungan dikarenakan adanya pandemic covid.pada tahun 2021 meskipun sudah mulai stabil tetapi lama kunjungan masih sama dengan tahun 2020 Pada tahun 2022 lama kunjungan wisatawan sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan destinasi wisata sudah mulai di normal kembali, meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi lama kunjungan untuk Kabupaten Wajo belum signifikan dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana di tempat wisata sehingga kebutuhan wisawatan belum terpenuhi serta Kabupaten Wajo belum menjadi Daerah tujuan wisata hanya sebatas persinggahan (Daerah Transit) wisatawan sebelum kunjungan ke kabupaten lain. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 312
Lama kunjungan wisata Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata.rata Lama kunjungan wisata dalam satu tahun	0.2 Hari	0.2 Hari	0.2 Hari	0.4 Hari	0.6 Hari

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata Kab. Wajo, 2024

3. PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami capaian yang berfluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Promosi destinasi wisata dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Wajo harus lebih optimal dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah khususnya sektor parawisata.

Dari Tabel 2.3 PAD Sektor Pariwisata dapat dijabarkan, dimana penerimaan sektor pariwisata dari tahun 2020 berkontribusi terhadap PAD sebesar 0,049%, tidak mengalami peningkatan karena adanya pandemic *covid-19*, pada tahun 2021 sudah ada peningkatan karena pembatasan kegiatan masyarakat sudah stabil. Dan pada tahun 2022 wisatawan tidak hanya nusantara tetapi wisatawan mancanegara juga sudah mulai berdatangan sehinggan PAD sektor pariwisata mengalami peningkatan sebanyak Rp.106.055.000,- sedangkan total PAD secara keseluruhan Rp. 162.855.347.697.00-.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD bisa ditingkatkan lagi dengan mempertimbangkan faktor pendukung seperti sarana akomodasi (hotel dan pondok wisata) restoran biro perjalanan wisata objek wisata daya tarik wisata maka dari itu pemerintah Kab. Wajo perlu meningkatkan lagi fasilitas dan perawatan objek wisata serta membuka objek wisata baru yang memiliki daya tarik untuk didatangi oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Tabel 2. 313
PAD sektor parawisata Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAD sektor pariwisata	71.277.000	63.374.000	84.146.000	84.146.000	5.301.338.094
2	Total PAD	142.127.811.980	128.402.684.712,76	132.322.535.540	132.322.535.540	186.338.116.332
3	PAD sektor pariwisata	**0.05%**	**0.049%**	**0.063%**	**0.063%**	**0,028%**

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata Kab. Wajo, 2024

2.1.5.3.2. Bidang Urusan Pertanian

1. Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB

Perekonomian Kabupaten Wajo masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 34% dari seluruh sektor pada di tahun 2022. Tidak salah dikatakan bahwa pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 314
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	3.598.987,91	3.721.004,71	4.155.652,80	8.279.462,20	99,52
2	Jumlah PDRB	19.838.814	19.773.157,51	22.319.744,50	24.352.778,90	24.588,57
3	**Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB**	**18,14%**	**18,82%**	**18.62%**	**34%**	**40%**

Sumber : Dinas Pertanian & Ket.Pangan Kab. Wajo Tahun 2024

2. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyumbang peningkatan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Wajo. Palawija merupakan salah satu kunci dalam menggalakkan diverisifikasi pangan di Indonesia demi mempertahankan ketahanan pangan. Lahan tidur yang tidak tergarap misalnya lahan kehutanan bisa ditanam palawija karena penanaman palawija tidak membutuhkan banyak air. Produktivitas pertanian (palawija) seperti jagung dan umbi.umbian yang meningkat menjadi faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian (palawija).

Tabel 2. 315
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)	2.377.598,96	2.453.539,44	2.773.288,20	3.320.849,60	3.323.406,10
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	3.598.987,91	3.721.004,71	4.155.652,80	4.794.046,40	4.864.314,20
3	**Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)**	**66.06**	**65.94**	**66,74**	**69,27**	**68,32**

Sumber : Dinas Pertanian & Ket.Pangan Kab. Wajo Tahun 2024

Dari data di atas dapat di lihat bahwa Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB lima tahun terakhir mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 sebesar 66.06% dan di tahun 2020 menjadi 65.94%. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 20.8 poin menjadi 66,74% dan tahun 2022 meningkat cukup signifikan sebesar 69.27%, tahun 2023 menurun menjadi 68,32%. Ini terjadi karena adanya harga hasil pertanian khusunya sektor palawija tidak stabil.

3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) mengalami peningkatan persentase tiap tahunnya tapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dibanding tahun sebelumnya dimana peningkatannya kurang lebih 0.05% pertahun.

Tabel 2. 316
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	726.215,71	755.091,09	855.371,70	895.633,10	925.668,20
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	3.598.987,91	3.721.004,71	4.155.652,80	4.794.046,40	4.864.314,20
3	**Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)**	**20.18**	**20.29**	**20.58**	**18,68**	**19,03**

Sumber : Dinas Pertanian & Ket.Pangan Kab. Wajo Tahun 2024

4. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Produksi Padi Kabupaten Wajo merupakan kontribusi dari seluruh Kelompok Tani di Kabupaten Wajo (100%) dari total produksi, hal ini disebabkan karena seluruh luas areal pertanaman merupakan lahan pertanian yang dimiliki oleh anggota Kelompok tani.

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB yaitu mulai Tahun 2019-2023 mencapai angka 100%, walaupun ada penurunan jumlah produksi pangan utama lokal kelompok petani dengan pangan utama daerah. Hal ini dapat terlihat jelas pada tabel berikut.

Tabel 2. 317
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n	721,281	723,623	778,832	954,419	795.460
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utamadi daerah (ton) Tahun n	721,281	723,623	778,832	954,419	795.460
3	**Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Dinas Pertanian & Ket.Pangan Kab. Wajo Tahun 2024

5. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produksi Padi tahun 2023 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 hal ini disebabkan karena curah hujan yang kurang atau

dampak dari el nino. Sebagian pertanaman padi mengalami kekeringan sehingga produksi tidak maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 318
Produktivitas padi lokal per hektar Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	721.281	723.623	778.832,00	954.419,00	795.460,00
2	Luas areal Panen padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)	133.752	166.507	76.263,30	165.696,70	154.159,00
3	**Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**	**5.39**	**4.35**	**4.42**	**5.76**	**5.16**

Sumber : Dinas Pertanian & Ket.Pangan Kab. Wajo Tahun 2024

6. Cakupan Bina Kelompok Petani

Jumlah Kelompok Tani tahun 2023 terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 hal ini disebabkan karena jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan mengalami kenaikan sebesar 639 kelompok tani. Hal ini disebabkan bertambahnya bantuan dari pemerintah baik berupa benih, alsintan, dan prasarana pertanian. Cakupan Bina Kelompok Petani terjadi kenaikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yaitu 19, 41%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 319
Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2019-2022

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	1.558	2.819	1.988	3.292	3.931
2.	Jumlah kelompok tani	3.875	3.957	4.050	4.033	4.041
3.	**Cakupan Bina Kelompok Petani (%)**	**40.20**	**71.24**	**49.09**	**81.63**	**97,28**

Sumber : Dinas Pertanian & Ket.Pangan Kab. Wajo Tahun 2024

7. Produktivitas Hasil Peternakan

Produktivitas peternakan atau hasil peternakan ditentukan oleh dua hal utama yaitu keturunan atau genetik ternak yang dipelihara dan lingkungan seperti tempat pemeliharaan (kandang), pemberian pakan. Faktor genetik atau keturunan dan lingkungan sangat menentukan

produktifitas peternakan, karena walaupun sapi berasal dari keturunan yang mampu menghasilkan kenaikan bobot badan tinggi, tetapi tanpa dukungan pemeliharaan dan pemberian pakan yang baik, produksi tidak akan maksimal. Sebaliknya walaupun diberi pakan yang baik tetapi sapi berasal dari keturunan yang tidak mempunyai potensi, produksinya juga tidak akan maksimal.

Total Produksi Daging Kabupaten Wajo tahun 2023 sebesar 2.519.067 kg, terdapat kenaikan produksi Daging sebesar 325.672 Kg atau sebesar 14,85% dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa jumlah pemotongan sapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan produksi telur juga meningkat karena selain populasinya yang bertambah juga permintaan konsumen meningkat. Jadi produksi daging dan telur tahun 2023 selalu tersedia.

Tabel 2. 320
Produksi Hasil Peternakan Tahun 2019-2023

Jenis	Produktivitas Hasil Peternakan					%
Produksi	2019	2020	2021	2022	2023	
Daging (Kg)	4.085.089,00	2.081.588,00	2.033.870	2.193.397,00	2.519.069,00	14,85
Telur (kg)	3.590.635,00	4.953.730,00	5.775.265	5.997.563,00	6.189.906,00	3,21
Susu (kg)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian & Ket.Pangan Kab. Wajo Tahun 2024

Untuk Populasi ternak Sapi di Kabupaten Wajo secara keseluruhan dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan Populasi, meskipun ada beberapa kecamatan yang mengalami penurunan populasi dari Tahun 2019 ke Tahun 2022, hal ini disebabkan adanya beberapa peternak menjual ternaknya karena kesulitan mendapatkan pakan ternak karena ketersediaan pakan di lapangan sangat sulit disebabkan karena musim kemarau. Namun demikian di beberapa Kecamatan Populasi ternak Sapi mengalami peningkatan Populasi Ternak karena ketersediaan Pakan di daerah tersebut cukup memadai. Tahun 2023 populasi sapi di beberapa kecamatan mengalami penurunan disebabkan karena adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Adapun Populasi terhadap ternak besar, ternak kecil dan unggas, dapat terlihat pada tabel berikut. Data berikut merupakan data ter*update.*

Tabel 2. 321
Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	TERNAK BESAR			TERNAK KECIL	
		SAPI	KERBAU	KUDA	KAMBING	BABI
1	2019	125.050	6.534	2.227	15.785	393
2	2020	133.539	8.058	2.153	16.929	416
3	2021	137.487	7.349	2.049	17.275	421
4	2022	142.900	8.200	1.935	18.357	440
5	2023	1.705.070	101.780	22.469	223.479	440

Sumber : Dinas Pertanian & Ket.Pangan Kab. Wajo Tahun 2024

Tabel 2. 322
Populasi Ternak Unggas Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	UNGGAS				
		AYAM			ITIK	ITIK MANILA
		BURAS	PETELUR	PEDAGING		
1	2019	896.099	256.131	1.032.412	164.433	59.576
2	2020	905.113	272.752	1.225.016	167.122	61.808
3	2021	913.524	285.297	1.068.900	168.598	63.772
4	2022	1.030.898	294.155	1.086.300	171.074	66.227
5	2023	12.755.885	3.627.220	13.223.150	2.877.775	66.227

Sumber : Dinas Pertanian & Ket.Pangan Kab. Wajo Tahun 2024

2.1.5.3.3. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber energi alam mineral adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau biasa disebut nonrenewable resources. Jumlah sumber daya itu amat terbatas. Selain itu, proses pembentukan dan pemulihannya juga butuh waktu lama. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam mineral harus digunakan dengan efektif dan efisien. Sumber daya mineral atau mineral resource merupakan endapan mineral dan dapat dimanfaatkan secara nyata.

Secara umum, sumber daya energi dibagi menjadi tiga, yakni sumber daya energi konvensional, sumber daya energi nuklir, dan sumber daya energi terbarukan. Sumber daya energi konvensional merupakan sumber daya energi yang dimanfaatkan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energi manusia saat ini, misalnya minyak bumi, batubara, serta gas alam. Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki Sumber daya energi konvensional berupa gas alam. Adapun sumber gas alam dan jumlah produksi gas tiap sumur, dapat terlihat pada tabel berikut.

1. Jumlah Sumur Gas

Tabel 2. 323
Jumlah Sumur Gas di Kabupaten Wajo

No	Uraian	Lokasi	Jumlah Sumur	Keterangan
1	Lapangan Kampung Baru	Kampung Baru	11	Produksi: 3; P&A: 8
2	Lapangan Walanga	Walanga	5	Belum Produksi: 3; P&A: 2
3	Lapangan Sampi-Sampi	Sampi.Sampi	2	Belum Produksi: 1; P&A: 1
4	Lapngan Bonge	Bonge	1	Plug & Abandoned (P&A)
5	Sumur Lamata	Lamata	1	P&A
6	Sumur Peniki	Peniki	1	P&A
7	Lapangan Sallo Bullo	Sallo Bullo	1	P&A
8	Sumur Tironge	Tironge	1	P&A

Sumber : Bappelitbangda Kab. Wajo. Tahun 2024. Diolah

2. Jumlah Produksi Gas Tiap Sumur

Tabel 2. 324
Jumlah Produksi Gas Tiap Sumur Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
		MMScf					
1	Lapangan Kampung Baru	1.129.343	13.409,03	11.901,07	14.291,43	9.672,15	Produksi berasal dari Sumur KB.4A 6A & 8
2	Lapangan Walanga	.	.	.	.	.	Belum Produksi
3	Lapangan Sampi-Sampi	.	.	.	.	.	Belum Produksi
4	Lapngan Bonge	.	.	.	.	.	Tidak Produksi
5	Sumur Lamata	.	.	.	.	.	Tidak Produksi
6	Sumur Peniki	.	.	.	.	.	Tidak Produksi
7	Lapangan Sallo Bullo	.	.	.	.	.	Tidak Produksi
8	Sumur Tironge	.	.	.	.	.	Tidak Produksi

Sumber : Bappelitbangda Kab. Wajo. Tahun 2024. Diolah

2.1.5.3.4. Bidang Urusan Perdagangan

1. Ekspor Bersih Perdagangan

Kondisi dan potensi ekonomi pada setiap daerah merupakan modal dasar dan faktor utama dalam penentuan strategis kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengetahui potensi pertumbuhan pada setiap

sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo, serta melihat tingkat daya saing pada setiap sektor tersebut guna mengetahui kedepannya sektor basis mana yang memiliki daya saing yang kuat sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah pada Kabupaten Wajo. keterbukaan ekonomi adalah total perdagangan (RasioEkspor + Impor) terhadap PDB. Derajat kebutuhan ekonomi yang merupakan rasio perdagangan terhadap PDRB ini sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan terbuka antar negara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut jika salah satu negara tidak memaksakan untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisi neraca perdagangan bagi mitra dagangnya.

Tabel 2. 325
Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai ekspor	4.457.600.00	8.009.935.64	9.153,32	470.620,88	-280,22
2	Nilai impor	4.553.000.00	8.696.355.23	9.273,79	24.352,78	24.588,57
3	**Nilai ekspor bersih (1 - 2)**	**-95.400.00**	**-686.419.59**	**-120.47**	**19,32**	**-0,01**

Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Wajo. Tahun 2024

Dari tabel diatas jumlah Ekspor dan Impor barang dan jasa pada tahun 2021 sebanyak 18.427,11 dengan rasio 0,83% tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 470.620,88 atau 19,32 % dan tahun 2023 jumlah ekspor dan impor mengalami penurunan -280,22 atau -0,01%. Hal tersebut salah satu penyebab terjadinya penurunan karena disebabkan siklus atau situsional saja.

2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Sektor Informal adalah sektor ekonomi yang terdiri dari atas unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptkan Lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga maupun keahlian.

Pada tahun 2019 target cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal sebesar 38,25% dengan realisasi 42,50% dan tahun 2020 target sebesar 46,56% dengan realisasi 46,51% mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 dengan target 54,87% dengan realisasi 52,09%. Rencana tingkat capaian (target) terhadap capaian bina kelompok pedagang guna menentukan persentase yang merupakan

perbandingan nilai sebelumnya dari nilai tahun berjalan. Ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020, sehingga tahun 2021 capainnya sebesar 52,09%. Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo pada tahun anggaran 2021 dapat dikatakan berhasil baik dan pada tahun 2022 sampai 2023 Cakupan Bina Kelompok Pedagangan/Usaha Informal sama dengan jumlah pada tahun 2022 yaitu 52,09 %. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 326
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yangmendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	85	100	112	112	112
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	200	215	215	215	215
3	**Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal**	**42.50%**	**46.51%**	**52.09%**	**52.09%**	**52.09%**

Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Wajo. Tahun 2023

2.1.5.3.5. Bidang Urusan Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Jumlah Kolompok pengrajin yang mendapatkan binaan terhadap industri kecil dan menengah yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi, penerapatan teknologi tepat guna, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, Pendampingan kualitas perizinan usaha dan standarisasi produk.

Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan melalui kegiatan pembangunan industri kabupatan/kota sub kegiatan pembangunan sumber daya industri dan pembangunan sarana dan prasarana industri sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang siknifikan kemudian ditahun 2022 mengalami penurunan dan di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebanyak 83 IKM baik IKM yang berada di dalam sentra IKM maupun IKM yang berada di luar sentra IKM yang tersebar di 14 kecamatan di kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 327
Cakupan bina kelompok Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	3	23	42	9	83
2	Jumlah kelompok pengrajin	8	78	120	644	307
3	**Cakupan bina kelompok pengrajin**	**37.5%**	**29.49%**	**35%**	**1.39%**	**27,04%**

Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.3.6. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan

Produksi perikanan bersumber dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022. Meningkatnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh adanya kegiatan penebaran (restocking) setiap tahun. Dimana kegiatan restocking ini bertujuan menyeimbangkan populasi jangan sampai terjadi dominasi populasi ikan tertentu, restocking ini juga bertujuan menambah, meremajakan populasi ikan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila anak ikan hasil pemijahan alami tidak seimbang dengan jumlah ikan yang ditangkap.

Total Produksi perikanan bersumber dari total produksi perikanan tangkap dan total produksi perikanan budidaya. Secara umum total produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2023. Pada tahun 2023 hasil tangkapan di perairan umum (danau,sungai,rawa) mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh musim kemarau panjang yang mengakibatkan volume air berkurang bahkan kering tetapi hal ini tidak mempengaruhi total produksi tangkap karena produksi penangkapan di laut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan peningkatan produksi dari perikanan budidaya disebabkan oleh adanya peningkatan produksi tambak, kolam dan mina padi. Peningkatan produksi tambak disebabkan oleh peningkatan produksi terutama dari udang vaname. Minat pembudidaya sangat tinggi dalam berbudidaya udang vaname. Demikian pula pada budidaya air tawar, masyarakat semakin berminat untuk budidaya di kolam dan minapadi ditambah semakin berkembangnya budidaya sistem bioflok pada lahan yang terbata. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 328
Produksi Perikanan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah produksi ikan (ton)	538.020,36	541.102,60	559.224,58	567.029,43	570.182,68
2	Target daerah (ton)	535.770,00	537.667,00	542.621,00	549.206,00	555.975,92
3	**Persentase produksi perikanan**	**100,42%**	**1.01**	**1.03**	**1.03**	**1.03**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wajo, 2024

Tabel 2. 329
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

No	Kecamatan	Perikanan	Perairan Umum
1	*2*	*3*	*4*
1	Sabbangparu		5.908,10
2	Tempe		6.340,95
3	Pammana		1.702,24
4	Bola	2.221,00	446,05
5	Takkalalla	5.478,29	148,34
6	Sajoanging	5.219,55	
7	Penrang	2.390,85	55,23
8	Majauleng		3.760,27
9	Tanasitolo		5.666,74
10	Belawa		6.800,43
11	Maniangpajo		1.726,45
12	Gilireng		
13	Keera	3.718,08	
14	Pitumpanua	5.789,93	
Jumlah		**24.817,70**	**32.554,80**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wajo, 2024

Tabel 2. 330
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

No	Kecamatan	Perikanan Laut	Perikanan Darat	
		Budidaya Laut	Budidaya Air Payau/Tambak	Budidaya Air Tawar/Kolam
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Sabbangparu	0	0	65,89
2	Tempe	0	0	33,73
3	Pammana	0	0	118,43
4	Bola	43.966,57	3.109,14	52,86
5	Takkalalla	57.156,54	9.158,80	69,48
6	Sajoanging	127.503,05	9.166,40	73,35
7	Penrang	26.379,94	8.914,65	101,26
8	Majauleng	0	0	102,57

No	Kecamatan	Perikanan Laut	Perikanan Darat	
		Budidaya Laut	Budidaya Air Payau/Tambak	Budidaya Air Tawar/Kolam
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9	Tanasitolo	0	0	55,47
10	Belawa	0	0	162,31
11	Maniangpajo	0	0	160,13
12	Gilireng	0	0	29,18
13	Keera	87.933,14	13.645,74	130,8
14	Pitumpanua	96.726,45	24.422,17	96,52
JUMLAH		**439.665,69**	**68.416,90**	**1.251,98**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wajo, 2024

Tabel 2. 331
Produksi Olahan Hasil Perikanan
Tahun 2021-2023

No	Jenis Pengolahan	Tahun (Kg)		
		2021	2022	2023
1	Pelumatan Daging dan Surimi (Bakso, Otak-otak)	181	0	65,89
2	Penggaraman	24.861	28.891,39	48.397,6
3	Olahan lainnya (Abon, Kerupuk, Olahan Rumput Laut, dll)	6.746,89	8.052,964	10.579,4
JUMLAH		**31.788,89**	**36.944,35**	**58.976,9**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wajo, 2024

2. Konsumsi ikan

Komsumsi ikan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan trend peningkatan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat cenderung memilih ikan dibanding daging masyarakat mulai menyadari pentingnya makan ikan (gemar makan ikan). Meningkatnya komsumsi ikan juga dipengaruhi oleh meningkatnya produksi ikan baik dari hasil penangkapan maupun dari hasil budidaya di Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 332
Konsumsi Ikan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	25.405.744	24.578.958,60	24.625.876,18	24.678.595,20	27.115.905,04
2	Target Daerah (Kg)	24.519.030	24.565.637,00	24.609.834,00	24.654.131,00	24.698.509,00

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	**Konsumsi ikan**	**1.04**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.10**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wajo, 2024

3. Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan diperoleh dari jumlah kelompok yang mendapat bantuan dibagi jumlah total kelompok. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dari 57 pada tahun 2018 menjadi 36 kelompok. Menurunnya jumlah kelompok yang diberi bantuan disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk memberikan bantuan kepada kelompok nelayaan. Serta adanya penurunan jumlah kelompok setelah dilakukan pemutahiran data. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 333
Cakupan bina kelompok nelayan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	36	52	57	72	114
2	Jumlah kelompok nelayan	598	672	731	812	829
3	**Cakupan bina kelompok nelayan**	**0.06**	**0.08**	**0.08**	**0.09**	**0.14**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wajo, 2024

4. Produksi perikanan kelompok nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan/pembudidaya terjadi peningkatan setiap tahunnya hal ini berbanding lurus dengan adanya penambahan kelompok tangkap dan kelompok pembudidaya setiap tahunnya yang memberikan kontribusi terhadap total produksi perikanan. Adapun kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019-2023 yakni dari tahun 2019 sebanyak 0,73% menjadi 0,81% di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 334
Produksi perikanan kelompok nelayan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasilkelompok nelayan	394.139,66	419.155,49	419.418,44	453.623,54	426.970,95

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah produksi ikan di daerah	538.020,45	545.172,37	559.224,58	567.029,43	570.182,68
3	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**0.73**	**0.77**	**0.75**	**0.80**	**0.81**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wajo, 2024

5. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) dinyatakan dalam persentase. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan nilai produksi sektor perikanan tangkap. Standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100. NTN >100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.

NTN = 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. NTN <100, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 335
Nilai tukar nelayan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks yang diterima nelayan	10	111	114.42	111	114.42
2	Indeks yang dibayar nelayan	103	103	106.26	103	106.26
3	**Nilai tukar nelayan**	**1.00**	**1.08**	**1.08**	**1.08**	**1.08**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wajo, 2024

2.1.5.4. Layanan Penunjang

2.1.5.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana. rencana pembangunan dalam jangka

panjang jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Pemeritah Daerah Kabupaten Wajo memadukan pendekatan teknokratis demokratis partisipatif politis *bottom up* dan *top down process* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD.

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan Dengan PERDA

Dokumen RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 yang diatur dalam Perda Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 Tentang RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wajo telah berlangsung selama 4 periode waktu RPJMD dan saat ini memasuki tahap terakhir, yang berarti saat ini merupakan proses penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045. Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan dokumen RPJPD di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 336
Ketersediaan Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan

No	Uraian	Ada / Tidak	Nomor Perda
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang RPJPD Kab. Wajo Tahun 2005 – 2025
		Ada	Perda Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 Tentang RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025

Sumber : Bapppelitbangda Kabupaten Wajo. 2024

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran visi misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJPN dan RPJMN. Dokumen RPJMD Kabupaten Wajo untuk pelaksaaan RPJPD Kabupaten Wajo meliputi :

- RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2014 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2009.
- RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2014 – 2019 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014.
- RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2024 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019.
- Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2024 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021.
- RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan dokumen RPJMD dan RPD di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 337
Ketersediaan Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan

1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA		**Ada**
		.	Perda No. 11 Tahun 2009 Tentang RPJMD Kab. Wajo Tahun 2009 – 2014
		.	Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kab. Wajo Tahun 2014 – 2019
		.	Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan RPJMD Kab. Wajo Tahun 2014 – 2019
		.	Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kab. Wajo Tahun 2019 – 2024
		.	Perda No. 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kab. Wajo Tahun 2019 – 2024
		.	Perbup No. 5 Tahun 2024 Tentang RPD Kab. Wajo Tahun 2025 – 2026

Sumber : Bapppelitbangda Kabupaten Wajo. 2024

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Penjabaran visi dan misi dalam dokumen RPJMD dituangkan dalam RKPD yang merupakan dokumen tahunan yang mana sejak tahun 2008 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo meliputi :

1. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2018.
2. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2020 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 117 Tahun 2019.
3. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2021 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2020.
4. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2022 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 39 Tahun 2023.
5. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 39 Tahun 2022.
6. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan dokumen RKPD di Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 338
Ketersediaan Dokumen RPKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2019-2023

1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	**Ada**
		- Perbup No. 117 Tahun 2019 Tentang RKPD Tahun 2020
		- Perbup No. 81 Tahun 2020 Tentang RKPD Tahun 2021
		- Perbup No. 113 Tahun 2021 Tentang RKPD Tahun 2022
		- Perbup No. 39 Tahun 2022 Tentang RKPD Tahun 2023
		- Perbup No. 39 Tahun 2023 Tentang RKPD Tahun 2022
		- Perbup No. 53 Tahun 2024 Tentang RKPD Tahun 2023

Sumber : Bapppelitbangda Kabupaten Wajo. 2024

4. Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Pada Tahun 2012 oleh Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kab. Wajo disusunlan Dokumen RTRW Kab. Wajo dan ditetapkan dengan PERDA Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana

Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032. Kemudian tahun 2023 Bappelitbangda, Dinas Perkim menyusun RTRW Kabupaten Wajo tahun 2023-2042.

Tabel 2. 339
Ketersediaan Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

No	Uraian	Ada / Tidak	Nomor Perda
1	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Perda Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2009-2032
2		Ada	Perda Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Sumber : Bapppelitbangda Kabupaten Wajo. 2024

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Wajo pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 73%, hal ini disebabkan dengan penyesuain terhadap prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Kemudian tahun 2021 meningkat tajam menjadi 99%, ini menandakan Renja OPD telah memperhatikan tujuan dan prioritas pembangunan daerah. Namun tahun 2022 menurun menjadi 75% disebabkan adanya perubahan regulasi terkait pemutakhiran nomenklatur program dan kegiatan serta dengan terbitnya regulasi tentang penggunaan sub kegiatan. Kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 340
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Tahun 2019 s.d 2023

No	Tahun	Uraian		
		Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	Jumlah Program RPJMD yg harus dilaksanakan Tahun Berkenaan	Persentase Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD
1	2019	229	314	73
2	2020	229	314	73

3	2021	322	324	99
4	2022	206	274	75
5	2023	211	211	100

Sumber : Bapppelitbangda Kabupaten Wajo. 2024

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD

Penjabaran program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Wajo pada tahun 2019 sebesar 74%. Tahun 2020 meningkat cukup tajam menjadi 90% dan di tahun 2021 menjadi 99%, demikian pula di tahun 2022. Hal ini menandakan sinkronisasi antara pendanaan dan perencanaan semakin baik. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 341
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Tahun 2019 s.d 2023

No	Tahun	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	Jumlah Program APBD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD
1	2019	231	314	74
2	2020	322	291	90
3	2021	206	204	99
4	2022	206	204	99
5	2023	211	211	100

Sumber : Bapppelitbangda Kabupaten Wajo. 2024

7. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Saat ini kesesuaian dengan RTRW kabupaten masih rendah diindikasikan dengan telah dilaksanakannya beberapa program / kegiatan pebangunan terhadap pola dan struktur ruang pembangunan pada program utama RTRW Kabupaten. Kesesuaian realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW sebesar 80 pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dan meningkat menjadi 82 di tahun 2020 dan stagnan hingga tahun 2021. Adanya kondisi lingkungan yang sudah kurang sesuai dengan peruntukan RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032 beserta Perdanya sehingga perlu dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 342
Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023

1	Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	80	80	80	80	80
2	Dokumen RTRW	1	1	1	1	1
3	**Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW**	**80**	**82**	**82**	**82**	**82**

Sumber : Bapppelitbangda Kabupaten Wajo. 2024

2.1.5.4.2. Bidang Urusan Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Tabel 2. 343
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Sementara pemeriksaan

Sumber : BPKPD Kab. Wajo Tahun 2024

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kabupaten Wajo telah 9 kali mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK dan untuk opini Laporan Keuangan Tahun 2023 akan dilaksanakan pada tahun 2022 jadi belum bisa memperlihatkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023. Diharapkan tahun berikutnya Kabupaten Wajo dapat mempertahankan opini BPK terhadap Laporan Keuangan yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

2. Persentase SILPA

Selisih antara Surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan Netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol artinya bahwa Penerimaan pembiayaan harus dapat menutupi deficit anggaran yang terjadi. Munculnya SILPA terjadi karena serapan Anggaran di OPD yang masih minim sehingga terdapat realiasasi Pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. Selain itu terjadinya SILPA juga karena adanya

kegiatan atau program Pemerintah yang belum terselesaikan serta adanya Pembatalan Proyek yang hendak dilaksanakan. Solusi untuk menekan SILPA yaitu mengotimalkan Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari tabel terlihat bahwa SiLPA Kabupaten Wajo tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebesar 0.08%. Kemudian terlihat bahwa SiLPA Kabupaten Wajo tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 2,66%.

Tabel 2. 344

Persentase SILPA Kab. Wajo Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total SILPA	25.571.333.441.86	36.951.951.812.20	84.072.364.025.40	120.163.293.402,72	118.941.838.827,87
2	Total APBD	1.575.433.188.853.20	1.439.278.513.045.14	1.593.623.204.604.00	1.515.882.130.155,76	1.619.862.275.645,00
3	**Persentase SILPA**	**1.62**	**2.51**	**0.05**	**0.08**	**7.34**

Sumber : BPKPD Kab. Wajo Tahun 2024

3. Persentase SILPA Terhadap APBD

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar maka SILPAnya adalah Rp0 namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif) yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayan Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program.program pembangunan di daerah. Pengalokasian tersebut dapat terlihat pada tabel 2.345.

4. Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Dalam rangka pembangunan daerah. maka seluruh OPD yang ada melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Wajo. Pada tahun 2021 dari 1425 program/kegiatan yang tersebar di 41 OPD yang ada di Kabupaten Wajo terdapat 32 program/kegiatan yang tidak dilaksanakan, dimana tersebar di beberapa OPD termasuk Kecamatan. Diharapkan ke depannya agar para kepala OPD lebih memperhatikan program dan kegiatan di masing.masing OPDnya agar tidak ada lagi program/kegiatan OPD yang tidak terlaksana. Adapun persentase program yang tidak terlaksana dapat dilihat pada tabel 2.346.

Tabel 2. 345
Persentase SILPA Terhadap APBD Kab. Wajo
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total SILPA	25.571.333.441.86	36.951.951.812.20	84.072.364.025.40	120.163.293.402,72	118.941.838.827,87
2	Total APBD	1.575.433.188.853.20	1.439.278.513.045.14	1.593.623.204.604.00	1.515.882.130.155,76	1.619.862.275.645,00
3	**Persentase SILPA**	**1.62**	**2.57**	**5.28**	**7.93**	**7.34**

Sumber : BPKPD Kab. Wajo Tahun 2024

Tabel 2. 346
Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	18	7	32	0	108
2	Total Program dalam APBD	754	405	1425	213	368
3	**Persentase program yang tidak terlaksana**	**2.39**	**1.73**	**2.25**	**0,00**	**29.35**

Sumber : BPKPD Kab. Wajo Tahun 2024

5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Untuk menunjang Sistem Pendidikan di Indonesia maka Pemerintah Pusat bersama dengan DPR RI mengeluarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Alokasi Anggaran fungsi Pendidikan dimaksud disesuaikan dengan Program Prioritas bidang Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Pendidikan sekurang kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Belanja Daerah dari table di atas sudah di gambarkan progres dari tahun ke tahun mengalami Peningkatan karena jumlah Belanja tiap Tahun meningkat sehingga mempengaruhi jumlah alokasi anggaran Pendidikan untuk di alokasikan. Belanja Pendidikan adalah salah satu mandatory spending yang alokasinya sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Dari tabel berikut dapat terlihat realisasi belanja Pendidikan di Kabupaten Wajo tahun 2023 sebesar 17.21% dari total APBD, dimana terdapat penurunan realisasi belanja Pendidikan di Kabupaten Wajo sebesar 2,74% dari tahun 2021.

6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Dalam rangka Peningkatan Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total Belanja APBD diluar Gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan keuangan daerah agar dilaksanakan secara bertahap. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD.

Sama halnya dengan belanja Pendidikan, belanja Kesehatan juga merupakan salah satu mandatory spending dimana besar anggaran

kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Dari tabel berikut terlihat bahwa realisasi belanja Kesehatan di Kabupaten Wajo tahun 2023 sebesar 21.15%, atau sudah memenuhi mandatory spending, dan terjadi kenaikan sebesar 3.29 % dari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 347
Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Wajo
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	321.835.699.750.00	326.936.958.390.00	318.003.213.582.00	321.984.756.554,00	278.817.329.175,00
2	Total APBD	1.575.433.188.853.20	1.473.790.469.753.89	1.593.623.204.604.00	1.515.882.130.115,76	1.619.862.275.645,00
3	**Persentase belanja pendidikan (20%)**	**20.43**	**22.18**	**19.95**	**21,24**	**17.21**

Sumber : BPKPD Kab. Wajo Tahun 2024

Tabel 2. 348
Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Wajo
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	233.179.860.840.51	219.530.308.361.75	284.614.269.986	288.565.518.022,65	342.608.316.729,00
2	Total APBD	1.575.433.188.853.20	1.473.790.469.7538.99	1.593.623.204.604.00	1.515.882.130.115,76	1.619.862.275.645,00
3	**Persentase belanja kesehatan (10%)**	**14.80**	**14.90**	**17.86**	**19.04**	**21,15**

Sumber : BPKPD Kab. Wajo Tahun 2024

7. Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Dalam rangka Peningkatan Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total Belanja APBD diluar Gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan keuangan daerah agar dilaksanakan secara bertahap. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang kurangnya 10% (sepuluh persen) dari Belanja APBD di luar Gaji di gambarkan pada tabel 2.315 tentang progres dari tahun ke tahun mengalami Peningkatan karena jumlah Belanja tiap Tahun meningkat sehingga mempengaruhi jumlah alokasi anggaran kesehatan untuk di alokasikan.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan mengunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulam tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi. dana. atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersbut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegitan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang tediri dari : Belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial.

Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Dari tabel 2.349 dan tabel 2.350 dapat terlihat bahwa belanja tidak langsung masih lebih tinggi persentasenya dibandingkan belanja langsung tahun 2022 di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 349
Persentase Belanja Langsung Kabupaten Wajo Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Langsung	710.285.184.222.50	549.941.510.994.80	615.301.005.723	347.787.722.166,63	609.942.966.632,60
2	Total APBD	1.575.433.188.853.20	1.473.790.469.753.89	1.527.433.597.888.82	1.515.882.130.115,76	1.619.862.275.645,00
3	**Persentase belanja langsung dari total APBD**	**45.09**	**37.31**	**40.28**	**22.94**	**37.65%**

Sumber : BPKAD Kab. Wajo Tahun 2024

Tabel 2. 350
Persentase Belanja Tidak Langsung Kabupaten Wajo
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja tidak Langsung	839.273.499.348.05	805.737.348.168.00	850.358.529.394.00	594.066.228.902,00	833.643.893.719
2	Total APBD	1.575.433.188.853.20	1.473.790.469.753.89	1.593.623.204.604.00	1.515.882.130.115,76	1.619.862.275.645,00
3	**Persentase belanja tidak langsung dari total APBD**	**53.27**	**54.67**	**53.36**	**39.19**	**51.46**

Sumber : BPKAD Kab. Wajo Tahun 2024

8. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Pemerintah Desa mendapatkan dua Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Kabupaten Wajo, yaitu Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah sedangkan Bagi Hasil Retribusi Daerah, adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah setelah dikurangi penerimaan retribusi daerah yang penggunaannya dibatasi/ditentukan.

Dari tabel dapat terlihat bahwa terjadi penurunan persentase belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa di kabupaten Wajo tahun 2023 yakni sebesar 0,01%. Diharapkan pemerintah desa dapat mengoptimalkan dana yang diberikan dalam pembangunan di desanya masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel 2.323.

9. Penetapan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penetapan APBD Kabupaten Wajo Tahun 2023 tepat waktu dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023 dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel 2.351 dan tabel 2. 352.

Tabel 2. 351
Bagi Hasil Kabupaten / Kota Kabupaten Wajo
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	4.694.043.593.05	5.217.519.054.00	4.673.842.335.00	5.675.233.300	5.910.978.400
2	Total APBD	1.572.796.056.556.47	1.473.790.469.753.89	1.593.623.204.604.00	1.515.882.130.115,76	1.619.862.275.645
3	**Bagi hasil kabupaten/kota dan desa**	**0.30%**	**0.35%**	**0.29%**	**0.37%**	**0,36%**

Sumber : BPKPD Kab. Wajo Tahun 2024

Tabel 2. 352
Penetapan APBD Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Penetapan APBD**	Tgl. Penetapan /31 Des 2018	Tgl. Penetapan /31 Des 2019	Tgl. Penetapan /30 Des 2020	Tgl. Penetapan /30 Des 2021	Tgl. Penetapan /30 Des 2022
		Tepat Waktu	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**

Sumber : BPKPD Kab. Wajo Tahun 2024

2.1.5.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah penciptaan suatu lingkungan dimana pegawai dapat meningkatkan keterampilan, penetahuan dan sikap untuk membantu organisasi mencapai sasaran.

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah waktu pendidikan dan pelatihan yang telah terselenggara yang dihitung sebagai jam pelajaran (JP) pada tahun berjalan dibagi dengan total jumlah ASN Kabupaten Wajo. Target pada Renstra di tahun 2022 adalah 6,61% dan yang terealisasi adalah 5,57%. Persentase rata–rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan karena pada tahun 2022 ini kurang tersedianya lembaga pelatihan yang memberikan ruang kepada para ASN lingkup Pemkab Wajo untuk berpartisipasi. Ruang dimaksud adalah ketersediaan kelas pelatihan (baik klasikal maupun non klasikal) serta ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh penyelenggara. Karena beberapa tahun terakhir ini kemampuan Pemkab Wajo mengalokasikan anggaran pada kegiatan pengembangan kompetensi ASN sangat terbatas, sehingga harapan besar untuk memenuhi target rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan sangat bergantung kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pelatihan yang tidak menuntut adanya kontribusi dari peserta.

Tabel 2. 353
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Wajo Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (%)	**0.46**	**2.95**	**4.88**	**5.57**	**1.09**

Sumber : BKPSDM Kab. Wajo 2024

2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan yang lebih baik melalui jalur sekolah secara berjenjang dengan struktur dan kurikulum yang jelas. Efek pendidikan dan pelatihan terhadap pembangunan adalah bahwa secara nyata pendidikan dan pelatihan itu merupakan kegiatan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang bertujuan

untuk menghilangkan GAP atau perbedaan antara kemampuan yang sekarang dimiliki dengan kemampuan standar yang ditetapkan. Pada saat pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat formal maupun non formal akan menambah kecakapan dalam diri yang bersangkutan sehingga diharapkan kinerja yang dicapai dapat lebih maksimal.

Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal ditambah jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal dibagi jumlah seluruh ASN Kabupaten Wajo. Target pada Renstra di tahun 2022 adalah 14,39% dan yang terealisasi adalah 18,63%. Indikator ini berdasarkan pada jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang digunakan pada tata naskah kepegawaian. Hal ini merupakan salah satu kegiatan pengembangan kompetensi bagi ASN dalam upaya memenuhi standar kompetensi jabatan yang diembannya. Terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun disebabkan rata – rata pendidikan formal yang diikuti oleh para PNS adalah status izin belajar, artinya mereka mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri (tergantung kemampuan PNS yang bersangkutan). Untuk indikator pelatihan formal, juga terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun disebabkan karena penganggaran untuk kegiatan pelatihan yang terbatas sehingga salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan kompetensi ASN adalah mengikut sertakan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Berikut merupakan data ter*update.*

Tabel 2. 354
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Wajo Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal (orang)	180	63	151	204	165
2	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal (orang)	173	141	719	531	858
3	Jumlah ASN (orang)	6.137	6.271	5.972	5.748	5.492
4	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**	**575%**	**3.25%**	**14.57%**	**12.79%**	**18.63%**

Sumber : BKPSDM Kab. Wajo 2023

3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pendidikan dan pelatihan struktural adalah pelatihan yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap

serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jabatan struktural.

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dibagi jumlah total jabatan. Pada tahun 2021 ada lima orang perjabat struktural mengikuti diklat struktural, Namun pada tahun 2022 tidak adanya pejabat struktural yang diikutkan dalam kegiatan diklat struktural disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dialokasi pada DPA BKPSDM Kab. Wajo (alokasi anggaran yang tersedia difokuskan pada kegiatan yang menjadi lebih prioritas). Kemudian Tahun 2023 terdapat 22,29% pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Kondisi ini belum masuk dalam tataran kondisi ideal yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yang paling krusial adalah keterbatasan anggaran yang dialokasi pada DPA BKPSDM Kab. Wajo (alokasi anggaran yang tersedia difokuskan pada kegiatan yang menjadi lebih prioritas). Meskipun pada dasarnya kita masih membutuhkan semua pejabat struktural untuk mengikuti diklat struktural untuk menambah wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap serta perilaku kepemimpinan aparatur. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan anggaran untuk mengikuti diklat struktural.

Tabel 2. 355
Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Wajo
Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	0	0	5	0	152
2	Jumlah Total Jabatan	1.072	935	719	719	682
3	**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**	**0.00%**	**0.00%**	**0.69%**	**0.00%**	**22.29%**

Sumber : BKPSDM Kab. Wajo 2024

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaiaman telah diubah dengan peraturan atas peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Target Tahun 2022 adalah sebanyak 31 orang dan yang terealisasi adalah 31

orang dengan uraian sebagai berikut. Eselon II.a = 1 Orang dan Eselon II.b = 30 Orang.

Tabel 2. 356
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada intansi pemerintahan	**43**	**31**	**30**	**31**	**31**

Sumber : BKPSDM Kab. Wajo 2024

5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Wajo, pada tahun 2020 mengalami perubahan struktur organisasi tata laksana satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo. Pada tahun 2021 juga mengalami perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja. Sehingga jumlah jabatan administrasi pada tahun 2022 yang ada sebanyak 4.854. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 5.105.

Tabel 2. 357
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2.734	6.276	1.913	4.854	5.105

Sumber : BKPSDM Kab. Wajo 2024

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah jabatan fungsional, pada instansi pemerintah Kabupaten Wajo mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena adanya pengalihan status dari jabatan pengawas (setingkat Eselon IV) menjadi jabatan fungsional, dimana pada tahun 2022 jumlah pemangku jabatan fungsional sebanyak 3.372 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 3.656 orang.

Tabel 2. 358
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.554	3.448	3.656	3.448	3.412

Sumber : BKPSDM Kab. Wajo 2024

2.1.5.4.4. Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan grafik yang menurun pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 sebanyak 3, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 6 jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti.

Adapun jumlah kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 7 dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 5 jumlah kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah. Namun persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 persentase kelitbangan sebanyak 100% sedangkan pada tahun 2022 menurun sebesar 86%. Untuk itu meskipun persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mengalami penurunan sebesar 86% namun masih dalam kategori Sangat Baik, sehingga untuk tahun selanjutnya dapat meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan. Tahun 2023 meningkat menjadi 100%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 35919
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	0	5	3	6	2
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	0	5	3	7	2
3	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.**	**0%**	**100%**	**100%**	**86%**	**100%**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi pada tahun 2019 dan 2020 berjumlah 0 sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 6 OPD dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 3 OPD, dari jumlah total perangkat daerah pada tahun 2019 hingga tahun 2022 sebanyak 27 OPD. Adapun persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah pada tahun 2021 sebanyak 22% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 11%. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah pada tahun 2022 sebesar 11% atau kategori Buruk. Hal tersebut mengalami penurunan dalam fasilitasi

penerapan inovasi daerah pada OPD untuk itu masih perlu meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi daerah pada OPD dengan cara memberikan treartment kepada OPD yang ada di Kabupaten Wajo serta menganggarkan kembali kegiatan tersebut. Namun di tahun 2023 meningkat menjadi 19%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 360
Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	0	0	6	3	5
2	Jumlah total perangkat daerah	27	27	27	27	27
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	**0%**	**0%**	**22%**	**11%**	**19%**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 sebanyak 0 inovasi sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 1 inovasi serta mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 15 inovasi, adapun jumlah inovasi yang diusulkan pada tahun 2019 sebanyak 0 inovasi sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6 inovasi dan pada tahun 2021 sebanyak 12 inovasi serta pada tahun 2022 sebanyak 15 inovasi. Adapun persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah pada 2019 sebesar 0% sementara pada tahun 2020 sebesar 17% dan pada tahun 2021 sebesar 8% serta pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 100%.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah sebesar 100% atau kategori sangat baik. Hal tersebut mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2020 hingga pada tahun 2022 peningkatannya sangat signifikan, sehingga untuk tahun selanjutnya dapat dipertahankan atau ditingkatkan. serta dapat meningkatkan kualitas keluaran kelitbangan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 361
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	0	1	1	15	16
2	Jumlah inovasi yang diusulkan	0	6	12	15	16

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	**0%**	**17%**	**8%**	**100%**	**100%**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.4.5. Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Penurunan capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan antara lain kurangnya respon dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan adanya beberapa pejabat yang mutasi/pensiun/meninggal dan adanya rekanan yang terkait dengan temuan sulit ditelusuri lagi keberadaannya. Adapun anomali data sejak tahun 2018, persentase tindak lanjut temuan lebih rendah dibanding capaian tahun.tahun sebelumnya disebabkan karena adanya peningkatan anggaran untuk kegiatan pengawasan yang berarti meningkatnya jumlah tim objek pemeriksaan serta jenis pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Kondisi tersebut belum berbanding lurus dengan kapasitas dan kapabilitas tim pelaksana tindak lanjut yang disiapkan.

Oleh karena itu sebagai tidak lanjut atas ketidaktercapain kinerja IKK ini sejak tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas tim tindak lanjut dan mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Upaya ini menunjukkan hasil yang signifikan pada tahun 2021 dengan capaian 92.27%. Selain itu kegiatan-kegiatan pendukung ketercapaian IKK Persentase Tindak Lanjut Temuan ini antara lain Kegiatan Gelar Pengawasan Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) pada Tahun 2022 terus dilaksanakan sehingga mendukung tercapainya kondisi Persentase Tindak Lanjut sebesar 86.32%.

Tabel 2. 362
Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan yang tindak lanjuti	667	602	836	833	
2	jumlah total temuan	769	708	906	965	

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	persentase tindak lanjut temuan	86.74	89.00	92.27	86.32	18

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Wajo. Tahun 2024

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Disiplin Pegawai Negei Sipil merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menanti kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Peundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan PP Tahun 2010 dalam rangka mewujudkan PNS yang handal profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah bersikap disiplin jujur, adil, transparan, akuntabel dalam melaksanakan tugas. Hukuman disiplin terdiri atas : Hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : terguran lisan teguran tertulis pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah pembebasan dari jabatan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Penjantuhan hukuman disiplin dimaksud untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah ASN yang direkomendasikan mendapatkan sanksi disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Kab. Wajo. Persentase pelanggaran mengalami penurunan sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan karena laporan yang diadukan oleh Kepala SKPD masing-masing ASN yang tidak menaati aturan jam kerja dan mendapatkan sanksi hukuman disiplin dengan ketentuan yang berlaku. Dampak dari sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin tersebut

dapat meningkatkan kesadaran ASN dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin ASN.

Tabel 2. 363
Persentase pelanggaran pegawai Tahun 2019-2023

No	Uraiann	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	4	6	5	7	
2	Jumlah total ASN	6.206	5.972	5,748	5.642	
3	**Persentase pelanggaran pegawai**	**0.06%**	**0.10%**	**0.08%**	**0.12%**	**0.67%**

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Wajo. Tahun 2024

3. Jumlah Temuan BPK

Ketercapaian indikator ini adalah hasil kerjasama Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo berperan dalam mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikator Jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang telah ditindaklanjuti dibandingan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Keberhasilan IKK Jumlah temuan BPK dalam mencapai target kinerjanya tidak lepas dari kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo melalui kegiatan.kegiatan pengawasan seperti Audit Kinerja Audit Operasional Reviu perencanaan dan penganggaran monitoring serta berbagai kegiatan evaluasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Tabel 2. 364
Jumlah temuan BPK

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan BPK	43	18	74	23	32

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Wajo. Tahun 2024

2.1.5.4.6. Sekretariat Dewan

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat.Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota dimana DPRD Kabupaten Wajo telah

membentuk Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagai perintah Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas dimana dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a bahwa Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan singkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana alat kelengkapan DPRD selanjutnya dalam pasal 107 menentukan bahwa rencana kerja DPRD yang bersumber dari rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dimana Rencana Kerja DPRD tersebut dalam bentuk Program dan Kegiatan yang kemudian Sekretaris DPRD sebagai melakukan Penyelerasan. Penyelarasan dimaksudkan dalam hal ini dimana Sekretariat DPRD memfasilitasi pembagian fungsi dari rencana kerja DPRD. Setiap tahunnya Alat kelengkapan DPRD, diantaranya Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Anggaran menyusun Rencana Kerja Tahunan atas permintaan Pimpinan DPRD dalam bentuk Program dan daftar Kegiatan, yang menguraikan Penyelenggaraan fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Pengawasan dan fungsi Penganggaran Pada Setiap Alat kelengkapan Sesuai dengan Bidang Tugas masing-masing Alat Kelengkapan, Rencana masing-masing Alat kelengkapan tersebut oleh Pimpinan DPRD ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah DPRD dalam kerangka pengkoordinasian dan singkronisasi untuk merumuskan Rencana Kerja Tahunan DPRD yang disusun dan ditetapkan Paling Lambat Bulan September tahun berjalan sebagaimana ketentuan dalam pasal 107 Peraturan DPRD Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2019, rencana Kerja DPRD yang telah dibahas dan ditetapkan dalam Paripurna menjadi Pedoman Bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Dokumen Rencana dan Anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

Tabel 2. 365
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. 2024

2. Tersusun dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Program–Program kerja DPRD Dalam pelaksanaan Fungsi DPRD pada tahun 2020 pada perinsipnya telah tersusun dan terintegrasi Dalam Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan hal didasari bahwa **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD** dalam implementasi pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilakukan dengan adanya Program DPRD dalam melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran adanya Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Setiap Tahun Anggaran yang disampaikan dalam Rapat Paripurna yang menjadi bahan dan pedoman bagi Bupati dalam Penyusunan Rencanan Pembangunan Daerah Penyusunan APBD dan Rencana Strategis Bupati lainnya sesuai degan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Penjaringan Aspirasi serta tindak Lanjut aspirasi Anggota pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksananya dalam bentuk Peraturan Bupati.

Dari aspek program DPRD dalam **fungsi Penganggaran** hal ini telah terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD dimana setiap tahunnya disetujui bersama antara DPRD dan Bupati terdahap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penetapan terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi peraturan Daerah tidak melebihi ketentuan waktu penetapan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak pernah mendapatkan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap keterlambatan Penetapan APBD. Pada perinsipnya Program Kerja DPRD dalam menjalankan fungsinya harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah maupun Rencana Pembangunan Daerah hal didasari oleh Undang.Undang 23 tahun 2014 dimana menyatakan secara ekplisit bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk menjalankan Fungsi Pengawasan Anggaran dan Pembentukan Perda.

Tabel 2. 366
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Tersusun** dan **terintegrasinya** Program.Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. 2024

Rencana kerja DPRD yang berisi Program dan daftar Kegiatan yang dibahas dan Ditetapakan melalui Paripurna DPRD Kabupaten Wajo merupakan Rencana Kerja yang mencerminkan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran DPRD yang selaras dengan target Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah dan RKPD.

3. Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dalam kondisi tersebut tahun 2020 korelasi antara Dokumen Perencanaan setwan dalam bentuk Renja dan Dokumen Anggaran Setwan pada perinsipnya telah terintegrasi dengan progran–program DPRD Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang menerangkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah oleh Karena ini dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen Anggaran Setwan harus berpedoman dengan Program Kerja DPRD sehingga pelaksanaan terhadap Fungsi DPRD yang kerkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat tercapai maksimal. Seiring Perkembangan perubahan Regulasi yang mengatur khusus untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaima diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Kabupaten dan Kota yang megatur secara eksplisit bahwa dalam melaksanana tugas dan fungsi DPRD maka DPRD pada awal masa jabatannya membentuk rencana Kerja 5 (lima) tahun dan untuk setiap tahunnya membentuk Rencana Kerja 1 (satu) tahun yang ditetapkan paling lambat bulan September tahun berjalan yang kemudian menjadi dasar bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Penyusunan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD untuk tahun perencanaan sehingga dipastikan bahwa terintegrasinya program.program kerja DPRD dalam menjalankan fungsi Pengawasan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pembentukan Perda dengan Rencana Kerja dan Dokumen Anggaran Setwan untuk tahun tahun mendatang merupakan sebuah keniscayaan sehingga dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas DPRD tidak lagi menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Tabel 2. 367
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. 2024

Program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang tertuang dalam rencana kerja DPRD 1 (satu) tahun anggaran yang diseleraskan oleh Sekretariat DPRD dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memberikan layanana administrasi dan supporting system terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik dalam pelaksanaan rapat-rapat DPRD, penyerapan aspirasi dan pelaksanaan perjalanan dinas.

2.1.6. Aspek Daya Saing Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio

atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi minuman tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan sandang biaya kesehatan.

Tabel 2. 368
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita *(Miliar Rupiah)*	12,470.90	12,494.90	13,623.87	15,021.26	16,021.75

Sumber : BPS Kabupaten Wajo Tahun 2024

2. Pengeluaran Perkapita/Tahun

Pengeluaran per kapita adalah jumlah pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk suatu perekonomian. Pengeluaran per kapita dapat dinyatakan dalam bentuk riil atau nominal. Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang merepresentasikan dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (daya beli) menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Berikut data pengeluaran per kapita Kabupaten Wajo dalam rentang 5 tahun ini.

Tabel 2. 369
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Per kapita	12.399	12.386	12.505	12.729	13.192

Sumber : BPS Kabupaten Wajo Tahun 2024

3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses

produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Tahun 2021. Tahun 2022, NTP pada umumnya mengalami penurunan yaitu sebesar -1,27 persen. Hal ini disebabkan kenaikan indeks yang diterima petani (It) lebih besar dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (Ib). It mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen. Namun berdasarkan subsektor kenaikan NTP terutama disebabkan oleh meningkatnya NTP pada semua Subsektor kecuali subsektor Tanaman Pangan yang mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 370
Nilai Tukar Petani Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks yang diterima petani (lt)	138.74	102.79	113.9	114.13	132.21
2	Indeks yang dibayar petani (lb)	134.63	105.37	107.96	112.86	115.71
3	**Nilai Tukar Petani**	**103.05**	**97.55**	**105.50**	**101.13**	**114.26**

Sumber : BPS Kab. Wajo Tahun 2024

4. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas diartikan sebagai output produk berupa barang atau jasa untuk setiap input atau faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi. Produktivitas ditujukan untuk melihat efisiensi produksi dengan membandingkan input yang digunakan untuk memproduksi output. Faktor input merupakan ukuran unit-unit sumber daya, yang dapat berupa sumber material atau bahan baku, tenaga kerja, mesin-mesin, serta sumber daya pikiran otak manusia. Sedangkan pengukuran produktivitas adalah penilain kuantitatif atas perubahan produktivitas. Untuk Kabupaten Wajo, Produktivitas Total Daerah sepanjang kurun waktu 5 Tahun bergerak dinamis, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 371
Produktivitas Total Daerah Tahun 2019 – 2023

No	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHK	12,858.45	12,708.31	13,569.28	13,891.79	14,090.79
2	Jumlah Angkatan Kerja	190.085	213.037	210.131	200.275	199.077
Produktivitas Total Daerah (juta/jiwa)		**67.646**	**59.653**	**64.575**	**69.364**	**70.781**

Sumber : BPS Kab.Wajo. tahun 2024 (Diolah)

5. Persentase Desa Berstatus Swawembada Terhadap Total Desa

Desa swasembada adalah desa dimana kehidupan waga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi pekerjan yang beragam dan pola berpikir yang udah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah berbagai jenis desa dari sisi perkembangnnya.

Tabel 2. 372
Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Keluarahan Swasembada	4	4	4	0	0
2	Jumlah Desa/Kelurahan	190	190	190	190	190
3	**Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa**	**210.5**	**210.5**	**210.5**	**0**	**0**

Sumber : DPMPDK Kabupaten Wajo 2024

6. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)

Kondisi dan potensi ekonomi pada setiap daerah merupakan modal dasar dan faktor utama dalam penentuan strategis kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengetahui potensi pertumbuhan pada setiap sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo, serta melihat tingkat daya saing pada setiap sektor tersebut guna mengetahui kedepannya sektor basis mana yang memiliki daya saing yang kuat sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah pada Kabupaten Wajo. Keterbukaan ekonomi adalah total

perdagangan (RasioEkspor + Impor) terhadap PDB. Derajat kebutuhan ekonomi yang merupakan rasio perdagangan terhadap PDRB ini sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan terbuka antar negara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut jika salah satu negara tidak memaksakan untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisi neraca perdagangan bagi mitra dagangnya.

Kondisi dan potensi ekonomi pada setiap daerah merupakan modal dasar dan faktor utama dalam penentuan strategis kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengetahui potensi pertumbuhan pada setiap sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo, serta melihat tingkat daya saing pada setiap sektor tersebut guna mengetahui kedepannya sektor basis mana yang memiliki daya saing yang kuat sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah pada Kabupaten Wajo. keterbukaan ekonomi adalah total perdagangan (RasioEkspor + Impor) terhadap PDB. Derajat kebutuhan ekonomi yang merupakan rasio perdagangan terhadap PDRB ini sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan terbuka antar negara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut jika salah satu negara tidak memaksakan untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisi neraca perdagangan bagi mitra dagangnya. Pada tabel berikut, jumlah Ekspor dan Impor barang dan jasa pada tahun 2021 sebanyak 18.427,11 dengan rasio 0,83% tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 470.620,88 atau 19,32 % dan tahun 2023 jumlah ekspor dan impor mengalami penurunan -280,22 atau -0,01%. Hal tersebut salah satu penyebab terjadinya penurunan karena disebabkan siklus atau situsional saja.

Tabel 2. 373
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB
Kabupaten Wajo Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa	149.402.77	16.706.290.87	18.427,11	470.620.88	-280,22
2	PDRB	8.280.575.80	19.773.157.51	22.319,78	24.352.78	24.588,57
3	**Rasio Ekspor dan Import terhadap PDRB**	**0.02**	**0.84**	**0.83**	**19.32**	**-0,01**

Sumber : Dinas Perindagkop Kabupaten Wajo. Tahun 2024

7. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15.64 tahun (disebut dengan angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase Rasio ketergantungan suatu daerah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sementara di Kabupaten Wajo data rasio ketergantungan dalam kurun waktu berfluktuasi namun tidak signifikan. Dari tahun 2019 rasio ketergantungan sebesar 44,85% yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Di tahun 2020 menurun menjadi 44,43% dan tahun 2021 menurun kembali menjadi 43,02%, demikian pula di tahun 2022 menjadi 41,35%. Namun di tahun 2023 meningkat menjadi 43,22% Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 374
Rasio Ketergantungan Kabupaten Wajo
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Uraian		
		Penduduk Usia <15 thn + >64 thn	Penduduk Usia 15-64 thn	Rasio Ketergantungan
1	2019	123.177	274.637	44,85
2	2020	116.612	262.467	44,43
3	2021	112.917	262.467	43.02
4	2022	109.296	264.316	41.35
5	2023	119.931	277.513	43.22

Sumber : BPS Tahun 2024 (Diolah)

2.2. Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Wajo Tahun 2024

Tabel 2. 375
Target dan Capaian IKU Bupati Kabupaten Wajo

Perubahan RPJMD Pokok Tahun 2019-2024							
No	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Tahun 2023**			**Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
				Target	**Realisasi**	**Tingkat Capaian (%)**	
Tujuan 1	**Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintahan daerah termasuk pemerintah desa**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka / Predikat**	**(60,51-61,00) / B**	**65.06/B**	**100**	**(60.03.60.50) / B**
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas. kapabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai / Predikat SAKIP kabupaten	Angka / Predikat	(65,01-70,10) / BB	62.99 / B	96.39%	(65,01-70,10) / BB
		Indeks Pelayanan Publik	Angka / Predikat	(3,01-3,30) / B-	2.67 / C	95,02	(3,01-3,30) / B-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	65	78.162	100%	65
		Skor Kinerja Penyelengga raan Pemerintahan Daerah	Angka / Predikat	(3,41-3,65) / Tinggi	0	0	(3,41-3,65) / Tinggi
		Indek Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	(2,31-2,60)	2.67	108%	(2,31-2,60)
Sasaran 2	Meningkat nya Dimensi Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Angka	(0,693-0,695)	0.697	101%	(0,693-0,695)

Perubahan RPJMD Pokok Tahun 2019-2024							
No	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Tahun 2023**			**Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
				Target	**Realisasi**	**Tingkat Capaian (%)**	
Tujuan 2	**Meningkatnya kualitas hidup manusia dan kehidupan manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**69,64**	**70.26**	**100.67**	**69,64**
Sasaran 3	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	(59,27-59,36)	7.16	12.08	(59,27-59,36)
Sasaran 4	Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	(73,11-73,40)	73.57	101	(73,11-73,40)
Sasaran 5	Meningkat nya daya beli masyarakat	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	(12.498-12.555)	12.729	101	(12.498-12.555)
Sasaran 6	Meningkat kan pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdaya an Gender (IDG)	Persentase	61,68	57.90	96	61,68
Sasaran 7	Terpelihara nya kualitas berbangsa. bernegara dan beragama	Indeks Ketentraman. Ketertiban dan Kerukunan	Angka	(1,96-2,00)	2,01	102.6	(1,96-2,00)
Tujuan 3	**Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah**	**Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah**	**Angka**	**71,25**	**0**	**0**	**71,25**
Sasaran 8	Meningkat nya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan	Cakupan daya saing infrastruktur	Persenta se	76,41	78.98	103	76,41
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	Angka	(61,61-61,90)	62.58	102	(61,61-61,90)

Perubahan RPJMD Pokok Tahun 2019-2024							
No	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Tahun 2023**			**Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
				Target	**Realisasi**	**Tingkat Capaian (%)**	
Tujuan 4	**Meningkatkan pendapatan masyarakat yang merata dan berkeadilan**	**Ratio Gini**	**Angka**	**0,341**	**0,360**	**103.14.00**	**0,341**
Sasaran 9	Meningkat nya kualitas pertumbu han ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persenta se	(4,24-5,65)	1.43	56.13	(4,24-5,65)
		PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	49,59	63.61	105	49,59
		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,2	85.46	102	84,2
Sasaran 10	Meningkat nya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	Tingkat Kemiskinan	Persenta se	6,84	6. 73	107	6,84
Sasaran 11	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persenta se	4,22	2.10	60.19	4,22

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2024. Diolah

2.2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah sampai tahun 2019-2023 dijabarkan dalam 2 aspek yaitu aspek kerejahteraan masyarakat dan aspek Pelayanan umum dan masing.masing aspek didukung dengan bidang urusan dan indikator capaian.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat terbagi dalam 2 urusan yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dengan 6 indikator kinerja pembangunan sedangkan untuk urusan kesehteraan social dengan 11 indikator kinerja pembangunan. Untuk aspek pelayanan umum terbagi dalam 4 bidang urusan yaitu:

a. Pelayanan Urusan wajib Dasar terdiri dari 8 urusan;

b. Pelayanan Urusan wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari 18 urusan;

c. Pelayanan Urusan Pilihan terdiri dari 8 urusan; dan

d. Penunjang urusan terdiri dari 6 urusan.

Pencapaian kinerja dari kedua aspek tersebut di atas yang menggambarkan kinerja impact Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pengukuran capaian aspek pelayanan umum yang menggambarkan kinerja outcome penyelenggaraan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023 dengan berbagai indikator dan capaiannya sebagaimana disajikan dalam Tabel 2. 376.

Tabel 2. 376
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2023

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
1				**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	**1**			**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
1	1	1		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,06	-1,17	6,67	2,38	1,43	BPS	<
1	1	2		Laju inflasi	%	1,64	1,89	2,26	5,52	2,83	BPS	>
1	1	3		- PDRB per kapita Atas Dasar harga Berlaku (ADHB)	Juta Rp	49,87	49,58	58,83	24,35	24,58	BPS	<
1	1	4		- PDRB per kapita Atas Dasar harga Konstan(ADHK)	Juta Rp	32,32	31,87	35,77	13,89	14,09	BPS	<
1	1	5		Indeks Gini	Angka	0,35	0,36	0,36	0,37	0,362	BPS	<
1	1	6		Tingkat Kemiskinan	%	6,91	6,95	6,46	6,57	6,73	BPS	>
1	1	7		Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	%	4,02	4,02	3,83	3,9	4,15	DISPERINDAGKOP	>
1	1	8		Pertumbuhan PDRB Industri	%	0,4	4,18	4,18	8,55	4,72	DISPERINDAGKOP	>

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	9		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	69,05	69,15	69,62	70,26	73,56	BPS	>
1	1	10		Angka Melek Huruf		99,86	99,86	90,44	91	90,67	DISDIKBUD	>
1	1	12		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,8	6,81	7,05	7,09	7,05	BPS	>
1	1	13		Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,13	13,14	13,15	13,12	13,206	BPS	<
1	1	14		Angka usia harapan hidup	Tahun	67,17	67,35	67,48	67,82	73,25	BPS	>
1	1	15		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,38	65,99	64,58	59,58	71,74	BPS	<
1	1	16		Tingkat pengangguran terbuka	%	3,3	4,33	4,32	2,54	2,10	BPS / DISNAKERTRANS	<
1	1	17		Persentase Penduduk yang Bekerja	%	96,7	95,67	95,68	97,6	97,90	BPS / DISNAKERTRANS	>
1	1	18		Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	%	n/a	2	1,48	7,43	70,84	BPS / DISNAKERTRANS	>
1	1	19		Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	11,51	12,33	12,33	44,34	54,70	BPS / DISNAKERTRANS	>
1	1	20		Indeks Kepuasaan Masyarakat	Indeks	B	80,33				BPS	<
1	1	21		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,08	60,02	60,09	60,69	65,06	BPS	>
1	1	22		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	55,09	56,24	56,3	55,83	57,90	BPS	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	23		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,13	90,25	90,44	90,33	90,65	BPS	<
2				**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
2	**1**			**Layanan Urusan Wajib Dasar**								
2	**1**	**1**		**Pendidikan**								
2	1	1	1	PAUD	%	74,99	60,11	74,02	75,33	110,72	DISDIKBUD	>
2	1	1	2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	85%	87%	101%	107%	117	DISDIKBUD	>
2	1	1	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	%	65%	62%	81%	95%	110	DISDIKBUD	>
2	1	1	4	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/PAKET A	%	6449	6700	6773		8,5	DISDIKBUD	<
2	1	1	5	Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP	%	6060	6090	6107	5854	5613	DISDIKBUD	<
2	1	1	6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	85,11%	88,10%	101,05%	92,25%	92,93%	DISDIKBUD	<
2	1	1	7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	63,00%	61,00%	81,43%	65,34%	81,68%	DISDIKBUD	<
2	1	1	8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	85,11	88,10	100,98	92,24	92,71	DISDIKBUD	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	1	9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	%	62,34	60,59	81,42	65,12	81,61	DISDIKBUD	<
2	1	1	10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,66	0,86	0,87	0,52	0,71	DISDIKBUD	<
2	1	1	11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,53	0,65	0,69	1,94	0,61	DISDIKBUD	>
2	1	1	12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97%	98%	100%	101%	102%	DISDIKBUD	<
2	1	1	13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	103%	97%	100%	103,55	106%	DISDIKBUD	>
2	1	1	14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	87%	87%	91%	90,36	99%	DISDIKBUD	<
2	1	1	15	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	25%	31%	53%	64,69	67%	DISDIKBUD	>
2	1	1	16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	7,56%	7,61%	8,04%	80,00%	84,00%	DISDIKBUD	=
2	1	1	17	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	95,95	115,10	119,14	99,99	111,71	DISDIKBUD	<
2	1	1	18	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	Rasio	95,94	115,09	945,08	0	N/A	DISDIKBUD	<
2	1	1	19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Rasio	615,03	1102,25	945,08	924,96	857,95	DISDIKBUD	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	1	20	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Rasio	124,01	102,81	129,64	79,91	73,70	DISDIKBUD	<
2	1	1	21	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	29,07%	28,50%	30,84%	73,08%	81,58%	DISDIKBUD	>
2	1	1	22	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	93%	95%	98%	99,57%	N/A	DISDIKBUD	>
2	1	1	23	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	145,83%	145,83%	150,37%	91,00%	N/A	DISDIKBUD	<
2	1	1	24	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86%	87%	96%	93%	92%	DISDIKBUD	<
2	**1**	**2**		**Kesehatan**								
2	1	2	1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	1,1	4,64	4,7	3,46	0	DINKES	<
2	1	2	2	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	-0.1	-3.64	-3.70	-2.46	-6.97	DINKES	<
2	1	2	3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	0,47	4,64	4.88	3.80	8.32	DINKES	>
2	1	2	4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	4,26	3,86	3.48	2.76	6.55	DINKES	<
2	1	2	5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	63,07	61,81	104.48	17.28	105.23	DINKES	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	2	6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	14,38	14,73	21,43	21.80	17.77	DINKES	<
2	1	2	7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,2	0,20	0,21	0,21	0,19	DINKES	=
2	1	2	8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,01	791	1,054	1,053	0,987	DINKES	=
2	1	2	9	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,17	0,21	174	179	0,165	DINKES	<
2	1	2	10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,17	0,28	0,31	0,33	0,40	DINKES	>
2	1	2	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	76,41	75,48	105,23	102,23	101,76	DINKES	>
2	1	2	12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,56	97,12	100,52	101,05	99,44	DINKES	>
2	1	2	13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	80,00	70,53	88,42	91,05	DINKES	>
2	1	2	14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES	=
2	1	2	15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	99,12	96,13	104,33	100,44	101,36	DINKES	>
2	1	2	16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Angka	0,002	1.391	0,66	8,720	6,247	DINKES	>
2	1	2	17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	18,53	4.50	3.98	18.19	19.78	DINKES	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	2	18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	58,19%	49,01	57.08	86.99	62,53%	DINKES	=
2	1	2	19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka	221	150,89	180,81	269,16	250,78	DINKES	<
2	1	2	20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka	13,57	10.02	`0.02	11.06	14.81	DINKES	<
2	1	2	21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	63,76%	51,57%	61.95	86.99%	68.51%	DINKES	=
2	1	2	22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	72,64	73,95	63.23	72.81	74.73	DINKES	=
2	1	2	23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES	=
2	1	2	24	Penderita diare yang ditangani	%	76,22	41.26	32.44	51.70	67.99	DINKES	<
2	1	2	25	Angka kejadian Malaria	Angka	8,04	3.69	6.06	7.90	6.91	DINKES	>
2	1	2	26	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Angka	0	0	0	100	0	DINKES	=
2	1	2	27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Angka	0,01	0,01	0.01	0.02	0.01	DINKES	=
2	1	2	28	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif	%	104,68	0,00	0,00	1,03	1.53	DINKES	>

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
				tentang HIV/AIDS								
2	1	2	29	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	32,93	63,35	57,64	76,90	77,70	DINKES	<
2	1	2	30	Cakupan kunjungan bayi	%	100,42	98,73	111,26	110,90	N/A	DINKES	<
2	1	2	31	Cakupan puskesmas	%	164,29	164,29	164,29	164,29	N/A	DINKES	=
2	1	2	32	Cakupan pembantu puskesmas	%	28,95	28,95	28,95	28,95	N/A	DINKES	=
2	1	2	33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	86,29	91,89	100	100	N/A	DINKES	=
2	1	2	34	Cakupan pelayanan nifas	%	91,39	95,33	107,57	101,60	N/A	DINKES	<
2	1	2	35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	59,50	60,69	74,40	73,26	N/A	DINKES	<
2	1	2	36	Cakupan pelayanan anak balita	%	70,49	70,24	80,83	97,65	N/A	DINKES	>
2	1	2	37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	98,32	94,09	99,37	98,05	N/A	DINKES	<
2	1	2	38	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	95,43	77,94	99,70	100	N/A	DINKES	>
2	1	2	39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	42,97	29,23	36,40	29,04	N/A	DINKES	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	2	40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	N/A	DINKES	=
2	1	2	41	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	N/A	DINKES	=
2	1	3		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
2	1	3	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,34	0,37	0,38	0,38	0,36	DPUPRP	>
2	1	3		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	45,18	47,16	48,85	48,76	41,05	DPUPRP	
2	1	3	2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002	DPUPRP	<
2	1	3	3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	0,12	0,12	0,18	0,18	0,18	DPUPRP	<
2	1	3	4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	34,41	36,68	38,10	38,36	35,65	DPUPRP	>
2	1	3	5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	3,73	3,73	3,73	3,79	3,88	DPUPRP	>
2	1	3	6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	DPUPRP	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	3	7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	95,54	95,54	90,12	91,20	91,80	DPUPRP	>
				Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Kabupaten Wajo	%	N/A	N/A	90,12	91,20	91,80	DPUPRP	
2	1	3	8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	45,13	45,13	37,48	37,48	37,48	DPUPRP	<
2	1	3	9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	76,60	23,46	72,60	77,56	79,98	DPUPRP	>
2	1	3	10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	41,94	47,31	51,61	56,99	73,12	DPUPRP	>
2	1	3	11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	63,94	69,31	70,66	72,03	73,47	DPUPRP	>
2	1	3	12	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	4,064	4,792	6,324	7,827	8,219	DPUPRP	>
2	1	3	13	Persentase penduduk berakses air minum	%	84,76	91,4	95,03	97,77	91,17	DPUPRP	>
2	1	3	14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Rasio	0,85	0,89	0,95	0,98	0,91	DPUPRP	>
2	1	3	15	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,42	0,23	0,23	0,23	0,23	DISPERKIM	>

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	3	16	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Rasio	7,04	60,7	73,2	74,66	N/A	DLH	>
2	1	3	17	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	1	3	18	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	1	3	19	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,49	0,49	0,51	0,51	0,51	DPUPR	=
2	1	3	20	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	116,28	116,28	120,27	120,27	120,27	DPUPR / DLH	=
2	1	3	21	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	0,18	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR / PTSP	
2	1	3	22	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,24	0,24	0,24	0,24	N/A	DLH	=
2	1	3	23	Ketaatan terhadap RTRW	%	8,03	99,98	99,77	99,92	99,92	DPUPR	>
2	**1**	**4**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
2	1	4	1	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	0,12	0,18	0,18	0,18	0,18	DISPERKIM	

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	4	2	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,263	0,265	0,268	0,268	0,254	DISPERKIM	=
2	1	4	3	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,945	0,945	0,946	0,95	0,95	DISPERKIM	=
2	1	4	4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	0,96	0,94	0,95	0,95	0,96	DISPERKIM	=
2	1	4	5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	17,85	23,66	24,53	27,47	32,75	DISPERKIM	>
2	1	4	6	Persentase pemukiman yang tertata	%	59,94	59,94	60,23	60,25	60,27	DISPERKIM	>
2	1	4	7	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,42	0,42	0,48	0,47	0,47	DISPERKIM	<
2	1	4	8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	3,79	5,81	14,89	17,77	17,77	DISPERKIM	>
2	1	4	9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	2,07	2,28	2,11	3,43	3,43	DISPERKIM	=
2	1	4	10	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0,06	0,06	0,06	0,17	0,17	DISPERKIM	>
2	**1**	**5**		**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
2	1	5	1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	97,84	87,60	87,60	71,12	91,24	SATPOL PP & DAMKAR	<
2	1	5	2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	99,05	100	100	100	100	SATPOL PP & DAMKAR	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	5	3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	35,24	42,28	42,28	42,28	42,28	SATPOL PP & DAMKAR	=
2	1	5	4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	82,4	SATPOL PP & DAMKAR	=
2	1	5	5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP & DAMKAR	=
2	1	5	6	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	14,35	10,27	8,96	10,67	N/A	SATPOL PP & DAMKAR	>
2	**1**	**6**		**Sosial**								
2	1	6	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	45,92	45,92	26,75	10,68	8,11	DINSOSP2KBP3A	=
2	1	6	2	Persentase PMKS yang tertangani	%	28,69	28,69	84,92	10,68	8,11	DINSOSP2KBP3A	>
2	1	6	3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	38,99	38,99	49,16	49,17	100,00	DINSOSP2KBP3A	>
2	1	6	4	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya	%	100	-	0,10	0,10	0,00	DINSOSP2KBP3A	=
2	1	6	5	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	91,32	6,44	84,14	0,786	100	DINSOSP2KBP3A	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	1	6	6	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	76,25	76,25	85,39	10,86	38,66	DINSOSP2KBP3A	<
2	1	6	7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	7,55	12,27	100,00	10,86	38,66	DINSOSP2KBP3A	=
2	**2**			**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**								
2	**2**	**1**		**Tenaga Kerja**								
2	2	1	1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Angka	14,08	5,99	14,08	12,85	9,12	DISNAKERTRANS	<
2	2	1	2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	100	100	100	DISNAKERTRANS	=
2	2	1	3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Angka	4,61	6,65	7,07	6,90	10,37	DISNAKERTRANS	<
2	2	1	4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	69,72	90,67	79,10	56,59	22,65	DISNAKERTRANS	<
2	2	1	5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	0	DISNAKERTRANS	=
2	2	1	6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	54	39	100	DISNAKERTRANS	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	1	7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	50	100	100	100%	100	DISNAKERTRANS	=
2	2	1	8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	0	N/A	N/A	DISNAKERTRANS	=
2	2	1	9	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	11,6	11,47	11,5	N/A	N/A	DISNAKERTRANS	
2	**2**	**2**		**Komunikasi dan Informatika**								
2	2	2	1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	178,57%	357,14%	357,14%	DISKOMINFOTIK	>
2	2	2	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0,75	0,75	0,75	0,78	0,78	DISKOMINFOTIK	=
2	2	2	3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	92,43%	97,35%	97,63%	98,38%	92,20%	DISKOMINFOTIK	>
2	2	2	4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	0,637	0,503	0,499	0,509	0,384	DISKOMINFOTIK	>
2	2	2	5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	0,683	0,539	0,525	0,538	0,478	DISKOMINFOTIK	<
2	**2**	**3**		**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**								
2	2	3	1	Persentase koperasi aktif	%	64,13%	69,51%	64,51%	64,67%	64,75%	DISPERINDAGKOP	>
2	2	3	2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100%	100%	42,86%	30,00%	30,00%	DISPERINDAGKOP	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	3	3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	DISPERINDAGKOP	=
2	2	3	4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,37%	100%	90,60%	18,29%	2,81%	DISPERINDAGKOP	<
2	**2**	**4**		**Penanaman Modal**								
2	2	4	1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	635	62	154	2875	6305	DPMPTSP	>
2	2	4	2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	rupiah	294.660.109.320	11.940.98 37.780	435.517.9 27.600	4.969.93 2.970.56 6	2.092.368. 212.287	DPMPTSP	>
2	2	4	3	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	6,29	10,7	6,2	3,11	2,47	DPMPTSP	<
2	2	4	4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	-95,55%	-0,95%	1.072,93 %	95,08%	1.575,40%	DPMPTSP	<
2	**2**	**5**		**Kepemudaan dan Olah Raga**								
2	2	5	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	176%	10,26%	23,08%	24,10%	N/A	DISPORAPAR	>
2	2	5	2	Persentase wirausaha muda	%	17,74%	62,22%	24,29%	34,44%	N/A	DISPORAPAR	>
2	2	5	3	Cakupan pembinaan olahraga	%	100%	100%	100%	100%	100%	DISPORAPAR	=
2	2	5	4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	100%	100%	100,00%	100%	100%	DISPORAPAR	

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	5	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	DISPORAPAR	
2	2	5	6	Jumlah prestasi olahraga	cabor	87	3	N/A	N/A	N/A	DISPORAPAR	
2	**2**	**6**		**Statistik**								
2	2	6	1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISKOMINFO	=
2	2	6	2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISKOMINFO	=
2	2	6	3	Buku ”PDRB”	Ada/ tidak	TidaK ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISKOMINFO	=
2	**2**	**7**		**Persandian**								
2	2	7	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	DISKOMINFO	=
2	**2**	**8**		**Kebudayaan**								
2	2	8	1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	buah	7	6	6	6	7	DISDIKBUD	=
2	2	8	2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIKBUD	=
2	2	8	3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan	buah	4	4	4	4	4	DISDIKBUD	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
				inventarisasi								
2	2	8	4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	24	24	24	24	24	DISDIKBUD	=
2	**2**	**9**		**Perpustakaan**								
2	2	9	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	383.742	204.192	170.942	281.200	N/A	SETDA	>
2	2	9	2	Jumlah Perpustakaan	unit	524	524	524	524	N/A	SETDA	=
2	2	9	3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	1,29	1,35	1,38	1,38	N/A	SETDA	=
2	2	9	4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Angka	375,644	204,092	328,103	428	N/A	SETDA	>
2	2	9	5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buku	12.500	12.500	12.500	12.500	N/A	SETDA	=
2	**2**	**10**		**Kearsipan**								
2	2	10	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	20,75%	21,95%	21,95%	21,95%	N/A	SETDA	=
2	2	10	2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	0	0	0	0	N/A	SETDA	=
2	**2**	**11**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	11	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	17,4	17,3	17,22	16,11	82,59	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	11	2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	17,50%	10%	10%	100%	100%	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	11	3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	55,76%	55,41%	98,16%	97,46%	16,46%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	11	4	Rasio KDRT	Rasio	0,014	0,008	0,013	0,03	N/A	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	11	5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	Tidak Ada Kegiatan		1,37	0	0	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	11	6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Tidak Ada Kegiatan		100%	4,66%	0,00%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	11	7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	11	8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100%	100%	100%	100%	200%	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	11	9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	0	0	0	0	N/A	DINSOSP2KBP3A	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	11	10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100%	100%	100%	N/A	150%	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	11	11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100%	100%	100%	0%	0%	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	11	12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	0,96	0,97	0,98	0,99	1,02	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	11	13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	0,49	0,5	0,83	0,90	1,20	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	11	14	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	1	1	4,44	1,00	0	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	11	15	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	22,42%	22,42%	22,42%	22,47%	0,00%	DINSOSP2KBP3A	>
2	**2**	**12**		**Pangan**								
2	2	12	1	Ketersediaan pangan utama	%	103,56	103,66	117,07	143,79	112,28	DPKP	>
2	2	12	2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	7,82	8,641	8,641	9,014	9,052	DPKP	<
						144.650	167.210	167.210	179,26	190,49		>
2	2	12	3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	66,67%	88,88%	90%	90%	100%	DPKP	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	**2**	**13**		**Pertanahan**								
2	2	13	1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0,005	0,021	0,057	0,015	0,015	DPUPRP	<
2	2	13	2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	62,75%	63,73%	64,71%	100%	100%	DPUPRP	>
2	**2**	**14**		**Lingkungan Hidup**								
2	2	14	1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	DLH	=
2	2	14	2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	DLH	=
2	2	14	3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	Ada/ tidak	1	-	1	-	1	DLH	=
2	2	14	4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	40	60	58,75	53,57	54,44	DLH	<
2	2	14	5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	92,56	90,73	91,48	91,93	89,06	DLH	>
2	2	14	6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	39,30	39,27	23,75	23,75	27,65	DLH	=
2	2	14	7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	28,59	21,71	4,60	0,44	0,21	DLH	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
				kabupaten/kota								
2	2	14	8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	DLH	=
2	2	14	9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	DLH	=
2	2	14	10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100%	100%	100%	100%	100%	DLH	=
2	2	14	11	Timbulan sampah yang ditangani	%	95,00%	41,31%	44,62%	75,24%	69,05%	DLH	>
2	2	14	12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	5,36%	1,47%	23,05%	5,70%	21,97%	DLH	=
2	2	14	13	Persentase cakupan area pelayanan	%	9,98	0,15	15,36	15,36	15,36	DLH	=
2	2	14	14	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	0	0	0	89,05	N/A	DLH	=
2	**2**	**15**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
2	2	15	1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	110	110	104	101	101	DISDUKCAPIL	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	15	2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	208	268	168	141	99	DISDUKCAPIL	<
2	2	15	3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	23	205	196	180	166	DISDUKCAPIL	>
2	2	15	4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/ tidak	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL	=
2	2	15	5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL	=
2	2	15	6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	99	100	97	101	DISDUKCAPIL	>
2	2	15	7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	130%	119	113	108	100	DISDUKCAPIL	>
2	**2**	**16**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
2	2	16	1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	85,92%	86,62%	92,96	92,96%	92,96%	DPMD	=
2	2	16	2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Angka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DPMD	<
2	2	16	3	Persentase LSM aktif	%	0%	0%	0%	0%	0%	DPMD	=
2	2	16	4	Persentase LPM Berprestasi	%	0%	0%	0%	0%	0%	DPMD	=
2	2	16	5	Persentase PKK aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMD	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	16	6	Persentase Posyandu aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMD	=
2	2	16	7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100%	100%	100%	0%	0%	DPMD	=
2	2	16	8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100%	100%	100%	0%	0%	DPMD	=
2	2	16	9	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	**%**	3,473	210,5	210,5	0	0	DPMD	
2	**2**	**17**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
2	2	17	1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,31	1,18	1,18	1,17	0	DINSOSP2KBP3A/ BPS	<
2	2	17	2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1	2,1	1,99	1,96	1,7	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	17	3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100%	100%	14,00%	14,63%	14,63%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	17	4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	9,43%	0%	0%	17,07%	17,07%	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	17	5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan	Angka	6	0	0	7	0	DINSOSP2KBP3A	>

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
				pelaksanaan program pembangunan								
2	2	17	6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Angka	1	1	65	0	0	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	17	7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Angka	2	2	1	0	0	DINSOSP2KBP3A	
2	2	17	8	Ratio Akseptor KB	%	73,66%	76,71%	75%	53,75%	67,72%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	17	9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	73,66%	76,71%	58,69%	58,69%	67,72%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	17	10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	1,25%	1,25%	100%	206,57%	0,00%	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	17	11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0.004%	0.008%	48,33	50,70%	54,75%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	17	12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,31%	12,85%	12,04%	15,46%	11,45%	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	17	13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	21,72%	22,49%	24,00%	5,40%	7,79%	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	17	14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	10,62%	10,65%	32,94%	18,48%	18,08%	DINSOSP2KBP3A	<

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	17	15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	80,46%	80,46%	74,48%	54,69%	44,31%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	17	16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	77,58%	77,58%	59,88%	15,20%	3,27%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	17	17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	70,33%	75,70%	43,06%	90,91%	9,34%	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	17	18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	14,29%	14,29%	21,00%	14,29%	14,29%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	17	19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	4,5	4,5	4,6	485,72%	492,86%	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	17	20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100%	100%	100%	0%	0%	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	17	21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	79,58%	84,14%	60,06%	66,35%	27,23%	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	17	22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	1	100%	100%	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	17	23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	148,50%	149%	104%	105,16%	0%	DINSOSP2KBP3A	>

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	17	24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	17	25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOSP2KBP3A	=
2	2	17	26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100%	100%	75,43%	78,82%	100,00%	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	17	27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	44,84%	48,12%	81,16%	81,02%	0,00%	DINSOSP2KBP3A	<
2	2	17	28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	21.4%	21.4%	18,18%	1,13%	0,00%	DINSOSP2KBP3A	>
2	2	17	29	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,57%	0,45%	0,38%	0,00%	0,00%	DINSOSP2KBP3A	<
2	**2**	**18**		**Perhubungan**								
2	2	17	1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	1.978.888	549,453	345.287	637.830	672.980	DISHUB	>
2	2	17	2	Rasio ijin trayek	Rasio	0	0	0	0,00027	0,00026	DISHUB	>

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	2	17	3	Jumlah uji kir angkutan umum	Angka	2.437	2.620	2.778	3.658	3.713	DISHUB	>
2	2	17	4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	Angka	5	5	4	4	3	DISHUB	=
2	2	17	5	Persentase layanan angkutan darat	%	0,03	0,03	0,05	0,05	0,049	DISHUB	=
2	2	17	6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,19	24,72	5,63	5,53	5,47	DISHUB	<
2	2	17	7	Pemasangan Rambu-rambu	unit	0	42,5	60.4%	46,27%	8,95%	DISHUB	<
2	2	17	8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,00021	0,00019	0,00019	0	0	DISHUB	=
2	2	17	9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ barang	1.451.890	68.483	72.193	169.414	230.691	DISHUB	>
2	2	17	10	Jumlah orang/barang melalui dermaga dan terminal per tahun	Orang/ barang	1.272.040	55.600	56.511	66.633	144.796	DISHUB	>
2	**3**			**Layanan Urusan Pilihan**								
2	**3**	1		**Pariwisata**								
2	3	1	1	Kunjungan wisata		114%	32%	100%	131%	992%	DISPORAPAR	>
2	3	1	2	Lama kunjungan Wisata		0	0.2 Hari	0.2 Hari	0.4 hari	0.6 Hari	DISPORAPAR	>
2	3	1	3	PAD sektor pariwisata		0	0.049%	0,064	0.063%	0,02%	DISPORAPAR	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	**3**	**2**		**Pertanian**								
2	3	2	1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	18.14%	18.82%	18.62%	34,00%	33.68%	DTPHP	>
2	3	2	2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	66,06	65,94	66.74	69.27	68.32	DTPHP	<
2	3	2	3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman tahunan) terhadap PDRB	%	20,18%	20,29%	20,58%	18,68%	19.03%	DTPHP	<
2	3	2	4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100%	100%	100%	100%	100%	DTPHP	=
2	3	2	5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	5,39	4,35	4,42	5,76	5.16	DTPHP	>
2	3	2	6	Cakupan bina kelompok petani	%	40.21	71,24	49,09	81,63	97.28	DTPHP	>
2	**3**	**3**		**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
2	3	3	1	Jumlah Sumur Gas	unit	7	7	7	7	7		
2	3	3	2	Jumlah Produksi Gas Tiap Sumur	unit	13.409,03	11.901,07	14.291,43	9.672,15	N/A	BAPPELITBANGDA	<
2	**3**	**4**		**Perdagangan**								
2	3	4	1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	-494.909,9	-643.714,5	-175.709,7	470.620,88	-280.221,23	DISPERINDAGKOP	

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
						1	1	8				
2	3	4	2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	42,50%	46,51%	52,09%	52,09%	52,09%	DISPERINDAGKOP	=
2	**3**	**5**		**Perindustrian**								
2	3	5	1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	37.5%	29,49%	35%	1.40%	27.04%	DISPERINDAGKOP	<
2	3	5	2	Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	4.04%	4,02%	3,83%	3,90%	4.15%	DISPERINDAGKOP	>
2	3	5	3	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	94,41%	8,84%	0,00%	0,00%	0.00%	DISPERINDAGKOP	=
2	3	5	4	Pertumbuhan Industri	%	0,40%	4,18%	6,25%	8,55%	4.72%	DISPERINDAGKOP	>
2	**3**	**6**		**Kelautan dan Perikanan**								
2	3	6	1	Produksi perikanan	%	01.00	01.01	01.03	01.03	01.03	DISKAN	=
2	3	6	2	Konsumsi ikan	%	1,04	1.10	1.10	1.10	1.10	DISKAN	=
2	3	6	3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0,06	0,08	0,08%	0,09%	0.14%	DISKAN	>
2	3	6	4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	0,73	0,77	0,75	0.80	0.81	DISKAN	=
2	3	6	5	Nilai tukar nelayan	%	01.00	99.64	107.43	109.29	111.49	DISKAN	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	**4**			**Penunjang Urusan**								
2	**4**	**1**		**Perencanaan Pembangunan**								
2	4	1	1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPELITBANGDA	=
2	4	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPELITBANGDA	=
2	4	1	3	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPELITBANGDA	=
2	4	1	4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPELITBANGDA	=
2	4	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD	Angka	73	99	75	75	90,83	BAPPELITBANGDA	=
2	4	1	6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Angka	74	90	99	99	90,83	BAPPELITBANGDA	=
2	4	1	7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	80	82	82	82	N/A	BAPPELITBANGDA	=
2	**4**	**2**		**Keuangan**								
2	4	2	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	12,35	10,76	10,21	9,99	9.02%	BPKPD	

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	4	2	2	Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD	
2	4	2	3	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD	=
2	4	2	4	Persentase SILPA	%	8,56	7,94	4,30	2,48	1,66%	BPKPD	>
2	4	2	5	Persentase SILPA terhadap APBD	%	8,56	7,94	4,30	2,48	1,66%	BPKPD	>
2	4	2	6	Persentase Program Yang Tidak Terlaksana	%	4,80	0,00	2,25	1,73	2,39	BPKPD	
2	4	2	7	PersentaseKegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	11,02	N/A	N/A	N/A	N/A	BPKPD	
2	4	2	8	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20,72	20,63	21,29	22,23	20,62%	BPKPD	>
2	4	2	9	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,17%	18,75%	17,57%	16,24%	14,40%	BPKPD	>
2	4	2	10	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung :	%	37,97%	37,31%	40,28%	22.94%	45,01%	BPKPD	<
					%	56,22%	55,94%	56,03%	59,33	58,06%	BPKPD	<
2	4	2	11	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,36%	0,37%	0,29%	0,35%	0,31%	BPKPD	>
2	4	2	12	Penetapan APBD	ketepatan pemenuhan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKPD	=
2	**4**	**3**		**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	4	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	angka	0,45	0,53	0,65	0,82	1,09	BKPSDM	>
2	4	3	2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5,18%	7,06%	12,79%	18,63%	13,28%	BKPSDM	>
2	4	3	3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	42,92%	32,55%	42,36%	23,26%	22,29%	BKPSDM	<
2	4	3	4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	37	31	30	31	31	BKPSDM	>
2	4	3	5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	2,615	2,455	1,914	1,805	1,693	BKPSDM	>
2	4	3	6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	3,554	3,486	3,785	3,656	3,412	BKPSDM	>
2	**4**	**4**		**Penelitian dan pengembangan**								
2	4	4	1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	0%	100%	100%	100%	N/A	BAPPELITBANGDA	=
2	4	4	2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	0%	100%	100%	13%	100%	BAPPELITBANGDA	=
2	4	4	3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0%	0%	22%	13%	N/A	BAPPELITBANGDA	<
2	4	4	4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	0%	17%	8%	11%	N/A	BAPPELITBANGDA	>

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
2	**4**	**5**		**Pengawasan**								
2	4	5	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	86,00%	61,00%	78,00%	74,00%	56,00%	INSPEKTORAT	<
2	4	5	2	Persentase pelanggaran pegawai	%	tdi	tdi	110,00%	0,00%	-135,00%	INSPEKTORAT	>
2	4	5	3	Jumlah temuan BPK	temuan	95%	80%	85%	85%	93%	INSPEKTORAT	<
2	**4**	**6**		**Sekretariat Dewan**								
2	4	6	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A	SEKWAN	=
2	4	6	2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakanFungsi Pengawasan,Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A	SEKWAN	=
2	4	6	3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A	SEKWAN	=

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Satuan	Capaian Kinerja					Penanggung jawab Data	Interpertasi
						2019	2020	2021	2022	2023		
3				**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
3	1			Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rupiah	12.470.903	12.527.991	1.030.536	1.085.996	N/A	DPKP/ BPS	>
3	2			Pengeluaran Perkapita	Rupiah	12,399	12,386	12,505	12.729	N/A	DPKP / BPS	>
3	3			Nilai tukar petani	Angka	103,05	97,55	105.50.00	101,13	113,28	DPKP / BPS	<
3	4			Produktivitas total daerah	%	146.712.883.413	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS/DPMPTSP	
3	5			Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	210,5	210,5	210,5	0	0	DPMD / BPS	<
3	6			Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0,02	0,84	0,83	19,32	-0,01	DISPERINDAGKOP/ BPS	<
3	7			Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS/DPMPTSP	
3	8			Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS/koperasi, bag, ekonomi SETDA & Bag, ekonomi BAPPEDA	
3	9			Rasio ketergantungan	Rasio	46,16	40,03	42,53	43,66	45,99	BPS / DISNAKERTRANS	<

2.2.3. Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Ment eri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa ada 5 (lima) Urusan yang dilaksanakan yaitu : Urusan Pendidikan Urusan Kesehatan Urusan Pekerjaaan Umum Urusan Sosial Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat. Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 terdapat 6 (enam) Perangkat Daerah penanggungjawab :

Tabel 2. 377
Data Indikator Capaian SPM

No	SPM	Target Nasional	Capaian SPM		Interpertasi
			2022	2023	
	Pendidikan				
1	Jumlah Warga Negara Usia 7– 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi.SMP/MTs)	100%	94,63%	94.63%	=
2	Jumlah Siswa Usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	100%	63.6%	63.6%	=
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 . 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	74.02%	74.02%	=
	Kesehatan				
4	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	100%	100%	95.11%	<
5	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Ibu Bersalin	100%	100%	94.92%	<
6	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	102%	95.90%	<
7	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	81%	95.29%	<
8	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skirining kesehatan sesuai standar	100%	100%	95.71%	<
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke bawah yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100%	72%	88.85%	>

No	SPM	Target Nasional	Capaian SPM		Interpertasi
			2022	2023	
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100%	56%	82.41%	>
11	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	43%	83.12%	>
12	Persentase Penyandang DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	69%	92.10%	>
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	116%	92.93%	<
14	Persentase Orang Terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	100%	104%	95.97%	<
15	Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	106%	94.78%	<
	Pekerjaan Umum				
15	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	88.53%	100%	>
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	90.12%	100%	>
	Perumahan Rakyat				
17	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	=
	Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
18	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%	88.13%	<
19	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	98.58%	<
20	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	68.73%	73.73%	>
21	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	50.58%	74%	>
22	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	=
	Sosial				
23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan	100%	100%	81.07%	<

No	SPM	Target Nasional	Capaian SPM		Interpertasi
			2022	2023	
	jaminan hidup				
24	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	100%	180%	93.33%	<
25	Jumlah orang yang diberikan rujukan	100%	160%	160%	=
26	Waktu pelaksanaan penanganan masalah-masalah strategis yang menyakut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100%	100%	100%	=
27	Waktu pelaksanaan penyediaan sandang yang disediakan yang menyakut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100%	100%	100%	=
28	Waktu pelaksanaan penampungan pengungsi yang disediakan selama tanggap darurat	100%	100%	100%	=

Sumber : Bagian Pemerintahan, Setda. Tahun 2024

2.2.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;

4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri. Inovasi. dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian. Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan provinsi. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2020 dari 17 tujuan. 206 indikator dapat digambarkan bahwa masih terdapat 95 indikator yang belum tercapai. sedangkan yang sudah tercapai sebanyak 111 indikator. Capaian target dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2. 378:

Tabel 2. 378

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustanaible Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Wajo

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
Tujuan 1 :	**Mengakhiri Kemiskinan dalam Bentuk Apapun**								
Target 1.2 :	**Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.**								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DINSOSP2KBP3A	%	21,73	21,6	21,6	21,6	21,6	
Target 1.3 :	**Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.**								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINKES	Jiwa	321.934	296.074	331.337	331.337	331.337	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKERTRANS	Orang	6.549	6.621	6.656	6.67	6.67	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 1.5 :	**Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.**								
1.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang						
	Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.	BPBD	Orang	DM	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana	BPBD	Orang	DM	DM	DM	DM	DM	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Jumlah korban terdampak (luka dan pengungsi) adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.	BPBD	Orang	DM	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah korban terdampak0 (luka dan pengungsi) adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.	BPBD	Orang	DM	DM	DM	DM	DM	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.5.2 *	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	BPBD	Rupiah	DM	DM	DM	DM	DM	
1.5.4 *	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	BPBD	Dokumen	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
Target 1.a :	**Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.**								
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPELITBANGDA	%	100	100	100	100	100	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total	BAPPELITBANGDA							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	belanja pemerintah.								
	Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan	BPKPD	%	20	20	20	20	20	
	Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan	BPKPD	%	10	10	10	10	10	
	Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial	BPKPD	%	6	6	7	8	8	
Tujuan 2 :	**Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan**								
Target 2.1 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.**								
2.1.2 *	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	DPKP	%	6,8	7,00	7,20	7,20	7,20	
Target 2.2 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES	%	5,5	5,2	4,6	4,6	4,6	
2.2.2 *	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINKES	%	3	2,7	2,4	2,1	2,1	
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	DPKP	%	93,10	94,00	95,00	97,50	97,50	
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	DINKES	%	3,9	3,9	3,6	3,3	3,3	
Target 2.3 :	**Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.**								
2.3.2*	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	BPS	Rupiah	############	DM	DM	DM	DM	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 2.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.**								
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DPKP	%	0	99,23	99,23	99,23	99,23	
Tujuan 3 :	**Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia**								
Target 3.1. :	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.**								
3.1.1*	Angka kematian ibu (AKI).	DINKES	kasus	4	4	3	3	3	
3.1.2 *	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	DINKES							
	Proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	DINKES	%	89	91	93	95	95	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINKES	%	89	91	93	95	95	
Target 3.2. :	**Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.**								
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.								
	Angka Kematian Balita (AKBa)	DINKES	Kasus	28	26	24	22	22	
	Angka Kematian Bayi (AKB)	DINKES	Kasus	27	25	23	23	23	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kasus	20	20	19	19	19	
Target 3.3 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.**								
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	DINKES	Kasus	20	19	17	16	16	
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	Kasus	331	325	219	312	312	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	DINKES	Per Mil	<1	<1	<1	<1	<1	
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	DINKES	%	0	0	0	0	0	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.								
	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis	DINKES	%	0	0	0	0	0	
	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	DINKES	%	40	40	40	40	40	
Target 3.4 :	**Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.**								
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	DINKES	%	<8,7	<8,7	<8,7	<8,7	<8,7	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES	%	<3,41	<3,41	<3,41	<3,41	<3,41	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINKES	%	<21,8	<21,8	<21,8	<21,8	<21,8	
Target 3.5 :	**Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	DINKES	Kasus	25	30	36	43	43	
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	DINKES	Kasus	8	9	11	13	13	
Target 3.7 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.**								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	DINSOSP2KBP3A	%	70,15	71,50	72,50	75	75	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DINKES	%	2,24	2,21	2,19	2,1	2,1	
Target 3.8 :	**Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.**								
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINKES	%	79,74	75,44	84,43	84,43	84,43	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 3.a :	**Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.**								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINKES	%	<30	<30	<30	<30	<30	
Target 3.b :	**Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.**								
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	DINKES	%	92,21	95	95	95	95	
Target 3.c :	**Meningkatkan secara signi kan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.**								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES	%	90	100	100	100	100	
Tujuan 4 :	**Mengakhiri Kemiskinan dalam Bentuk Apapun**								
Target 4.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.**								
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/sederajat,	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
	Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/sederajat	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
4.1.2(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	DISDIKBUD							
Target 4.5 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.**								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat,								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki- laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.								
	Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki-laki	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
	Rasio APK antara Perempuan dan laki-laki	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
Target 4.6 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.**								
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	IKK	%	100	100	100	100	100	
Target 4.a :	**Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).								
	Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 4.c :	**Pada tahun 2030, secara signi kan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.**								
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kuali kasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan								
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kuali kasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki serti kat pendidik.	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Tujuan 5 :	**Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**								
Target 5.2 :	**Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.**								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOSP2KBP3A							
	Cara Perhitungan Kekerasan Seksual: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	DINSOSP2KBP3A	%						

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Cara Perhitungan Kekerasan Fisik dan/atau Seksual: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	DINSOSP2KBP3A	%						
	Cara Perhitungan Kekerasan Emosional:	DINSOSP2KBP3A	%						

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%)								
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOSP2KBP3A	%	44	30	25	20	20	
Target 5.3 :	**Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.**								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15	DINSOSP2KBP3A							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun.								
	Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%)	DINSOSP2KBP3A	%						
	Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%)	DINSOSP2KBP3A	%						
Target 5.5 :	**Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b pemerintah daerah.								
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.								
	Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) dibagi dengan jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) dinyatakan dalam satuan persen (%)	BKPSDM	Orang	4	4	DM	DM	DM	
	Perempuan yang menduduki posisi manager di perusahaan miliki publik atau swasta sebagai pekerjaannya dibagi dengan jumlah seluruh jabatan manager	DINSOSP2KBP3A							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	dinyatakan dalam satuan persen (%).								
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI									
Tujuan 7 :	**Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua**								
Target 7.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern**								
7.1.1	Rasio elektrifikasi.	Perkim	%	94,00%	96,00%	98,00%	99,00%	99,00%	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Perkim	KWH/ Kapita	310,0	320,0	330,0	340,0	340,0	
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Bappelitbangda Kab. Wajo	Rumah Tangga	6750	4600	DM	DM	DM	
7.1.2. (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Bappelitbangda Kab. Wajo	Persen	0,1353	0,1835	DM	DM	DM	
Tujuan 8 :	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua**								
Target 8.1 :	**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.**								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	Persen	12,78	DM	DM	DM	DM	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	P-RPJMD	Juta Rupiah	58,83	49,59	49,62	49,68	49,68	
Target 8.2 :	**Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	DISNAKERTRANS	%	DM	DM	DM	DM	DM	
Target 8.3 :	**Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.**								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin.	DISNAKERTRANS	%	DM	DM	DM	DM	DM	
Target 8.5 :	**Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.**								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja.	DISNAKERTRANS	Rp/Jam	17,395	17,395	20,000	20,000	20,000	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DISNAKERTRANS	%	4,33	4,33	4,00	3,98	3,98	
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Tingkat setengah pengangguran.	DISNAKERTRANS	%	4,33	4,33	4,00	3,98	3,98	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 8.6 :	**Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.**								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DISNAKERTRANS	%	40	50	50	50	50	
Target 8.8 :	**Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.**								
8.8.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DISNAKERTRANS	Perusahaan	DM	DM	DM	DM	DM	
Target 8.9 :	**Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.**								
8.9.1*	Proporsi dan laju kontribusi pariwisata terhadap PDB.	BPS	%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Disporapar	Orang	0	500	550	600	600	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Disporapar	Orang	29,222	30	32	35	35	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	BPS	USD	0	55000	60500	66000	66000	
Target 8.10 :	**Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
8.10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa								
Tujuan 9 :	**Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelnjutan, serta mendorong inovasi**								
Target 9.1 :	**Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.**								
9.1.2 *	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	DISHUB	Org/Kg	76.840 Orang, 68.278.000 Kg	102.934 Orang, 71.692.000 Kg	106.848 Orang, 75.277.000 Kg	112.574 Orang, 79.041.000 Kg	112.574 Orang, 79.041.000 Kg	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DISHUB	Unit	1	1	1	1	1	
Target 9.2 :	**Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.**								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	DISPERINDAGKOP	%	3,03	3,05	3,06	3,06	3,06	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	DISPERINDAGKOP	%	4,97	4,98	5,00	5,00	5,00	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DISPERINDAGKOP	Orang	39.469	40	40.5	40.5	40.5	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 9.3 :	**Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.**								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DISPERINDAGKOP	Juta Rupiah	11.133,05	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	
Tujuan 10 :	**Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara**								
Target 10.1 :	**Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.**								
10.1.1*	Rasio Gini.	BPS	Poin	0,35	0,348	0,34	0,336	0,336	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DINSOSP2KBP3A	%	21,73	21,6	21,6	21,6	21,6	
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa	3	0	0	0	0	
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas PMD	Desa	2	6	10	15	15	
Target 10.2 :	**Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.**								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 10.3 :	**Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.**								
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	DINSOSP2KBP3A	Orang	34	30	25	23	23	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	DINSOSP2KBP3A	Orang	25	20	17	15	15	
10.3.1.(d)	dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi	DINSOSP2KBP3A	Dokumen	NA	DM	DM	DM	DM	
Target 10.4 :	**Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.**								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKERTRANS	%	100	100	100	100	100	
Tujuan 17 :	**Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan**								
Target 17.1 :	**Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKPD	%	0,73	0,75	0,75	0,75	0,75	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKPD	%	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKPD	%	11,74	12	12	12	12	
Target 17.6 :	**Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.**								
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	KOMINFOTIK	%	NA	NA	NA	NA	NA	
Target 17.8 :	**Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.**								
17.8.1*	Persentase pengguna internet	BPS	Persen	53,52	53,52	53,52	53,52	53,52	
Target 17.17 :	**Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	PMPTSP	dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	PMPTSP	Rupiah	NA	NA	NA	NA	NA	
Target 17.19 :	**Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.**								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	CAPIL	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
Tujuan 6 :	**Air Bersih dan Sanitasi Layak**								
Target 6.1 :	**Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua**								
6.1.1 *	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	PUPRP	%	88,53	88,98	89,47	90,03	90,03	
Target 6.2 :	**Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
6.2.1 *	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	PUPRP	%	90,12	90,54	90,98	91,34	91,34	
	Untuk akses terhadap fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	DINKES	%	67	74	81	88	88	
	Untuk akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama)	PUPRP	%	90,12	90,54	90,98	91,34	91,34	
	Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	DINKES	%	0	0	0	0	0	
	Untuk akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	PUPRP	%	97,86	97,86	97,86	97,86	97,86	
	Untuk akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	PUPRP	%	0	0,015	0,017	0,02	0,02	
Target 6.3 :	**Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	DLH	%	100	100	100	100	100	
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	DLH	Indeks	52,60	52,70	52,80	52,90	52,90	
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	DLH		DM	DM	DM	DM	DM	
Target 6.4 :	**Pada tahun 2030, secara signi kan meningkatkan e siensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signi kan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air**								
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	**PUPRP**	Persen	89	90	92	94	94	
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	**PUPRP**	Persen	60	62	65	67	67	
Tujuan 11 :	**Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan**								
Target 11.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.**								
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Perkim	%	94,68%	94,72%	94,75%	94,78%	94,78%	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 11.2 :	**Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua.**								
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	DISHUB							
Target 11.4 :	**Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia**								
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP) .	DISDIK/CAPIL	Rp	DM	DM	DM	DM	DM	
Target 11.5 :	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.**								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD							
	Jumlah korban meninggal	BPBD	Orang	DM	DM	DM	DM	DM	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Jumlah korban hilang	BPBD	Orang	DM	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah Korban Terluka	BPBD	Orang	DM	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah Korban Mengungsi	BPBD	Orang	DM	DM	DM	DM	DM	
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	BPBD	%	DM	DM	DM	DM	DM	
Target 11.6 :	**Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.**								
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	DLH	%	90,15	94,17	96,12	98,10	98,10	
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLH	Indeks	52,60	52,70	52,80	52,90	52,90	
Target 11.7 :	**Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas**								
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	DLH	%	20,04	20,05	20,06	20,07	20,07	
Target 11.b. :	**Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, e siensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
Target 11.c :	**Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.**								
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	PUPRP	ADA	TIDAK ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
Tujuan 12 :	**Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab**								
Target 12.5 :	**Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.**								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Ton/Thn	240,17	255,14	264,99	264,99	264,99	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 12.6 :	**Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.**								
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DISNAKERTRANS	Perusahaan	DM	DM	DM	DM	DM	
Target 12.7 :	**Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.**								
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	DLH	Unit						
Target 12.8 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.**								
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	DM	DM	DM	DM	DM	DM	
Target 12.b. :	**Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
Target 12.b.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.								
Tujuan 13 :	**Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya**								
Target 13.3 :	**Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.**								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	DISDIKBUD	Satuan Pendidikan						
PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA									
Tujuan 16 :	**perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh**								
Target 16.1 :	**Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.**								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POL-PP							
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POL-PP							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POL-PP							
Target 16.3 :	**Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.**								
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	POL-PP							
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	BAG. HUKUM							
	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi.	BAG. HUKUM							
	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum nonlitigasi.	BAG. HUKUM							
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan	BAG. HUKUM							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
	pembebasan biaya perkara								
	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum	BAG. HUKUM							
	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan	BAG. HUKUM							
	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara.	BAG. HUKUM							
Target 16.5 :	**Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.**								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	ITDA							
Target 16.6 :	**Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.**								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKPD	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	BPKPD	%	100	100	100	100	100	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	ITDA							
16.6.1.(c)	Persentaseinstansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	ITDA							
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	ITDA							
Target 16.7 :	**Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.**								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	%	10	10	10	10	10	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	%	4	4	DM	DM	DM	
Target 16.9 :	**Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.**								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	CAPIL	%	100	100	100	100	100	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	CAPIL	%	100	100	100	100	100	
Target 16.10 :	**Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.**								
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	DINSOSP2KBP3A	Orang	34	30	25	23	23	
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	DINSOSP2KBP3A	Orang	25	20	17	15	15	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun			Target Pencapaian		KET
				2021	2022	2023	2024	2025	
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifi asi Informatif.	KOMISI INFORMASI PUBLIK (KIP)	Badan Publik	83	83	83	83	83	

Sumber : KLHS RPJMD dan Laporan OPD Lingkup Kab. Wajo, 2024

2.3. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar. benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lingkup nasional provinsi dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya.

Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan memberikan pelayanan sesuai kewenangan masing.masing. Keberhasilan pencapaian target dari kegiatan dan program akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah dan lebih lanjut akan memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Wajo. Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan digunakan untuk mengetahui :

a. Tingkat capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten dengan rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten; dan

b. Tingkat capaian (penyerapan) anggaran yaitu membandingkan antara realisasi penyerapan dana/anggaran program dan kegiatan berdasarkan laporan realisasi APBD Kabupaten dengan pagu anggaran yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten.

Berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 diketahui jumlah program dari masing.masing perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada dan pada APBD Tahun 2018 terdapat 425 program dan 4.298 kegiatan. Jumlah program pada APBD Tahun 2018 sebenarnya hanya 111 judul atau nama program namun karena ada beberapa judul program yang sama dan digunakan di seluruh perangkat daerah maka jumlah seluruhnya menjadi 425 program.

Adapun penyerapan Anggaran yang masih kurang pada setiap Perangkat Daerah disebabkan oleh terjadinya defisit yang melebih target 3%. Namun secara umum faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas. prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Adapun Evaluasi dilakukan dengan menganalisis setiap capaian kinerja program dalam masing-masing urusan dengan membandingkan antara capaian yang telah dilakukan sampai saat ini dengan target akhir tahun kelima RPJMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Begitu pula dengan realisasi anggaran membanding antara anggaran yang telah digunakan sampai dengan tahun sekarang dengan pagu yang telah direncanakan dalam lima tahun RPJMD. Gambar lebih jelasnya dapat terlihat sebagai berikut :

1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Wajo melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah

sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis. efisien. dan efektif. ini bertujuan antara lain:

1. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program. Kegiatan dan Sub.kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel 2.379

Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Yang Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	RENJA PD	APBD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
5	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Yang Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	RENJA PD	APBD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
7	Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
9	Dinas sosial. Pengendalian Penduduk. KB. Pemberdayaan Perempuan. dan Perlindungan Anak	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0
10	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian. dan Pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Yang Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	RENJA PD	APBD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
12	Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
14	Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
15	Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Yang Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	RENJA PD	APBD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
19	Dinas Perikanan Kabupaten Wajo	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
21	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
22	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Yang Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	RENJA PD	APBD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
26	Dinas Pemuda. Olah Raga dan Parawisata Kabupaten Wajo	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
28	Kecamatan Tempe	3	4	4	4	3	4	4	3	1	0	0	1
29	Kecamatan Sabbangparu	5	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	1
30	Kecamatan Pammana	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
31	Kecamatan Bola	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
32	Kecamatan Takkalalla	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
33	Kecamatan Sajoanging	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
34	Kecamatan Majauleng	4	5	5	5	4	5	5	4	1	0	0	1

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Yang Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	RENJA PD	APBD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35	Kecamatan Tanasitolo	6	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	1
36	Kecamatan Belawa	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
37	Kecamatan Maniangpajo	4	5	5	5	4	5	5	4	1	0	0	1
38	Kecamatan Keera	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
39	Kecamatan Pitumpanua	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
40	Kecamatan Penrang	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
41	Kecamatan Gilireng	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
J U M L A H		**205**	**206**	**206**	**206**	**203**	**206**	**206**	**203**	**5**	**.**	**.**	**5**

Sumber : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021. Bappelitbangda. Tahun 2024

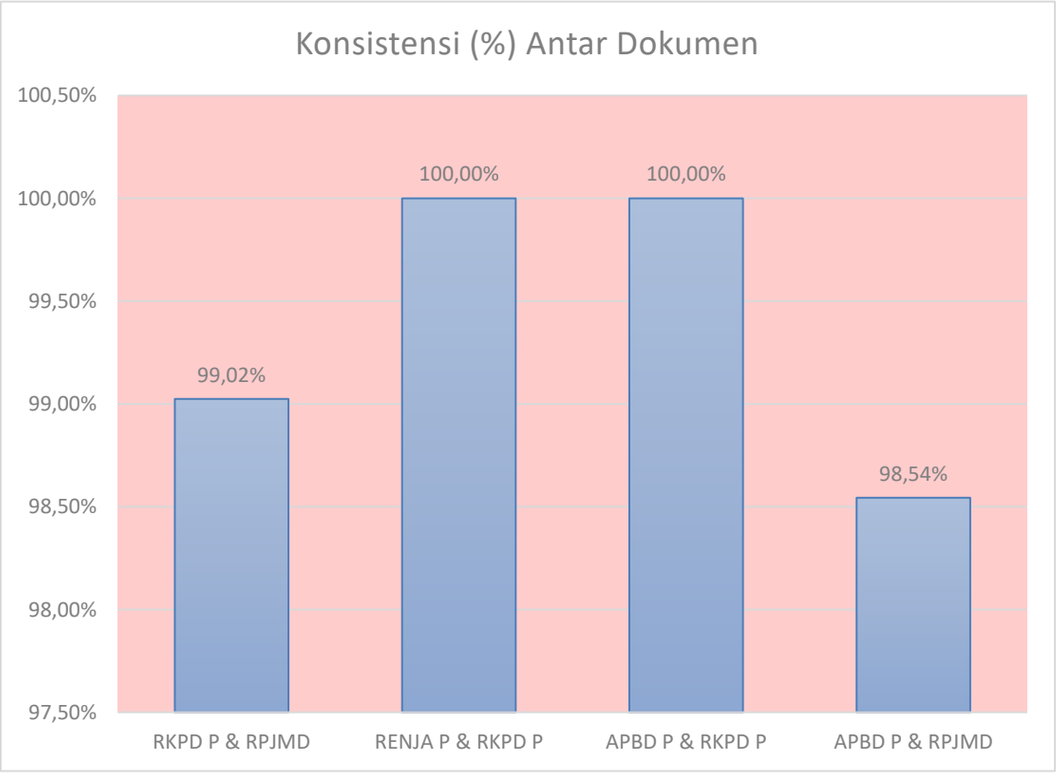
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 205 program (jumlah pada kolom 3). sedangkan jumlah program dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah 206 program (jumlah pada kolom 4). Dari sejumlah program dalam RKPD dan RPJMD tersebut. 203 program diantaranya (jumlah pada kolom 7) adalah program yang sama.sama ada dalam kedua dokumen. Sedangkan 5 program (jumlah pada kolom 11) merupakan program yang tidak sesuai antara RKPD dan RPJMD.
   b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat 2 program di RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD dan 3 program yang tidak terdapat dalam RPJMD.
2. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 206 program (jumlah pada kolom 4). sedangkan jumlah program dalam Renja PD adalah 206 program (jumlah pada kolom 5). Dari sejumlah program dalam RKPD dan Renja PD tersebut. terdapat 206 program yang sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 8).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja.PD sudah **konsisten.**
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 206 program (jumlah pada kolom 4). sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 206 program (jumlah pada kolom 6). Dari sejumlah program dalam RKPD dan APBD tersebut. terdapat 206 program yang sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 9).
   b. Antara dokumen RKPD dan APBD sudah **konsisten.**
4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 205 program (jumlah pada kolom 3). sedangkan jumlah program dalam Perubahan APBD Tahun 2021 adalah 206 program (jumlah pada kolom 6). Dari sejumlah program dalam APBD dan RPJMD tersebut. 203 program diantaranya (jumlah pada kolom 10) adalah program yang sama.sama ada dalam kedua

dokumen. Sedangkan 5 program (jumlah pada kolom 11) merupakan program yang tidak sesuai antara RKPD dan RPJMD.

b. Program yang tidak sesuai tersebut merupakan 2 program RPJMD yang tidak dijabarkan dalam APBD dan 3 Program pada APBD yang tidak terdapat dalam RPJMD.

Konsistensi antar dokumen dalam penjabaran program RPJMD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 2.14
Konsistensi Antar Dokumen

Menjadi hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra.PD. Kegiatan dalam Renstra.PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja.PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja.PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R.APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel 2.380

Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan yang Sama			Kegiatan yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA PD	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	16	16	16	16	16	16	.	.	.
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	20	20	20	20	20	20	.	.	.
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo	10	10	10	10	10	10	.	.	.
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo	9	9	9	9	9	9	.	.	.
5	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan	21	21	21	21	21	21	.	.	.
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11	11	11	11	11	11	.	.	.
7	Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14	14	14	14	14	14	.	.	.
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo	11	11	11	11	11	11	.	.	.

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan yang Sama			Kegiatan yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA PD	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Dinas sosial. Pengendalian Penduduk. KB. Pemberdayaan Perempuan. dan Perlindungan Anak	26	26	26	26	26	26	.	.	.
10	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian. dan Pengembangan Daerah	16	16	16	16	16	16	.	.	.
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	15	15	15	15	15	15	.	.	.
12	Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo	12	12	12	12	12	12	.	.	.
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	12	12	12	12	12	.	.	.
14	Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo	22	22	22	22	22	22	.	.	.
15	Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo	18	18	18	18	18	18	.	.	.
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo	13	13	13	13	13	13	.	.	.
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	7	6	7	6	6	.	1	1

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan yang Sama			Kegiatan yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA PD	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20	20	20	20	20	20	.	.	.
19	Dinas Perikanan Kabupaten Wajo	17	17	17	17	17	17	.	.	.
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo	15	15	15	15	15	15	.	.	.
21	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo	12	12	12	12	12	12	.	.	.
22	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	22	22	22	22	22	22	.	.	.
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo	15	15	15	15	15	15	.	.	.
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	15	15	16	15	15	15	.	1	1
25	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	12	12	12	12	12	12	.	.	.
26	Dinas Pemuda. Olah Raga dan Parawisata Kabupaten Wajo	13	13	13	13	13	13	.	.	.

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan yang Sama			Kegiatan yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA PD	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo	10	10	10	10	10	10	.	.	.
28	Kecamatan Tempe	9	9	10	9	9	9	.	1	1
29	Kecamatan Sabbangparu	10	10	10	10	10	10	.	.	.
30	Kecamatan Pammana	11	11	12	11	11	11	.	1	1
31	Kecamatan Bola	13	13	14	13	13	13	.	1	1
32	Kecamatan Takkalalla	11	11	11	11	11	11	.	.	.
33	Kecamatan Sajoanging	16	16	15	16	15	15	.	1	1
34	Kecamatan Majauleng	12	12	13	12	12	12	.	1	1
35	Kecamatan Tanasitolo	14	14	15	14	14	14	.	1	1
36	Kecamatan Belawa	12	12	13	12	12	12	.	1	1
37	Kecamatan Maniangpajo	13	13	14	13	13	13	.	1	1
38	Kecamatan Keera	11	11	12	11	10	10	.	3	3
39	Kecamatan Pitumpanua	10	10	10	10	10	10	.	.	.
40	Kecamatan Penrang	10	10	11	10	10	10	.	1	1
41	Kecamatan Gilireng	12	12	13	12	12	12	.	1	1
J U M L A H		**568**	**568**	**577**	**568**	**565**	**565**	**.**	**15**	**15**

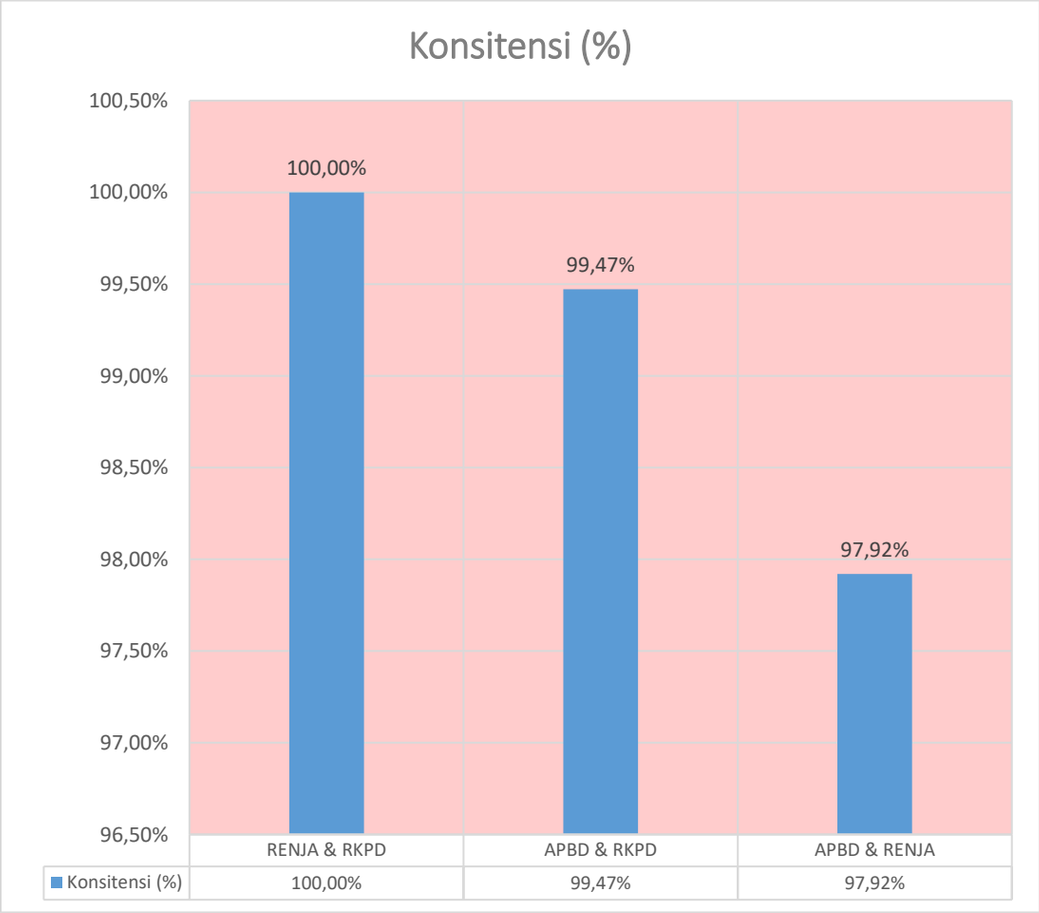
Sumber : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021. Bappelitbangda. Tahun 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan APBD
    a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 568 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 577 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 565 (jumlah pada kolom 7).
    b. Kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD adalah 3 kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD dan 12 kegiatan APBD yang tidak direncanakan dalam RKPD.
    c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 99.47%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang.

2. RKPD dan Renja PD
    a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 568 (jumlah pada kolom 3) dan Renja PD adalah sejumlah 568 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 568 (jumlah pada kolom 6).
    b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD dan Renja.PD telah sesuai.
    c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja.PD adalah sebesar 100 %.
3. Renja PD dan APBD
    a. Kegiatan dalam Renja PD adalah sejumlah 568 (jumlah pada kolom 4) dan APBD adalah sejumlah 577 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 565 (jumlah pada kolom 8). sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 15 (jumlah pada kolom 11).
    b. Kegiatan yang tidak sesuai antara Renja PD dan APBD adalah 3 kegiatan Renja PD yang tidak dianggarkan dalam APBD dan 12 kegiatan APBD yang tidak direncanakan dalam Renja PD.
    c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 97.92%.

Konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 2.15
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2021 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuatrincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja Perangkat daerah. RKPD terhadap APBD. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel 2.381
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan yang Sama			Sub Kegiatan yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA PD	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	76	76	76	76	76	76	.	.	.
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	75	75	75	75	75	75	.	.	.
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo	16	16	16	16	16	16	.	.	.
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo	15	15	15	15	15	15	.	.	.
5	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan	65	65	65	65	65	65	.	.	.
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30	30	30	30	30	30	.	.	.
7	Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39	39	39	39	39	39	.	.	.

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan yang Sama			Sub Kegiatan yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA PD	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo	18	18	18	18	18	18	.	.	.
9	Dinas sosial. Pengendalian Penduduk. KB. Pemberdayaan Perempuan. dan Perlindungan Anak	59	59	59	59	59	59	.	.	.
10	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian. dan Pengembangan Daerah	59	59	59	59	59	59	.	.	.
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	64	64	64	64	64	64	.	.	.
12	Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo	43	43	42	43	42	42	.	1	1
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25	25	25	25	24	24	.	2	2
14	Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo	69	69	69	69	69	69	.	.	.
15	Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo	55	55	56	55	55	55	.	1	1

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan yang Sama			Sub Kegiatan yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA PD	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo	50	50	50	50	50	50	.	.	.
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30	30	31	30	29	29	.	3	3
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48	48	48	48	48	48	.	.	.
19	Dinas Perikanan Kabupaten Wajo	35	35	35	35	35	35	.	.	.
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo	29	29	29	29	29	29	.	.	.
21	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo	28	28	28	28	28	28	.	.	.
22	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	50	50	50	50	50	50	.	.	.
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo	42	42	42	42	42	42	.	.	.
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	23	23	23	23	23	23	.	.	.

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan yang Sama			Sub Kegiatan yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA PD	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	36	36	36	36	36	36	.	.	.
26	Dinas Pemuda. Olah Raga dan Parawisata Kabupaten Wajo	24	24	24	24	24	24	.	.	.
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo	27	27	27	27	27	27	.	.	.
28	Kecamatan Tempe	22	22	24	22	22	22	.	2	2
29	Kecamatan Sabbangparu	23	23	24	23	23	23	.	1	1
30	Kecamatan Pammana	15	15	15	15	14	14	.	2	2
31	Kecamatan Bola	25	25	25	25	24	24	.	2	2
32	Kecamatan Takkalalla	27	27	28	27	27	27	.	1	1
33	Kecamatan Sajoanging	28	28	28	28	27	27	.	2	2
34	Kecamatan Majauleng	28	28	28	28	27	27	.	2	2
35	Kecamatan Tanasitolo	28	28	28	28	27	27	.	2	2
36	Kecamatan Belawa	25	25	26	25	25	25	.	1	1
37	Kecamatan Maniangpajo	26	26	26	26	26	26	.	.	.
38	Kecamatan Keera	20	20	19	20	18	18	.	3	3

No.	PerangKat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan yang Sama			Sub Kegiatan yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA PD	APBD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RENJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
39	Kecamatan Pitumpanua	22	22	22	22	21	21	.	2	2
40	Kecamatan Penrang	25	25	26	25	25	25	.	1	1
41	Kecamatan Gilireng	21	21	21	21	21	21	.	.	.
J U M L A H		**1.465**	**1.465**	**1.471**	**1.465**	**1.454**	**1.454**	**.**	**28**	**28**

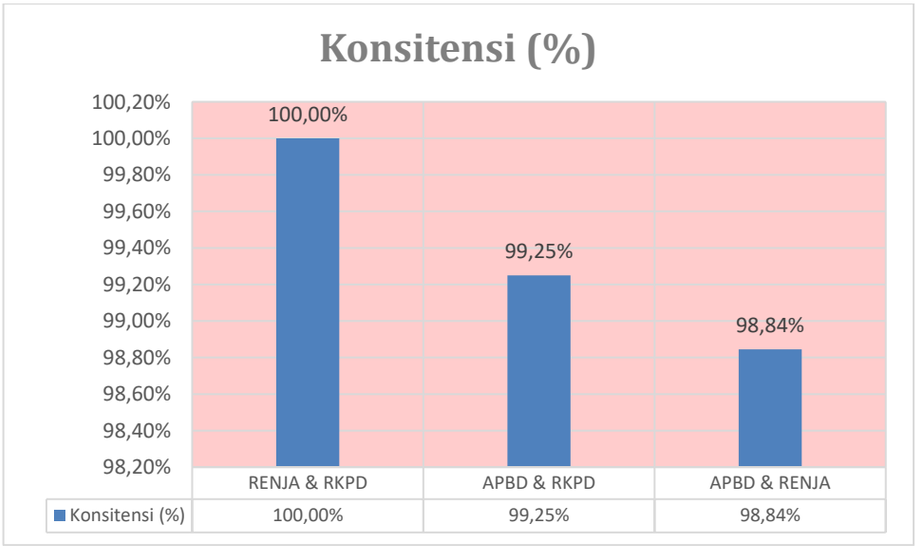
Sumber : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021. Bappelitbangda. Tahun 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut :

1. RKPD dan APBD
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.457 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1.471 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.454 (jumlah pada kolom 7). sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 28 (jumlah pada kolom 10).
   b. Dari sejumlah 28 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut. 11 sub kegiatan adalah sub kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD dan sisanya sejumlah 17 sub kegiatan adalah kegiatan yang ada dalam APBD yang tidak direncanakan dalam RKPD.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 99.25%.
2. RKPD dan Renja PD
   a. Sub kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.465 (jumlah pada kolom 3) dan Renja PD adalah sejumlah 1.465 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.465 (jumlah pada kolom 6).
   b. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja.PD adalah sebesar 100%.
3. Renja PD dan APBD
   a. Sub Kegiatan dalam Renja PD adalah sejumlah 1.465 (jumlah pada kolom 4) dan APBD adalah sejumlah 1.471 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.454 (jumlah pada kolom 8). sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 28 (jumlah pada kolom 11).
   b. Dari sejumlah 28 sub kegiatan yang tidak sesuai antara Renja PD dan APBD tersebut. 11 sub kegiatan adalah sub kegiatan Renja PD yang tidak dianggarkan dalam APBD dan sisanya sejumlah 17 sub kegiatan adalah sub kegiatan yang ada dalam APBD yang tidak direncanakan dalam Renja PD.

c. Persentase konsistensi kegiatan Renja.PD dan APBD adalah sebesar 98.84%

Konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 2.16
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

B. Penjabaran Kerangka Pendanaan

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD. APBD disusun berpedoman pada KUA.PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.382
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD

No.	PerangKat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD		
		RPJMD	RKPD		APBD				
		Rp	(Rp)	% RPJMD	(Rp)	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) . (3)	(7) = (5) . (4)	(8) = (5) . (3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	117.981.917.250	340.535.206.155.00	288.63%	339.015.206.155.00	287.35%	222.553.288.905	(1.520.000.000)	221.033.288.905
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	215.347.228.666	189.740.256.223.52	88.11%	192.766.456.224.00	89.51%	(25.606.972.442)	3.026.200.000	(22.580.772.442)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo		100.781.730.272.00	#DIV/0!	100.871.730.272.00	#DIV/0!	100.781.730.272	90.000.000	100.871.730.272
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo		20.202.974.546.00	#DIV/0!	20.202.974.546.00	#DIV/0!	20.202.974.546	.	20.202.974.546
5	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan	155.107.196.930	184.991.746.139.00	119.27%	184.899.946.139.00	119.21%	29.884.549.209	(91.800.000)	29.792.749.209
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.936.219.220	23.604.135.514.00	340.30%	23.804.135.514.00	343.19%	16.667.916.294	200.000.000	16.867.916.294

No.	PerangKat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD		
		RPJMD	RKPD		APBD				
		Rp	(Rp)	% RPJMD	(Rp)	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) . (3)	(7) = (5) . (4)	(8) = (5) . (3)
7	Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	682.664.200	12.164.214.065.00	1781.87%	12.189.427.265.00	1785.57%	11.481.549.865	25.213.200	11.506.763.065
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo	2.379.371.696	4.895.969.970.00	205.77%	4.895.969.970.00	205.77%	2.516.598.274	.	2.516.598.274
9	Dinas sosial. Pengendalian Penduduk. KB. Pemberdayaan Perempuan. dan Perlindungan Anak	6.851.069.650	12.793.010.818.00	186.73%	12.843.010.818.00	187.46%	5.941.941.168	50.000.000	5.991.941.168
10	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian. dan Pengembangan Daerah	4.263.073.170	11.227.622.224.00	5.18%	11.315.872.224.00	5.22%	(205.441.202.132)	88.250.000	(205.352.952.132)
11	Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah	216.668.824.356	245.615.787.247.00	8307.44%	242.889.368.927.00	8215.22%	242.659.209.447	(2.726.418.320)	239.932.791.127
12	Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo	2.956.577.800	12.168.019.973.00	411.56%	12.168.019.973.00	411.56%	9.211.442.173	.	9.211.442.173

No.	PerangKat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD		
		RPJMD	RKPD		APBD				
		Rp	(Rp)	% RPJMD	(Rp)	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) . (3)	(7) = (5) . (4)	(8) = (5) . (3)
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	345.330.000	4.526.290.636.00	1310.71%	4.526.290.636.00	1310.71%	4.180.960.636	.	4.180.960.636
14	Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo	15.741.841.950	44.122.574.060.00	280.29%	44.787.663.460.00	284.51%	28.380.732.110	665.089.400	29.045.821.510
15	Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo	11.394.711.056	39.141.921.392.00	343.51%	39.191.921.392.00	343.95%	27.747.210.336	50.000.000	27.797.210.336
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo	2.569.539.250	7.572.101.699.00	294.69%	7.572.101.699.00	294.69%	5.002.562.449	.	5.002.562.449
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.819.514.002	7.365.686.533.00	192.84%	7.265.686.533.00	190.23%	3.546.172.531	(100.000.000)	3.446.172.531
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.025.618.580	40.847.886.067.00	226.61%	41.116.286.067.00	228.10%	22.822.267.487	268.400.000	23.090.667.487
19	Dinas Perikanan Kabupaten Wajo	3.377.285.000	7.355.367.540.00	217.79%	7.525.367.540.00	222.82%	3.978.082.540	170.000.000	4.148.082.540
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo	357.890.830	5.989.805.343.00	1673.64%	5.989.805.343.00	1673.64%	5.631.914.513	.	5.631.914.513

No.	PerangKat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD		
		RPJMD	RKPD		APBD				
		Rp	(Rp)	% RPJMD	(Rp)	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) . (3)	(7) = (5) . (4)	(8) = (5) . (3)
21	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo	6.530.736.850	11.423.850.899.00	174.92%	11.448.520.899.00	175.30%	4.893.114.049	24.670.000	4.917.784.049
22	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	12.214.102.150	20.226.207.240.00	165.60%	20.301.207.240.00	166.21%	8.012.105.090	75.000.000	8.087.105.090
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo	887.600.000	3.838.345.404.00	432.44%	3.838.345.404.00	432.44%	2.950.745.404	.	2.950.745.404
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	3.514.033.000	9.038.089.675.00	257.20%	9.054.127.895.00	257.66%	5.524.056.675	16.038.220	5.540.094.895
25	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	5.488.119.000	9.306.839.562.00	169.58%	9.444.339.562.00	172.09%	3.818.720.562	137.500.000	3.956.220.562
26	Dinas Pemuda. Olah Raga dan Parawisata Kabupaten Wajo	4.970.469.200	9.184.999.285.00	184.79%	9.384.999.285.00	188.82%	4.214.530.085	200.000.000	4.414.530.085
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo	975.021.000	5.708.521.551.00	585.48%	5.708.521.551.00	585.48%	4.733.500.551	.	4.733.500.551

No.	PerangKat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggran OPD		
		RPJMD	RKPD		APBD				
		Rp	(Rp)	% RPJMD	(Rp)	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) . (3)	(7) = (5) . (4)	(8) = (5) . (3)
28	Kecamatan Tempe	3.904.934.550	38.905.844.866.00	5975.55%	38.905.844.866.00	5975.55%	38.254.760.876	.	38.254.760.876
29	Kecamatan Sabbangparu	1.134.850.000	17.331.952.797.00	1527.25%	17.331.952.797.00	1527.25%	16.197.102.797	.	16.197.102.797
30	Kecamatan Pammana	430.994.750	16.396.995.502.00	3804.45%	16.356.995.502.00	3795.17%	15.966.000.752	(40.000.000)	15.926.000.752
31	Kecamatan Bola	394.200.000	9.412.383.379.00	2387.72%	9.412.383.379.00	2387.72%	9.018.183.379	.	9.018.183.379
32	Kecamatan Takkalalla	773.999.999	10.000.992.798.00	1292.12%	10.000.992.798.00	1292.12%	9.226.992.799	.	9.226.992.799
33	Kecamatan Sajoanging	629.982.590	10.460.138.596.00	1660.39%	10.460.138.596.00	1660.39%	9.830.156.006	.	9.830.156.006
34	Kecamatan Majauleng	835.500.000	18.286.960.231.00	2188.74%	18.286.960.231.00	2188.74%	17.451.460.231	.	17.451.460.231
35	Kecamatan Tanasitolo	991.000.000	20.750.485.199.00	2093.89%	20.820.485.199.00	2100.96%	19.759.485.199	70.000.000	19.829.485.199
36	Kecamatan Belawa	651.083.990	13.122.881.536.00	2015.54%	13.122.881.536.00	2015.54%	12.471.797.546	.	12.471.797.546
37	Kecamatan Maniangpajo	15.000.000	11.556.153.833.00	77041.03%	11.556.153.833.00	77041.03%	11.541.153.833	.	11.541.153.833
38	Kecamatan Keera	215.500.000	7.570.743.687.00	3513.11%	7.570.743.687.00	3513.11%	7.355.243.687	.	7.355.243.687
39	Kecamatan Pitumpanua	1.000.502.200	14.603.114.556.00	1459.58%	14.603.114.556.00	1459.58%	13.602.612.356	.	13.602.612.356
40	Kecamatan Penrang	545.200.000	7.440.004.205.00	1364.64%	7.440.004.205.00	1364.64%	6.894.804.205	.	6.894.804.205
41	Kecamatan Gilireng	230.500.000	7.545.393.386.00	3273.49%	7.545.393.386.00	3273.49%	7.314.893.386	.	7.314.893.386
J U M L A H		**1.574.121.089.147**	**1.587.753.204.603.52**	**100.87%**	**1.588.431.347.104.00**	**100.91%**	**761.174.347.649**	**678.142.500**	**761.852.490.149**

Sumber : Evaluasi Hasil Terhadap Pelaksanaan RKPD Tahun 2023. Bappelitbangda. Tahun 2023

RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD. APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

C. Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023

Terkait penggambaran Pelaksanaan Capaian Kinerja pada sub kegiatan pada pelaksanan RKPD tahun 2021 terdapat 1.846 Subkegiatan dengan jumlah indikator sebanyak 3085 dengan rata-rata capaian kinerja outcome 87.49% dengan interpretasi Tinggi (T) dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 68.84% dengan interpretasi Sedang (S) untuk penggambaran pencapaian kinerja subkegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.383
Capaian Sub kegiatan Kabupaten Wajo Tahun 2023

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Sub Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Sub Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)		(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	76		20	6	43	7	151.85%	100.06%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	75		2	8	54	11	101.89%	86.05%	Sangat Tinggi	Tinggi
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo	16		2	4	10	0	94.06%	93.90%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo	15		0	3	12		79.13%	95.73%	Tinggi	Sangat Tinggi
5	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan	65		1	7	57	0.00%	92.57%	88.55%	Sangat Tinggi	Tinggi
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30		5	18	7	0	16.80%	97.19%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Sub Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Sub Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)		(7)	(8)
7	Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39		0	10	17	12	106.22%	97.38%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo	18		0	2	16		99.87%	98.40%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Dinas sosial. Pengendalian Penduduk. KB. Pemberdayaan Perempuan. dan Perlindungan Anak	59		3	6	50	0	93.33%	88.69%	Sangat Tinggi	Tinggi
10	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian. dan Pengembangan Daerah	59		0	0	59	0	93.33%	96.24%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
11	Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah	64		0	23	37	4	100.05%	96.99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
12	Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo	43	1	42	1	0	0	16.27%	85.29%	Sangat Rendah	Tinggi
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25	1	0	2	22	1	98.87%	94.42%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Sub Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Sub Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)		(7)	(8)
14	Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo	69		13	3	50	3	67.09%	92.80%	Sedang	Sangat Tinggi
15	Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo	55		3	7	26	19	1015.38%	88.02%	Sangat Tinggi	Tinggi
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo	50		1	4	41	4	215.20%	91.64%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30	1	1	0	28	1	189.91%	93.68%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48		0	7	33	8	903.36%	92.32%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
19	Dinas Perikanan Kabupaten Wajo	35		10	0	24	1	94.44%	95.45%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo	29		0	0	29	0	100.00%	96.97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Sub Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Sub Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)		(7)	(8)
21	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo	28		0	1	23	4	208.44%	96.65%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
22	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	50		1	14	33	2	104.40%	94.88%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo	42		0	16	26	0	98.98%	95.03%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	23		1	3	19	0	73.56%	97.73%	Sedang	Sangat Tinggi
25	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	36		1	0	31	4	99.84%	96.82%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
26	Dinas Pemuda. Olah Raga dan Parawisata Kabupaten Wajo	24		0	2	20	2	105.54%	88.58%	Sangat Tinggi	Tinggi
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo	27		0	8	18	1	98.95%	96.05%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
28	Kecamatan Tempe	22		22	0	0	0	0.00%	94.62%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Sub Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Sub Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)		(7)	(8)
29	Kecamatan Sabbangparu	23		19	3	1	0	1.93%	94.92%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Pammana	15	1	2	0	12	1	99.87%	94.04%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Bola	25	1	0	1	24	0	99.43%	94.74%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Takkalalla	27		27	0	0	0	0.00%	94.41%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Sajoanging	28	1	8	14	6	0	74.01%	95.06%	Sedang	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Majauleng	28	1	2	1	25	0	95.62%	95.03%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Tanasitolo	28	1	0	3	25	0	93.77%	93.03%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
36	Kecamatan Belawa	25		4	4	17	0	99.12%	94.91%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Sub Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Sub Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)		(7)	(8)
37	Kecamatan Maniangpajo	26		0	1	25	0	99.61%	94.79%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
38	Kecamatan Keera	20	2	2	1	15	2	241.34%	95.69%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
39	Kecamatan Pitumpanua	22	1	5	2	15	0	98.90%	95.14%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
40	Kecamatan Penrang	25		4	4	13	4	95.25%	93.78%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Gilireng	21		1	0	16	4	108.32%	94.93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
J U M L A H		**1.465**	**11**	**202**	**189**	**979**	**95**	**150.60%**	**66.19%**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Evaluasi Hasil Terhadap Pelaksanaan RKPD Tahun 2023. Bappelitbangda. Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian kinerja subkegiatan dengan jumlah sukegiatan sebanyak 1.465 menunjukkan pencapaian kinerja SubKegiatan yang mendapat predikat Sangat Tinggi (ST), dengan interpretasi pencapaian yakni terdapat 189 Subkegiatan yang belum tercapai. Tingkat capaian rata-rata kinerja maupun anggaran sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan setiap sub kegiatan dalam pencapaian kegiatan dan program. Oleh karena itu terkadang perangkat daerah yang tinggi daya serap anggarannya belum tentu memperoleh capaian rata-rata kinerja anggaran yang tinggi apabila pelaksanaan seluruh kegiatan tidak konsisten. Kemudian, capaian kinerja dan anggaran dimungkinkan lebih dari 100% apabila target dan pagu anggaran APBD lebih besar dibandingkan dengan target dan pagu indikatif RKPD. Hal penting lainnya yang menjadi catatan adalah indikator kinerja kegiatan (output) yang masih banyak kurang terukur atau tidak menunjukkan kinerja. misalnya “jumlah kegiatan”, “persentase”, “jumlah tahun”, “jumlah paket” dan lain-lain.

Adapaun Kegiatan dengan interpretasi sesuai sebanyak 568 dengan predikat predikat Sangat Tinggi (ST) dengan interpretasi pencapaian yakni 298 yang mencapai target. 42 melebihi target dan 79 yang tidak mencapai target. Adapun rata-rata capaian Perangkat Daerah adalah 95.31% untuk Kinerja dan 94.11% untuk Anggaran. Untuk lebih jelasanya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.384
Capaian Kegiatan Kabupaten Wajo Tahun 2023

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	16		15	0	0	1	0.07%	100.06%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	20		0	4	16	0	73.65%	86.05%	Sedang	Tinggi
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo	10		5	3	2	0	1.18%	93.90%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo	9		0	4	4	1	88.04%	95.73%	Tinggi	Sangat Tinggi
5	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan	21		0	1	20	0	99.96%	88.55%	Sangat Tinggi	Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11		11	0	0		0.00%	97.19%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14		1	0	10	3	171.52%	97.38%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo	11		0	2	8	1	99.29%	98.40%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Dinas sosial. Pengendalian Penduduk. KB. Pemberdayaan Perempuan. dan Perlindungan Anak	26		2	4	19	1	88.40%	88.69%	Tinggi	Tinggi
10	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian. dan Pengembangan Daerah	16		0	0	16	0	100.00%	96.24%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
11	Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah	15		0	1	10	4	100.17%	96.99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
12	Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo	12		12	0	0	0	0.00%	85.29%	Sangat Rendah	Tinggi
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12		0	3	7	2	161.47%	94.42%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
14	Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo	22		0	1	21	0	99.99%	92.80%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
15	Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo	18		1	3	5	9	918.13%	88.02%	Sangat Tinggi	Tinggi
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo	13		3	1	9	0	75.61%	91.64%	Tinggi	Sangat Tinggi
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	1	0	0	4	3	189.91%	93.68%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20		0	2	16	2	102.85%	92.32%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
19	Dinas Perikanan Kabupaten Wajo	17		5	0	12	0	55.96%	95.45%	Rendah	Sangat Tinggi
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo	15		0	0	15	0	100.00%	96.97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
21	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo	12		0	3	7	2	86.49%	96.65%	Tinggi	Sangat Tinggi
22	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	22		18	1	1	2	33.48%	94.88%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo	15		0	7	6	2	5647.02%	95.03%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	15		1	1	13	0	47.69%	97.73%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
25	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	12		0	4	8	0	203.03%	96.82%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
26	Dinas Pemuda. Olah Raga dan Parawisata Kabupaten Wajo	13		0	0	9	4	182.89%	88.58%	Sangat Tinggi	Tinggi
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo	10		0	2	8	0	98.68%	96.05%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
28	Kecamatan Tempe	9		9	0	0	0	0.00%	94.62%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Sabbangparu	10		10	0	0	0	0.00%	94.92%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Pammana	11		4	2	5	0	21.02%	94.04%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Bola	13		2	2	9	0	99.43%	94.74%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Takkalalla	11		11	0	0	0	0.00%	94.41%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
33	Kecamatan Sajoanging	16	1	10	6	0	0	1.26%	95.06%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Majauleng	12		1	0	11		99.74%	95.03%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Tanasitolo	14		10	3	1	0	0.70%	93.03%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
36	Kecamatan Belawa	12		1	6	4	1	99.12%	94.91%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
37	Kecamatan Maniangpajo	13		1	4	8	0	99.25%	94.79%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
38	Kecamatan Keera	11	1	8	0	2	1	94.97%	95.69%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
39	Kecamatan Pitumpanua	10		4	4	0	2	18.86%	95.14%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
40	Kecamatan Penrang	10		3	2	5	0	7.15%	93.78%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Gilireng	12		1	3	7	1	99.59%	94.93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
J U M L A H		**568**	**3**	**149**	**79**	**298**	**42**	**95.31%**	**94.11%**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Evaluasi Hasil Terhadap Pelaksanaan RKPD Tahun 2023. Bappelitbangda. Tahun 2023

Program dalam RKPD pada dasarnya terdiri dari program rutin, program pembangunan daerah dan program strategis perangkat daerah. Program rutin adalah program yang ada di setiap perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program pembangunan daerah adalah program yang langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi RPJMD. Sedangkan program strategis perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan. pelayanan maupun pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2023 berdasarkan Capaian Target Outcome Program yaitu:

Tabel 2.385
Capaian Program Kabupaten Wajo Tahun 2023

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Program						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Program	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	5		5	0	0	0	0.00%	100.06%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	5		1	0	4	0	95.80%	86.05%	Sangat Tinggi	Tinggi
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo	2		0	2	0	0	0.00%	93.90%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo	2		1	0	1		50.95%	95.73%	Rendah	Sangat Tinggi
5	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan	11		0	1	10	0	99.96%	88.55%	Sangat Tinggi	Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Program						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Program	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4		4	0	0	0	0.00%	97.19%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3		0	0	3	0	100.00%	97.38%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo	6		1	1	4	0	47.84%	98.40%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
9	Dinas sosial. Pengendalian Penduduk. KB. Pemberdayaan Perempuan. dan Perlindungan Anak	13		0	2	10	1	88.40%	88.69%	Tinggi	Tinggi
10	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian. dan Pengembangan Daerah	4		0	0	4	0	100.00%	96.24%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
11	Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah	4		0	1	1	2	98.25%	96.99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Program						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Program	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
12	Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo	3		3	0	0	0	0.00%	85.29%	Sangat Rendah	Tinggi
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6		0	3	1	2	161.14%	94.42%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
14	Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo	5		0	0	5	0	100.00%	92.80%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
15	Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo	2		0	0	1	1	101.54%	88.02%	Sangat Tinggi	Tinggi
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo	3		2	0	1	0	66.07%	91.64%	Sedang	Sangat Tinggi
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3		0	0	2	1	100.84%	93.68%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10			0	10		100.00%	92.32%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Program						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Program	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
19	Dinas Perikanan Kabupaten Wajo	5		2	0	3	0	86.34%	95.45%	Tinggi	Sangat Tinggi
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo	3		0	0	3	0	100.00%	96.97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
21	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo	7		0	5	0	2	86.49%	96.65%	Tinggi	Sangat Tinggi
22	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	14			0	13	1	6.77%	94.88%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Wajo	2		0	2	0		90.79%	95.03%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	8		0	0	8	0	100.00%	97.73%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
25	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	5		0	1	1	3	205.67%	96.82%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Program						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Program	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
26	Dinas Pemuda. Olah Raga dan Parawisata Kabupaten Wajo	6		0	0	6	0	100.00%	88.58%	Sangat Tinggi	Tinggi
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo	4		0	1	3	0	100.00%	96.05%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
28	Kecamatan Tempe	4		4	0	0	0	0.00%	94.62%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Sabbangparu	4		4	0	0	0	0.00%	94.92%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Pammana	3		1	1	1	0	18.07%	94.04%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Bola	5		2	0	3	0	97.62%	94.74%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Takkalalla	4		4	0	0	0	0.00%	94.41%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Program						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Program	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
33	Kecamatan Sajoanging	5		3	1	1	0	2.70%	95.06%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Majauleng	5		0	3	2	0	99.74%	95.03%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Tanasitolo	5		5	0	0	0	0.00%	93.03%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
36	Kecamatan Belawa	4		1	3	0	0	94.93%	94.91%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
37	Kecamatan Maniangpajo	5		0	2	3	0	99.25%	94.79%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
38	Kecamatan Keera	5		3	2	0	0	2.99%	95.69%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
39	Kecamatan Pitumpanua	3		1	2			17.67%	95.14%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi

No.	PerangKat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Program						Rata.Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Program	Non APBD	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian =100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)				(7)		(8)	
40	Kecamatan Penrang	4		2	1	1	0	32.51%	93.78%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Gilireng	5		0	0	5	0	100.00%	94.93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
J U M L A H		**206**	**.**	**49**	**34**	**110**	**13**	**59.24%**	**94.11%**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Evaluasi Hasil Terhadap Pelaksanaan RKPD Tahun 2023. Bappelitbangda. Tahun 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas diperoleh gambaran terkait pelaksanaan program antara lain sebagai berikut:

1. Dari total 206 program dalam RKPD. tidak terdapat program yang tidak dianggarkan dalam APBD.
2. Outcome yang tidak ada realisasinya adalah sejumlah 49. outcome yang tidak mencapai target adalah sejumlah 34, outcome yang capaiannya 100% adalah sejumlah 110 dan outcome yang capaiannya melebih target adalah sejumlah 13.
3. Rata-rata capaian perangkat daerah adalah 59.24%, dengan predikat kinerja “rendah” untuk kinerja output dan 94.11% untuk anggaran. dengan predikat kinerja “sangat tinggi”.
4. Terdapat 21 Perangkat Daerah yang capaian rata – rata kinerjanya dengan predikat kinerja “sangat tinggi”, 3 Perangkat Daerah yang capaian rata–rata kinerjanya dengan predikat kinerja “tinggi”, 1 Perangkat Daerah yang capaian rata – rata kinerjanya dengan predikat kinerja “sedang” dan 10 Perangkat Daerah yang capaian rata–rata kinerjanya dengan predikat kinerja “sangat rendah”.

Capaian rata–rata kinerja Perangkat Daerah pada outcome yang rendah disebabkan oleh:

1. Perangkat Daerah mengalami kesulitan dalam menghitung capaian dikarenakan rumus dari indikator outcome yang tidak terdefinisi dengan baik;
2. Adanya perbedaan indikator dan target pada dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
3. Target yang ditetapkan Perangkat Daerah kurang memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

D. Reviu Capaian Kinerja RPJMD terhadap RKPD

Reviu capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana. dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana. dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Reviu capaian kinerja RPJMD Kabupaten Wajo terhadap RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.386
Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD								Rata.rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
		Jumlah			Non APBD			Pagu dan Realiasi Anggaran						
		Program	Keg	Sub Keg	Program	Keg	Sub Keg	Pagu Indikatif	%	Realisasi	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		(6)	(7)		(8)	
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**34**	**116**	**368**	**0**	**0**	**0**	**878.746.728.387**	**55.34%**	**827.075.878.013**	**45.72%**	**94.12%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**
1.01	Pendidikan	2	13	73	0			340.414.906.155	21.44%	339.117.555.256	0.00%	99.62%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
1.02	Kesehatan	9	39	107	0			310.724.961.042	19.57%	279.938.754.556	63.76%	90.09%	Rendah	Sangat Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	18	62	0			181.749.964.939	11.45%	163.360.286.315	100.00%	89.88%	Sangat Tinggi	Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	11	30	0			23.604.135.514	1.49%	23.135.296.157	0.00%	98.01%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
1.05	Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	5	24	66	0			16.002.559.469	1.01%	15.517.670.689	97.80%	96.97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD								Rata.rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
		Jumlah			Non APBD			Pagu dan Realiasi Anggaran						
		Program	Keg	Sub Keg	Program	Keg	Sub Keg	Pagu Indikatif	%	Realisasi	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		(6)	(7)		(8)	
1.06	Sosial	6	11	30	0			6.250.201.268	0.39%	6.006.315.040	100.05%	96.10%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**60**	**131**	**290**	**0**	**1**	**2**	**69.470.753.374**	**4.38%**	**63.240.257.421**	**114.67%**	**91.03%**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
2.01	Tenaga Kerja	5	12	33	0			4.241.350.775	0.27%	4.125.605.789	100.00%	97.27%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	9	13	0			839.265.550	0.05%	625.378.180	92.63%	74.51%	Sangat Tinggi	Sedang
2.03	Pangan	4	6	9	0			1.726.383.790	0.11%	1.605.290.422	100.00%	92.99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.04	Pertanahan	3	3	3	0			3.241.781.200	0.20%	441.570.200	97.60%	13.62%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD								Rata.rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
		Jumlah			Non APBD			Pagu dan Realiasi Anggaran						
		Program	Keg	Sub Keg	Program	Keg	Sub Keg	Pagu Indikatif	%	Realisasi	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		(6)	(7)		(8)	
2.05	Lingkungan Hidup	7	12	28	0			11.423.850.899	0.72%	11.064.697.465	97.88%	96.86%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	11	23	0			5.708.521.551	0.36%	5.482.834.339	100.00%	96.05%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	8	30	0	1	1	7.365.686.533	0.46%	6.806.786.759	100.84%	92.41%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	6	16	0			5.703.544.000	0.36%	4.758.906.650	85.70%	83.44%	Tinggi	Tinggi
2.09	Perhubungan	3	15	29	0			5.989.805.343	0.38%	5.808.491.617	100.00%	96.97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.10	Komunikasi dan Informatika	3	9	32	0			9.135.669.562	0.58%	8.984.291.405	204.50%	98.34%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.11	Koperasi. Usaha Kecil. dan Menengah	5	5	6	0			1.158.803.050	0.07%	1.190.781.450	0.00%	102.76%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
2.12	Penanaman Modal	6	12	27	0		1	4.526.290.636	0.29%	4.273.802.738	161.14%	94.42%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD								Rata.rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
		Jumlah			Non APBD			Pagu dan Realiasi Anggaran						
		Program	Keg	Sub Keg	Program	Keg	Sub Keg	Pagu Indikatif	%	Realisasi	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		(6)	(7)		(8)	
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	3	13	24	0			8.058.280.985	0.51%	7.741.782.173	100.00%	96.07%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.14	Statistik	1	1	2	0			97.314.000	0.01%	90.575.334	100.00%	93.08%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.15	Persandian	1	2	2	0			73.856.000	0.00%	68.984.000	492.37%	93.40%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.16	Kebudayaan	3	3	3	0			120.300.000	0.01%	115.832.800	0.00%	96.29%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
2.17	Perpustakaan	1	2	8	0			50.049.500	0.00%	44.646.100	100.00%	89.20%	Sangat Tinggi	Tinggi
2.18	Kearsipan	1	2	2	0			10.000.000	0.00%	10.000.000	100.00%	100.00%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**26**	**54**	**118**	**0**	**0**	**0**	**71.467.731.207**	**4.50%**	**66.901.457.228**	**71.91%**	**93.61%**	**Sedang**	**Sangat Tinggi**

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD								Rata.rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
		Jumlah			Non APBD			Pagu dan Realiasi Anggaran						
		Program	Keg	Sub Keg	Program	Keg	Sub Keg	Pagu Indikatif	%	Realisasi	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		(6)	(7)		(8)	
3.01	Kelautan dan Perikanan	5	17	35	0			7.355.367.540	0.46%	7.183.137.168	86.34%	97.66%	Tinggi	Sangat Tinggi
3.02	Pariwisata	3	3	6	0			1.126.718.300	0.07%	571.831.100	100.00%	50.75%	Sangat Tinggi	Rendah
3.03	Pertanian	6	14	39	0			39.121.502.277	2.46%	36.353.237.300	100.00%	92.92%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.04	Kehutanan				0				0.00%		0.00%	0.00%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				0				0.00%		0.00%	0.00%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.06	Perdagangan	5	6	7	0			915.982.150	0.06%	812.292.300	0.00%	88.68%	Sangat Rendah	Tinggi
3.07	Perindustrian	4	11	22	0			18.151.422.040	1.14%	17.258.018.460	0.00%	95.08%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
3.08	Ketransmigrasian	3	3	9	0			4.796.738.900	0.30%	4.722.940.900	100.00%	98.46%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD								Rata.rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
		Jumlah			Non APBD			Pagu dan Realiasi Anggaran						
		Program	Keg	Sub Keg	Program	Keg	Sub Keg	Pagu Indikatif	%	Realisasi	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		(6)	(7)		(8)	
4	**Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan**	**5**	**37**	**115**	**0**	**0**	**0**	**83.204.445.952**	**5.24%**	**76.057.919.126**	**100.72%**	**91.41%**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
4.01	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan	5	37	115	0			83.204.445.952	5.24%	76.057.919.126	100.72%	91.41%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	**Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**11**	**44**	**173**	**0**	**0**	**0**	**264.415.511.170**	**16.65%**	**253.399.630.388**	**97.40%**	**95.83%**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
4.01	Perencanaan Pembangunan	3	13	51	0			9.685.202.724	0.61%	9.387.524.631	100.00%	96.93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4.02	Keuangan	4	15	64	0			245.615.787.247	15.47%	235.569.713.015	98.25%	95.91%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4.03	Kepegawaian	2	11	47	0			6.456.240.699	0.41%	5.847.915.469	77.48%	90.58%	Tinggi	Sangat Tinggi
	Pendidikan dan Pelatihan	1	2	3	0			1.115.861.000	0.07%	1.091.213.669	0.00%	97.79%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
4.04	Penelitian dan Pengembangan	1	3	8	0			1.542.419.500	0.10%	1.503.263.604	100.00%	97.46%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD									Rata.rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
		Jumlah			Non APBD			Pagu dan Realiasi Anggaran						
		Program	Keg	Sub Keg	Program	Keg	Sub Keg	Pagu Indikatif	%	Realisasi	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		(6)	(7)		(8)	
4	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**3**	**12**	**43**	**0**	**0**	**1**	**12.168.019.973**	**0.77%**	**10.378.441.645**	**0.00%**	**85.29%**	**Sangat Rendah**	**Tinggi**
4.02	Pengawasan	3	12	43	0		1	12.168.019.973	0.77%	10.378.441.645	0.00%	85.29%	Sangat Rendah	Tinggi
4	**Unsur Kewilahan**	**61**	**163**	**340**	**0**	**2**	**8**	**203.454.044.571**	**12.81%**	**192.418.694.759**	**30.27%**	**94.58%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**
4.02	Unsur Kewilahan	61	163	340	0	2	8	203.454.044.571	12.81%	192.418.694.759	30.27%	94.58%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
4	**Unsur Pemerintahan Umum**	**6**	**11**	**18**	**0**	**0**	**0**	**4.895.969.970**	**0.31%**	**4.817.758.604**	**99.29%**	**98.40%**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
4.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	18	0	0	0	4.895.969.970	0.31%	4.817.758.604	99.29%	98.40%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD									Rata.rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD			
		Jumlah			Non APBD			Pagu dan Realiasi Anggaran						
		Program	Keg	Sub Keg	Program	Keg	Sub Keg	Pagu Indikatif	%	Realisasi	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		(6)	(7)		(8)	
J U M L A H		206	568	1465	0	3	11	1.587.823.204.604	100.00%	1.494.290.037.184	59.24%	94.11%	Rendah	Sangat Tinggi

Sumber : Evaluasi Hasil Terhadap Pelaksanaan RKPD Tahun 2023. Bappelitbangda. Tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Wajo, antara lain yang dapat diuraikan adalah:

1. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah 45.72% dengan predikat “sangat rendah” dan keuangan 94.12% dengan predikat “sangat tinggi”;
2. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah 114.67% dengan predikat “sangat tinggi” dan keuangan 91.03% dengan predikat “sangat tinggi”;
3. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan adalah 71.91% dengan predikat “sedang” dan keuangan 93.61% dengan predikat “sangat tinggi”;
4. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan adalah 100.72% dengan predikat “sangat tinggi” dan keuangan 91.41% dengan predikat “sangat tinggi”;
5. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan adalah 97.40% dengan predikat “sangat tinggi” dan keuangan 95.83% dengan predikat “sangat tinggi”;
6. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah 0.00% dengan predikat “sangat rendah” dan keuangan 85.29%. dengan predikat “tinggi”;
7. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Unsur Kewilayahan adalah 30.27% dengan predikat “sangat rendah” dan keuangan 94.58% dengan predikat “tinggi”;
8. Unsur Pemerintahan Umum adalah 99.29% dengan predikat “sangat tinggi” dan keuangan 98.40% dengan predikat “sangat tinggi”.;

Rata-rata kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan adalah 59.24% dengan predikat “rendah” dan keuangan 94.11%. dengan predikat kinerja “sangat tinggi”.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Berdasarkan hasil Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2022 dapat terlihat bahwa adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja yang dihimpun dari seluruh OPD adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi OPD yang baik dan komitmen pimpinan untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
b. Sudah adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP
c. Anggaran yang disahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat.
d. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e. Adanya regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan.

Kemudian faktor penghambat keberhasilan kinerja yang dihimpun dari seluruh OPD sesuai dengan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Perubahan peraturan perundangan di tingkat pusat yang perlu dilakukan penyesuaian.
b. Ketidakmampuan dan profesionalisme SDM masih terbatas terutama di dalam menjalankan tupoksinya.
c. Lemahnya sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.

Memperhatikan hasil tersebut diatas maka dapat dianalisa bahwa keterkaitan Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD dengan permasalahan Pembangunan Daerah lain dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 387
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Hasil Evaluasi

No.	Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023	Permasalahan	Faktorfaktor Penentu Keberhasilan
1	Masih kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia	Terbatasnya SDM aparat perencana	Perekrutan jabatan fungsional perencana
		Rendahnya konsistensi perangkat daerah mempedomani program	Konsistensi program melalui sistem e.budgeting
		Rencana yang disusun belum menyentuh pokok persoalan	adanya tenaga fungsional peneliti
		Belum tertitbnya pengelolaan keuangan dan adaministrasi pelaksanaan program kegiatan	Monitoring dan pembinaan tata kelola administrasi dan keuangan pelaksanaan program kegiatan
		Belum optimalnya pendataan	Mengoptimlakan pendataan terhadap indeks kepuasan masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat	Mengoptimalkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
		Belum tersedia rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun	Struktur kelembagaan perangkat daerah yang proporsional
		Belum tersedianya kebijakan internal terkait pemenuhan kebutuhan PNS yang berasal dari instansi lain dan PPPK	Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang valid
		Belum tersedia kebijakan internal mengenai pengembangan karir berupa standar kompetensi jabatan pola karir pemetaan kompetensi dan talent pool	Penyusunan kebijakan internal mengenai pengadaan ASN melalui jalur PPPK
			Penyusunan kebijakan internal mengenai standar kompetensi jabatan pola karir pemetaan kompetensi dan *talent pool*
2	Belum Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kurangnya data / informasi pendukung	Koordinasi antar perangkat daerah
		Terbatasnya SDM aparat perencana	Perekrutan jabatan fungsional perencana
		Rendahnya konsistensi perangkat daerah mempedomani program	Konsistensi program melalui sistem e.planning
		Rendahnya konsistensi perangkat daerah mempedomani RTRW	Konsistensi perencanaan melalui pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
		Rencana yang disusun belum menyentuh pokok persoalan	adanya tenaga fungsional peneliti
		Minimnya anggaran yang tersedia	Terjadinya kerjasama dengan instansi yang bergerak di Badan Litbang
		Belum optimalnya kontribusi sektor.sektor unggulan	Mengoptimalkan produksi sektor.sektor unggulan
		Belum optimalnya kontribusi sektor-sektor unggulan	Mengoptimalkan produksi sektor.sektor unggulan
		Belum optimalnya pendataan	Mengoptimlakan pendataan terhadap indeks kepuasan masyarakat

No.	Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023	Permasalahan	Faktorfaktor Penentu Keberhasilan
		Rendahnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan	Pemantuan tindaklanjut hasil pemeriksaan
		Belum tertitbnya pengelolaan keuangan dan adaministrasi pelaksanaan program kegiatan	Monitoring dan pembinaan tata kelola administrasi dan keuangan pelaksanaan program kegiatan

Dan bahwa Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya untuk penyusunan RPJMD termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori.

Melihat pada rumusan permasalahan yang telah dianalisis berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Permasalahan Pembangunan Daerah dalam menentukan Priortitas Daerah dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.359
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Masalah	Akar Masalah	Program Pembangunan Daerah RPJMD Tahun berkenaan
1	Pemantapan sistem reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi;	Meningkatnya akuntabilitas, kapabilitas dan kualitas pelayanan publik	Belum optimlnya akuntabilitas, kapabilitas dan kualitas pelayanan publik	Masih rendahnya Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
				Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Kurang optimalnya Indeks Pelayanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk
					Program Pencatatan Sipil
				Masih rendahnya Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Program Kepegawaian Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Masalah	Akar Masalah	Program Pembangunan Daerah RPJMD Tahun berkenaan
				Masih rendahnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Masih rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik (SPBE)	Program Aplikasi Informatika
				Perangkat Daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Dimensi Pembangunan Desa	Belum optimalnya dimensi pembangunan Desa	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial	Program Pemerintahan Administrasi Desa
				Masih rendahnya Indeks Ketahanan Ekonomi	
				Masih rendahnya Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	
2	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia yang berkualitas & berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah Masih rendahnya angka Harapan Lama Sekolah	Kurang optimalnya Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
				Masih rendahnya akses pemerataan pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM)	Program Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masih rendahnya angka usia harapan hidup	Kurang optimalnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Masalah	Akar Masalah	Program Pembangunan Daerah RPJMD Tahun berkenaan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Meningkatnya daya beli masyarakat	belum optimalnya daya beli masyarakat	Masih rendahnya Pendapatan Perkapita	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Prioritas)
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Meningkatkan pengarusutamaan gender	Belum optimalnya kualitaspengarusutamaan gender	Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3	Menciptakan iklim demokrasi yang baik	Terpeliharanya kualitas berbangsa, bernegara dan beragama	Belum optimalnya kualitas kualitas berbangsa, bernegara dan beragama	Kurang optimalnya pemeliharaan ketentraman ketertiban dan kerukunan masyarakat	Persentase warga Negara Warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada
4	Pemantapan Infrastruktur terpadu untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan	Belum optimalnya konektivitas antar wilayah	Kurang optimalnya daya saing infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			Belum meratanya		Program Penyelenggaraan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Masalah	Akar Masalah	Program Pembangunan Daerah RPJMD Tahun berkenaan
			ketersediaan Infrastruktur dasar		Jalan (Prioritas)
				Kurang optimalnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
					Program Pengelolaan Pelayaran
			Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Program Pengeloalaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
					Program Pengelolaan Persampahan (Prioritas)
5	Pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatan pendapatan masyarakat yang merata dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pertumbu han ekonomi daerah	Masih timpangnya pendapatan masyarakat	Masih tinggi ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Masih rendahnya kualitas ekonomi daerah	Kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Masih rendahnya PDRB perkapita daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Belum optimalnya ketahanan pangan	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Pangan	Program Pemasaran Pariwisata
			Masih rendahnya kualitas ekonomi daerah	Kurang Optimalnya pengelolaan Potensi ekonomi daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Masalah	Akar Masalah	Program Pembangunan Daerah RPJMD Tahun berkenaan
					Program Pengembangan Ekspor
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Meningkatnya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin	Masih timpangnya pendapatan masyarakat	Masih tingginya angka kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial
		Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha		Masih tingginya angka pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Dalam perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 juga memperhatikan isu-isu strategis yang terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan isu yaitu isu strategis internasional, isu strategis nasional, dan isu strategis daerah untuk provinsi dan kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2. 360
Isu Strategis yang berdampak pada Kabupaten Wajo Tahun 2024

No	Isu Strategis			
	Internasional	Nasional	Tingkat Provinsi	Kabupaten Wajo
1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

No	Isu Strategis			
	Internasional	**Nasional**	**Tingkat Provinsi**	**Kabupaten Wajo**
2	Perubahan Iklim	Bonus Demografi	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
3	Transformasi Digital		Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian	Meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan permukiman;
4			Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kegiatan mitigasi bencana;
5			Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang inklusif;
6			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
7			Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah Jual)	Meningkatkan daya beli masyarakat;
8			Sulawesi Selatan sebagai poros maritim	Meningkatkan pengarusutamaan gender;
9				Menperkecil ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki;
10				Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
11				Meningkatkan kerukunan umat beragama;
12				Meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar masyarakat;
13				Meningkatkan fungsi dan aksesibilitas infrastruktur kewilayahan;
14				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;

No	Isu Strategis			
	Internasional	Nasional	Tingkat Provinsi	Kabupaten Wajo
15				Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
16				Meningkatkan kesehateraan masyarakat;dan
17				Menurunkan angka kemiskinan

2.4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang disusun menurut urusan pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk bekerjanya fungsi.fungsi yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah kabupaten guna mengatur dan mengurus fungsi.fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi melayani memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Adapun urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebanyak 6 (enam) urusan.

2.4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan pembangunan tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut.

1. Pendidikan

Adapun permasalahan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana PAUD
2. Kurangnya tenaga pendidik PAUD kualifikasi PGSDTK
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi mesyarakat terhadap pendidikan dasar 9 tahun.
4. Aksesibilitas antara lokasi sekolah dengan potensi siswa sekolah belum sesuai standar SPM
5. Kurangnya kualitas dan kuantitas laboratorium dan guru
6. Banyanya peserta didik yang tidak menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

7. Daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah masih rendah
8. Banyaknya peserta didik ditingkat SMP/MTs SMA/SMK/MA tidak melanjutkan pendidikan formal dengan memilih bekerja
9. Orang tua yang mempekerjan anak usia sekolah untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari.hari
10. Adanya siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian namun tida mengikuti ujian
11. Masih kurangnya daya tampung sekolah
12. Adanya sekolah dengan usia bangunan yang tua dan belum di rehabililtasi
13. Belum meratanya sebaran guru dan sekolah
14. Terbatasnya jumlah guru
15. Rendahnya angka melek huruf penduduk usia 15.24 tahun
16. Minimnya guru yang berijazah kualifikasi S1/D.IV

2. Kesehatan

Adapun permasalahan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Keterbatasan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2. Belum optimalnya upaya kesehatan masyarakat
3. Rendahnya pengawasan obat dan makanan
4. Belum optimalnya pengembangan obat bahan alam lokal
5. Belum optimalnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Belum optimalnya perbaikan gizi masyarakat
7. Belum optimalnya pengembangan lingkungan sehat
8. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
9. Belum optimalnya penerapan standarisasi pelayanan kesehatan
10. Belum optimalnya pelayanan kesehatan penduduk miskin
11. Belum optimalnya pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana puskesmas / puskesman pembantu dan jaringannya
12. Belum optimalnya pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
13. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
14. Belum optimalnya pemanfaatan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
15. Belum optimalnya pelayanan kesehatan anak balita
16. Belum optimalnya pelayanan kesehatan lansia
17. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

18. Belum optimalnya keselamatan ibu melahirkan dan anak
19. Terbatasnya jumlah dokter
20. Belum meratanya persebaran tenaga medis
21. Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun permasalahan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas jalan dan jembatan
2. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak sejalan dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan
3. Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman
4. Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air yang beralih fungsi
5. Terbatasnya ketersediaan sempadan jalan
6. Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi sendiri
7. Belum terpeliharanya sanitasi rumah tinggal
8. Masih kurang efektifnya pembangunan saluran drainase yang memperhatikan kondisi topografi wilayah Kabupaten Wajo
9. Daya tampung drainase secunder yang tidak maksimal
10. Jumlah wilayah rawan longsor yang meningkat setiap tahunnya
11. Tingginya intensitas banjir wilayah sungai/luapan air
12. Akses ke lokasi pelasanaan fisik sulit di jangkau
13. Kurangnya penyediaan akses air minum
14. Tingginya tingkat kerusakan saluran drainase / gorong.gorong
15. Belum meratanya pembangunan turap / talud / bornjong pada daerah rawan longsor dan rawan banjir
16. Belum optimalnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
17. Belum optimalnya rehabilitasi / pemeliharaan talud dan bronjong
18. Belum optimalnya inpeksi kondisi jalan dan jembatan
19. Terbatasnya rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
20. Terbatasnya sarana dan prasarana kebinamargaan
21. Terbatasnya rehabilitasi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawan dan jaringan pengairan lainnya
22. Terbatasnya penyediaan dan pengelolaan air baku
23. Belum optimalnya pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber daya air lainnya

24. Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
25. Belum optimalnya pengendalian banjir
26. Belum optimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
27. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
28. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh
29. Terbatasnya tempat pembuangan sampah
30. Peningkatan jumlah penduduk tidak sebanding dengan luasan TPU dan TPK Kabupaten Wajo yang cenderung tetap
31. Keterbatasan area pemakaman sehingga daya tampung terbatas
32. Belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya di kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No. 26/2017 tentang penataan ruang.
33. Tidak adanya alat yang dipergunakan untuk mengukur rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
34. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Adapun permasalahan pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum adanya peta sebaran rumah layak huni di Kab Wajo
2. Pertumbuhan permukiman semakin cepat tidak sebanding dengan penanganan kawasan permukiman kumuh
3. Pertumbuhan permukiman semakin cepat tidak sebanding dengan penanganan kawasan permukiman kumuh
4. Masih banyaknya rumah tidak layak huni
5. Belum optimalnya data terkait rumah layak huni terjangkau di Kab. Wajo
6. Belum optimalnya penanganan permukiman yang tertata
7. Pertumbuhan permukiman semakin cepat tidak sebanding dengan penanganan kawasan permukiman kumuh
8. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh di perkotaan
9. Belum optimalnya data terkait rumah tangga kumuh perkotaan
10. Belum optimalnya penyediaan PUS

5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun permasalahan pembangunan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum optimalnya intensitas cakupan petugas perlindungan masyarakat
2. Masih adanya pelanggaran K3 yang belum terselesaikan
3. Luasnya wilayah yang belum tercakup dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tidak terproteksi dari kebakaran
4. Terbatasnya lahan untuk pembangunan pos pemadaman kebakaran
5. Terbatasnya sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan
6. Masih terbatasnya aparatur Polisi Pamong Praja yang mempunyai kompetensi
7. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi PERDA.

6. Sosial

Adapun permasalahan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Penerimaan bantuan tidak tepat sasaran disebabkan tidak adanya data yang akurat
2. Proporsi alokasi dana untuk sosial bagi PMKS masih sangat minim
3. Tidak adanya kerjasama yang baik antar masyarakat dan dinas Sosial (Pemarintah) menangani PMKS ini
4. Kurangnya sosialisasi / penyuluhan kepada sasaran (PMKS) tentang PMKS dan PSKS itu sendiri sehingga PSKS tidak optimal dalam membantu pemerintah dalam penanganan penyaluran bantuan kepada PMKS
5. Belum tersedianya data persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
6. Belum lengkapnya data tentang persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
7. Belum lengkapnya data karena data yang terhimpun berdasar dari aduan / laporan dari kepala desa
8. Masih kurangnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial menerima jaminan sosisal

2.4.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebanyak 18 (delapan belas) urusan. Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan pembangunan tentang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut.

1. Tenaga Kerja

Adapun permasalahan pembangunan bidang tenaga kerja di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Tidak adanya kesepakatan tentang upah antara pengusaha dengan tenaga pekerja
2. Banyaknya kasus yang tercatat
3. Masih sedikitnya pencari kerja yang ditempatkan
4. Terbatasnya jamsostek bagi tenaga kerja
5. Tidak adanya kesepahaman antara pihak buruh dan pengusaha
6. Tidak tersedianya SDM yang memadai sebagai syarat mutlak di dasar menjadi pengawas ketenagakerjaan.
7. Masih kurangnya pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
8. Minimnya pegawai mediator yang dapat memediasi kasus perselisihan.
9. Beban tugas mediator yang disamping menangani kasus perselisihan juga ditangani pejabat struktural sebagai kasi Hubungan Industrial
10. Minimnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi
11. Minimnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi berbasis masyarakat
12. Minimnya tenaga kerja yang memiliki kemampuan kewirausahaan
13. Tinggi biaya pendidikan perguruan tinggi

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun permasalahan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Rendahnya akses dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
2. Rendahnya minat perempuan dan keterpilihannya di DPRD
3. Rendahnya akses dan partisipasi perempuan di lembaga swasta
4. Belum maksimalnya fungsi layanan KDRT
5. Rendahnya ekonomi keluarga

6. Terbatasnya sektor lapangan kerja khusus perempuan
7. Belum maksimalnya fungsi layanan KDRT
8. Belum maksimalnya fungsi layanan kesehatan
9. Belum tersedianya data tentang cakupan layanan rehabilitas sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
10. Belum maksimanya penegakan hukum atas kasus.kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
11. Belum maksimalnya fungsi layanan bantuan hukum korban KDRT
12. Data tentang cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang belum valid
13. Data tentang cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang belum valid
14. Lembaga pendidikan dasar yang belum merata
15. Banyaknya peserta didik (perempuan dan laki.laki) ditingkat SMP.MTs tidak melanjutkan pendidikan formal dengan memilih bekerja
16. Rendahnya Angka melek huruf penduduk usia 15 - 24 tahun (perempuan dan laki.laki)
17. Pekerjaan dalam pertanian yang tergantika dalam mesin

3. Pangan

Adapun permasalahan pembangunan bidang pangan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Terjadinya fuso atau gagal panen disebabkan karena musim kemarau banjir atau terserang hama.
2. Gabah petani dijual ke pengusaha dari luar Kabupaten Wajo
3. Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah
4. Belum optimalnya cadangan pangan masyarakat
5. Kurangnya jaminan Ketersediaan pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) yang Sehat aman dikomsumsi alami dan Mempunyai kandungan Gizi
6. Belum optimalnya Pemantauan dan Pengawasan Secara berkala pada pangan yang beredar baik di Pasar tradisional dan modern
7. Belum Optimalnya Pemantauan dan pengawasaan Secara berkala Pada produksi Pangan ditingkat Petani terutama Penggunaan pestisida

4. Pertanahan

Adapun permasalahan pembangunan bidang pertanahan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah
2. Terbatasnya jumlah kuota program sertifikat tanah gratis
3. Masih lemahnya penertiban dokumen tanah negara
4. Masih lemahnya penertiban penrbitan izin lokasi
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang izin lokasi

5. Lingkungan Hidup

Adapun permasalahan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum tersusunnya Dokumen RPPLH
2. Belum tersedianya dokumen RPPLH
3. Belum tersusunnya Dokumen KLHS Kabupaten Wajo
4. Kurangnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas air
5. Belum tersedianya sarana & prasarana pengujian kualitas udara
6. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tutupan lahan
7. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH
8. Belum adanya data tentang peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup yang valid
9. Belum adanya data tentang Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup yang valid.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun permasalahan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan pengurusan KTP
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan
3. Belum optimalnya pelayanan pengurusan akte kelahiran
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib ad. ministrasi kependudukan
5. Ketergantungan pada jaringan sistem informasi administrasi kependudukan
6. Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik
7. Belum optimalnya pelayanan pengurusan KTP

8. Belim optimalnya pelayanan penerbitan akta kelahiran

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun permasalahan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Adanya kantor desa dengan usia bangunan yang tua dan belum direhabilitasi
2. Masih adanya desa yang belum mempunyai kantor
3. Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
4. Data tentang kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) belum yang belum valid
5. Data tentang jumlah kelompok binaan PKK yang belum valid
6. Masih kurangnya kinerja kader LSM dalam pembangunan
7. Masih banyaknya lembaga masyarakat belum memahami tentang konsep pemberdayaan masyarakat pada kegiatan LPM
8. Masih kurangnya kinerja kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pembangunan
9. Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke posyandu
10. Masih kurangnya pengetahuan kader posyandu yang memahami pelayanan kesehatan dasar
11. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya swadaya masyarakat
12. Kurang melibatkan penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan
13. Kurangnya program pemberdayaan yang inovatif

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun permasalahan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Belum optimalnya penerapaan KB di masyarkat
3. Masih tingginya jumlah kelahiran
4. Masih rendahnya peran stakeholders terhadap program pembangunan daerah melalui Kampung KB
5. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program pengendalian penduduk

6. Data tentang Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk yang belum valid
7. Data tentang Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk yang belum valid
8. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK
9. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga
10. Masih kurangnya sosialisasi tentang program KB
11. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif
12. Kurangnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata
13. Rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
14. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
15. Tingkat unmet need masih tinggi
16. Kurangnnya akses dan kualitas pelayanan KB
17. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan
18. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi
19. Anggota Poktan BKB belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber.KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)
20. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
21. Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal
22. Terbatasnya jumlah dan kualitas PKB/PLKB dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
23. Partisipasi pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah
24. Terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan
25. Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar yaitu berkaitan dengan ketersediaan

26. Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan
27. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi data mikro keluarga di setiap desa
28. Rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi
29. Belum optimalnya pelaksanaan program kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan akn peran dan fungsi keluarga
30. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
31. Rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga
32. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga masih rendah

9. Perhubungan

Adapun permasalahan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Banyaknya Angkutan Umum yang menggunakan Plat Hitam
2. Masih kurangnya penindakan terhadap Angkutan Umum yang menggunakan Plat Hitam
3. Tidak adanya batasan wilayah / tempat tinggal terhadap pengajuan ijin trayek kendaraan
4. Beberapa pemilik kendaraan yang mengajukan ijin trayek bertempat tinggal di luar kabupaten Wajo
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Uji Kelayakan Teknis Angkutan Umum
6. Pemanfaatan Terminal Sawerigading yang belum bisa difungsikan/beroperasi
7. Masyarakat lebih memilih beralih menggunakan kendaraan rental
8. Kurangnya kerangka peraturan untuk melibatkan sektor swasta didalam investasi dan peningkatan pelayanan publik sarana dan prasarana transportasi
9. Masih kurangnya pelayanan dalam angkutan umum
10. Kepemilikan KIR angkutan Umum tidak berlaku per wilayah

11. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KIR angkutan umum
12. Masih kurangnya jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan
13. Rambu/Traffic light yang sudah perlu diremajakan
14. Vandalisme dikalangan Remaja
15. Tidak sebandingnya pertambahan jumlah kendaraan dengan panjang jalan
16. Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan baru
17. Banyaknya Angkutan Umum yang menggunakan Plat Hitam
18. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan yang layak sehingga masyarakat lebih memilih rental kendaraan
19. Masih banyaknya angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang tidak di Terminal

10. Komunikasi dan Informatika

Adapun permasalahan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah KIM yang dibentuk di Desa / Kelurahan sebagaimana yang di SK Bupati.kan
2. Kurangnya sosialisasi di masyarakat terkait pembentukan KIM
3. Belum tersedianya sarana telekomunikasi / tower di seluruh wilayah
4. Topografi Kab. Wajo yang bervariasi menjadikan area tangkapan / akses terhadap layanan telekomunikasi terbatas
5. Adanya batasan umur penggunaan HP / telekomunikasi sementara pembaginya adalah total penduduk
6. Kemampuan masyarakat yang masih terbatas
7. Kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan akan internet masih kurang
8. Kemampuan masyarakat yang masih terbatas

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Adapun permasalahan pembangunan bidang kopreasi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian
2. Kurangnya keterbukaan dan kerja sama antara anggota yang terdapat dalam koperasi
3. Koperasi tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT) selama 3 tahun berturut- turut

4. Masih kecilnya UKM non BPR/LKM aktif
5. Masih kecilnya BPR/LKM aktif
6. Kurangnya pemasaran hasil produksi UKM
7. Kurangnya permodalan yang dimiliki UKM
8. Kurangnya inovasi produk bagi UKM

12. Penanaman Modal

Adapun permasalahan pembangunan bidang penanaman modal di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Birokrasi pelayanan publik yang berbelit. belit
2. Kepastian hukum yang belum jelas
3. Persiapan di beberapa instansi pemerintahan belum menerapkan pelayanan terpadu satu pintu hal ini
4. Sumber daya manusia (ASN) yang belum kompeten
5. Belum maksimalnya investor melaporkan realisasi investasinya pertriwulan
6. Rendahnya tingkat pendidikan
7. Tidak tersedianya data realisasi investasi

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Adapun permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kinerja kader pemuda dalam pembangunan
2. Masih kurangnya wirausaha dalam usia muda
3. Belum optimalnya pembinaan olahraga
4. Kurangnya Pelatih yang bersertifikasi
5. Rendahnya pembinaan atlet muda
6. Minimnya prestasi atlet
7. Minimnya prestasi dalam olahraga

14. Statistik

Adapun permasalahan pembangunan bidang statistik di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Tidak adanya kerjasama per 2017
2. Ketersediaan data yang dibutuhkan masih kurang
3. Tidak adanya kerjasama terkait penyediaan buku PDRB kabupaten per Tahun 2017

15. Persandian

Adapun permasalahan pembangunan bidang persandian di Kabupaten Wajo adalah kurangnya pemahaman OPD dalam menggunakan sandi.

16. Kebudayaan

Adapun permasalahan pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Rendanya partispasi masyarakt
2. Belum optimalnya perlindungan cagar budaya
3. Masih kurangnya karyaa budaya yang direvitalisasi dan inventaris
4. Data tambahan untuk cagar budaya yang belum ada

17. Perpustakaan

Adapun permasalahan pembangunan bidang perpustakaan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Kurangnya mina masyarakat berkunjung ke perpustakaan
2. Belum memadainya sarana dan prasarana
3. Belum maksimalnya promosi perpustakaan
4. Kurangnya koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Jumlah perpustakaan tidak memadai untuk melayani jumlah penduduk di Kabupaten Wajo
6. Belum adanya gedung perpustakaan yang permanen dibangun di setiap kecamatan
7. Minimmya jumlah pengunjung yang msuk setiap hari di Perpustakaan
8. Kurangnya buku yang sesuai dengan subjek/judul yang dibutuhkan pengunjung
9. Belum tersedianya data tentang jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat
10. Belum adanya penerimaan CPNS dalam jabatan fungsional pustakawan di Kabupaten Wajo

18. Kearsipan

Adapun permasalahan pembangunan bidang kearsipan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum tertib kebijakan tentang kearsipan
2. Belum memadainya sarana dan prasarana kearsipan
3. Belum ada penerimaan CPNS dalam jabatan fungsional arsiparis di Kabupaten Wajo
4. Tidak ada peningkatan ilmu kearsipan

2.4.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebanyak 8 (delapan) urusan. Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan pembangunan tentang urusan pemerintahan pilihan sebagai berikut.

1. Pariwisata

Adapun permasalahan pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Objek daya tarik wisata di kabupaten wajo belum dikembangankan secara maksimal
2. Promosi pariwisata ke luar daerah belum di maksimalkan
3. Belum optimalnya promosi wisata
4. Belum berkualitasnya sarana dan prasarana obyek wisata
5. Rendahnya dukungan pihak swasta
6. Masih rendahnya PAD sektor pariwiasata

2. Pertanian

Adapun permasalahan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan lahan pertanian dan lahan tidur
2. Belum optimalnya pengelolaan palawija dan lahan tidur
3. Belum optimalnya pengelolaan lahan perkebunan dan lahan tidur
4. Masih relatif rendahnya kualitas dan kemampuan Petani dalam akses teknologi modal dan kelembangaan
5. Masih Rendahnya produksi lahan pertanian
6. Masih rendahnya Ketersediaan benih unggul
7. Kelembangan pertanian yang belum memiliki tanah yang kuat
8. Masih rendahnya pemahaman peteni dalam hal berkelompok

3. Perdagangan

Adapun permasalahan pembangunan bidang perdagangan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakaat tentang produk yangn dapat di ekspor
2. Rendahnya pembinaan kelompok pedagang / usaha formal

4. Perindustrian

Adapun permasalahan pembangunan bidang perindustrian di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Kurangnya permodalan untuk pengembangan kelompok pengrajin

5. Transmigrasi

Adapun permasalahan pembangunan bidang transmigrasi di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data tentang transmigrasi swakarsa

6. Kelautan dan Perikanan

Adapun permasalahan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Kurangnya inovasi yang ramah lingkungan terhadap pelaku perikanan
2. Sarana dan Prasarana belum maksimal terhadap pelaku perikanan.

2.4.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Selain itu juga terdapat fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebanyak 5 (lima) urusan. Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan pembangunan tentang funsgi penunjang urusan pemerintahan sebagai berikut.

1. Perencanaan

Adapun permasalahan pembangunan bidang perencanaan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Kurangnya data / informasi pendukung
2. Terbatasnya SDM aparat perencana
3. Kurangnya data / informasi pendukung
4. Terbatasnya SDM aparat perencana
5. Kurangnya data / informasi pendukung
6. Terbatasnya SDM aparat perencana
7. Kurangnya data / informasi pendukung
8. Terbatasnya SDM aparat perencana
9. Rendahnya konsistensi perangkat daerah mempedomani program
10. Rendahnya konsistensi perangkat daerah mempedomani RTRW

2. Keuangan

Adapun permasalahan pembangunan bidang keuangan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum tertibnya laporan tentang aset daerah
2. Adanya kegiatan yang tidak terlaksana pada OPD
3. Masih rendahnya belanja pendidikan
4. Masih rendahnya belanja kesehatan
5. Belanja tidak lansung yang masih besar
6. Belum optimalnya pengelolaan dana desa

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Adapun permasalahan pembangunan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai
2. Belum tersedia rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun
3. Belum tersedianya kebijakan internal terkait pemenuhan kebutuhan PNS yang berasal dari instansi lain dan PPPK
4. Belum tersedia kebijakan internal mengenai pengembangan karir berupa standar kompetensi jabatan pola karir pemetaan kompetensi dan talent pool.

4. Penelitian dan Pengembangan

Adapun permasalahan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga peneliti
2. Rencana yang disusun belum menyentuh pokok persoalan
3. Minimnya anggaran yang tersedia.

5. Pengawasan

Adapun permasalahan pembangunan bidang pengawasan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
2. Kedisplinan pegawai
3. Belum tertitbnya pengelolaan keuangan dan adaministrasi pelaksanaan program kegiatan.

6. Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Adapun permasalahan pembangunan bidang fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur
3. Rendahnya disiplin aparatur
4. Belum optimalnya fasilitas pindah / purna tugas PNS
5. Belum optimalnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
6. Belum optimalnya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
7. Belum optimalnya peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
8. Belum optimalnya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
9. Belum optimalnya penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan
10. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
11. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat
12. Belum optimalnya peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
13. Belum optimalnya penataan peraturan perundang.undangan
14. Belum optimalnya penataan daerah dan penyelesaian tapal batas administrasi antar wilayah.

2.5. Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki "penyakit-penyakit" di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset serta cultural set aparatur). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi. inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual. artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai.nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Kabupaten Wajo Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan melibatkan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Wajo telah menerbitkan beberapa inovasi. Adapun Penghargaan yang telah di terima oleh pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam rentang waktu tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.361
Penghargaan Inovasi yang Diterima Kabupaten Wajo

No.	Judul Inovasi	Penghargaan	Tahun	Diberikan Oleh

No.	Judul Inovasi	Penghargaan	Tahun	Diberikan Oleh
1	Promosi dan Konseling Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Keguguran	Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulsel	2019	Pemerintah Provinsi Sulsel
2	Vanamerator Hebat Tradisional	Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulsel	2021	Pemerintah Provinsi Sulsel
3	PANRITA (Pusat Informasi Perencanaan Berbasis Peta)	Juara 1 Lomba Inovasi Daerah kategori tata kelola Pemerintahan	2022	Pemerintah Kabupaten Wajo
4	Masker Pelita (Masyarakat Keera Peduli Disabilitas)	Top 99 inovasi pelayanan publik	2022	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Juara 3 Nakesdan tingkat nasional	2022	Kementerian Kesehatan
		Peringkat utama lomba inovasi puskesmas TK.nasional	2022	APKESMI
		Top 30 inovasi pelayanan publik	2022	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
		Juara 1 Nakesdan	2022	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
		Juara 1 Lomba Inovasi Daerah kategori Pelayanan Publik	2022	Pemerintah Kabupaten Wajo
5	SISWASPADA (SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH)	Juara 2 Lomba Inovasi Daerah kategori tata kelola Pemerintahan	2022	Pemerintah Kabupaten Wajo
6	PINISI (Pusat Informasi Perencanaan Berbasis NIK) Bappelitbangda	Juara 3 Lomba Inovasi Daerah kategori tata kelola Pemerintahan	2022	Pemerintah Kabupaten Wajo
7	TIKTOK JABLAY (Tangkap Ikan Tokke Jadikan Bahan Layak)	Juara 1 Lomba Inovasi Pelayanan Publik kategori Inovasi Lainnya yang menjadi Kewenangan Daerah	2022	Pemerintah Kabupaten Wajo

No.	Judul Inovasi	Penghargaan	Tahun	Diberikan Oleh
8	Black Box Media Alternatif Pengelola Sumber Daya Perikanan Berwawasan Lingkungan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Juara 3 Lomba Inovasi Daerah kategori Inovasi Lainnya yang menjadi Kewenangan Daerah	2022	Pemerintah Kabupaten Wajo
9	LAKTASI (Layanan Administrasi Kecamatan Terintegrasi)	Juara 2 Lomba Inovasi Daerah kategori Pelayanan Publik	2022	Pemerintah Kabupaten Wajo
10	SATGAS ADMINDUK PETAN (SATUAN TUGAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENDUDUK RENTAN)	Juara 3 Lomba Inovasi Pelayanan Publik	2022	Pemerintah Kabupaten Wajo
11	WA'EKO ber SUTRA (Pewarnaan Ekoprint pada sutera)	Top 6 Lomba Inovasi Daerah	2023	Pemerintah Kabupaten Wajo
12	RIDER MOMSIA (Reading Inovasi Demonstrasi Elaborasi dan Refleksi Momen Inersia)	Top 7 Lomba Inovasi Daerah	2023	Pemerintah Kabupaten Wajo
13	MAHARDIKA (Mengharmonisasikan Kinerja Individu dengan Kinerja Organisasi melalui Dialog Kinerja)	Top 8 Lomba Inovasi Daerah	2023	Pemerintah Kabupaten Wajo
14	Perbanyak Makan Ikan Gabus untuk Pencegahan Stunting (PAK GANTENG)	Top 3 Lomba Inovasi Daerah	2023	Pemerintah Kabupaten Wajo
15	SEHATI (SEHAT DI RUMAH - Layanan Homecare di Kabupaten Wajo)	Top 5 Lomba Inovasi Daerah	2023	Pemerintah Kabupaten Wajo
16	UPAYA PELESTARIAN BUDAYA MAQCACCA SEBAGAI STAR (South Celebes Culture Playing Card) DALAM MERAWAT MEMORI KOLEKTIF KEBUDAYAAN ANAK-ANAK DI KOTA SENGKANG KABUPATEN WAJO	Top 9 Lomba Inovasi Daerah	2023	Pemerintah Kabupaten Wajo
17	JEMARI INDAH SIAP SIAGA (Jemput dan Antar Ibu Bersalin dari/ke Rumah dengan Aplikasi Alarm Persalinan Siap Antar Jaga)	Top 1 Lomba Inovasi Daerah	2023	Pemerintah Kabupaten Wajo

Sumber : Bappelitbangda Kab. Wajo. Tahun 2023

Kemudian di Tahun 2020-2023, inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Wajo yang diterapkan ke Perangkat Daerah dan diaplikasikan langsung ke masyarakat dapat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2. 388
Inovasi Yang Dikembangkan Kabupaten Wajo Tahun 2020-2023

No.	Uraian Inovasi/Tahun	Lokasi Pengembangan	OPD
1	Oto Dottoro/2020	Kab. Wajo	Dinas Kesehatan
2	Masyarakat Keera Peduli Disabilitas (MASKER PELITA) / 2020	Desa Keera	UPT Puskesmas Keera
3	Layanan Pindah Datang (Sipaduppai) / 2020	Kab. Wajo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Pelayanan Online Administrasi Kependudukan melalui Telegram (Pentagram)/2020	Kab. Wajo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Solusi Mengatasi Antrian dengan Menggunakan Elektronik Android (Sumange'na)/2020	Kab. Wajo	RSUD Lamaddukkelleng
6	Bumdes Mart/2020	Desa Makmur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Penerapan Protokol Kesehatan di Toko Alizah/2020	Toko Alizah	---
8	Penerapan Protokol Kesehatan di Janji Jiwa Café/2020	Janji Jiwa Café	---
9	Penerapan Protokol Kesehatan di Hotel Eka/2020	Hotel Eka	---
10	Siswa Berani Membuat Video Pembelajaran Sendiri (SIRANI MEMBIDIK RANDI)/2021	SMPN 1 Sengkang	SMPN 1 Sengkang
11	Kartu Kontrol Penilaian Siswa (KATROL LISA PLUS SK)/2021	SMPN 1 Sengkang	SMPN 1 Sengkang
12	Pemanfaatan Aplikasi Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Android untuk Siswa Kelas Terbuka (MATA SILASRI TERBUKA)/2021	SMPN 5 Sengkang	SMPN 5 Sengkang
13	Sabtu Inspirasi, Sehari Membersamai Tokoh (SATURASI SEMBAKO)/2021	SMPN 5 Sengkang	SMPN 5 Sengkang
14	Perpustakaan Digital Berbasis Android/2021	SMKN 1 Wajo	SMKN 1 Wajo
15	Satuan Tugas Administrasi Kependudukan Pendudukan Rentan (SATGAS ADMINDUK PETAN)/2021	Kab. Wajo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Layanan Administrasi Kecamatan Terintegrasi (LAKTASI)/2021	Sengkang	Kantor Kecamatan Tempe

No.	Uraian Inovasi/Tahun	Lokasi Pengembangan	OPD
17	Gerakan Wajo Cari Jentik (Go Cantik)/2022	Kab. Wajo	Dinas Kesehatan
18	Pusat Informasi Perencanaan Berbasis NIK (Pinisi)/2020	Kab. Wajo	Bappelitbangda
19	Pusat Informasi Perencanaan Berbasis Peta (Panrita)/2021	Kab. Wajo	Bappelitbangda
20	Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah Inspektorat (SISWASPADA)/2021	Kab. Wajo	Inspektorat Daerah
21	Digitalisasi Rumah Inovasi Produk Pertanian/2022	Kecamatan Sabbangparu	Universitas Puang ri Maggalatung
22	Inovasi Peraga Fisika dari Limbah Plastik untuk Membuktikan Persamaan Momen Inersia/2020	UPT SMA Negeri 11 Wajo	UPT SMA Negeri 11 Wajo
23	Pembasmi Kecoa Ramah Lingkungan (BROMICOA)/2020	UPT SMA Negeri 11 Wajo	UPT SMA Negeri 11 Wajo
24	Bioarang Hemat Energi Ramah Lingkungan dari Kombinasi Limbah Bonggol Pisang dan Ampas Tebu (BOPIAT) /2020	UPT SMA Negeri 11 Wajo	UPT SMA Negeri 11 Wajo
25	Tangkap Ikan Tokke Jadikan Bahan Layak (TIKTOK JABLAY)/2021	Danau Tempe	Dinas Perikanan
26	Analisis Tanaman Akuatik Danau Tempe sebagai Fitoremediasi untuk Menghadapi Industri 4.0/2021	UPT SMA Negeri 11 Wajo	UPT SMA Negeri 11 Wajo
27	Black Box Media Alternatif Pengelola Sumber Daya Perikanan Berwawasan Lingkungan /2021	UPT SMA Negeri 11 Wajo	UPT SMA Negeri 11 Wajo
28	Inovasi Penggemukan Sapi Melalui Pakan (PERMEN SAPI)/2021	Kab. Wajo	Universitas Puang ri Maggalatung
29	Desain Prototype Lampu Panel Surya sebagai Alat Pengendali Hama Tanaman Padi /2021	Kab. Wajo	Universitas Puang ri Maggalatung
30	Model Pertanian Terapung/2021	Kecamatan Tempe	Universitas Puang ri Maggalatung
31	Usaha Lebah Madu Trigona (Rumah Madu Cinta)/2021	Kab. Wajo	Universitas Puang ri Maggalatung
32	TEMPE BERI TAHU/2023	Kecamatan Tempe	Kantor Kecamatan Tempe
33	WA'EKO ber SUTRA (Pewarnaan Ekoprint pada sutera)/2022	Kecamatan Tanasitolo	Universitas Puang ri Maggalatung
34	SEHATI (SEHAT DI RUMAH - Layanan Homecare di Kabupaten Wajo)/2022	Kecamatan Tempe	Medical Center Sengkang

No.	Uraian Inovasi/Tahun	Lokasi Pengembangan	OPD
35	UPAYA PELESTARIAN BUDAYA MAQCACCA SEBAGAI STAR (South Celebes Culture Playing Card) DALAM MERAWAT MEMORI KOLEKTIF KEBUDAYAAN ANAK-ANAK DI KOTA SENGKANG KABUPATEN WAJO/2022	UPT SDN 200 Tempe	Universitas Puang ri Maggalatung
36	JEMARI INDAH SIAP SIAGA (Jemput dan Antar Ibu Bersalin dari/ke Rumah dengan Aplikasi Alarm Persalinan Siap Antar Jaga)/2021	Kecamatan Keera	Puskesmas Keera
37	TEBAKAN JIWA (TEMUKAN, OBATI, dan PULIHKAN PENDERITA JIWA)/2023	Puskesmas Liu	Puskesmas Liu
38	SI BAPER MANTAP (APLIKASI BERBASIS PAPERLESS - MANAJEMEN DATA PUSKESMAS)/2023	Puskesmas Liu	Puskesmas Liu
39	SIPANTER (Sistem Pelayanan Maternal)/2021	Puskesmas Liu	Puskesmas Liu
40	GEMINDU (GERAKAN MOBILE POSBINDU)/2023	Puskesmas Liu	Puskesmas Liu
41	GO CANTIK (GERAKAN WAJO MENCARI JENTIK)/2022	Kab. Wajo	Dinas Kesehatan Kab. Wajo
42	WANGI SAKURA (WAJO TANGGULANGI HIPERTENSI DENGAN SADAR UKUR TEKANAN DARAH)/2022	Kab. Wajo	Dinas Kesehatan Kab. Wajo
43	RIDER MOMSIA (Reading Inovasi Demonstrasi Elaborasi dan Refleksi Momen Inersia)/2022	SMA 13 Wajo	SMA 13 Wajo
44	MAHARDIKA (Mengharmonisasikan Kinerja Individu dengan Kinerja Organisasi melalui Dialog Kinerja)/2023	Bappelitbangda	Bappelitbangda
45	Perbanyak Makan Ikan Gabus untuk Pencegahan Stunting (PAK GANTENG)/2022	Kab. Wajo	Dinas Kesehatan Kab. Wajo
46	SI MIA (Sistem Integrated Mobile Advertising)/2022	Kab. Wajo	PT. Wajo Amanah Multimedia

Sumber : Bappelitbangda Kab. Wajo. Tahun 2023

Inovasi yang dikembangkan tersebut, sangat membantu Pemda Wajo dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk kedepannya Bappelitbangda, Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah, Dikominfotik dan stakeholder terkait terus melakukan seleksi-seleksi terhadap inovasi.inovasi yang berkelanjutan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Wajo Tahun 2024 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2025 dapat digambarkan melalui kerangka ekonomi daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Dalam rangka memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusunlah berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan guna menghadapi tantangan dan permasalahan pembangunan untuk dilakukan penyelesaiannya melalui arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai sesuai sasaran program prioritas dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan. Hal lain juga menyangkut perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah yang dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah, tentunya tidak terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Olehnya itu, terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter dan sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global antara lain pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, serta pengaruh krisis keuangan yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

Melihat pada perkembangan dinamika ekonomi global dan kondisi perekonomian Kabupaten Wajo yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, dimana perkembangan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2022

mengalami perlambatan yang cukup signifikan, tahun 2023 dan tahun 2024 diproyeksikan pada kondisi optimis dengan diarahkan dan diupayakan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalam rangka menjaga perekonomian daerah berjalan sesuai dengan jalur yang benar juga perlu diciptakan kondisi keuangan yang mantap dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman dan layak secara ekonomis.

3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Melihat pada perkembangan dinamika ekonomi global dan kondisi perekonomian Kabupaten Wajo yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, dimana perkembangan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2022 hingga awal tahun 2024 perekonomian baik nasional dan daerah mulai mengalami peningkatan. Di tahun 2025 juga diproyeksikan perekonomian mengalami peningkatan dengan adanya peningkatan kegiatan masyarakat yang akan membuat konsumsi masyarakat meningkat. Dalam rangka menjaga perekonomian daerah berjalan sesuai dengan jalur yang benar juga perlu diciptakan kondisi keuangan yang mantap dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman dan layak secara ekonomis.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Wajo serta dengan mempertimbangan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta Program Prioritas periode 2025-2026 yang terangkum dalam Tujuan Sasaran RPD Tahun 2025-2026, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut:

Semakin meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung perekonomian;

1. Terbukanya pasar ekspor di wilayah ASEAN untuk produk lokal Kabupaten Wajo;
2. Iklim usaha yang kondusif dan relatif stabil serta kultur budaya yang ramah;
3. Pelayanan terpadu satu pintu hingga ke Kecamatan yang dilengkapi dengan aplikasi yang memberi kemudahan berinvestasi baik PMA maupun PMD;

4. Pengembangan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) melalui pembinaan para wirausahawan Baru;
5. Meningkatnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi unggulan regional;
6. Ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam regulasi yang pro investasi dan kemudahan investasi; dan
8. Berkembangnya potensi ekonomi daerah yang berbasis sektor unggulan.

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2021 hingga 2023 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali menjadi 6,40 persen. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo pada tahun 2025 antara lain; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan eceran yang sebelum menurun dikarenakan pembatasan jumlah penjual, sektor Pertambangan dan Penggalian yang berperan cukup signifikan dalm pertumbuhan ekonomi serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Global

Menjelang datangnya tahun 2024, perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan

inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Suasana geopolitik yang berubah
2. Terjadinya perang Rusia-Ukraina
3. Konflik Timur Tengah (Palestina-Israel)
4. Pesatnya perkembangan teknologi digital
5. Perubahan iklim
6. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda
7. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto
8. Tuntutan ekonomi keuangan hijau
9. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 5,17% (yoy)[1] dan pada akhir tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 5,05 % (C to C) . Kemudian pada tahun 2024 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,3 –5,9 % sedangkan tahun 2025 sebesar 5,3 –5,7%.

Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didukung oleh kondisi sektor keuangan tahun 2023 yang dinilai stabil dan resilien tercermin dari pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Di sektor pasar modal, IHSG posisi 30 November 2023 tercatat menguat sebesar 3,36% secara ytd ke level Rp7.080,74. Untuk sektor perbankan, kinerja intermediasi perbankan posisi Oktober 2023 tetap terjaga dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp6.902,98 triliun (tumbuh 8,99% secara yoy) dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

mencapai sebesar Rp8.198,80 triliun (tumbuh 3,43% secara yoy). Adapun untuk sektor keuangan non bank, akumulasi pendapatan premi Perusahaan Asuransi posisi Oktober 2023 mencapai sebesar Rp264,23 triliun (tumbuh 3,54% secara yoy) dan dari industri Perusahaan Pembiayaan, piutang pembiayaan mencapai Rp463,12 triliun (tumbuh sebesar 15,02% secara yoy)[2]. Capaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan tahun 2023 di atas, tentu patut kita syukuri bersama. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan kuat di tengah perlambatan perekonomian serta tingginya ketidakpastian global.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh positif, Pertumbuhan ekspor barang disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diprakirakan meningkat; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supply-demand beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran varian baru COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2025, walaupun perekonomian negara mitra dagang diprakirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor nonkomoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan

3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulsel diprakirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diprakirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diprakirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan wait and see investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2023 diprakirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diprakirakan juga tumbuh kuat, sejalan dengan konsumsi rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan tinggi pada tahun 2022.

Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel tahun 2023 diprakirakan kembali ke rentang sasaran 3,0±1,0% (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diprakirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2023.

3.1.1.5 Tantangan Perekonomian Daerah

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Wajo ke depan masih akan diperhadapkan pada beberapa tantangan akibat pengaruh dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif

serta diambil langkah-langkah yang lebih konkret. Adapun beberapa tantangan yang diprediksi akan dihadapi Kabupaten Wajo berupa :

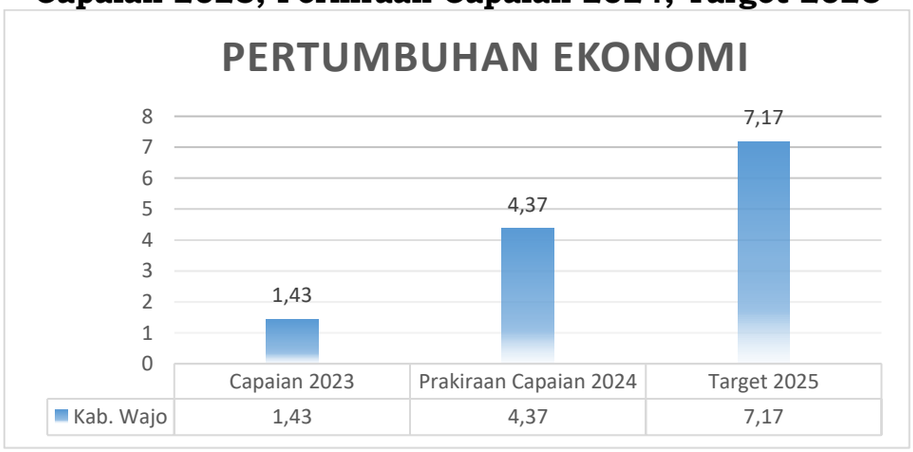
a. Terjadi penurunan harga komoditas ekspor dunia, sehingga berpengaruh pada nilai ekspor non migas;
b. Meningkatnya angka kemiskinan;
c. Meningkatnya angka pengangguran;
d. Menurunnya kunjungan wisata;
e. Menurunnya arus perdagangan;
f. Meningkatnya tuntutan konsumen akan produk yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
g. Masih tingginya resiko bencana alam dan mitigasi bencana;
h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan ekonomi yang bersifat strategis;
i. Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
j. Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
k. Menyediakan infrastuktur yang memadai dan berkualitas; dan
l. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan sumber daya manusia.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator makro ekonomi daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan ekonomi dapat diukur dengan salah satu indikator pereknomian secara makro adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertenu di bandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. PDRB terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasaar Harga Berlaku (ADHB). Penggunaan nilai atas dasar harga berlaku ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga sehingga perubahan yang di ukur merupakan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Wajo pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Nilai PDRB Wajo atas dasar harga konstan 2023, mencapai 14,09 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Wajo tahun 2023 melambat sebesar 0.95 persen dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar 2.38 persen. Berikut grafik Pertumbuhan Ekonomi.

Grafik 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo
Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024, Target 2025

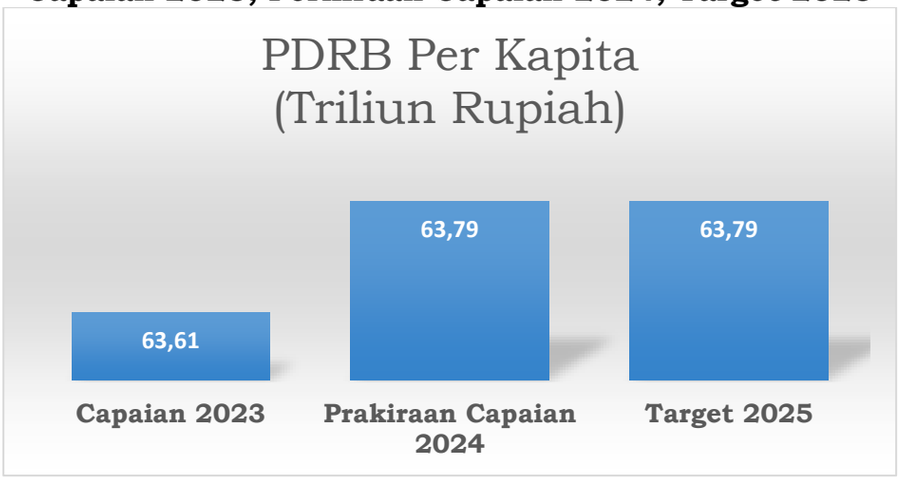


Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024

3.1.1.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk dan menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita pun merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Wajo, dengan perhitungan tahun berlaku, juga mengalami peningkatan yang siginifikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita Kabupaten Wajo pada tahun 2023 sebesar Rp 63.61 Juta Rupiah. Dan untuk tahun 2024, PDRB Perkapita perkiraan capaian sebesar Rp 63.79 Juta Rupiah. Berikut adalah grafik PDRB perkapita di Kabupaten Wajo.

Grafik 3. 2
PDRB Perkapita Kabupaten Wajo
Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024, Target 2025



Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024

3.1.1.5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan publikasi ILO *(International Labour Organization)*, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun.

Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Tingkat partisipasi umum yaitu jumlah angkatan kerja dibagi seluruh penduduk berumur 10 tahun keatas.

Adapun Persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wajo di tahun 2023 menurun menjadi 2.10% dari tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Wajo, maka Kabupaten Wajo

memperkirakan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada angka 2.44% di tahun 2024.

Grafik 3. 3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wajo
Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024, Target 2025



Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024

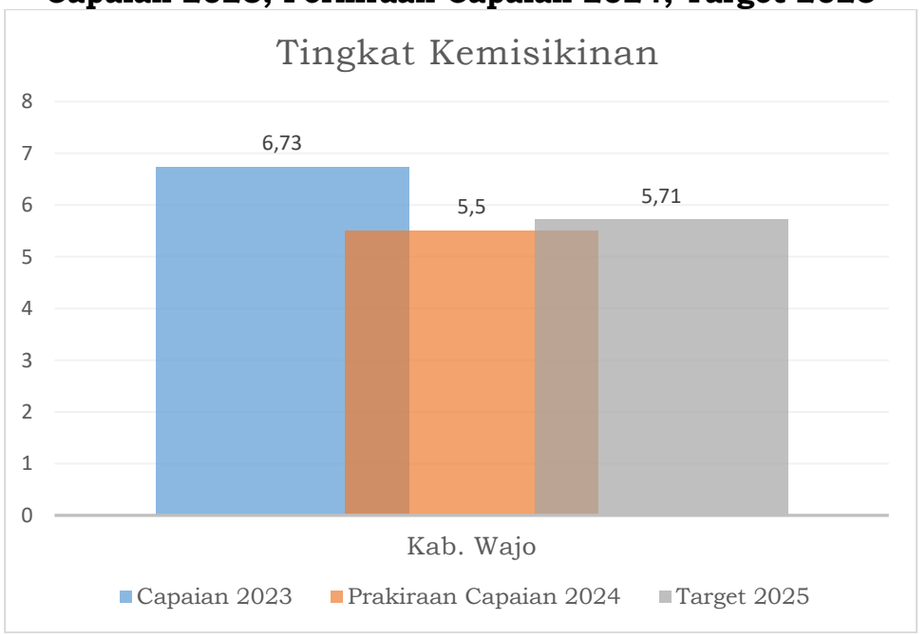
3.1.1.5.4 Tingkat Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo selama kurun waktu 2018-2023 cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo pada tahun 2023 sebesar 6,73%

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Di tahun 2024 Kabupaten Wajo perkiraan capaian tingkat kemiskinan sebesar 5.50%, dan menargetkan di tahun 2025 sebesar 5.71%. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada grafik berikut

Grafik 3. 4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wajo
Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024, Target 2025



Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2023

3.1.1.5.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang di lihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Di tahun 2023, IPM Kabupaten Wajo mencatat angka 71.10 dan di tahun 2024 Kabupaten Wajo menargetkan IPM di angka 70.13.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilllihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grafik di bawah ini.

Grafik 3. 5
IPM Kabupaten Wajo
Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024, Target 2025



Sumber : BPS. Diolah Bappelitbangda 2024

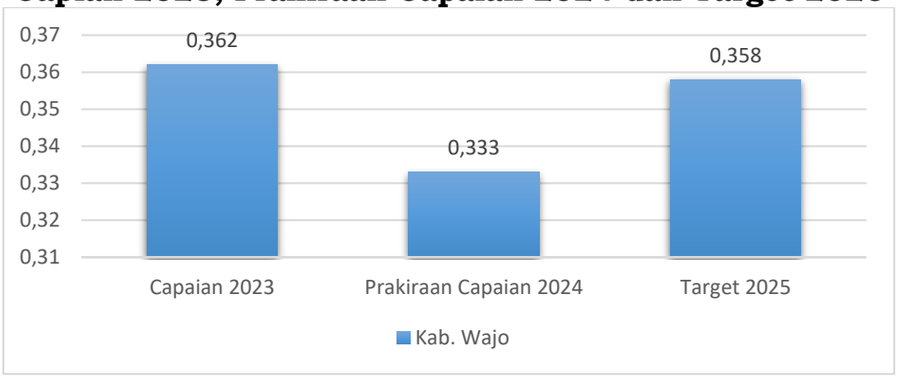
3.1.1.5.6 Indeks Gini

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang seringkali digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

1. Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan rendah
2. 0,3 ≤ Indeks Gini ≤ 0,5 = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini ≥ 0,5 = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Wajo selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menjukkan berada dikategori kelompok ketimpangan “moderat” karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0,4. Kondisi ini apabila dicermati lebih dalam, terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya menunjukkan adanya tendensi semakin menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin membaik.

Grafik 3. 6
Gini Ratio Kabupaten Wajo
Capian 2023, Prakiraan Capaian 2024 dan Target 2025



Sumber : BPS. Diolah Bappelitbangda 2023

Pergeseran angka indeks Gini Kabupaten Wajo yang semakin menurun memperlihatkan adanya pergeseran ke arah peningkatan pemerataan, yang pada dasarnya disebabkan oleh keseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Hal ini berarti bahwa percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh SDM yang tinggi sejalan dengan kelompok berpendapatan rendah, sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo. Namun demikian upaya tetap harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif, protektif, *pro poor, pro job dan pro invorement*.

Dengan melihat Indeks gini Rasio Kabupaten Wajo pada tahun 2023, Kabupaten Wajo memprakirakan capaian Gini Ratio di tahun 2024 di angka 0,333 dan menargetkan Gini Rasio di angka 0.349.

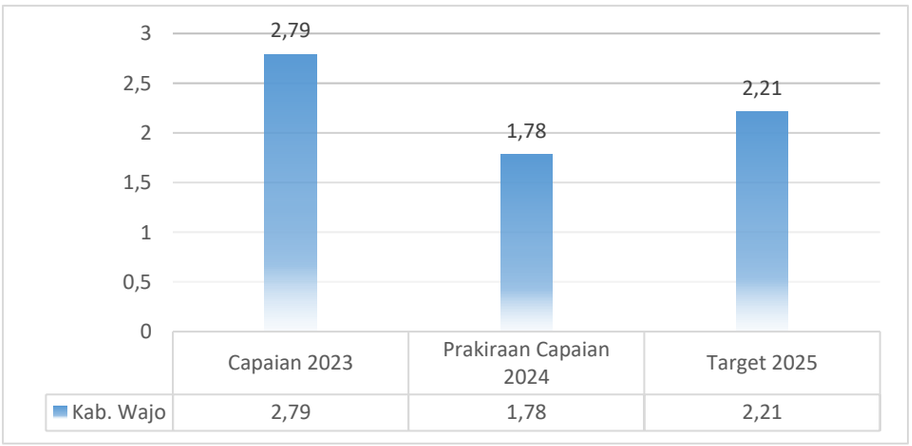
3.1.1.5.7 Inflasi

Inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Apabila inflasi meningkat maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan menurunnya nilai tukar mata uang. Keberadaan inflasi ini berhubungan dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan

oleh masyarakat dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan atau penurunan tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Laju inflasi Kabupaten Wajo tertinggi terjadi pada saat menjelang perayaan hari besar hari besar keagamaan dan musim liburan sekolah yang menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan barang/jasa jenis tertentu. Selain itu laju inflasi ini dipengaruhi juga faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa omoditas yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang selanjutnya akan memacu dan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Untuk lebih jelasnya berikut grafik nilai Inflasi Kabupaten Wajo pada grafik berikut ini:



4 **Proyeksi Ekonomi Makro**

Arah kebijakan ekonomi secara nasional menderivasi perekonomian daerah. Hal ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistic ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam peningkatan ekonomi makro, daerah perlu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat, kualitas dan produktivitas

tenaga kerja, memperkuat ekonomi bagi usaha kecil dan menengah, dan memperkuat bidang ekonomi lainnya.

Proyeksi untuk tahun 2025 dilakukan perhitungan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pada pencapaian target sampai dengan tahun 2024 terkait dengan adanya pencapaian baik yang melampaui target maupun yang dibawah target. Sedangkan untuk target sebelum 2024 tetap berpedoman pada penetapan indikator kinerja daerah sebelumnya. Proyeksi tahun 2025 dari indikator makro ekonomi daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Target RKPD Tahun 2025 Kabupaten Wajo

No	Indikator	Capaian 2023	Target RKPD Kab. Wajo 2025	Target RKPD Sulawesi Selatan	Target RKP Nasional 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	1,43	6.4		5,3-5,6
2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		63.79		
3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		14.89		
4	Persentase Penduduk Miskin	6,73	5.71		
5	TPT	2,1	2.44		
6	IPM	71,1	72.12		
7	Gini ratio	0,362	0.349		
8	Inflasi				

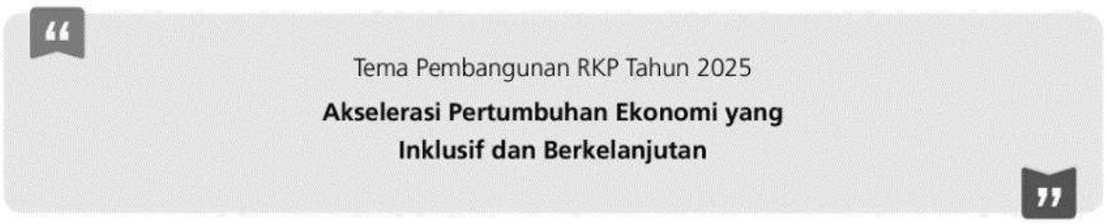
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer).

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Gambar 3. 1
Tema RKPD Tahun 2025

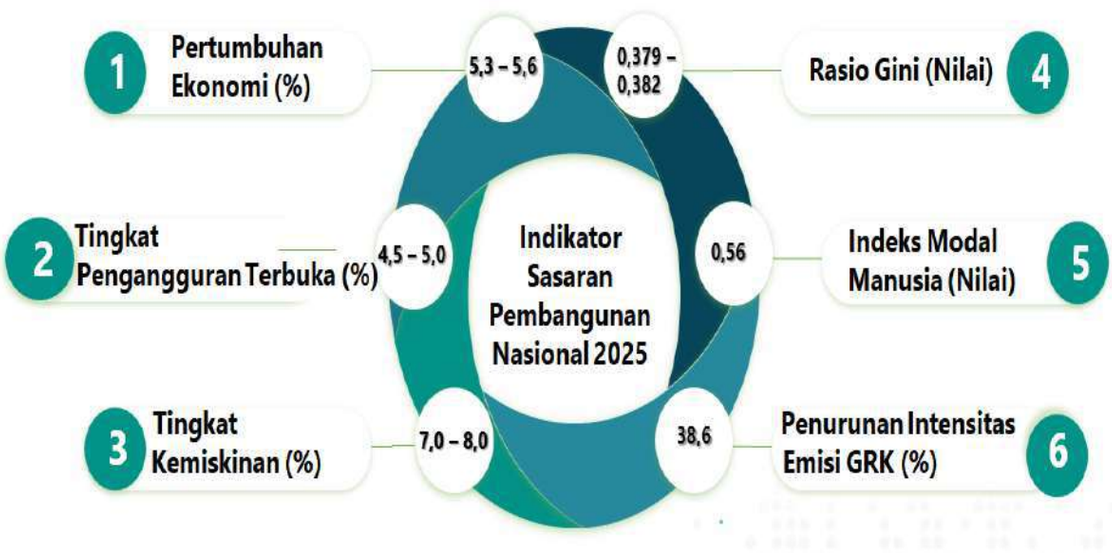


Gambar 3. 2
Arah Kebijakan RKP Tahun 2025



Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. 3
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2025, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
5. Menurunkan kemiskinan;
6. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
8. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;
11. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2023 dan kondisi perkembangan ekonomi tahun 2023, target tahun 2024 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Arah kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2023 maupun perkiraan tahun 2025, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Nasional untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ekonomi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang positif sebesar 4,51 % (c to c) pada tahun 2023, kondisi ini mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun 2023 sebelumnya yang mencapai 5,09 % (c to c). Ketegangan geopolitik

antarnegara yang terjadi antara rusia dengan ukraina serta konflik timur tengah, telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah terus melanjutkan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Dimulai dari perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (KIL}, kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, peningkatan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus {DTK) untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan jenis dana lainnya.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,67 – 6,82 persen; Tingkat Kemiskinan 8,20 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,03 persen; Gini Rasio 0,365; PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 74,55 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2025, diarahkan pada **"*Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing*",** dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (tata kelola), Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang

berkualitas dan merata (infrastuktur), Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (pengembangan wilayah dan hilirisasi), Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (Sosial Ekonomi), Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (Lingkungan Hidup), Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan tahun RPD Kabupaten Wajo tahun 2025 - 2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai arah kebijakan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/ non pajak (retribusi) untuk membayar artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi

pula. Di tahun 2023 pemerintah Kabupaten Wajo kebijakan pendapatan daerah mengarah pada peningkatan kemampuan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarkat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat, disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Untuk rencana Pendapatan Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 1,468,299,985,657 yang diproyeksikan bedasarkan potensi yang terukur dan rasional untuk dapat dicapai sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah saat ini.

Berdasarkan arah kebijakan umum pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024, maka starategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui:

1. Perbaikan manajemen pelayanan pendapatan terhadap semua potensi pendapatan daerah secara profesional, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia dengan pengoperasian alat bantu pencatatan pendapatan yang canggih serta prosedur pelayanan yang mudah dan cepat.
3. Peningkatan investasi dengan membangun iklim investasi usaha yang kondusif, disertai ketersediaan data dan sarana prasarana penunjang sehingga keterjangkauan investasi dapat secara merata, mudah dan cepat penyelesaiannya.

Arah Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2024 difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
2. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui pemungutan pajak dan pendataan secara menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi objek pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pemungutan sumber-sumber penerimaan baru yang potensial dan menguntungkan;
4. Optimalisasi penerimaan daerah melalui system digitalisasi transaksi

pemerintah daerah;

5. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah melalui sinergitas dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sekitar dan instansi terkait;
6. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;
7. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;

   Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;

3.2.1.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/ non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, OPD terkait harus

melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada :

1. Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatn pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Terdapat perbedaan pada struktur Pendapatan Daerah yang diatur PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan tersebut terdapat pada rincian pada pendapatan transfer. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, memberi rincian pada pendapatan transfer yaitu transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Dana Perimbangan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Selain itu terdapat rincian lain berupa dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Kemudian juga terdapat rincian pada transfer antardaerah yang tidak terdapat pada PP 58 Tahun 2005.

3.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.567.052.311.480. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Asli daerah diuraikan dalam beberapa jenis yakni:

1. **Pajak Daerah**

   Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber internal. Pada tahun pajak daerah 2025 diproyeksikan sebesar Rp 50.487.224.412, dengan rincian sebagai berikut: pajak hotel: Rp 320.000.000; pajak restoran: Rp 4.305.500.000,

pajak hiburan: Rp 71.000.000; pajak reklame: 2.310.000.000; pajak penerangan jalan: 18.449.605.750; pajak parkir: 54.000.000; pajak air tanah: 18.000.000; pajak sarang burung wallet: 51.498.000; pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya: 1.207.620.662; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: 18.700.000.000; bea perolehan hak katas tanah dan bangunan: 5.000.000.000.

2. **Retribusi Daerah**

   Retribusi daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan atau pemanfaatan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Di tahun 2025 retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp 16.997.448.000. Retribusi daerah tidak hanya berfungsi sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong penggunaan layanan publik secara efisien dan memastikan bahwa biaya penyediaan layanan dapata ditutup melalui kontribusi dan pengguna layanan tersebut.

3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 18.000.000.000. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat meningkatkan kapasitas finansial dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah.

4. **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

   Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 101.469.337.068.

3.2.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat. Rencana penerimaan pendapatan transfer pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.380.098.302.000.

3.2.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang sah dan legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya mengenai Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kabupaten Wajo Tahun 2022-2026

Uraian (sesuai PP 12/2019)	Realisasi		Tahun Berjalan	Proyeksi	Target
	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Daerah	**1.439.282.293.126,29**	**1.499.563.680.226,00**	**1.567.052.311.480,00**	**1.567.052.311.480,00**	**1.575.247.036.264,20**
Pendapatan Asli Daerah	**154.797.102.869,29**	**175.181.792.764,00**	**186.954.009.480,00**	**186.954.009.480,00**	**187.496.376.620,20**
Pajak Daerah	48.284.683.827,00	51.098.500.000,00	50.487.224.412,00	50.487.224.412,00	50.739.660.534,06
Retribusi Daerah	13.070.907.059,00	18.936.663.364,00	16.997.448.000,00	16.997.448.000,00	17.048.440.344,00
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	16.672.797.933,00	20.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.036.000.000,00
Lain-lain PAD yang sah	76.768.714.050,29	85.146.629.400,00	101.469.337.068,00	101.469.337.068,00	101.672.275.742,14
Pendapatan Transfer	**1.270.113.397.304,00**	**1.321.622.310.462,00**	**1.380.098.302.000,00**	**1.380.098.302.000,00**	**1.387.750.659.644,00**
Transfer dari Pemerintah Pusat	**1.186.392.788.319,00**	**1.228.480.454.851,00**	**1.300.625.624.000,00**	**1.300.625.624.000,00**	**1.308.039.563.610,00**
Dana Perimbangan	**1.067.088.436.319,00**	**1.077.726.947.851,00**	**1.184.775.398.000,00**	**1.184.775.398.000,00**	**1.191.610.086.480,00**
Dana Transfer Umum	**721.162.749.033,00**	**745.679.387.436,00**	**800.085.895.000,00**	**800.085.895.000,00**	**806.151.204.474,00**
Dana Transfer Khusus	**345.925.687.286,00**	**332.047.560.415,00**	**384.689.503.000,00**	**384.689.503.000,00**	**385.458.882.006,00**
Dana Insentif Daerah	**6.062.576.000,00**	**31.670.716.000,00**	**-**	**-**	**-**
Dana Desa	**113.241.776.000,00**	**119.082.791.000,00**	**115.850.226.000,00**	**115.850.226.000,00**	**116.429.477.130,00**
Transfer Antar Daerah	**83.720.608.985,00**	**93.141.855.611,00**	**79.472.678.000,00**	**79.472.678.000,00**	**79.711.096.034,00**
Pendapatan Bagi Hasil	73.783.137.269,00	75.701.855.611,00	75.132.678.000,00	75.132.678.000,00	75.358.076.034,00
Bantuan Keuangan	9.937.471.716,00	17.440.000.000,00	4.340.000.000,00	4.340.000.000,00	4.353.020.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**14.371.792.953,00**	**2.759.577.000,00**	**-**	**-**	**-**
Hibah	14.371.792.953,00	2.759.577.000,00	-	-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-

Tabel 3. 2
Proyeksi Alokasi APBD terhadap Urusan Wajib

Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
Pendidikan	244.891.852.363,00	94.449.800,00	0,00	0,00	244.986.302.163,00
Kesehatan	188.221.915.618,00	5.143.167.790,00	0,00	0,00	193.365.083.408,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.608.175.365,00	324.639.500,00	0,00	0,00	6.932.814.865,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.474.318.565,00	0,00	0,00	0,00	4.474.318.565,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.519.157.911,00	36.563.000,00	0,00	0,00	10.555.720.911,00
Sosial	6.585.463.217,00	2.500.000,00	0,00	0,00	6.587.963.217,00

Tabel 3. 3
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu 2025
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	359.156.296.163
2	Dinas Kesehatan	363.254.938.908
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	88.450.061.669
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	7.974.318.565
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.267.243.201
6	Badan Penangggulangan Bencana Daerah	2.951.124.910
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.989.976.217
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.636.613.849
9	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	46.078.460.864
10	Dinas Lingkungan Hidup	6.722.429.453
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.914.936.433
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.510.170.884
13	Dinas Perhubungan	5.437.347.253
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	6.837.254.265
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.788.627.966
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.262.080.362
17	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	48.743.570.063
18	Dinas Perikanan	3.916.472.064

No	Perangkat Daerah	Pagu 2025
19	Sekretariat Daerah	35.174.925.949
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.516.794.528
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	10.069.187.527
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	268.039.991.340
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.557.552.462
24	Inspektorat Daerah	11.987.522.188
25	Kecamatan Belawa	12.579.657.724
26	Kecamatan Bola	9.636.529.369
27	Kecamatan Gilireng	6.757.797.321
28	Kecamatan Keera	7.888.885.691
29	Kecamatan Majauleng	17.195.706.533
30	Kecamatan Maniangpajo	10.986.611.736
31	Kecamatan Pammana	14.345.573.483
32	Kecamatan Penrang	6.939.324.617
33	Kecamatan Pitumpanua	14.931.592.280
34	Kecamatan Sabbangparu	15.234.740.508
35	Kecamatan Sajoanging	10.332.965.152
36	Kecamatan Takkalalla	9.855.351.457
37	Kecamatan Tanasitolo	18.122.122.124
38	Kecamatan Tempe	37.227.269.214
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.780.287.188

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp. 1,567,052,311,480** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 1,111,866,204,666** Belanja Modal sebesar **Rp. 244,352,600,336** Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 10,000,000,000** serta Belanja Transfer sebesar **Rp. 2010,833,506,478** Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program /kegiatan pembangunan daerah tahun 2025.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan

belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal **(SPM)** di tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 224,756,828,981** atau **15.56 persen** dari total Belanja Daerah dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja Terhadap Urusan Wajib Mendasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

No.	Bidang	Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	122,539,976,720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	95,785,282,885	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4,609,600,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,578,290,000	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	440,000,000	Dinas Perumahan Dan Kawasam Permukiman
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87,445,500	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	344,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	300,000,000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,

No.	Bidang	Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	153,500,000	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
TOTAL			**224,756,828,981**	

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 - 2026. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Peemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Terdapat perbedaan pada struktur Belanja Daerah yang diatur

dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, perbedaan hanya pada klasifikasi belanja daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara efisien dan efektif, berdasarkan prioritas, disertai tolok ukur dan target kinerja, selektif, akuntabel dan transparan.

Untuk realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 s.d Tahun 2026

Uraian (sesuai PP 12/2019)	Realisasi		Tahun Berjalan	Proyeksi	Target
	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Daerah	**1,502,288,621,050.00**	**1,439,039,074,101.00**	**1,542,429,041,064.00**	**1,567,052,311,480.00**	**1,567,052,311,480.00**
Belanja Operasi	**1,004,106,580,355.00**	**1,050,089,641,785.00**	**1,087,242,934,250.00**	**1,111,866,204,666.00**	**1,111,866,204,666.00**
Belanja Pegawai	632,028,131,194.00	667,850,185,936.00	634,875,536,510.00	659,498,806,926.00	659,498,806,926.00
Belanja Barang dan Jasa	336,379,162,936.00	336,048,224,129.00	400,367,592,016.00	400,367,592,016.00	400,367,592,016.00
Belanja Bunga	3,186,313,729.00	2,182,305,743.00	616,628,248.00	616,628,248.00	616,628,248.00
Belanja Hibah	30,806,472,496.00	43,561,538,977.00	50,863,177,476.00	50,863,177,476.00	50,863,177,476.00
Belanja Bantuan Sosial	1,706,500,000.00	447,387,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00
Belanja Modal	**297,427,859,258.00**	**184,837,480,980.00**	**244,352,600,336.00**	**244,352,600,336.00**	**244,352,600,336.00**
Belanja Modal Tanah	4,448,000,000.00	788,000,000.00	3,172,568,000.00	3,172,568,000.00	3,172,568,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,237,648,271.00	22,421,737,839.00	33,881,379,739.00	33,881,379,739.00	33,881,379,739.00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	72,649,725,028.00	46,235,271,477.00	122,864,453,110.00	122,864,453,110.00	122,864,453,110.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163,857,035,596.00	110,410,655,354.00	77,972,780,462.00	77,972,780,462.00	77,972,780,462.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5,235,450,363.00	4,981,816,310.00	6,461,419,025.00	6,461,419,025.00	6,461,419,025.00
Belanja Tidak Terduga	**9,600,642,237.00**	**7,400,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**
Belanja Transfer	**191,153,539,200.00**	**196,711,951,336.00**	**200,833,506,478.00**	**200,833,506,478.00**	**200,833,506,478.00**
Belanja Bagi Hasil	5,820,253,400.00	6,484,850,436.00	6,996,572,878.00	6,996,572,878.00	6,996,572,878.00
Belanja Bantuan Keuangan	185,333,285,800.00	190,227,100,900.00	193,836,933,600.00	193,836,933,600.00	193,836,933,600.00

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp 1,567,052,311,480** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp 1,111,866,204,666** Belanja Modal sebesar **Rp 244,352,600,336** Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp 10,000,000,000** serta Belanja Transfer sebesar **Rp 200,833,506,478** Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program /kegiatan pembangunan daerah tahun 2025.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

3.2.3.1 Arah Kebijakan Penerimaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman obligasi,

transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Yang dimaksud dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. SiLPA bersumber dari:

a. Pelampauan penerimaan PAD;
b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
e. Penghematan belanja;
f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau;
g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Terkait dengan pencairan dana cadangan terdapat aturan sebagai berikut:

a. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan
b. Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
c. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
d. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
e. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
e. masyarakat.

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran cicilan pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

3.2.3.2 Arah Kebijakan Pengeluaran

Terkait dengan penyertaan modal, terdapat aturan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha milik negara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
b. Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
c. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan

modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

d. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Terkait dengan penggunaan Dana Cadangan, PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

a. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
   1) DAK;
   2) Pinjaman Daerah; dan
   3) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
d. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat dengan ketentuan bahwa pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD Persetujuan DPRD yang menjadi bagian yang disepakati dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pengeluaran Pembiayaan

lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Pembiayaan Daerah Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi dan proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun Berjalan Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Target Tahun 2026
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**42,198,747,320.00**	**-29,234,847,663.00**	**-24,623,270,416.00**	**-**	**-**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	55,792,256,386.00	6,813,076,865.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	a. Sisa Lebih SILPA	55,792,256,386.00	6,813,076,865.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	b. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	13,593,509,066.00	36,047,924,528.00	29,623,270,416.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	a. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8,593,509,066.00	29,547,924,528.00	24,623,270,416.00	-	-
	b. Penyertaan Modal Daerah	5,000,000,000.00	6,500,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Jumlah Pendapatan Daerah (3.1 - 3.2)		**42,198,747,320.00**	**-29,234,847,663.00**	**-24,623,270,416.00**	**-**	**-**

3.2.3.3 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Wajo mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.2.3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Wajo selain bersumber dari APBD Kabupaten Wajo, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi.

3.2.3.5 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan selain APBN dan APBD Kabupaten Wajo yang perlu dimaksimalkan yaitu Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL lebih diutamakan pada program yang mendukung prioritas daerah serta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berikesinambungan dan

berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Tabel 3. 7
Mitra Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggunag Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSl) Yang Mendukung Pembangunan Daerah di Kabupaten Wajo

No	Lembaga	Program	Fokus Kegiatan
1	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Sengkang	Gerakan Bumi Hijau	1.Pengadaan bola sampah sehat 2. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pertanian kelompok tani
2	PT. South Sulawesi LNG (SS LNG)	Sosial Lingkungan Hidup	1. Pemasangan listrik gratis bagi wrag kurang mampu 2. Perbaikan jalan desa dan drainase 3. Pembuatan Jembatan akses usaha tambak dan nelayan
3	PT. Bank Sulselbar Sengkang	Penguatan UMKM dan Pendidikan	
4	PT. Bank BRI Cabang Sengkang	Sosial Lingkungan Hidup	

3.2.3.6 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Ekonomi dan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Direktur Perencanaan Pembangunan Nasional Agensi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Direktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Ekonomi dalam Pembangunan

Infrastruktur: Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pelaku ekonomi.

Situasi pembangunan saat ini telah membuat banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi sektor swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta yang ada, sektor swasta dapat memberikan keahlian, pengetahuan, teknologi, efisiensi dan modal yang sangat dibutuhkan oleh sektor publik, sehingga bila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat, maka kontribusinya akan lebih besar lagi terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, sektor swasta memerlukan dukungan lingkungan yang stabil dan peraturan serta kerangka peraturan yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor-faktor lain yang penting untuk "mendapatkan pangsa pasar". Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah adalah ketidakmampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan secara memadai. Artinya, masih banyak bidang lain yang membutuhkan APBD untuk menyerap anggarannya, seperti bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama. Di sisi lain, perluasan infrastruktur juga merupakan kebutuhan yang mendesak. Dalam situasi seperti ini, program pembiayaan Kerja Sama Pemerintah-Bisnis (KPBU) yang berlandaskan prinsip gotong royong bisa menjadi solusi. Melalui program pembiayaan KPS, pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta bekerja sama untuk membiayai percepatan pembangunan.

3.2.3.7 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) Pinjaman Daerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan

prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023, dan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal dan eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada RKP 2025;
2. Arah kebijakan RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2025.
3. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Provinsi sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi.

4. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2024. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organsasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya tujuan dan sasaran pembangunan .Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkandalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama 2 (dua) tahun kedepan, maka rumusan strategi pembangunan daerah Kabupaten Wajo untuk tahun 2025-2026 yang dirinci menurut visi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan 3 (tiga) sasaran;
   (1) Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas;
   (2) Menurunnya Angka Kemiskinan;
   (3) Meningkatkan daya saing dan penempatan tenaga kerja
2. Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel, dengan 2 (dua) sasaran :
   (1) Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel;
   (2) Meningkatnya Dimensi Pembangunan Desa.

3. Meningkatkan pemerataan Pembangunan wilayah yang didkung Infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan 1 (satu) sasaran:
   (1) Meningkatnya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia:
   (1) Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan khusus;
   (2) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat;
   (3) Meningkatnya standar hidup layak masyarakat;
   (4) Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan Anak;
   (5) Terpeliharanya kualitas berbangsa, bernegara dan beragama.

Adapun target dari tujuan dan sasaran Tahun 2023 yang menjadi landasan RKPD Tahun 2025, termuat dalam Tabel IV. 3. sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran serta Target Pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2025

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025
Tujuan 1	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**		Indeks Gini		Angka / Predikat	0,36	0,333	0,353	0,353
	Sasaran 1	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	1,43	(4,37-5,80)	6,4	6,4
			2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	63,61	64,5		
			3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,36	84,8	88,11	88,11
	Sasaran 2	Menurunnya Angka Kemiskinan	4	Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,73	5,50	5,71	5,71
	Sasaran 3	Meningkatkan daya saing dan penempatan tenaga kerja	5	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	2,1	4,13	2,41	2,41
Tujuan 2	**Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel**		Indeks Reformasi Birokrasi		Angka	65,06	(61,51-62,00)/ B	63,85	63,85

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025
	Sasaran 4	Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	6	Nilai / Predikat SAKIP kabupaten	Angka/ Predikat	62,99	(75,01-80,10) / A	64,3	64,3
			7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	78,16	72	75,69	75,69
			8	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,67	(3,51-3,75) / B	3,36/C	3,36/C
			9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,67	(3,01-3,50)	2,6	2,6
	Sasaran 5	Meningkatnya Dimensi Pembangunan Desa	10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,706	(0,711-0,730)	0,724	0,724
Tujuan 3	**Meningkatkan pemerataan Pembangunan wilayah yang didkung Infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan**		Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah		Angka		4	4,1	4,1

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025
	Sasaran 6	Meningkatnya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan	11	Cakupan daya saing infrastruktur	Persentase	82,14	77,24	70,19	70,19
			12	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	Angka	62,6	(62,21-62,50)	78,98	78,98
Tujuan 4	**Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia**		Indeks Pembangunan Manusia		Angka	73,56	70,13	72,12	72,12
	Sasaran 7	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan khusus	13	Angka rata-rata lama sekolah	Persentase	7,09	8,6	7,13	7,13
			14	Angka Harapan Lama Sekolah	Persentase	13,12		13,11	13,11
	Sasaran 8	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	15	Angka usia harapan hidup	Persentase	67,82	67,5	67,95	67,95
			16	Pravelensi Balita Stunting	Persentase	28,6		34,6	34,6

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025
	Sasaran 9	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	17	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	57,90	62,10	3,83	3,83
	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan Anak	18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	3,00	(2,11-2,15)	2,86	2,86
	Sasaran 11	Terpeliharanya kualitas berbangsa, bernegara dan beragama	19	Indeks Ketentraman, Ketertiban dan Kerukunan	Indeks	12,73	(12.610-12.665)	12,85	12,85

Sumber : RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

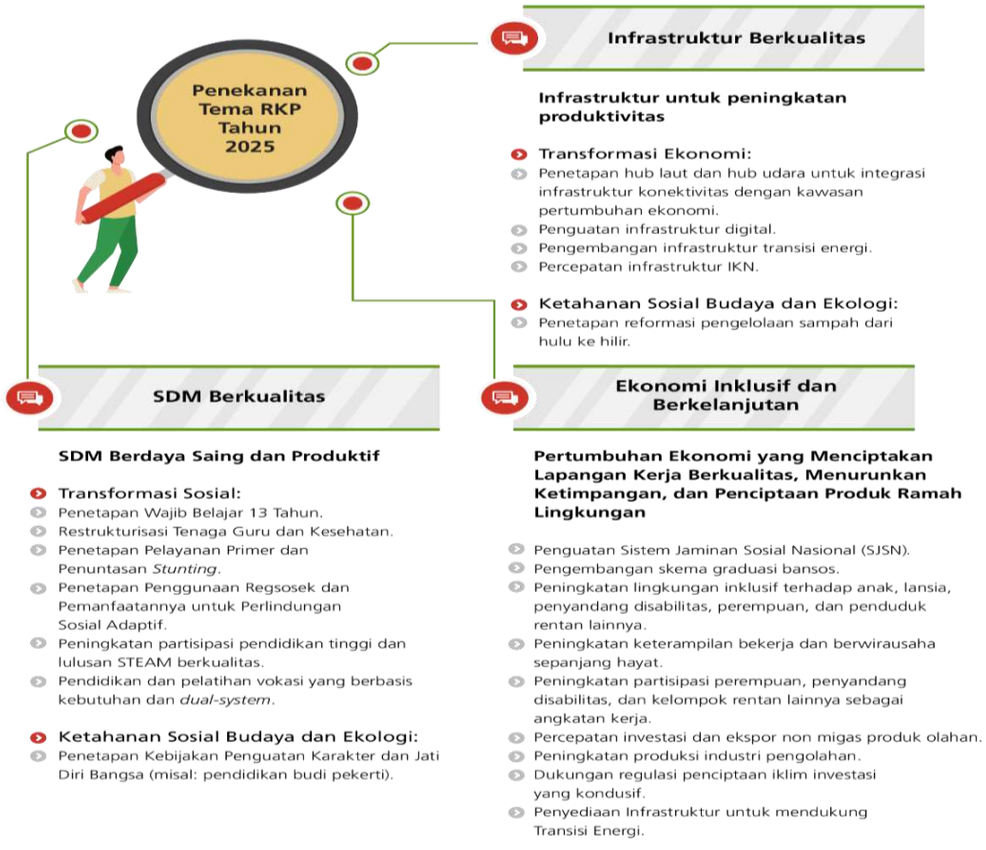
Dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah, memperhatikan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026 sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan daerah.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada gambar berikut.

Gambar 4. 1
Penekanan Tema RKPD Tahun 2025

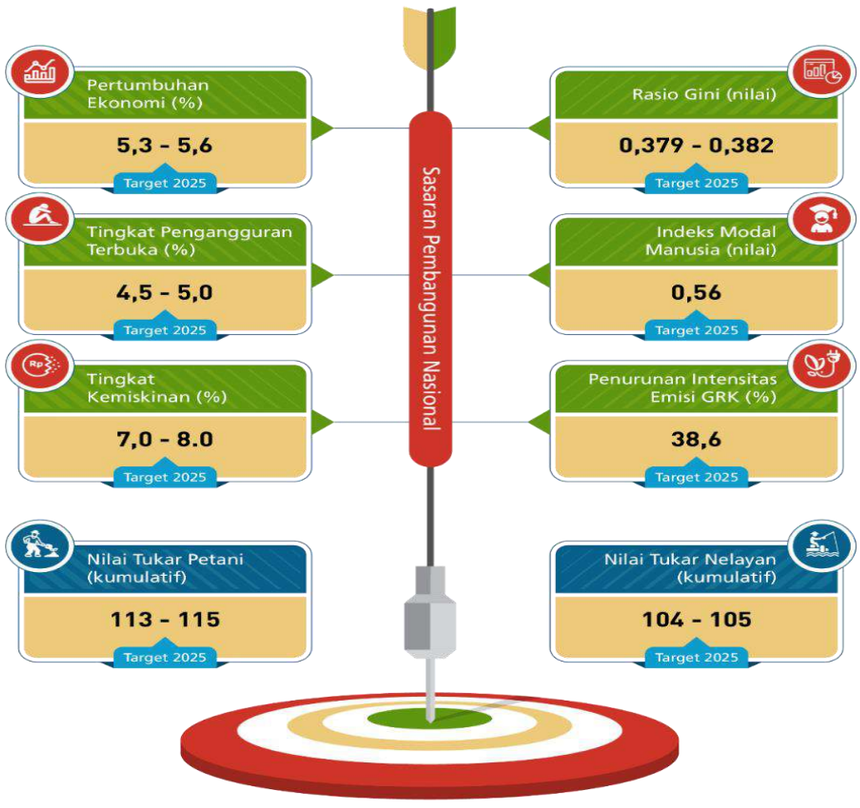


Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun awal dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan penguatan fondasi dalam kerangka pencapaian Indonesia Emas 2045.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Gambar 4. 2
Sasaran Pembangunan Tahun 2025



4.2.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar 4. 3
Prioritas Nasional Tahun 2025



4.2.1.4 Agenda Pembangunan RKPD Tahun 2025

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Gambar di bawah ini memperlihatkan lima Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025.

Gambar 4. 4
Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025



4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing"** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2025	Hasil Pembahasan Rakortek
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	74,21 (BB)	74,67	Tidak dibahas
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	68,78 (B)	69,27 (B)	Tidak dibahas
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	A-(4,34)	A-(4,35-4,50)	4,34
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	4	Indeks Williamson	Angka	0,567 (2022)	0,462	Tidak dibahas
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	80,39 (2022)	82,34	Tidak dibahas
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah	Rp/- Angkatan Kerja	79.149.920,77 (2022)	84.248.042,86	Tidak dibahas
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51	5,67-6,82	5,50-6.30
4	Peningkatan	Meningkatkan Kesejahteraan	8	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,59 (2022)	74,55	76,55-78,89

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2025	Hasil Pembahasan Rakortek
	Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	masyarakat secara merata	9	Gini Rasio	%	0,377 (Maret 2023)	0,356	0,371-0,376
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,33	4,03	3,8 - 4,1
		Menurunya angka kemiskinan	11	Tingkat Kemiskinan	Angka	8,70 (Maret 2023)	8,20	7,30 - 7,89
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12	IPM	Angka	74,60	74,80	Tidak dibahas
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,14 (2022)	93,78	Tidak dibahas
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	14	IKLH	poin	74,17 (2022)	74,54	Tidak dibahas
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)	Juta Ton CO_2Eq	1.360.000 (2022)	2.075.597	Turun 37 %

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2025

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 serta memperhatikan Tema RKP Nasional Tahun 2025, RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 maka tema RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2024 adalah **"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah"** yang kemudian di tuangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanankan di tahun 2025.

Dan untuk mendukung tema tersebut diatas maka Kabupaten Wajo menetapkan 5 prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing;
2. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah;
4. Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi dengan digitalisasi pelayanan;
5. Peningkatan Daya saing Kepemudaan

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table 4.5 berikut :

Tabel 4. 3
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RKPD 2025
1	**Pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah**	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**	1	Ratio Gini	Angka	0,36	0,333	0,353
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	2	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	1,43	(4,37-5,80)	6,4
			3	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	63,61	64,5	
			4	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,36	84,8	88,11
		Menurunnya Angka Kemiskinan	5	Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,73	5,50	5,71
		Meningkatkan daya saing dan penempatan tenaga kerja	6	Tingkat Penganggu ran Terbuka (TPT)	Persentase	2,1	4,13	2,41
2	**Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi dengan digitalisasi pelayanan;**	**Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel**	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka / Predikat	65,06	(61,51-62,00)/ B	63,85
		Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	8	Nilai / Predikat SAKIP kabupaten	Angka / Predikat	62,99	(75,01-80,10) / A	64,3

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RKPD 2025
			9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka / Predikat	78,16	72	75,69
			10	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	2,67	(3,51-3,75) / B	3,36/C
			12	Indek Sistem Pemerinta han Berbasisi Elektronik (SPBE)	Angka	2,67	(3,01-3,50)	2,6
		Meningkatnya Dimensi Pembangunan Desa	13	Indeks Desa Membangun	Angka	0,706	(0,711-0,730)	0,724
3	**Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan**	**Meningkatkan pemerataan Pembangunan wilayah yang didkung Infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan**	14	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka		4	4,1
		Meningkatnya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan	15	Cakupan daya saing infrastruktur	Persentase	82,14	77,24	70,19
			16	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	Angka	62,6	(62,21-62,50)	78,98

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RKPD 2025
4	**Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing**	**Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia**	17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase	73,56	70,13	72,12
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan khusus	18	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	7,09	8,6	7,13
			19	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	13,12		13,11
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	20	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	67,82	67,5	67,95
			21	Pravelensi Balita Stunting	Persentase	28,6		34,6
		Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan Anak	22	Indeks Pemberdaya an Gender (IDG)	Angka	57,90	62,10	3,83
		Terpeliharanya kualitas berbangsa, bernegara dan beragama	23	Indeks Ketentraman, Ketertiban dan Kerukunan	Angka	3,00	(2,11-2,15)	2,86
5	**Peningkatan Daya saing Kepemudaan**	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	24	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	12,73	(12.610-12.665)	12,85

4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

4.2.4.1. Strategi Pembangunan Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan komoditas unggulan dan Meningkatkan sistem pengelolaan komoditas unggulan
2. Mengembangkan potensi perekonomian
3. Menanggulangi sebahagian beban hidup secara terpadu dan terpat sasaran, disaat bersamaan mengembangkan kapasitas produksi usaha (barang dan jasa)
4. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kerja di berbagai bidang pembangunan
5. Mengembangkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan pasar, meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif termasuk fasilitasi sarana prasarana berusaha
6. Meningkatkan kapabilitas dan kemampuan SDM aparatur, Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan, evalusi dan pencapaian kinerja pemerintahan secara terintegrasi yang mampu mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang akuntabilitas.
7. Meningatkan keterpenuhan sarana dan prasarana infrastruktur desa, kapasitas aparat desa sejalan dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman serta mitigasi bencana.
8. Meningkatkan kapasitas infrastruktur/sarana prasarana jalan dan jembatan, perhubungan serta perbaikan manajemen yang diikuti dengan peningkatan kapasitas tutupan lahan, perbaikan tata kelola persampahan dan penanganan limbah termasuk penambahan sarana prasarana persampahan yang secara bersamaan meningkatkan pemberdayaan masyarakat

9. Meningkatkan pemertaan akses dan kualitas pendidikan masarakat termasuk pendidikan inklusi
10. Meningkatkan kompetensi dan penataan distribusi Tenaga kesehatan (reguler dan nonreguler), seiring dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat menjadi sadar pola hidup sehat
11. Mengembangkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan pasar, memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha serta iklim berusaha yang kondusif dengan dukungan fasilitas yang baik.
12. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, menguatkan lembaga jejaring pengarusutamaan gender secara beriringan meningkatkan kapasitas pendidikan, keterampilan, kesempatan berusaha bagi perempuan baik formal maupun nonformal termasuk pendidikan politik.
13. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah dengan lembaga keagamaan, antar sesama lembaga keagamaan, dengan pihak lain termasuk masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, dan pembinaan antar dan inter ummat beragama sehingga ikut tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4.2.4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan tiap tahun yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 ini, disajikan dalam keterkaitan strategi pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan produksi dan produktifitas komoditi pertanian (holtikultura, perternakan, tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan) serta pemantapan manajemen pengelolaan usaha pertanian;
2. Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan;
3. Peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin, pemberian akses berusaha serta penigkatan layanan dasar terhadap masyarkat miskin;

4. Mengembangkan kapasitas produksi usaha melalui pemberdayaan masyarakat miskin;
5. Peningkatan kualitas dan pastispasi Angkatan Kerja di berabagai bidang pembangunan;
6. Pengembangan kesempatan berusaha serta pengembangan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan pasar dan dunia usaha;
7. Pengembangan kapasitas SDM Aparat perencana dalam hal perencanaan, pelaporan dan evaluasi pencapaian kinerja;
8. Peningkatan kualitas pengawasan penyelanggraan pemerintah daeah secara transparan dan akuntabel;
9. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi;
10. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur desa, pembinaan aparat desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
11. Peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas serta pemantapan manajemen dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan permukiman serta perhubungan;
12. Pengembangan penanganan tutupan lahan dan tata kelola persampahan dan penanganan limbah serta termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pengeloalaan sampah;
13. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan akses dan kualitas pendidikan dasar, khusus dan vokasi termasuk pendidikan inklusi bagi masyarakat rentan;
14. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat menjadi sadar pola hidup sehat;
15. Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting;
16. Pengembangan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan pasar, memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha serta iklim berusaha yang kondusif dengan dukungan fasilitas yang baik;
17. Peningkatan kapasitas pendidikan, keterampilan dan kesepatan berusaha bagi perempuan baik formal maupun non formal dan pendidikan politik perempuan;

18. Peningkatan cakupan pemenuhan hak dan perlindungan anak diseluruh sektor pembangunan;
19. Pemantapan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dengan lembaga keagamaan dan dengan pihak lain termasuk masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah ibadah.

4.3 Keselarasan Dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

4.3.1 Kesesuaian Prioritas Pembangunanm Tahun 2025 dengan Sasaran RPD

RKPD sebagai perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPD yang tergambarkan melalui keselaranan prioritas pembangunan dengan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan pada RPD 2025-2026, keselarasan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 4
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPD untuk Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	
1	**Pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah**	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**	1	Ratio Gini
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	2	Pertumbuhan Ekonomi
				3	PDRB Perkapita ADHB
				4	Indeks Ketahanan Pangan
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	5	Tingkat Kemiskinan
		Meningkatkan daya saing dan penempatan tenaga kerja	Meningkatkan daya saing dan penempatan tenaga kerja	6	Tingkat Penganggu ran Terbuka (TPT)
2	**Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi dengan digitalisasi pelayanan;**	**Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel**	**Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel**	7	Indeks Reformasi Birokrasi
		Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	8	Nilai / Predikat SAKIP kabupaten
				9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
				10	Indeks Pelayanan Publik
				12	Indek Sistem Pemerinta han Berbasisi Elektronik (SPBE)
		Meningkatnya Dimensi Pembangunan Desa	Meningkatnya Dimensi Pembangunan Desa	13	Indeks Desa Membangun
3	**Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan**	**Meningkatkan pemerataan Pembangunan wilayah yang didkung Infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan**	**Meningkatkan pemerataan Pembangunan wilayah yang didkung Infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan**	14	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah
		Meningkatnya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan	15	Cakupan daya saing infrastruktur

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	
				16	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)
4	**Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing**	**Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia**	17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan khusus	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan khusus	18	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				19	Angka Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	20	Angka Usia Harapan Hidup
				21	Pravelensi Balita Stunting
		Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan Anak	22	Indeks Pemberdaya an Gender (IDG)
		Terpeliharanya kualitas berbangsa, bernegara dan beragama	Terpeliharanya kualitas berbangsa, bernegara dan beragama	23	Indeks Ketentraman, Ketertiban dan Kerukunan
5	**Peningkatan Daya saing Kepemudaan**	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	24	Rata-rata Pengeluaran Perkapita

Selanjutnya, untuk memastikan seluruh tujuan dan sasaran prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2025 dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan, maka perlu dirumuskan program prioritas tahun 2025, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 5
Tujuan, Sasaran dan Prograqm Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Impact, Outcome	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	**Indeks Gini**	**Indeks / Predikat**	**0,353**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persentase**	**6,4**	
		PDRB per kapita	**Juta Rupiah**		
		Indeks Ketahanan Pangan	**Angka**	**88,11**	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persentase	113.00 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Prioritas)	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Persentase	0,96 %	Dinas Perikanan
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Prioritas)	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Persentase	0,94%	Dinas Perikanan
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Prioritas)	PAD sektor pariwisata	Persentase	0,10 %	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
5	Program Pemasaran Pariwisata (Prioritas)	Persentase Kunjungan wisata	Persentase	36,06 %	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Prioritas)	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase	100 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kasus kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang dikendalikan	Persentase	15,00 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan sarana distribusi perdagangan	Persentase	100 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9	Program Pengembangan Ekspor (Prioritas)	Persentase Promosi Dagang yang diselenggarakan	Persentase	100 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Impact, Outcome	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Usaha Kecil dan Menengah
	Sasaran 2 : Menurunnya Angka Kemiskinan	**Tingkat Kemiskinan**	**Persentase**	**5,71**	
10	Program Rehabilitasi Sosial (Prioritas)	Rata-rata Capaian Pemenuhan SPM	Persentase	100 %	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (Prioritas)	Persetase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	Persentase	100 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Sasaran 3 : Meningkatkan daya saing dan penempatan tenaga kerja	**Tingkat pengangguran terbuka**	**Persentase**	**2,41**	
12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas)	Persentase angkatan kerja yang memperoleh sertifikat kelulusan pelatihan peningkatan produktivitas	Persentase	50%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tujuan 2: : Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**63,85**	
	Sasaran 4 : Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	**Nilai / Predikat SAKIP kabupaten**	**Angka/ Predikat**	**64,30**	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	**Angka**	**75,69**	
		Indeks Pelayanan Publik	**Angka**	**3,36/C**	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**Angka**	**2,60**	
13	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pencapaian Target Nasional	Persentase	100 %	Dinas Kependudukan dan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Impact, Outcome	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Prioritas)	Bidang Pendaftaran Penduduk			Pencatatan Sipil
14	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Adminduk dan Inovasi Pelayanan	Persentase	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Prioritas)	Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Persentase	55%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
16	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Prioritas)	Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Baik, Cerdas, Sehat dan Beriman	Persentase	100 %	Sekretariat Daerah
17	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Persentase Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Persentase	100 %	Bappelitbangda
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase	100 %	
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam APBD	Persentase	100 %	
18	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Prioritas)	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Program Kepegawaian Daerah (Prioritas)	Cakupan Pemenuhan Manajemen Kepegawaian	Persentase	100 %	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Program Penyelenggaraan Pengawasan (Prioritas)	Persentase penurunan temuan yang berulang	Persentase	12%	Inspektorat Daerah
	Sasaran 5 : Meningkatnya Dimensi Pembangunan Desa	**Indeks Desa Membangun**	**Indeks**	**0,724**	
21	Program Administrasi Pemerintahan	Persentase Peningkatan Kapasitas	Persentase	100 %	Dinas Pemberdayaan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Impact, Outcome	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Desa (Prioritas)	Aparatur Pemerintahan Desa			Masyarakat dan Desa
	Tujuan 3: Meningkatkan pemerataan Pembangunan wilayah yang didkung Infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan	**Indeks Daya Saing Infrastruktur**	**Angka**	**4,10**	
	Sasaran 6 : Meningkatnya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan	**Cakupan Daya Saing Infrastruktur Daerah**	**Persentase**	**70,19**	
		Indeks Kualitas Lingkungan hidup Daerah (IKLHD)	**Angka**	**78,98**	
22	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (prioritas)	Persentase Konservasi sungai	Persentase	100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Rasio Jaringan Irigasi	Hektar	9,10	
23	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	Persentase	0,91	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
24	Program Penyelenggaraan Jalan (Prioritas)	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	Persentase	0,51	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
25	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Prioritas)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	Persentase	0,17%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (Prioritas)	Persentase Luasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase	20,07%	Dinas Lingkungan Hidup
27	Program Pengelolaan Persampahan (Prioritas)	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Persentase	50,04%	Dinas Lingkungan Hidup
28	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan	Persentase	100 %	Dinas Perhubungan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Impact, Outcome	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bermotor			
	Tujuan 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**72,12**	
	Sasaran 7 : Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan khusus	**Angka rata-rata lama sekolah**	**Persentase**	**7,13**	
		Angka Harapan Lama Sekolah	**Persentase**	**13,11**	
29	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM dan Prioritas)	Persentase Capaian SPM Bidang Pendidikan	Persentase	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	Program Pendidik dan Tenaga Kependidkan (Prioritas)	Persentase Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sasaran 8: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	**Angka usia harapan hidup**	**Persentase**	**67,95**	
		Pravelensi Balita Stunting	**Persentase**	**34,6**	
31	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM & Prioritas)	Persentase Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Persentase	100 %	Dinas Kesehatan
32	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Prioritas)	Cakupan SDM yang memenuhi standar kompetensi	Persentase	100 %	Dinas Kesehatan
	Sasaran 9: Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	**Pengeluaran Per Kapita**	**Juta Rupiah**	**12,85**	
33	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Nilai investasi yang direalisasikan terhadap total nilai investasi yang disetujui	Persentase	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Prioritas)	Persentase Ikan yang di Konsumsi	Persentase	0,94	Dinas Perikanan
35	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase	100 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
36	Program Stabilisasi Harga Barang	Persentase Ketersediaan Harga Barang	Persentase	100 %	Dinas Perindustrian,

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Impact, Outcome	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Prioritas)	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Sasaran 10: Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan Anak	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Angka**	**3,83**	
37	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	Persentase	100 %	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38	Program Perlindungan Khusus Anak (Prioritas)	Persentase Kecamatan/desa Layak Anak (%)	Persentase	100 %	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Sasaran 11: Terpeliharanya kualitas berbangsa, bernegara dan beragama	**Indeks Ketentraman, Ketertiban dan Kerukunan**	**Indeks**	**2,86**	
39	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (SPM & Prioritas)	Jumlah warga Negara Warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada kabupaten/kota	Persentase	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
40	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada semua event politik	Persentase	82%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3.2 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Wajo tahun 2025 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2026 dan mendukung prioritas nasional dan provinsi tahun 2025 yang merupakan tahun awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 6
Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
1	Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi dengan digitalisasi pelayanan	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN 7
2	Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
3	Peningkatan Daya saing Kepemudaan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN 4
4	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN 5
			Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PN 6
			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PN 2
5	Pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PN 1
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
		Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.		

Selanjutnya sebagai dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Nasional tahun 2025, maka Kabupaten Wajo menetapkan program pembangunan daerah yang selaras dan menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 7
Keselarasan Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat			
	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik			
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyediaan sarana pendukung untuk ternak (terutama kontainer untuk inseminasi buatan) di Kabupaten Maros			
	Bantuan benih ikan, terutama di Kabupaten Takalar			
	· Pengembangan Kawasan Tebu di Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone			
	· Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan di 12 kabupaten			
	· Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di 12 kabupaten untuk meningkatkan ketahanan bencana			
	· Pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Gowa			
	· Pengembangan tempat			

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
	pengolahan sampah terpadu di area Metropolitan Mamminasata			
	· Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial			
	· Pembangunan jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mamminasata			
	· Fasilitasi business matchmaking startup digital			
	· Fasilitasi digital technopreneur			
	· Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian			
	· Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (prioritas), Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara			
	· Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	20,07%
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luasan Keaneka Ragaman Hayati (KEHATI) yang dipelihara	13 Persen
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10,79 Ha
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan,	· Pengembangan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan Pontap di Kota Palopo			
	· Penyempurnaan			

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi Makassar–Parepare			
	· Pengembangan sarana pengelolaan rumah produksi bersama komoditi garam terpadu di Pangkep dan Jeneponto			
	· Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim			
	· Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital			
	· Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan sentra usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jeneponto			
	· Rehabilitasi ballroom celebes convention center gedung sentra industri kecil menengah di Kota Makassar			
	· Pengembangan jejaring desa wisata di Provinsi Sulawesi Selatan			
	· Pengendalian sedimen Sungai Radda			
	· Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi			
	· Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Konektivitas Regional dan Penguatan Konektivitas Regional	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	0,51 Rasio
		Kegiatan: penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkapnya yang	14,50 KM

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
			Dibangun, Ditingkatkan, dan Dipelihara	
		Sub Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	15,80 KM
		Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3,53 KM
		Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13,74 KM
		Sub Kegaiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan
		Sub Kegaiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5 Jembatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat	98 %
		Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	100 %
		Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen
		Sub Kegaiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	· Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan			
	· Pengendalian penyakit	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase kasus kesehatan	15,00 %

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	menular lainnya (eliminasi malaria)	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang dikendalikan	
	· Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) (Dinas Peternakan)	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan penyakit hewan menular	90,00 %
		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	3 Wilayah
	· Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan Lainnya (Rabies) (Dinas Kesehatan)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan uantuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten Kota	100 %
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7.063 Orang
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8050 Orang
	· Pembangunan, rehabilitasi,	PROGRAM PENGEMBANGAN	Cakupan pembinaan olahraga	100 %

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
	dan renovasi sarana prasarana olahraga	KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Sport yang representatif	90 %
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Unit
	· Pembangunan kualitas keluarga			
	· Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar			
	· Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan			
	· Fasilitasi literasi digital			
	· Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian SPM Bidang Pendidikan	100 %

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
	peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini	Kegiatan :Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalan Pendidikan SD/ MI	100 %
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta Didik
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	21396 Orang
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	25 Komunitas
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	3740 Buku
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	647 Paket
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses	389 Satuan Pendidikan

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
			Belajar	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	80 Ruang
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	700 Peserta Didik
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP / MTs	100 %
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	60 Paket
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	444 Peserta Didik

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5044 Peserta Didik
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7932 Orang
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	· Penguatan industri logam dasar			
	· Hilirisasi industri kakao			
	· Hilirisasi industri rumput laut			
	· Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik			
	· Pengembangan Bandara Hub Sultan Hasanuddin			
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemugaran permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Wajo	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh perkotaan	17,78 %
		Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman yang tertata	3,84 Ha
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen
		Kegaitan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani	0,05 Ha
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak	6 Unit Rumah

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
			Huni yang Diperbaiki	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.02 Ha
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Permukiman Layak Huni	0.500 %
		Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Rumah Layak Huni	0,496 %
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	6 Unit Rumah
	· Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung pemerataan ekonomi			
	· Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan Makassar			

Prioritas Pembanguna Nasional Untuk Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah		
Prioritas Nasional	Indikasi Intervensi Pada RKP Tahun 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perengkart Daerah yang selaras	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
	· Pengembangan sistem angkutan umum massal di Wilayah Metropolitan Makassar			
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	· Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga			
	· Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional			
	· Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar			
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	· Fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional di Geopark Maros Pangkep			
	· Bantuan pelaksanaan giat warisan budaya di Kota Makassar			
	· Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan			

Tabel 4. 8
Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Daerah yang mendukung kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Perangkat Daerah
				Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	743.324.550.733	Semua Perangkat Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pencapaian Target Nasional Bidang Kependudukan	100 %	188.584.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Pencapaian Target Nasional Bidang Pencatatan Sipil	100 %	43.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Aplikasi Informatika	Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	55 %	1.979.603.100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Baik, Cerdas, Sehat dan Beriman	100 %	7.191.200.000	Sekretariat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	100%	837.742.800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%		
			Persentase Penjabaran	100%		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Daerah yang mendukung kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Perangkat Daerah
				Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Konsistensi Program RPJMD kedalam APBD			
			Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	100%		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	224.359.629.812	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pemenuhan Manajemen Kepegawaian	100 %	170.736.700	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan yang berulang	12%	2.206.467.400	Inspektorat Daerah
		Program Pemerintahan Administrasi Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100 %	2.210.273.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Konservasi sungai	100%	14.259.947.269	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Rasio Jaringan Irigasi	8,22 Rasio		
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	91,37 %	2.235.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Program Penyelenggaraan Jalan (Prioritas)	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	0,51 Rasio	60.126.081.235	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	0,17 %	2.574.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Daerah yang mendukung kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Perangkat Daerah
				Kinerja	Anggaran (Rp)	
3	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kawasan pertanian terpadu yang berfungsi dengan baik	100 %	23.924.099.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	15.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Promosi Dagang yang diselenggarakan	100 %	250.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	0,96 %	255.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	0,94%	110.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Yang Direalisasi Terhadap Total Niali Investasi Yang Disetujui	100 %	32.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70,50 %	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	20,07 %	333.388.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan (Prioritas)	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani (Ton)	50,04 %	1.927.901.500	Dinas Lingkungan Hidup

4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Wajo

Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo (Pokok-Pokok Pikiran DPRD) untuk RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mana ;

a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (pasal 153, huruf k).
b. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses Proses penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Wajo terhadap RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 ini dilaksanakan dengan proses awal berupa pengumpulan dokumen hasil aspirasi masyarakat baik dalam bentuk laporan reses, audiensi, tamu, dan berbagai aspirasi lainnya, serta telaah terhadap APBD Kabupaten Wajo tahun anggaran sebelumnya (pasal 178, ayat (1, 3)).
c. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan (pasal 178, ayat (5).
d. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran (pasal 178, ayat (2)).
e. Pokok-pokok pikiran DPRD akan dimasukkan kedalam e-planning SIPD (pasal 178, ayat (6)).

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Wajo terhadap RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pengawasan dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Wajo dengan mengedepankan aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam proses serta kebijakan perencanaan pembangunan. Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok Pikiran DPRD telah di integrasikan ke dalam aplikasi SIPD yang terintegrasi pula pada dokumen penyusunan RKPD. Pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 652 usulan dan yang telah di intergrasikan ke dalam dokumen perencanaan sebanyak 417 usulan berdasarkan pada hasil telaahan dari tim penyusun RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing Anggota DPRD untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan RKPD Tahun 2025. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Wajo secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan;
2. Pengembangan ekonomikreatif, UMKM dan kewirausahaan;
3. Peningkatan kualitas dan sarana prasarana kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian;
5. Peningkatan sarana prasarana ibadah masyakat;
6. Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman;
7. Peningkatankesejahteraan masyarakat miskin; dan
8. Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), lokasi, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Wajo yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, lalu dianalisa sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan khususnya yang menyangkut pelayanan hak dasar masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo.

Rencana program kegiatan prioritas daerah tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 – 2026 dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan, dengan memuat sasaran

dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, juga merupakan keselarasan antara rancangan awal RKP tahun 2025 dan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 serta rancangan awal rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2025.

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2024 Kabupaten Wajo. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program. Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa Pendapatan Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1,567,052,311,480,- yang bersumber dari PAD sebesar Rp 186,954,009,480,- dan pendapatan transfer sebesar Rp. 1,380,098,302,000,-. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2025, dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp 1,567,052,311,480,- Belanja daerah tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2023 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabuapten Wajo Tahun 2025. Struktur Belanja Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel 5. 1
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Uraian	Asumsi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
Belanja Daerah	**1,542,429,041,064.00**	**1,567,052,311,480.00**
Belanja Operasi	**1,087,242,934,250.00**	**1,111,866,204,666.00**
Belanja Pegawai	634,875,536,510.00	659,498,806,926.00
Belanja Barang dan Jasa	400,367,592,016.00	400,367,592,016.00
Belanja Bunga	616,628,248.00	616,628,248.00
Belanja Hibah	50,863,177,476.00	50,863,177,476.00
Belanja Bantuan Sosial	520,000,000.00	520,000,000.00
Belanja Modal	**244,352,600,336.00**	**244,352,600,336.00**
Belanja Modal Tanah	3,172,568,000.00	3,172,568,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,881,379,739.00	33,881,379,739.00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	122,864,453,110.00	122,864,453,110.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77,972,780,462.00	77,972,780,462.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6,461,419,025.00	6,461,419,025.00
Belanja Tidak Terduga	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**
Belanja Transfer	**200,833,506,478.00**	**200,833,506,478.00**
Belanja Bagi Hasil	6,996,572,878.00	6,996,572,878.00
Belanja Bantuan Keuangan	193,836,933,600.00	193,836,933,600.00

5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Wajo Tahun 2025

Perumusan Rencana program, dan sub kegiatan daerah tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan target yang telah ditetapkan dalam RPD 2025-2026,

juga keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi tahun 2025 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi dikabupaten/kota. Keterkaitan tersebut dapat dilihat melalui sinkronisasi pendanaan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

5.1.1. Sinkronisasi Usulan Program Prioritas Kabupaten Wajo Terhadap Program Prioritas Nasional

Pengajuan usulan program prioritas Kabupaten Wajo yang terkait dengan 5 (lima) prioritas nasional Tahun 2025 melalui aplikasi Krisna DAK Fisik. Usulan Kabupaten Wajo pada aplikasi tersebut disesuaikan dengan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Kementerian terkait melalui Bappenas, dimana Kabupaten Wajo mendapat jatah sebanyak 3 (tiga) lokpri yang merupakan DAK PENUGASAN. Dari Lokpri tersebut, Kabupaten Wajo mengajukan 1989 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) usulan dengan nominal usulan senilai Rp. 964.116.468.008,9-. Usulan tersebut diampu oleh 6 (Enam) OPD yaitu, Dinas PUPR untuk Bidang Jalan dan Irigasi; Dinas Pendidikan untuk Bidang Pendidikan yang meliputi PAUD, SD, PAUD dan SKB; Dinas Kesehatan unuk Bidang Kesehatan; Dinas Sosial, P3A dan P2KB untuk Bidang Keluarga Berencana; Dinas Pertanian untuk Bidang Pertanian dan Dinas Perikanan untuk Bidang Perikanan.

5.1.2. Sinkronisasi Usulan Program Prioritas Kabupaten Wajo Terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan

Pengajuan usulan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Wajo yang terkait dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang diajukan melalui aplikasi SIPD dan dibahas pada saat Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov), Forum Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Wajo dengan keterbatasan penganggaran maka mengusulkan program dan kegiatan yang tersinkronisasi dengan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada tahun sebelumnya, usulan Kabupaten Wajo sebanyak 10 usulan.

5.1.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Wajo Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025 dukungan pendanaannya masih bersifat indikatif, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024. Adapun rekapan pendanaan pada plafon anggaran sementara berdasarkan perangkat daerah menurut belanja Operasi dan Belanja Modal pada RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025.

Sementara untuk perincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang disertai dengan indikator dan terget kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4

INDIKASI RENCANA PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			358.796.296.163					350.577.781.425	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata - Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISDIKBID)	100 %	244.986.302.163				100 %	227.106.627.262	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata - Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISDIKBID)	100 %	132.000.000			OPD	100%	143.000.000	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	52.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	5 Dokumen	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe,	PENDAPATAN ASLI	OPD	1 Laporan	8.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	18 Laporan	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	243.449.902.163			OPD	100%	225.436.227.262	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11532 Orang/bulan	243.399.902.163	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	OPD	84080 Orang/bulan	225.401.227.262	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	5 Laporan	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	35.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100 %	25.000.000			OPD	100%	25.000.000	
1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	32.500.000			OPD	100%	89.000.000	
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	22.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	12 Orang	54.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	485.970.000			OPD	100%	602.862.600	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	12 Paket	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.470.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	10 Paket	10.870.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	47.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	15 Dokumen	57.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	400.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	170 Laporan	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	2 Dokumen	29.492.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	100.000.000			OPD	100%	110.507.400	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	10 Unit	10.507.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	8 Unit	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	663.450.000			OPD	100%	612.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.050.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	12 Laporan	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	195.600.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	12 Laporan	150.600.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	12 Laporan	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	437.800.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	5 Laporan	441.400.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	97.480.000			OPD	100%	88.030.000	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.130.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	54.680.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	20 Unit	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	2 Unit	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	18.350.000	Kab. Wajo, Tempe, Paddupa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	2 Unit	8.350.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian SPM Bidang Pendidikan	100 %	113.709.994.000				100 %	123.371.154.163	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalan Pendidikan SD/ MI	100 %	65.131.164.280			-	100% 100%	73.848.887.000	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	940.860.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	7 Ruang	1.940.860.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.495.320.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	5 Ruang	1.495.320.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	697.875.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	3 Ruang	697.875.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	1.201.170.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	55 Unit	5.701.170.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	379.925.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	3 Unit	379.925.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	776.702.100	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	5 Ruang	776.702.100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	63.720.900	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1 Ruang	63.720.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	123.832.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Ruang	123.832.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	359.160.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	3 Unit	359.160.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Paket	120.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	85 Paket	410.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	240.300.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	50 Paket	240.300.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta Didik	350.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	800 Peserta Didik	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	21396 Orang	5.356.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1783 Orang	1.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	500.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	540 Orang	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	388 Satuan Pendidikan	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	389 Satuan Pendidikan	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	388 Satuan Pendidikan	34.885.680.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	397 Satuan Pendidikan	36.109.220.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25 Orang	70.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	15 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	10 Ruang	3.016.240.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	13 Ruang	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	30 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	80.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Konten Digital	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	388 Orang	70.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	200 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	200.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5 Dokumen	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Dokumen	185.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	25 Komunitas	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Komunitas	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	3740 Buku	300.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	9000 Buku	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	647 Paket	200.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	150 Paket	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	633.308.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2 Ruang	633.308.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Unit	784.258.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	14 Unit	784.258.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	250 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	389 Satuan Pendidikan	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	389 Satuan Pendidikan	195.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	80 Ruang	11.760.613.280	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	87 Ruang	13.197.056.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	700 Peserta Didik	350.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1614 Peserta Didik	992.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	1.662.440.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	50 Paket	1.662.440.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP / MTs	100 %	29.330.931.000			Satuan Pendidikan	100% 100%	32.529.691.000	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	1 Ruang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.158.780	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	5 Ruang	1.000.158.780	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	700.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	5 Ruang	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	7 Ruang	1.900.267.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	7 Ruang	1.900.267.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	420.215.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	9 Unit	1.420.215.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	1.147.421.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	8 Unit	847.421.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	2.104.225.003	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	23 Ruang	4.104.225.003	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	822.047.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	6 Ruang	822.047.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	338.520.217	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	4 Ruang	338.520.217	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	350.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	3 Ruang	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	92.517.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	1 Unit	92.517.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	2 Unit	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	60 Paket	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	60 Paket	370.600.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	60 Paket	370.600.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	444 Peserta Didik	210.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	1110 Peserta Didik	630.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5044 Peserta Didik	827.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	750 Peserta Didik	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7932 Orang	2.038.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	664 Orang	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	225 Orang	400.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	507 Orang	385.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	74 Satuan Pendidikan	1.025.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan	13.124.960.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	13.388.720.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15 Orang	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	10 Orang	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	30 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	1 Konten Digital	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	148 Orang	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	100 Orang	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	130.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	74 Dokumen	1.676.114.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	200.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	3 Dokumen	153.886.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	25 Komunitas	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	10 Komunitas	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	74 Satuan Pendidikan	150.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	200.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	1 Ruang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	124 Orang	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	250 Orang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	600 Buku	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	600 Buku	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	473 Paket	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	120 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	500.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan	4 Ruang	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	450.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan	10 Paket	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	16.929.898.720			Satuan Pendidikan	100% 100%	14.832.698.720	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	15 Unit	1.072.098.850	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	11 Unit	1.822.098.850	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	50 Paket	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Satuan Pendidikan	1 Paket	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	12612 Orang	6.316.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	5340 Orang	2.089.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	300.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	200 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	363 Satuan Pendidikan	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	363 Satuan Pendidikan	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	363 Satuan Pendidikan	6.410.400.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Satuan Pendidikan	363 Satuan Pendidikan	7.300.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	20 Orang	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	20 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	250 Orang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	5 Dokumen	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Satuan Pendidikan	1 Ruang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	330.535.150	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Satuan Pendidikan	3 Ruang	330.535.150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Satuan Pendidikan	1 Ruang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan	2 Ruang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	100 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	70 Paket	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan	2 Unit	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan	10 Paket	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	363 Satuan Pendidikan	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	363 Satuan Pendidikan	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan	1 Ruang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Satuan Pendidikan	1 Ruang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	255.864.720	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Satuan Pendidikan	1 Ruang	255.864.720	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	1.000.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Satuan Pendidikan	11 Ruang	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	2.318.000.000			Satuan Pendidikan	100% 100%	2.159.877.443	
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	100 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	1.198.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	983.700.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	10 Orang	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	200 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	35.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	125.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan	1 Ruang	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	70.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Satuan Pendidikan	1 Ruang	70.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	32 Paket	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Satuan Pendidikan	32 Paket	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	80.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Satuan Pendidikan	2 Unit	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	100 Peserta Didik	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	65.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Satuan Pendidikan	1 unit	66.177.443	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	10 Paket	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Satuan Pendidikan	200 Paket	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Satuan Pendidikan	1 Ruang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	185.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Satuan Pendidikan	2 Ruang	185.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Dasar	100 %	50.000.000				100 %	25.000.000	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase muatan lokal yang masuk dalam kurikulum	100 %	50.000.000			-	100%	25.000.000	
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	472 Buku	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	471 Buku	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 %	50.000.000				100 %	75.000.000	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 %	50.000.000			Satuan Pendidikan	100%	75.000.000	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan		25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			607.696.298.208					526.418.786.935	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DINKES)	100 %	96.282.998.008				100 %	93978658253,48	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	120.400.000			OPD Dinas Kesehatan	100%	99.886.000	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	96.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	6 Dokumen	26.500.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	2 Dokumen	21.500.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	2 Dokumen	7.162.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	1 Dokumen	5.662.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	1 Dokumen	5.662.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.400.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	1 Laporan	33.400.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan sesuai standar	100 %	94.236.683.208			OPD Dinas Kesehatan	100%	90789008253,48	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2436 Orang/bulan	94.210.148.008	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	2436 Orang/bulan	90769458253,48	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.835.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	3 Laporan	10.850.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.700.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	12 Laporan	8.700.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Kepagawaian sesuai standar.	100 %	65.640.000			OPD Dinas Kesehatan	100%	155.000.000	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	60.640.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	12 Dokumen	5.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan		150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	100 %	354.000.000			OPD Dinas Kesehatan	100%	531.876.000	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	1 Paket	7.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	1 Paket	10.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	1 Paket	15.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	2 Dokumen	2.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	1 Paket	15.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	12 Laporan	482.876.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.092.980.000			OPD Dinas Kesehatan	100%	1.861.520.000	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.180.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	12 Laporan	15.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	310.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	12 Laporan	515.320.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	754.800.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	12 Laporan	1.331.200.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	163.294.800			OPD Dinas Kesehatan	100%	291.368.000	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	56.130.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	2 Unit	79.868.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	82.164.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	28 Unit	66.500.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	6 Unit	45.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	4 Unit	100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	BOR RS	68 %	97.082.085.400			Rumah Sakit	68%	97.082.085.400	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	97.082.085.400	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN DARI BLUD	Rumah Sakit	2 Unit Kerja	97.082.085.400	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang disusun sesuai standar	100 %	250.000.000			OPD Dinas Kesehatan	100%	250.000.000	
1	02	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD Dinas Kesehatan	1 Dokumen	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	166.222.928.900				100 %	167.495.134.845	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan uantuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten Kota	100 %	87.186.179.504			Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	100%	87.221.056.604	
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	3.675.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	11 Unit	3.675.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	67.196.647.693	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Unit	67.196.647.693	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	9.660.952.307	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	50 Unit	9.660.952.307	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	1.189.254.600	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	500 Unit	1.189.254.600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	5.249.202.004	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	56 Paket	5.249.202.004	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	23 Paket	215.122.900	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	23 Paket	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten Kota yang terselenggara	100 %	79.036.749.396			Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	100%	80.274.078.241	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.922 Orang	763.570.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	5922 Orang	763.570.800	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.653 Orang	386.450.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	5653 Orang	386.450.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.384 Orang	894.806.106	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	5384 Orang	894.806.106	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.843 Orang	3.587.050.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	20843 Orang	3.587.050.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48.583 Orang	1.582.060.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	48583 Orang	1.582.060.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270301 Orang	300.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	270301 Orang	300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83750 Orang	300.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	83750 Orang	300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108585 Orang	189.583.400	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	108585 Orang	189.583.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.584 Orang	1.067.220.850	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	9584 Orang	1.067.220.850	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	946 Orang	300.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	946 Orang	300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7.063 Orang	2.356.988.900	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	7063 Orang	2.356.988.900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8050 Orang	545.800.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	8050 Orang	545.800.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	5.704.418.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	5.704.418.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	795.275.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	795.275.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	495.942.100	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	495.942.100	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	677.033.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	677.033.500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	6.331.392.100	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	6.331.392.100	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	45.000.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	45.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	52.462.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Paket	52.462.800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	7.102.485.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	7.102.485.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	48.670.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	1.209.509.685	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	697 Orang	395.030.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	697 Orang	395.030.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	160.510.840	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Orang	237.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan SDM yang memenuhi standar kompetensi	100 %	2.604.731.300				100 %	5.300.000.000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	605.290.900			Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	100%	300.000.000	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2244 Orang	348.172.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	2244 Orang	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	257.118.100	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang disusun tepat waktu sesuai standar	100 %	1.999.440.400			Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	100%	5.000.000.000	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	575 Orang	1.999.440.400	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	575 Orang	5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	100 %	421.131.000				100 %	402.648.000	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100 %	421.131.000			Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	100%	402.648.000	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	61 Unit	421.131.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	51 Unit	402.648.000	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Prima Akti	97,36 %	342.164.509.000				97,36 %	353.221.004.090	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang tersusun tepat waktu sesuai standar	100 %	218.504.400			Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	100%	330.795.000	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	218.504.400	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	330.795.000	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup bersih dan sehat	54,15 %	179.125.200			Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	54,15%	382.566.900	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10 Dokumen	179.125.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	10 Dokumen	382.566.900	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	243.434.700			Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	100%	409.428.500	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	243.434.700	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyarakat wilayah Kerja Puskesmas	12 Dokumen	409.428.500	DINAS KESEHATAN
					DINAS PEKERJAAN UMUM,			88.450.061.669					100.765.907.477	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			87.842.761.669					100.097.877.477	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			87.842.761.669					100.097.877.477	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (PUPR)	100 %	6.932.814.865				100 %	7.580.665.432	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terselesaikan	100 %	108.700.000			OPD	100%	106.465.260	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	47.100.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	38.705.260	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.200.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	5.720.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.200.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	5.720.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.100.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	OPD	1 Dokumen	8.910.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.100.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	8.910.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.300.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		8.030.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	15.200.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	16 Laporan	16.720.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	7.200.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	7.920.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.300.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Data	5.830.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang terseleisaikan tepat waktu	100 %	4.856.114.865			OPD	100%	5.341.716.672	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86/14 Orang/bulan	4.830.714.865	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	86 Orang/bulan	5.313.786.352	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	9.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Laporan	10.450.220	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	15.900.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	18 Laporan	17.480.100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	100 %	35.000.000			OPD	100%	38.500.000	
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	35.000.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	25 Orang	38.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	556.000.000			OPD	100%	610.393.500	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Paket	5.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Paket	13.750.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	45.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		49.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.500.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Paket	9.350.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411 Laporan	485.000.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	415 Laporan	532.493.500	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	205.000.000			OPD	100%	225.500.000	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	55.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	60.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	7 Unit	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	757.000.000			OPD	100%	831.400.000	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	54.000.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	58.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	135.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	43.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	540.000.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	594.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	415.000.000			OPD	100%	426.690.000	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	45.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	8 Unit	48.543.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	140.000.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	30 Unit	152.922.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit	110.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	6 Unit	112.612.500	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Ujungnge	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		112.612.500	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pelaksanaan Konservasi Sungai Rasio Jaringan Irigasi	100 % 9,10 Rasio	14.259.947.269				100% 9,45Rasio	15.686.822.556	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkat	92 %	4.577.277.269			P3A	95%	5.035.895.556	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	43.200.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	1 KM	47.520.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	250 Lembaga	74.282.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	330 Lembaga	81.710.200	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	16 KM	515.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	1,93 KM	566.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	41.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	1 Dokumen	45.990.560	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	9 Titik	1.558.848.609	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	12 Titik	1.714.733.470	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	15 Unit	2.344.946.660	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	38 Unit	2.579.441.326	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas layanan daerah irigasi Kewenangan kabupaten minimal Sedang (ha)	3949 Ha	9.682.670.000			P3A	3949Ha	10.650.927.000	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2 KM	892.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	2,5 KM	981.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM	2.465.200.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	P3A	1 KM	2.711.720.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	6.234.600.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	2 KM	6.858.050.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5 KM	58.440.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	2,75 KM	64.284.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen	32.430.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3A	3 Dokumen	35.673.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	91,37 %	2.235.000.000				91,37 %	2.458.500.000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak	128133 RT	2.235.000.000			Masyarakat	128823RT 128823RT	2.458.500.000	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	155.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	170.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	6,28 Liter/Detik	1.425.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	6,91 Liter/Detik	1.567.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	314 SR	655.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Masyarakat	345 SR	720.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,93 %	3.174.344.000				91,93 %	3.491.778.400	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar	128916 RT	3.174.344.000			Masyarakat	129100RT 129100RT	3.491.778.400	
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat	1 Unit	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	149.844.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	60 Rumah Tangga	164.828.400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	67 Rumah Tangga	2.850.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Masyarakat	164 Rumah Tangga	3.135.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	24.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	26.950.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Primer Kondisi Bsik	92,06 %	720.300.000				92,06 %	797.995.000	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Primer kondisi baik	1321 Meter	720.300.000			Masyarakat	1321Meter 14061Meter	797.995.000	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	531,187 Sistem Drainase Perkotaan	350.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	584,31 Sistem Drainase Perkotaan	385.495.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	655 Sistem Drainase Perkotaan	295.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	721,29 Sistem Drainase Perkotaan	324.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	75.300.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	88.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rekomendasi dan sertifikat teknis bangunan gedung yang diterbitkan	100 %	95.400.000				100 %	104.940.000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penerbitan rekomendasi dan serifikat teknis bangunan gedung	100 %	95.400.000			Masyarakat	100%	104.940.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	35 Dokumen	95.400.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	45 Dokumen	104.940.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	0,51 Rasio	60.126.081.235				0,51 Rasio	69.538.414.359	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkapnya yang Dibangun, Ditingkatkan, dan Dipelihara	14,50 KM	60.126.081.235			Masyarakat	19,54KM	69.538.414.359	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	775.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	5 Dokumen	852.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	15,80 KM	1.580.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	16,76 KM	1.738.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3,53 KM	6.598.702.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	3,89 KM	10.658.572.200	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13,74 KM	42.791.570.435	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Masyarakat	12,38 KM	47.070.727.479	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	700.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Masyarakat	5 Jembatan	770.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5 Jembatan	2.850.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	4 Jembatan	3.135.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	65 KM	415.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	67 KM	456.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	17 KM	4.415.808.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	20,542 KM	4.857.114.680	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat	98 %	144.474.300				98 %	268.921.730	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	100 %	144.474.300			Masyarakat	100%	268.921.730	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	75.874.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	2 Dokumen	193.461.730	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	68.600.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	9 Orang	75.460.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian dan Keteraturan Mendirikan Bangunan	95 %	154.400.000				95 %	169.840.000	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penataan Ruang	100 %	75.200.000			Masyarakat	100%	82.720.000	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.200.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	82.720.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	30 kali	43.500.000			Masyarakat	35kali	47.850.000	
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	47.850.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	28 Kali	35.700.000			Masyarakat	30Kali	39.270.000	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	35.700.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	12 Dokumen	39.270.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN			7.974.318.565					7681588836,61	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			7.974.318.565					7681588836,61	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			7.974.318.565					7681588836,61	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISPERKIM)	100 %	4.474.318.565				100 %	3332588836,61	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	29.000.000			Pegawai	100%	38.000.000	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	1 Laporan	5.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	12 Laporan	5.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Keuangan	100 %	3.795.318.565			-	100%	2975486836,61	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.783.318.565	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	33 Orang/bulan	2963486836,61	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	12.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Kepegawaian	100 %	6.000.000			-	100%	25.000.000	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	6.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Orang	25.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Peningkatan SDM	100 %	278.155.000			Pegawai	100%	103.949.000	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	1 Paket	1.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	1 Paket	1.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28 Dokumen	1.200.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	28 Dokumen	1.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	275.455.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	100 Laporan	100.449.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	100 %	304.962.800			Pegawai	100%	127.270.800	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	12 Laporan	12.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.400.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	12 Laporan	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.562.800	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	5 Laporan	2.562.800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	279.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	12 Laporan	102.708.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah	100 %	56.882.200			OPD	100%	56.882.200	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	40.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	18 Unit	15.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.882.200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	1.882.200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Ketersediaan Dokumen Penunjang Organisasi	100 %	4.000.000			-	100%	6.000.000	
1	04	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	100 %	440.000.000				100 %	440.000.000	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota	100 %	68.000.000			Masyarakat	100%	68.000.000	
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	46.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat	1 Dokumen	46.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat	1 Dokumen	12.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM	100 %	371.000.000			Masyarakat	100%	371.000.000	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	13 Unit Rumah	300.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	13 Unit Rumah	300.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	71.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat	3 Unit Rumah	71.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Site Plan yang disahkan	100 %	1.000.000			Masyarakat	100%	1.000.000	
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	1 Laporan	1.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh perkotaan	17,78 %	332.400.000				17,78 %	363.000.000	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman yang tertata	3,84 Ha	15.000.000			Masyarakat	0Ha	15.000.000	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani	0,05 Ha	317.400.000			Masyarakat	0,05Ha	348.000.000	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	6 Unit Rumah	128.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	6 Unit Rumah	128.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat	1 Laporan	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.02 Ha	169.400.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat	0.02 Ha	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Permukiman Layak Huni	0.500 %	153.600.000				0.500 %	46.000.000	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Rumah Layak Huni	0,496 %	153.600.000			Masyarakat	0,496%	46.000.000	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	6 Unit Rumah	153.600.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat	2 Unit Rumah	46.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	0,17 %	2.574.000.000				0,17 %	3.500.000.000	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas PSU Perumahan yang tertangani	0,40 Ha	2.574.000.000			Masyarakat	0,40Ha	3.500.000.000	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	14 Lokasi	2.574.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat	14 Lokasi	3.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			10.267.243.201					10.568.639.801	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.267.243.201					10.568.639.801	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			10.267.243.201					10.568.639.801	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (SATPOLPP)	100 %	8.190.396.001				100 %	8.207.937.701	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	33.696.000			dokumen perencanaan	100%	21.955.500	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.809.400	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen perencanaan	2 Dokumen	8.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.603.500	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen perencanaan	1 Dokumen	2.600.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.769.800	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen perencanaan	1 Dokumen	2.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.625.500	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen perencanaan	1 Laporan	2.625.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.444.900	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen perencanaan	1 Laporan	3.530.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.442.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen perencanaan	1 Data	2.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	5.434.048.101			dokumen dan laporan	100%	5.436.898.201	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	5.407.243.201	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	dokumen dan laporan	50 Orang/bulan	5.407.243.201	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Dokumen	23.259.900	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen dan laporan	1 Dokumen	25.180.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.220.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen dan laporan	1 Laporan	2.875.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.325.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen dan laporan	1 Laporan	1.600.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100 %	1.275.400			dokumen	100%	1.150.000	
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.275.400	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen	1 Dokumen	1.150.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	59.771.100			dokumen	100%	62.396.400	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	40.125.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen	45 Paket	42.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	19.646.100	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen	1 Dokumen	20.196.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	117.616.100			dokumen dan laporan	100%	128.069.100	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.226	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen dan laporan	3 Paket	9.226	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.635	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen dan laporan	0 Paket	9.765	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.160.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen dan laporan	3 Paket	2.100.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen dan laporan	1 Dokumen	3.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 Laporan	110.270.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	dokumen dan laporan	98 Laporan	120.270.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	39.989.400			barang milik daerah	100%	41.989.400	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	29.503.400	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	barang milik daerah	3 Unit	29.503.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.486.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	barang milik daerah	2 Unit	12.486.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	2.120.559.900			jasa penunjang	100%	2.121.039.100	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.911.900	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	jasa penunjang	1 Laporan	4.391.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.872.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	jasa penunjang	12 Laporan	24.872.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.091.776.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	jasa penunjang	12 Laporan	2.091.776.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	383.440.000			barang milik daerah	100%	394.440.000	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.070.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	barang milik daerah	1 Unit	59.570.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	319.750.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	barang milik daerah	15 Unit	329.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.720.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	barang milik daerah	6 Unit	2.820.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.900.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	barang milik daerah	1 Unit	2.300.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga Negara Warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/kota	100%	203.842.000				100%	235.696.900	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban, keindahan) undefined	100 % undefined undefined	144.782.300			masyarakat	100%	151.610.200	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.636.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	masyarakat	1 Dokumen	7.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	24.135.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	1 Dokumen	24.135.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	86 Orang	14.173.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	110 Orang	14.173.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	2.862.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	1 Dokumen	2.862.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	62 laporan	20.718.300	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	45 laporan	27.183.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	42 Laporan	17.724.900	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	38 Laporan	17.724.900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	700	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	1 Laporan	700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	18 Unit	57.830.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	3 Unit	57.830.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100 %	59.059.700			masyarakat	100%	84.086.700	
1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	10 laporan	34.473.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	5 laporan	44.470.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14 Laporan	6.770.400	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	2 Laporan	9.770.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	34 Laporan	10.791.900	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	38 Laporan	12.791.900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14 Laporan	7.023.900	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	20 Laporan	17.053.900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	1.873.005.200				100 %	2.125.005.200	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) dslam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %	1.799.510.500			masyarakat	100%	2.019.510.500	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	135 Laporan	1.734.648.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	masyarakat	120 Laporan	1.934.648.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	7 Unit	64.862.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	6 Unit	84.862.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	3.823.600			Masyarakat dan tempat	96%	3.823.600	
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	3.823.600	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan tempat usaha	1 Dokumen	3.823.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase investigasi terhadap kejadian kebakaran	100 %	2.339.500			korban kebakaran dan	100%	2.339.500	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	2.339.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	korban kebakaran dan warga terdampak	1 Dokumen	2.339.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	tingkat peran serta relawan kebakaran dalam penanggulangan kebakaran	4,8 %	25.091.200			masyarakat	4,6%	45.091.200	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang	5.493.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	740 Orang	15.493.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	19.598.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	12 Desa/Kelurahan	29.598.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penyelenggaraan layanan operasi pencarian dan penyelamatan	100 %	42.240.400			masyarakat	100%	54.240.400	
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	40 Laporan	7.942.400	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	48 Laporan	9.942.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit	34.298.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat	5 Unit	44.298.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					BADAN PENANGGGULANGAN			2.951.124.910					2.751.936.740	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.951.124.910					2.751.936.740	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (BPBD)	100 %	2.365.324.910				100 %	2.250.336.740	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pencapaian perencanaan dan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	12.000.000			OPD	100%	15.000.000	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	15.000.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencapaian administrasi keuangan	100 %	1.987.724.910			-	100%	1.834.337.740	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	1.987.724.910	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	22 Orang/bulan	1.834.337.740	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	130.118.000			OPD	100%	128.823.000	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	5 Paket	5.000.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	125.118.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	70 Laporan	123.823.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	149.272.000			OPD	100%	185.966.000	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	35.000.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.672.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	100.000.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.600.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	50.966.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	86.210.000			OPD	100%	86.210.000	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.130.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	42.130.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	36.770.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	36.770.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.260.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	6 Unit	4.260.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.050.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	5 Unit	3.050.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rata-Rata Capaian SPM	100 %	585.800.000				100 %	501.600.000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	320.800.000			Warga Negara	100%	241.600.000	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	156.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Warga Negara	20 Orang	156.000.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	64.800.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Warga Negara	12 laporan	85.600.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	25 Kawasan	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Warga Negara	25 Kawasan	-	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	100 %	250.000.000			Warga Negara	100%	250.000.000	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	250.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Warga Negara		250.000.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	15.000.000			-	100%	10.000.000	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Kegiatan	10.000.000	BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN			16.989.976.217					126.424.023.791	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			8.187.963.217					117.377.983.217	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			8.187.963.217					117.377.983.217	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DINSOS)	100 %	6.587.963.217				100 %	6.727.983.217	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah yan disusun tepat waktu	100 persen	78.200.000			-	100persen	98.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	63.200.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	64.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	5.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	3.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	3.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Data	3.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan perangkat Daerah tepat Waktu	100 %	5.975.983.217			-	100 %	5.976.983.217	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5.974.983.217	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	68 Orang/bulan	5.974.983.217	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	2.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	206.130.000			-	100persen	308.000.000	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Paket	2.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	20 Paket	3.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	-	-	-		3.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	200.130.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	60 Laporan	300.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	63.000.000			-	100persen	64.000.000	
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	63.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Unit	64.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	181.650.000			-	100persen	194.000.000	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	39.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	40.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	54.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.150.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	100.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	83.000.000			-	100persen	87.000.000	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	35.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	39.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Unit	40.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Unit	6.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Unit	6.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rata-rata Capaian Pemenuhan SPM	100 %	1.300.000.000				100 %	110.310.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, persentase penyandang disabilitas yang terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	300.000.000			-	100persen	310.000.000	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	125 Orang	210.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	20 Orang	100.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	100 %	1.000.000.000			-	100persen	110.000.000.000	
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1250 Orang	1.000.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	125 Orang	110.000.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	35.000.000				-	50.000.000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan anak2 terlantar	100 %	35.000.000			-	100persen	50.000.000	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10 Orang	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Orang	25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	500 Keluarga	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	500 Keluarga	25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100 %	250.000.000				-	270.000.000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 %	200.000.000			-	100persen	220.000.000	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	150 Orang	160.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	50 Orang	60.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	100 %	50.000.000			-	100persen	50.000.000	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Kampung	50.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100 %	15.000.000				-	20.000.000	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan TMP yang di kelola	100 %	15.000.000			-	100persen	20.000.000	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Makam	20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.199.113.849					5812346323,01	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6.199.113.849					5812346323,01	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISNAKERTRANS)	100 %	6.049.113.849				100 %	4746346323,01	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 persen	41.000.000			-	100persen	48.472.500	
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	16.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	3.447.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	3.447.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	3.447.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	3.447.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	3.682.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Data	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100 persen	3.940.333.849			-	100persen	3059473823,01	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3.930.333.849	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	39 Orang/bulan	3049473823,01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	3.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	2.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	3.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	7.000.000			-	100persen	15.000.000	
2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	142.470.000			-	100persen	268.000.000	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Paket	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Paket	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	122.470.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	40 Laporan	243.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	1.832.380.000			-	100persen	1.260.400.000	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	54.400.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Laporan	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.748.880.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	12 Laporan	1.191.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	85.930.000			-	100persen	95.000.000	
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	71.930.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	70.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Unit	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang memperoleh sertifikat kelulusan pelatihan peningkatan produktivitas	50 %	51.500.000				50 %	776.000.000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelatihan tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi	50 persen	40.000.000			Pencari Kerja	50persen	760.000.000	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	69 Orang	270.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Pencari Kerja	64 Orang	760.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	8 Unit	165.000.000	Kab. Wajo, Pammana, Lempa Kab. Wajo, Pammana, Pammana	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Masyarakat dan Pencari Kerja	1 Unit	300.000.000	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	100 persen	10.000.000			Pencari Kerja	100persen	10.000.000	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	7 Lembaga	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Pencari Kerja	7 Lembaga	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok tenaga kerja produktif	100 persen	1.500.000			Pencari kerja	100persen	6.000.000	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pencari kerja	1 Dokumen	6.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	33 %	78.000.000				33 %	200.000.000	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	13.000.000			Masyarakat dan Pencari Kerja	100persen	130.000.000	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	3 Orang	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Pencari Kerja	3 Orang	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	5 Orang	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Pencari Kerja	50 Orang	110.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pengelolaan informasi pasar kerja	100 persen	60.000.000			Masyarakat dan Pencari	100persen	60.000.000	
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Pencari Kerja	1 Dokumen	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Pencari Kerja	1000 Orang	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota yang dilindungi	100 persen	5.000.000			Masyarakat dan Pencari Kerja	100persen	10.000.000	
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	5 Orang	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Pencari	5 Orang	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	98,59 %	20.500.000				98,59 %	90.000.000	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	100 persen	4.500.000			Masyarakat dan Perusahaan	100persen	30.000.000	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	6 Perusahaan	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat dan Perusahaan	6 Perusahaan	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2 Perusahaan	1.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Perusahaan	2 Perusahaan	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Perusahaan	1 Laporan	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten / Kota	100 persen	16.000.000			Masyarakat dan Perusahaan	100persen	60.000.000	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Perusahaan	30 Perkara	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Perusahaan	5 Perkara	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Perusahaan	17 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Perusahaan	1 Lembaga	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6500 Orang	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Perusahaan	6500 Orang	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			572.777.500					584.000.000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender	100 %	10.700.000				100 %	11.000.000	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	% perangkat daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran Responsive Gender	100 %	10.700.000			-	100 %	11.000.000	
2	08	02	2.02	0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	50 Orang	10.700.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	100 %	202.319.000				100 %	205.000.000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	100 %	54.579.000			-	100 %	56.000.000	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	51.579.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Dokumen	52.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		4.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan rujukan yang memerlukan Koordinasi kewenangan kab/kota	100 %	101.600.000			-	100 %	102.000.000	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	101.600.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	15 Layanan	102.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan layanan perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan	100 %	46.140.000			-	100 %	47.000.000	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	46.140.000	-	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	20 Orang	47.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan	100 %	2.218.000				100 %	3.000.000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyediaan layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	100 %	2.218.000			-	100 %	3.000.000	
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	2.218.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	0 Perangkat Daerah	3.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak	100 %	19.859.500				100 %	20.000.000	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentae pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	19.859.500			-	100 %	20.000.000	
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	19.859.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	2 Organisasi	20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kecamatan/desa Layak Anak (%)	100 %	337.681.000				100 %	345.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan/Desa layak Anak	100 %	83.421.000			-	100 %	86.000.000	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	25 Orang	78.421.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	0 Orang	80.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	0 Dokumen	6.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000			-	-	201.000.000	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-		201.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	54.260.000			-	100persen	58.000.000	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	5 Orang	42.260.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	0 Orang	45.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	0 Dokumen	13.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			607.300.000					668.030.000	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	17.500.000				100 %	19.250.000	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi	2 Bidang	17.500.000			Masyarakat	2Bidang	19.250.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	19.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	75%	524.500.000				-	576.950.000	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	1 Kasus	524.500.000			Masyarakat	1Kasus	576.950.000	
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	524.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	576.950.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	100%	65.300.000				100%	71.830.000	
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah yang diselesaikan	1 Dokumen	65.300.000			Masyarakat	2Dokumen	71.830.000	
2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	65.300.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	71.830.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			273.400.000					273.400.000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	113.00 %	239.800.000				113.00 %	239.800.000	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan informasi penyediaan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 %	75.000.000			DPKP	100%	75.000.000	
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga	35.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPKP	30 Keluarga	35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPKP	1 Dokumen	35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah	100 %	140.000.000			DPKP	91,70skor 100%	140.000.000	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	140.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPKP	50 Ton	140.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor capaian target konsumsi pangan per kapita per tshun	89,60 skor	24.800.000			DPKP	100%	24.800.000	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	13.600.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	1 Dokumen	13.600.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	11.200.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	1 Laporan	11.200.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	3,28 %	29.600.000				3,28 %	29.600.000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100 %	29.600.000			DPKP	100%	29.600.000	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	29.600.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	1 Dokumen	29.600.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Permbinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	100,00 %	4.000.000				100,00 %	4.000.000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	1 dokumen	4.000.000			DPKP	1dokumen	4.000.000	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP	1 Dokumen	4.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6.722.429.453					7.370.975.731	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DLH)	99 %	4.166.139.453				99 %	4.583.256.731	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 Persen	24.000.000			OPD	100Persen	26.400.000	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	17.600.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	6.600.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	2.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD tepat waktu	99 Persen	3.627.829.453			OPD	99Persen	3.990.612.398	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.626.829.453	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	36 Orang/bulan	3.989.512.398	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	1.100.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 Persen	186.000.000			OPD	100Persen	204.600.000	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	5.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Paket	1.100.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	180.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	1 Laporan	198.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	61 Persen	6.000.000			OPD	61Persen	6.600.000	
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	1.100.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	1 Unit	5.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan yg tersedia	91 Persen	276.400.000			OPD	91Persen	304.273.333	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	22.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	43.400.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	47.740.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	213.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	234.333.333	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	92 Persen	45.910.000			OPD	92Persen	50.771.000	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	17.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	25 Unit	18.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	26.910.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	14 Unit	29.871.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	2.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yg disusun	60 %	80.000.000				60 %	88.000.000	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang disusun	75 Persen	80.000.000			OPD	75Persen	88.000.000	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	80.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	1 Dokumen	88.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	70,50 %	160.000.000				70,50 %	176.000.000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah lokasi / titik pencemaran LH yang dipantau	80 Persen	160.000.000			OPD	80Persen	176.000.000	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	80.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Sabangparu, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	OPD	1 Dokumen	88.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	80.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Majauleng, Tajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	OPD	1 Dokumen	88.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	20,07 %	333.388.500				20,07 %	344.727.350	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luasan Keaneka Ragaman Hayati (KEHATI) yang dipelihara	13 Persen	333.388.500			Masyarakat, OPD	13Persen	344.727.350	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10,79 Ha	333.388.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Sabangparu, Liu Kab. Wajo, Tanasitolo, Wae Tuwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, OPD	10,79 Ha	344.727.350	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan yg melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan LB3	56 %	40.000.000				56 %	44.000.000	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase usaha/kegiatan yg melakukan penyimpanan sementara Limbah B3	57 Persen	15.000.000			Pelaku Usaha/Kegiatan, OPD	57Persen	16.500.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Pelaku Usaha/Kegiatan, OPD	1 Laporan	16.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Limbah B3 yg terkumpul	54 Persen	25.000.000			Pelaku Usaha/Kegiatan, OPD	54Persen	27.500.000	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Pelaku Usaha/Kegiatan, OPD	1 Dokumen	27.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	26 %	10.000.000				26 %	8.800.000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	26 Persen	10.000.000			Pelaku Usaha/Kegiatan	26Persen	8.800.000	
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	56 Badan Usaha	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha/Kegiatan	56 Badan Usaha	8.800.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap aturan lingkungan hidup	100 %	5.000.000				100 %	5.500.000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	100 Persen	5.000.000			Masyarakat	100Persen	5.500.000	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12 Pengaduan	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Masyarakat	12 Pengaduan	5.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	50,04 %	1.927.901.500				50,04 %	2.120.691.650	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase luasan area pelayanan	24 Persen	1.927.901.500			Masyarakat	24Persen	2.120.691.650	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	225 Unit	150.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Masyarakat	66 Unit	165.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	5.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	34.800.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Pattirosompe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Masyarakat	1 Laporan	38.280.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	41.017 Ton	1.738.101.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	55.398 Ton	1.911.911.650	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.914.936.433					3.937.851.633	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DUKCAPIL)	100 %	3.605.851.633				-	3.605.851.633	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu	100 %	11.900.000			OPD	100%	11.900.000	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	11.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu	100 %	2.884.036.433			OPD	100%	2.884.036.433	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	2.883.936.433	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	35 Orang/bulan	2.883.936.433	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu	100 %	146.915.200			OPD	100%	146.915.200	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Paket	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	141.915.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	141.915.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terselesaikan tepat waktu	100 %	525.500.000			OPD	100%	525.500.000	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	36 Laporan	135.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	375.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	12 Laporan	375.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terselesaikan tepat waktu	100 %	37.500.000			OPD	100%	37.500.000	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Unit	12.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pencapaian Target Nasional Bidang Pendaftaran Penduduk	100 %	188.584.800				100 %	211.500.000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerapan IKD dari Jumlah Perekaman	40 %	33.500.000			Masyarakat	50%	33.500.000	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	33.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	1 Laporan	33.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	98,50 % 70 %	155.084.800			Masyarakat	99,00% 80%	178.000.000	
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	155.084.800	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	1 Dokumen	178.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencapaian Target Nasional Bidang Pencatatan Sipil	100 %	43.500.000				100 %	43.500.000	
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Buku Pokok Pemakaman	60 %	43.500.000			Masyarakat	80%	43.500.000	
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	43.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	1 Laporan	43.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Adminduk dan Inovasi Pelayanan	100 %	77.000.000				100 %	77.000.000	
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan secara tepat waktu	100 %	58.500.000			Masyarakat	100%	58.500.000	
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	58.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	1 Dokumen	58.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan terintegrasi	2 Inovasi	18.500.000			Masyarakat	2Inovasi	18.500.000	
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	18.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	1 Dokumen	18.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.510.170.884					5.256.620.884	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (PMD)	100 %	2.725.397.484				100 %	2.736.397.484	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Perencanaan dan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	53.200.000			OPD	100%	22.300.000	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	49.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	18.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.100.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.600.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	2.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Keuangan	100 %	2.272.097.484			OPD	100%	2.272.297.484	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.270.097.484	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	20 Orang/bulan	2.270.097.484	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	2.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Peningkatan SDM	100 %	135.000.000			OPD	100%	155.500.000	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	5 Paket	5.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	130.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	40 Laporan	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Milik Daerah	100 %	41.500.000			OPD	100%	41.500.000	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	41.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	3 Unit	41.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	100 %	189.600.000			OPD	100%	207.400.000	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35.100.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	OPD	12 Laporan	37.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	70.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	34.000.000			OPD	100%	37.400.000	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	28.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	7 Unit	30.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	6.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	15 Unit	6.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100 %	2.210.273.400				100 %	2.238.273.400	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2.210.273.400			Pemerintah Desa	100%	2.238.273.400	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2.060.273.400	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Pemerintah Desa	1 Dokumen	2.060.273.400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Desa	1 Dokumen	44.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Desa	1 Dokumen	44.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	70.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerintah Desa		90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan desa	100 %	574.500.000				100 %	281.950.000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang Dibina Kapasitas Kelembagaan dan Teknologi Tepat Gunanya	100 %	574.500.000			Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100%	281.950.000	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	142 Lembaga	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	142 Lembaga	33.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	44.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	2 Laporan	48.950.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	500.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	1 Dokumen	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA			8.229.235.500					8.462.040.574	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan informasi dan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100 %	166.040.574				100 %	167.040.574	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase stakeholder yang terlibat dalam pemetaan perkiraan pengendalian penduduk capaian daerah kabupaten/kotaPersentase stakeholder yang terlibat dalam pemetaan perkiraan pengendalian penduduk capaian daerah kabupaten/kotaPersentase stakeholder yang terlibat dalam pemetaan perkiraan pengendalian penduduk capaian daerah kabupaten/kota	100 %	166.040.574			-	100 %	167.040.574	
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	114.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	115.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	32.040.574	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Laporan	32.040.574	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	100 %	5.822.296.926				-	5.974.000.000	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan advokasi pemuktahiran data keluarga	100 %	1.577.274.200			-	100persen	1.594.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	126.685.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	12 Laporan	127.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Unit	150.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		160.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	918.278.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Laporan	920.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	256.774.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	4 Laporan	260.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1 Dokumen	11.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	115.537.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	5 Organisasi	116.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pendayagunaan tenaga pemuktahiran data keluarga	100 %	985.449.726			-	100persen	1.000.000.000	
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	-	-	415.449.726	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		420.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi	570.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		580.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alkon dan pelaksanaan pelayanan KB didaerah kabupaten/kota	100 %	1.742.573.000			-	100persen	1.762.000.000	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	82.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Laporan	83.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2500 Orang	522.073.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2500 Orang	530.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	500.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3 Unit	500.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	17.550.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		18.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	150 Orang	150.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		160.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 Orang	470.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		471.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100 %	1.517.000.000			-	100persen	1.618.000.000	
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	17.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Laporan	18.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Kampung	1.500.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	0 Kampung	1.600.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pelayanan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100 %	2.240.898.000				-	2.321.000.000	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1 program	2.215.898.000			-	17persen	2.295.000.000	
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	59.998.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	65.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2 Unit	300.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		310.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1 Orang	10.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	979 Orang	1.845.900.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		1.900.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	25.000.000			-	100persen	26.000.000	
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	0 Organisasi	26.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			5.437.347.253					5014090218,44	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISHUB)	100 %	5.284.384.053				100 %	4847855018,44	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	100 %	15.705.700			Organisasi Perangkat Daerah	100%	12.871.600	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.012.900	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.615.100	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.692.800	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	4.256.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD tepat waktu	100 %	3.755.795.013			Organisasi Perangkat Daerah	100%	3.309.259.129	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	3.749.347.413	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Organisasi Perangkat Daerah	456 Orang/bulan	3.304.807.829	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.447.600	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	4.451.300	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	10.500.000			Organisasi Perangkat Daerah	100%	5.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	10.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	30 Paket	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	100 %	129.215.100			Organisasi Perangkat	100%	203071189,44	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.131.500	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	7 Paket	2.298.700	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.252.500	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	1 Paket	3.162.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	1.587.500	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	11 Paket	1.794.200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	2.053.600	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	23 Paket	3.839.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	100.190.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	60 Laporan	191976789,44	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang terpenuhi	100 %	1.260.037.500			Organisasi Perangkat	100%	1.238.113.100	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	156 Laporan	30.105.600	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	156 Laporan	8.181.200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	12 Laporan	85.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4.931.900	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	2 Laporan	4.931.900	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.140.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Perangkat Daerah	12 Laporan	1.140.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan yang terpelihara	100 %	113.130.740			Organisasi Perangkat Daerah	100%	79.540.000	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	59.130.000	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	2 Unit	38.630.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	54.000.740	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Perangkat Daerah	36 Unit	40.910.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	100 %	142.072.100				100 %	154.752.900	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	100 %	34.414.500			Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	100%	24.296.800	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	3.978.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	3 Unit	4.254.200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 Unit	30.436.300	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	3 Unit	20.042.600	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal yang terpelihara	100 %	3.854.500			Masyarakat Penggunan Layanan	100%	5.052.600	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	3.854.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Penggunan Layanan Terminal	2 Unit	5.052.600	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang teregistrasi	100 %	60.467.200			Masyarakat Pengguna	100%	70.290.400	
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1.500 Unit	60.467.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pengguna Layanan PKB	3.800 Unit	70.290.400	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	29.967.100			Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	100%	36.164.600	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	6.234.300	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	12 Laporan	10.311.800	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	8.869.300	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	1 Laporan	10.049.300	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	10.596.000	Kab. Wajo, Tempe, Campalagi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	10 Dokumen	10.596.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	4.267.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	12 Laporan	5.207.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	4.432.700			Masyarakat/Badan Usaha/Pemerintah yang akan mendirikan Permukiman dan/atau	100%	8.240.600	
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	3 Laporan	4.432.700	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat/Badan Usaha/Pemerintah yang akan mendirikan Permukiman dan/atau	3 Laporan	8.240.600	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit/Inspeksi Keselamatan dan penetapan potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum	100 %	5.144.300			Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	100%	4.786.100	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	5.144.300	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pelaku Lalu-Lintas	6 Laporan	4.786.100	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen penyediaan angkutan umum	100 %	3.791.800			Masyarakat Pelaku Transportasi Angkutan Umum	100%	5.921.800	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.791.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pelaku Transportasi Angkutan Umum	12 Laporan	5.921.800	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelabuhan	100 %	10.891.100				100 %	11.482.300	
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan, pengendalian dan pendataan penumpang orang/ barang pada angkutan penyeberangan.	100 %	10.891.100			Masyarakat Pengguna Layanan Pelabuhan	100%	11.482.300	
2	15	03	2.06	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10.891.100	Kab. Wajo, Pitumpanua, Siwa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Pengguna Layanan Pelabuhan	12 Dokumen	11.482.300	DINAS PERHUBUNGAN
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6.735.455.665					6499484355,17	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISKOMINFOTIK)	100 %	3.757.052.565				100 %	3.111.186.783	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)	100 %	31.400.000			OPD	100%	16.625.000	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	13.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	3.125.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	2.250.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	2.250.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	2.250.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	2.250.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.100.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	2.250.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.300.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	2.250.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.923.354.265			OPD	100%	2.595.723.783	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.918.204.265	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	26 Orang/bulan	2.589.723.783	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	3.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.650.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	3.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	217.924.500			OPD	100%	140.913.000	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Paket	5.700.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	7.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	6 Paket	5.700.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Paket	27.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	-	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	3 Dokumen	500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	165.424.500	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	20 Laporan	101.513.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	151.500.000			-	100%	15.950.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	22.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	2.950.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	129.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Unit	13.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	306.332.800			OPD	100%	281.225.000	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	5.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235.332.800	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	225.725.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	119.591.000			OPD	100%	55.050.000	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	15.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	9.591.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Unit	9.550.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	33.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	1 Dokumen	6.950.000			OPD	1Dokumen	5.700.000	
2	16	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	6.950.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	-	OPD	1 Dokumen	5.700.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebarluasan Informasi	80 %	998.800.000				80 %	1818297572,17	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	80 %	998.800.000			OPD	80%	1818297572,17	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	686.681.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	139.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	21.332.100	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD	20 Komunitas	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	53.341.700	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Permohonan	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	20.882.200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD	1 Rekomendasi	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	150.376.100	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	1 Media	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	66.186.900	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	1 Konten	1488797572,17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	55 %	1.979.603.100				55 %	1.570.000.000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi (%) Persentase Perangkat Daerah/Even/Aplikasi Yang Menggunakan Sub Domain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 % 100 %	209.761.000			OPD	80%	185.000.000	
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	209.761.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD	1 Dokumen	185.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah (%)	55 %	1.769.842.100			OPD	55%	1.385.000.000	
2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi	10.800.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Aplikasi	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	19.310.400	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	-	OPD	1 Laporan	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	30.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	202.603.800	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	24.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Aplikasi	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	10.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD	2 Aplikasi	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	39 unit	15.120.800	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	39 unit	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	3 Layanan	17.648.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Layanan	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	11.648.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	5 Program	80.650.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	5 Program	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	7 Aplikasi	12.560.400	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	7 Aplikasi	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	39 Perangkat Daerah	1.334.000.700	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD	39 Perangkat Daerah	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.255.627.966					8.463.202.534	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISPERINDAGKOP)	100 %	7.135.627.966				100 %	8.098.202.534	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi Kinerja Peragkat Daerah tepat waktu	100 %	39.500.000			Pegawai	100%	48.925.000	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	2 Dokumen	10.925.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	1 Dokumen	7.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	1 Dokumen	7.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	1 Laporan	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	2 Laporan	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	33 Data	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	4 Data	3.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pegawai	1 Berita Acara	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	5.896.677.966			pegawai	100%	6.528.277.534	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	5.886.677.966	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	68 Orang/bulan	6.518.277.534	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	1 Laporan	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	3 Laporan	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 %	20.000.000			pegawai	100%	30.000.000	
2	17	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	20.000.000			pegawai	100%	46.000.000	
2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	8 Orang	36.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	399.000.000			pegawai	100%	465.000.000	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	15 Paket	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	20 Paket	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	30.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	20 Paket	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	351.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	12 Laporan	425.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	70.000.000			pegawai	100%	25.000.000	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	70.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	4 Unit	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	558.450.000			pegawai	100%	790.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	12 Laporan	40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	12 Laporan	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	393.450.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	pegawai	12 Laporan	550.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	132.000.000			pegawai	100%	165.000.000	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	92.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	20 Unit	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	7 Unit	15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pegawai	1 Unit	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi	100 %	5.000.000				100 %	15.000.000	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	15 Koperasi 15 Unit Usaha	5.000.000			Koperasi	15Koperasi	15.000.000	
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit Usaha	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Koperasi	15 Unit Usaha	15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	100 %	20.000.000				100 %	35.000.000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	35 Koperasi	20.000.000			Koperasi	35Koperasi	35.000.000	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	35 Unit Usaha	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Koperasi	35 Unit Usaha	35.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	100 %	15.000.000				100 %	40.000.000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	30 Koperasi	15.000.000			Koperasi	30Koperasi	40.000.000	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	35 Unit Usaha	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Koperasi	35 Unit Usaha	40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persetase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	100 %	64.000.000				100 %	215.000.000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	178 UMKM	64.000.000			Pelaku Usaha	305UMKM	215.000.000	
2	17	07	2.01	0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	5 Unit Usaha	10.000.000	Kab. Wajo, Sabangparu, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pelaku Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	2.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	18 Unit Usaha	4.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pelaku Usaha	30 Unit Usaha	45.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	130 Unit Usaha	24.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pelaku Usaha	150 Unit Usaha	40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	25 Orang	25.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pelaku Usaha	30 Orang	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan promosi produk UMKM	100 %	16.000.000				100 %	60.000.000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan dengan Orientasi skala usaha menjadi skala kecil	30 UMKM	16.000.000			Pelaku Usaha	30UMKM	60.000.000	
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pelaku Usaha	20 Unit Usaha	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	6 Unit Usaha	6.000.000	Kab. Wajo, Majauleng, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tanasitolo, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pelaku Usaha	30 Unit Usaha	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.262.080.362					4.262.080.362	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DPMPTSP)	100 %	3.538.353.362				100 %	3.538.353.362	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	100 Persen	35.500.000			OPD	100Persen	35.500.000	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Dokumen	17.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	3.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	3.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	3.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	3.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Data	4.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen	2.900.053.362			OPD	100Persen	2.900.053.362	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.892.053.362	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	27 orang/Bulan Orang/bulan	2.892.053.362	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilayani	100 Persen	31.000.000			OPD	100Persen	31.000.000	
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Paket	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	4 Orang	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	190.718.500			OPD	100Persen	190.718.500	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Paket	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Paket	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Paket	4.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Paket	4.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	159.718.500	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	159.718.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Diadakan	100 Persen	69.000.000			OPD	100Persen	69.000.000	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Unit	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	54.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	3 Unit	54.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	272.081.500			OPD	100Persen	272.081.500	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.832.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	14.832.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	65.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	184.249.500	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	184.249.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan yang Terpelihara	100 Persen	40.000.000			OPD	100Persen	40.000.000	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Unit	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Unit	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai investasi yang direalisasikan terhadap total nilai investasi yang disetujui	100 %	32.000.000				100 %	32.000.000	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitasi/Insentif sesuai Perundangan dan Kewenangan Daerah	100 Persen	15.000.000			OPD	100Persen	15.000.000	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan Potensi Investasi Daerah Berdasarkan Wilayah Kecamatan	100 Persen	17.000.000			OPD	100Persen	17.000.000	
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	14 Daerah	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	14 Daerah	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor berskala nasional (PMDN/PMA)	100 %	20.000.000				100 %	20.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Berskala Nasional/Internasional yang diselenggarakan /diikuti	100 Persen	20.000.000			OPD	100Persen	20.000.000	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 %	28.500.000				100 %	28.500.000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	100 Persen	28.500.000			OPD	100Persen	28.500.000	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha	13.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	4000 Pelaku Usaha	13.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	50 Pelaku Usaha	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	10 Kegiatan Usaha	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	10 Kegiatan Usaha	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha penanaman modal yang menjalankan kegiatan investasi sesuai dengan perundangan yang berlaku	100 %	638.227.000				100 %	638.227.000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Penanaman Modal yang dikendalikan	100 Persen	638.227.000			OPD	100Persen	638.227.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha.	101.026.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	OPD	4 Kegiatan Usaha.	101.026.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku Usaha	250.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	OPD	120 Pelaku Usaha	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	287.201.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	OPD	20 Kegiatan Usaha	287.201.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan data dan Informasi pendukung penanamana modal yang akurat	100 %	5.000.000				100 %	5.000.000	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan secara Elektronik yang Memanfaatkan Data Olahan Terintegrasi Tingkat Daerah	100 Persen	5.000.000			OPD	100Persen	5.000.000	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			48.563.570.063					54.864.565.732	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISPORAPAR)	100 %	4.074.640.732				100 %	4.264.565.732	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	36.000.000			OPD	100%	46.000.000	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Dokumen	20.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	5.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Laporan	5.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Berita Acara	6.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	100 %	3.531.440.732			OPD	100%	3.533.440.732	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.524.440.732	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	OPD	34 Orang/bulan	3.524.440.732	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	6.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	3.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD tepat waktu	100 %	22.125.000			OPD	100%	22.125.000	
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	22.125.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Orang	22.125.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	182.100.000			OPD	100%	259.000.000	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	5 Paket	2.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	5 Paket	6.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	600	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Dokumen	1.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	175.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	4 Laporan	250.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	262.875.000			OPD	100%	358.000.000	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	35.965.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	4 Laporan	40.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	17.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	4 Laporan	18.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	209.910.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	4 Laporan	300.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	40.100.000			OPD	100%	46.000.000	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	35.100.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	6 Unit	40.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	4 Unit	6.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	100 %	66.000.000				100 %	220.000.000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	100 %	66.000.000			Organisasi Kepemudaan	100%	220.000.000	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	16.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Kepemudaan	60 Orang	160.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Organisasi Kepemudaan	30 Orang	60.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	100 %	44.297.429.331				100 %	50.230.000.000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Sport yang representatif	90 %	41.887.429.331			Induk organisasi cabang olahraga	100%	45.000.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Unit	41.887.429.331	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Induk organisasi cabang olahraga	3 Unit	45.000.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi olahraga	5 Cabor	950.000.000			Induk organisasi cabang	8Cabor	2.450.000.000	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	550.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Induk organisasi cabang olahraga	1 Kegiatan	2.000.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	4 Orang	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Induk organisasi cabang olahraga	10 Orang	450.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi ditingkat provinsi	31 Atlet	1.250.000.000			Induk organisasi cabang	33Atlet	1.090.000.000	
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	10 Orang	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Induk organisasi cabang olahraga	12 Orang	60.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	400.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Induk organisasi cabang olahraga	10 Orang	200.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	10 Orang	775.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Induk organisasi cabang olahraga	12 Orang	800.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Induk organisasi cabang olahraga	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	1 Organisasi	75.000.000			Induk organisasi	1Organisasi	1.500.000.000	
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tempe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Induk organisasi cabang olahraga	1 Dokumen	1.500.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	135.000.000			Induk organisasi	2Cabor	190.000.000	
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Induk organisasi cabang olahraga	1 Laporan	40.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Induk organisasi cabang olahraga	1 Laporan	150.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan pramuka	100 %	125.500.000				100 %	150.000.000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase 0rganisasi pramuka yang aktif	100 %	125.500.000			Organisasi Kepramukaan	100%	150.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	125.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	150.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			73.591.600					80.000.000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100 %	73.591.600				100 %	80.000.000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100 %	73.591.600			OPD	100%	80.000.000	
2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	39 Orang	17.710.400	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	39 Orang	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	17.710.400	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	100 Persentase	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	22.810.400	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	100 Persentase	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Dokumen	15.360.400	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	5 Dokumen	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			28.207.000					58.450.000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan Informasi pemerintah	20,92 %	28.207.000				20,92 %	58.450.000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 %	21.036.300			OPD	60%	43.500.000	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.586.300	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	10.450.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Titik Yang Diamankan Dibanding Dengan Jumlah Seluruh Titik Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) Yang Ditetapkan	100 %	7.170.700			OPD	100%	14.950.000	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	39 Perangkat Daerah	7.170.700	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	39 Perangkat Daerah	14.950.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			360.000.000					1.160.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Budaya	100 %	130.000.000				100 %	200.000.000	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	130.000.000			Satuan Pendidikan	100%	200.000.000	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	10 Objek	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	300 Orang	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	300 Orang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100 %	30.000.000				100 %	175.000.000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunyadalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	30.000.000			Satuan Pendidikan	100%	175.000.000	
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	100 Orang	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Dalam daerah Kabupaten/Kota	100 %	50.000.000				100 %	135.000.000	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	50.000.000			Satuan Pendidikan	100%	135.000.000	
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100 Orang	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan	50 Orang	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	150.000.000				100 %	435.000.000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %	120.000.000			Kelompok Masyarakat	100%	250.000.000	
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	120.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kelompok Masyarakat	30 Objek	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %	30.000.000			Kelompok Masyarakat	100%	185.000.000	
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Kelompok Masyarakat	5 Objek	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			79.500.000					110.000.000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Literasi Masyarakat	100 %	79.500.000				100 %	110.000.000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas layanan pengelolaan Perpustakaan Daerah	100 %	69.500.000			Sekretariat Daerah	100%	95.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	12.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Perpustakaan	15.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PELAYANAN DASAR
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan	25.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Perpustakaan	25.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PELAYANAN DASAR
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	14.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	5 Orang	15.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PELAYANAN DASAR
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	20 Eksemplar	11.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	20 Eksemplar	25.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PELAYANAN DASAR
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	7.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Perpustakaan	15.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PELAYANAN DASAR
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Literasi Minat Baca	100 %	10.000.000			Sekretariat Daerah	100%	15.000.000	
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	25 Orang	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	25 Orang	15.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PELAYANAN DASAR
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			35.000.000					38.500.000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Pengelolaan Arsip Daerah	100 %	35.000.000				100 %	38.500.000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan arsip daerah	100 %	15.000.000			Sekretariat Daerah	100%	16.500.000	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Berkas	16.500.000	BAGIAN UMUM
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi arsip daerah yang terkoneksi dengan sistem informasi arsip nasional	100 %	20.000.000			Sekretariat Daerah	100%	22.000.000	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah		22.000.000	BAGIAN UMUM
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.916.472.064					6.004.783.147	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISKAN)	100 %	3.478.472.064				100 %	3.821.000.000	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	100 %	32.000.000			-	100%	28.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	15.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	4.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	2.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Berita Acara	4.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	2.987.872.064			ASN Dinas Perikanan dan Laporan	100%	3.010.000.000	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.981.872.064	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Dinas Perikanan dan Laporan	32 Orang/bulan	3.000.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Dinas Perikanan dan Laporan Keuangan	1 Laporan	5.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Dinas Perikanan dan Laporan Keuangan	1 Laporan	5.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dilayani	1 Orang	17.000.000			ASN Dinas Perikanan	100%	17.000.000	
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	17.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Dinas Perikanan	3 Orang	17.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	203.600.000			-	100%	247.000.000	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Paket	2.000.000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Paket	5.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Paket	15.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	190.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	220.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	10.000.000			Aset Dinas Perikanan	100%	70.000.000	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aset Dinas Perikanan	1 Unit	70.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN dan Non ASN yang dilayani	62 Orang	180.000.000			ASN dan Non ASN Dinas	100%	348.000.000	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Non ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	25.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Non ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	73.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	110.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Non ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara	100 %	44.000.000			Aset Dinas Perikanan	100%	95.000.000	
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	35.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aset Dinas Perikanan	7 Unit	47.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aset Dinas Perikanan	5 Unit	13.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aset Dinas Perikanan	1 Unit	35.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi perangkat Daerah	3 Dokumen	4.000.000			-	3Dokumen	6.000.000	
3	25	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	6.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	0,96 %	255.000.000				0,96 %	675.783.147	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	44.217,17 Ton	250.000.000			-	45.543,68Ton	655.783.147	
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10 Unit	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	10 Unit	295.783.147	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit	150.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	2 Unit	360.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang Diberdayakan	20 %	5.000.000			Nelayan	40%	20.000.000	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nelayan	50 Orang	20.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	0,94%	110.000.000				0,94%	1.295.000.000	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang Diberdayakan	15%	110.000.000			Pembudidaya Ikan	15%	1.295.000.000	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	40.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	Pembudidaya Ikan	2 Unit	545.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	70.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembudidaya Ikan	3 Unit	750.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan	100 %	3.000.000				100 %	3.000.000	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Sumberdaya Perikanan yang Diawasi	15 Unit Usaha	3.000.000			Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	15Unit Usaha	3.000.000	
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	15 Pelaku Usaha	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil	5 Pelaku Usaha	3.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Ikan yang di Konsumsi	0.94 %	70.000.000				0.94 %	210.000.000	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diverifikasi	20 Kelompok	7.500.000			-	25Kelompok	10.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	7.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Skala Mikro dan Kecil yang Memperoleh Pembinaan	10 %	42.500.000			Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	15%	50.000.000	
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	42.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	5 Unit Usaha	50.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produksi Perikanan yang Didistribusi Sebagai Bahan Baku Industri	0.43 %	20.000.000			Pembudidaya Ikan	0.43%	150.000.000	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	Pembudidaya Ikan	1 Pelaku Usaha	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			180.000.000					435.000.000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAD sektor pariwisata	0,10 %	60.000.000				0,10 %	245.000.000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikelola	3 Destinasi	50.000.000			Destinasi	3Destinasi	225.000.000	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Destinasi	3 Unit	200.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Destinasi	1 Laporan	25.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah yang diterbitkan	10 Rekomendasi	10.000.000			Pelaku Usaha	10Rekomendasi	20.000.000	
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	10 Usaha	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha	10 Usaha	20.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata	36,06 %	120.000.000				36,06 %	190.000.000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi, kawasan, daya tarik wisata Kab/Kota yang dipasarkan dalam dan luar negeri	32 Obyek	120.000.000			Obyek Wisata	32Obyek	190.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Obyek Wisata	1 Kegiatan	150.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Obyek Wisata	1 Promosi	40.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			45.805.060.864					45.805.060.864	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DPKP)	95 %	20.112.751.864				95 %	20.112.751.864	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 % undefined undefined	46.722.500			DPKP	100%	46.722.500	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen Dokumen	32.622.500	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	2 Dokumen	32.622.500	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	1 Laporan	2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.600.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	4 Laporan	2.600.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	1 Dokumen	4.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	96,00 %	19.418.151.864			DPKP	97,00%	19.418.151.864	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	19.404.951.864	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	197 Orang/bulan	19.404.951.864	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	11.200.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	1 Dokumen	11.200.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	1 Laporan	2.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi pegawai PD yang dilayani	95 %	4.000.000			DPKP	100%	4.000.000	
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	1 Dokumen	4.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	98,00 %	283.694.500			DPKP	98,50%	283.694.500	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.322.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	3 Paket	26.322.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.860.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	2 Paket	5.860.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.012.500	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	1 Dokumen	4.012.500	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	2.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	5 Paket	2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	245.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP	105 Laporan	245.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	104.040.000			DPKP	100%	104.040.000	
3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	104.040.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	0 Unit	104.040.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	90,00 %	191.703.000			DPKP	95,00%	191.703.000	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	1 Laporan	15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	137.800.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	1 Laporan	137.800.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.331.600	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	1 Laporan	3.331.600	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.571.400	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	1 Laporan	35.571.400	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara Persentase BMN penunjang urusan yang terpelihara	93,00 % 93 %	64.440.000			DPKP	95,00%	64.440.000	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	50.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	3 Unit	50.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.440.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPKP	2 Unit	14.440.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian	90,00 %	325.400.000				90,00 %	325.400.000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penggunaaan sarana pertanian yang dioptimalkan	94,00 %	265.000.000			DPKP	95,00%	265.000.000	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DPKP	1 Laporan	250.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP	1 Laporan	15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	80 %	60.400.000			DPKP	85%	60.400.000	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	1 Dokumen	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	2 Dokumen	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	20.400.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	DPKP	1 laporan	20.400.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100 %	23.924.099.000				100 %	23.924.099.000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	100 %	48.000.000			DPKP	100%	48.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP	1 Laporan	3.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	1 Ha	40.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP	1 Ha	40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP	1 Unit	5.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terpenuhi	99,75 %	23.876.099.000			Kelompok Masyarakat	100,00%	23.876.099.000	
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	244.800.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Kelompok Masyarakat	17 Unit	244.800.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 Unit	7.774.060.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Kelompok Masyarakat	43 Unit	7.774.060.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2.619.140.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng Kab. Wajo, Belawa, Malangke	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Kelompok Masyarakat	2 Unit	2.619.140.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	67 Unit	12.665.179.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Kelompok Masyarakat	94 Unit	12.665.179.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	572.920.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Kelompok Masyarakat	1 Unit	572.920.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang dikendalikan	15,00 %	796.300.000				15,00 %	796.300.000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan penyakit hewan menular	90,00 %	30.000.000			DPKP	40%	30.000.000	
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	3 Wilayah	30.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPKP	1 Wilayah	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik	99,20 %	762.300.000			DPKP	99,50%	762.300.000	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	762.300.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DPKP	1 Laporan	762.300.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit Kesehatan Masyarakat Veteriner yang tertangani	75 %	4.000.000			DPKP	80%	4.000.000	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP	1 Laporan	4.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertangani	75,00 %	9.000.000				75,00 %	9.000.000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase luas serangan OPT yang tertangani	100 %	9.000.000			DPKP, Kelompok Masyarakat	100%	9.000.000	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	4.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP, Kelompok Masyarakat	1 Ha	4.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	4.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP, Kelompok Masyarakat	1 Laporan	4.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani yang dibina	72,00 %	637.510.000				72,00 %	637.510.000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Frekwensi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4 kali	637.510.000			DPKP, Kelompok	4kali	637.510.000	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Unit	205.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	DPKP, Kelompok Masyarakat	14 Unit	205.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DPKP, Kelompok Masyarakat	1 Unit	2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	260.010.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DPKP, Kelompok Masyarakat	5 Unit	260.010.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	4 Unit	170.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	DPKP, Kelompok Masyarakat	6 Unit	170.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			423.000.000					705.000.000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan sarana distribusi perdagangan	100 %	93.000.000				100 %	300.000.000	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola	4 Unit	48.000.000			masyarakat	4Unit	250.000.000	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Bola, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	masyarakat	4 Unit	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 Unit	13.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	masyarakat	50 Unit	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	30	03	2.01	0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	1 laporan	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	masyarakat		20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	12 kali	45.000.000			pedagang	14kali	50.000.000	
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	45.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pedagang	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	30.000.000				100 %	130.000.000	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali	10 Bahan Pokok	30.000.000			pedagang	10Bahan Pokok	130.000.000	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pedagang	1 Laporan	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	pedagang	1 Laporan	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Promosi Dagang yang diselenggarakan	100 %	250.000.000				100 %	200.000.000	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan	4 kali	250.000.000			Pelaku Usaha	4kali	200.000.000	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15 Pelaku Usaha	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang berstandarisasi	100 %	40.000.000				100 %	55.000.000	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan	12 kali	40.000.000			Pedagang dan Pengusaha	12kali	55.000.000	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	350 Unit	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pedagang dan Pengusaha	330 Unit	35.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pedagang dan Pengusaha	150 Orang	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	100 %	10.000.000				100 %	20.000.000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri	20 UMKM	10.000.000			Pelaku Usaha	20UMKM	20.000.000	
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha	20 UMKM	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			110.000.000					175.000.000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri	85 %	90.000.000				85 %	155.000.000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1 Laporan	90.000.000			Pelaku IKM	1Laporan	155.000.000	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pelaku IKM	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku IKM	1 Dokumen	80.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Wajo, Sabangparu, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Majauleng, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tanasitolo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku IKM	1 Dokumen	45.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data industri kecil, menengah di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas	100 %	20.000.000				100 %	20.000.000	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas	75 Data 75 Data	20.000.000			Pelaku IKM	80Data	20.000.000	
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pelaku IKM	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pelaku IKM	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			42.500.000					290.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan dan Sarana Prasarana yang akan dibangun	60 %	1.500.000				60 %	-	
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase pencapaian pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	100 persen	1.500.000			Warga Transmigrasi	100persen	-	
3	32	02	2.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Gilireng, Paselloreng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Warga Transmigrasi	1 Dokumen	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Tahap Pengembangan	50% %	29.500.000				50% %	80.000.000	
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian pembangunan satuan pemukiman pada tahap pengembangan	100 persen	29.500.000			Warga Transmigrasi	100persen	80.000.000	
3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Paselloreng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Warga Transmigrasi	1 Laporan	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Paselloreng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Warga Transmigrasi	1 Dokumen	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	20 Kepala Keluarga	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Gilireng, Paselloreng	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Warga Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15 Orang	15.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Paselloreng	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Warga Transmigrasi	15 Orang	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	1.500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Paselloreng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Warga Transmigrasi	1 Lokasi	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	30 %	11.500.000				30 %	210.000.000	
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	100 persen	11.500.000			Warga Transmigrasi	100persen	210.000.000	
3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	19 Kepala Keluarga	10.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Paselloreng	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Warga Transmigrasi	19 Kepala Keluarga	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	1.500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Paselloreng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Warga Transmigrasi	1 Satuan Permukiman	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			14.268.325.949					14.215.097.349	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			14.268.325.949					14.215.097.349	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (SETDA)	100 %	14.268.325.949				100 %	14.215.097.349	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	258.000.000			Sekretariat Daerah	100%	278.771.400	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	160.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	16.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	15.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah		28.771.400	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	13.169.156.501			Sekretariat Daerah	100%	13.085.156.501	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan	12.832.156.501	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Sekretariat Daerah	108 Orang/bulan	12.832.156.501	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	300.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1000 Dokumen	210.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	15.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	27.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	28.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100 %	65.000.000			Sekretariat Daerah	100%	75.000.000	
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	65.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	2 Laporan	75.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase keuangan dan operasional Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100 %	776.169.448			Sekretariat Daerah	100%	776.169.448	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	776.169.448	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	776.169.448	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			35.060.425.949					32.876.048.249	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (SETDA)	100 %	26.761.725.949				100 %	25.419.548.249	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	258.000.000			Sekretariat Daerah	100%	278.771.400	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	160.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	16.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah		28.771.400	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	13.169.156.501			Sekretariat Daerah	100%	13.085.156.501	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan	12.832.156.501	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Sekretariat Daerah	108 Orang/bulan	12.832.156.501	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	300.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1000 Dokumen	210.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	27.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	28.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100 %	65.000.000			Sekretariat Daerah	100%	75.000.000	
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	65.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	2 Laporan	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	162.000.000			Sekretariat Daerah	100%	176.000.000	
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	55.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	112.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	30 Orang	121.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	2.370.000.000			Sekretariat Daerah	100%	2.657.000.000	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	40.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	10 Paket	44.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	300.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	25 Paket	330.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	75 Paket	33.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	500.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.500.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	1.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.100.000.000			Sekretariat Daerah	100%	2.120.000.000	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	4.000.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Sekretariat Daerah	2 Unit	2.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	30.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	5 Unit	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	70.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	12 Unit	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.533.350.000			Sekretariat Daerah	100%	1.336.460.900	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	2 Laporan	62.028.900	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	308.350.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	308.350.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.175.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat Daerah	2 Laporan	966.082.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan yang terpenuhi	100 %	1.235.000.000			Sekretariat Daerah	100%	1.504.990.000	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	300.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	3 Unit	345.170.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	385.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	10 Unit	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	400.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	3 Unit	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	150.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	5 Unit	159.820.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase keuangan dan operasional Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100 %	1.494.219.448			Sekretariat Daerah	100%	1.496.169.448	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	776.169.448	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	776.169.448	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	68.050.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	6 Paket	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	2 Orang	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan yang difasilitasi	100 %	1.800.000.000			Sekretariat Daerah	100%	2.050.000.000	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	1.200.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	15 Paket	1.300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	500.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	10 Paket	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	5 Paket	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Cakupan Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi sesuai ketentuan	100 %	250.000.000			Sekretariat Daerah	100%	275.000.000	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	100.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	5 Dokumen	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	6 Laporan	55.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	100.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	3 Dokumen	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kebutuhan keprotokoleran pimpinan yang terpenuhi	100 %	325.000.000			Sekretariat Daerah	100%	365.000.000	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	200.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	215.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	100.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	25.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Baik, Cerdas, Sehat dan Beriman	100 %	7.191.200.000				100 %	6.350.000.000	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyusunan kebijakan dan laporan di bidang administrasi pemerintahan	100 %	2.493.000.000			Sekretariat Daerah	100%	2.505.000.000	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	165.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	2.163.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	2.165.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	165.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan hasil evaluasi yang diimplementasikan berdasarkan kebijakan bidang kesejahtraan rakyat	100 %	3.880.000.000			Sekretariat Daerah	100%	3.080.000.000	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	3.800.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Sekretariat Daerah	7 Dokumen	3.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Laporan Penyusunan Hukum berdasarkan Kebijakan Daerah	100 %	818.200.000			Sekretariat Daerah	100%	765.000.000	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	265.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	270.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30 Kasus	165.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	30 Kasus	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen	388.200.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	50 Dokumen	325.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Ekonomi dan Pembangunan yang merata dan Berkeadilan	100 %	1.107.500.000				100 %	1.106.500.000	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase laporan hasil evaluasi yang diimplementasikan berdasarkan kebijakan bidang ekonomi	100 %	210.000.000			Sekretariat Daerah	100%	231.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	110.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	121.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	100.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase penyusunan kebijakan dan laporan di bidang administrasi pembangunan	100 %	292.500.000			Sekretariat Daerah	100%	210.000.000	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	82.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	90.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	105.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	2 Laporan	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	105.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	2 Laporan	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan paket pelelangan barang dan jasa	12 Laporan	535.000.000			Sekretariat Daerah	12Laporan	588.500.000	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Dokumen	150.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	100 Dokumen	165.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	350.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	50 Dokumen	385.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	112 Orang	35.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat Daerah	112 Orang	38.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase laporan hasil evaluasi yang diimplementasikan berdasarkan kebijakan bidang SDA	100 %	70.000.000			Seekretariat Daerah	100%	77.000.000	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	70.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Seekretariat Daerah	1 Dokumen	77.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	02				SEKRETARIAT DPRD			42.516.794.528					45.169.034.528	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (SETWAN)	98 %	25.178.472.808				98 %	25.535.184.928	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100 Persentase	46.500.000			Sekretariat DPRD	100Persentase	50.500.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	22.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	22.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Laporan	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	4 Laporan	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	100 Persentase	3.694.195.976			Sekretariat DPRD	100Persentase	3.697.695.976	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.642.195.976	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Sekretariat DPRD	38 Orang/bulan	3.642.195.976	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	25.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	700 Dokumen	25.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Laporan	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	13 Laporan	22.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasi sesuai standar	100 Persentase	13.500.000			Sekretariat DPRD	100Persentase	15.000.000	
4	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	4 Laporan	11.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 Persentase	117.000.000			Sekretariat DPRD	100Persentase	168.000.000	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	10 Paket	10.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	40 Orang	150.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	100 Persentase	1.323.800.000			Sekretariat DPRD	100Persentase	1.468.800.000	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	10 Paket	17.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	40.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	10 Paket	50.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	900.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	40 Dokumen	920.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	12 Paket	16.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	12 Laporan	22.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	12 Laporan	400.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	33.800.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	43.800.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah penunjang urusan yang diadakan	100 Persentase	260.000.000			Sekretariat DPRD	100Persentase	64.000.000	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	0 Unit	-	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	40 Unit	12.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	12 Unit	52.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan yang tersedia	100 Persentase	1.068.467.880			Sekretariat DPRD	100Persentase	1.077.000.000	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	12 Laporan	55.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	381.898.980	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	12 Laporan	382.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	636.568.900	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	12 Laporan	640.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	85 Persentase	430.860.000			Sekretariat DPRD	90Persentase	466.040.000	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	175.820.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	4 Unit	176.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	100.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	17 Unit	110.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	5.040.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	5 Unit	5.040.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	2 Unit	120.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	50.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	15 Unit	55.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase keterpenuhan Layanan (Gaji, Pakaian Dinas dan medical check up) Anggota DPRD	85 Persentase	17.724.148.952			DPRD	90Persentase	17.988.148.952	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	17.418.148.952	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	40 Orang/Bulan	17.418.148.952	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	80 Paket	186.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPRD	200 Paket	450.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	120.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	DPRD	40 Orang	120.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 Persentase	500.000.000			Sekretariat DPRD	100Persentase	540.000.000	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	100.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	12 Laporan	120.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	400.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Sekretariat DPRD	12 Paket	420.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian rata-rata kinerja kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	17.338.321.720				95 %	19.633.849.600	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase rancangan peraturan daerah dan rancangan Peraturan DPRD dibahas menjadi perda dan peraturan DPRD	95 Persentase	284.000.000			DPRD	100Persentase	317.600.000	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	7.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	7.100.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	120.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	8 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	30.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	120.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	4 Dokumen	122.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	7.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	7.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran	85 Persentase	125.000.000			DPRD	95Persentase	127.500.000	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	20.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	20.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	30.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	30.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	25.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85 Persentase	47.500.000			DPRD	90Persentase	49.500.000	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	2.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Laporan	2.700.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Laporan	2.700.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Laporan	2.700.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Laporan	2.700.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	2.700.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	2 Dokumen	10.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	25.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	90 Persentase	456.000.000			DPRD	95Persentase	492.000.000	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	230.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	6 Orang	11.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	220.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	7 Orang	223.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	18.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	2 Dokumen	19.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	8.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	9.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	80 Persentase	325.000.000			DPRD	85Persentase	971.500.000	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	3 Dokumen	6.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	320.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPRD	3 Dokumen	965.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelanggaran Kode Etik	0 Persentase	10.000.000			DPRD	0Persentase	12.000.000	
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	6.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Laporan	6.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	90 Persentase	16.090.821.720			DPRD	95Persentase	17.663.749.600	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	16.052.821.720	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPRD	12 Dokumen	17.623.249.600	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	8.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Laporan	8.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	12 Dokumen	21.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DPRD	1 Dokumen	11.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			10.069.187.527					9.205.255.219	
5	01				PERENCANAAN			9.766.187.527					8.985.255.219	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (Bappelitbangda)	100 %	7.946.755.727				100 %	6.947.881.473	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	136.877.700			OPD	100%	163.877.700	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	72.497.500	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Dokumen	99.497.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.487.800	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	11.487.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.237.800	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	11.237.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	6.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	25.654.600	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Laporan	25.654.600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.686.271.534			OPD	100%	5.057.789.373	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.531.271.534	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	45 Orang/bulan	4.920.439.373	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	115.350.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Laporan	12.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	10.000.000			OPD	100%	10.000.000	
5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani Persentase Pegawai PD Yang Dilayani	100 % 100 %	77.000.000			OPD	100%	115.000.000	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	25.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	100 Paket	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	52.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	4 Orang	90.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Berjalan Sesuai Standar	100 %	451.306.493			OPD	100%	660.614.400	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	10 Paket	10.530.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	16.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	15 Paket	16.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Paket	25.084.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	46.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	255.088.865	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	365.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	115.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	122.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.217.628	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	906.000.000			OPD	100%	191.500.000	
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	200.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	173.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	5 Unit	21.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	283.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	7 Unit	125.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	100 % 100 %	340.300.000			OPD	100%	490.100.000	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	21.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	352.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	23.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	18.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	97.800.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	98.800.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	339.000.000			OPD	100%	259.000.000	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	74.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	74.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	65.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	26 Unit	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	135.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam APBD Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 % 100 % 100 %	837.742.800				100% 100% 100%	1.000.888.746	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas dan Tepat Waktu	100 %	387.742.800			OPD	100%	603.048.746	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	9.051.300	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	50.960.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	19.779.800	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	27.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	13.676.400	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Berita Acara	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	39 Berita Acara	7.234.700	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	39 Berita Acara	7.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	69.507.500	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	39 Berita Acara	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1809 Usulan	19.197.900	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	180 Usulan	15.290.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	249.295.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	402.798.746	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan	100 %	50.000.000			OPD	100%	95.340.000	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	14.160.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	19.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	240 Orang	35.840.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	240 Orang	75.840.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	300.000.000			OPD	100%	202.500.000	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	208.506.500	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Laporan	142.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	91.493.500	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	4 Laporan	60.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	100.000.000			OPD	100%	100.000.000	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	60.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	100 % 100 % 100 %	981.689.000				100% 100% 100%	1.036.485.000	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	346.554.400			OPD	100%	365.820.000	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	133.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	142.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	161.554.400	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	102.820.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	52.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	121.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA yang terlaksana Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA yang terlaksana	100 % 100 %	300.227.800			OPD	100%	315.465.000	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	68.843.499	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		50.125.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	146.800.700	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Laporan	185.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	84.583.601	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD	1 Laporan	80.340.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Hasil Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	334.906.800			OPD	100%	355.200.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	61.906.800	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	4.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	7.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	54.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	45.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	130.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	143.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	16.950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	65.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	67.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			303.000.000					220.000.000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Presentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan daerah	50,95 (Inovatif) Nilai 100 % 100 %	303.000.000				55,80 (Inovatif)Nilai 100%	220.000.000	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Diterbitkan Pesentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diterbitkan	100 % 100 %	138.000.000			OPD	100%	165.000.000	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan									
						Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	138.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	165.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Riset dan Inovasi yang dilaksanakan Persentase Riset dan Inovasi Yang Dilaksanakan	100 % 100 %	165.000.000			OPD	100%	55.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang									
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	165.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	55.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	02				KEUANGAN			268.039.991.340					294.741.420.000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (BPKPD)	100 %	39.291.038.128				100 %	43.194.953.000	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu	100 %	33.345.800			OPD	100% 100%	35.483.000	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	19.915.400	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	20.707.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.870.500	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	2.058.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.870.500	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	2.058.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.727	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	1.070.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.979	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	988	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.047.500	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	2 Laporan	1.153.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.371.300	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	5.909.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	700	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	770	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	700	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Data	770	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	23.263.005.292			OPD	100% 100%	25.589.307.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	816 Orang/bulan	23.240.484.392	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	816 Orang/bulan	25.564.533.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	20.022.600	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	22.025.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.668.700	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	1.836.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8.296	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	913	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	18.257.400			OPD	100% 100%	20.084.000	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	3.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	157 Paket	3.300.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.741.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	3.016.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	12.516.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	25 Orang	13.768.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar	100 %	549.677.000			OPD	100% 100%	580.647.000	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.966.700	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Paket	8.764.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	69.696.900	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	76.667.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	122.049.500	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	134.255.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	349.963.900	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	360.961.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang diadakan	100 %	68.998.300			OPD	100% 100%	75.899.000	
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	68.998.300	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	7 Unit	75.899.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	15.210.607.436			OPD	100% 100%	16.731.670.000	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.506.100	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	23.657.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.099.012.936	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	16.608.915.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.698.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	4.068.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	86.390.400	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	95.030.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan yang Terpelihara	100 %	147.146.900			OPD	100% 100%	161.863.000	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14.492.800	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	15.942.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	24.090.400	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	55 Unit	26.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.541.900	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	107.297.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	11.021.800	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	15 Unit	12.124.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	224.359.629.812				100 %	246.731.405.000	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD secara Tepat Waktu	100 %	723.400.835			OPD	100% 100%	779.545.000	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	13.760.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	15.136.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	13.760.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	15.136.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	600	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	39 Dokumen	660	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	504.435	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	39 Dokumen	557	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	301.195.300	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	323.215.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	302.664.200	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	324.831.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	58.224.900	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	64.048.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	23.725.600	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	26.099.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	8.966.400	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	52 Orang	9.863.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	617.068.000			OPD	100% 100%	645.178.000	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	780 Dokumen	51.423.800	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	780 Dokumen	54.167.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	21.835.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	24.019.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	144.587.700	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	149.447.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	47.937.700	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	52.732.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	92 Orang	351.283.800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	92 Orang	364.813.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah OPD yang menyetor Pelaporan Keuangan secara tepat waktu	100 %	372.920.100			OPD	100% 100%	395.815.000	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	6.135.100	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	6.749.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	10.469.700	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	11.517.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	295.513.700	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	310.666.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	54.440.100	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Dokumen	59.885.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	6.361.500	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	41 Orang	6.998.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	222.619.473.277			OPD	100% 100%	244.881.422.000	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	195.622.900.400	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA DESA	OPD	1 Laporan	215.185.191.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	20.000.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	22.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.996.572.877	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	7.696.231.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Daerah yang dikelola	100 %	26.767.600			OPD	100% 100%	29.445.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	26.767.600	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	29.445.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	307.102.600				100 %	324.616.000	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah OPD yang menyetor Laporan BMD secara tepat waktu	100 %	307.102.600			OPD	100% 100%	324.616.000	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	50 Dokumen	13.192.400	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	50 Dokumen	14.512.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	2.843.200	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	6 Dokumen	3.128.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	17.776.700	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	19.555.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	7.264.900	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	7.992.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	42.922.600	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	47.215.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	2.244.600	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	2.470.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	220.858.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	229.744.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	100 %	4.082.220.800				100 %	4.490.446.000	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	100 %	4.082.220.800			OPD	100% 110%	4.490.446.000	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	159.723.600	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	175.696.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	28.911.800	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	31.803.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	101.835.200	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	112.019.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	198.663.000	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	218.530.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	357600 Obyek Pajak	2.224.589.800	Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	357600 Obyek Pajak	2.447.049.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	893.023.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Dokumen	982.326.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	270.211.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	5 Dokumen	297.233.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	205.263.200	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Maddukelleng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	1 Laporan	225.790.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	03				KEPEGAWAIAN			5.550.180.262					6.105.198.288	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (BKPSDM)	100 %	5.379.443.562				100 %	5.917.387.918	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 Persen	12.000.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	100Persen	13.200.000	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	5 Dokumen	6.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	1 Dokumen	3.850.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	1.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	1 Laporan	1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 Persen	4.382.822.462			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	100Persen	4.821.104.708	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	4.338.122.462	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	44 Orang/bulan	4.771.934.708	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93 Dokumen	44.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	72 Dokumen	48.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	1 Laporan	550	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten	18 Laporan	220	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persentase	5.000.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	100Persentase	5.500.000	
5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	1 Dokumen	2.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	2 Orang	2.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	246.969.200			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	100Persen	271.666.120	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	1 Paket	2.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya		2.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	4 Paket	11.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	7 Dokumen	1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.969.200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	12 Laporan	254.066.120	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	98.000.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	100Persen	107.800.000	
5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	98.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	15 Unit	107.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100 Persen	557.251.900			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	100Persen	612.977.090	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	12 Laporan	28.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	387.751.900	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	12 Laporan	426.527.090	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	25.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	4 Laporan	27.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	12 Laporan	130.350.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	74.400.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	100Persen	81.840.000	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	49.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	13 Unit	53.900.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.400.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	1 Unit	27.940.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	03	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan dan Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100 Persen	3.000.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100Persen	3.300.000	
5	03	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	2 Dokumen	1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	2 Dokumen	1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Manajemen Kepegawaian	100 %	170.736.700				100 %	187.810.370	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Ketersediaan Layanan Data dan Informasi Kepegawaian Persentase Pemberhentian ASN sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku Persentase Pemenuhan Formasi ASN	13,75 Persen 18 Persen 100 Persen 0,03 Persen	39.472.000			ASN Kabupaten Wajo	18Persen 100Persen 0,04Persen	43.419.200	
5	03	02	2.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	220	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	16.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Laporan	5.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	500	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	550	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	5.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	2.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	500	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Lembaga	550	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	03	02	2.01	0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	220	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.872.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	8.659.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	4 Laporan	220	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	95,00 Persen	114.259.200			ASN Kabupaten Wajo	96,00Persen	125.685.120	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	16.259.200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	17.885.120	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	93.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	2 Dokumen	102.300.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	5.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	13,75 Persen	2.902.200			ASN Kabupaten Wajo	13,85Persen	3.192.420	
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1.101.100	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	1.211.210	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	123 Orang	1.101.100	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	220 Orang	1.211.210	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	500	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	550	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Laporan	220	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai yang memperoleh PPKPNS Minimal Baik	90,00 Persen	14.103.300			ASN Kabupaten Wajo	95,00Persen	15.513.630	
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7 Dokumen	200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	7 Dokumen	220	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5437 Dokumen	8.301.100	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	5479 Dokumen	9.131.210	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5492 Laporan	200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	5.494 Laporan	220	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	1.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	150 Orang	1.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	294 Orang	1.101.100	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	268 Orang	1.211.210	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	1.101.100	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	4.426 Orang	1.211.210	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Laporan	1.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	2 Dokumen	1.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo		1.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	200	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo		220	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			7.372.200					8.109.420	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Teknis	13,65 %	7.372.200				13,65 %	8.109.420	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kebijakan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen	1.101.100			ASN Kabupaten Wajo	100Persen	1.211.210	
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1.101.100	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	1.211.210	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 Persen	6.271.100			ASN Kabupaten Wajo	100Persen	6.898.210	
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	1.101.100	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	1.211.210	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	4.670.000	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Laporan	5.137.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	500	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kabupaten Wajo	1 Dokumen	550	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.987.522.188					14.109.229.666	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			11.987.522.188					14.109.229.666	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	9.531.274.788				100%	9.720.117.366	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	100%	80.100.000			-	100%	81.900.000	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	47.550.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		48.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.600.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.700.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.600.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.650.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.550.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.550.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.700.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.750.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.650.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.700.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5000000 Berita Acara	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
6	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.756.130.826			-	100%	7.846.036.626	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	7.697.736.626	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		7.787.486.626	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	45.300.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.400.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.894.200	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.900.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	7.200.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.250.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.500.000			-	100%	1.550.000	
6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.550.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	443.155.000			-	100%	542.700.000	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	5.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	297.805.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		298.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	20.100.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.200.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	120.250.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	522.969.193			-	100%	531.900.000	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.819.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		23.900.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	409.193	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.450.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	56.400.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	423.891.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		424.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12unit	130.000.000			-	12unit	165.000.000	
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	40.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	35.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	55.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	413.116.100			-	100%	428.000.000	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	20.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	600 Laporan	25.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.200.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		160.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.916.100	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		208.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	163.030.740			-	100%	98.030.740	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	63.030.740	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Unit	63.030.740	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	35.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Presentase Penataan Organisasi	100%	21.272.929			-	100%	25.000.000	
6	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0 Dokumen	16.272.929	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	20.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Tempe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penurunan temuan yang berulang	12%	2.206.467.400				12%	4.132.112.300	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase hasil pemeriksaan sesuai PKPT	100%	1.696.504.900			-	100%	3.519.359.800	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	25 Laporan	344.850.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25 Laporan	1.782.104.900	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan	686.264.800	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25 Laporan	779.064.800	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 Laporan	369.349.200	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25 Laporan	462.149.200	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	12.300.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	12.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	142 Laporan	154.600.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	142 Laporan	254.600.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	129.140.900	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		229.140.900	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan kasus dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terlaksana	100%	509.962.500			-	100%	612.752.500	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	30.010.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	65 Laporan	479.952.500	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		572.752.500	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)	70 poin	249.780.000				-	257.000.000	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Presentase kebijakan teknis pengawasan yang tersusun	100%	19.500.000			-	100%	20.000.000	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	19.500.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Presentase Keberhasilan coching clinik	100%	230.280.000			-	100%	237.000.000	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25 perangkat daerah	25.280.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		26.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	180.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		185.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25 perangkat daerah	25.000.000	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		26.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
					KECAMATAN BELAWA			12.579.657.724					12.648.377.724	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (BELAWA)	100 %	11.880.057.724				100 %	11.877.676.724	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	12.300.000			Staf Kantor Kecamatan Belawa	100%	13.530.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Staf Kantor Kecamatan Belawa	3 Dokumen	13.200.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Staf Kantor Kecamatan Belawa	1 Laporan	330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100 Persen	11.497.457.724			ASN Kecamatan Belawa	100%	11.497.957.724	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/bulan	11.492.457.724	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kecamatan Belawa	155 Orang/bulan	11.492.457.724	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kecamatan Belawa	1 Laporan	5.500.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani (%)	100 %	7.041.000			ASN Kecamatan Belawa	100%	7.071.000	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	6.741.000	Kab. Wajo, Belawa, Belawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Staf dan Kantor Kelurahan	28 Paket	6.741.000	KELURAHAN BELAWA
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kecamatan Belawa		330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum/ Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100 %	69.010.000			Kantor Kecamatan Belawa	100%	69.610.000	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Kecamatan Belawa		1.100.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Malangke	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Staf dan Kelurahan Macero		4.400.000	KELURAHAN MALAKKE
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Kecamatan Belawa	2 Paket	1.100.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	63.010.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Kecamatan Belawa	110 Laporan	63.010.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang rusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	272.549.000			Staf dan Kantor Kecamatan	100%	272.649.000	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	32.226.500	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Staf dan Kantor Kecamatan Belawa	4 Laporan	32.226.500	KECAMATAN BELAWA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	47.720.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Staf dan Kantor Kecamatan Belawa	12 Laporan	47.720.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Staf dan Kantor Kecamatan Belawa	3 Laporan	1.100.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	191.602.500	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Staf dan Kantor Kecamatan Belawa	12 Laporan	191.602.500	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum	100 %	21.400.000			Kantor Kecamatan Belawa	100%	23.600.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	15.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Kecamatan Belawa	7 Unit	16.500.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Kecamatan Belawa	3 Unit	3.300.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.400.000	Kab. Wajo, Belawa, Belawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Staf dan Kantor Kelurahan Belawa		3.800.000	KELURAHAN BELAWA
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang tersedia	1 Dokumen	300.000			ASN Kantor Kecamatan	1 Dokumen	330.000	
7	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Kantor Kecamatan Belawa	1 Dokumen	330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kec. Belawa)	100 %	83.800.000				100 %	92.180.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100 %	9.200.000			Masyarakat dan Pemerintah kecamatan Belawa	100%	10.120.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	9.200.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Pemerintah kecamatan	1 Dokumen	10.120.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 %	74.600.000			Masyarakat	100%	82.060.000	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	1 Dokumen	330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 %	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	100 %	330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	74.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	2 Laporan	81.400.000	KECAMATAN BELAWA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	612.300.000				100 %	613.330.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan	100 %	7.000.000			Masyarakat Desa	100%	7.700.000	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Lautang Kab. Wajo, Belawa, Sappa Kab. Wajo, Belawa, Wele Kab. Wajo, Belawa,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.400.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Desa	2 Laporan	3.300.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100 %	605.300.000			Masyarakat Kelurahan	100%	605.630.000	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Belawa Kab. Wajo, Belawa, Malangke Kab. Wajo, Belawa, Macero	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.300.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	565.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Macero	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Masyarakat Kelurahan Macero	9 Unit	565.000.000	KELURAHAN MACERO
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	37.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	37.000.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kelurahan	3 Laporan	330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	2.600.000				100 %	2.860.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	2.300.000			Masyarakat	100%	2.530.000	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	3 Laporan	330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	4 Laporan	2.200.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		300.000			Masyarakat	-	330.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat		330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	300.000				100 %	330.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	300.000			Masyarakat	100%	330.000	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	15 Orang	330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Kec. Belawa)	100 %	600.000				100 %	660.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100 %	600.000			Masyarakat dan Pemerintah Desa	100%	660.000	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Pemerintah Desa		330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	300.000	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan Pemerintah	2 Laporan	330.000	KECAMATAN BELAWA
7	01				KECAMATAN BOLA			9.389.929.369,00					9.396.129.369,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (BOLA)	100 %	9.341.150.969,00				100 %	9.345.129.369,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,penganggaran & Evaluasi tepat waktu	100 %	12.000.000,00			-	100%	13.000.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN BOLA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.204.029.369,00			0	100%	9.204.129.369,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	9.203.329.369,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	115 Orang/bulan	9.203.329.369,00	KECAMATAN BOLA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	700.000,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	800.000,00	KECAMATAN BOLA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.767.400,00			-	100%	16.000.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	15.767.400,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	33 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN BOLA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16700000			-	100%	16700000	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16700000	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Unit	16700000	KECAMATAN BOLA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	134254200			-	100%	134254200	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5315000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	5315000	KECAMATAN BOLA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	28.620.000,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	24 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN BOLA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	100319200	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	24 Laporan	100319200	KECAMATAN BOLA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.000.000,00			-	100%	5.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN BOLA
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	0,00			-	100%	0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 % 100 %	3.796.100,00				100%	5.000.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100 %	3.796.100,00			-	100%	5.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.796.100,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BOLA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 % 100 %	14.982.300,00				100% 100%	15.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	100 %	14.982.300,00			-	100%	15.000.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	14.982.300,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	-	-	10 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	KECAMATAN BOLA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	30.000.000,00				-	31.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	30000000			-	100%	30000000	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN BOLA
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Wajo, Bola, Solo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN BOLA
					KECAMATAN GILIRENG			6.757.797.321					7.280.130.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (GILIRENG)	100 %	6.523.347.321				100 %	7.022.500.000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	14.500.000			-	100%	15.950.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Dokumen	13.200.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	2.750.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100 %	6.324.777.321			-	100%	6.812.750.000	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	6.313.197.321	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	85 Orang/bulan	6.800.000.000	KECAMATAN GILIRENG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	2.750.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	9.080.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum/ Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100 %	33.580.000			-	82%	36.100.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Paket	1.100.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	32.580.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	95 Laporan	35.000.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang rusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	118.000.000			-	100%	121.900.000	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	21.000.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.900.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	15.900.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81.100.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	85.000.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum	100 %	30.850.000			-	100%	33.600.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	28.350.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Unit	31.000.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.500.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Unit	1.100.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen kelembagaan Organisasi yang tersedia	100 %	1.640.000			-	100%	2.200.000	
7	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	1.640.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	2.200.000	KECAMATAN GILIRENG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	8.650.000				100 %	9.550.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100 %	5.000.000			-	100%	5.500.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	5.500.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yag dilimpahkan kepda camat yang dilaksanakan (%)	100 %	3.650.000			-	100%	4.050.000	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Dokumen	550.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	1.150.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	1.300.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	2.200.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	219.000.000				100 %	240.800.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan	100 %	19.000.000			-	100 %	20.800.000	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	8.800.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100 %	200.000.000			-	100%	220.000.000	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	200.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Unit	220.000.000	KELURAHAN GILIRENG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Gilireng) Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Gilireng)	100 % 100 %	3.800.000				100% 100%	3.980.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	2.500.000			-	100%	2.750.000	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Laporan	550.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Gilireng, Gilireng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Laporan	2.200.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada (%)	100 %	1.300.000			-	100%	1.230.000	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	1.300.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Laporan	1.230.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	3.000.000				100 %	3.300.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (%)	100 %	3.000.000			-	100%	3.300.000	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9 Dokumen	550.000	KECAMATAN GILIRENG
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	2.500.000	Kab. Wajo, Gilireng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	2.750.000	KECAMATAN GILIRENG
7					UNSUR KEWILAYAHAN			7.651.885.691					7.651.885.691	
7	01				KECAMATAN KEERA			7.888.885.691					7.854.885.691	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (KEERA)	100 %	7.652.885.691				100 %	7.618.885.691	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	25.000.000			-	100%	25.000.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Dokumen	24.000.000	KECAMATAN KEERA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100 %	7.439.885.691			-	100%	7.439.885.691	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	7.437.885.691	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	95 Orang/bulan	7.437.885.691	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	1.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum/ Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100 %	42.500.000			-	100%	42.500.000	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	30 Paket	2.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.500.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	40 Paket	2.500.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	38.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	180 Laporan	38.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang urusan yang terpeuhi (%)	100 %	1.800.000			-	100%	1.800.000	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.800.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Unit	1.800.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang rusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	132.700.000			-	100%	132.700.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.700.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	11.700.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	21.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	3.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	97.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketersediaan administrasi Umum	100 %	10.000.000			-	100%	10.000.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	8.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	8.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Unit	2.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen kelembagaan Organisasi yang tersedia	100 %	1.000.000			-	100%	1.000.000	
7	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	7.000.000				100 %	7.000.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100 %	1.000.000			Masyarakat	100%	1.000.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	1 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yag dilimpahkan kepda camat yang dilaksanakan (%)	100 %	6.000.000			Masyarakat	100%	6.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	2 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	3 Laporan	1.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat	12 Laporan	4.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	221.000.000				100 %	221.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan (%)	100 %	19.000.000			-	100%	19.000.000	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	6.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (%)	100 %	202.000.000			-	100%	202.000.000	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Ballaere	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	197.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1 Unit	197.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Ballaere	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	2 Pokmas / Ormas	3.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Keera)	100 %	6.000.000				100 %	6.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	6.000.000			-	100%	6.000.000	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	6.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Laporan	6.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Keera)	100 %	2.000.000				100 %	2.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (%)	100 %	2.000.000			-	100%	2.000.000	
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Keera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9 Laporan	2.000.000	KECAMATAN KEERA
7	01				KECAMATAN MANIANGPAJO			10.986.611.736					10.986.611.736	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (MANIANGPAJO)	100 %	10.355.111.736				100 %	10.355.111.736	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	13.500.000			-	100 %	13.500.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.000.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Dokumen	13.000.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	500.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.089.611.736			-	100%	10.089.611.736	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/bulan	10.088.611.736	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	155 Orang/bulan	10.088.611.736	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	500.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	500.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	500.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	500.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	43.954.100			-	100%	43.954.100	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	500.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16 Paket	500.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.500.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10309 Paket	5.500.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	37.954.100	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	37.954.100	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	17.888.300			-	100%	17.888.300	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17.888.300	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		17.888.300	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	170.657.600			-	100%	170.657.600	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.879.400	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	17.879.400	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.700.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	39.700.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4.000.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	4.000.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	109.078.200	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	109.078.200	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	19.300.000			-	100%	19.300.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	14.300.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Unit	14.300.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Unit	5.000.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	200.000			-	100%	200.000	
7	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	200.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	200.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	9.085.000				100 %	9.085.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	5.000.000			-	100%	5.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	100 %	4.085.000			-	100%	4.085.000	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	200.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	200.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	200.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.685.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	3.685.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	621.615.000				100 %	621.615.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan yang dikoordinasikan	100 %	4.115.000			-	100 %	4.115.000	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	200.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		200.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.915.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		3.915.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	617.500.000			-	100 %	617.500.000	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		15.000.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	581.000.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Anabanua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		581.000.000	KELURAHAN ANABANUA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	21.500.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Pokmas / Ormas	21.500.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Maniangpajo)	100 %	600.000				100 %	600.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	400.000			-	100%	400.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	200.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	200.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	200.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Maniangpajo, Anabanua Kab. Wajo, Maniangpajo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	200.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada (%)	100 %	200.000			-	100%	200.000	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	200.000	Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	200.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Maniangpajo)	100 %	200.000				100 %	200.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	200.000			-	100 %	200.000	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	200.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Maniangpajo, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		200.000	KECAMATAN MANIANGPAJO
7	01				KECAMATAN PAMMANA			14.345.573.483,00					37.319.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata realisasi kegiatan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (PAMMANA)	100 % 100 %	13.905.047.483,00				100%	0,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai ketentuan (%)	100 %	12.000.000,00			OPD	100%	0,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Pammana Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100 %	13.603.773.483,00			OPD	100%	0,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	13.602.773.483,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		0	KECAMATAN PAMMANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.391.000,00			OPD	100%	0,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5500 Paket	4.591.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	800.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100 %	6.832.500,00			-	100%	0,00	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.832.500,00	Kab. Wajo, Pammana, Pammana	-	-		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia (%)	100 %	262.050.500,00			OPD	100%	0,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	17.606.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Pammana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	22.900.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144 Laporan	221.544.500,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Terpelihara	100 %	15.000.000,00			OPD	100%	0,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Pammana, Pammana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	13.610.000,00				100 %	13.610.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100 %	5.000.000,00			OPD	100%	5.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		5.000.000,00	KECAMATAN PAMMANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yag dilimpahkan kepda camat yang dilaksanakan (%)	100 %	8.610.000,00			OPD	100%	8.610.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	8.610.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		8.610.000,00	KECAMATAN PAMMANA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	425.916.000,00				100 %	22.709.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan (%)	100 %	9.629.900,00			OPD	100%	9.629.900,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	9.629.900,00	Kab. Wajo, Pammana, Pammana Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		9.629.900,00	KECAMATAN PAMMANA
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (%)	100 %	416.286.100,00			OPS	100%	13.079.100,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPS		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	388.207.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Cina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kelurahan Cina		0	KECAMATAN PAMMANA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	13.079.100,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPS		13.079.100,00	KECAMATAN PAMMANA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Pammana) Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Pammana)	100 % 100 %	1.000.000,00				100% 100%	1.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	1.000.000,00			OPD	100%	1.000.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Pammana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		1.000.000,00	KECAMATAN PAMMANA
7	01				KECAMATAN PITUMPANUA			14.931.592.280,00					14.931.592.280,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (PITUMPANUA)	100 %	13.946.892.280,00				100%	13.946.892.280,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	13.000.000,00			-	100%	13.000.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	13.551.192.280,00			-	100%	13.551.192.280,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	13.549.192.280,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	165 Orang/bulan	13.549.192.280,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	14 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	64.000.000,00			-	100%	64.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	17 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	52.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	52.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	282.700.000,00			-	100%	282.700.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	37.600.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	37.600.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	195.100.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	195.100.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Perangkat Daerah yang terpelihara Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 % 100 %	36.000.000,00			-	100%	36.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Tobarakka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 % 85 %	147.200.000,00				100%	147.200.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100 %	147.200.000,00			-	100%	147.200.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	147.200.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	147.200.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Capaian Kinerja pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	85 % 100 %	825.000.000,00				100%	825.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan	100 %	5.000.000,00			-	100%	5.000.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	100 %	820.000.000,00			-	100%	820.000.000,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Bulete	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	30 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	800.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Benteng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	9 Unit	800.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	4.500.000,00				100 %	4.500.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	3.000.000,00			-	100%	3.000.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Bulete	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada (%)	100 %	1.500.000,00			-	100%	1.500.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 % 0 %	5.000.000,00				100%	5.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100 %	5.000.000,00			-	100%	5.000.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Pitumpanua)	100 % 0 %	3.000.000,00				100%	3.000.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (%)	100 %	3.000.000,00			-	100%	3.000.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	23 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Wajo, Pitumpanua, Bulete	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PITUMPANUA
7	01				KECAMATAN MAJAULENG			17.195.706.533,00					17.195.706.533,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (MAJAULENG)	100 %	16.308.366.533,00				100%	16.308.366.533,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu (%)	100 %	13.500.000,00			-	100%	13.500.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100 %	15.970.906.533,00			-	100%	15.970.906.533,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171 Orang/bulan	15.967.906.533,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	171 Orang/bulan	15.967.906.533,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1.500.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani (%)	100 %	17.000.000,00			-	100%	17.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	17.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Orang	17.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum/ Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100 %	51.497.600,00			-	100%	51.497.600,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang Kab. Wajo, Majauleng, Lamiku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Paket	500.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	997.600,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	997.600,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang urusan yang terpeuhi (%)	100 %	13.000.000,00			-	100%	13.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang rusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	217.462.400,00			-	100%	217.462.400,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	43.800.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Laporan	43.800.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Laporan	21.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.028.100,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Laporan	1.028.100,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	151.634.300,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Laporan	151.634.300,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum	100 %	25.000.000,00			-	100%	25.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	62.840.000,00				100 %	62.840.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	100 %	1.000.000,00			-	100%	1.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100 %	61.840.000,00			-	100%	61.840.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	59.840.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	59.840.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	811.500.000,00				100%	811.500.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan	100 %	11.500.000,00			-	100%	11.500.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	18 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.500.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	6.500.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	800.000.000,00			-	100%	800.000.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	8 Unit	800.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Majauleng)	100 %	6.000.000,00				100 %	6.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	5.000.000,00			-	100%	5.000.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada (%)	100 %	1.000.000,00			-	100%	1.000.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0 %	5.000.000,00				0 %	5.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100 %	5.000.000,00			-	100%	5.000.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18 Orang	5.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	25 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Majauleng)	100 %	2.000.000,00				100 %	2.000.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100 %	2.000.000,00			-	100%	2.000.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	14 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Majauleng, Limpomajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	14 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN MAJAULENG
7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.939.324.617,00					6.939.324.617,00	
7	01				KECAMATAN PENRANG			6.939.324.617,00					6.939.324.617,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (PENRANG)	100 %	6.708.824.617,00				100 %	6.708.824.617,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 %	14.000.000,00			-	100%	14.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Penrang, Doping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.489.124.617,00			-	100%	6.489.124.617,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1040 Orang/bulan	6.488.124.617,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1040 Orang/bulan	6.488.124.617,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	18 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang terlayani	100 %	4.000.000,00			-	100%	4.000.000,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	4.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Ketersediaan Adminsitrasi Umum Perangkat daerah	100 %	62.000.000,00			-	100%	62.000.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Paket	1.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	61.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	61.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan yang terpenuhi	100 %	99.600.000,00			-	100%	99.600.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	8.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	10.500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	80.100.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Penrang, Doping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	80.100.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penujang Urusan yang terpelihara	100 %	40.100.000,00			-	100%	40.100.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.100.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	40.100.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	2.500.000,00				-	2.500.000,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Urusan yang tidak dilaksanakan perangkat daerah yang ada dikecamatan	100 %	1.000.000,00			-	100%	1.000.000,00	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Penrang, Doping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan yang di Limpahkan Kekecamatan	100 %	1.500.000,00			-	100%	1.500.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Penrang, Doping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Penrang, Doping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Penrang, Doping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	214.000.000,00				-	214.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Desa yang di Koordinasikan	100 %	3.000.000,00			-	100%	3.000.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	3.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN PENRANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang di Koordinasikan	100 %	211.000.000,00			-	100%	211.000.000,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	195.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Doping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	195.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	5.500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Pokmas / Ormas	5.500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	5.000.000,00				-	5.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan Perda	100 %	4.000.000,00			-	100%	4.000.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	1.500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di koordinasikan	100 %	1.000.000,00			-	100%	1.000.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	6.000.000,00				-	6.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Ketersediaan Adminsitrasi Umum Perangkat daerah	100 %	6.000.000,00			-	100%	6.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	6.000.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Orang	6.000.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Penrang)	100 %	3.000.000,00				-	3.000.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	3.000.000,00			-	100%	3.000.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Penrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PENRANG
7					UNSUR KEWILAYAHAN			37.227.269.214,0					37.227.269.214	
7	01				KECAMATAN TANASITOLO			37.227.269.214,0					37.227.269.214	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (TANASITOLO)	100 %	17.235.822.124,0				100 %	17.235.822.124	
7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	100 %	18.000.000,0			-	100%	18.000.000	
7	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	200.000	KECAMATAN TANASITOLO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 %	16.796.722.124,0			-	100%	16.796.722.124	
7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	16.791.522.124,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	112 Orang/bulan	16.791.522.124	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	5.500.000,0			-	100%	5.500.000	
7	01	01	205	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	2.500.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Orang	2.500.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum	100 %	34.800.000,0			-	100%	34.800.000	
7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Paket	500.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Paket	500.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.500.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Paket	1.500.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32.300.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	32.300.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di adakan	100 %	43.000.000,0			-	100%	43.000.000	
7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	43.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Unit	43.000.000	KECAMATAN TANASITOLO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	322.300.000,0			-	100%	322.300.000	
7	01	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	28.400.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Laporan	28.400.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	78.500.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Laporan	78.500.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	208	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.500.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	1.500.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	213.900.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Laporan	213.900.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	13.500.000,0			-	100%	13.500.000	
7	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	10.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.500.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	3.500.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	01	213		Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Kelembagaan Organisasi yang Tersedia	100 %	2.000.000,0			-	100%	2.000.000	
7	01	01	213	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	2.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	63.600.000,0				100%	63.600.000	
7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	100 %	3.200.000,0			-	100%	3.200.000	
7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	02	201	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Dilaksanakan	100 %	60.400.000,0			-	100%	60.400.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02	204	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	02	204	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	60.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung Kab Wajo, Tanasitolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	60.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 % 100 %	815.800.000,0				100% 100%	815.800.000	
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dikoordinasikan	100 %	400.000,0			-	100%	400.000	
7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Lembaga Kemasyarakatan	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	815.400.000,0			-	100%	815.400.000	
7	01	03	202	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	03	202	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	800.000.000,0	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	4 Unit	800.000.000	KELURAHAN BARU TANCUNG
7	01	03	202	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pokmas / Ormas	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	03	202	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Laporan	200.000	KECAMATAN TANASITOLO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja pelaksanaan Kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Tanasitolo) Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Tanasitolo)	100 % 100 %	1.500.000,0				100% 100% 100%	1.500.000	
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dikoordinasikan	100 %	1.500.000,0			-	100%	1.500.000	
7	01	04	201	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	04	201	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.300.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.300.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 % 100 %	5.000.000,0				100% 100%	5.000.000	
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	5.000.000,0			-	100%	5.000.000	
7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	5.000.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung Kab Wajo, Tanasitolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Orang	5.000.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Tanasitolo) Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Tanasitolo)	100 % 100 %	400.000,0				100% 100%	400.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan KOOrdinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	100 %	400.000,0			-	100%	400.000	
7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15 Dokumen	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01	06	201	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15 Laporan	200.000,0	Kab Wajo, Tanasitolo, Barutancung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15 Laporan	200.000	KECAMATAN TANASITOLO
7	01				KECAMATAN SABBANGPARU			15.234.740.508,00					15.234.740.508,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (SABBANGPARU) Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (SABBANGPARU)	100 % 100 %	14.580.840.508,00				100%	14.580.840.508,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu (%)	100 %	13.000.000,00			OPD	100%	13.000.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100 %	14.288.640.508,00			-	100%	14.288.640.508,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	14.287.140.508,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		14.287.140.508,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum/ Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100 %	54.200.000,00			-	100%	54.200.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16 Paket	1.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Walennae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN WALENNAE
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	1.200.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	43.500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	43.500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang rusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	211.000.000,00			-	100%	211.000.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.900.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	26.900.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	165.100.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	165.100.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum	100 %	14.000.000,00			-	100%	14.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	14.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8 Unit	14.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 % 100 %	14.000.000,00				100% 100%	14.000.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yag dilimpahkan kepda camat yang dilaksanakan	100 %	14.000.000,00			OPD	100%	14.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Walennae Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	13.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 % 100 %	636.900.000,00				100% 100%	636.900.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan (%0	100 %	28.000.000,00			OPD	100%	28.000.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	15 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	13.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (%)	100 %	608.900.000,00			OPD	100%	608.900.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	600.000.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	OPD	0 Unit	600.000.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	8.400.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD	15 Pokmas / Ormas	8.400.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Laporan	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Sabbangparu)	100 % 100 %	1.500.000,00				100% 100%	1.500.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	1.000.000,00			OPD	100%	1.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Laporan	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	4 Laporan	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada (%)	100 %	500.000,00			OPD	100%	500.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Laporan	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0 % 0 %	500.000,00				100% 100%	500.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	500.000,00			OPD	100%	500.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Orang	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Sabbangparu)	100 % 100 %	1.000.000,00				100% 100%	1.000.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (%)	100 %	1.000.000,00			OPD	100%	1.000.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Sompe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Laporan	500.000,00	KECAMATAN SABBANGPARU
7	01				KECAMATAN SAJOANGING			10.332.965.152,00					11.365.962.667,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (SAJOANGING)	100 %	9.707.965.152,00				100 %	10.678.462.667,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu (%)	100 %	12.500.000,00			-	100 %	13.750.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Dokumen	13.200.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100 %	9.401.565.152,00			-	100%	10.341.721.667,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	9.400.565.152,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	115 Orang/bulan	10.340.621.667,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum/ Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100 %	60.670.900,00			-	100%	66.438.990,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Paket	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3.930.900,00	Kab. Wajo, Sabangparu, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Sajoanging,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Paket	4.323.990,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.240.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	61.565.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang urusan yang terpeuhi (%)	100 %	20.400.000,00			-	100%	22.440.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.400.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Unit	22.440.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang rusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	189.230.000,00			-	100%	208.153.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.061.600,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	27.567.760,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.700.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	24 Laporan	24.970.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.968.400,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	155.065.240,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum	100 %	23.099.100,00			-	100%	25.409.010,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	16.750.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Unit	18.425.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.349.100,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		6.984.010,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	500.000,00			-	100%	550.000,00	
7	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	2.000.000,00				-	2.200.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100 %	500.000,00			-	100%	550.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yag dilimpahkan kepda camat yang dilaksanakan	100 %	1.500.000,00			-	100%	1.650.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Dokumen	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	615.500.000,00				-	677.050.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan (%)	100 %	13.500.000,00			-	100%	14.850.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	13.200.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	1.650.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (%)	100 %	602.000.000,00			-	100%	662.200.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	600.000.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Sajoanging, Akkajeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9 Unit	660.000.000,00	KELURAHAN AKKAJENG
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2.000.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Akkajeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Pokmas / Ormas	2.200.000,00	KELURAHAN AKKAJENG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	2.000.000,00				100 %	2.200.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	1.500.000,00			-	100 %	1.650.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	500.000,00	-	-	-		550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	500.000,00			-	100%	550.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	5.000.000,00				100 %	5.500.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	5.000.000,00			-	100 %	5.500.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Orang	5.500.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Sajoanging)	100 %	500.000,00				-	550.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (%)	100 %	500.000,00			-	100%	550.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Wajo, Sajoanging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Dokumen	550.000,00	KECAMATAN SAJOANGING
7	01				KECAMATAN TAKKALALLA			37.227.269.214					37.227.269.214	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (TAKKALALLA)	100 %	9.324.254.857				100 %	9.330.254.857	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu (%)	100 %	12.500.000			-	100 %	12.500.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	500.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100 %	9.162.151.457			-	100%	9.168.151.457	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	9.161.151.457	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	122 Orang/bulan	9.161.151.457	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	500.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	18 Laporan	6.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani (%)	100 %	4.500.000			-	100%	4.500.000	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	4.500.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Orang	4.500.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum/ Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100 %	52.099.000			-	100%	52.099.000	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Paket	2.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	500.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Paket	500.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	6.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	43.599.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	36 Laporan	43.599.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang urusan yang terpeuhi (%)	100 %	38.951.200			-	100%	38.951.200	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	38.951.200	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Unit	38.951.200	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang rusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	32.464.900			-	100%	32.464.900	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	11.414.900	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	36 Laporan	11.414.900	KECAMATAN TAKKALALLA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	19.050.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	50 Laporan	19.050.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Laporan	2.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum	100 %	20.988.300			-	100%	20.988.300	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14.988.300	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	14.988.300	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		6.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen kelembagaan Organisasi yang tersedia	1 Dokumen	600.000			-	100%	600.000	
7	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	600.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	600.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	97.096.600				-	97.096.600	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100 %	1.000.000			-	100%	1.000.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	1.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	93.096.600			-	-	93.096.600	
7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	36 Unit	93.096.600	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		93.096.600	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yag dilimpahkan kepda camat yang dilaksanakan	100 %	3.000.000			-	100%	3.000.000	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	500.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	500.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	500.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	500.000	KECAMATAN TAKKALALLA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	2.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	427.000.000				-	427.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dikoordinasikan (%)	100 %	27.000.000			-	100%	27.000.000	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	11 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	12.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	13 Laporan	12.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (%)	100 %	400.000.000			-	100%	400.000.000	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	400.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Unit	400.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	7.000.000				-	7.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	2.000.000			-	100%	2.000.000	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	1.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	1.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Laporan	1.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	5.000.000			-	100%	5.000.000	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000	Kab. Wajo, Takkalalla, Peneki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN TAKKALALLA
7	01				KECAMATAN TEMPE			37.227.269.214,00					37.227.269.214,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (TEMPE) Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (TEMPE)	100 % 100 %	33.272.408.814,00				100%	33.272.408.814,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu (%)	100 %	14.900.000,00			-	100%	14.900.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan Laporan	2.900.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	2.900.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100 %	32.258.708.814,00			-	100%	32.258.708.814,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan Orang/bulan	32.252.208.814,00	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	155 Orang/bulan	32.252.208.814,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Laporan	3.500.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Lapongkoda	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Laporan	3.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum/ Persentase Administrasi Umum PD berjalan sesuai standar (%)	100 %	68.893.600,00			-	100%	68.893.600,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.684.300,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Attakkae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Paket	16.684.300,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.218.900,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16 Paket	5.218.900,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.990.400,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	24 Dokumen	3.990.400,00	KECAMATAN TEMPE

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380 Laporan	43.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	112 Laporan	43.000.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang urusan yang terpeuhi (%)	100 %	95.887.200,00			-	100%	95.887.200,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	90.387.200,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Unit	90.387.200,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.500.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Unit	5.500.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang rusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	826.322.000,00			-	100%	826.322.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	103.517.300,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	17 Laporan	103.517.300,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139.227.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16 Laporan	139.227.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.455.400,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Laporan	5.455.400,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	578.122.300,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Laporan	578.122.300,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan administrasi Umum	100 %	7.697.200,00			-	100%	7.697.200,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.697.200,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	7.697.200,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 % 100 %	733.060.400,00				100% 100%	733.060.400,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100 %	5.000.000,00			-	100%	5.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yag dilimpahkan kepda camat yang dilaksanakan	100 %	728.060.400,00			-	100%	728.060.400,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	728.060.400,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	12 Laporan	728.060.400,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 % 100 %	3.215.000.000,00				100% 100%	3.215.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegitan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100 %	3.215.000.000,00			-	100%	3.215.000.000,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3.124.639.300,00	Kab. Wajo, Tempe, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Tempe, Attakkae	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	16 Unit	3.124.639.300,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	75.360.700,00	Kab. Wajo, Tempe, Siengkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	16 Pokmas / Ormas	75.360.700,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	6.800.000,00				100 %	6.800.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100 %	3.400.000,00			-	100%	3.400.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	3.400.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	100 Laporan	3.400.000,00	KECAMATAN TEMPE
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada (%)	100 %	3.400.000,00			-	100%	3.400.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	3.400.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Bulu Pabbulu Kab. Wajo, Tempe, Tempe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	100 Laporan	3.400.000,00	KECAMATAN TEMPE
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.780.287.188					6.583.216.888	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.780.287.188					6.583.216.888	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.780.287.188					6.583.216.888	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (KESBANGPOL)	100 %	3.517.536.877				100 %	3.034.666.577	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai ketentuan	100 %	33.322.000			OPD	100%	37.000.000	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.322.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Dokumen	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Dokumen	4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 %	2.326.666.577			OPD	100%	2.328.666.577	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	2.309.666.577	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	228 Orang/bulan	2.309.666.577	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Laporan	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	47.261.000			OPD	100%	17.000.000	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	47.261.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD		17.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	274.693.100			OPD	100%	282.000.000	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.493.100	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Paket	3.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22.910.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Paket	24.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	249.290.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	60 Laporan	255.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Urusan Yang Terpenuhi	100 %	563.501.000			OPD	100%	80.000.000	
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	364.800.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Unit	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	198.701.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	2 Unit	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	100 %	207.865.700			OPD	100%	215.000.000	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	65.123.700	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	700 Laporan	70.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.742.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	12 Laporan	125.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Terpelihara	100 %	64.227.500			OPD	100%	75.000.000	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	60.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	1 Unit	70.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.227.500	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD	3 Unit	5.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	1.138.000.000				-	1.190.000.000	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa	90 %	1.138.000.000			OPD DAN MASYARAKAT	90%	1.190.000.000	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	36 Orang	60.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD DAN MASYARAKAT	36 Orang	80.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1.070.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	OPD DAN MASYARAKAT	100 Orang	1.100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	8.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	OPD DAN MASYARAKAT	1 Dokumen	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada semua event politik	82 %	928.550.311				82 %	948.550.311	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Peningkatan Demokrasi	90 %	928.550.311			OPD DAN MASYARAKAT	90%	948.550.311	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	40.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD DAN MASYARAKAT	150 Orang	60.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	888.550.311	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD DAN MASYARAKAT	1 Laporan	888.550.311	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	40.000.000				100 %	60.000.000	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan diberdayakan	100 %	40.000.000			OPD DAN MASYARAKAT	100%	60.000.000	
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 Orang	40.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD DAN MASYARAKAT	50 Orang	60.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus akibat pengaruh ekonomi, sosial dan budaya	92 %	70.000.000				92 %	100.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	90 %	70.000.000			OPD DAN MASYARAKAT	90%	100.000.000	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	70.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	OPD DAN MASYARAKAT	150 Orang	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	1.086.200.000				100 %	1.250.000.000	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100 %	1.086.200.000			OPD DAN MASYARAKAT	100%	1.250.000.000	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Orang	226.200.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD DAN MASYARAKAT	6 Orang	230.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	10.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD DAN MASYARAKAT	3 Laporan	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	48 Dokumen	850.000.000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	OPD DAN MASYARAKAT	24 Dokumen	1.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						J U M L A H		**1.567.052.311.480**					**1711469326224,71**	

BAB VI
KINERJA
PENYELENGGRAAN DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Dalam penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan memperhatikan target yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Wajo pada periodesasi Tahap V, serta dengan menfokuskan pada aspek kesejahateraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Target capaian untuk tahun 2025 dilakukan perhitungan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pada pencapaian target sampai dengan tahun 2023 terkait dengan adanya pencapaian baik yang melampaui target maupun yang dibawah target. Sedangkan untuk target sebelum 2024 tetap berpedoman pada penetapan indikator kinerja daerah sebelumnya.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembanguan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Kemiskinan
    a. Tingkat kemiskinan
    b. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)

c. Indeks Kedalaman Kemiskinan

3. Tingkat Pengangguras Terbuka (TPT)

a. Jumlah Penganggur (Ribu orang)

4. Gini Ratio

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

c. Angka Harapan Hidup (AHH)

d. Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)

6. PDRB Perkapita

a. ADHB

b. ADHK

Target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 1
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Wajo

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024	Target RPD Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,43	(4,37-5,80)	6,4	6,4
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,73	5,50	5,71	5,71
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,1	4,13	2,41	2,41
4	Indeks Gini	Angka/Nilai	0,36	0,333	0,353	0,353
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka/Nilai	73,56	70,13	72,12	72,12
6	PDRB Perkapita		63,61	64,5		

Sumber : BPS Kab. Wajo Tahun 2023

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang diperoleh berdasarkan indikator sasaran strategis RPD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diperoleh dari indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. 2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wajo

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025
Tujuan 1	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**		Indeks Gini		Angka / Predikat	0,36	0,333	0,353	0,353
	Sasaran 1	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	1,43	(4,37-5,80)	6,4	6,4
			2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	63,61	64,5		
			3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,36	84,8	88,11	88,11
	Sasaran 2	Menurunnya Angka Kemiskinan	4	Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,73	5,50	5,71	5,71
	Sasaran 3	Meningkatkan daya saing dan penempatan tenaga kerja	5	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	2,1	4,13	2,41	2,41
Tujuan 2	**Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel**		Indeks Reformasi Birokrasi		Angka	65,06	(61,51-62,00)/ B	63,85	63,85

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025
	Sasaran 4	Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	6	Nilai / Predikat SAKIP kabupaten	Angka/ Predikat	62,99	(75,01-80,10) / A	64,3	64,3
			7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	78,16	72	75,69	75,69
			8	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,67	(3,51-3,75) / B	3,36/C	3,36/C
			9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,67	(3,01-3,50)	2,6	2,6
	Sasaran 5	Meningkatnya Dimensi Pembangunan Desa	10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,706	(0,711-0,730)	0,724	0,724
Tujuan 3	**Meningkatkan pemerataan Pembangunan wilayah yang didkung Infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan**		Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah		Angka		4	4,1	4,1

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025
	Sasaran 6	Meningkatnya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan	11	Cakupan daya saing infrastruktur	Persentase	82,14	77,24	70,19	70,19
			12	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	Angka	62,6	(62,21-62,50)	78,98	78,98
Tujuan 4	**Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia**		Indeks Pembangunan Manusia		Angka	73,56	70,13	72,12	72,12
	Sasaran 7	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan khusus	13	Angka rata-rata lama sekolah	Persentase	7,09	8,6	7,13	7,13
			14	Angka Harapan Lama Sekolah	Persentase	13,12		13,11	13,11
	Sasaran 8	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	15	Angka usia harapan hidup	Persentase	67,82	67,5	67,95	67,95
			16	Pravelensi Balita Stunting	Persentase	28,6		34,6	34,6
	Sasaran 9	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	17	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	57,90	62,10	3,83	3,83

Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi 2023	Asumsi Capaian 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025
	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan Anak	18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	3,00	(2,11-2,15)	2,86	2,86
	Sasaran 11	Terpeliharanya kualitas berbangsa, bernegara dan beragama	19	Indeks Ketentraman, Ketertiban dan Kerukunan	Indeks	12,73	(12.610-12.665)	12,85	12,85

Sumber: RPD Kabupaten Wajo Tahun 2024 (Diolah)

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 terdiri atas:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dimana penentuan capaian indikator tahunan dari indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga;
2. Aspek Daya Saing Daerah, dimana capaian indikator tahunan dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan fokus sumber daya manusia; dan
3. Aspek Pelayanan Umum, dimana penentuan capaian indikator tahunan dari indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar, dan urusan pilihan.

Target tahunan dari indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. 3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Wajo

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
1				**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	**1**			**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**			
1	1	1		Pertumbuhan Ekonomi	1,43	7	6,66
1	1	2		Laju inflasi	2,83	1,78	2,1
1	1	3		- PDRB per kapita Atas Dasar harga Berlaku (ADHB)	24,58	49,62	26,01
1	1	4		- PDRB per kapita Atas Dasar harga Konstan(ADHK)	14,09	15,26	15,86
1	1	5		Indeks Gini	0,362	00.34	0.41
1	1	6		Tingkat Kemiskinan	6,73	05.02	5,74
1	1	7		Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	4,15	4,50%	4,60%
1	1	8		Pertumbuhan PDRB Industri	4,72	29,02%	36,15%
1	1	9		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,56	71,04	72,14
1	1	10		Angka Melek Huruf	90,67	97,52	97,57
1	1	11		Angka rata-rata lama sekolah	7,05	08.04	08.06
1	1	12		Angka Harapan Lama Sekolah	13,206	09.36	
1	1	13		Angka usia harapan hidup	73,25	67,03	67,05
1	1	14		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,74	04.22	59,79
1	1	15		Tingkat pengangguran terbuka	2,1	04.12	3,17
2				**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
2	**1**			**Layanan Urusan Wajib Dasar**			
2	**1**	**1**		**Pendidikan**			
2	1	1	1	PAUD	110,72	60.80%	70.00%
2	1	1	2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	117	105	106
2	1	1	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	110	108	112
2	1	1	4	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/PAKET A	8,5	4899	4990
2	1	1	5	Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP	5613	4899	4990
2	1	1	6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,93%	100%	100%
2	1	1	7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,68%	100%	100%
2	1	1	8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	92,71	100%	100%
2	1	1	9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	81,61	100%	100%
2	1	1	10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,71	00.09	00.05
2	1	1	11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,61	00.02	0,2
2	1	1	12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	102%	100%	100%
2	1	1	13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	106%	100%	100%
2	1	1	14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99%	90	93
2	1	1	15	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	67%	60	70
2	1	1	16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	84,00%	60	70

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
2	1	1	17	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	111,71	94	94
2	1	1	18	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	N/A	4,65	4,72
2	1	1	19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	857,95		
2	1	1	20	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	73,7		
2	1	1	21	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	81,58%		
2	1	1	22	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	N/A	93%	95%
2	1	1	23	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	N/A	98.07%	98.08%
2	1	1	24	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92%	95%	97%
2	**1**	**2**		**Kesehatan**			
2	1	2	1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0	02.03	02.07
2	1	2	2	Angka kelangsungan hidup bayi	-6.97	-2.08	-2.48
2	1	2	3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	08.32	01.28	01.48
2	1	2	4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	06.55	07.01	08.29
2	1	2	5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	105.23.00	219.75	254.68
2	1	2	6	Rasio posyandu per satuan balita	0,761805556		
2	1	2	7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,19	00.25	00.26
2	1	2	8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,987	00.01	00.01
2	1	2	9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,165	00.36	00.04
2	1	2	10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,4	02.07	02.13
2	1	2	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	101,76	100.00%	100.00%
2	1	2	12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,44	100.00%	100.00%
2	1	2	13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91,05	100	100
2	1	2	14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100	100
2	1	2	15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	101,36	100	100
2	1	2	16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	6,247	0.01%	0.02%
2	1	2	17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0,845833333	34.65%	37.38%
2	1	2	18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	62,53%	64.78%	67.10%
2	1	2	19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000	250,78	342.97	365.91

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
				penduduk)			
2	1	2	20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,639583333	14.03	14.50
2	1	2	21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	68.51%	58.89%	59.28%
2	1	2	22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	74.73	84.40	84.60
2	1	2	23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100.00%	100.00%
2	1	2	24	Penderita diare yang ditangani	67.99	100.00%	100.00%
2	1	2	25	Angka kejadian Malaria	0,313194444		
2	1	2	26	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	100.00%	100.00%
2	1	2	27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	00.01	0%	0%
2	1	2	28	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	01.53	100.00%	100.00%
2	1	2	29	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	77,7	100.00%	100.00%
2	1	2	30	Cakupan kunjungan bayi	N/A	100.00%	100.00%
2	1	2	31	Cakupan puskesmas	N/A	100.00%	100.00%
2	1	2	32	Cakupan pembantu puskesmas	N/A	35.87%	37.60%
2	1	2	33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	N/A	100.00%	100.00%
2	1	2	34	Cakupan pelayanan nifas	N/A	100.00%	100.00%
2	1	2	35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	N/A	60.27%	60.58%
2	1	2	36	Cakupan pelayanan anak balita	N/A	100.00%	100.00%
2	1	2	37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	N/A	11,45%	14,20%
2	1	2	38	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	N/A	100.00%	100.00%
2	1	2	39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	N/A	100.00%	100.00%
2	1	2	40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	N/A	100.00%	100.00%
2	1	2	41	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	N/A	100.00%	100.00%
2	1	3		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
2	1	3	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,36	0,047916667	0,059027778
2	1	3	2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,002	00.25	00.25
2	1	3	3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui	0,18	0.10%	0.10%

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
				kendaraan roda 4			
2	1	3	4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	35,65	42.28%	44.61%
2	1	3	5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	3,88	5.69%	6.29%
2	1	3	6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,04	2.00%	2.00%
2	1	3	7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	91,8	100.00%	100.00%
2	1	3	8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	37,48	45.13%	45.13%
2	1	3	9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	79,98	89.84%	94.91%
2	1	3	10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	73,12	48.44%	50.81%
2	1	3	11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	73,47	69.70%	70.00%
2	1	3	12	Rasio Jaringan Irigasi	8,219	14.22	15.18
2	1	3	13	Persentase penduduk berakses air minum	91,17	100.00%	100.00%
2	1	3	14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	0,91	100.00%	100.00%
2	1	3	15	Persentase areal kawasan kumuh	0,23	3.02%	3.02%
2	1	3	16	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	N/A	80.00%	90.00%
2	1	3	17	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	N/A	2,325.00	2,330.00
2	1	3	18	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	N/A	0.49	0.51
2	1	3	19	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,51	00.49	00.49
2	1	3	20	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	120,27	116.28%	116.28%
2	1	3	21	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	N/A	0,119	0,126
2	1	3	22	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	N/A	0,158	0,158
2	1	3	23	Ketaatan terhadap RTRW	99,92	0,057	0,057
2	**1**	**4**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**			
2	1	4	1	Rasio rumah layak huni	0,18	0,28	0,3
2	1	4	2	Rasio permukiman layak huni	0,254	0,06875	1
2	1	4	3		0,95		
2	1	4	4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0,96	94,75%	94,78%
2	1	4	5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	32,75	28,71%	31,96%
2	1	4	6	Persentase pemukiman yang	60,27	59.90%	59.90%

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
				tertata			
2	1	4	7	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,47	0.43%	0.43%
2	1	4	8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17,77	7,59%	8,37%
2	1	4	9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	3,43	1,22%	1,21%
2	1	4	10	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0,17	8,24%	8,25%
2	**1**	**5**		**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
2	1	5	1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	91,24	100.00%	100.00%
2	1	5	2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	95%	96%
2	1	5	3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	42,28	42,28%	42,28%
2	1	5	4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	82,4	100.00%	100.00%
2	1	5	5	Persentase Penegakan PERDA	100	100.00%	100.00%
2	**1**	**6**		**Sosial**			
2	1	6	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	8,11	45,85	45,85
2	1	6	2	Persentase PMKS yang tertangani	8,11	32,50%	00.33
2	1	6	3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	75%	75%
2	1	6	4	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya	0	100.00%	100.00%
2	1	6	5	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	8%	8%
2	1	6	6	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	38,66	76.27%	76.27%
2	1	6	7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	38,66	8%	8%
2	**2**			**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**			
2	**2**	**1**		**Tenaga Kerja**			
2	2	1	1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	9,12	28,35	28,4
2	2	1	2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100.00%	100.00%
2	2	1	3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	10,37		

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
2	2	1	4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	22,65	69.95%	69.98%
2	2	1	5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	100.00%	100.00%
2	2	1	6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100	100%	100%
2	2	1	7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100	100%	100%
2	2	1	8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	N/A	70%	71%
2	2	1	9	Rasio lulusan S1/S2/S3	N/A	14.48	14.05
2	**2**	**2**		**Komunikasi dan Informatika**			
2	2	2	1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	357,14%	100.00%	100.00%
2	2	2	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,78	0,79	0,8
2	2	2	3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	92,20%	100.00%	100.00%
2	2	2	4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,384	0,481	0,484
2	2	2	5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,478	0,413	0,513
2	**2**	**3**		**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**			
2	2	3	1	Persentase koperasi aktif	64,75%	74.90%	80.41%
2	2	3	2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	30,00%	100.00%	100.00%
2	2	3	3	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100.00%	100.00%
2	2	3	4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	2,81%	100.00%	100.00%
2	**2**	**4**		**Penanaman Modal**			
2	2	4	1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	6305	4	48
2	2	4	2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	2.092.368.212.287	2.553.505.040	2.681.180.290
2	2	4	3	Rasio daya serap tenaga kerja	2,47	312	327
2	2	4	4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1575,40%	4,8	5
2	**2**	**5**		**Kepemudaan dan Olah Raga**			
2	2	5	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	N/A	55%	60%
2	2	5	2	Persentase wirausaha muda	N/A	23%	25%
2	2	5	3	Cakupan pembinaan olahraga	100%	100.00%	100.00%
2	2	5	4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	100%	53%	55%
2	2	5	5	Cakupan pembinaan atlet muda	100%	26%	30%
2	2	5	6	Jumlah prestasi olahraga	N/A	18 cabor	19 cabor
2	**2**	**6**		**Statistik**			
2	2	6	1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada
2	2	6	2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada
2	2	6	3	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
2	**2**	**7**		**Persandian**			25.00%
2	2	7	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	**2**	**8**		**Kebudayaan**			
2	2	8	1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	10	11
2	2	8	2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	35	40
2	2	8	3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4	6	7
2	2	8	4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	24	32	36
2	**2**	**9**		**Perpustakaan**			
2	2	9	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	N/A	4268	4662
2	2	9	2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	N/A	374,54	465,6
2	2	9	3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	N/A	0.028	0.029
2	2	9	4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	N/A	6138	6532
2	2	9	5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	N/A	374,54	465,6
2	**2**	**10**		**Kearsipan**			
2	2	10	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	N/A	24.75%	24.87%
2	2	10	2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	N/A	60	65
2	**2**	**11**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
2	2	11	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	82,59	20	22.05
2	2	11	2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	100%	20.00%	21.00%
2	2	11	3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	16,46%	82.09.00	83
2	2	11	4	Rasio KDRT	N/A	12	10
2	2	11	5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	4.50	3.50
2	2	11	6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0,00%	25.00	25.50
2	2	11	7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	87%	100%
2	2	11	8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	200%	87%	100%
2	2	11	9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak	N/A	12%	15%

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
				korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.			
2	2	11	10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	150%	89%	90%
2	2	11	11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	0%	85	95
2	2	11	12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,02	0	0
2	2	11	13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,2	90	95
2	2	11	14	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0	87	90
2	2	11	15	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	0,00%	25%	25%
2	**2**	**12**		**Pangan**			
2	2	12	1	Ketersediaan pangan utama	112,28	100	100
2	2	12	2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	9,052	8.138	08.16
					190,49	161.97	162.33
2	2	12	3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%	86.30%	87.00%
2	**2**	**13**		**Pertanahan**			
2	2	13	1	Persentase luas lahan bersertifikat	0,015	0.01%	0.01%
2	2	13	2	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	69.26%	72.89%
2	**2**	**14**		**Lingkungan Hidup**			
2	2	14	1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	2	14	2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	2	14	3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	1	1	1
2	2	14	4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	54,44	60,05	60,6
2	2	14	5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	89,06	94	94.05.00
2	2	14	6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	27,65	41.72	41.73
2	2	14	7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0,21	100.00%	100.00%
2	2	14	8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	2	14	9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
2	2	14	10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100%	100.00%	100.00%
2	2	14	11	Timbulan sampah yang ditangani	69,05%	93.36%	96.05%
2	2	14	12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	21,97%	20.00%	20.00%
2	2	14	13	Persentase cakupan area pelayanan	15,36	100.00%	100.00%
2	2	14	14	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	N/A	81	82
2	**2**	**15**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
2	2	15	1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	101	0,98	1
2	2	15	2	Rasio bayi berakte kelahiran	99	0,76	0,77
2	2	15	3	Rasio pasangan berakte nikah	166	0,35	0,5
2	2	15	4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada
2	2	15	5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah
2	2	15	6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	101	100.00%	100.00%
2	2	15	7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100	97.50%	100.00%
2	**2**	**16**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
2	2	16	1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	92,96%	100.00%	100.00%
2	2	16	2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	15.33	15.38
2	2	16	3	Persentase LSM aktif	0%	100%	100%
2	2	16	4	Persentase LPM Berprestasi	0%	100%	100%
2	2	16	5	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%
2	2	16	6	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%
2	2	16	7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0%	100%	100%
2	2	16	8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0%	100%	100%
2	**2**	**17**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
2	2	17	1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0	0,28	0,28
2	2	17	2	Total Fertility Rate (TFR)	1,7	2,19	2,1
2	2	17	3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	14,63%	100.00%	100.00%
2	2	17	4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	17,07%	14,50%	15,00%

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
2	2	17	5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0	9	10
2	2	17	6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	7	10
2	2	17	7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0	2	2
2	2	17	8	Ratio Akseptor KB	67,72%	84,35%	85,00%
2	2	17	9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	67,72%	72.50%	75,00%
2	2	17	10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,00%	20%	18%
2	2	17	11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	54,75%	1,05%	1,00%
2	2	17	12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	11,45%	13,58%	12,95%
2	2	17	13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7,79%	24,00%	25,14%
2	2	17	14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	18,08%	10,25%	10,00%
2	2	17	15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	44,31%	77,25%	77,50%
2	2	17	16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	3,27%	74,50%	75,00%
2	2	17	17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	9,34%	67,75%	70,00%
2	2	17	18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	14,29%	33,00%	35,00%
2	2	17	19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	492,86%	100.00%	100.00%
2	2	17	20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	0%	100.00%	100.00%
2	2	17	21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	27,23%	86,15%	87,00%
2	2	17	22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100.00%	100.00%
2	2	17	23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat	0%	513.32%	604.41%

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
				kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat			
2	2	17	24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100.00%	100.00%
2	2	17	25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100.00%	100.00%
2	2	17	26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100,00%	100.00%	100.00%
2	2	17	27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak	0,00%	55,57%	57,57%
2	2	17	28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	0,00%	22,1	22,1
2	2	17	29	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,00%	2,50%	3,00%
2	**2**	**18**		**Perhubungan**			
2	2	17	1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	672.980	1.685.200.00	1.710.000.00
2	2	17	2	Rasio ijin trayek	0,00026	0.01599	0.01704
2	2	17	3	Jumlah uji kir angkutan umum	3.713	46.05.00	48
2	2	17	4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal	3	5	5
2	2	17	5	Persentase layanan angkutan darat	0,049	0.36%	0.04%
2	2	17	6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	5,47	5,50%	5,40%
2	2	17	7	Pemasangan Rambu-rambu	8,95%	90.00%	95.00%
2	2	17	8	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0	0,0067	0,0069
2	2	17	9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	230.691	1,095,440	1,105,500
2	2	17	10	Jumlah orang/barang melalui dermaga dan terminal per tahun	144.796	4177	421.536
2	**3**			**Layanan Urusan Pilihan**			
2	**3**	1		**Pariwisata**			
2	3	1	1	Kunjungan wisata	992%	95.12%	100.00%
2	3	1	2	Lama kunjungan Wisata	0.6 Hari	1 Hari	8 Hari
2	3	1	3	PAD sektor pariwisata	0,02%	0.09%	0.10%
2	**3**	**2**		**Pertanian**			
2	3	2	1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	33.68%	62.56%	83.08%
2	3	2	2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	68.32.00	72.05%	73.39%
2	3	2	3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	19.03%	97.48%	97.49
2	3	2	4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100%	100.00%	100.00%

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
2	3	2	5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	05.16	07.08	07.24
2	3	2	6	Cakupan bina kelompok petani	97.28.00	68.95%	77.84%
2	**3**	**3**		**Energi dan Sumber Daya Mineral**			
2	3	3	1	Jumlah Sumur Gas	7		
2	3	3	2	Jumlah Produksi Gas Tiap Sumur	N/A		
2	**3**	**4**		**Perdagangan**			
2	3	4	1	Ekspor Bersih Perdagangan	-280.221,23	145721.72	145721.72
2	3	4	2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	52,09%	71.49%	79.80%
2	**3**	**5**		**Perindustrian**			
2	3	5	1	Cakupan bina kelompok pengrajin	27.04%	37.80%	
2	3	5	2	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	4.15%	151.47%	44.76%
2	**3**	**6**		**Kelautan dan Perikanan**			
2	3	6	1	Produksi perikanan	01.03	0,88	0,89
2	3	6	2	Konsumsi ikan	01.10	0,92	0,93
2	3	6	3	Cakupan bina kelompok nelayan	0.14%	0,05	0,05
2	3	6	4	Produksi perikanan kelompok nelayan	0,056	0,68	0,69
2	3	6	5	Nilai tukar nelayan	111.49.00		
2	**4**			**Penunjang Urusan**			
2	**4**	**1**		**Perencanaan Pembangunan**			
2	4	1	1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada
2	4	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada
2	4	1	3	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada
2	4	1	4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada
2	4	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90,83	77	78
2	4	1	6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90,83	78	79
2	4	1	7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	N/A	90	92
2	**4**	**2**		**Keuangan**			
2	4	2	3	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
2	4	2	4	Persentase SILPA	1,66%	0,16	0,16
2	4	2	5	Persentase SILPA terhadap APBD	1,66%	0,16	0,16
2	4	2	6	Persentase belanja pendidikan (20%)	20,62%	20.44%	21.20%
				Persentase belanja kesehatan (10%)	14,40%	15.73%	16.28%
2	4	2	7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung :	45,01%	36,40%	36,58%
2	4	2	8		58,06%	62,78%	63,70%

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
				Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,31%	0,38%	0,36%
				Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	**4**	**3**		**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**			
2	4	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1,09	07.21	0,347916667
2	4	3	2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	13,28%	21.03%	24.85%
2	4	3	3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	22,29%	19.77%	23.65%
2	4	3	4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	31	71	78
2	4	3	5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1,693	9,294	10,934
2	4	3	6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3,412	4,102	4,171
2	**4**	**4**		**Penelitian dan pengembangan**			
2	4	4	1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	N/A	100%	100%
2	4	4	2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100%	100%	100%
2	4	4	3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	N/A	100%	100%
2	4	4	4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	N/A	100%	100%
2	**4**	**5**		**Pengawasan**			
2	4	5	1	Persentase tindak lanjut temuan	56,00%	88,90%	90,10%
2	4	5	2	Persentase pelanggaran pegawai	-135,00%	0,09%	0,09%
2	4	5	3	Jumlah temuan BPK	93%	39	37
2	**4**	**6**		**Sekretariat Dewan**			
2	4	6	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	N/A	Ada	Ada
2	4	6	2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakanFungsi Pengawasan,Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	N/A	Ada	Ada
2	4	6	3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	N/A	Ada	Ada
3				**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
3	1			Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapota	N/A	10.193,57	

No				Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	2023	Target 2024	Target 2025
3	2			Pengeluaran Perkapita	N/A	11.681	
3	3			Nilai tukar petani	113,28	104.75	105.00.00
3	4			Produktivitas total daerah	N/A	2,562,662,109.18	2,603,962,526.72
3	5			Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	0	6.056.335	64.084.473
3	6			Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	-0,01	0.03829002	0.043893495
3	7			Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	N/A	01.36	01.43
3	8			Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	N/A	04.43	0,226388889
3	9			Rasio ketergantungan	45,99	47.12.00	47.43.00

6.4 Indikator Standar Pelaynan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 4
Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Wajo Tahun 2025

No.	Indikator SPM	Capaian 2023	Asumsi Capaian 2024	Target 2025	OPD
	Pendidikan				
1	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95.33%	100%	100%	DISDIKBUD
2	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	30.47%	100%	100%	DISDIKBUD
3	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	98.76%	100%	100%	DISDIKBUD
	Kesehatan				
4	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.00%	100%	100%	DINKES
5	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.39%	100%	100%	DINKES
6	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.89%	100%	100%	DINKES
7	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan	98.91%	100%	100%	DINKES

No.	Indikator SPM	Capaian 2023	Asumsi Capaian 2024	Target 2025	OPD
	kesehatan				
8	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.85	100%	100%	DINKES
9	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96.46%	100%	100%	DINKES
10	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	98.21%	100%	100%	DINKES
11	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	98.20%	100%	100%	DINKES
12	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.92%	100%	100%	DINKES
13	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.92%	100%	100%	DINKES
14	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.92%	100%	100%	DINKES
15	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.90%	100%	100%	DINKES
		Pekerjaan Umum			
16	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	100%	100%	PUPR
17	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	PUPR
		Perumahan Rakyat			
18	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	DISPERKIM
19	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	DISPERKIM
		Trantibumlinmas			
20	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	99,93%	100%	100%	SATPOL PP & DAMKAR
21	Jumlah warga negara yang	100%	100%	100%	BPBD

No.	Indikator SPM	Capaian 2023	Asumsi Capaian 2024	Target 2025	OPD
	memperoleh layanan informasi rawan bencana				
22	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	91,64%	100%	100%	BPBD
23	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	BPBD
	Sosial				
24	Jumalh warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	DINSOSP2KBP3A
25	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	DINSOSP2KBP3A
26	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	DINSOSP2KBP3A
27	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	DINSOSP2KBP3A
28	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	97,24%	100%	100%	DINSOSP2KBP3A

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistanable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di tabel 6.5 mengenai penetapan indikator TPB/SDGs Kabupaten Wajo Tahun 2024:

Tabel 6. 5
Penetapan Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Wajo Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
Tujuan 1 :	**Mengakhiri Kemiskinan dalam Bentuk Apapun**								
Target 1.2 :	**Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.**								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DINSOSP2K BP3A	%	21,6	21,73	21,6	21,6	21,6	
Target 1.3 :	**Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.**								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINKES	Jiwa	324.204	321.934	296.074	331.337	331.337	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKERTRANS	Orang	6621	6.549	6.621	6.656	6.670	
Target 1.5 :	**Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.**								
1.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang						

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
	Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.	BPBD	Orang	0	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana	BPBD	Orang	0	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah korban terdampak (luka dan pengungsi) adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.	BPBD	Orang	2	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah korban terdampak0 (luka dan pengungsi) adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.	BPBD	Orang	70	DM	DM	DM	DM	
1.5.2 *	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	BPBD	Rupiah	NA	DM	DM	DM	DM	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
1.5.4 *	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	BPBD	Dokumen	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
Target 1.a :	**Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.**								
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPELITBANGDA	%	100	100	100	100	100	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPELITBANGDA							
	Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan	BPKPD	%	20,74	20	20	20	20	
	Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan	BPKPD	%	14,48	10	10	10	10	
	Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial	BPKPD	%	6,47	6	6	7	8	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Tujuan 2 :	**Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan**								
Target 2.1 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.**								
2.1.2 *	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	DPKP	%	7,00	6,8	7,00	7,20	7,20	
Target 2.2 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.**								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES	%	3,17	5,5	5,2	4,6	4,6	
2.2.2 *	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINKES	%	6,72	3	2,7	2,4	2,1	
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	DPKP	%	94,00	93,10	94,00	95,00	97,50	
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	DINKES	%	1,98	3,9	3,9	3,6	3,3	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Target 2.3 :	**Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.**								
2.3.2*	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	BPS	Rupiah	78.976.457,37	###########	DM	DM	DM	
Target 2.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.**								
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DPKP	%	99,23	0	99,23	99,23	99,23	
Tujuan 3 :	**Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia**								
Target 3.1. :	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.**								
3.1.1*	Angka kematian ibu (AKI).	DINKES	kasus	1	4	4	3	3	
3.1.2 *	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	DINKES							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
	Proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	DINKES	%	101,06	89	91	93	95	
	Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINKES	%	101,05	89	91	93	95	
Target 3.2. :	**Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.**								
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.								
	Angka Kematian Balita (AKBa)	DINKES	Kasus	22	28	26	24	22	
	Angka Kematian Bayi (AKB)	DINKES	Kasus	20	27	25	23	23	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kasus	16	20	20	19	19	
Target 3.3 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.**								
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	DINKES	Kasus	19	20	19	17	16	
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	Kasus	76,61	331	325	219	312	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	DINKES	Per Mil	0,08	<1	<1	<1	<1	
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	DINKES	%	0	0	0	0	0	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.								
	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis	DINKES	%	0	0	0	0	0	
	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	DINKES	%	1	40	40	40	40	
Target 3.4 :	**Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.**								
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	DINKES	%	3,60	<8,7	<8,7	<8,7	<8,7	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES	%	1	<3,41	<3,41	<3,41	<3,41	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINKES	%	9,42	<21,8	<21,8	<21,8	<21,8	
Target 3.5 :	**Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.**								
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	DINKES	Kasus	30	25	30	36	43	
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	DINKES	Kasus	0,06	8	9	11	13	
Target 3.7 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.**								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana	DINSOSP2K BP3A	%	71,50	70,15	71,50	72,50	75	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
	terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.								
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DINKES	%	5,12	2,24	2,21	2,19	2,1	
Target 3.8 :	**Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.**								
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINKES	%	97,79	79,74	75,44	84,43	84,43	
Target 3.a :	**Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.**								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINKES	%	NA	<30	<30	<30	<30	
Target 3.b :	**Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.**								
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	DINKES	%	100	92,21	95	95	95	
Target 3.c :	**Meningkatkan secara signi kan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.**								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES	%	2,26	90	100	100	100	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Tujuan 4 :	**Mengakhiri Kemiskinan dalam Bentuk Apapun**								
Target 4.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.**								
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.								
	Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/sederajat,	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
	Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/sederajat	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
4.1.2(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	DISDIKBUD							
Target 4.5 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.**								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki- laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
	terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.								
	Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki-laki	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
	Rasio APK antara Perempuan dan laki- laki	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
Target 4.6 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.**								
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	IKK	%	100	100	100	100	100	
Target 4.a :	**Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.**								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).								
	Jumlah sekolah dasar (SD/MI/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
	Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
Target 4.c :	**Pada tahun 2030, secara signi kan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.**								
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kuali kasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan								
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kuali kasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki serti kat pendidik.	DISDIKBUD	%	100	100	100	100	100	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Tujuan 5 :	**Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**								
Target 5.2 :	**Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.**								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOSP2K BP3A							
	Cara Perhitungan Kekerasan Seksual: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	DINSOSP2K BP3A	%	NA					
	Cara Perhitungan Kekerasan Fisik dan/atau Seksual: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah	DINSOSP2K BP3A	%	NA					

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
	penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).								
	Cara Perhitungan Kekerasan Emosional: Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%)	DINSOSP2K BP3A	%	NA					
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOSP2K BP3A	%	30	44	30	25	20	
Target 5.3 :	**Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.**								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a)	DINSOSP2K BP3A							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
	sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun.								
	Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%)	DINSOSP2K BP3A	%	NA					
	Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%)	DINSOSP2K BP3A	%	NA					
Target 5.5 :	**Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.**								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b pemerintah daerah.	SETWAN	%		10	10	10	10	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
	Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) dibagi dengan jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) dinyatakan dalam satuan persen (%)	BKPSDM	Orang	4	4	4	DM	DM	
	Perempuan yang menduduki posisi manager di perusahaan miliki publik atau swasta sebagai pekerjaannya dibagi dengan jumlah seluruh jabatan manager dinyatakan dalam satuan persen (%).	DINSOSP2K BP3A							
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI									
Tujuan 7 :	**Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua**								
Target 7.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern**								
7.1.1	Rasio elektrifikasi.	Perkim	%	96,00%	94,00%	96,00%	98,00%	99,00%	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Perkim	KWH/ Kapita	320,0	310,0	320,0	330,0	340,0	
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Bappelitbang da Kab. Wajo	Rumah Tangga	4600	6750	4600	DM	DM	
7.1.2. (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Bappelitbang da Kab. Wajo	Persen	0,1835	0,1353	0,1835	DM	DM	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Tujuan 8 :	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua**								
Target 8.1 :	**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.**								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	Persen		12,78	DM	DM	DM	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	P-RPJMD	Juta Rupiah	49,59	58,83	49,59	49,62	49,68	
Target 8.2 :	**Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.**								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	DISNAKERTRANS	%	NA	DM	DM	DM	DM	
Target 8.3 :	**Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.**								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin.	DISNAKERTRANS	%	NA	DM	DM	DM	DM	
Target 8.5 :	**Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.**								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja.	DISNAKERTRANS	Rp/Jam	17,395	17,395	17,395	20,000	20,000	
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DISNAKERTRANS	%	4,33	4,33	4,33	4,00	3,98	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
kelamin dan kelompok umur.									
8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.	Tingkat setengah pengangguran.	DISNAKERTRANS	%	4,33	4,33	4,33	4,00	3,98	
Target 8.6 :	**Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.**								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DISNAKERTRANS	%	50	40	50	50	50	
Target 8.8 :	**Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.**								
8.8.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DISNAKERTRANS	Perusahaan	NA	DM	DM	DM	DM	
Target 8.9 :	**Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.**								
8.9.1*	Proporsi dan laju kontribusi pariwisata terhadap PDB.	BPS	%	1,1	1,0	1,1	1,2	1,3	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Disporapar	Orang	500	0	500	550	600	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Disporapar	Orang	30	29,222	30	32	35	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	BPS	USD	55000	0	55000	60500	66000	
Target 8.10 :	**Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.**								
8.10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa								
Tujuan 9 :	**Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelnjutan, serta mendorong inovasi**								
Target 9.1 :	**Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.**								
9.1.2 *	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	DISHUB	Org/Kg	102.934 Orang, 71.692.000 Kg	76.840 Orang, 68.278.000 Kg	102.934 Orang, 71.692.000 Kg	106.848 Orang, 75.277.000 Kg	112.574 Orang, 79.041.000 Kg	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DISHUB	Unit	1	1	1	1	1	
Target 9.2 :	**Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.**								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	DISPERINDAGKOP	%	3,05	3,03	3,05	3,06	3,06	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	DISPERINDAGKOP	%	4,98	4,97	4,98	5,00	5,00	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DISPERINDAGKOP	Orang	40.000	39.469	40.000	40.500	40.500	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Target 9.3 :	**Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.**								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DISPERINDAGKOP	Juta Rupiah	11.200,00	11.133,05	11.200,00	11.300,00	11.400,00	
Tujuan 10 :	**Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara**								
Target 10.1 :	**Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.**								
10.1.1*	Rasio Gini.	BPS	Poin	0,348	0,35	0,348	0,34	0,336	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DINSOSP2K BP3A	%	21,6	21,73	21,6	21,6	21,6	
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa	0	3	0	0	0	
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas PMD	Desa	6	2	6	10	15	
Target 10.2 :	**Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.**								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.								
Target 10.3 :	**Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.**								
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	DINSOSP2K BP3A	Orang	30	34	30	25	23	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	DINSOSP2K BP3A	Orang	20	25	20	17	15	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi	DINSOSP2K BP3A	Dokumen	NA	NA	DM	DM	DM	
Target 10.4 :	**Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.**								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKERTRANS	%	100	100	100	100	100	
Tujuan 17 :	**Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan**								
Target 17.1 :	**Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.**								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKPD	%	0,75	0,73	0,75	0,75	0,75	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKPD	%	0,2	0,19	0,2	0,2	0,2	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKPD	%	12	11,74	12	12	12	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Target 17.6 :	**Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.**								
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	KOMINFOTIK	%	NA	NA	NA	NA	NA	
Target 17.8 :	**Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.**								
17.8.1*	Persentase pengguna internet	BPS	Persen	53,52	53,52	53,52	53,52	53,52	
Target 17.17 :	**Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.**								
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	PMPTSP	dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	PMPTSP	Rupiah	NA	NA	NA	NA	NA	
Target 17.19 :	**Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.**								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	CAPIL	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN									
Tujuan 6 :	**Air Bersih dan Sanitasi Layak**								
Target 6.1 :	**Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua**								
6.1.1 *	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	PUPRP	%	88,98	88,53	88,98	89,47	90,03	
Target 6.2 :	**Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.**								
6.2.1 *	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	PUPRP	%	90,54	90,12	90,54	90,98	91,34	
	Untuk akses terhadap fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	DINKES	%	74	67	74	81	88	
	Untuk akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama)	PUPRP	%	90,54	90,12	90,54	90,98	91,34	
	Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	DINKES	%	0	0	0	0	0	
	Untuk akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	PUPRP	%	97,86	97,86	97,86	97,86	97,86	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
	Untuk akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	PUPRP	%	0,015	0	0,015	0,017	0,02	
Target 6.3 :	**Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.**								
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	DLH	%	100	100	100	100	100	
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	DLH	Indeks	52,70	52,60	52,70	52,80	52,90	
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	DLH		NA	DM	DM	DM	DM	
Target 6.4 :	**Pada tahun 2030, secara signi kan meningkatkan e siensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signi kan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air**								
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	**PUPRP**	Persen	90	89	90	92	94	
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	**PUPRP**	Persen	62	60	62	65	67	
Tujuan 11 :	**Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan**								
Target 11.1 :	**Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.**								
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Perkim	%	94,72%	94,68%	94,72%	94,75%	94,78%	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Target 11.2 :	**Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua.**								
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	DISHUB							
Target 11.4 :	**Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia**								
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP) .	DISDIK/CAPIL	Rp	NA	DM	DM	DM	DM	
Target 11.5 :	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.**								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD							
	Jumlah korban meninggal	BPBD	Orang	0	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah korban hilang	BPBD	Orang	0	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah Korban Terluka	BPBD	Orang	2	DM	DM	DM	DM	
	Jumlah Korban Mengungsi	BPBD	Orang	70	DM	DM	DM	DM	
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	BPBD	%	NA	DM	DM	DM	DM	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Target 11.6 :	**Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.**								
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	DLH	%	94,17	90,15	94,17	96,12	98,10	
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLH	Indeks	52,70	52,60	52,70	52,80	52,90	
Target 11.7 :	**Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas**								
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	DLH	%	20,05	20,04	20,05	20,06	20,07	
Target 11.b. :	**Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, e siensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030**								
Target 11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
Target 11.c :	**Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.**								
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	PUPRP	ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA	ADA	ADA	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Tujuan 12 :	**Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab**								
Target 12.5 :	**Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.**								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Ton/Thn	255,14	240,17	255,14	264,99	264,99	
Target 12.6 :	**Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.**								
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DISNAKERTRANS	Perusahaan	NA	DM	DM	DM	DM	
Target 12.7 :	**Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.**								
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	DLH	Unit						
Target 12.8 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.**								
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	DM	NA	DM	DM	DM	DM	
Target 12.b. :	**Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal**								
Target 12.b.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
Tujuan 13 :	**Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya**								
Target 13.3 :	**Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.**								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	DISDIKBUD	Satuan Pendidikan						
PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA									
Tujuan 16 :	**perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh**								
Target 16.1 :	**Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.**								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POL-PP							
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POL-PP							
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POL-PP							
Target 16.3 :	**Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.**								
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	POL-PP							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	BAG. HUKUM							
	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi.	BAG. HUKUM							
	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum nonlitigasi.	BAG. HUKUM							
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	BAG. HUKUM							
	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum	BAG. HUKUM							
	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan	BAG. HUKUM							
	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara.	BAG. HUKUM							
Target 16.5 :	**Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.**								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	ITDA							
Target :	**Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
16.6									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKPD	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	BPKPD	%	100	100	100	100	100	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	ITDA							
16.6.1.(c)	Persentaseinstansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	ITDA							
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	ITDA							
Target 16.7 :	**Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.**								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	%		10	10	10	10	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	%		4	4	DM	DM	
Target :	**Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.**								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Pencapaian (6)				KET
					2021	2022	2023	2024	
16.9									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	CAPIL	%	99,60	100	100	100	100	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	CAPIL	%	99,84	100	100	100	100	
Target 16.10 :	**Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.**								
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	DINSOSP2K BP3A	Orang	30	34	30	25	23	
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	DINSOSP2K BP3A	Orang	20	25	20	17	15	
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifi asi Informatif.	KOMISI INFORMASI PUBLIK (KIP)	Badan Publik	83	83	83	83	83	

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja. Olehnya itu, maka penyampaian RKPD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan publik baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan maupun forum konsultasi publik.

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sekaligus menjadi pedoman dalam menyusun renja PD Tahun 2025. RKPD Kabupaten Wajo memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo pada tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan

penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;

3. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kabupaten Wajo dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Dokumen RKPD Kabupaten Wajo berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah, Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan

kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan transparasi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam

memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2025 dengan sebaik baiknya. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
3. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 penyusunannya dilakukan secara artisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2025.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijkan pembangunan yang dimuat

dalam RPD Kabupaten Wajo untuk Tahun 2024, sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.